Solid Performance
Towards Business Sustainability

Kinerja Solid Menuju Keberlanjutan Usaha



Laporan Tahunan **2023** Annual Report

KAMUS ISTILAH
Glossary

Entitas

ABM	= PT ABM Investama Tbk
TMT	= PT Tiara Marga Trakindo
Valle	= Valle Verde Pte. Ltd.
Reswara	= PT Reswara Minergi Hartama
CK	= PT Cipta Kridatama
CKB Logistics	= PT Cipta Krida Bahari
SSB	= PT Sanggar Sarana Baja
AJN	= PT Anzara Janitra Nusantara
PWP	= PT Prima Wiguna Parama
TIA	= PT Tunas Inti Abadi
RJR	= PT Radhika Jananta Raya
MIFA	= PT Mifa Bersaudara
BEL	= PT Bara Energi Lestari
ANN	= PT Agata Nugraha Nastari
ND	= PT Nagata Dinamika
NBE	= PT Nagata Bio Energi
NDHBU	= PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu Ulu
NDHP	= PT Nagata Dinamika Hidro Pongko
PNDH	= PT Punggawa Niagata Dinamika Hidro
NBD	= PT Nagata Biogas Dwienergi
ACE	= PT Andara Candria Energi
ATR	= PT Alfa Trans Raya
BDD	= PT Baruna Dirga Dharma
DDE	= PT Dianta Daya Embara
PBR	= PT Pelabuhan Buana Reja
MDB	= PT Media Djaya Bersama
SSD	= PT SSB Sammitr Distribution
GEMS	= PT Golden Energy Mines Tbk
Sewatama	= PT Sumberdaya Sewatama
MHU	= PT Multi Harapan Utama
Pradipa	= PT Pradipa Aryasatya

Istilah

MVC	= Mining Value Chain
ESG	= Environmental, Social, & Governance
LST	= Lingkungan, Sosial, & Tatakelola
IPP	= Independent Power Producer
PLTBg	= Pembangkit Listrik Tenaga Biogas
PUGKI	= Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia
GRC	= Governance, Risk, and Compliance
SDGs	= Sustainability Development Goals
TPB	= Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
ACGS	= Asean Corporate Governance Scorecard

Satuan

Rp	= Rupiah
AS$ / USD	= Dolar AS
bcm	= bank cubic meters
DWT	= Dead Weight Tonnes
hp	= horse power
TEUS	= Twenty-foot Equivalent Unit
kkal	= kilo kalori
adb	= air dribe base

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN SERTA SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Information Presented in The Annual Report as Well as Disclaimer and Limitation of Liability

Penyusunan Laporan Tahunan PT ABM Investama Tbk, disebut juga "ABM" atau "Perusahaan" tahun 2023 menggunakan standar yang berlaku di Indonesia, dengan parameter mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

The preparation of PT ABM Investama Tbk's Annual Report 2023 adheres to standards applicable in Indonesia, referencing Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 regarding Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. ABM tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

This Annual Report encompasses various statements concerning the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are categorized as forward-looking statements according to prevailing laws. These statements entail risks and uncertainties, with the potential for variance from actual developments. The prospective statements herein are formulated based on assumptions regarding current conditions and future projections related to the Company's business environment. ABM cannot guarantee specific outcomes from documents whose validity has been confirmed.

Selain itu, kata "Kami" juga digunakan pada beberapa kesempatan dengan fungsi yang sama, atas pertimbangan kemudahan penyebutan PT ABM Investama Tbk.

In addition, the term "We" is used on several occasions for the sake of convenience, referring to PT ABM Investama Tbk.

Untuk dapat meraih pembaca yang lebih beragam dan sesuai ketentuan yang berlaku, laporan ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di situs web resmi Perusahaan dengan alamat www.abm-investama.com.

To cater to a broader audience and comply with applicable regulations, this report is presented in two languages: Indonesian and English. The Annual Report is accessible for viewing and downloading on the Company's official website at www.abm-investama.com.

TEMA SAMPUL DAN KESINAMBUNGAN TEMA

Cover Theme and Theme Continuity



Solid Performance **Towards Business Sustainability**

Kinerja Solid Menuju Keberlanjutan Usaha

Manajemen strategi berperan penting dalam menjaga arah pengembangan bisnis ke depannya. Melalui berbagai pertimbangan yang matang, keputusan diambil untuk dapat menjaga kelangsungan usaha. Atas dasar filosofi tersebut, ABM berupaya memperkuat berbagai kompetensi yang dimiliki untuk merespon peluang yang ada dalam rangka menjaga kelangsungan usaha. Hal ini terlihat dari bisnis jasa kontraktor pertambangan yang tumbuh dengan cukup baik di tengah perdagangan komoditas batu bara yang begitu dinamis. Tak hanya itu, pengelolaan permodalan juga menjadi perhatian ABM sejalan dengan perkembangan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan berbagai fokus tersebut, terbukti ABM mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk menjaga keberlanjutan usahanya.

Strategic management plays an important role in maintaining the direction of future business development. Through meticulous deliberation, decisions are made to ensure the continuity of operations. Guided by this principle, ABM is dedicated to enhancing its diverse competencies to effectively seize existing opportunities and sustain business continuity. A prime example of this commitment is evident in the robust growth of its mining contractor services business amid the dynamic coal commodity trade landscape. Furthermore, ABM prioritizes capital management to align with the principles of healthy and sustainable business expansion. Through these strategic focuses, ABM demonstrates its capability to capitalize on prevailing opportunities, thereby fortifying the longevity of its operations.



LANGKAH STRATEGIS MENUJU KEBERLANJUTAN
STRATEGIC MOVE TOWARDS SUSTAINABILITY

Tahun 2022 merupakan tahun luar biasa bagi ABM yang berhasil membukukan berbagai pencapaian membanggakan sepanjang tahun. Hal ini tidak lepas dari upaya ABM memanfaatkan momentum pertumbuhan sebaik-baiknya melalui langkah-langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan, mulai dari optimalisasi sinergi di Grup ABM, peningkatan volume dan kinerja operasional, serta melakukan *cost review* yang berkelanjutan, hingga menambah cadangan batu bara.

Berbagai inisiatif strategis tersebut sejalan dengan *roadmap* jangka panjang yang telah dicanangkannya, dengan fokus utama adalah pada keseimbangan antara aspek sosial *(people)*, aspek lingkungan *(planet)*, dan juga aspek finansial *(profit)* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan menjalan ketiga faktor utama dari suatu Keberlanjutan (*the Triple Bottom Line*), ABM berkomitmen untuk menjalankan inisiatif-inisiatif yang menunjang aspek *Environmental, Social & Governance* (ESG), yang menjadi bagian dari indikator performa utama (*Key Performance Indicator*/KPI) bagi setiap insan di Grup ABM. Hal ini sejalan dengan visi ABM 2025 yakni untuk meraih stabilitas finansial (*achieve financial stability*), menjalankan sinergi yang optimum dengan seluruh perusahaan di Grup ABM (*drive groupwide synergy*) dan menjadi perusahaan dengan rantai nilai kegiatan energi/pertambangan yang terkemuka di Indonesia (*reputable mining value chain entity in Indonesia*).

2022 is an extraordinary year for ABM that succeeded to book an outstanding performance throughout the year. Such achievement reflected ABM's prowess to optimize the growth momentum through the implementation of strategic measures to boost the Company's performance, starting from the synergy optimization within ABM Group, increases in volume and operational performances, encouraging the continuous cost review to adding coal reserve.

We have aligned all of those measures with the corporate long-term roadmap with the main focus on balancing the people, planet, and profit aspects of running its business. By living the triple bottom line of sustainability, ABM is committed to implementing initiatives that support Environmental, Social & Governance (ESG), aspects, which are part of the key performance indicators (KPIs) for everyone in the ABM Group. This is in line with ABM's 2025 vision to achieve financial stability, drive groupwide synergy and become a reputable mining value chain entity in Indonesia.



MERAIH MOMENTUM MENUJU PERTUMBUHAN YANG LEBIH TINGGI
SEIZE THE MOMENTUM TOWARDS THE NEXT LEVEL OF GROWTH

Sepanjang tahun 2021, industri batu bara menunjukkan tren *bullish* di mana harga *coal* mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang menjadikannya komoditas dengan peningkatan harga tertinggi tahun ini. Selain itu, Pemerintah juga menambah kuota ekspor batu bara sebanyak 75 juta ton sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung industri batu bara dengan memanfaatkan harga terbaik melalui ekspor untuk dapat menambah devisa negara.

In 2021, with the soaring coal price, the coal industry was bullish if compared to the previous year's trend, thus resulting the commodity experienced its highest price hike this year. In the meantime, the Government's decision to add coal export quota by 75 million tons in order to boost export performance of the coal industry and help them taking benefits from the high coal price, succeeded to increase the state income.

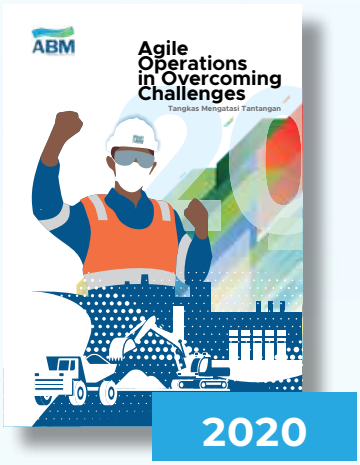

TANGKAS MENGATASI TANTANGAN
AGILE OPERATIONS IN OVERCOMING CHALLENGES

ABM telah berhasil mengatasi berbagai rintangan yang timbul akibat ketidakpastian di tengah pandemi selama 2020, dengan mengandalkan landasan kokoh yang selama ini telah dibangun dalam wujud etos kerja dan kompetensi sumber daya manusia, keluwesan organisasi, dan teknologi digital yang diadopsi. Di atas landasan ini, Perseroan terus menciptakan nilai yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di sepanjang rantai nilai pertambangan. Perseroan dapat melakukan ini karena telah bertransformasi menjadi organisasi yang tangkas, serta ramping di seluruh lini operasi. Upaya untuk menumbuhkan sinergi yang kuat antara seluruh Entitas Anak sekaligus untuk memanfaatkan seluruh sumber daya secara efisien telah membuahkan kinerja bisnis yang optimal. Seiring Perseroan memastikan keberlangsungan usaha untuk jangka panjang, Perseroan juga melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan. Bersama mereka, dan didukung semua pemangku kepentingan, Perseroan melangkah dengan berani untuk menyambut masa depan yang sarat dengan potensi menjanjikan.

ABM successfully weathered the tremendous headwinds of uncertainty brought about by the pandemic in 2020, thanks to the resilient foundation it has built over the years in its people's work ethic and competence, in its organizational versatility, and in its discerning adoption of digital technology. Armed with this foundation, the Company continued to deliver value to all stakeholders throughout its entire mining value chain. The Company has done so by undertaking an ongoing transformation to become an agile organization, which takes place throughout its operations. Fostering a fruitful synergy among its subsidiaries and ensuring an efficient use of resources has resulted in optimum performance. And as it secures its business for the long term, it also unreservedly protects its people's safety, health, and well- being. Together with its people, and with the support of all stakeholders, the Company is taking a bold move as it goes beyond its achievements to date, venturing further to reap greater successes in the future.

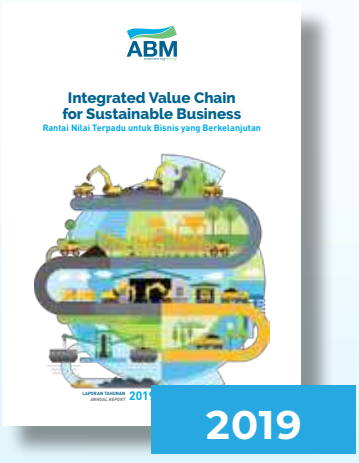

INTEGRATED VALUE CHAIN FOR SUSTAINABLE BUSINESS
Rantai Nilai Terpadu untuk Bisnis yang Berkelanjuta

Tantangan di industri batu bara mendorong peningkatan implementasi strategi *Mining Value Chain* (MVC) di ABM dengan Entitas Anak. Kegiatan usaha yang saling terintegrasi ini mendorong optimalisasi peran dari masing-masing Entitas di dalam Grup ABM sehingga kinerja operasional secara konsolidasi dapat terus meningkat. Strategi ini juga meningkatkan efisiensi biaya operasional sehingga Perseroan masih membukukan laba walaupun harga batu bara sempat terkoreksi. Strategi sekaligus komitmen bisnis jangka panjang tersebut ditujukan agar Perseroan tetap tumbuh berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi strategi juga disertai dengan komitmen tanggung jawab pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga Perseroan menjadi *partner of community* bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Challenges faced by the coal industry has driven the improvement of implementing Mining Value Chain (MVC) strategy in ABM and its Subsidiaries. Integrated business activities pushed the optimization of respective Subsidiary role in ABM Group, thus improving Group entire operational performance. This strategy has also enhanced operational cost efficiency, thus enabling the Company to continue to book profit despite the slumping coal prices. The aim of the strategy and long-term business commitment is to enable the Company to grow sustainably. The implementation of this strategy and a commitment to be responsible for the economic, social, and environmental will support the Company in becoming a partner of community to all its relevant stakeholders.

DAFTAR ISI
Table of Contents

PROLOG
Prologue

3	KAMUS ISTILAH Glossary
4	INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TAHUNAN SERTA SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB Information Presented in The Annual Report as Well as Disclaimer and Limitation of Liability
5	TEMA SAMPUL DAN KESINAMBUNGAN TEMA Cover Theme and Theme Continuity
8	DAFTAR ISI Table of Contents
10	SINERGI LINI BISNIS DALAM KELOMPOK USAHA ABM Synergy within ABM Group's Business Line
11	MENGEMBANGKAN FOKUS ESG Developing ESG Focus
12	KINERJA 2023 Performance in 2023

IKHTISAR KINERJA
Performance Highlights

16	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Significant Financial Highlights
20	IKHTISAR OPERASI Operational Highlights
22	IKHTISAR SAHAM Share Highlights
24	KILAS PERISTIWA 2023 2023 Highlights
26	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Awards and Certifications

LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

42	LAPORAN DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners Report
50	LAPORAN DIREKSI Board of Directors Report
58	TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN Annual Report Responsibility

PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

62	INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN General Information and Corporate Identity
64	RIWAYAT SINGKAT ABM ABM at a Glance
65	JEJAK LANGKAH Milestone
68	VISI, MISI, NILAI INTI, DAN SIKAP KEPEMIMPINAN Vision, Mission, Core Values, and Leadership Traits
72	KEGIATAN USAHA Business Activities
74	WILAYAH OPERASIONAL DAN JARINGAN USAHA Operational Area and Business Network
76	KEANGGOTAAN ASOSIASI Association Membership
78	STRUKTUR ORGANISASI Organizational Structure
80	PROFIL DEWAN KOMISARIS Profile of the Board of Commissioners
85	PROFIL DIREKSI Profiles of Board of Directors
89	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF Profile of the Executive Officers
92	DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources Demographics
98	KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM Chronology of Stock Listing
98	PEMEGANG SAHAM Shareholders
104	STRUKTUR GRUP Group Structure
106	DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/*JOINT VENTURE* List of Subsidiaries and Associate Entities/ Joint Venture
114	KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA Listing Chronology of Other Securities
114	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Capital Market Supporting Institutions and Professions
118	SITUS WEB PERUSAHAAN Company Website

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

122	TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI Economic and Industrial Overview
124	TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA Operational Review of Each Business Segment
144	TINJAUAN KINERJA KEUANGAN Financial Review
161	KEMAMPUAN PROFITABILITAS/ MENGHASILKAN KEUNTUNGAN Profitability/Profit Generating Ability
161	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG Ability to Pay Debts
163	TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG Collectability of Receivables
164	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN Capital Structure and Management Policy
166	IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL Material Commitments for the Capital Goods Investment
166	REALISASI INVESTASI BARANG MODAL Realization of Capital Goods Investment
167	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN Material Information and Facts Post Accounting Date

168	PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023 Target Accomplishments in 2023
169	PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024 Business Prospects and Company Performance Projections for 2024
172	PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA Taxation and Contribution to the State
172	KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAYARANNYA Dividend and Its Payment Policy
174	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Realization of the Use of Proceeds of Public Offering
174	INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL Material Information about Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring
175	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliates/Related Parties
184	INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events
184	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN Changes in Accounting Policy and the Impacts on the Company
185	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN Changes in Regulations and the Impacts on the Company's Performance
187	INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA Business Continuity Information
188	OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI Information Technology Optimization

TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance

194	DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI LINGKUP ABM Basic Reference for the Implementation of Corporate Governance in ABM
200	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM General Meeting of Shareholders
211	DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners
216	DIREKSI Board of Directors
221	TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Information Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors
242	KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS Committees under the Board of Commissioners
272	KOMITE DAN UNIT TUGAS/FUNGSI PENDUKUNG FUNGSI DAN TUGAS DIREKSI Committees Supporting the Functions and Duties of the Board of Directors
284	AKUNTAN PUBLIK Public Accountant
286	SISTEM MANAJEMEN RISIKO Risk Management System
292	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Internal Control System
298	PERKARA PENTING Legal Claims
300	KODE ETIK Code of Conduct
303	GRATIFIKASI DAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI Gratuities And Anti-Corruption Policy
303	KEBIJAKAN *INSIDER TRADING* Insider Trading Policy
304	INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK Information on the Provision of Funding for Political Activities
304	PENGELOLAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN Management of Potential Conflict of Interest
305	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Goods and Services Procurement Policy
306	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Whistleblowing System
311	PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA Implementation of Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies
320	KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS) Uniformity of Implementation of Corporate Governance to Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)
321	INDEKS PUGKI PUGKI Index

RUJUKAN KEBERLANJUTAN
Sustainability Reference

366	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) Sustainability Development Goals (SDGs)
370	**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN** Consolidated Financial Statement
612	**REFERENSI SEOJK NO. 16/ SEOJK.04/2021: LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK** SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

SINERGI LINI BISNIS DALAM KELOMPOK USAHA ABM

Synergy within ABM Group's Business Line

Melalui kelompok usaha yang solid, ABM berupaya mengembangkan bisnis dan layanan yang terintegrasi, mulai dari pengupayaan pertambangan batu bara di hulu, hingga proses bisnis dengan *service excellence* di hilir.

Through a solid business group, ABM develops integrated business and services, starting from coal mining efforts upstream, to business processes with service excellence downstream.



MENGEMBANGKAN FOKUS ESG

Developing ESG Focus

ABM menyadari adanya dampak atas operasi dan bisnis yang dilakukan. Inisiatif dengan pendekatan ESG menjadi fokus penting ABM untuk dapat mewujudkan keberlanjutan dan terus menciptakan nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

ABM acknowledges the impact of its operations on the environment and society. Consequently, the company places significant emphasis on initiatives with an ESG approach. These initiatives are pivotal in realizing sustainability and continually generating added value for all stakeholders.

Pendidikan Education	**Lingkungan dan Dampak Ekologi** Environment and Ecological Impact	**Pemberdayaan Ekonomi** Economic Empowerment	**Kesehatan Masyarakat dan Infrastruktur** Public Health and Infrastructure
Elevating Local Talent Capability	*Engage Biodiversity Preservation*	*Building Welfare Communities*	*Develop Community Livelihood*

KINERJA 2023
Performance in 2023

Perkembangan yang berkelanjutan menjadi aspek penting bagi ABM dalam mewujudkan bisnis yang tumbuh dan berevolusi.

Continuous development stands as a cornerstone for ABM in actualizing a business that not only grows but also evolves.

Volume Pemindahan Lapisan Penutup oleh CK
Overburden Removal Volume by CK

276,56

juta bcm | million bcm

Meningkat 36,30% atau setara 73,66 juta bcm dari tahun sebelumnya sebesar 202,90 bcm. Pertumbuhan volume pemindahan lapisan penutup dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara menjadi bagian penting bagi Grup ABM dalam menjaga kelangsungan usahanya di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

The volume increased by 36.30%, equivalent to 73.66 million bcm compared to the previous year's 202.90 bcm. This growth in overburden removal and equipment rental for coal extraction plays a crucial role for ABM Group in sustaining business continuity amid the evolving economic landscape.



Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
Revenue from Contracts with Customers

AS$ | US$

1,49

miliar | billion

Tumbuh 3,28% dari tahun sebelumnya sebesar AS$1,44 miliar. Seluruh segmen mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi didapatkan dari segmen Lainnya dengan kegiatan perdagangan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan operasi dalam ruang lingkup bisnis Grup ABM yang dijalankan melalui PT Prima Wiguna Parama (“PWP”).

Experiencing a growth of 3.28% from the previous year’s figure of US$1.44 billion, all segments have shown positive development. Particularly noteworthy is the significant growth observed in the Others segment, primarily driven by fuel trading activities aimed at fulfilling operational requirements within the ABM Group’s business scope, managed through PT Prima Wiguna Parama (“PWP”).

Marjin Laba Bersih
Net Profit Margin

%

19,36

Meningkat 0,68% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18,67%.

An increase of 0,68% compared to 18,67%billion in the previous year.



Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity

AS$ | US$

289,00

juta | million

Mencatat kenaikan 7,07% dari tahun sebelumnya sebesar AS$269,91 miliar. Meningkatnya Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk memperlihatkan potensi nilai tambah bagi pemegang saham, terutama melalui acuan atas pembagian dividen.

The Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity has recorded an increase of 7.07% from the previous year, reaching US$269.91 billion. This rise highlights the potential for added value for shareholders, particularly concerning dividend distribution.

Investasi pada Entitas Asosiasi
Investment in Associated Entities

AS$ | US$

589,64

juta | million

Meningkat 22,60% dari tahun sebelumnya sebesar AS$480,95 miliar.

An increase of 22.60% compared to US$480.95 billion in the previous year.

Jumlah Aset
Total Assets

AS$ | US$

2,16

miliar | billion

Meningkat 8,78% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar AS$1,98 miliar.

An increase of 8.78% compared to US$1.98 billion in the previous year.

Nilai Aset Tetap
Value of Fixed Asset

AS$ | US$

725,35

juta | million

Meningkat 27,85% dari tahun sebelumnya sebesar AS$567,33 juta.

An increase of 27.85% compared to US$567.33 million in the previous year.

Jumlah Ekuitas
Total Equity

AS$ | US$

758.93

juta | million

Tumbuh 22,90% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar AS$617,52 juta.

An increase of 22.90% compared to US$617.52 million in the previous year.


3T



8,78%

Peningkatan jumlah aset dari tahun sebelumnya
Increase in total assets from the previous year

01

IKHTISAR KINERJA
Performance Highlights

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Significant Financial Highlights

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Dolar AS) (in thousand US Dollar)	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Revenue from Contracts with Customers	1.492.999	1.445.527	1.021.865	606.407	592.395	3,28	26,00
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.100.953)	(923.623)	(655.509)	(504.892)	(484.564)	19,20	22,77
Laba Bruto Gross Profit	392.046	521.904	366.357	101.515	107.831	(24,88)	38,09
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi Selling General and Administrative Expenses	(110.371)	(105.068)	(60.086)	(54.081)	(58.341)	5,05	17,28
Pendapatan Lainnya Other Income	47.754	15.283	15.755	12.653	10.599	212,47	45,69
Beban Lainnya Other Expenses	(23.802)	(36.387)	(18.524)	(43.785)	(6.541)	(34,59)	38,12
Laba Usaha Profit from Operations	305.627	395.732	303.502	16.302	53.548	(22,77)	54,57
Bagian atas Laba Entitas Asosiasi - Neto Share of Profit of Association - Net	143.997	66.588	-	-	-	116,25	-
Pendapatan Dividen Dividend Income	25.000	22.500	-	-	-	11,11	-
Pendapatan Keuangan - Neto Finance Income - Net	4.813	2.596	1.785	3.677	2.988	85,39	12,66
Biaya Keuangan Finance Charges	(106.107)	(52.481)	(57.496)	(43.910)	(36.577)	102,18	30,51
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	373.329	434.934	247.791	(23.931)	19.959	(14,16)	107,96
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(1.839)	(1.873)	(1.120)	(1.063)	(944)	(1,83)	18,13
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	371.491	433.061	246.671	(24.994)	19.015	(14,22)	110,24
Beban Pajak Penghasilan - Neto Income Tax Expense - Net	(55.867)	(91.158)	(60.487)	(12.745)	(15.121)	(38,71)	38,64
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	315.624	341.904	186.184	(37.739)	3.894	(7,69)	200,05
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	310.282	327.137	190.561	(58.459)	4.853	(5,15)	182,77

(dalam ribuan Dolar AS) (in thousand US Dollar)	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Profit (Loss) for the Year Attributable to:**							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company	289.001	269.910	148.004	(35.659)	7.556	7,07	148,69
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	26.623	71.994	38.180	(2.081)	(3.662)	(63,02)	N/a
	315.624	**341.904**	**186.184**	**(37.740)**	**3.894**	**(7,69)**	**200,05**
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Total Comprehensive Income (Loss) for the Year Attributable to:**							
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company	283.658	255.181	152.419	(56.514)	8.665	11,16	139,20
Kepentingan Non-Pengendali Non- Controlling Interests	26.623	71.956	38.142	(1.945)	(3.812)	(63,00)	N/a
	310.282	**327.137**	**190.561**	**(58.460)**	**4.853**	**(5,15)**	**182,77**
Laba (Rugi) per Saham Dasar (dalam AS$ penuh) Basic Earning (Loss) per Share (in full US$ amount)	0,10497	0,09804	0,05376	(0,01295)	0,00274	7,07	148,79

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
Revenue from Contracts with Customers

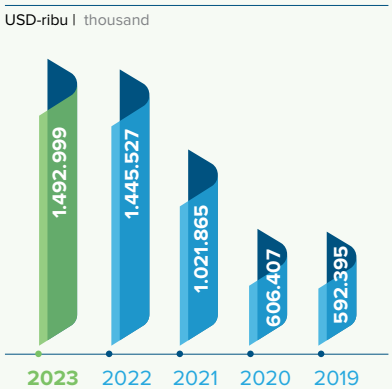

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Profit (Loss) for the Year

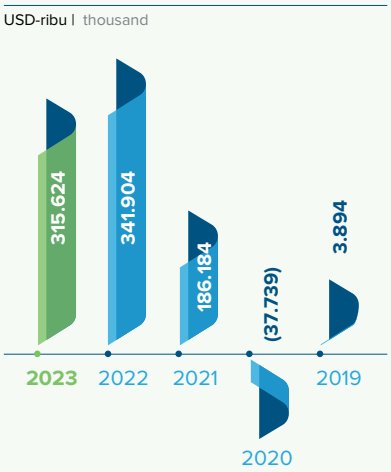

Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive Income (Loss) for the Year

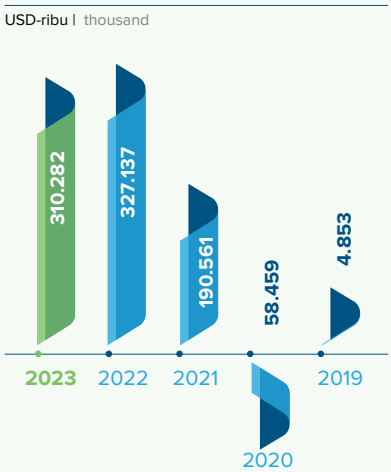

Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Dolar AS) (in thousand US Dolar)	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Aset **Assets**							
Investasi pada Saham Investments in Shares	16.731	23.619	23.463	20.029	60.139	(29,16)	(27,37)
Investasi pada Entitas Asosiasi Investment in Associates	589.643	480.947	28	-	-	22,60	-
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	725.355	567.333	349.195	330.690	369.711	27,85	18,35
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	622.722	706.664	495.193	314.161	260.755	(11,88)	24,31
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	202.237	204.015	168.825	162.358	163.623	(0,87)	5,44
Jumlah Aset Total Assets	2.156.688	1.982.579	1.036.704	827.237	854.229	8,78	26,05
Liabilitas dan Ekuitas **Liabilities and Equity**							
Liabilitas **Liabilities**							
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	631.681	616.934	299.693	262.691	216.603	2,39	30,68
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	766.080	748.123	380.122	402.797	392.432	2,40	18,20
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.397.761	1.365.057	679.815	665.488	609.035	2,40	23,08
Ekuitas **Equity**							
Jumlah Ekuitas Total Equity	758.927	617.521	356.889	161.749	245.194	22,90	32,64
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	2.156.688	1.982.579	1.036.704	827.237	854.229	8,78	26,05

Total Aset
Total Assets

USD-ribu | thousand

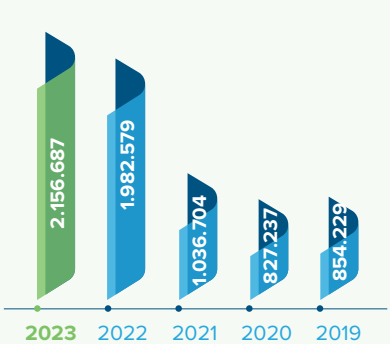

Total Liabilitas
Total Liabilities

USD-ribu | thousand

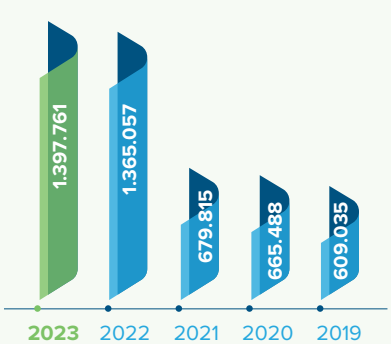

Total Ekuitas
Total Equity

USD-ribu | thousand

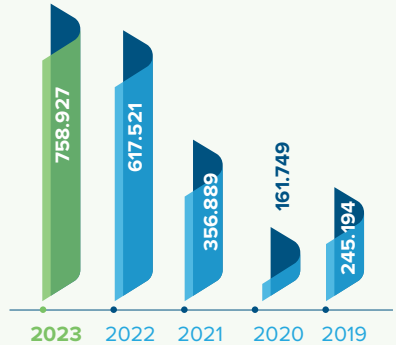

Rasio-rasio Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Ratio

	2023	2022	2021	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023 (poin | point)
Rasio Profitabilitas **Profitability Ratio**						
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) Return on Assets (ROA) (%)	13,96	17,88	15,88	4,56	0,88	(3,92)
Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (ROE) (%)	38,08	43,71	41,47	23,33	3,08	(5,63)
Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) Profit Margin (%)	19,36	18,67	14,48	6,22	1,28	0,68
Rasio Likuiditas **Liquidity Ratio**						
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times)	0,99	1,15	1,65	1,20	1,20	(0,16)
Rasio Cepat (kali) Quick Ratio (times)	0,90	1,06	1,52	0,94	0,97	(0,15)
Rasio Solvabilitas **Solvency Ratio**						
Utang Berbunga Neto terhadap Ekuitas (kali) Net Interest-Bearing Debt to Equity (Times)	1,11	1,00	0,41	1,95	1,18	0,11
Utang Berbunga Neto terhadap EBITDA (kali) Net Interest-Bearing Debt to Equity (Times)	1,68	1,09	0,37	2,29	2,43	0,59
Liabilitas terhadap Ekuitas (kali) Debt to Equity Ratio (DER) (times)	1,37	1,52	1,08	4 ,11	2,48	(0,15)
Liabilitas terhadap Aset (kali) Debt to Total Asset Ratio (DAR) (times)	0,48	0,47	0,37	0,80	0,71	0,01

IKHTISAR OPERASI
Operational Highlights

Kinerja Operasi
Operational Performance

	2023	2022	2021	2020	2019	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Pertambangan Batu Bara **Coal Mining**							
Volume Produksi (juta ton) Production Volume (million ton)	11,54	12,20	13,22	12,56	11,78	(5,02)	(0,42)
Volume Penjualan (juta ton) Sales Volume (million ton)	11,30	12,66	13,53	11,63	11,76	(10,77)	(0,80)
Kontrak Pertambangan **Mining Contract**							
Volume Pemindahan Lapisan Penutup (juta bcm) Volume of Overburden Removal (million bcm)	276,56	202,90	178,56	139,67	95,54	36,30	23,69
Volume Penyewaan Alat untuk Pengambilan Batu Bara (juta ton) Volume of Equipment Rental and Coal Extraction (million tons)	34,07	28,38	30,61	27,61	18,55	20,02	12,93

Volume Produksi Batu Bara
Coal Production Volume

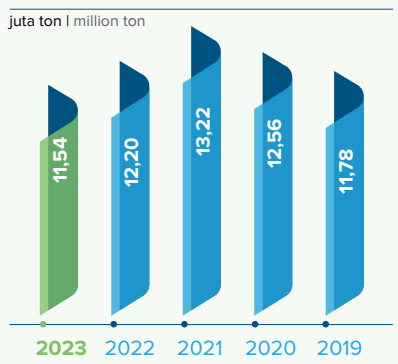

Volume Penjualan Batu Bara
Coal Sales Volume

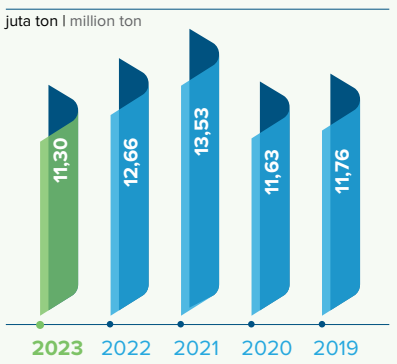

Volume Pemindahan Lapisan Penutup
Volume of Overburden Removal

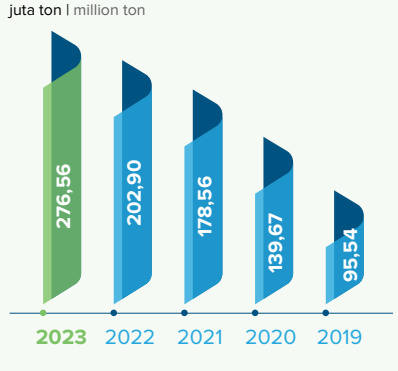

Volume Penyewaan Alat untuk Pengambilan Batu Bara
Volume of Equipment Rental and Coal Extraction

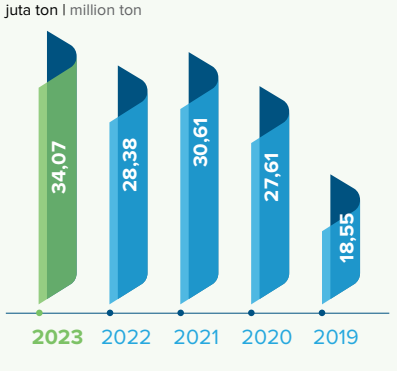

Kinerja Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan per Segmen
Revenue Performance from Contracts with Customers by Segment

	2023 (USD-ribu | thousand)	2022 (USD-ribu | thousand)	2021 (USD-ribu | thousand)	2020 (USD-ribu | thousand)	2019 (USD-ribu | thousand)	YoY 2022-2023 (%)	CAGR 2019-2023 (%)
Jasa Services	233.229	226.482	189.995	165.360	184.881	2,98	5,98
Pabrikasi Fabrication	45.304	34.980	26.275	22.624	30.231	29,51	10,64
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara Mining Contractor and Coal Mining	1.360.526	1.343.176	969.043	561.504	521.085	1,29	27,12
Lain-lain Others	295.727	228.288	140.076	84.393	74.190	29,54	41,30
Sub Jumlah Sub Total	1.934.786	1.832.926	1.325.389	833.881	810.387	5,56	24,30
Eliminasi Elimination	(441.788)	(387.398)	(303.524)	(227.474)	(217.992)	14,04	19,31
Jumlah Total	**1.492.998**	**1.445.528**	**1.021.865**	**606.407**	**592.395**	**3,28**	**26,00**

Komposisi Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan per Segmen
Composition of Revenue from Contracts with Customers by Segment

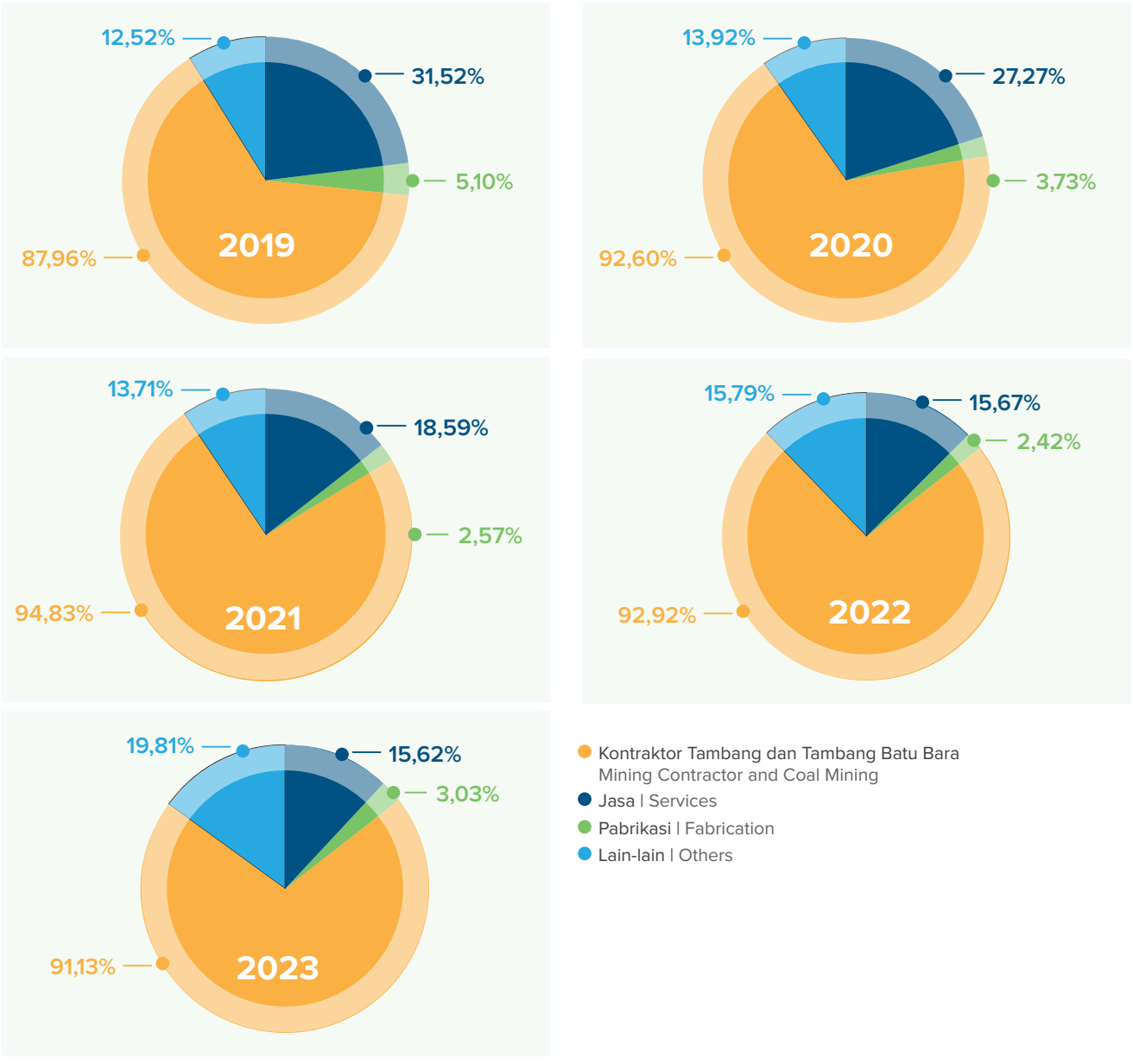

IKHTISAR SAHAM
Share Highlights

Kode Saham
Ticker Code
ABMM

Perusahaan telah mencatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Desember 2011.
The Company has listed and traded its shares on the Indonesia Stock Exchange since December 6, 2011.

Informasi Saham ABMM
Share Highlights of ABMM
2019-2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Nilai Buku per Saham (Rp) Book Value per Share (Rp)	4.250	3.528	1.850	829	1.243
Harga Saham per Nilai Buku Price to Book Value (%)	80	93	77	92	123
Harga Saham per Pendapatan Price to Earning Ratio (%)	2,10	2,13	1,85	(4,16)	39,94
Jumlah Saham Beredar (lembar saham) Number of Shares Outstanding (shares)	2.753.165.000	2.753.165.000	2.753.165.000	2.753.165.000	2.753.165.000
Bursa Efek Stock Exchange	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange				

Informasi Pergerakan Saham ABMM
ABMM Stock Movement Information
2022-2023

Periode Period	**Harga per Saham (Rp/lembar)** Price per Share (Rp/share)			**Modal Disetor (lembar saham)** Paid-up Capital (share)	**Kapitalisasi Pasar (Rp-juta)** Market Capitalization (Rp-million)	**Volume Transaksi** (ribu lembar) Transaction Volume (thousand sheets)	**Nilai (Rp-juta)** Value (Rp-million)	**Frekuensi** (kali) Frequency (times)	**Hari** Days
	Tertinggi Highest	**Terendah** Lowest	**Penutupan** Closing						
2023									
Triwulan I 1st Quarter	3.360	2.600	3.170	2.753.000.000	8.727.010	70.239	305.048	55.719	63
Triwulan II 2nd Quarter	3.660	2.740	3.070	2.753.000.000	8.451.710	215.529	607.305	80.794	52
Triwulan III 3rd Quarter	4.150	3.140	3.940	2.753.000.000	10.846.820	156.170	592.011	74.800	62
Triwulan IV 4th Quarter	4.300	3.220	3.400	2.753.000.000	9.360.200	122.245	459.104	70.960	63
2022									
Triwulan I 1st Quarter	1.965	1.325	1.765	2.753 .000.000	4.859.000	194.085	304.196	53.284	61

Periode Period	Harga per Saham (Rp/lembar) Price per Share (Rp/share)			Modal Disetor (lembar saham) Paid-up Capital (share)	Kapitalisasi Pasar (Rp-juta) Market Capitalization (Rp-million)	Volume Transaksi (ribu lembar) Transaction Volume (thousand sheets)	Nilai (Rp-juta) Value (Rp-million)	Frekuensi (kali) Frequency (times)	Hari Days
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing						
Triwulan II 2nd Quarter	3.360	1.720	2.230	2.753 .000.000	6.140.000	321.983	848.978	116.268	55
Triwulan III 3rd Quarter	4.900	2.020	3.960	2.753 .000.000	10.903.000	346.790	1.141.711	92.148	65
Triwulan IV 4th Quarter	4.460	3.000	3.280	2.753 .000.000	9.030.000	227.627	849.592	112.344	65

Grafik Harga Penutupan dan Volume Perdagangan ABMM
ABMM Closing Price and Trading Volume Chart
2022-2023

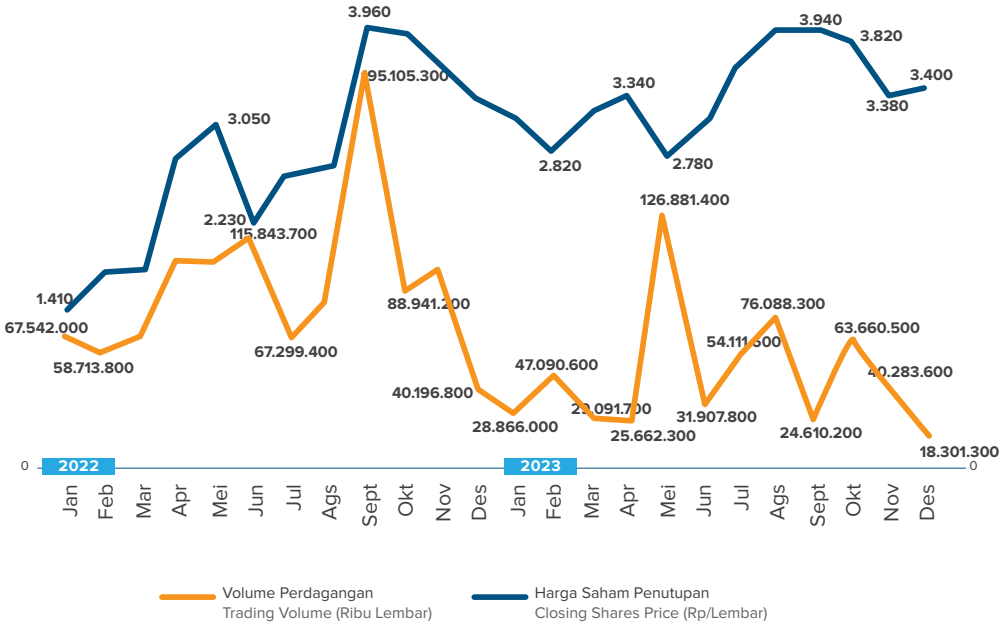

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Di sepanjang tahun 2022 dan 2023, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahaan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split),* penggabungan saham (*reverse stock)*, saham bonus, dividen dalam bentuk saham, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

INFORMATION ON CORPORATE ACTIONS

Throughout 2022 and 2023, the Company did not conduct any corporate actions that caused changes in shares, such as stock splits, reverse stock combinations, bonus shares, dividends in the form of shares, changes in the nominal value of shares, issuance of convertible securities, and capital increases and decreases.

PENGHENTIAN SEMENTARA DAN/ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM ABMM SERTA PENGHAPUSAN/PEMBATALAN PENCATATAN SAHAM

Sepanjang tahun 2022 dan 2023, Perusahaan tidak mengalami penghentian sementara perdagangan saham (*suspension)* dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

TEMPORARY SUSPENSION AND/OR SANCTION OF ABMM'S SHARES TRADING AND DELISTING/ CANCELLATION OF SHARES LISTING

Throughout 2022 and 2023, the Company did not experience any suspension and/or delisting.

KILAS PERISTIWA 2023
2023 Highlights

FEBRUARI | FEBRUARY **2023**



CKB Logistics meresmikan fasilitas pergudangan dan perkantoran baru di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan di Jalan poros provinsi yang menghubungkan akses dari kota Balikpapan, Samarinda, Bontang menuju Sangatta.

CKB Logistics inaugurated new warehousing and office facilities in Banjarbaru City, South Kalimantan and on the provincial axis road which connects access from the cities of Balikpapan, Samarinda, Bontang to Sangatta.

MARET | MARCH **2023**



CKB Logistics meresmikan fasilitas pergudangan dan *cross dock* di Jalan Lintas Prabumulih, Sumatera Selatan dan merelokasi fasilitas hubungan logistik ke Komplek Pergudangan Graha Mitra Sukarami Palembang.

CKB Logistics inaugurated warehousing and cross dock facilities on Jalan Lintas Prabumulih, South Sumatra and relocated logistics connection facilities to the Graha Mitra Sukarami Warehouse Complex Palembang.

JUNI | JUNE **2023**



CKB Logistics meresmikan fasilitas logistik dan kantor baru di Meulaboh, Aceh Barat dan di Benete, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

CKB Logistics inaugurated new logistics facilities and offices in Meulaboh, West Aceh and in Benete, Sumbawa, West Nusa Tenggara.

AGUSTUS | AUGUST **2023**



SSB meresmikan *Hub Support* di Surabaya ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam Grup ABM dan menambah kapabilitas SSB juga dapat menjadi *footprint* SSB di Indonesia bagian timur.

The inauguration of Hub Support by SSB in Surabaya is expected to strengthen synergies within the ABM Group and increase SSB's capabilities and also become SSB's footprint in eastern Indonesia.

SEPTEMBER | SEPTEMBER **2023**



» CKB Logistics mencapai hasil yang memuaskan dalam kegiatan eksternal ISO audit 2023. Hasil audit ini menunjukkan bahwa CKB Logistics berhak menerima rekomendasi untuk mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 (*Quality Management System*/Sistem Manajemen Mutu) & ISO 45001:2018 (*Occupational Health & Safety Management System*/Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja) dan juga berhasil meraih sertifikat ISO 14001:2015 (*Environmental Management System*/Sistem Manajemen Lingkungan).

CKB Logistics achieved satisfactory results in the external ISO audit 2023. The results of this audit demonstrates that CKB Logistics deserves to be granted recommendations to maintain the ISO 9001:2015 (Quality Management System) & ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management System certificates, and also managed to obtain ISO 14001:2015 (Environmental Management System) certificate.



» ABM melalui anak usahanya PT Prima Wiguna Parama (PWP) telah menandatangani kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka pelaksanaan Pertamina One Solution yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman di Bali.

ABM, through its subsidiary PT Prima Wiguna Parama (PWP), has signed a collaborative partnership with PT Pertamina Patra Niaga in implementing the Pertamina One Solution as outlined in a Memorandum of Understanding in Bali.

OKTOBER | OCTOBER **2023**



CKB Logistics melakukan ekspansi bisnis dengan membuka fasilitas pergudangan di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai bentuk penyelarasan dengan visi CKB Logistics yaitu menjadi penyedia solusi logistik terkemuka di tanah air.

CKB Logistics expanded its business by inaugurating a warehousing facility in Makassar, South Sulawesi. The initiative is aligned with with CKB Logistics's vision, namely to become the leading logistics solutions provider in the country.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

ABM

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA INTERNASIONAL/REGIONAL
2023 INTERNATIONAL/REGIONAL AWARDS



Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) kategori *Gold*
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) Gold category

Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)
Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT)

Desember 2023
December 2023



Company of the Year 2023
Company of the Year 2023

Company Of The Year 2023 - Empowering Energy
Company Of The Year 2023 - Empowering Energy

APAC Business Headlines
APAC Business Headlines

April 2024
April 2024

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA NASIONAL
NATIONAL AWARDS 2023



Public Relations Indonesia Awards 2023
Public Relations Indonesia Awards 2023

Public Relations Indonesia Awards 2023 "*Silver Winner*" Sektor Swasta Kategori *Owned Media* Sub Kategori E-Magazines Cerdas Edisi IV
Public Relations Indonesia Awards 2023 "Silver Winner" Private Sector Category Owned Media Sub Category Smart E-Magazines Edition IV

Public Relation Indonesia
Public Relations Indonesia

17 Maret 2023
March 17, 2023



Fortune 100 Indonesia's Biggest Companies
Fortune 100 Indonesia's Biggest Companies

100 Indonesia's Biggest Companies
100 Indonesia's Biggest Companies

Fortune Indonesia
Fortune Indonesia

Agustus 2023
August 2023



IICD Corporate Governance Awards 2023
IICD Corporate Governance Awards 2023

Best Non-Financial Sector
Best Non-Financial Sector

Indonesian Institute for Corporate Director (IICD)
Indonesian Institute for Corporate Directors (IICD)

18 September 2023
September 18, 2023



The Best Investortrust Companies 2023
The Best Investortrust Companies 2023

The Best Five Investortrust Companies 2023
The Best Five Investortrust Companies 2023

Investortrust Indonesia
Investortrust Indonesia

31 Oktober 2023
October 31, 2023

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2023
CERTIFICATIONS THAT ARE STILL VALID IN 2023

» **ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti-Bribery Management System)**
ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System

PT SGS Indonesia
PT SGS Indonesia

22 Desember 2022-22 Desember 2025
December 22, 2022-December 22, 2025

SSB

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA INTERNASIONAL/REGIONAL
2023 INTERNATIONAL/REGIONAL AWARDS



Palfinger Asia Pacific Sales & Service Conference 2023
Palfinger Asia Pacific Sales & Service Conference 2023

Palfinger Asia Pacific Sales & Service Conference 2023 untuk kategori Best Achievement in Mining Segment
Palfinger Asia Pacific Sales & Service Conference 2023 for the category of Best Achievement in Mining Segment

Palfinger Asia Pacific
Palfinger Asia Pacific

19 Juli 2023
July 19, 2023

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA NASIONAL
NATIONAL AWARDS 2023



Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS (Tanjung)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program (Tanjung)

Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori *Silver* (Tanjung)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program at the Workplace for Silver Category (Tanjung)

Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan
South Kalimantan Provincial

10 Februari 2023
February 10, 2023



Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan (Tanjung)
Award for Zero Accident with Safe Manhours (Tanjung)

Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian *Safe Manhours* 1.650.294 dari 1 Januari 2011 - 31 Desember 2022 (Tanjung)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 1,650,294 from January 1, 2011-December 31, 2022 (Tanjung)

Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan
South Kalimantan Provincial

10 Februari 2023
February 10, 2023



Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan (Balikpapan)
Award for Zero Accident with Safe Manhours (Balikpapan)

Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian *Safe Manhours* 1.471.458 dari 1 Januari 2022-31 Desember 2022 (Balikpapan)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 1,471,458 from January 1, 2011-December 31, 2022 (Balikpapan)

Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur
East Kalimantan Provincial

18 Maret 2023
March 18, 2023



Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS (Bengalon)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program (Bengalon)

Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja dan Masyarakat Kalimantan Timur dengan kategori Gold (Bengalon)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program at the Workplace for Gold Category (Bengalon)

Pemerintah Provinsi Kalimatan Timur
East Kalimantan Provincial

18 Maret 2023
March 18, 2023



Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil (Tanjung)
Award for Zero Accident (Tanjung)

Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian Safe Manhours 4.536.846 dari 1 Oktober 2017 - 31 Desember 2022 (Tanjung)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 4,536,846 from October 1, 2017-December 31, 2022 (Tanjung)

PT Putra Perkasa Abadi

30 April 2023
April 30, 2023



Top CSR Awards 2023
Top CSR Awards 2023

Top CSR Awards 2023 pada Kategori Bintang 4 untuk Program CSR Berkelanjutan Training of Trainer (ToT) dan Welding Development Program (WDP)
Top CSR Awards 2023 in 4 stars category for CSR Program on Continuous Training of Trainers (ToT) and Welding Development Program (WDP)

Top Business

7 Juni 2023
June 7, 2023



Top Leader on CSR Commitment 2023
Top Leader on CSR Commitment 2023

Top Leader on CSR Commitment 2023
Top Leader on CSR Commitment 2023

Top Business
Top Business

7 Juni 2023
June 7, 2023



Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan (Tanjung)
Award for Zero Accident with Safe Manhours (Tanjung)

Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian *Safe Manhours* 1.665.351 dari 1 Januari 2011-31 Desember 2022 (Tanjung)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 1,665,351 from January 1, 2011-December 31, 2022 (Tanjung)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

9Juni 2023
June 9, 2023



Piagam Pencapaian Nihil Kecelakaan (Samarinda)
Award for Zero Accident with Safe Manhours (Samarinda)

Piagam Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian Safe Manhours 1.347.566 dari 2 Juni 2018-31 Desember 2022 (Samarinda)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 1,347,566 from June 2, 2018-December 31, 2022 (Samarinda)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

9Juni 2023
June 9, 2023

SSB



Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan (Balikpapan)
Award for Zero Accident with Safe Manhours (Balikpapan)

Piagam Penghargaan Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian Safe Manhours 1.471.458 dari 1 Januari 2022-31 Desember 2022 (Balikpapan)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 1,471,458 from January 1, 2022-December 31, 2022 (Balikpapan)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

9Juni 2023
June 9, 2023



Pencapaian Nihil Kecelakaan (Berau)
Award for Zero Accident (Berau)

Pencapaian Nihil Kecelakaan dengan Pencapaian Safe Manhours 416.796 dari 1 Desember 2019 - 31 Desember 2022 (Berau)
Award for Zero Accident with Safe Manhours of 416,796 from December 1, 2019 - December 31, 2022 (Berau)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

9Juni 2023
June 9, 2023



Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AID (Sangatta)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling (Sangatta)

Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AID di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum (Sangatta)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program at the Workplace for Platinum Category (Sangatta)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

9Juni 2023
June 9, 2023



Piagam Penghargaan Perencanaan & Penanggulangan HIV-AIDS (Bengalon)
Award for HIV/AIDS Prevention & Handling (Bengalon)

Piagam Penghargaan Perencanaan & Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori Gold (Bengalon)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program at the Workplace for Gold Category (Bengalon)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesiaa

9 Juni 2023
June 9, 2023



Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AID (Tanjung)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling (Tanjung)

Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AID di Tempat Kerja dengan Kategori Silver (Tanjung)
Award for HIV/AIDS Prevention and Handling Program at the Workplace for Silver Category (Tanjung)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesiaa

9 Juni 2023
June 9, 2023



Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 (Cikupa)
Award for COVID-19 Prevention and Handling Program (Cikupa)

Piagam Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja dengan Kategori Platinum (Cikupa)
Award for COVID-19 Prevention and Handling Program at the Workplace for Platinum Category (Cikupa)

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesiaa

18 Maret 2023
March 18, 2023



Penghargaan Performance KPLH
Subcontractor Plant Workshop

Penghargaan Performance KPLH Subcontractor Plant Workshop Periode Juni 2023 (Tanjung)
Award for KPLH Performance on Subcontractor Plant Workshop, for the period of June 2023 (Tanjung)

Adaro
Adaro

31 Juli 2023
July 31, 2023



Indonesia Operational Excellence Conference and Award 2023
Indonesia Operational Excellence Conference and Award 2023

Indonesia Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) ke-12 tahun 2023 pada kategori Gold Achievement
12th Indonesia Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) 2023 in the Gold Achievement category

SHIFT Indonesia
SHIFT Indonesia

21 November 2023
November 21, 2023



Piagam Penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023 (Cikupa)
Advisory Committee Award for Occupational Safety and Health in Banten Province in 2023 (Cikupa)

Piagam Penghargaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023 (Cikupa)
Advisory Committee Award for Occupational Safety and Health in Banten Province in 2023 (Cikupa)

Gubernur Banten
Governor of Banten

23 November 2023
November 23, 2023

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2023
CERTIFICATION S THAT ARE STILL VALID IN 2023

- **ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu**
  ISO 9001:2015 Quality Management System

  PT TUV NORD Indonesia
  PT TUV NORD Indonesia

  2023-2026

- **ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
  ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

  PT TUV NORD Indonesia
  PT TUV NORD Indonesia

  2023-2026

- ***Certificate of Authorization* "R" *for Metallic and Repairs and Alterations* Izin penggunaan simbol R sesuai ketentuan National Board Inspection Code dan NB-415, Akreditasi Organisasi Perbaikan "R"**
  Certificate of Authorization "R" for Metallic and Repairs and Alterations Permission to use the R symbol as required by the National Board Inspection Code and NB-415, Accreditation of "R" Repair Organizations

  The American Society of Mechanical Engineers
  The American Society of Mechanical Engineers

  1 Desember 2020-14 Januari 2024
  December 1, 2020-January 14, 2024

- **Certificate of Authorization ASME U2 Stamp Produksi Class 1 dan Class 2 Pressure Vessels**
  Certificate of Authorization ASME U2 Stamp Produksi Class 1 dan Class 2 Pressure Vessels

  The American Society of Mechanical Engineers
  The American Society of Mechanical Engineers

  6 Desember 2020-6 Desember 2023
  December 6, 2020-December 6, 2023

» **Certificate of Authorization ASME S Stamp Produksi dan Perakitan Power Boilers**
Certificate of Authorization ASME S Stamp Production and Assembly of Power Boilers

The American Society of Mechanical Engineers
The American Society of Mechanical Engineers

6 Desember 2020-6 Desember 2023
December 6, 2020-December 6, 2023

» **Certificate of Authorization ASME U Stamp Produksi Pressure Vessels**
Certificate of Authorization ASME U Stamp Production of Pressure Vessels

The American Society of Mechanical Engineers
The American Society of Mechanical Engineers

6 Desember 2020-6 Desember 2023
December 6, 2020-December 6, 2023

» **ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan**
ISO 14001:2015 Environmental Management System

PT TUV NORD Indonesia
PT TUV NORD Indonesia

2023-2026

» **ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System

PT TUV NORD Indonesia
PT TUV NORD Indonesia

21 Desember 2023-20 Desember 2026
December 21, 2023-December 20, 2026

CKB LOGISTICS

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA INTERNASIONAL/REGIONAL
2023 INTERNATIONAL/REGIONAL AWARDS



Maintaining Zero Accident Throughout the Year 2022
Maintaining Zero Accident Throughout the Year 2022

For maintaining zero accident throughout the year 2022
For maintaining zero accident throughout the year 2022

Total Energies Indonesia
Total Energies Indonesia

5 Mei 2023
May 5, 2023

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA NASIONAL
NATIONAL AWARDS 2023



Marunda Customs and Excise Awards 2023
Marunda Customs and Excise Awards 2023

Penerima Fasilitas Pusat Logistik Berikat Terpatuh
Recipient of the Most Compliant Bonded Logistics Center Facility

KPPBC TMP A Marunda
KPPBC TMP A Marunda

Februari 2023
February 2023



Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori SILVER
Workplace HIV-AIDS Prevention and Response Award with SILVER Category

Sebagai Perusahaan penerima penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja dengan kategori SILVER
As a company that received an award fot HIV-AIDS prevention and control program in the workplace with SILVER category

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
South Kalimantan Provincial

10 Februari 2023
February 10, 2023



Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Tempat Kerja dengan Kategori GOLD
GOLD Category for Prevention of HIV-AIDS in Workplace and Response Award

Penghargaan program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja dengan kategori GOLD
GOLD Category for Prevention of HIV-AIDS in Workplace and Response Program Award

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

9 Juni 2023
June 9, 2023



Dukungan dan Kerjasama Perusahaan dalam Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal
Company Support and Cooperation in Local Workforce Empowerment

Penghargaan atas dukungan dan Kerjasama Perusahaan dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal Musi Banyuasin
Awarded for the Company's support and cooperation in empowering the local workforce of Musi Banyuasin

Bupati Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
Regent of Musi Banyuasin, South Sumatra Province

28 Juli 2023
July 28, 2023



Indonesia Logistics (ILA) Awards 2023
Indonesia Logistics (ILA) Awards 2023

Warehouse Provider of the Year
Warehouse Provider of the Year

Supply Chain Indonesia (SCI)
Supply Chain Indonesia (SCI)

13 Oktober 2023
October 13, 2023



Indonesia Logistics (ILA) Awards 2023
Indonesia Logistics (ILA) Awards 2023

3PL Company of the Year
3PL Company of the Year

Supply Chain Indonesia (SCI)
Supply Chain Indonesia (SCI)

13 Oktober 2023
October 13, 2023



Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Certification of Occupational Safety and Health Management System

Piagam Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Kategori Gold (Surabaya dan Banjarmasin)
Certificate for Certification of Occupational Safety and Health Management System with Gold category (Surabaya and Banjarmasin)

Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
Governor of East Java Province and Governor of South Kalimantan Province

9 September 2023 & 13-15 September 2023
September 9, 2023 & September 13-15, 2023



Zero Accicent Award
Zero Accicent Award

Penghargaan dalam Zero Accicent Award
Award in the Zero Accident Award

PT Putra Perkasa Abadi
PT Putra Perkasa Abadi

10 April 2023
April 10, 2023



Penghargaan terhadap Penerapan SLPI
Appreciation for SLPIs Implementation

Penghargaan terhadap Penerapan SLPI
Appreciation for SLPIs Implementation

Tangguh LNC Vessel
Tangguh LNC Vessel

20 Desember 2023
December 20, 2023



GOLD Achievement untuk kategori "Services" pada project "Carbon Emission Reduction at CKB Logistics Cakung Operation"
GOLD Achievement for the "Services" category in the "Carbon Emission Reduction at CKB Logistics Cakung Operation" project

Indonesia Operational Excellence Conference and Award (OPEXCON) ke-12 tahun 2023 pada kategori Gold Achievement

SHIFT Indonesia
SHIFT Indonesia

21 November 2023
November 21, 2023

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2023
CERTIFICATIONS THAT ARE STILL VALID IN 2023

» **Sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) CKB Logistics (Jakarta) No. AEO:0.0.0.0.5.0.7.00146.ID**
CKB Logistics (Jakarta) Authorized Economic Operator (AEO) Certificate No. AEO:0.0.0.0.5.0.7.00146.ID

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu RI
Director General of Customs and Excise Ministry of Finance RI

27 Desember 2019-27 Desember 2024
December 27, 2019-December 27, 2024

» **Sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) CKB Logistics (Surabaya) No. AEO:0.0.0.0.5.0.7.00147.ID**
CKB Logistics (Surabaya) Authorized Economic Operator (AEO) Certificate No. AEO:0.0.0.0.5.0.7.00147.ID

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu RI
Director General of Customs and Excise Ministry of Finance RI

27 Desember 2019-27 Desember 2024
December 27, 2019-December 27, 2024

» **Sertifikat Perpanjangan Pengakuan sebagai Authorized Economic Operator (AEO) No. AEP:0.0.3.0.0.0.0.00023.ID**
Certificate of Renewal of Recognition as Authorized Economic Operator (AEO) No. AEP:0.0.3.0.0.0.0.00023.ID

Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Director General of Customs and Excise

25 Januari 2021-25 Januari 2026
January 25, 2021-January 25, 2026

» **Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum**
Certificate of Safety Management System for Public Transport Companies based on Decree of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. 85 Year 2018 on Safety Management System for Public Transport Companies

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
Director General of Land Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia

29 Agustus 2022-29 Agustus 2027
August 29, 2022-August 29, 2027

» **ISO 45001:2018 Certificate Register No. 01 213 1835153**
ISO 45001:2018 Certificate Register No. 01 213 1835153

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

26 September 2022-25 Juni 2025
September 26, 2022-June 25, 2025

» **SNI ISO 9001:2015 Certificate Register No. 824 100 18070**
SNI ISO 9001:2015 Certificate Register No. 824 100 18070

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

30 September 2022-19 Agustus 2025
September 30, 2022-August 19, 2025

» **Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk 64 Kriteria berdasarkan PP No 50 Tahun 2012 No Sertifikat: Reg. SMK3.2023.TUV.SK-196 (CKB Logistics Cakung)**
Occupational Safety and Health for 64 Criteria based on Government Regulation No. 50 Year 2012 Certificate number: Reg. SMK3.2023.TUV.SK-196 (CKB Logistics Cakung)

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

9 Juni 2023-9 Juni 2026
June 9, 2023-June 9, 2026

» **SNI ISO 14001:2015, TWIMC Letter No. 1012/TRID-BSS/TWIMC/9/23**
SNI ISO 14001:2015, TWIMC Letter No. 1012/TRID-BSS/TWIMC/9/23

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

Certificate Issuance
Certificate Issuance

» **TWIMC Letter untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP No. 50 Tahun 2012, dengan No. 1025/TRID-BSS/TWIMC/9/23 (CKB Logistics Banjarmasin)**
TWIMC Letter for Certification of Occupational Safety and Health Management System PP No. 50 Year 2012, with No. 1025/TRID-BSS/TWIMC/9/23 (CKB Logistics Banjarmasin)

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

Certificate Issuance
Certificate Issuance

» **TWIMC Letter untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PP No. 50 Tahun 2012, dengan No. 1013/TRID-BSS/TWIMC/9/23 (CKB Logistics Surabaya)**
TWIMC Letter for Occupational Health and Safety Management System Certification PP No. 50 of 2012, with No. 1013/TRID-BSS/TWIMC/9/23 (CKB Logistics Surabaya)

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

Certificate Issuance
Certificate Issuance

» **SNI ISO 14001:2015, Certificate Register No. 824 104 23018**
SNI ISO 14001:2015, Certificate Register No. 824 104 23018

TUV Rheinland Indonesia
TUV Rheinland Indonesia

9 November 2023-8 November 2026
November 9, 2023-November 8, 2026

NBE

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA NASIONAL
NATIONAL AWARDS 2023



Subroto *Award* 2023
Subroto Award 2023

Piagam "Aditama" untuk kategori "Kinerja Pengembang Pembangkit Tenaga Listrik Bioenergi
"Aditama" Charter for the category "Performance of Bioenergy Power Plant Developers

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)

September 2023
September 2023

TIA

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA INTERNASIONAL/REGIONAL
2023 INTERNATIONAL/REGIONAL AWARDS



ASEAN Coal Awards
ASEAN Coal Awards

ASEAN Coal Awards - Good Mining Practice
ASEAN Coal Awards - Good Mining Practice

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR)

1 September 2023
September 1, 2023



GMP *Awards* 2023
GMP Awards 2023

TIA meraih 4 Penghargaan sekaligus dalam gelaran Good Mining Practice (GMP) Awards 2023
TIA) won 4 awards at the Good Mining Practice (GMP) Awards 2023

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)

4 Oktober 2023
October 4, 2023

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA NASIONAL
NATIONAL AWARDS 2023



ASN KLHK Berprestasi dan Mitra KLHK
Outstanding KLHK ASN and KLHK Partner

Anugerah Mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terbaik Tahun 2023 serta sebagai Pemegang PPKH dengan Komitmen Keberlanjutan Rehabilitasi DAS dan Reklamasi
Award for Best Partner of the Ministry of Environment and Forestry in 2023 as well as being a PPKH Holder with a Continuous Commitment to Watershed Rehabilitation and Reclamtion.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)

16 Maret 2023
March 16, 2023

CK

PENGHARGAAN TAHUN 2023 BERSKALA INTERNASIONAL/REGIONAL
2023 INTERNATIONAL/REGIONAL AWARDS



TIA-GMP *Awards* 2023
TIA-GMP Awards 2023

Meraih 4 Penghargaan sekaligus dalam gelaran Good Mining Practice (GMP) Awards 2023
Won 4 awards at the Good Mining Practice (GMP) Awards 2023

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM)

4 Oktober 2023
October 4, 2023

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2023
CERTIFICATIONS THAT ARE STILL VALID IN 2023

» **ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu**
ISO 9001:2015 on Quality Management System

SGS United Kingdom Ltd
SGS United Kingdom Ltd

5 Desember 2022-5 Desember 2025
December 5, 2022-December 5, 2025

» **ISO 45001: 2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management System

SGS United Kingdom Ltd
SGS United Kingdom Ltd

5 Maret 2022-5 Desember 2025
March 5, 2022-December 5, 2025

» **ISO 14001: 2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan**
ISO 14001: 2015 on Environmental Management System

SGS United Kingdom Ltd
SGS United Kingdom Ltd

10 Februari 2022-20 Februari 2026
February 10, 2022-February 20, 2026

» **ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan**
ISO 14001: 2015 on Anti Bribery Management System

SGS United Kingdom Ltd
SGS United Kingdom Ltd

12 Desember 2023-12 Maret 2026
December 12, 2023-March 12, 2026

KETERANGAN | INFORMATION:
ABM: ABM Investama
CK: Cipta Kridatama
CKB Logistics: Cipta Krida Bahari
SSB: Sanggar Sarana Baja
NBE: PT Nagata Bio Energi
TIA: PT Tunas Inti Abadi


BAHAYA
DANGER





7,07%

Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk.

Profit Growth for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity.

02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Report



Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas konsistensi ABM dalam mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ke dalam proses bisnis Perusahaan

The Board of Commissioners also expressed appreciation for ABM's consistency in integrating Environmental, Social and Governance principles into the Company's business processes

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama | President Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Kondisi perekonomian global yang terkontraksi memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan banyak perusahaan di berbagai industri, tidak terkecuali PT ABM Investama Tbk. Di tengah tantangan yang masih demikian besar, izinkan saya mewakili jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan ABM untuk Tahun Buku 2023, terutama dari sudut pandang Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

PEREKONOMIAN INDONESIA YANG TANGGUH DAN KOMODITAS BATU BARA YANG DINAMIS

Perekonomian Indonesia di tahun 2023 memperlihatkan kemampuannya untuk tetap tumbuh dengan baik di tengah tantangan perekonomian dunia. International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2023 memroyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Berbagai tantangan seperti inflasi yang masih membayangi akibat rentannya pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19, serta isu krisis geopolitik, memberikan hambatan yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian dunia.

Di tengah tantangan perlambatan perekonomian global tersebut, perekonomian Indonesia justru mampu membukukan kinerja yang cukup tangguh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Meskipun melambat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,31%, capaian ini menjadi hal positif di mana perekonomian Indonesia mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi dunia.

Tangguhnya perekonomian Indonesia tak lepas dari tingkat inflasi nasional yang menunjukkan tren normalisasi dengan perlambatan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 ditutup di level 2,61% dengan inflasi inti yang rendah pada level 1,80%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51%. Keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter diharapkan mampu terus dilanjutkan agar perekonomian Indonesia mampu untuk tetap stabil di masa mendatang.

Statistik di atas menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Sejak triwulan I 2020 hingga akhirnya COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi di awal tahun 2023, perekonomian dunia termasuk Indonesia mengalami goncangan luar biasa yang berdampak besar terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Kita bangsa Indonesia patut mengapresiasi berbagai langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam merespon kondisi dan permasalahan yang timbul karena pandemic COVID-19.

Navigating the current global economic landscape presents unique challenges for numerous organizations across industries, not to mention PT ABM Investama Tbk. In the face of these unfavorable obstacles, allow me to represent the Board of Commissioners in conveying the ABM Annual Report for the 2023 Fiscal Year, particularly focusing on the Board's supervisory role.

INDONESIAN ROBUST ECONOMY AND DYNAMIC COAL MARKET

Amid global economic uncertainties, Indonesian economy showcased resilience and continued growth throughout 2023. The International Monetary Fund (IMF), in its October 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO), projects a global economic growth rate of 3% for 2023, a slight deceleration from the 3.5% growth recorded in 2022. Challenges such as lingering inflation due to global commodity supply vulnerabilities post-COVID-19 pandemic and geopolitical crises pose significant hurdles to global economic development.

Despite the challenges of a global economic slowdown, Indonesia demonstrated commendable economic performance. According to data from Statistics Indonesia (BPS), the country achieved a growth rate of 5.05% in 2023. Even though this marked a slight decrease from the 5.31% growth recorded in the previous year, Indonesian economy outpaced global economic growth.

The resilience of Indonesian economy is underscored by the national inflation rate, which indicates a normalization trajectory with inflation decreasing at a faster rate than anticipated. In December 2023, the Consumer Price Index (CPI) inflation closed at 2.61%, with core inflation remaining low at 1.80%, a decrease from the 5.51% CPI inflation recorded in 2022. Continued success in formulating monetary policy by the Indonesian Government is crucial for maintaining economic stability in the future.

The aforementioned statistics underscore Indonesia's effective response to the COVID-19 pandemic, which significantly impacted all aspects of community life. From the first quarter of 2020 until the declaration of COVID-19 as a pandemic in early 2023, both the global economy and Indonesia faced unprecedented shocks, severely affecting sustainable growth. Indonesia, as a nation, should appreciate all measures taken by the Government to swiftly respond the COVID-19-related conditions and adversities.

Dinamika sektor mineral dan batu bara ("minerba") sebagai penyedia komoditas penting dalam Industri dan perdagangan dunia memberikan gambaran atas terganggunya pasokan global, yang pada akhirnya memberikan dampak pada kenaikan inflasi dan perlambatan perekonomian dunia. Khususnya batu bara, yang mengalami ledakan permintaan di tahun 2022, pada tahun 2023 justru mengalami normalisasi persediaan dan permintaan, yang kemudian berimbas pada penyesuaian harga batu bara yang terjadi sejak awal tahun 2023.

The dynamics within the mineral and coal sector, crucial contributors to global industry and trade, highlight disruptions in global supply chains, consequently leading to inflationary pressures and a slowdown in the global economy. While coal experienced a surge in demand in 2022, in 2023, the coal market's supply and demand however underwent a normalization, leading to coal price adjustment since 2023.

Perkembangan Harga *Newcastle Coal* di Sepanjang Tahun 2023
(AS$ per ton)
Development Newcastle Coal Price throughout 2023
(AS$ per ton)



Sumber | Source: https://id.investing.com

Perkembangan Harga Batu Bara Acuan (HBA) di Sepanjang Tahun 2023
(US$ per ton)
Development of Reference Coal Prices (HBA) throughout 2023
(US$ per ton)

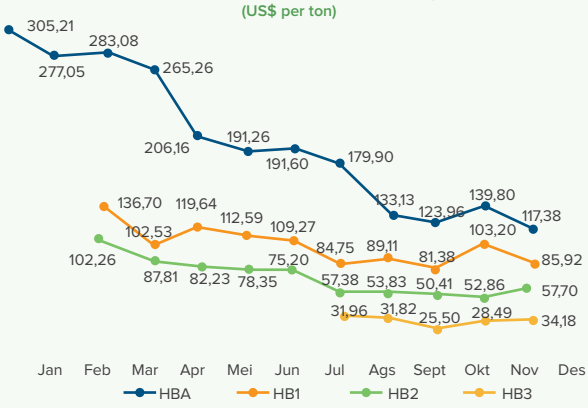

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Source: Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DAN HUBUNGAN KERJA DENGAN DIREKSI SERTA PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Pembentukan dan pelaksanaan fungsi organ Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama Perusahaan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi berperan dalam mengelola operasi dan bisnis Perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris memiliki peran untuk mengawasi pengelolaan operasi dan bisnis yang dijalankan Direksi.

Hubungan kerja antara kedua organ ini dibangun dengan prinsip dan budaya saling menghormati antar keduanya. Hukum perusahaan yang berlaku memberi batasan tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengelolaan ABM dan kelompok usaha oleh Direksi, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam merancang dan merumuskan rencana kerja dan target Perusahaan, Dewan Komisaris berperan untuk memastikan bahwa aspirasi pemangku kepentingan, khususnya investor dan pemegang saham, tercakupkan dengan baik. Bentuk pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan Dewan baik rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, baik mengundang Direksi atau menghadiri undangan dari Direksi. Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menggelar 8 kali rapat Dewan Komisaris berdasarkan undangan Direksi dan 8 kali rapat

BOARD OF COMMISSIONERS SUPERVISORY ROLE AND COLLABORATION WITH BOARD OF DIRECTORS IN IMPLEMENTING COMPANY STRATEGY

The establishment and the implementation of duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors as primary organs serve as our compliance with relevant laws and regulations. While the Board of Directors plays a role to manage the Company's operations and business activities, the Board of Commissioners is responsible for supervising the management carried out by the Board of Directors.

The interaction between these two entities is built on mutual respect, especially in principles and cultures. The applicable corporate laws and regulations have set distinct responsibilities and roles between the Company's organs. The Board of Commissioners oversees ABM's management and business groups led by the Board of Directors, offers guidance to them, and ensures adherence to Good Corporate Governance (GCG) principles.

In shaping work plans and the Company's objectives, the Board of Commissioners ensures the inclusion of stakeholders' aspirations, particularly those of investors and shareholders. This oversight is exercised through various meetings, both internal and joint sessions with the Directors, all as a host and an invitee. Throughout 2023, the Board of Commissioners attended 8 meetings of the Board of Directors, and convened 8 internal meetings inviting the Directors. Each meeting serves as primary platforms for the Board of Commissioners to conduct thorough evaluations of the

Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat-rapat tersebut menjadi forum utama bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi intensif dan mendalam terhadap berbagai hal terkait kinerja Perusahaan, baik dalam merumuskan dan memantau pencapaian kinerja, pengelolaan operasi dan bisnis serta kinerja keuangan Perusahaan, perkembangan investasi, penanganan permasalahan, penerapan GCG, pengelolaan lingkungan, kontribusi sosial di mana Perusahaan beroperasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), kinerja entitas anak dan kelompok usaha, arus kas dan permodalan, hingga sistem teknologi dan informasi di lingkup ABM.

Kunci utama dari keberhasilan manajemen untuk memenuhi target kinerja Perusahaan adalah kolaborasi yang harmonis antara Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui rapat-rapat seperti yang telah dijelaskan di atas, Dewan Komisaris memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, sekaligus membuka ruang diskursus terhadap permasalahan yang dihadapi Direksi didalam mengurus Perusahaan. Pengawasan atas implementasi strategi oleh Direksi juga dilakukan Dewan Komisaris pada lingkup pelaksanaan prinsip GCG untuk memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan telah memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, praktik terbaik korporasi, dan nilai budaya perusahaan.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Didalam mengemban aspirasi pemegang saham terkait pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris memiliki peran untuk memberikan pandangan kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan yang akuntabel dan *prudent*, dan sesuai dengan aspirasi pemangku kepentingan dan investor. Pengukuran pencapaian kinerja Direksi dilakukan dengan metode *Self-Assessment* melalui sejumlah *Key Performance Indicator* (KPI) yang sebelumnya telah ditentukan sendiri dan disetujui oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris atau Direksi. KPI Direksi tersebut mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan; pelaksanaan hasil keputusan RUPS sebelumnya; penilaian kesehatan Perusahaan yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi; serta indikator kinerja pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menyambut baik atas capaian kinerja yang ditunjukkan Perusahaan di sepanjang tahun 2023. Dewan Komisaris memandang, Direksi telah berhasil mencatatkan kinerja operasional dan finansial yang positif di tengah tren normalisasi harga batu bara yang terjadi di tahun 2023, khususnya melalui penerapan strategi yang tepat untuk merespon dinamika bisnis yang ada. Di bawah pengelolaan Direksi, ABM mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 3,28%, dari AS$1,44 juta di tahun 2022 menjadi AS$1,49 juta pada tahun 2023. Keputusan strategis Direksi dalam melakukan akuisisi 30% PT Golden Energy Mines Tbk ("GEMS") melalui PT Radhika Jananta Raya ("RJR") juga mulai memperlihatkan hasil yang dapat dilihat dari peningkatan volume pemindahan lapisan tanah penutup sebagai bagian dari bisnis kontraktor pertambangan yang justru mampu menopang pertumbuhan pendapatan Perusahaan di tengah penurunan harga batu bara.

Company's performance, covering formulation and monitoring of performance targets, operational and business management, financial performance, investment progress, issue resolution, GCG implementation, environment preservation, social contribution to the surrounding community, Human Resources (HR) management, subsidiary and business group performance, cash flow, capital, as well as technology and information systems within ABM's purview.

The key to achieving the Company's performance lies in the harmonious collaboration between the Board of Commissioners and the Board of Directors. Through the aforementioned meetings, the Board of Commissioners provides guidance and counsel to the Board of Directors, fostering open dialogue on the challenges they encounter in managing the Company. Moreover, the Board of Commissioners oversees the implementation of strategies by the Board of Directors, ensuring alignment with GCG principles and adherence to relevant regulations, the corporate best practice, and corporate values.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF BOARD OF DIRECTORS ON COMPANY MANAGEMENT

In carrying out the aspirations of shareholders regarding supervision over the management of the Company carried out by the Board of Directors, the Board of Commissioners has the role of providing views to the Board of Directors on the accountable and prudent management of the Company, and in accordance with the aspirations of stakeholders and investors. Measuring the achievements of the Board of Directors uses Self-Assessment method through a number of Key Performance Indicators (KPI) and approved by each member of the Board of Commissioners or the Board of Directors. The KPI includes the implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors based on the Company's Articles of Association; implementation of the results of previous GMS decisions; assessment of the Company's health that encompasses 3 (three) aspects, namely financial aspects, operational aspects and administrative aspects; as well as other supporting performance indicators.

Overall, the Board of Commissioners commends the performance achievements shown by the Company throughout 2023. The Board of Commissioners views that the Board of Directors has succeeded in recording positive operational and financial performance amid the trend of normalizing coal prices that occurred in 2023, especially through implementing the right strategy to respond to existing business dynamics. Under the management of the Board of Directors, ABM was able to record revenue growth of 3.28%, from US$1.44 million in 2022 to US$1.49 million in 2023. The Board of Directors' strategic decision to acquire 30% of PT Golden Energy Mines Tbk ("GEMS") through PT Radhika Jananta Raya ("RJR") is also starting to show results that can be seen from the increase in the volume of overburden removal as part of the mining contractor business which is actually able to support the Company's revenue growth amid the decline in coal prices.

Di samping itu, Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi atas konsistensi ABM dalam mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ke dalam proses bisnis Perusahaan. Hal ini tercermin dari keberlanjutan strategi dan program *Environmental, Social and Governance* ("ESG") di tahun 2023, baik yang sifatnya defensif (*resilient*) ataupun *offensive* (*sustainability*). Dalam penerapan program tersebut, Komite ESG berperan besar untuk memastikan berjalannya bisnis ABM sesuai dengan ABM *Vision* 2025.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA TAHUN 2024 YANG DISUSUN DIREKSI

Tahun 2024 akan menjadi tahun yang penting bagi Indonesia. Siklus politik lima tahunan melalui peristiwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, dengan puncaknya melalui pergantian kepemimpinan eksekutif sebagai pengelola administratif pemerintahan dan legislatif sebagai penentu kebijakan publik. Peristiwa ini tidak hanya membawa perubahan besar pada kepemimpinan nasional, tetapi juga akan memberikan dampak yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, khususnya dengan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan belanja fiskal yang agresif dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu.

Menariknya, perhelatan peristiwa besar ini dilakukan ditengah perekonomian dunia yang belum juga menunjukkan perbaikan dengan lompatan luar biasa. Dalam dokumen World Economic Outlook yang dirilis IMF pada Januari 2024, perekonomian dunia di tahun 2024 diproyeksikan hanya mampu tumbuh sebesar 3,1% dan belum menunjukkan titik baliknya pasca perlambatan ekonomi di tahun 2023. Bertahannya perekonomian Amerika Serikat dan beberapa negara besar lainnya, serta krisis geopolitik yang belum juga menunjukkan hasil yang positif, akan menjadi faktor pembentuk dampak negatif atas perekonomian dunia di tahun 2024. Meskipun di sisi lain, pesatnya pasar negara berkembang, kebijakan fiskal Tiongkok yang menunjukkan arah menuju perbaikan, serta inflasi global yang diperkirakan akan melambat menjadi 5,8%, akan membantu perekonomian dunia menemukan keseimbangannya.

Menghadapi prospek perekonomian global yang cukup menantang, Indonesia diharapkan akan mampu mempertahankan kondisi perekonomiannya dengan cukup solid. Pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia diharapkan mampu tetap stabil pada tingkat 5,2%, dengan Pemilu dan Pilkada serta penyerapan APBN diharapkan dapat menjadi *shock absorber* atau peredam atas imbas perekonomian global yang tidak menentu. Inflasi nasional diharapkan mampu terjaga pada kisaran 2,8%, terutama dengan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal.

Dewan Komisaris menyambut baik keberhasilan Direksi dalam menjaga pertumbuhan kinerja Perusahaan di tahun 2023. Keberhasilan ini tentunya akan menjadi faktor fundamental dalam mendorong kinerja Perusahaan di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Dewan Komisaris optimis dengan proyeksi yang disusun oleh Direksi, yang akan selalu berfokus dalam peningkatan *operational excellence* dan penerapan inisiatif-inisiatif strategis lainnya untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Secara khusus Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi

In addition, the Board of Commissioners also expressed appreciation for ABM's consistency in integrating Environmental, Social and Governance principles into the Company's business processes. This is reflected in the sustainability of Environmental, Social and Governance ("ESG") strategies and programs in 2023, both defensive (resilient) and offensive (sustainability). In implementing this program, the ESG Committee plays a major role in ensuring that the ABM business runs in accordance with ABM Vision 2025.

BUSINESS PROSPECTS FOR 2024 PREPARED BY BOARD OF DIRECTORS

The year 2024 holds paramount significance for Indonesia, marked by the five-year political cycle with the General Election (Pemilu) scheduled for February 14, 2024. This electoral event signifies a change in executive leadership as the governmental administrative manager and legislative leadership that is responsible for public policy adjudicator. Beyond its impact on national leadership, the General Election will provide significant impact to the national economy, especially with the increased public consumption and aggressive fiscal spending to support election-related activities.

Remarkably, this pivotal event unfolds amid a global economy yet to exhibit significant recovery. According to the World Economic Outlook (WEO) report released by the IMF in January 2024, global economic growth for 2024 is projected at a modest 3.1%, indicating a continued sluggishness following the economic downturn in 2023. The persistence of economic challenges in the United States and several other major economies, coupled with ongoing geopolitical crises, remains a drag on global economic prospects for 2024. However, the rapid growth of emerging markets, China's fiscal policy reforms, and an expected slowdown in global inflation to 5.8% offer some semblance of balance to the global economy.

Despite confronting daunting global economic prospects, Indonesia is anticipated to maintain a relatively robust economic stance. National economic growth is projected to remain stable at 5.2%, with the General Election, local elections (Pilkada), and effective utilization of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) serving as buffers against the uncertainties of the global economy. Efforts to manage national inflation around 2.8% will be bolstered by leveraging the APBN to mitigate inflationary pressures stemming from climate change and external shocks.

The Board of Commissioners commends the Directors for their achievements in sustaining the Company's growth trajectory in 2023. This success forms a crucial foundation for driving performance in 2024 and beyond. With optimism, the Board of Commissioners endorses the projections laid out by the Directors, emphasizing a steadfast commitment to enhancing operational excellence and executing strategic initiatives to foster sustainable business growth. Moreover, the Board of Commissioners underscores the importance of vigilance in navigating potential disruptions arising from global,

untuk tetap waspada dalam menghadapi disrupsi yang mungkin muncul akibat ketidakpastian global, regional dan dan nasional.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN KEBERLANJUTAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan regulator yang berkepentingan pada pasar modal serta perkembangan dunia usaha Indonesia telah berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip dan praktik GCG sebagai suatu kumpulan nilai yang wajib diemban oleh setiap entitas usaha yang berdomisili di Indonesia. Perusahaan menyambut dengan tangan terbuka atas niat baik dari regulator, terutama karena penerapan GCG terbukti memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan dunia usaha dan iklim investasi.

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan GCG oleh Direksi, Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup ABM terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pengembangan perangkat kebijakan yang terus diperbaharui, hingga evaluasi dan pemantauan GCG, menjadi cerminan komitmen Direksi untuk dapat menerapkan prinsip dan praktik GCG di seluruh elemen operasi dan bisnis Perusahaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi, dan Komite ESG. Komite Audit bekerja sama dengan Audit Internal di bawah Direksi untuk bersama-sama melakukan pengawasan atas operasi dan bisnis ABM dan kelompok usaha, termasuk diantaranya memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik serta pendampingan atas penyusunan laporan keuangan teraudit oleh Akuntan Publik.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Perusahaan dalam mengembangkan konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam kegiatan operasinya. Tumbuh bersama, yang didasari pada hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan serta lingkungan hidup, menjadi catatan penting bagi keberhasilan Perusahaan dalam kelangsungan usahanya di masa-masa mendatang. Dewan Komisaris berharap, seluruh upaya untuk mengembangkan penerapan prinsip GCG dan bisnis keberlanjutan oleh Direksi turut memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ABM yang berkelanjutan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan.

PENILAIAN KINERJA ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Komite Pendukung Dewan Komisaris
Committees Supporting Board of Commissioners

Komite Audit Audit Committee	**Komite Nominasi dan Remunerasi** Nomination and Remuneration Committee	**Komite Investasi** Investment Committee	**Komite ESG** ESG Committee

regional, and national uncertainties, guiding the Board of Directors to remain agile in response.

PERSPECTIVES ON CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The Financial Services Authority (OJK), the Indonesia Stock Exchange (IDX), and regulatory bodies vested in capital market affairs and the advancement of Indonesia's business landscape are staunch advocates for the adoption of Good Corporate Governance (GCG) as an arrangement of principles practices by all Indonesian business entities. Companies wholeheartedly embrace the regulators' noble intentions, recognizing that GCG implementation yields positive outcomes for the sustainability of businesses and the investment climate.

As the overseeing body tasked with supervising the Board of Directors' adherence to GCG standards, the Board of Commissioners observes a continual enhancement in GCG implementation within ABM's realm. The ongoing refinement of policy instruments, coupled with the rigorous evaluation and monitoring of GCG, underscores the Board of Directors' steadfast dedication to embedding GCG principles across all facets of the Company's operations and business activities.

In fulfilling its supervisory mandate, the Board of Commissioners is supported by four auxiliary organs: the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Investment Committee, and ESG Committee. The Audit Committee collaborates with the Internal Audit department under the purview of the Board of Directors, jointly overseeing ABM's operations and business activities. It also offers recommendations for the engagement of a Public Accountant and provides assistance in preparing audited financial reports.

Furthermore, the Board of Commissioners expresses profound admiration for the Company's commitment to advancing the concept of Sustainable Development in its operational endeavors. Embracing a "grow together" ethos, rooted in fostering harmonious relationships with stakeholders and the environment, underscores the Company's pathway to future success. The Board of Commissioners anticipates that the Board of Directors' endeavors to enhance GCG principles and sustainability business will serve as robust pillars for ABM's sustainable growth, fostering mutual prosperity among all stakeholders.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING ORGANS UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Keempat organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi, dan Komite ESG, memberikan masukan yang sangat berarti bagi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Keaktifan dan gelaran rapat masing-masing komite memberikan rekomendasi yang dapat digunakan Dewan Komisaris untuk menyampaikan arahan dan nasihat kepada Direksi.

Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja organ pendukung dengan menggunakan sistem *self-assessment*, *peer evaluation*, atau dengan sistem lain untuk diputuskan dalam rapat internal Dewan Komisaris. Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan kinerja komite-komite tersebut sepanjang tahun buku dengan pencapaian target yang telah dicanangkan dalam rencana kerja tahunan.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi, dan Komite ESG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan penilaian kinerja yang ditetapkan. Izinkan Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komite yang telah memberikan masukan berharga.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN DAN PENGELOLAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS) PERUSAHAAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS PERUSAHAAN

Komitmen ABM dalam menerapkan prinsip GCG dilakukan melalui pembentukan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk dapat melaporkan kecurangan yang terjadi dalam proses bisnis ABM. Sistem ini juga memungkinkan pelapor untuk terlindungi identitasnya, selama laporan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sistem WBS yang dimiliki ABM, Dewan Komisaris berperan penting sebagai pucuk pimpinan dalam keorganisasian pengelola WBS Perusahaan. Keberadaan WBS Perusahaan didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/ABM-BOCRES/IV/2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pemberlakuan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS), di mana melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 024/ABM-RESBOC/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018, Dewan Komisaris menunjuk Komite Audit untuk menjadi Tim Pengelola WBS Perusahaan. Sebagai pihak yang memegang fungsi pengawasan, keberadaan WBS Perusahaan di bawah Dewan Komisaris menentukan praktik pelaporan yang independen, yang diharapkan mampu memberikan penguatan bagi dasar-dasar penerapan GCG yang kokoh.

The four supporting organs of the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Investment Committee, and ESG Committee, offer significant input for the implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners. The activities and meetings conducted by each committee yield recommendations that can guide the Board of Commissioners in providing direction and advice to the Board of Directors.

At least once a year, the Board of Commissioners evaluates the performance of these supporting organs through a self-assessment system, peer evaluation, or other systems determined during an internal meeting of the Board of Commissioners. This assessment involves comparing the committees' performance throughout the fiscal year with the targets outlined in the annual work plan.

Based on the results of the 2023 assessment, the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Investment Committee, and ESG Committee have diligently fulfilled their duties and responsibilities in accordance with established procedures and performance assessments. The Board of Commissioners extends its deepest appreciation and gratitude to all committees for their valuable input.

VIEWS ON IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF THE COMPANY'S WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) AND THE BOARD OF COMMISSIONERS' ROLE

ABM is committed to implementing GCG principles, which is manifested through the establishment of a Whistleblowing System (WBS). This system enables stakeholders to report instances of fraud occurring within ABM's business processes. In addition, it ensures the protection of the reporter's identity, provided that the report is substantiated.

Within ABM's WBS framework, the Board of Commissioners assumes a pivotal role as the top leadership overseeing the Company's WBS. The inception of the Company's WBS is grounded in the Decree of the Board of Commissioners No. 013/ABM-BOCRES/IV/2013, dated April 1, 2013, outlining the Whistleblowing System (WBS) Policy. Subsequently, through the Decree of the Board of Commissioners No. 024/ABM-RESBOC/VII/2018, dated July 5, 2018, the Board of Commissioners appointed an Audit Committee to serve as the Company's WBS Management Team. As the entity tasked with supervisory functions, the Company's WBS under the purview of the Board of Commissioners facilitates independent reporting practices, thereby reinforcing the robust implementation of GCG principles.

Di sepanjang tahun 2023 terdapat 37 laporan yang masuk melalui WBS yang dibentuk Tata Kelola Perusahaan. Dari ke-37 laporan tersebut, 1 (satu) laporan masih berstatus terbuka dan dalam proses, sedangkan 36 laporan lainnya berhasil ditindaklanjuti dengan status selesai. Dewan Komisaris berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan WBS ini, khususnya dalam memperkuat penerapan GCG di lingkup ABM.

Throughout 2023, a total of 37 reports were submitted through the WBS system established by the Company. Among these, 1 report remains open and under review, while the remaining 36 reports have been successfully addressed and closed. The Board of Commissioners anticipates that stakeholders will leverage the WBS to enhance GCG implementation within the ABM framework.

INFORMASI TENTANG SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Demikian pula tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sejak 31 Desember 2023 hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini.

INFORMATION REGARDING BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

There were no changes to the composition of the Board of Commissioners throughout 2023. Similarly, there have been no changes to the Board's composition from December 31, 2023 to the date of this annual report.

Susunan Dewan Komisaris ABM
Susunan Dewan Komisaris ABM

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office
Rachmat Mulyana Hamami	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan penutupan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) on May 7, 2021 until the closing of the GMS scheduled for 2024
Mivida Hamami	Komisaris Commissioner	
Arief Tarunakarya Surowidjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner	
Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen Independent Commissioner	

PENUTUP

Kepada seluruh pemegang saham dan investor, Dewan Komisaris menghaturkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian pula kepada regulator dan seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. Kepada Direksi dan karyawan, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan rasa bangga atas kerja keras yang telah ditunjukkan di tengah situasi yang masih diliputi ketidakpastian. Semoga seluruh jalin kelindan yang harmoni ini mampu menjadi dasar bagi ABM untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan, dan mampu terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan.

CLOSING STATEMENT

The Board of Commissioners extends heartfelt appreciation to all shareholders and investors for their unwavering trust. We also express profound gratitude to regulators and all stakeholders for their steadfast support. To our Directors and employees, we commend your dedication and perseverance in navigating through uncertain times. Your hard work is a source of pride for the Board of Commissioners. We believe that nurturing these harmonious relationships will serve as the cornerstone for ABM's sustainable growth and enable us to continually deliver value to our shareholders and stakeholders alike.

Jakarta, 22 April 2024
Jakarta, April 22, 2024
Atas nama Dewan Komisaris PT ABM Investama Tbk
On behalf of the Board of Commissioners of PT ABM Investama Tbk



RACHMAT MULYANA HAMAMI
Komisaris Utama
President Commissioner

LAPORAN DIREKSI
Board of Directors Report



> ***Operational Excellence*** **selalu menjadi strategi Perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga efektivitas operasional**
>
> Operational Excellence has always been the Company's strategy to maximize efficiency and maintain operational effectiveness.

Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama | President Director

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,
Dear Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Mewakili Direksi dan seluruh Insan ABM, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja PT ABM Investama Tbk untuk tahun buku 2023. Pencapaian kinerja perusahaan di tahun 2023 mencerminkan komitmen Perusahaan, untuk dapat menumbuhkembangkan bisnisnya dan terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

KONDISI PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Perekonomian Indonesia di tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31% berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, pertumbuhan nasional ini jauh di atas perekonomian dunia, di mana International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO) edisi Oktober 2023 memroyeksikan perekonomian global tahun 2023 tumbuh hanya sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Berbagai tantangan seperti inflasi yang masih membayangi akibat rentannya pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19, serta isu krisis geopolitik, memberikan hambatan yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian dunia.

Mengutip data BPS, sektor lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,13%, meningkat dari pertumbuhan di tahun 2022 sebesar 4,38%. Kondisi perekonomian yang berangsur-angsur membaik menjadi salah satu daya dorong bagi sektor ini untuk dapat tumbuh berkembang, di samping tentunya kondisi pertambangan Indonesia yang menunjukkan kinerja cukup baik.

Permintaan serta kebutuhan akan batu bara masih memperlihatkan potensi pertumbuhan, khususnya di beberapa negara Asia seperti Tiongkok dan India yang berkontribusi besar terhadap konsumsi batu bara global pada tahun 2023. Harga batu bara di tahun 2023 menunjukan tren penurunan dari tahun sebelumnya dengan rata-rata harga *Newcastle Coal* tahun 2023 menyentuh AS$171,7 per ton, walau harga tersebut masih di atas harga rata-rata batu bara dari dua tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tak lepas dari rentannya pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2023 terjadi normalisasi persediaan dan permintaan batu bara global pasca ledakan permintaan di tahun 2022.

Di lingkup nasional, produksi batu bara melanjutkan peningkatannya dengan jumlah produksi tercatat sebesar 775,2 juta ton, melebihi target yang ditetapkan sebesar 695 juta ton, dan lebih tinggi dibandingkan produksi batu bara di tahun sebelumnya yang mencapai 687 juta ton. Konsumsi domestik juga konsisten mengalami peningkatan disebabkan batu bara yang masih menjadi sumber energi paling umum di Indonesia.

I am pleased to share with you the performance report of PT ABM Investama Tbk for the financial year 2023, on behalf of the Board of Directors and all ABM employees. The Company's performance throughout 2023 underscores our dedication to expanding our business and consistently delivering value to our shareholders and stakeholders.

ECONOMIC AND INDUSTRIAL CONDITIONS

In 2023, Indonesia's economy saw a growth rate of 5.05%, slightly lower than the 5.31% growth recorded in 2022, according to data from Statistics Indonesia (BPS). This growth outpaced the global economy, as indicated by the October 2023 edition of the World Economic Outlook (WEO) from the International Monetary Fund (IMF), which projected global economic growth for 2023 at only 3%, down from 3.5% in 2022. Several challenges persist, including lingering inflation due to the continued vulnerability of global commodity supplies following the COVID-19 pandemic, along with ongoing geopolitical crises, all of which pose significant hurdles to global economic development.

Based on BPS data, the Mining and Quarrying sector experienced a growth rate of 6.13%, marking an improvement from the 4.38% growth observed in 2022. This growth can be attributed to the steadily improving economic environment, coupled with the strong performance of the Indonesian mining sector.

The demand for coal continues to exhibit growth potential, especially in key Asian markets like China and India, which made significant contributions to global coal consumption in 2023. Despite this, coal prices in 2023 followed a downward trend compared to the previous year, with the average price of Newcastle Coal in 2023 reaching US$171.7 per ton. However, this price remained higher than the average coal prices from the preceding two years. This decline can be attributed to the global commodity supply's vulnerability post-COVID-19, as 2023 saw a normalization of global coal supply and demand following the surge in demand experienced in 2022.

On a national scale, coal production saw a continuous rise, reaching a total of 775.2 million tons, surpassing the targeted amount of 695 million tons and showing an increase from the previous year's production of 687 million tons. Concurrently, domestic consumption continued to grow steadily, reflecting coal's predominant role as the primary energy source in Indonesia.

Di tahun 2023, industri logistik mencatatkan pertumbuhan *double digit* yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejalan dengan tingginya pertumbuhan di sektor Transportasi dan Pergudangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya volume perdagangan di Indonesia. Himpunan Alat Berat Indonesia (Hinabi) mencatat produksi alat berat di Indonesia mencapai 8.806 selama tahun 2023, atau hampir sama dengan tahun 2022 yang mencapai 8.826 unit. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan kontrak pertambangan dan alat berat, yang pada akhirnya mendorong permintaan jasa logistik dan kegiatan perbaikan juga perawatan alat-alat pertambangan.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN PROSES IMPLEMENTASI STRATEGI

Strategi dan kebijakan strategis ABM disusun oleh Direksi yang tertuang dalam target dan rencana kerja dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Proses penyusunan strategi dan kebijakan strategis ini melibatkan berbagai unit bisnis, di mana setiap unit bisnis memiliki program dan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan dan jangka panjang. Setelahnya akan diselenggarakan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas lebih lanjut atas target dan rencana kerja tersebut untuk dapat disetujui.

Rumusan strategi dan kebijakan strategis ini ditetapkan dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Perusahaan. Direksi bersama jajaran manajemen, melalui pengawasan dan masukan dari Dewan Komisaris, terus melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan strategis ABM serta implementasinya di seluruh level unit bisnis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan strategis Perusahaan masih relevan dengan perkembangan bisnis dan penerapannya telah berjalan untuk dapat mencapai tujuan dan target Perusahaan.

Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh level unit bisnis memahami serta menerapkan strategi Perusahaan secara konsisten. Untuk itu, Direksi terlibat langsung dalam pengawasan implementasi strategi serta mendorong seluruh unit bisnis menerapkan ide inovatif yang dapat mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.

KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN DI TAHUN 2023

Untuk merespon kondisi perekonomian yang cukup fluktuatif, *Operational Excellence* selalu menjadi strategi Perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi dan menjaga efektivitas operasional dengan aspek keselamatan pekerja sebagai prioritas utama. Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga ekosistem usaha yang dimilikinya dengan terus mengedepankan sinergi di Grup ABM. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan berfokus dalam meningkatkan manajemen permodalan untuk dapat mencapai target kinerja keuangan yang telah ditetapkan. Perusahaan sebagai pelaku investasi terkemuka dalam bidang energi, senantiasa mengkaji portofolio investasi secara aktif untuk memastikan nilai tambah dan *return* yang maksimal atas investasi tersebut, sejalan dengan strategi keberlanjutan yang dijalankan Perusahaan.

In 2023, the logistics sector experienced robust double-digit growth, propelled by Indonesia's economic expansion. This growth aligns with the significant uptick observed in the Transportation and Warehousing sector, driven by the escalating volume of trade within Indonesia. According to the Heavy Equipment Manufacturer Association of Indonesia (Hinabi), heavy equipment production in Indonesia remained steady, with 8,806 units produced in 2023, almost identical to the 8,826 units produced in 2022. This stability is attributed to the increased contracts in mining and heavy equipment, consequently spurring demand for logistics services and the maintenance and repair of mining equipment.

ROLE OF BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION PROCESS

ABM's strategic strategies and policies are crafted by the Board of Directors as targets and operational plans, which are then endorsed by the Board of Commissioners. This process involves collaboration across different business units, each of which develops a one-year program and work plan alongside long-term objectives. Subsequently, a Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors convenes to delve deeper into these targets and plans before granting approval.

The formulation of these strategic strategies and policies is guided by the Company's Vision and Mission. The Board of Directors and management, with oversight and input from the Board of Commissioners, conduct regular evaluations of ABM's strategic strategies and policies, along with their implementation across all business units. This ongoing assessment ensures that the Company's strategies and policies remain aligned with evolving business dynamics, and their execution is on track to meet the Company's goals and targets.

The Board of Directors takes an active role in ensuring a consistent understanding and implementation of the Company's strategy across all levels of business units. The Board directly oversees the strategy's implementation and encourage the adoption of innovative ideas within all business units to support the achievement of the Company's goals.

COMPANY STRATEGIC POLICY IN 2023

To respond to the fluctuating economic conditions, Operational Excellence has always been the Company's strategy to maximize efficiency and maintain operational effectiveness with worker safety as the top priority. The Company always strives to maintain its business ecosystem by continuing to prioritize synergy within the ABM Group. Throughout 2023, the Company focused on improving its capital management to achieve its financial performance targets. As a leading investment player in the energy sector, the Company continues to actively review its investment portfolio to ensure maximum added value and return on investment, in line with the Company's sustainability strategy.

Di tahun 2023, Perusahaan membentuk Direktorat baru langsung di bawah Direktur Utama yaitu "*Logistics, Engineering & New Businesses*" (LENB), yang bertujuan untuk memperkuat sinergi dan dukungan terhadap bisnis logistik, rekayasa industri, seperti yang telah dilakukan Perusahaan sebelumnya dengan memperkuat sinergi pada rantai nilai pertambangan (*Mining Value Chain* - MVC). Direktorat baru ini juga bertanggung jawab untuk melakukan studi, monitoring dan pengembangan portofolio bisnis Perusahaan untuk bisnis logistik, rekayasa industri dan energi terbarukan, serta mencari sumber-sumber bisnis baru yang dapat menyeimbangkan portofolio bisnis pertambangan.

KENDALA DAN PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023

Grup ABM mencatatkan kinerja finansial yang solid selama periode 2023 yang dihasilkan dari pencapaian operasional yang kuat. Secara umum, seluruh anak usaha Perusahaan membukukan kinerja operasional yang baik. Kinerja operasional yang baik terutama terlihat pada volume OB *removal yang* mencapai 276,6 juta BCM, atau 6,3% diatas target 2023 dan tercatat sebagai pencapaian terbaik CK selama ini. Sementara itu, CKB Logistics mencatatkan *On Time Delivery* (OTD) sebesar 94,67% dan *Asset Utilization* sebesar 96,49%, di mana keduanya membukukan pencapaian di atas target sebesar 90%. Selain itu, SSB juga berhasil mencatatkan pencapaian *Productive Hours* sebesar 2,3 juta jam atau 28% di atas target. Pada tahun 2023 ini, performa keselamatan kerja Grup ABM juga memperoleh hasil yang sangat baik tanpa adanya kecelakaan kerja yang berakibat kematian (*fatality*) selama menjalankan kegiatan usaha.

Pencapaian kinerja operasional yang baik tersebut merupakan hasil dari komitmen dan usaha seluruh anak usaha Perusahaan dalam menerapkan *operational excellence*. Pencapaian produksi bulanan OB *removal* tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2023 yaitu sebesar 26,7 juta BCM yang merupakan salah satu hasil dari implementasi *Mining Value Chain* (MVC) yang efisien. *Physical Availability* (PA) atau ketersediaan fisik unit-unit alat berat CK mencapai 90%, atau mengalami peningkatan performa dalam 5 tahun terakhir. Berbagai program untuk meningkatkan PA ini telah dilakukan, seperti penerapan *predictive* dan *preventive equipment maintenance* serta pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten.

Grup CKB berhasil melakukan optimalisasi rute logistik sehingga memberikan efisiensi biaya bagi para pelanggannya. Selain itu, CKB Logistics juga berhasil melakukan ekspansi dan meningkatkan volume perdagangan melalui pembukaan beberapa fasilitas logistik dan pergudangan di Kawasan Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Kawasan Indonesia Timur lainnya sehingga memudahkan lalu lintas logistik dan memangkas rantai pasokan dari dan ke dalam area pertambangan di sekitar area tersebut.

Realisasi *On-Time and In-Full Delivery* (OTIF) dari SSB menunjukkan tren yang semakin positif dikuartal 4 tahun 2023 sehingga memberikan kepuasan yang tinggi dari para pelanggannya. Selama tahun 2023, SSB juga berhasil memaksimalkan kesempatan untuk memperluas pelanggan dan pelayanannya di *workshop* Sebamban yang baru diresmikan di bulan November tahun 2022. Selain itu, performa *On-Time Delivery* (OTD) SSB meningkat dengan baik, seiring dengan implementasi *Sales and Operation Planning* (S&OP)

In 2023, the Company introduced a new Directorate directly reporting to the President Director, named "Logistics, Engineering & New Businesses" (LENB). This initiative is designed to enhance synergies and support for logistics and industrial engineering businesses, mirroring the Company's success in strengthening synergies within the mining value chain (MVC). The LENB Directorate also oversees studies, monitors, and develops the Company's business portfolio in logistics, industrial engineering, and renewable energy sectors. Additionally, it seeks out new ventures to diversify and balance the mining business portfolio.

ADVERSITY AND TARGET ACHIEVEMENT IN 2023

During the 2023 period, the ABM Group demonstrated strong financial performance, driven by robust operational achievements across all subsidiaries. Notably, the OB removal volume exceeded expectations, reaching 276.6 million BCM, marking a 6.3% increase over the 2023 target and representing CK's best performance to date. Additionally, CKB Logistics achieved an On Time Delivery (OTD) rate of 94.67% and an Asset Utilization rate of 96.49%, both surpassing the 90% target. Furthermore, SSB achieved a remarkable 2.3 million productive hours, exceeding the target by 28%. In terms of work safety, the ABM Group achieved exceptional results in 2023, with no work-related fatalities recorded during business activities.

The attainment of excellent operational performance reflects the dedication and endeavors of all the Company's subsidiaries in upholding operational excellence. A notable highlight was the highest monthly OB removal production achieved in August 2023, totaling 26.7 million BCM. This accomplishment is attributed to the efficient implementation of the Mining Value Chain (MVC). Additionally, the Physical Availability (PA) of CK heavy equipment units has reached 90%, marking a significant performance improvement over the past five years. Various initiatives have contributed to this improvement, including the implementation of predictive and preventive equipment maintenance programs and the investment in competent human resources.

The CKB Group has successfully streamlined logistics routes, leading to cost efficiencies for its clients. Additionally, CKB Logistics has expanded its trade volume by establishing multiple logistics and warehousing facilities across Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and other regions in Eastern Indonesia. This strategic expansion has not only facilitated smoother logistics operations but also shortened supply chains to and from mining sites in these regions.

SSB experienced a notably positive trend in On-Time and In-Full Delivery (OTIF) realization during the fourth quarter of 2023, resulting in heightened customer satisfaction. Throughout 2023, SSB effectively capitalized on opportunities to expand its customer base and services at the newly inaugurated Sebamban workshop in November 2022. Furthermore, SSB's On-Time Delivery (OTD) performance significantly improved, supported by the implementation of Sales and Operation Planning (S&OP). This integration effectively

yang berhasil mengintegrasikan antara permintaan pelanggan dan ketersediaan material sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu dan efisiensi biaya kepada pelanggan. Hal tersebut terlihat dari pencapaian OTD SSB secara keseluruhan diakhir tahun 2023 tercatat sebesar 94,00%.

Dari sisi investasi saham, Perusahaan mencatatkan laba pada entitas asosiasi di tahun 2023 sebesar AS$143,9 juta, atau meningkat dari AS$66,6 juta di tahun 2022, yang berasal dari investasi 20% saham pada PT Golden Energy Mines Tbk, melalui salah satu anak usahanya yaitu PT Radhika Jananta Raya ("RJR"). Sedangkan untuk investasi 10% saham pada PT Multi Harapan utama, Perusahaan melalui PT Agata Nugraha Nastari ("ANN") mencatatkan kenaikan pendapatan dividen menjadi AS$25 juta, dari sebesar 2022 : AS$22,5 juta di tahun 2022.

Seluruh kinerja dan inovasi yang dilakukan Grup ABM ini diakui pula oleh pihak eksternal, di mana SSB dan CKB Logistics masing-masing mendapatkan penghargaan OPEXCON, yaitu penghargaan bagi perusahaan yang sukses melakukan inovasi di kategori manufaktur untuk SSB dan kategori jasa untuk CKB Logistics.

Pencapaian di atas berimbas positif pada kinerja keuangan Perusahaan. ABM mampu mencatatkan pendapatan sebesar AS$1,49 miliar di tahun 2023 atau 9,63% di atas target. Kenaikan pendapatan ini terutama didorong oleh bisnis kontraktor pertambangan yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, laba tahun berjalan tercatat sebesar AS$289,00 juta di tahun 2023 atau 252,57% di atas target.

PENERAPAN PRINSIP ESG SEBAGAI BAGIAN DARI TATA KELOLA PERUSAHAAN UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA

Salah satu fokus penting dalam transformasi organisasi Perusahaan adalah penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) sebagai bagian dari pengelolaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Menyandang status sebagai perusahaan terbuka, ABM memiliki kewajiban yang besar untuk melaksanakan pengelolaan bisnis dengan selalu memperhatikan keseimbangan lingkungan, kesejahteraan sosial dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, Manajemen telah menuangkannya kedalam skema organisasi dan perangkat kebijakan, maupun evaluasi dan pemantauan. Penerapan prinsip-prinsip GCG atau *Governance Principles* terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

aligns customer demand with material availability, enhancing timeliness and cost efficiency for customers. As a testament to these efforts, SSB achieved an impressive overall OTD rate of 94.00% by the end of 2023.

Regarding investment in shares, the Company recorded profit in associates in 2023 amounting to US$143.9 million, an increase from US$66.6 million in 2022, which came from a 20% investment in PT Golden Energy Mines Tbk, through one of its subsidiaries, PT Radhika Jananta Raya ("RJR"). As for the 10% investment in PT Multi Harapan Utama, the Company through PT Agata Nugraha Nastari ("ANN") recorded an increase in dividend income to US$25 million, from 2022: US$22.5 million in 2022.

The ABM Group's performance and innovation have been acknowledged by external entities, with both SSB and CKB Logistics receiving the prestigious OPEXCON award. This award recognizes companies that demonstrate successful innovation, with SSB honored in the manufacturing category and CKB Logistics in the services category.

The aforementioned accomplishments had a favorable impact on the Company's financial performance. ABM achieved a revenue of US$1.49 billion in 2023, surpassing the target by 9.63%. This rise in revenue was primarily attributed to the notable growth in the mining contractor business compared to the preceding year. Additionally, the profit for the year amounted to US$289.00 million in 2023, exceeding the target by 252.57%.

IMPLEMENTATION OF ESG PRINCIPLES AS PART OF CORPORATE GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE BUSINESS

One of the key priorities in the Company's organizational transformation is the adoption of ESG (Environmental, Social, Governance) principles as integral components of Good Corporate Governance (GCG) practices. As a publicly traded entity, ABM holds significant responsibility in managing its business operations while prioritizing environmental sustainability, social welfare, and adherence to relevant laws and regulations.

In integrating GCG principles, Management has embedded them into organizational frameworks, policy instruments, and performance assessment mechanisms. The application of GCG principles encompasses two main facets: Governance Structure and Governance Process. These aspects are interconnected and ongoing, culminating in the desired Governance Outcome.

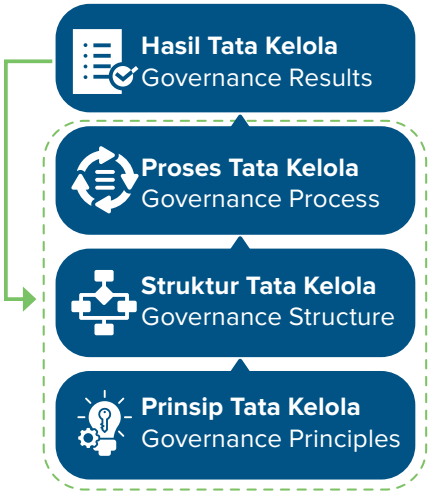

Manajemen risiko dan pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan Perusahaan. ABM terus melakukan pemetaan berbagai risiko yang muncul sebagai dampak, baik risiko dari eksternal maupun internal. Pemetaan ini penting, mengingat potensi risiko operasi, bisnis dan keuangan harus ditindaklanjuti dengan serangkaian strategi yang tepat agar kelangsungan usaha dapat terjaga dengan baik.

Risk management and internal control are integral components of Company management. ABM consistently identifies and assesses various risks, encompassing both external and internal factors. This risk mapping process is crucial, as it enables the development of appropriate strategies to address potential operational, business, and financial risks, ensuring robust business continuity.

Secara khusus manajemen menekankan tentang pentingnya integritas sebagai kunci utama penerapan prinsip dan praktik tata kelola yang baik, khususnya bagi seluruh Insan ABM. Manajemen memiliki komitmen yang tinggi untuk terus membudayakan integritas sebagai faktor fundamental dalam mewujudkan etika bisnis yang baik. Hanya dengan integritas, organisasi Perusahaan akan dapat mencapai visinya.

Management places significant emphasis on integrity as the cornerstone of implementing sound governance principles and practices, particularly among all ABM employees. There is a strong commitment from management to foster a culture of integrity, recognizing it as a fundamental element in upholding good business ethics. It's understood that only through integrity can the Company's organization realize its vision effectively.

Selama tahun 2023, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip ESG (*Environmental, Sosial, Governance*) dalam setiap aktivitasnya. Tercatat total hampir 100 initiatives ESG telah dikerjakan oleh Perusahaan dan anak usahanya sampai dengan tahun 2023, seperti implementasi *solar panel* pada beberapa *site* pertambangan, memperluas area mangrove dan arboretum (*conservation area*) di sekitar area kerja Grup ABM, serta melakukan implementasi ISO 37001 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada anak usaha Perusahaan.

Throughout 2023, the Company remained dedicated to enhancing the integration of ESG (Environmental, Social, Governance) principles across all its operations. Notably, nearly 100 ESG initiatives were undertaken by the Company and its subsidiaries by 2023. These initiatives included installing solar panels at various mining sites, expanding conservation areas such as mangroves and arboretums around the ABM Group's work areas, and implementing ISO 37001 - Anti-Bribery Management Systems in the Company's subsidiaries.

Atas kinerja yang baik selama tahun 2023 dan komitmen kuat Perusahaan dalam menjalankan prinsip ESG tersebut telah menghasilkan sejumlah penghargaan ESG dari berbagai institusi, diantaranya adalah ABM masuk sebagai *Top 50 companies* dari daftar *Fortune 100 Indonesia's Biggest Company* yang diberikan oleh *Fortune Indonesia, Corporate Governance Award 2023* untuk kategori *Best Non-Financial Sector* dari *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICD),* dan *Best Investortrust Companies 2023* untuk kategori *The Best Five Investortrust Companies* dari *Investortrust.*

The Company's exceptional performance in 2023, coupled with its steadfast commitment to implementing ESG principles, has garnered several prestigious ESG awards from esteemed institutions. ABM was recognized in the Top 50 companies on Fortune Indonesia's Biggest Company list, awarded by Fortune Indonesia. Additionally, the Company received the Corporate Governance Award 2023 in the Best Non-Financial Sector category from the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICD). Furthermore, ABM was honored as one of the Best Investortrust Companies 2023 in the Best Five Investortrust Companies category by Investortrust.

Untuk skala regional dan internasional, ABM juga berhasil meraih status *Company of the Year 2023* dari *APAC Business Headlines,* serta mendapatkan *Gold Rating* pada ajang *Asia Sustainability Reporting Rating 2023,* yang merupakan bentuk pengakuan atas komitmen ABM dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.

ABM's accomplishments extend to regional and international recognition, with the Company earning the prestigious Company of the Year 2023 title from APAC Business Headlines. Furthermore, ABM received a Gold Rating at the Asia Sustainability Reporting Rating 2023 event, underscoring the Company's dedication to sustainable business practices.

TANTANGAN SERTA PROSPEK USAHA DAN RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN TAHUN 2024

Melalui dokumen WEO yang dirilis IMF pada April 2024, perekonomian global tahun 2024 diprediksi hanya tumbuh 3,2%, tumbuh melandai dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 mencanangkan pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 5,2%, yang terutama ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah seiring dengan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Transisi pemerintahan diharapkan akan memberikan gairah tersendiri bagi industri dan pelaku usaha.

Ekspektasi tinggi konsumen untuk mendapatkan jasa layanan yang cepat, tepat waktu dan berbiaya hemat menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Grup ABM secara umum. Persaingan di bisnis *freighter* merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh CKB Logistics, seiring dengan mulai pulihnya jalur pengiriman kargo via penerbangan komersial. Adapun tantangan yang dihadapi oleh SSB adalah terkait pembatasan impor besi baja yang akan berdampak pada rendahnya volume produksi. Dari sisi kontrak pertambangan, bidang *safety* dan *operational excellence* adalah dua hal utama yang menjadi ekspektasi utama pelanggan. Terhadap hal tersebut, Grup ABM telah mengantisipasi dengan melakukan beberapa tindakan mitigasi seperti pemanfaatan teknologi digital dan otomasi proses untuk meningkatkan *customer experience*, meningkatkan efisiensi biaya untuk dapat memberikan harga layanan yang lebih kompetitif, serta menjajaki aliansi strategis dengan mitra usaha untuk memperluas jaringan operasional.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan proyeksi perekonomian Indonesia yang cukup solid, Direksi memperkirakan prospek industri batu bara masih akan menunjukkan tren positif di tahun 2024. Direksi memandang permintaan batu bara masih akan tetap tinggi, baik dari sisi pasar domestik ataupun internasional. Sifat batu bara yang masih menjadi sumber energi terbesar dan termurah, akan menjadi faktor penting dalam perkembangan komoditas batu bara.

Perusahaan akan terus memperkuat sinergi di MVC dengan tetap berupaya memperkuat operasional tambang batu bara, mencari sumber daya baru, mengembangkan talenta yang mumpuni dan penerapan teknologi pertambangan yang sesuai. Perusahaan tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan secara organik untuk bisnis logistik, manufaktur dan energi terbarukan. Perusahaan juga tengah mencari sumber pendapatan baru yang dapat melengkapi bisnis inti perusahaan sebagai bagian dari rencana jangka panjang Perusahaan untuk diversifikasi usaha.

Keamanan dan keselamatan kerja adalah hal yang penting bagi perusahaan dan pelanggan sehingga ABM menetapkan tahun 2024 sebagai tahun keselamatan (*safety year*). Kedepan, ABM akan terus memastikan dan menjalankan program keselamatan kerja bagi para karyawan dan lingkungan sekitarnya, agar dapat meminimalkan tingkat frekuensi waktu kerja yang hilang (*Lost Time Frequency Rate* - LTFR) dan mencegah *fatality*.

CHALLENGES, COMPANY BUSINESS PROSPECT, AND STRATEGIC PLANS IN 2024

As per the WEO document released by the IMF in April 2024, the global economy is projected to experience modest growth of 3.2% in 2024, reflecting a slowdown compared to the economic expansion witnessed in 2023. Conversely, the Indonesian Government's Draft State Revenue and Expenditure Budget (RAPBN) for 2024 anticipates a national economic growth rate of 5.2%. This growth is primarily bolstered by increased household consumption and government expenditure aligned with the upcoming General Election (Pemilu) and Regional Head Election (Pilkada). The government transition is expected to inject enthusiasm among industry and business stakeholders.

Consumers' heightened expectations for fast, timely, and cost-effective services pose a significant challenge for the ABM Group as a whole. Specifically, CKB Logistics faces competition in the freighter business, especially with the recovery of cargo delivery routes via commercial flights. SSB, on the other hand, grapples with challenges related to restrictions on steel imports, which may impact production volumes. In the realm of mining contracts, customers primarily expect safety and operational excellence. In response to these challenges, the ABM Group has proactively taken several mitigating measures. These include leveraging digital technology and process automation to enhance the customer experience, improving cost efficiency to offer more competitive service prices, and exploring strategic alliances with business partners to expand operational networks.

The Board of Directors anticipates a positive trend in the coal industry for 2024 despite global economic challenges, buoyed by Indonesia's solid economic projections. The Directors foresee continued high demand for coal in both domestic and international markets. The inherent advantages of coal, being the largest and most affordable energy source, will remain pivotal in driving the development of coal commodities.

The Company is committed to enhancing synergies within the Mining Value Chain (MVC) by focusing on strengthening coal mining operations, exploring new resources, nurturing skilled talent, and adopting suitable mining technologies. Additionally, there is a continued effort to foster organic growth across logistics, manufacturing, and renewable energy sectors. Moreover, the Company is actively seeking new revenue streams that align with its core business, as part of a long-term plan for business diversification.

Designating 2024 as the year of safety reflects ABM's strong commitment to prioritizing work safety and security for both employees and customers. Moving forward, ABM will persist in implementing comprehensive work safety programs aimed at minimizing the frequency of lost working time (Lost Time Frequency Rate - LTFR) and preventing fatalities.

Di tahun 2024, Perusahaan akan berfokus dalam meningkatkan sinergi, pertumbuhan bisnis, implementasi ESG dan penguatan kesiapan organisasi untuk mencapai target kinerja keuangan dan operasional yang telah dicanangkan untuk tahun mendatang.

In 2024, the Company will concentrate on enhancing synergy, fostering business growth, implementing ESG initiatives, and bolstering organizational readiness to attain the financial and operational performance targets set for the upcoming year.

INFORMASI TENTANG SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan Direksi. Demikian pula tidak terdapat perubahan susunan Direksi sejak 31 Desember 2023 hingga ditandatanganinya laporan tahunan ini.

INFORMATION ABOUT THE COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2023, there were no changes in the composition of the Board of Directors. Similarly, there were no changes in the Board of Directors' composition from December 31, 2023, until the signing of this annual report.

Susunan Direksi ABM
Composition of the Board of Directors of ABM

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office
Achmad Ananda Djajanegara	Direktur Utama President Director	RUPS Tahunan tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 Annual GMS on May 7, 2021 until the GMS which will be held in 2024.
Adrian Erlangga	Direktur Director	
Haris Mustarto	Direktur Director	

AKHIR KATA

Dengan seluruh tantangan yang telah berhasil dilalui, izinkan Direksi mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas kelancaran perjalanan operasi dan bisnis ABM dan kelompok usaha. Direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan investor atas kepercayaan yang telah diberikan. Direksi juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan kemitraan strategis dalam pengelolaan operasi dan bisnis Perusahaan. Demikian pula kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, Direksi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah tercipta.

Kepada seluruh insan ABM, izinkan Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja cerdas yang telah diperlihatkan di sepanjang tahun 2023. Seluruh pencapaian ini akan menjadi fondasi bagi Perusahaan untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

FINAL REMARKS

The Board of Directors extends heartfelt gratitude to God Almighty for guiding ABM and its business group through successful navigation of various challenges. We also express deep appreciation to all shareholders and investors for their trust and confidence. The Board acknowledges and respects the guidance and strategic partnership provided by the Board of Commissioners in managing the Company's operations and business. Additionally, the Directors express gratitude to regulators, customers, suppliers, and business partners for their cooperation and collaboration, which has been instrumental in the Company's journey.

The Board of Directors extends its utmost appreciation to all ABM employees for their hard work and dedication demonstrated throughout 2023. These achievements serve as the foundation for the Company to optimize its potential and strive for even greater performance in the future.

Jakarta, 22 April 2024
Jakarta, April 22, 2024
Atas nama Direksi dan seluruh Insan PT ABM Investama Tbk
On behalf of the Board of Directors and the entire Personnel of PT ABM Investama Tbk



ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA
Direktur Utama
President Director

TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN
Annual Report Responsibility

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT ABM Investama Tbk

Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT ABM Investama Tbk. Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT ABM Investama Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama
President Commissioner

Mivida Hamami
Komisaris
Commissioner

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Statement of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners on the Responsibility for the 2023 Annual Report of PT ABM Investama Tbk

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT ABM Investama Tbk for year 2023 has been fully contained and we shall be fully responsible to the correctness of contents in the Annual Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, April 22, 2024

Direksi
Board of Directors

Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama
President Director

Adrian Erlangga
Direktur
Director

Haris Mustarto
Direktur
Director





27

Provinsi persebaran jaringan usaha Grup ABM
Provinces where ABM Group's business network is spread

03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

General Information and Corporate Identity

	Nama Perusahaan Company Name	:	**PT ABM Investama Tbk**
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	**1 Juni 2006** June 1, 2006
	Status Hukum Legal Status	:	**Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Terbuka (Tbk), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)** Limited Liability Company (PT), Public Company (Tbk), Domestic Investment (PMDN)
	Dasar Hukum Pembentukan Legal Basis of Establishment	:	**Akta Notaris Asih Wahyuni Martaningrum, S.H., No. 01 tanggal 1 Juni 2006, dengan nama PT Adiratna Bani Makmur, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22790.HT.01.01. TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006.** Notarial Deed of Asih Wahyuni Martaningrum, SH, No. 01 dated June 1, 2006, under the name PT Adiratna Bani Makmur, which was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a Decree No. C-22790. HT.01.01.TH.2006 dated August 3, 2006.
	Akta Perubahan Terakhir Most Recent Amendment to the Articles of Association	:	**Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M. Kn, No. 52 Tanggal 10 Mei 2023 mengenai perubahan Pasal 23. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU- AH.01.03-0067388 tanggal 24 Mei 2023.** Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M. Kn, No. 52 dated May 10, 2023 outlining changes to Article 23. These changes were notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.03-0067388 dated May 24, 2023.
	Kegiatan Usaha Business Sectors	:	**Jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, serta jasa penyewaan alat berat.** Business management consulting service, including planning and design as part of the business management consulting, and rental of heavy equipment.
	Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2023 Shareholders as of December 31, 2023	:	• **PT Tiara Marga Trakindo 53,559%** • **Valle Verde Pte. Ltd. 25,511%** • **Rachmat Mulyana Hamami (Komisaris Utama** | President Commissioner) **0,222%** • **Mivida Hamami (Komisaris** | Commissioner) **0,005%** • **Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama** | President Director) **0,047%** • **Masyarakat Umum dan Karyawan (masing-masing di bawah 5%)** General Public and Employees (each below 5%) **20,656%**
	Modal Dasar Authorized Capital	:	**Rp4.680.000.000.000,-**
	Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-Up Capital	:	**Rp1.376.582.500.000,-**
	Pencatatan Saham di Bursa Saham Share Listing	:	**Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 6 Desember 2011** December 6, 2011 on Indonesia Stock Exchange (IDX)
	Kode Saham Share Ticker Code	:	**ABMM**
	Pencatatan Obligasi di Bursa Saham Bonds Listing	:	**Singapore Stock Exchange (SGX) sejak 5 Agustus 2021** August 5, 2021 on Singapore Stock Exchange (SGX)
	Kode Obligasi dan Peringkatnya Bonds Code and Rating	:	US$200,000,000 9.5% Senior Notes: CUSIP: 69379AAB1 (144A) ISIN: US69379AAB17 (144A) ISIN: USY708CHAB61 (Reg S) (2022) Rating: “B1” (Moody’s); “B+” (Fitch)
	Alamat Address	:	**Gedung TMT 1, Lantai 18, Suite 1802** **Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia** TMT 1 Building, 18th Floor, Suite 1802 Jalan Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia



	Jumlah Karyawan Number of Employees	:	**11.195 orang** 11,195 people
	Jaringan Bisnis dan Kelompok Usaha Business Network and Business Group	:	• **6 Entitas Anak kepemilikan langsung** 6 Directly-Owned Subsidiaries • **15 Entitas Anak kepemilikan tidak langsung** 15 Indirectly-Owned Subsidiaries • **3 Entitas Asosiasi** 3 Associate Entities
	Telepon Telephone	:	**+62 21 29976767**
	Faksimili Fax	:	**+62 21 29976768**
	Email Email	:	**corporate.secretary@abm-investama.co.id**
	Situs Web Website	:	**www.abm-investama.com**
	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	:	**Rindra Donovan** **Telp. (+62 21) 2997 6767** **Faks. (+62 21) 2997 6768**
	Hubungan Investor Investor Relations	:	**Hans Christian Manoe** **Telp. (+62 21) 2997 6767** **Faks. (+62 21) 2997 6768**



RIWAYAT SINGKAT ABM
ABM at a Glance

PT ABM Investama Tbk, disebut juga sebagai "ABM" atau "Perusahaan", awalnya didirikan dengan nama PT Adiratna Bani Makmur pada tahun 2006 sebelum pada akhirnya berubah nama menjadi PT ABM Investama pada tanggal 31 Agustus 2009 yang disebabkan adanya perubahan kepemilikan saham menyusul aksi korporasi yang dilakukan oleh Grup Tiara Marga Trakindo (TMT) yang merupakan induk dari kelompok usaha di bidang energi terintegrasi dengan mengakuisisi Perusahaan. Perubahan nama tersebut dinyatakan dalam Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 5 tanggal 31 Agustus 2009 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU50239.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009.

PT ABM Investama Tbk, also referred to as "ABM" or "Company", was initially established under PT Adiratna Bani Makmur in 2006 before it changed the name into PT ABM Investama on August 31, 2009 due to changes in share ownership following the acquisition of the company by the Tiara Marga Trakindo (TMT) Group, which is the parent to a group of an integrated energy business. The name change was outlined in the Notarial Deed Dwi Yulianti, S.H., No. 5 dated 31 August 2009 and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU50239.AH.01.02. 2009 on October 16, 2009.

Sejak bergabung dalam Grup TMT, ABM mulai melakukan aksi korporasi pertamanya melalui penawaran umum saham perdana dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham "ABMM". Sejak saat itu, ABM secara resmi menyandang status sebagai perusahaan terbuka.

After joining TMT Group, ABM began taking its first corporate action through an initial public offering and listing its stocks on the Indonesia Stock Exchange under a ticker code "ABMM". Since then, ABM has officially held the title of a public-listed company.

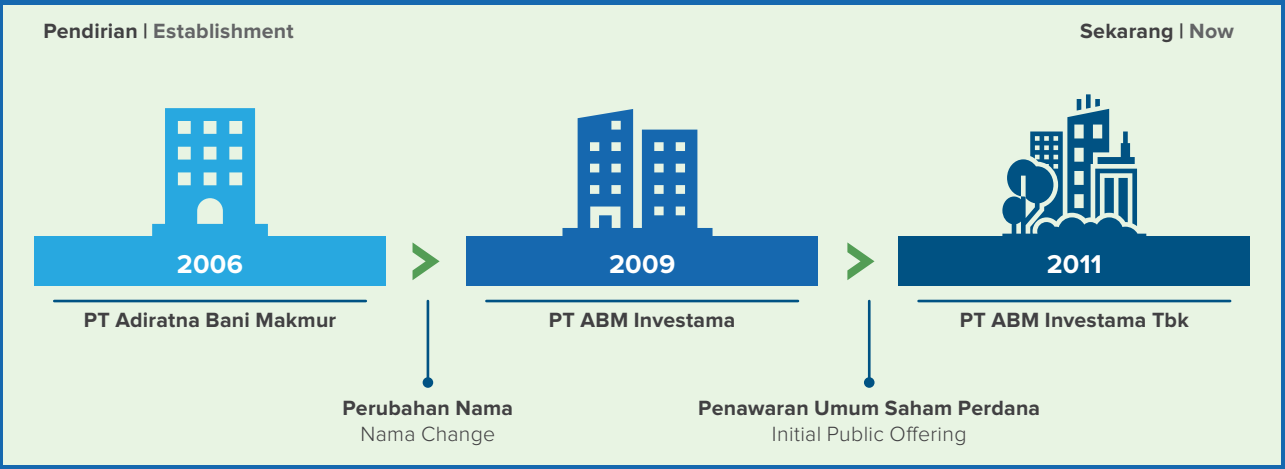

Kini ABM telah bertransformasi menjadi perusahaan investasi terkemuka di Indonesia, dengan posisinya sebagai *Holding Investment* atas beberapa entitas usaha di bidang sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi investasi. Rantai bisnis ABM yang terintegrasi atau dikenal dengan *Mining Value Chain* (MVC) mampu menyelaraskan operasi yang dijalankan, mulai dari konsesi pertambangan, jasa kontraktor pertambangan, manajemen bahan bakar, sampai dengan pengapalan batu bara.

ABM has evolved into a prominent investment company in Indonesia, serving as the Holding Investment for various business entities specializing in energy resources, energy services, and investment in energy infrastructure. The integrated business chain within ABM, referred to as the Mining Value Chain (MVC), ensures cohesive operations across mining concessions, mining contractor services, fuel management, and coal shipments.

Grup ABM telah memperlihatkan komitmennya untuk terus mengembangkan bisnis melalui optimalisasi dan integrasi bisnis, dan melakukan diversifikasi portofolio investasinya di sektor pertambangan baik di jasa pertambangan maupun infrastruktur pertambangan.

The ABM Group is dedicated to advancing its business through optimization, integration, and diversification of its investment portfolio within the mining sector, encompassing mining services and infrastructure.

JEJAK LANGKAH
Milestone



1970–1980

Era berdirinya PT Trakindo Utama oleh (Alm.) Achmad Hadiat Kismet (AHK) Hamami kemudian diikuti pendirian PT Sanggar Sarana Baja (SSB) pada tahun 1977 sebagai anak usaha Trakindo yang menyediakan layanan desain dan fabrikasi untuk pasar alat berat.

The founding period of PT Trakindo Utama by Achmad Hadiat Kismet (AHK) Hamami was succeeded by the establishment of PT Sanggar Sarana Baja (SSB) in 1977. SSB operated as a subsidiary of Trakindo, offering design and fabrication services tailored for the heavy equipment market.

1990-2000

Era berdirinya beberapa entitas usaha seperti PT Sumberdaya Sewatama (Sewatama), PT Cipta Kridatama (CK), dan PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), yang kemudian diikuti dengan pendirian PT Tiara Marga Trakindo (TMT) sebagai entitas induk terintegrasi bagi Trakindo dan entitas anak lainnya.

In this era, several business entities were established, including PT Sumberdaya Sewatama (Sewatama), PT Cipta Kridatama (CK), and PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics). Subsequently, PT Tiara Marga Trakindo (TMT) was founded as an integrated holding company for Trakindo and its other subsidiaries.

2001-2010

Pada era ini, dilakukan beberapa aksi korporasi hingga terjadinya perubahan status kepemilikan. Diawali dengan pengambilalihan PT Tunas Inti Abadi (TIA) dan TMT yang mengakuisisi PT Adiratna Bani Makmur sekaligus mengubah namanya menjadi PT ABM Investama yang pada akhirnya menjadi pemegang saham mayoritas SSB, Sewatama, CKB Logistics, CK dan TIA. Langkah strategis ini berlanjut dengan pendirian anak usaha baru, yaitu PT Reswara Minergi Hartama (Reswara) yang kemudian juga mendirikan PT Pelabuhan Buana Reja (PBR). CKB Logistics juga mengikuti jejak tersebut dengan mendirikan PT Alfa Trans Raya (ATR). Selain itu diakhir era ini, ABM menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (MCB) setara dengan 64.71% saham ABM kepada AHK Holding Pte. Ltd., yang kemudian mengalihkan kepada Valle Verde Pte. Ltd. (Valle), perusahaan terafiliasi lainnya yang juga berkedudukan di Singapura.

During this period, several significant corporate actions occurred, resulting in changes in ownership status. It began with the acquisition of PT Tunas Inti Abadi (TIA) and TMT's acquisition of PT Adiratna Bani Makmur, subsequently renaming itself PT ABM Investama and becoming the majority shareholder of SSB, Sewatama, CKB Logistics, CK and TIA. This strategic move continued with the establishment of a new subsidiary, PT Reswara Minergi Hartama (Reswara), which later established PT Pelabuhan Buana Reja (PBR). CKB Logistics also followed suit by establishing PT Alfa Trans Raya (ATR). Apart from that, ABM eventually issued Mandatory Convertible Bonds (MCB) equivalent to 64.71% of ABM shares to AHK Holding Pte. Ltd., which subsequently transferred it to Valle Verde Pte. Ltd. (Valle), another affiliated company which is also domiciled in Singapore.

2011-2020

Era ini menjadi salah satu momentum bersejarah, di mana Perusahaan secara resmi menjadi perusahaan terbuka sejalan dengan Penawaran Umum Perdana yang dilakukannya pada tahun 2011. Selain itu, ABM juga melakukan ekspansi bisnis secara masif baik secara langsung maupun melalui entitas anaknya yang disertai dengan berbagai restrukturisasi usaha.

Diawali dengan langkah Valle yang melakukan konversi MCB, sehingga menjadikannya pemilik 64,71% saham ABM. ABM juga mendirikan sejumlah entitas usaha melalui Sewatama yang bergerak di bidang pembangkit listrik independen (*Independent Power Producer*/IPP), yaitu PT Nagata Bisma Shakti (NBS) dan PT Pradipa Aryasatya (Pradipa).

Pada proses selanjutnya, ABM mengambil alih salah satu anak usaha Pradipa, yaitu PT Pradipa Aceh Daya (PAD), yang kemudian melakukan perubahan nama menjadi PT Anzara Janitra Nusantara (AJN) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang IPP.

This era marked a historic moment as the Company officially transitioned into a public company through its Initial Public Offering in 2011. Alongside this milestone, ABM embarked on substantial business expansion both directly and through its subsidiary entities, accompanied by various business restructurings.

Through the convention of MCB by Valle the ABM shares reached 64,71%. ABM also established a number of business entities through Sewatama which are engaged in independent power generation (Independent Power Producer/IPP), namely PT Nagata Bisma Shakti (NBS) and PT Pradipa Aryasatya (Pradipa).

In the next process, ABM took over one of Pradipa's subsidiaries, PT Pradipa Aceh Daya (PAD), which then changed its name to PT Anzara Janitra Nusantara (AJN) as a company operating in the IPP sector.



2011-2020

Masih di era yang sama, Reswara mengakuisisi PT Media Djaya Bersama (MDB) yang memiliki anak usaha yaitu PT Mifa Bersaudara (MIFA) dan PT Bara Energi Lestari (BEL), yang memiliki konsesi tambang batu bara di wilayah Aceh.

Selain mendirikan PT Dianta Daya Embara (DDE) untuk menjalankan bisnis jasa kurir sebelum beralih ke jasa bongkar muat (*Stevedoring*), ABM juga mendirikan PT Baruna Dirga Dharma (BDD) melalui CKB Logistics, yang menjalankan bisnis transportasi batu bara, layanan tongkang serta kapal tunda, dan, PT Prima Wiguna Parama (PWP) melalui SSB untuk penanganan peralatan terkait industri energi.

ABM kemudian mengambilalih kepemilikan saham mayoritas PWP untuk dijadikan perusahaan perdagangan bahan bakar minyak untuk sektor industri dan pertambangan. SSB juga bekerja sama dengan PT Sammitr Motor Indonesia (SMI) untuk mendirikan PT SSB Sammitr Distribution (SSD). SSD kemudian berubah status menjadi entitas asosiasi sehubungan dengan penambahan modal disetor oleh SMI sehingga kepemilikan SSB di SSD terdilusi menjadi 40%.

Di tahun 2017 ABM untuk menerbitkan Global Bonds di Bursa Efek Singapura senilai AS$350 juta dengan kupon sebesar 7,125%.

Untuk meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan kinerja Grup, ABM terus berupaya melakukan penataan ulang struktur usaha yang dimulai dari aksi CKB Logistics mengambilalih seluruh saham milik Reswara dan menjadi pemegang saham mayoritas di PBR yang kemudian mengambilalih aset kepelabuhanan milik TIA di Kalimantan Selatan. ABM melakukan investasi pada PT Multi Harapan Utama (MHU) sejumlah 10% saham yang dikeluarkan MHU melalui anak usaha Reswara yaitu PT Agata Nastari Nusantara (ANN). Selain itu, terjadi perubahan saham pengendali atas Sewatama dari ABM kepada PT Godra Investama Mandiri (GIM) sehubungan dengan adanya penerbitan saham baru Sewatama yang diambil alih seluruhnya oleh GIM (perusahaan di luar Grup ABM).

Still in the same period, Reswara acquired PT Media Djaya Bersama (MDB), which has subsidiaries, namely PT Mifa Bersaudara (MIFA) and PT Bara Energi Lestari (BEL), which has a coal mining concession in the Aceh region.

Apart from establishing PT Dianta Daya Embara (DDE) to run a courier service business before switching to loading and unloading services (Stevedoring), ABM also established PT Baruna Dirga Dharma (BDD) through CKB Logistic, which runs a coal transportation business, barge services and tugboats, and PT Prima Wiguna Parama (PWP) through SSB for handling equipment related to the energy industry.

ABM took over majority share ownership of PWP to become a fuel oil trading company for the industrial and mining sectors. SSB also collaborates with PT Sammitr Motor Indonesia (SMI) to establish PT SSB Sammitr Distribution (SSD). SSD later became an associated entity following an increase in paid-in capital by SMI, leading to a dilution of SSB's ownership to 40%.

In 2017, ABM issued Global Bonds in Singapore Exchange worth US$350 million with a coupon of 7.125%.

To enhance competitiveness and optimize performance, ABM continued its efforts to reorganize its business structure. This included CKB Logistics acquiring all shares held by Reswara and becoming the majority shareholder in PBR, which subsequently acquired TIA's port assets in South Kalimantan. ABM owned 10% shares of PT Multi Harapan Utama (MHU) that are issues by MHU through its subsidiary, PT Agata Nastari Nusantara (ANN). Moreover, controlling shares in Sewatama transitioned from ABM to PT Godra Investama Mandiri (GIM) in conjunction with the issuance of new Sewatama shares wholly acquired by GIM, an entity outside the ABM Group.

2021-2023

Sejumlah aksi korporasi dilakukan pada era ini, di mana ABM melakukan pembelian kembali sebanyak US$40.000.000 atas surat utang yang diterbitkan tahun 2017, dan kemudian melakukan *repackaging* atas surat utang tersebut senilai US$200.000.000 pada tahun 2021, dengan tingkat bunga sebesar 9,5% yang akan jatuh tempo pada tahun 2026. Di tahun yang sama, Reswara mengalihkan sejumlah 15.500 lembar saham MDB atau setara dengan 20% dari seluruh saham yang ditempatkan MDB, kepada PT Inti Murni Kencana (IMK). Pada tahun 2022, ABM mengambil langkah terobosan melalui PT Radhika Jananta Raya (RJR), anak usaha yang dimiliki sepenuhnya secara tidak langsung untuk mengakuisisi 1.764.705.900 saham atau setara dengan 30% saham PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

A number of corporate actions were carried out in this era, where ABM repurchased US$40,000,000 of debt securities issued in 2017, and then repackaged the debt securities for US$200,000,000 in 2021, with an interest rate of 9.5% which will mature in 2026. In the same year, Reswara transferred 15,500 MDB shares or the equivalent of 20% of all MDB issued shares, to PT Inti Murni Kencana (IMK). In 2022, ABM performed a breakthrough initiative through PT Radhika Jananta Raya (RJR), an indirect wholly owned subsidiary to acquire 1,764,705,900 shares or the equivalent of 30% of the shares of PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).

VISI, MISI, NILAI INTI, DAN SIKAP KEPEMIMPINAN

Vision, Mission, Core Values, and Leadership Traits



Visi dan Misi, Nilai Inti, dan Sikap Kepemimpinan ABM adalah sebagaimana yang tertuang dalam Piagam Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance Charter*) yang disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi ABM melalui Surat Keputusan Direksi ABM No. 002/ABM-BOC-CIR/I/2013 pada Januari 2013, tidak mengalami perubahan karena dianggap masih sesuai dengan kondisi dan tujuan ABM.

ABM's Vision and Mission, Core Values and Leadership Attitude as stated in the Good Corporate Governance Charter which was ratified by the ABM Board of Commissioners and Directors through ABM Directors' Decree No. 002/ABM-BOC-CIR/I/2013 in January 2013 did not undergo changes because it still adheres to the conditions and objectives of ABM.

Visi
Vision

Untuk menjadi perusahaan investasi terkemuka dengan melakukan berbagai investasi strategis di bidang sumber daya energi, jasa energi, dan infrastruktur energi.

To be the leading investment company with strategic investments in energy resources, services and infrastructures.



Misi
Mission

- **Secara terus-menerus menciptakan lapangan kerja yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia;**
- **Selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan yang me-maksimalkan nilai Pemegang Saham;**
- **Senantiasa menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang akan mengoptimalkan kepuasan pelanggan; dan**
- **Secara aktif terlibat dalam masyarakat sebagai warga korporat yang baik.**

- To continually create meaningful and challenging job opportunities for as many Indonesians as possible;
- To ensure sustainable and profitable growth that maximizes shareholder value;
- To provide value-added solutions that will optimize customer satisfaction; and
- To actively engage within communities as good corporate citizen.

NILAI INTI
Core Values

INTEGRITAS | INTEGRITY
Kami senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi dengan selalu mengedepankan azas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan.
We enforce the highest ethical and moral standards, demonstrating honesty and fairness in all activities.

PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN | CONTINUOUS DEVELOPMENT
Kami bertekad untuk senantiasa mengembangkan perusahaan kami berikut sumber daya manusianya.
We are committed to continuously developing both our companies and employees.

KEUNGGULAN | EXCELLENCE
Kami terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi.
We continuously strive to achieve the highest standards as result.

PROAKTIF | PROACTIVE
Kami terus mencari dan mengadopsi teknik dan pendekatan baru untuk meningkatkan mutu basis kami.
We pursue and adopt new techniques and approaches to improve our business quality.

TANGGUNG JAWAB | ACCOUNTABILITY
Kami bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan atas segala keputusan dan tindakan yang kami ambil.
We assume responsibility to shareholders for all decisions and actions taken.

KERJA SAMA KELOMPOK | TEAMWORK
Kami mendorong dan mendukung keanekaragaman tenaga kerja berdasarkan azas saling percaya dan menghormati, serta bersama-sama mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan dengan berkomunikasi secara baik.
We promote and support a multicultural workforce, based on the principles of trust and respect, collectively achieving goals by communicating appropriately.



SIKAP KEPEMIMPINAN
Leadership Traits



KOMPETEN | COMPETENT
Kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
Display leadership competence in making correct decisions.

BERWAWASAN KE DEPAN | VISIONARY
Dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh, memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti Perusahaan.
Set encompassing goals, have a well-communicated vision that all members of the organization would take into ownership, envision how to succeed and establish priorities based on the Company's core values.

MENGINSPIRASI | INSPIRING
Memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi, memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi, memberi inspirasi, dan memberdayakan para karyawan untuk terus berprestasi.
Exhibit confidence in all interactions; take charge, demonstrate endurance, communicate inspire, and empower others to achieve new heights.

MENGAKTUALISASI DIRI | SELF-ACTUALIZING
Terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru.
Develop self-potential and seek new challenges.

JUJUR DAN RENDAH HATI | HONEST AND HUMBLE
Selalu bersikap tulus, rendah hati, dapat diandalkan, dan jujur dalam menjaga kepercayaan.
Be sincere, modest, reliable, and straightforward in maintaining trustworthiness.

KEGIATAN USAHA
Business Activities



Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir disahkan melalui Akta No. 52 tanggal 10 Mei 2023 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta, maksud dan tujuan ABM adalah menjalani usaha dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ABM melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, which was further ratified through the Deed No. 52 dated May 10, 2023 by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta, ABM's purpose and objectives are to run a business in the service sector. To achieve these goals and objectives, ABM serves the following main business activities:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities According to Article of Association	**Telah/Belum Dijalankan** Have/Have Not Yet Run	**Keterangan** Description
Kegiatan Usaha Utama **Main Business Activities**		
Menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis pertambangan, energi, teknik, *engineering*, industri, minyak, gas dan panas bumi, sumber daya energi, serta jasa konsultasi lainnya, kecuali dalam bidang hukum dan pajak. To run business management consulting services including planning and design in developing management of mining business, energy, engineering, engineering, industry, oil, gas and geothermal, energy resources, and other consulting services, excluding law and tax.	√	Melakukan konsultasi bisnis bagi kepentingan internal kelompok perusahaan. Provide business consultation for the internal group's interests.
Menjalankan jasa penyewaan, termasuk namun tidak terbatas pada bidang perkantoran dan pemukiman serta jasa penyewaan alat-alat berat pada bidang pertambangan serta industri lainnya. To provide rental services yet not limited to office and residence as well as the lease of heavy equipment for mining and other industries.	X	Perusahaan saat ini tidak menjalankan bisnis jasa penyewaan alat berat. The Company currently does not serve the lease of heavy equipment.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities According to Article of Association	Telah/Belum Dijalankan Have/Have Not Yet Run	Keterangan Description
Kegiatan Penunjang **Supporting Activities**		
Penyertaan modal pada perusahaan lain. Capital participation in other companies	√	Melakukan penyertaan modal pada internal kelompok Perusahaan. Conduct capital participation within the Company's internal group.
Melakukan kegiatan-kegiatan baik atas usaha sendiri maupun atas kerja sama dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kerja sama operasi dengan pihak lain dalam bidang usaha terkait dengan bisnis pertambangan, serta industri lainnya. Carrying out activities on its own and under cooperation, both directly and indirectly, including operational partnership with other parties in activities relating to the mining business, as well as other industries.	√	Melakukan kerja sama operasi pertambangan secara tidak langsung dalam bisnis pertambangan. Conduct partnership on mining operations indirectly in the mining business.

SEGMEN USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Teraudit, kegiatan usaha ABM terbagi atas 4 (empat) segmen yang dijalankan oleh Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

BUSINESS SEGMENTS AND PRODUCTS AND SERVICES

In accordance with the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), ABM's business activities are divided into 4 (four) segments operated by the Company's Subsidiaries with details as follows:

Kegiatan Business Segment	Entitas Anak Subsidiary	Bidang Usaha Entitas Anak Subsidiary's Line of Business
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara **Mining Contractor and Coal Mining**		
Kontraktor penambangan serta penambangan dan perdagangan batu bara. Mining contractor and coal mining and trading.	CK	Kontraktor tambang batu bara Coal mining contractor
	Reswara	Penambangan dan perdagangan batu bara Coal mining and trading
Jasa **Services**		
Solusi ketenagalistrikan, logistik terintegrasi, jasa rekayasa, dan pengembangan. Electricity solution, integrated logistics, engineering, and development services.	AJN	Jasa industri tenaga listrik terbarukan Renewable electricity power industry
	CK	Jasa logistik terintegrasi Integrated logistics services
	SSB	Jasa rekayasa dan pengembangan Engineering and development services
Pabrikasi **Fabrication**		
Perancangan dan pembuatan/manufaktur perlengkapan penunjang alat-alat berat pertambangan dan alat angkut bahan. Design and manufacture of mining heavy equipment support and material transportation equipment.	SSB	Pabrikasi/manufaktur Fabrication/manufacture
Lain-lain **Others**		
Perniagaan bahan bakar minyak dan pelumas. Fuel and lubricant business.	PWP	Usaha lain-lain Other businesses

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan dan entitas anaknya menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah disebutkan di atas. Penjelasan secara rinci tentang masing-masing segmen usaha serta layanan yang diberikan dan profitabilitasnya dapat dilihat pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Throughout 2023, the Company and its subsidiaries carried out business activities as mentioned above. A detailed explanation of each business segment as well as the services provided and their profitability can be seen in the Management Analysis and Discussion on Company Performance chapter in this Annual Report.

WILAYAH OPERASIONAL DAN JARINGAN USAHA

Operational Area and Business Network



Perusahaan Company	Wilayah Area	Keterangan Lokasi Description
CK	1. Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	*Head Office*
	2. Kabupaten Aceh Barat, Aceh	*Site Location*
	3. Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan	*Site Location*
	4. Kabupaten Muaro Bungo, Jambi	*Site Location*
	5. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	6. Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	7. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	*Site Location*
Reswara	1. Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	*Head Office*
	2. Kabupaten Aceh Barat & Kabupaten Nagan Raya, Aceh	*Site Location*
	3. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Site Location*
CKB Logistics	1. Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	*Head Office*
	2. Kotamadya Jakarta Utara, DKI Jakarta	*Office, Warehouse, Operations*
	3. Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	*Office, Warehouse, Operations*
	4. Kota Tangerang, Banten	*Office, Operations*
	5. Kota Surabaya, Jawa Timur	*Office, Warehouse, Operations*
	6. Kota Denpasar, Bali	*Office, Operations*
	7. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	*Office, Operations*
	8. Kota Banda Aceh, Aceh	*Office, Operations*
	9. Kota Medan, Sumatera Utara	*Office, Operations*

Perusahaan Company	Wilayah Area	Keterangan Lokasi Description
CKB Logistics	10. Kota Pekanbaru, Riau	*Office, Operations*
	11. Kota Padang, Sumatera Barat	*Office, Operations*
	12. Kota Jambi, Jambi	*Office, Warehouse, Operations*
	13. Kota Palembang, Sumatera Selatan	*Office, Warehouse, Operations*
	14. Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan	*Office, Warehouse, Operations*
	15. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	*Office, Warehouse, Operations*
	16. Kota Batam, Riau	*Office, Operations*
	17. Kota Pontianak, Kalimantan Barat	*Office, Operations*
	18. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	*Office, Operations*
	19. Kota Samarinda, Kalimantan Timur	*Office, Warehouse, Operations*
	20. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	*Office, Warehouse, Operations*
	21. Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	*Office, Operations*
	22. Kecamatan Batu Licin, Kalimantan Selatan	*Office, Operations*
	23. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Office, Warehouse, Operations*
	24. Kabupaten Paser, Kalimantan Timur	*Office, Operations*
	25. Kabupaten Tanjung, Kalimantan Selatan	*Office, Operations*
	26. Kota Rantau, Kalimantan Selatan	*Office, Operations*
	27. Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah	*Office, Operations*

CK
Kantor Pusat dan Lokasi Kontrak Pertambangan
Head Office and Contract Mining Project Sites

Reswara
Kantor Pusat dan Lokasi Lokasi Konsesi Pertambangan
Head Office and Mining Concession Sites

CKB Logistics
Kantor Pusat dan Lokasi Kantor Logistik Terintegrasi
Head Office and Integrated Logistic Offices

SSB
Kantor Pusat dan Lokasi *Workshop* Jasa Rekayasa
Head Office and Engineering Services Workshop

PWP
Kantor Pusat dan Lokasi Distribusi Bahan Bakar
Head Office and Fuel Distribution Location

AJN
Kantor Pusat dan Lokasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
Head Office and Renewable Energy Power Plant Locations



Perusahaan Company	Wilayah Area	Keterangan Lokasi Description
	28. Kota Sangatta, Kalimantan Timur	*Office, Operations*
	29. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	*Office, Warehouse, Operations*
	30. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	*Office, Operations*
	31. Kota Manado, Sulawesi Utara	*Office, Operations*
	32. Kota Makassar, Sulawesi Selatan	*Office, Warehouse, Operations*
	33. Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan	*Office, Operations*
	34. Kota Ternate, Maluku Utara	*Office, Operations*
	35. Kota Timika, Papua Tengah	*Office, Operations*
	36. Kota Sorong, Papua Barat	*Office, Operations*
	37. Kota Jayapura, Papua	*Office, Operations*
	38. Kota Meulaboh, Aceh Barat	*Office, Operations*
	39. Kabupaten Kepulauan Anambas, Riau	*Office, Operations*
	40. Kota Bengkulu, Sumatera Selatan	*Office, Operations*
	41. Kota Semarang, Jawa Tengah	*Office, Operations*
	42. Kota Surabaya, Jawa Timur	*Office, Operations*
	43. Kota Tarakan, Kalimantan Utara	*Office, Operations*
	44. Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur	*Office, Operations*
	45. Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat	*Office, Operations*
SSB	1. Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	*Head Office*
	2. Kota Tangerang, Banten	*Plant*
	3. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	*Workshop*
	4. Kota Samarinda, Kalimantan Timur	*Workshop*
	5. Kabupaten Mimika, Papua Tengah	*Workshop*
	6. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Workshop*

Perusahaan Company	Wilayah Area	Keterangan Lokasi Description
SSB	7. Kota Meulaboh, Aceh Barat	*Site Location*
	8. Kota Muara Bungo, Jambi	*Site Location*
	9. Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan	*Site Location*
	10. Kota Surabaya, Jawa Timur	*Site Location*
	11. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	12. Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	13. Kabupaten Paser, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	14. Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur	*Site Location*
	15. Kabupaten Berau, Kalimantan Timur	*Site Location*
	16. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat	*Site Location*
	17. Kabupaten Mimika, Papua	*Site Location*
PWP	1. Kota Meulaboh, Aceh	*Site Location*
	2. Kabupaten Bungo, Jambi	*Site Location*
	3. Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan	*Site Location*
	4. Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	*Head Office, Site Location*
	5. Kota Surabaya, Jawa Timur	*Site Location*
	6. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	7. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan	*Site Location*
	8. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur	*Site Location*
	9. Kota Samarinda, Kalimantan Timur	*Site Location*
	10. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Site Location
AJN	1. Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta	*Head Office*
	2. Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	*Site Location*

KEANGGOTAAN ASOSIASI
Association Membership



Hingga akhir tahun 2023, ABM dan Entitas Anak terdaftar sebagai anggota dari beberapa asosiasi baik skala nasional maupun internasional sebagai berikut:

As of the end of 2023, ABM and its Subsidiaries were a registered member of several national and international associations, as follows:

Entitas Entity	**Asosiasi** Association	**Peran dalam Asosiasi** Role in the Association
ABM	• Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)	Anggota | Member
	• Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota | Member
	• Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD) Indonesia Centre for Sustainable Development (ICSD)	Anggota | Member
Reswara	• Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Indonesia Port Business Association (ABUPI)	Anggota | Member
	• Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)	Anggota | Member
	• Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Association of Indonesian Mining Professionals (Perhapi)	Anggota | Member
	• Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia (APKPI) Indonesian Association of Mining Safety Professionals (APKPI)	Anggota | Member
	• Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Indonesia Coal Mining Association (APBI)	Anggota | Member
CK	• Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) Indonesian Mining Services Association (Aspindo)	Anggota | Member
	• Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) Indonesian Contractors Association (AKI)	Anggota | Member
	• Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Indonesia Coal Mining Association (APBI)	Anggota | Member



Entitas Entity	Asosiasi Association	Peran dalam Asosiasi Role in the Association
CKB Logistics	• International Air Transport Association (IATA) International Air Transport Association (IATA)	Anggota | Member
	• Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Indonesian Forwarders Association	Anggota | Member
	• Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesian Chamber of Commerce (KADIN)	Anggota | Member
	• Global Project Logistics Network (GPLN) Global Project Logistics Network (GPLN)	Anggota | Member
	• One World Network (OWN) One World Network (OWN)	Anggota | Member
	• Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia (PPLBI) WCA World Bonded Logistic Centre Association (PPLBI) WCA World	Anggota | Member
	• Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) Association of Indonesian Multimodal Transport Companies (PPMTI)	Anggota | Member
SSB	• Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia (HINABI) Heavy Equipment Manufacturer Association of Indonesia (Hinabi)	Anggota | Member
	• Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Management of Indonesia Chamber of Commerce (KADIN)	Anggota | Member
	• Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Indonesian Construction Contractors Association (GAPENSI)	Anggota | Member
	• Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO DKI Jakarta-Jakarta Timur) Indonesian Entrepreneurs Association (APINDO DKI Jakarta-East Jakarta)	Anggota | Member
	• Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO Kutai Timur) Indonesian Entrepreneurs Association (APINDO East Kutai)	Anggota | Member
	• Asosiasi Karoseri Indonesia (ASKARINDO) Indonesian Carrosserie Industries (ASKARINDO)	Anggota | Member
	• Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal Elektrikal (APTEK) Association of Mechanical Electrical Engineering Companies (APTEK)	Anggota | Member
	• Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) Association of Partners of Indonesian Goods Procurement and Distributor (ARDIN)	Anggota | Member

STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure

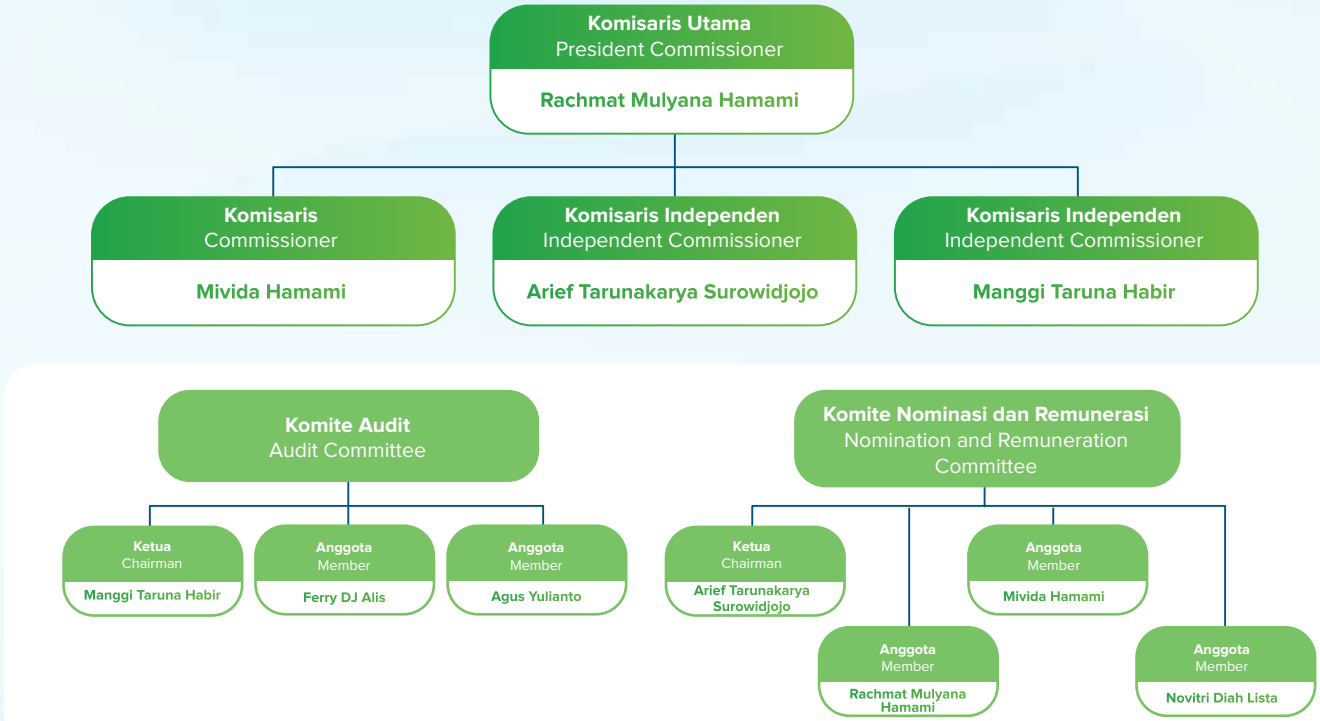

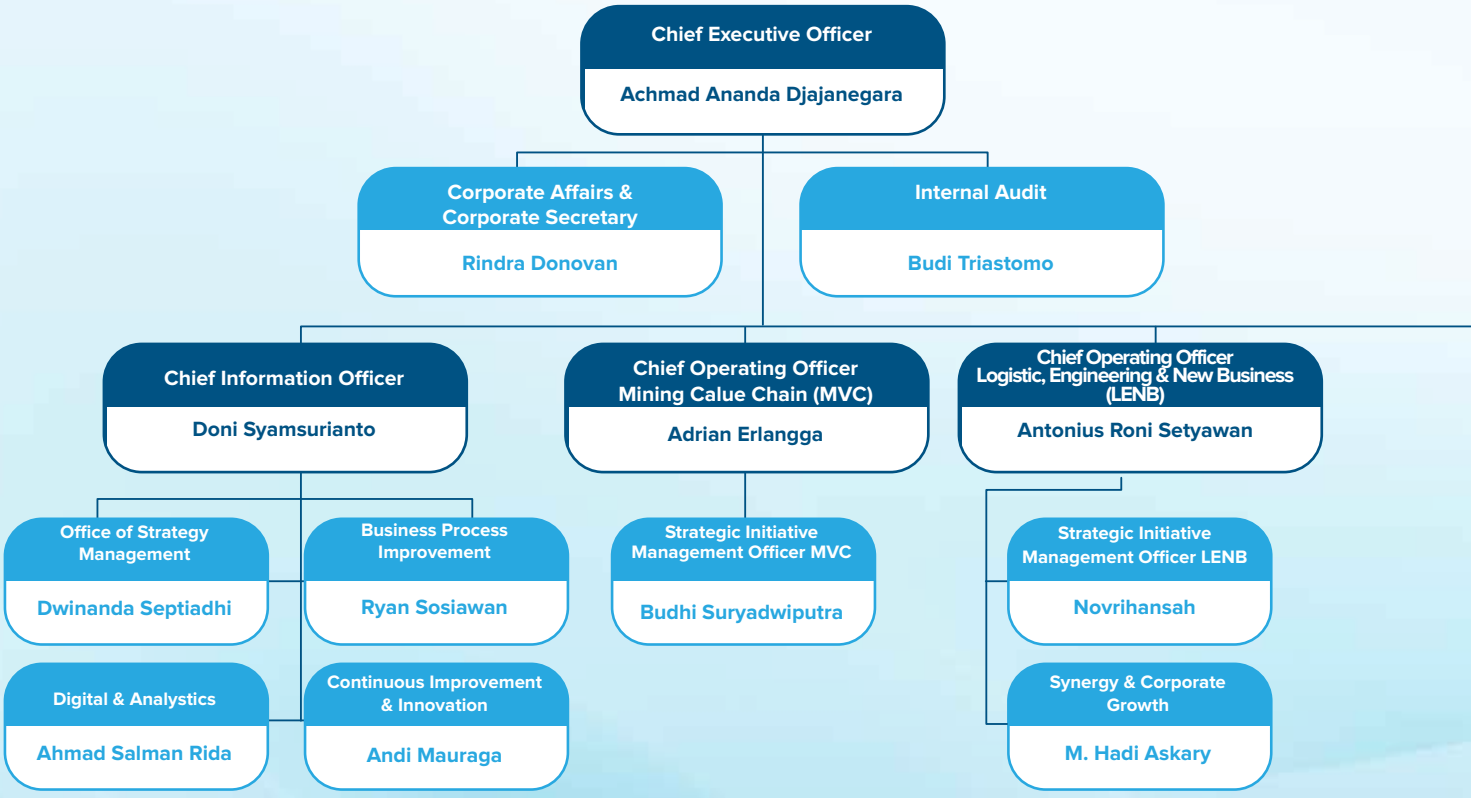

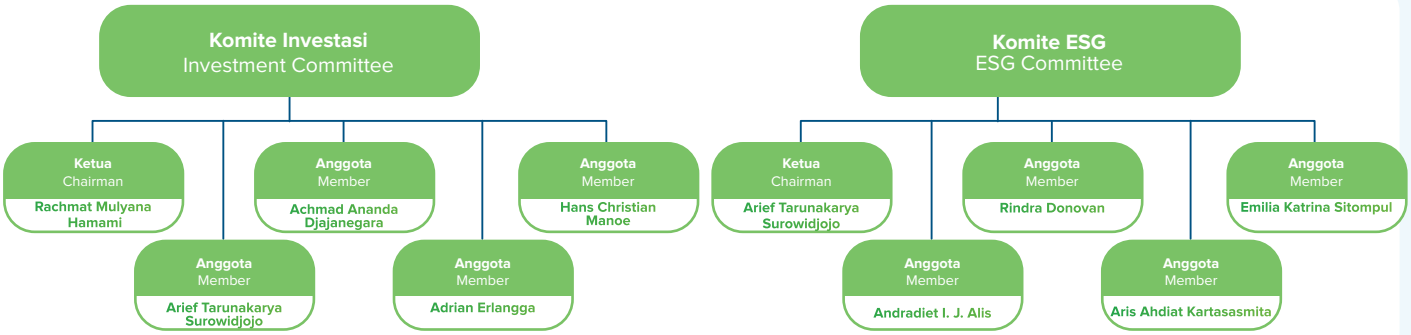
Komite Investasi
Investment Committee
Ketua
Chairman
Rachmat Mulyana Hamami
Anggota
Member
Achmad Ananda Djajanegara
Anggota
Member
Hans Christian Manoe
Anggota
Member
Arief Tarunakarya Surowidjojo
Anggota
Member
Adrian Erlangga
Komite ESG
ESG Committee
Ketua
Chairman
Arief Tarunakarya Surowidjojo
Anggota
Member
Rindra Donovan
Anggota
Member
Emilia Katrina Sitompul
Anggota
Member
Andradiet I. J. Alis
Anggota
Member
Aris Ahdiat Kartasasmita

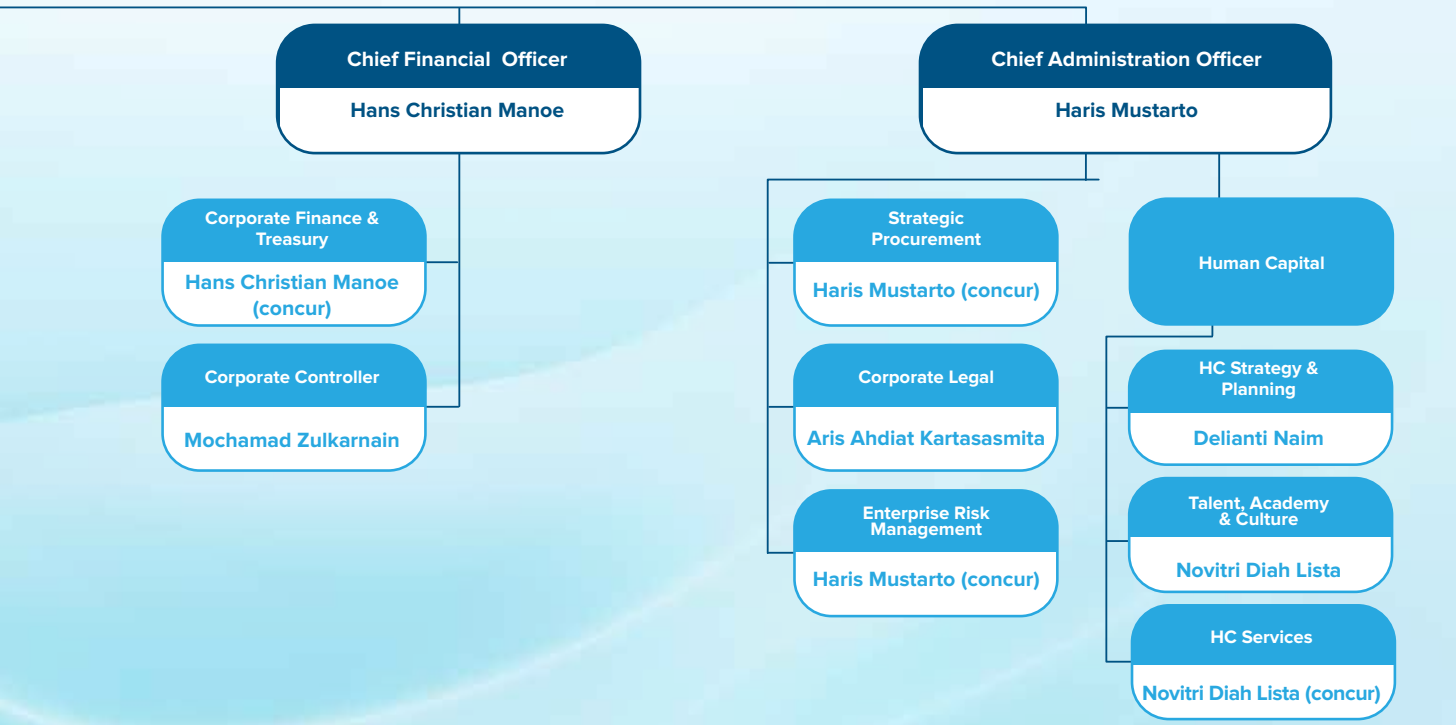
Chief Financial Officer
Hans Christian Manoe
Corporate Finance & Treasury
Hans Christian Manoe (concur)
Corporate Controller
Mochamad Zulkarnain
Chief Administration Officer
Haris Mustarto
Strategic Procurement
Haris Mustarto (concur)
Corporate Legal
Aris Ahdiat Kartasasmita
Enterprise Risk Management
Haris Mustarto (concur)
Human Capital
HC Strategy & Planning
Delianti Naim
Talent, Academy & Culture
Novitri Diah Lista
HC Services
Novitri Diah Lista (concur)

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris

Throughout 2023, there were no changes in composition of the Board of Commissioners



Manggi Taruna Habir
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Mivida Hamami
Komisaris
Commissioner

Rachmat Mulyana Hamami
Komisaris Utama
President Commissioner

Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Profil Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Dapat Dilihat Di Bawah Ini:
The Profiles Of Each Member Of The Board Of Commissioners are Presented Below:



Rachmat Mulyana Hamami

Komisaris Utama
President Commissioner

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Jakarta, 24 September 1964
Jakarta, September 24, 1964

USIA
AGE
59 tahun
59 years old

DOMISILI
DOMICILE
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
- 2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021;
- 2018-2021: Akta No. 16 tanggal 8 Mei 2018;
- 2015-2018: Akta No. 9 tanggal 5 Juni 2015;
- 2012-2015: Akta No. 47 tanggal 31 Mei 2012; dan
- 2010-2012: Akta No. 15 tanggal 14 Desember 2010.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Bachelor of Arts jurusan Business Studies, University of Brighton, Sussex, Inggris (1989);
- IEP Program Fontainebleau INSEAD (1997).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Finance Officer Leverton, UK (1988-1989);
- Major Account Finnings Canada (1989-1990);
- Direktur Utama PT Trakindo Utama (1990-2008);
- Direktur PT Cipta Kridatama (1997-2004);
- Komisaris PT Sanggar Sarana Baja (2002-2010);
- Komisaris PT Chandra Sakti Utama Leasing Finance (2005-2012);
- Direktur Utama PT Chakra Jawara (2006-2010);
- Komisaris Utama PT Tri Swardana Utama (2008-2010);
- Direktur Utama Perusahaan (2009-2010); dan
- Komisaris Utama PT Mahadana Dasha Utama (2010-2016).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Direktur Utama PT Tiara Marga Trakindo (2005-sekarang);
- Komisaris Utama PT Trakindo Utama (2008-sekarang); dan
- Komisaris Utama PT Sumberdaya Sewatama (2022-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:
- Ketua Komite Investasi (2021-sekarang)
- Anggota Komite Nominasi & Remunerasi (2021-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI
Merupakan Pemilik Manfaat Utama Perusahaan melalui kepemilikan saham atas Pemegang Saham Utama Perusahaan. Beliau juga memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris (Mivida Hamami).

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
- 2021-2024: Deed No. 39 dated May 7, 2021;
- 2018-2021: Deed No. 16 dated May 8, 2018;
- 2015-2018: Deed No. 9 dated June 5, 2015;
- 2012-2015: Deed No. 47 dated May 31, 2012; and
- 2010-2012: Deed No. 15 dated December 14, 2010.

EDUCATION
- Bachelor of Arts majoring in Business Studies, University of Brighton, Sussex, UK (1989); and
- IEP Program Fontainebleau INSEAD (1997).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- Finance Officer Leverton, UK (1988-1989);
- Major Account Finnings Canada (1989-1990);
- President Director of PT Trakindo Utama (1990-2008);
- Director of PT Cipta Kridatama (1997-2004);
- Commissioner of PT Sanggar Sarana Baja (2002-2010);
- Commissioner of PT Chandra Sakti Utama Leasing Finance (2005-2012);
- President Director of PT Chakra Jawara (2006-2010);
- President Commissioner of PT Tri Swardana Utama (2008-2010);
- President Director of the Company (2009-2010); and
- President Commissioner of PT Mahadana Dasha Utama (2010-2016).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- President Director of PT Tiara Marga Trakindo (2005-present);
- President Commissioner of PT Trakindo Utama (2008-present); and
- President Commissioner of PT Sumberdaya Sewatama (2022-present).

Within ABM:
- Chairman of Investment Committee (2021-present)
- Member of Nomination and Remuneration Committee (2021-present)

AFFILIATION RELATIONSHIP
He is an Ultimate Beneficial Owner of the Company through share ownership of the Company's Major Shareholders. He also has management relation, ownership relation and family relationship with a member of the Board of Commissioners (Mivida Hamami).



Mivida Hamami

Komisaris Independen
Independent Commissioner

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Surabaya, 29 Oktober 1961
Surabaya, October 29, 1961

USIA
AGE
62 tahun
62 years old

DOMISILI
DOMICILE
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
- 2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021
- 2018-2021: Akta No. 16 tanggal 8 Mei 2018;
- 2015-2018: Akta No. 9 tanggal 5 Juni 2015;
- 2012-2015: Akta No. 47 tanggal 31 Mei 2012;
- 2009-2012: Akta No. 2 tanggal 28 Agustus 2009; dan
- 2004-2009: Akta No. 1 tanggal 1 Juni 2004.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Sarjana bidang Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia (1988);
- Diploma Marketing, The Hotel Career Centre, Bournemouth, Inggris (1990); dan
- Master of Business Administration, New Hampshire College, Manchester, Amerika Serikat (1992).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Direktur Utama PT Sumberdaya Sewatama (2008-2010);
- Komisaris Utama PT Mitra Solusi Telematika (2010-2013);
- Komisaris Utama PT Tri Swardana Utama (2010-2013);
- Komisaris Utama PT Chakra Jawara (2010-2014);
- Komisaris Utama PT Triyasa Propertindo (2010-2016);
- Direktur Utama PT Mahadana Dasha Utama (2010-2023);
- Komisaris Utama PT Wiyasa Persada (2011-2016);
- Komisaris Utama PT Aruna Kirana (2011-2019);
- Komisaris Utama PT Madara Swarna (2011-2019);
- Komisaris Utama PT Pastika Nirmala (2013-2016);
- Komisaris PT Mitra Solusi Telematika (2014-2021);
- Komisaris PT Triyasa Propertindo (2016-2019);
- Komisaris PT Triyasa Propertindo (2016-2019);
- Komisaris PT Pastika Nirmala (2016-2019); dan
- Komisaris PT Wiyasa Persada (2016-2019).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Komisaris Utama PT Mahadana Dasha Utama (2023-sekarang);
- Direktur PT Tiara Marga Trakindo (2005-sekarang);
- Komisaris PT Chitra Paratama (2010-sekarang); dan
- Komisaris PT Karya Kharisma Mandiri (2018-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:
Anggota Komite Nominasi dan Renumerasi (2021-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI
Merupakan Pemilik Manfaat Utama Perusahaan melalui kepemilikan saham atas Pemegang Saham Utama Perusahaan. Beliau juga memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris (Rachmat Mulyana Hamami).

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
- 2021-2024: Deed No. 39 dated May 7, 2021
- 2018-2021: Deed No. 16 dated May 8, 2018;
- 2015-2018: Deed No. 9 dated June 5, 2015;
- 2012-2015: Deed No. 47 dated May 31, 2012;
- 2009-2012: Deed No. 2 dated August 28, 2009; and
- 2004-2009: Deed No. 1 dated June 1, 2004.

EDUCATION
- Bachelor's Degree in Commercial Administration, Faculty of Social and Political Studies, University of Indonesia (1988);
- Diploma Marketing, The Hotel Career Centre, Bournemouth, UK (1990); and
- Master of Business Administration, New Hampshire College, Manchester, United States of America (1992).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- President Commissioner of PT Sumberdaya Sewatama (2008-2010);
- President Commissioner of PT Mitra Solusi Telematika (2010-2013);
- President Commissioner of PT Tri Swardana Utama (2010-2013);
- President Commissioner of PT Chakra Jawara (2010-2014);
- President Commissioner of PT Triyasa Propertindo (2010-2016);
- President Director of PT Mahadana Dasha Utama (2010-2023);
- President Commissioner of PT Wiyasa Persada (2011-2016);
- President Commissioner of PT Aruna Kirana (2011-2019);
- President Commissioner of PT Madara Swarna (2011-2019);
- President Commissioner of PT Pastika Nirmala (2013-2016);
- Commissioner of PT Mitra Solusi Telematika (2014-2021);
- Commissioner of PT Triyasa Propertindo (2016-2019);
- Commissioner of PT Triyasa Propertindo (2016-2019);
- Commissioner of PT Pastika Nirmala (2016-2019); and
- Commissioner of PT Wiyasa Persada (2016-2019).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- President Commissioner of PT Mahadana Dasha Utama (2023-present);
- Director of PT Tiara Marga Trakindo (2005-present);
- Commissioner of PT Chitra Paratama (2010-present); and
- Commissioner of PT Karya Kharisma Mandiri (2018-present).

Within ABM:
Member of Nomination and Remuneration Committee (2021-present)

AFFILIATION RELATIONSHIP
She is an Ultimate Beneficial Owner of the Company through share ownership of the Company's Major Shareholders. He also has management relation, ownership relation and family relationship with a member of the Board of Commissioners (Rachmat Mulyana Hamami).



Arief Tarunakarya Surowidjojo

Komisaris Independen
Independent Commissioner

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Yogyakarta, 9 April 1953
Yogyakarta, April 9, 1953

USIA
AGE
71 tahun
71 years old

DOMISILI
DOMICILE
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN

- 2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021;
- 2018-2021: Akta No. 16 tanggal 8 Mei 2018; dan
- 2015-2018: Akta No. 9 tanggal 18 Mei 2015.

Walaupun telah menjabat lebih dari dua periode sebagai Komisaris Independen, beliau tetap berkomitmen untuk menjaga independensinya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Independensi tertanggal 7 Mei 2021 dan diangkat kembali sebagai Komisaris Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2021.

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok (1977); dan
- Master of Law (LLM), University of Washington (LLM), Seattle, Amerika Serikat (1984).

SERTIFIKASI PROFESI

Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA

- Wakil Presiden Komisaris (Independen) dan anggota Komite Audit PT Holcim Indonesia Tbk (2001-2014);
- Wakil Presiden Komisaris (Independen), Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite GCG PT Vale Indonesia Tbk (dahulu PT Inco Indonesia Tbk) (2009-2016);
- Ketua Komite GCG PT Indika Energy Tbk (2008-2015), PT Petrosea Tbk, dan PT Tripatra Engineering (2013-2015), dan anggota Komite GCG PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2013- 2015);
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sampoerna Agro Tbk (2007-2013);
- Komisaris Independen, Ketua Komite Pemantauan Risiko, dan anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2016-2018);
- Sejak Tahun 2021 diangkat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
- Pendiri, eksekutif atau patron di sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti:
  - World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia;
  - Transparency International Indonesia;
  - Masyarakat Transparansi Indonesia;
  - Yayasan Cahaya Guru;
  - Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia;
  - Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera; dan
  - Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
- Senior Partner Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo (1985-2023).

RANGKAP JABATAN

Di Luar Perusahaan:

- Co-Founder & Senior Partner Firma Hukum Surowidjojo & Co (2023-sekarang); dan
- Komisaris Independen, Ketua Komite Pemantauan Risiko, dan anggota Komite Audit PT Bank Jago Tbk (2021-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan (2015-sekarang);
- Ketua Komite ESG Perusahaan (2021-sekarang); dan
- Anggota Komite Investasi Perusahaan (2021-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT

- 021-2024: Deed No. 39 dated 7 May 2021
- 2018-2021: Deed No. 16 dated 8 May 2018;
- 2015-2018: Deed No. 9 dated 5 June 2015;

Although he has served more than two terms as an Independent Commissioner, he remains committed to maintaining his independence as stated in the Statement Letter OF Independence dated May 7, 2021 and was reappointed as an Independent Commissioner at the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.

EDUCATION

- Bachelor of Law, Faculty of Law, University of Indonesia, Depok (1977); and
- Master of Law (LLM), University of Washington (LLM), Seattle, United States of America (1984).

CERTIFICATION

None.

WORK EXPERIENCE

- Vice President Commissioner (Independent) and member of Audit Committee of PT Holcim Indonesia Tbk (2001-2014);
- Vice President Commissioner (Independent), Chairman of Audit Committee, and Chairman of GCG Committee of PT Vale Indonesia Tbk (previously PT Inco Indonesia Tbk) (2009-2016);
- Chairman of GCG Committee of PT Indika Energy Tbk (2008-2015), PT Petrosea Tbk, and PT Tripatra Engineering (2013-2015), and member of GCG Committee of GCG PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (2013- 2015);
- Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee of PT Sampoerna Agro Tbk (2007-2013);
- Independent Commissioner, Chairman of Risk Monitoring Committee, and member of Audit Committee of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2016-2018);
- Since 2021 appointed by the Minister of Education, Culture, Research and Technology as a member of the College Accreditation Council; and

- Founder, executive or patron at non-profit organizations, such as:
  - World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia;
  - Transparency International Indonesia;
  - Masyarakat Transparansi Indonesia;
  - Yayasan Cahaya Guru;
  - Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia;
  - Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera; dan
  - Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).
- Senior Partner at Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (1985-2023).

CONCURRENT POSITIONS

Other than ABM:

- Co-Founder & Senior Partner of Surowidjojo & Co Law Firm (2023-present); and
- Independent Commissioner, Chairman of the Risk Monitoring Committee, and member of the Audit Committee of PT Bank Jago Tbk (2021-present).

Within ABM:

- Chairman of Nomination and Remuneration Committee of the Company (2015-present);
- Chairman of ESG Committee of the Company (2021-present); and
- Member of Investment Committee of the Company (2021-present).

AFFILIATION RELATIONSHIP

He has no financial, management nor family relations with members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major as well as Controlling Shareholders.



Manggi Taruna Habir

Komisaris Independen
Independent Commissioner

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
London, 4 April 1953
London, April 4, 1953

USIA
AGE
71 tahun
71 years old

DOMISILI
DOMICILE
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Bachelor of Arts (Honors), Faculty of Arts, McGill University, Canada (1977);
- Master in Business Administration, Graduate School of Business, University of Michigan (1979); dan
- Master in Public Administration, Kennedy School of Government Cambridge, Harvard University, USA (2002).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Indonesia Asisten Manager Multinational Finance Corporation (1979-1981);
- Manager Citibank N.A. Indonesia (1981-1982);
- Staf Korespondensi Indonesia Far Eastern Economic Review (1982-1985);
- Vice President, Kepala Unit Lembaga Keuangan Citibank, Jakarta (1985-1990);
- Executive Vice President of Research PT Bahana Securities (1995-1998);
- Presiden Direktur PEFINDO (1998-2001);
- Advisor Indonesian Bank Restructuring Agency (2000-2001);
- Direktur Pemeringkatan Lembaga Keuangan Standard & Poor's, Singapura (2002-2005);
- Senior Editor The Jakarta Post (2008-2010);
- Contributor Tempo Weekly Magazine (2013-2018);
- Presiden Komisaris Adira Insurance (2009-2019); dan
- Komisaris Independen Bank Danamon (2005-2020).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Senior Advisor Mitra Gagasemha Kreasi (1991-sekarang);
- Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2021-sekarang);
- Komisaris Independen PT Berdayakan Usaha Indonesia (BATUMBU) (2020-sekarang);
- Anggota Independen Komite Audit dan Komite Risiko, Bank Jago (2021-sekarang); dan
- Visiting Fellow, Regional Economic Studies, Yusof Ishak Institute, Institute of Southeast Asian Studies Singapore (ISEAS) sejak (2020-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:
Ketua Komite Audit Perusahaan (2021-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
2021-2024: Deed no. 39 dated May 7, 2021.

EDUCATION
- Bachelor of Arts (Honors), Faculty of Arts, McGill University, Canada (1977);
- Master in Business Administration, Graduate School of Business, University of Michigan (1979); dan
- Master in Public Administration, Kennedy School of Government Cambridge, Harvard University, USA (2002).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- Indonesian Assistant Manager of Multinational Finance Corporation (1979-1981);
- Manager Citibank N.A. Indonesia (1981-1982);
- Correspondence Staff for Indonesia Far Eastern Economic Review (1982-1985);
- President Director of CITIBANK N.A. Indonesia (1981-1982 dan 1985-1990);
- Research Director of Bahana Securities (1995-1998);
- President Director of PEFINDO (1998-2001);
- Advisor at Indonesian Bank Restructuring Agency (2000-2001);
- Director of Singapore STANDARD & POOR'S (2002-2005);
- Senior Editor at The Jakarta Post (2008-2010);
- Contributor for Tempo Weekly Magazine (2013-2018);
- President Commissioner of Adira Insurance (2009-2019); and
- President Commissioner of Bank Danamon (2005-2020).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- Senior Advisor at Mitra Gagasemha Kreasi (1991-present);
- Independent Commissioner of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (2021-present);
- Independent Commissioner of PT Berdayakan Usaha Indonesia (BATUMBU) (2020-present);
- Independent Members of Audit Committee and Risk Committee of Bank Jago (2021-present);
- Visiting Fellow, Regional Economic Studies, at Yusof Ishak Institute, Institute of Southeast Asian Studies Singapore (ISEAS) since (2020-present);

Within ABM:
Chairman of the Company's Audit Committee (2021-present).

AFFILIATION RELATIONSHIP
He does not have financial, management and family relations with members of Board of Commissioners, Board of Directors, and Major as well as Controlling Shareholders.

PROFIL DIREKSI
Profiles of Board of Directors

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi Direksi

Throughout 2023, there were no changes in composition of the Board of Directors



Adrian Erlangga
Direktur (Chief Operating Officer/COO)
Director (Chief Operating Officer/COO)

Achmad Ananda Djajanegara
Direktur Utama (Chief Executive Officer/CEO)
President Director (Chief Executive Officer/CEO)

Haris Mustarto
Direktur (Chief Administration Officer/CAO)
Director (Chief Administration Officer)

Profil masing-masing anggota Direksi dapat dilihat sebagai berikut:
The profile of each member of the Board of Directors are presented below:



Achmad Ananda Djajanegara

Direktur Utama (Chief Executive Officer/CEO)
President Director (Chief Executive Officer/CEO)

KEWARGANEGARAAN NATIONALITY	Indonesia Indonesian
KELAHIRAN BORN	Jakarta, 24 April 1966 Jakarta, April 24, 1966
USIA AGE	58 tahun 58 years old
DOMISILI DOMICILE	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
- 2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021;
- 2018-2021: Akta No. 16 tanggal 8 Mei 2018;
- 2015-2018: Akta No. 9 tanggal 15 Juni 2015;
- 2012-2015: Akta No. 47 tanggal 31 Mei 2012; dan
- 2009-2012: Akta No. 4 tanggal 6 November 2009.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Sarjana Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok (1990);
- Master of Business Administration, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (1992).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Partner Corporate Finance and Advisory Fund Asia (2004-2006);
- Senior Director Standard Chartered Bank (2006-2007);
- Managing Director Standard Chartered Bank (2007-2008);
- Chief Strategy Officer PT Tiara Marga Trakindo (2008-2009); dan
- Managing Director Perusahaan (2009-2010).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Komisaris PT Sanggar Sarana Baja (2019-sekarang);
- Komisaris PT Cipta Kridatama (2019-sekarang);
- Komisaris PT Cipta Krida Bahari (2019-sekarang);
- Komisaris PT Agata Nugraha Nastari (2019-sekarang);
- Komisaris PT Reswara Minergi Hartama (2021-sekarang);
- Komisaris PT Media Djaya Bersama (2021-sekarang); dan
- Komisaris PT Radhika Jananta Raya (2022-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:
Anggota Komite Investasi Perseroan (2021-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI
Merupakan Pemegang Saham Perusahaan dengan kepemilikan <5%, namun tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
- 2021-2024: Deed No. 39 dated May 7,2021;
- 2018-2021: Deed No. 16 dated May 8, 2018;
- 2015-2018: Deed No. 9 dated June 15, 2015;
- 2012-2015: Deed No. 47 dated May 31, 2012; And
- 2009-2012: Deed No. 4 dated November 6, 2009.

EDUCATION
- Bachelor's Degree in Business Administration, Faculty of Social and Political Studies, University of Indonesia, Depok (1990);
- Master of Business Administration, Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, the Netherlands (1992).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- Partner at Corporate Finance and Advisory Fund Asia (2004- 2006);
- Senior Director of Standard Chartered Bank (2006-2007);
- Managing Director of Standard Chartered Bank (2007-2008);
- Chief Strategy Officer of PT Tiara Marga Trakindo (2008-2009); and
- Managing Director of the Company (2009-2010).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- Commissioner of PT Sanggar Sarana Baja (2019-present);
- Commissioner of PT Cipta Kridatama (2019-present);
- Commissioner of PT Cipta Krida Bahari (2019-present);
- Commissioner of PT Agata Nugraha Nastari (2019-present);
- Commissioner of PT Reswara Minergi Hartama (2021-present);
- Commissioner of PT Media Djaya Bersama (2021-present); and
- Commissioner of PT Radhika Jananta Raya (2022-present).

Within ABM:
Member of Investment Committee of the Company (2021-present).

AFFILIATION RELATIONSHIP
He is a Company's Shareholder with ownership of <5%, but has no management nor family relation with members of the Board of Commissioners, Directors, and Major as well as Controlling Shareholders.



Adrian Erlangga

Direktur (Chief Operating Officer/COO)
Director (Chief Operating Officer/COO)

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Bandung, 09 Oktober 1964
Bandung, October 9, 1964

USIA
AGE
59 tahun
59 years old

DOMISILI
DOMICILE
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
- 2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021;
- 2018-2021: Akta No. 16 tanggal 8 Mei 2018;
- 2015-2018: Akta No. 9 tanggal 5 Juni 2015; dan
- 2014-2015: Akta No. 47 tanggal 19 Mei 2014.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung (1989); dan
- Master of Business Administration, Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat (1993).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
Di Luar Perusahaan:
- Direktur PT Mandiri Inti Finance Tbk (1998-2000);
- Presiden Direktur PT Ciputra Finance (2000-2001);
- Vice President PT Pasifik Satelit Nusantara (2001-2008);
- Member of the Board & Chief Advisor ACeS International Ltd (2006-2009);
- Direktur Keuangan PT Trada Maritime Tbk (2008-2012);
- Direktur Strategi Korporasi PT Reswara Minergi Hartama (2012-2014);
- Komisaris PT Mifa Bersaudara (2012-2016);
- Komisaris PT Media Djaya Bersama (2012-2016);
- Komisaris PT Bara Energi Lestari (2013-2016);
- Komisaris PT Cipta Krida Bahari (2015-2016);
- Komisaris Utama PT Cipta Krida Bahari (2016-2019);
- Komisaris Utama PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu (2017-2019);
- Komisaris Utama PT Reswara Minergi Hartama (2018-2019);
- Direktur Utama PT Reswara Minergi Hartama (2019-2021);
- Komisaris PT Anzara Janitra Nusantara (2014-2023); dan
- Komisaris PT Nagata Bio Energi (2017-2023).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Komisaris PT Dianta Daya Embara (2016-sekarang);
- Direktur PT Agata Nugraha Nastari (2019-sekarang);
- Komisaris Utama PT Cipta Kridatama (2019-sekarang);
- Komisaris PT Prima Wiguna Parama (2021-sekarang);
- Direktur PT Radhika Jananta Raya (2022-sekarang);
- Wakil Presiden Komisaris PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) (2022-sekarang); dan
- Wakil Presiden Komisaris di PT Barasentosa Lestari (GEMS Group) (2022-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:
Anggota Komite Investasi Perseroan (2021-sekarang).

HUBUNGAN AFILIASI
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
- 2021-2024: Deed No. 39 dated May 7, 2021;
- 2018-2021: Deed No. 16 dated May 8, 2018;
- 2015-2018: Deed No. 9 dated June 5, 2015; And
- 2014-2015: Deed No. 47 dated May 19, 2014.

EDUCATION
- Bachelor of Law, Padjadjaran University, Bandung (1989); and
- Master of Business Administration, Golden Gate University, San Francisco, United States of America (1993).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
Other than ABM:
- Director of PT Mandiri Inti Finance Tbk (1998-2000);
- President Director of PT Ciputra Finance (2000-2001);
- Vice President of PT Pasifik Satelit Nusantara (2001-2008);
- Member of the Board & Chief Advisor of ACeS International Ltd (2006-2009);
- Finance Director of PT Trada Maritime Tbk (2008-2012);
- Corporate Strategy Director PT Reswara Minergi Hartama (2012-2014);
- Commissioner of PT Mifa Bersaudara (2012-2016);
- Commissioner of PT Media Djaya Bersama (2012-2016);
- Commissioner of PT Bara Energi Lestari (2013-2016);
- Commissioner of PT Cipta Krida Bahari (2015-2016);
- President Commissioner of PT Cipta Krida Bahari (2016-2019);
- President Commissioner of PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu (2017-2019);
- President Commissioner of PT Reswara Minergi Hartama (2018-2019);
- President Director of PT Reswara Minergi Hartama (2019-2021);
- Commissioner of PT Anzara Janitra Nusantara (2014-2023); and
- Commissioner of PT Nagata Bio Energi (2017-2023).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- Commissioner of PT Dianta Daya Embara (2016-present);
- Director of PT Agata Nugraha Nastari (2019-present);
- President Commissioner of PT Cipta Kridatama (2019-present);
- Commissioner of PT Prima Wiguna Parama (2021-present);
- Director of PT Radhika Jananta Raya (2022-present);
- Vice President Commissioner of PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) (2022-present); And
- Vice President Commissioner at PT Barasentosa Lestari (GEMS Group) (2022-present).

Within ABM:
Member of Investment Committee of the Company (2021-present).

AFFILIATION RELATIONSHIP
He has no financial, management nor family relation with members of the Board of Commissioners, Directors, as well as Majority and Controlling Shareholder.



Haris Mustarto

Direktur (Chief Administration Officer/CAO)
Director (Chief Administration Officer/CAO)

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Sleman, 1 Juni 1965
Sleman, June 1, 1965

USIA
AGE
58 tahun
58 years old

DOMISILI
DOMICILE
Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
- 2021-2024: Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021; dan
- 2020-2021: Akta No. 146 tanggal 16 Juni 2020.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1990); dan
- Magister di Bidang Keuangan, Universitas Indonesia, Jakarta (1996).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Head of HR & Support Services PT Cikarang Listrindo (2010-2012);
- Kepala Divisi/General Manager Human Capital PT Trakindo Utama (2012-2018); dan
- Chief Administration Officer (CAO) PT Cipta Kridatama (2018-2019).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Direktur PT Prima Wiguna Parama (2019-sekarang); dan
- Komisaris PT Golden Energy Mines Tbk (2021-sekarang).

Di Dalam Perusahaan: tidak ada.

HUBUNGAN AFILIASI
Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
- 2021-2024: Deed No. 39 dated May 7, 2021; and
- 2020-2021: Deed No. 146 dated June 16, 2020.

EDUCATION
- Bachelor's Degree in Agricultural Technology, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1990); and
- Master's Degree in Finance, Indonesia University, Jakarta (1996).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- Head of HR & Support Services of PT Cikarang Listrindo (2010-2012);
- Head of Division/General Manager of Human Capital of PT Trakindo Utama (2012-2018); And
- Chief Administration Officer (CAO) of PT Cipta Kridatama (2018-2019).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- Director of PT Prima Wiguna Parama (2019-present); and
- Commissioner of PT Golden Energy Mines Tbk (2021-present).

Within ABM: None

AFFILIATION RELATIONSHIP
He has no financial, management nor family relations with members of the Board of Commissioners, Directors, as well as Majority and Controlling Shareholder.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF
Profile of the Executive Officers



Doni Syamsurianto

Chief Information Officer/CIO
Chief Information Officer/CIO

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Kerinci, 2 April 1976
Kerinci, April 2, 1976

USIA
AGE
48 tahun
48 years old

DOMISILI
DOMICILE
Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

PERIODE DAN RIWAYAT PENUNJUKAN
Sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Internal Memo ABM-BOD/237/ADJ/XII/2017.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Sarjana Teknik Nuklir, Universitas Gadjah Mada (1999); dan
- Magister Manajemen - Strategic Management, Universitas Prasetiya Mulya (2010).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Team Leader at Partnership Project Between DIHT and KADINDA DIY (1999-2000);
- Consultant Accenture (2000-2002);
- Manager Accenture (2006-2010);
- Go To Market Group Head LG Electronics Indonesia (2010-2011);
- Head of ICT PT Trakindo Utama (2011-2015);
- Head of Business Reinvention and Value Enhancement (BRAVE) PT Trakindo Utama (2016-2017); dan
- Head of Office of Strategy Management PT Trakindo Utama (Juli-Desember 2017).

RANGKAP JABATAN
Dia tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain di luar Grup ABM.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
Since January 1, 2018 pursuant to Internal Memo ABM-BOD/237/ADJ/XII/2017.

EDUCATION
- Bachelor's Degree in Nuclear Engineering, Gadjah Mada University (1999); and
- Master's Degree in Strategic Management, Prasetiya Mulya University (2010).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- Team Leader at Partnership Project Between DIHT and KADINDA DIY (1999-2000);
- Accenture Consultant (2000-2002);
- Manager Accenture (2006-2010);
- Go To Market Group Head LG Electronics Indonesia (2010-2011);
- Head of ICT PT Trakindo Utama (2011-2015);
- Head of Business Reinvention and Value Enhancement (BRAVE) of PT Trakindo Utama (2016-2017); and
- Head of Office of Strategy Management of PT Trakindo Utama (July-December 2017).

CONCURRENT POSITIONS
He has no concurrent positions in other companies other than ABM Group.



Hans Christian Manoe

Chief Financial Officer/CFO
Chief Financial Officer/CFO

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Bandung, 16 Mei 1969
Bandung, May 16, 1969

USIA
AGE
54 tahun
54 years old

DOMISILI
DOMICILE
Tangerang, Jawa Barat, Indonesia
Tangerang, West Java, Indonesia

PERIODE DAN DASAR PENGANGKATAN
Sejak 1 Juli 2022 berdasarkan Internal Memo ABM-BOD/016/INTER/ADJ/VII/2022.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (1995);
- Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1993);
- Magister Manajemen - International Finance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2012); dan
- Master of Business Administration - International Business, University of Pierre Mendes France (UPMF) (2012).

SERTIFIKASI PROFESI
- Chartered Accountant (CA);
- Certified Fraud Examiners (CFE); dan
- Licensed to practice law as an advocate by the Indonesian Bar Association (PERADI)

PENGALAMAN KERJA
- GM Audit PT Matahari Department Store Tbk (2009-2012);
- Group Head Audit Perusahaan (2012-2015);
- Head of Financial Reporting and Analysis ABM (2015-2018);
- Group Corporate Controller ABM (2018-2022); dan
- Direktur Operasi PT Media Djaya Bersama (2021-2023).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Komisaris PT Mifa Bersaudara (2021-sekarang);
- Komisaris PT Bara Energi Lestari (2021-sekarang).

Di Dalam Perusahaan:
Anggota Komite Investasi Perseroan (2022-sekarang).

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
Since July 1, 2022 pursuant to Internal Memo ABM-BOD/016/ INTER/ADJ/VII/2022.

EDUCATION
- Bachelor's Degree in Accounting, Faculty of Economy, Diponegoro University (1995);
- Bachelor of Law, Faculty of Law of Gadjah Mada University (1993);
- Master's Degree in Management - International Finance, Faculty of Economy and Business, University of Indonesia (2012); and
- Master of Business Administration - International Business, University of Pierre Mendes France (UPMF) (2012).

CERTIFICATION
- Chartered Accountant (CA);
- Certified Fraud Examiners (CFE); and
- Licensed to practice law as an advocate by the Indonesian Bar Association (PERADI).

WORK EXPERIENCE
- GM Audit of PT Matahari Department Store Tbk (2009-2012);
- Group Head Audit of the Company (2012-2015);
- Head of Financial Reporting and Analysis of ABM (2015-2018);
- Group Corporate Controller of ABM (2018-2022); and
- Director of Operations of PT Media Djaya Bersama (2021-2023).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- Commissioner of PT Mifa Bersaudara (2021-present);
- Commissioner of PT Bara Energi Lestari (2021-present).

Within ABM:
Member of Investment Committee of the Company (2022-present).



Antonius Roni Setyawan

Chief Operating Officer/COO (Logistics, Engineering & New Businesses)
Chief Operating Officer/COO (Logistics, Engineering & New Businesses)

KEWARGANEGARAAN
NATIONALITY
Indonesia
Indonesian

KELAHIRAN
BORN
Ambarawa, 23 Mei 1968
Ambarawa, May 23, 1968

USIA
AGE
55 tahun
55 years old

DOMISILI
DOMICILE
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

PERIODE DAN DASAR PENGANGKATAN
Sejak 30 Juni 2023 berdasarkan Internal Memo IOM 016/INTRA/ADJ/VI/2023.

RIWAYAT PENDIDIKAN
- Master of Science in Transportation dari Massachusetts Institute of Technology, AS (1995)
- Business Administration (magna cum laude) dari Northeastern University, AS (1993).

SERTIFIKASI PROFESI
Tidak ada.

PENGALAMAN KERJA
- Operations Manager APL Logistics (1997);
- Business Development Manager APL Logistics (1999-2000);
- Senior Consultant to the Operations Management Group di Booz & Co. (2000-2002);
- Business Development Manager Grup Tiara Marga Trakindo (TMT) (2002);
- Presiden Direktur CKB Logistics (2007-2013);
- Chief Supply Chain Officer Trakindo Utama (2014-2016);
- Chief Operating Officer Trakindo Utama (2016-2021); dan
- Chief Customer Support Trakindo Utama (2021-2023).

RANGKAP JABATAN
Di Luar Perusahaan:
- Komisaris Utama PT Cipta Krida Bahari (2023-sekarang);
- Komisaris Utama PT Sanggar Sarana Baja (2023-sekarang);
- Komisaris PT Anzara Janitra Nusantara (2023-sekarang);
- Komisaris PT Nagata Dinamika (2023-sekarang);
- Komisaris PT Nagata Bio Energi (2023-sekarang);
- Komisaris PT Nagata Biogas Dwienergi (2023-sekarang);
- Komisaris PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu Ulu (2023-sekarang);
- Komisaris PT Nagata Dinamika Hidro Pongko (2023-sekarang); dan
- Komisaris PT Andara Candria Energi (2023-sekarang).

Di Dalam Perusahaan: tidak ada.

TERM OF OFFICE AND LEGAL BASIS OF APPOINTMENT
Since June 30, 2023 pursuant to Internal Memo IOM 016/INTRA/ADJ/VI/2023.

EDUCATION
- Master of Science in Transportation from Massachusetts Institute of Technology, AS (1995)
- Bachelor's Degree in Business Administration (magna cum laude) from Northeastern University, AS (1993).

CERTIFICATION
None.

WORK EXPERIENCE
- Operations Manager of APL Logistics (1997);
- Business Development Manager of APL Logistics (1999-2000);
- Senior Consultant to the Operations Management Group at Booz & Co. (2000-2002);
- Business Development Manager of Tiara Marga Trakindo (TMT) Group (2002);
- President Director of CKB Logistics (2007-2013);
- Chief Supply Chain Officer of Trakindo Utama (2014-2016);
- Chief Operating Officer of Trakindo Utama (2016-2021); and
- Chief Customer Support of Trakindo Utama (2021-2023).

CONCURRENT POSITIONS
Other than ABM:
- President Commissioner of PT Cipta Krida Bahari (2023-present);
- President Commissioner of PT Sanggar Sarana Baja (2023-present);
- Commissioner of PT Anzara Janitra Nusantara (2023-present);
- Commissioner of PT Nagata Dinamika (2023-present);
- Commissioner of PT Nagata Bio Energi (2023-present);
- Commissioner of PT Nagata Biogas Dwienergi (2023-present);
- Commissioner of PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu Ulu (2023-present);
- Commissioner of PT Nagata Dinamika Hidro Pongko (2023-present); and
- Commissioner of PT Andara Candria Energi (2023-present).

Within ABM: None

DEMOGRAFI SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources Demographics



Hingga akhir tahun 2023, Grup ABM mempekerjakan 11.195 karyawan, meningkat 1.892 orang atau 20,35% dibandingkan jumlah karyawan Perusahaan di tahun 2022 yang mencapai 9.302 orang. Jumlah ini terdiri dari 133 karyawan Perusahaan dan 11.062 karyawan Entitas Anak.

Adanya kenaikan jumlah karyawan tersebut disebabkan berkembangnya bisnis pada *site project* di anak usaha. Tingkat perputaran/*turnover* karyawan tahun 2023 sebesar 1,18%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,20%.

Di bawah ini disajikan jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan level organisasi/jabatan, tingkat pendidikan, status kepegawaian, usia, dan gender atau jenis kelamin.

As of the end of 2023, the ABM Group employee comprised 11,195 people, marking a rise of 1,892 individuals or 20.35% compared to the preceding year, during which the workforce totalled 9,302 individuals. This figure encompasses 133 Company employees and 11,062 employees from Subsidiaries.

The increase in the number of employees was due to business development at project sites in subsidiaries. The employee turnover rate for 2023 stands at 1.18%, exhibiting a decrease from the previous year's rate of 1.20%.

The subsequent section presents a breakdown of the employee by organizational level/position, educational level, employment status, age, and gender.

Jumlah Karyawan 2021-2023
Number of Employees 2021-2023

(orang | people)

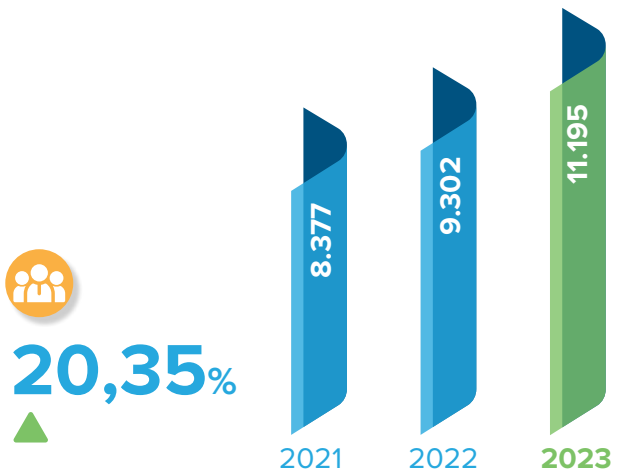

Perusahaan mempekerjakan 11.195 karyawan, meningkat 1.892 orang atau 20,35% dibandingkan jumlah karyawan Perusahaan di tahun 2022 yang mencapai 9.302 orang

the Company's employee comprised 11,195 people, marking a rise of 1,892 individuals or 20.35% compared to the preceding year, during which the workforce totalled 9,302 individuals

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan
Number and Composition of Employees Based on Organizational Level/Position

(orang | people)

Level Jabatan Position Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	%
ABM										
Director/Chief	6	-	6	0,05	5	-	5	0,05	1	20,00
General Manager	-	-	-	0,00	1	-	1	0,01	(1)	-100,00
Senior Manager	12	2	14	0,13	11	2	13	0,14	1	7,69
Manager	14	15	29	0,26	15	16	31	0,33	(2)	-6,45
Staff & Non-Staff	37	47	84	0,75	42	43	85	0,91	(1)	-1,18
Sub Jumlah **Sub Total**	**69**	**64**	**133**	**1,19**	**74**	**61**	**135**	**1,45**	**(2)**	**-1,48**
Entitas Anak **Subsidiary**										
Director/Chief	8	1	9	0,08	7	-	7	0,08	2	28,57
General Manager	-	-	-	0,00	4	2	6	0,06	(6)	-100,00
Senior Manager	34	2	36	0,32	28	6	34	0,37	2	5,88
Manager	118	22	140	1,25	117	21	138	1,48	2	1,45
Staff & Non-Staff	10.338	539	10.877	97,16	8.516	466	8.982	96,56	1.894	21,09
Sub Jumlah Sub Total	10.498	564	11.062	98,81	8.672	495	9.167	98,55	1.894	20,66
Jumlah Total	**10.567**	**628**	**11.195**	**100,00**	**8.746**	**556**	**9.302**	**100,00**	**1.892**	**20,34**

L = Laki-laki | Male
P = Perempuan | Female

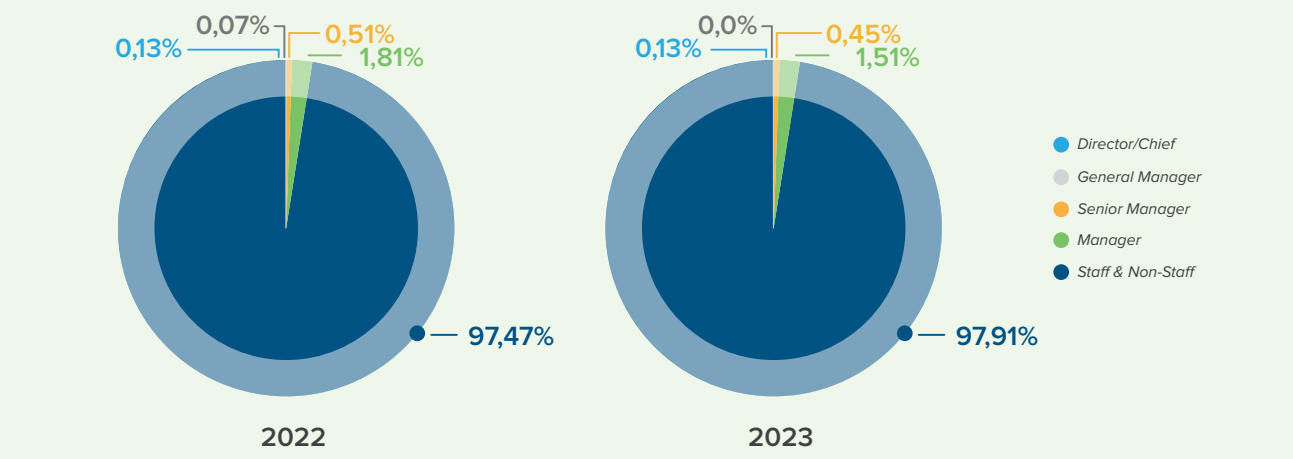

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Number and Composition of Employees Based on Age

(orang | people)

Jenjang Usia Age	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	%
ABM										
> 55 tahun > 55 years old	5	-	5	0,04	4	-	4	0,04	1	25,00
46-55 tahun 46-55 years old	18	9	27	0,24	15	6	21	0,23	6	28,57
36-45 tahun 36-45 years old	23	19	42	0,38	23	19	42	0,45	-	0,00
25-35 tahun 25-35 years old	33	19	52	0,46	24	25	49	0,53	3	6,12
< 25 tahun < 25 years old	3	4	7	0,06	8	11	19	0,20	(12)	-63,16
Sub Jumlah Sub Total	**82**	**51**	**133**	**1,19**	**74**	**61**	**135**	**1,45**	**(2)**	**-1,48**
Entitas Anak Subsidiary										
> 55 tahun > 55 years old	28	3	31	0,28	16	2	18	0,19	13	72,22
46-55 tahun 46-55 years old	1.169	22	1.191	10,64	952	24	976	10,49	215	22,03
36-45 tahun 36-45 years old	3.571	109	3.680	32,87	3.003	90	3.093	33,25	586	18,95
25-35 tahun 25-35 years old	4.742	358	5.100	45,56	3.878	304	4.182	44,96	918	21,95
< 25 tahun < 25 years old	988	72	1.060	9,47	823	75	898	9,65	162	18,04
Sub Jumlah Sub Total	**10.497**	**564**	**11.061**	**98,81**	**8.672**	**495**	**9.167**	**98,55**	**1.894**	**20,66**
Jumlah Total	**10.562**	**633**	**11.195**	**100,00**	**8.746**	**556**	**9.302**	**100,00**	**1.892**	**20,34**

L = Laki-laki | Male
P = Perempuan | Female

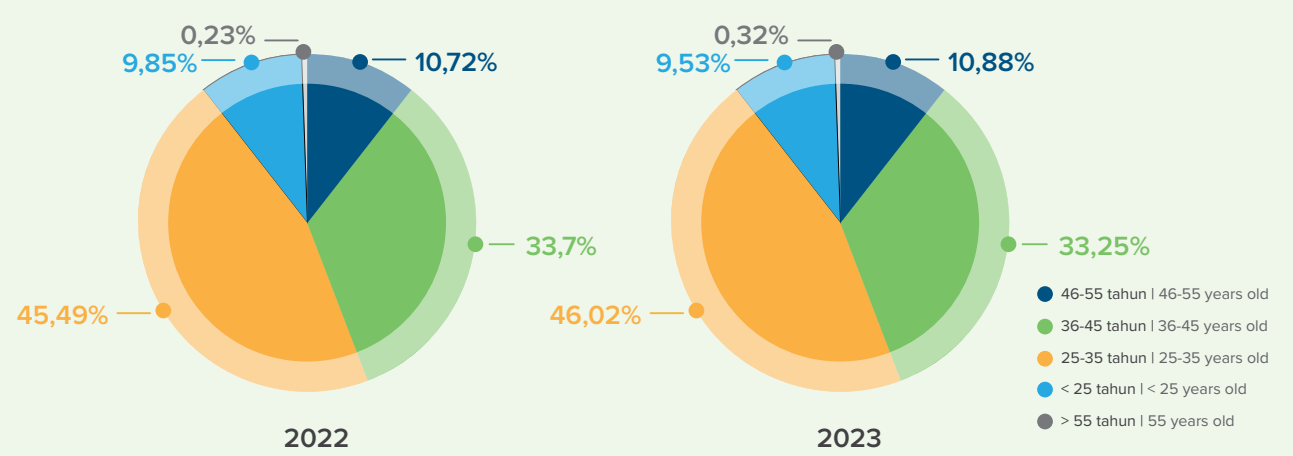

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Number and Composition of Employees Based on Educational Level

(orang | people)

Tingkat Pendidikan Educational Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	%
ABM										
S2 Master	27	12	39	0,35	29	10	39	0,40	0	0
S1 Bachelor	38	46	84	0,75	41	46	87	0,90	(3)	-3,45
D1, D2, D3 Associate	2	5	7	0,06	2	4	6	0,06	1	16,67
SMA dan Setara High School	2	1	3	0,03	2	1	3	0,03	0	0
Sub Jumlah Sub Total	**69**	**64**	**133**	**1,19**	**74**	**61**	**135**	**1,45**	**(2)**	**-1,48**
Entitas Anak Subsidiary										
S2 Master	51	10	61	0,54	61	12	73	0,78	(12)	-16,44
S1 Bachelor	1.636	415	2.051	18,32	1.300	365	1.665	17,90	386	23,18
D1, D2, D3 Associate	583	62	645	5,76	471	64	535	5,75	110	20,56
SMA dan Setara High School	8.253	52	8.305	74,19	6.840	54	6.894	74,11	1.411	20,47
Sub Jumlah Sub Total	**10.523**	**539**	**11.062**	**98,81**	**8.672**	**495**	**9.167**	**98,55**	**1.895**	**20,67**
Jumlah Total	**10.592**	**603**	**11.195**	**100,00**	**8.746**	**556**	**9.302**	**100,00**	**1.893**	**20,35**

L = Laki-laki | Male
P = Perempuan | Female

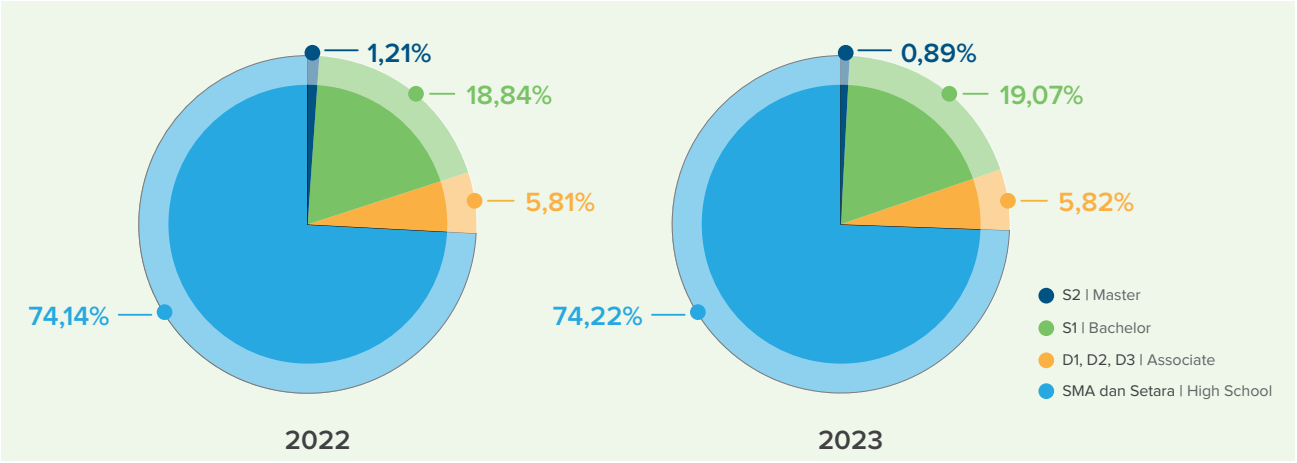

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
Number and Composition of Employees Based on Employment Status

(orang | people)

Status Kepegawaian Employment Status	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	L	P	Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	%
ABM										
Permanen Permanent	67	61	128	1,14	60	45	105	1,13	23	21,90
Kontrak Contract	2	3	5	0,04	14	16	30	0,32	(25)	-83,33
Sub Jumlah Sub Total	**69**	**64**	**133**	**1,19**	**74**	**61**	**135**	**1,45**	**(2)**	**-1,48**
Entitas Anak Subsidiary										
Permanen Permanent	7.232	413	7.645	68,29	6.056	362	6.418	69,00	1.226	19,10
Kontrak Contract	3.266	151	3.417	30,53	2.616	133	2.749	29,55	668	24,30
Sub Jumlah Sub Total	**10.498**	**564**	**11.062**	**98,81**	**8.672**	**495**	**9.167**	**98,55**	**1.894**	**20,66**
Jumlah Total	**10.567**	**628**	**11.195**	**100,00**	**8.746**	**556**	**9.302**	**100,00**	**1.892**	**20,35**

L = Laki-laki | Male
P = Perempuan | Female

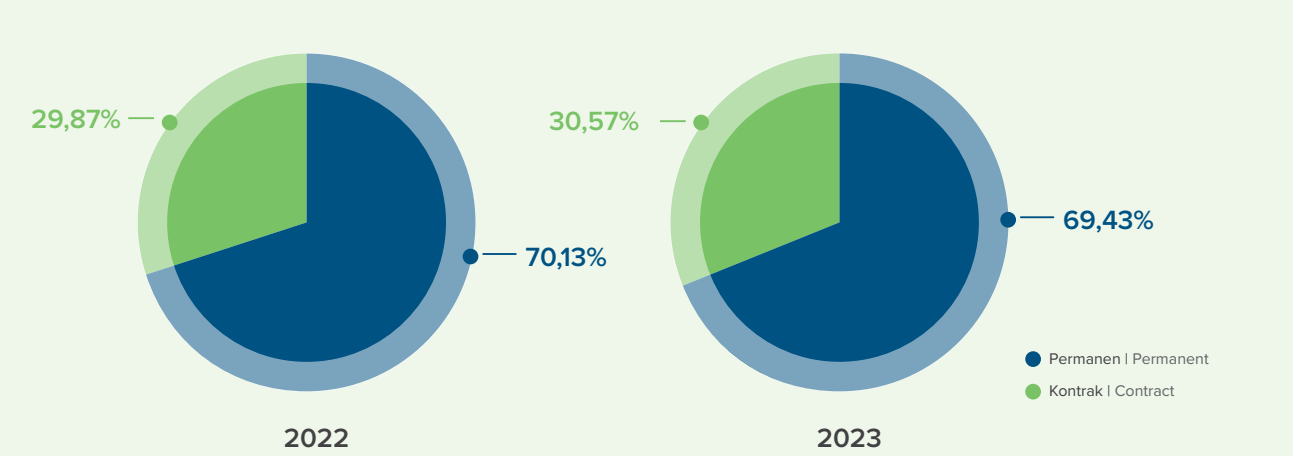

Jumlah dan Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Number and Composition of Employees Based on Gender

(orang | people)

Jenis Kelamin Gender	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (decrease)	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition	Orang People	%
ABM						
Laki-laki Male	69	0,62	74	0,80	(5)	-6,76
Perempuan Female	64	0,57	61	0,66	3	4,92
Sub Jumlah Sub Total	**133**	**1,19**	**135**	**1,45**	**(2)**	**-1,48**
Entitas Anak Subsidiary						
Laki-laki Male	10.498	93,77	8.672	93,23	1.825	21,05
Perempuan Female	564	5,04	495	5,32	69	13,94
Sub Jumlah Sub Total	**11.062**	**98,81**	**9.167**	**98,55**	**1.894**	**20,66**
Jumlah Total	**11.195**	**100,00**	**9.302**	**100,00**	**1.892**	**20,34**

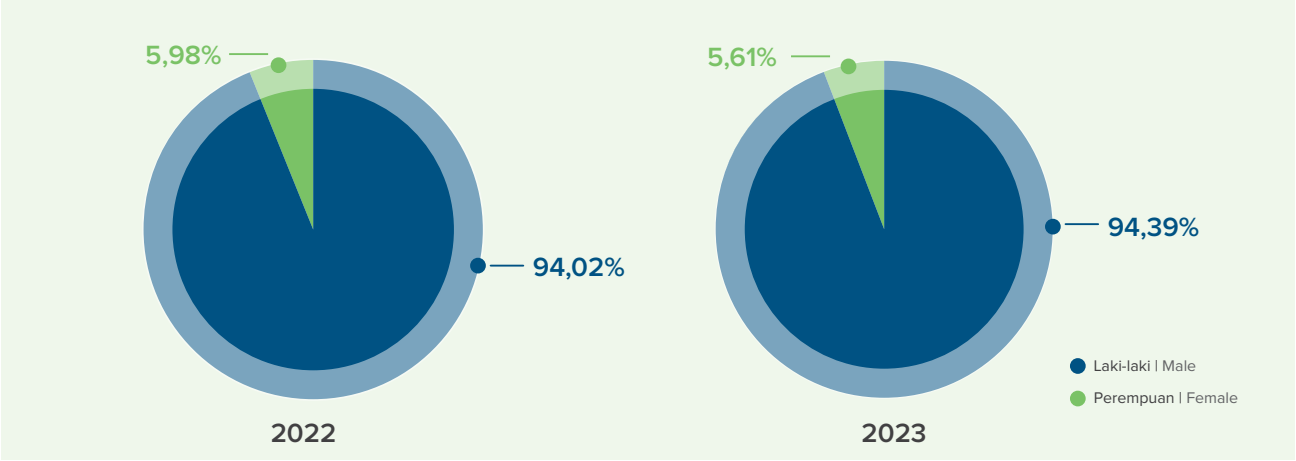

Rincian tentang pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan dan komitmen ABM untuk tumbuh bersama seluruh karyawan dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Details regarding the fulfilment of employment rights and ABM's commitment to mutually grow with all employees is available in the Sustainability Report, which is an integral document of this Annual Report.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM
Chronology of Stock Listing

Kronologi pencatatan saham Perusahaan sejak Penawaran Umum Perdana hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The chronology of the Company's stock listing since the Initial Public Offering until the end of 2023 is as follows:

Aksi Korporasi Corporate Action	**Tanggal Pencatatan** Listing Date	**Bursa Tempat Penerbitan dan Pencatatan Saham** Share Listed on Exchange	**Jumlah Penambahan Saham** Additional Shares	**Nilai Nominal Saham** Share Nominal Value (Rp)	**Harga Penawaran Saham** Share Offering Price (Rp)	**Akumulasi Saham (Lembar)** Total Shares Outstanding (Shares)
Pra Penawaran Umum Perdana **Pra Initial Public Offering**						
Pra Penawaran Umum Perdana Pra Initial Public Offering						2.202.532.000
Penawaran Umum Perdana* Initial Public Offering*	6 Desember 2011 December 6, 2011	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	550.633.000	500	3.750	2.753.165.000

*) Setelah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Surat No. S-12687/BL/2011 pada tanggal 24 November 2011.
*) After receiving the effective statement from Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam-LK) through a Decree No. S-12687/BL/2011 dated November 24, 2011.

PEMEGANG SAHAM
Shareholders

Tidak Terdapat Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan di atas 5% Di Sepanjang Tahun 2023.
There were no changes in the Company's shareholders above 5% throughout 2023.

Informasi tentang Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Manajemen Kunci
Information about the Company's Share Ownership by Key Management Members

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan
Composition of the Company's Shareholders

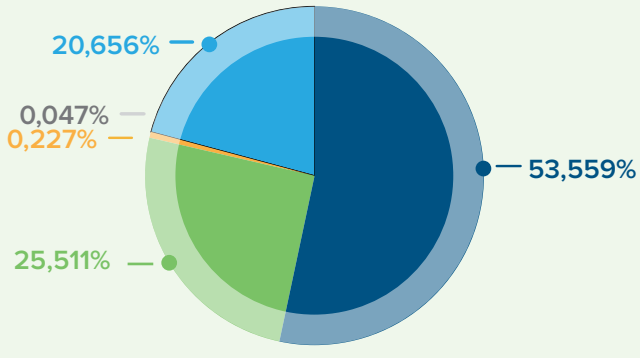

Komposisi Kepemilikan Saham Perusahaan
Composition of the Company's Shareholders

Pemegang Saham Shareholder	Jenis Saham Types of Shares	31 Desember 2023 December 31, 2023 Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (AS$) Issued and Fully Paid Capital (US$)	31 Desember 2022 December 31, 2022 Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (AS$) Issued and Fully Paid Capital (US$)
Kepemilikan Saham 5% atau Lebih **Share Ownership of 5% or More**							
TMT	Saham Biasa Common Shares	1.474.573.133	53,559	78.042.982	1.474.573.133	53,559	78.042.982
Valle	Saham Biasa Common Shares	702.349.867	25,511	37.172.438	702.349.867	25,511	37.172.438
Sub Total **Sub Total**		**2.176.923.000**	**79,070**	**115.215.420**	**2.176.923.000**	**79,070**	**115.215.420**
Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi **Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors**							
Dewan Komisaris Board of Commissioners	MESA	6.254.000	0,227	809.944	6.254.000	0,227	809.944
Direksi Board of Directors	MESA	1.283.500	0,047	70.363	1.283.500	0,047	70.363
Sub Total **Sub Total**		**7.537.500**	**0,274**	**880.307**	**7.537.500**	**0,274**	**880.307**
Kepemilikan Saham di Bawah 5% **Share Ownership Below 5%**							
Masyarakat Umum dan Karyawan General Public and Employees	Saham Biasa Common Shares	568.704.500	20,656	30.459.181	568.704.500	20,656	30.459.181
Sub Total **Sub Total**		**568.704.500**	**20,656**	**30.459.181**	**568.704.500**	**20,656**	**30.459.181**
Total **Total**		**2.753.165.000**	**100,000**	**146.554.908**	**2.753.165.000**	**100,000**	**146.554.908**

Pemegang Saham Shareholder	Kepemilikan Saham ABM secara Langsung Direct Ownership of ABM Shares					Kepemilikan Saham ABM secara Tidak Langsung Indirect Ownership of ABM Shares			
	Jenis Saham Types of Shares	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022		31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 December 31, 2022	
		Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**									
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama President Commissioner	MESA	6.120.500	0,222	6.120.500	0,222	586.290.278 (melalui | through TMT)	39,760	586.290.278 (melalui | through TMT)	39,760
						280.939.947 (melalui | through Valle)	40,000	280.939.947 (melalui | through Valle)	40,000
Mivida Hamami Komisaris Commissioner	MESA	133.500	0,005	133.500	0,005	146.572.569 (melalui | through TMT)	9,940	146.572.569 (melalui | through TMT)	9,940
						70.234.987 (melalui | through Valle)	10,000	70.234.987 (melalui | through Valle)	10,000
Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manggi Taruna Habir Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah **Sub Total**		**6.254.000**	**0,227**	**6.254.000**	**0,227**				
Direksi **Board of Directors**									
Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama President Director	MESA	1.283.500	0,047	1.283.500	0,047	-	-	-	-
Adrian Erlangga Direktur Director	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haris Mustarto Direktur Director	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah **Sub Total**		**1.283.500**	**0,047**	**1.283.500**	**0,047**				
Manajemen Kunci Lainnya Other Key Management									
Doni Syamsurianto Chief Information Officer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hans Christian Manoe Chief Financial Officer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah **Sub Total**		**-**	**-**	**-**	**-**				
Jumlah **Total**		**7.537.500**	**0,274**	**7.537.500**	**0,274**				

Kepatuhan pelaporan transaksi saham ABM oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait pemenuhan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dapat dilihat pada bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini.

The compliance reporting of ABM share transactions by the Board of Commissioners and Directors, in accordance with OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 regarding Ownership Reports or Any Changes in Public Company Share Ownership, is available for review in the Good Corporate Governance chapter of this annual report.

Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Status
Shareholder Composition Based on Status

Status Pemegang Saham Shareholder Status	31 Desember 2023 December 31, 2023			31 Desember 2022 December 31, 2022		
	Jumlah Pemilik Number of Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)	Jumlah Pemilik Number of Shareholder	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Shares)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Investor Domestik **Domestic Investors**						
Ritel Domestik **Domestic Retail**						
Perorangan Individuals	7.986	348.604.000	12,662	7.082	328.088.700	11,916
Institusi Domestik **Domestic Institutions**						
Koperasi Cooperatives	1	200.000	0,007	4	439.000	0,015
Asuransi Insurance Companies	3	4.458.400	0,162	2	2.399.100	0,087
Bank Bank	1	12.000	0,000	1	15.000	0,000
Perseroan Terbatas Limited Liability Companies	32	1.485.871.538	53,970	38	1.494.612.565	54,287
Lembaga Pemerintahan Government Institutions	-	-	-	1	133.200	0,004
Reksa Dana Mutual Fund	3	384.500	0,014	1	88.800	0,003
Sub Jumlah Institusi Domestik Sub Total of Domestic Institutions	**40**	**1.490.926.549**	**54,153**	**47**	**1.497.687.665**	**54,396**
Jumlah Investor Domestik **Total of Domestic Investors**	**8.026**	**1.839.530.438**	**66,815**	**7.129**	**1.825.776.365**	**66,315**
Investor Asing **Foreign Investor**						
Ritel Asing **Foreign Retail**						
Perorangan Individuals	18	314.900	0,011	15	510.300	0,018
Institusi Asing **Foreign Institutions**						
Badan Usaha Business Entity	85	913.319.212	33,173	100	926.877.947	33,665
Jumlah Investor Asing **Total of Foreign Investors**	**103**	**913.634.112**	**33,185**	**115**	**927.388.247**	**33,684**
Jumlah **Total**	**8.129**	**2.753.165.000**	**100,000**	**7.244**	**2.753.164.612**	**100,000**

Tren Kepemilikan Saham ABMM Berdasarkan Status Periode 2019-2023
ABMM Share Ownership Trends Based on Status for the 2019-2023 Period
per 31 Desember di setiap tahunnya | as of December 31 each year

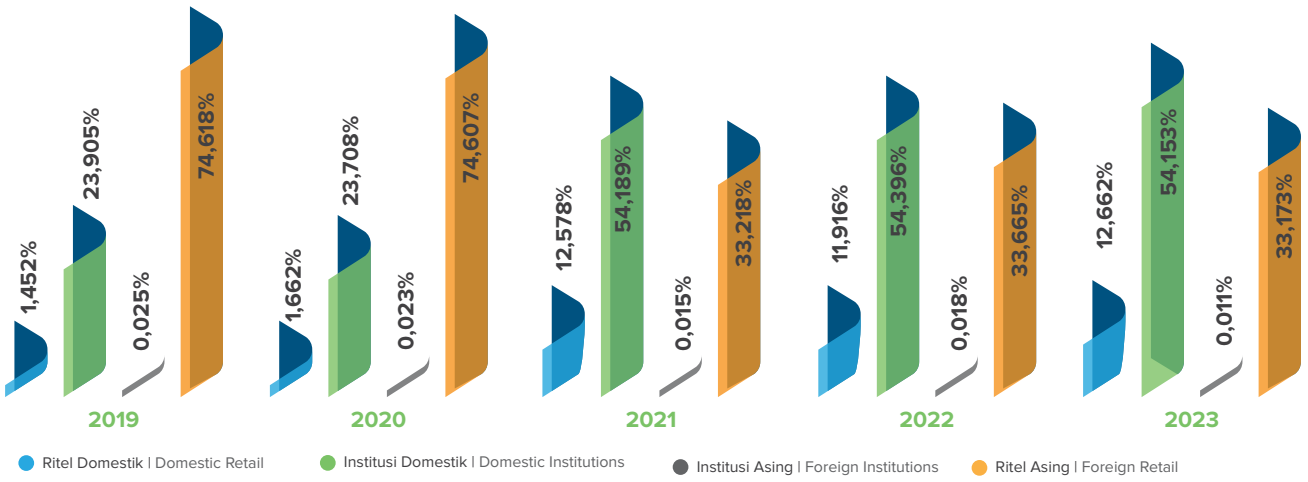

Jumlah Pemegang Saham ABMM dengan Kepemilikan Kurang dari 5% di Sepanjang Tahun 2023
Number of ABMM Shareholders with Ownership of Less than 5% Throughout 2023



20 Pemegang Saham Terbesar ABM Per 31 Desember 2023
Top 20 Shareholders of ABM Per December 31, 2023

No.	Nama Investor Investor Name	Status	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares	Persentasi Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
1	PT Tiara Marga Trakindo	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	1.474.573.133	53,559
2	Valle Verde Pte. Ltd.	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	702.349.867	25,511
3	Drs. Lo Kheng Hong	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	133.838.200	4,861
4	Noble Investment Corporation (SPC) Ltd.	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	127.715.300	4,639
5	Syailendra Asia Pte. Ltd.	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	20.000.000	0,726
6	Hermanto Tanoko	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	17.281.600	0,628
7	Noble Investment Corporation (SPC) Ltd.	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	9.351.700	0,340

No.	Nama Investor Investor Name	Status	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares	Persentasi Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
8	State Street Bank	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	8.640.200	0,314
9	FX Boedi Soebianto	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	7.967.500	0,290
10	Amir Sudjono	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	7.000.000	0,254
11	Joan Merri Tandiari	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	6.180.800	0,224
12	Rachmat Mulyana Hamami	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	6.120.500	0,222
13	PT Panin Sekuritas	Perseroan Terbatas Limited Liability Company	4.653.500	0,170
14	Anita Hasan	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	4.640.000	0,170
15	Surya Adil Wijaya	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	3.850.000	0,140
16	Dikky Handoyo	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	3.800.000	0,139
17	Bank of New York (Melon)	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	3.680.285	0,134
18	PT Prudential Life Assurance	Asuransi Insurance	3.411.200	0,124
19	Bank of New York (Melon)	Badan Usaha Asing Foreign Investment Company	3.259.201	0,120
20	Lily Aristanty	Perorangan Indonesia Indonesian Individuals	3.015.000	0,110

Informasi Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pengendali, Hingga Pemilik Akhir
Information on Majority Shareholders, Controlling Shareholders, and Ultimate Beneficial Owners

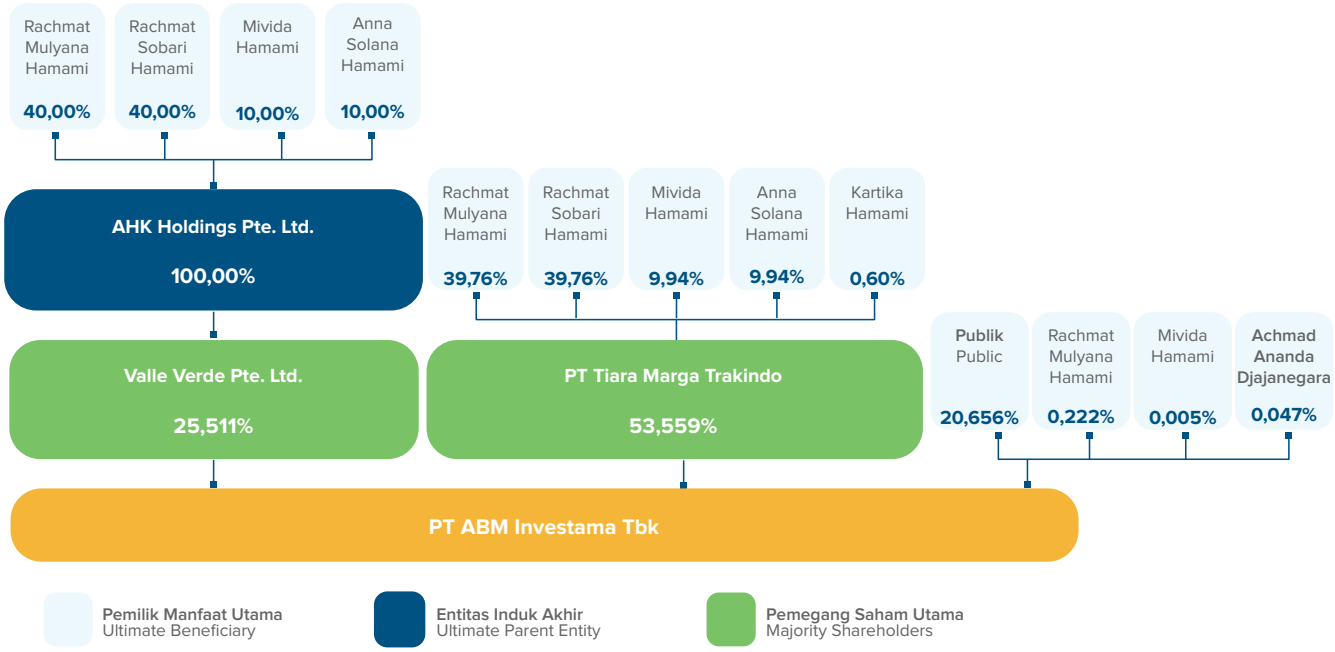

Berdasarkan struktur di atas, Pemegang Saham Utama Perusahaan adalah TMT dan Valle.Sementara itu, AHK Holdings Pte. Ltd. merupakan Entitas Induk Akhir (*Ultimate Parent Entity*) Perusahaan, sedangkan Rachmat Mulyana Hamami, Rachmat Sobari Hamami, Mivida Hamami, dan Anna Solana Hamami tercatat sebagai Pemilik Manfaat Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan, melalui kepemilikan saham mayoritas langsung di TMT dan tidak langsung di Valle.

Based on the above structure, the Company's Major Shareholders are TMT and Valle. Meanwhile, AHK Holdings Pte. Ltd. is the Company's Ultimate Parent Entity, while Rachmat Mulyana Hamami, Rachmat Sobari Hamami, Mivida Hamami, and Anna Solana Hamami are listed as the Main Beneficial Owners and Controlling Shareholders of the Company, through direct majority share ownership at TMT and indirectly at Valle.

STRUKTUR GRUP
Group Structure

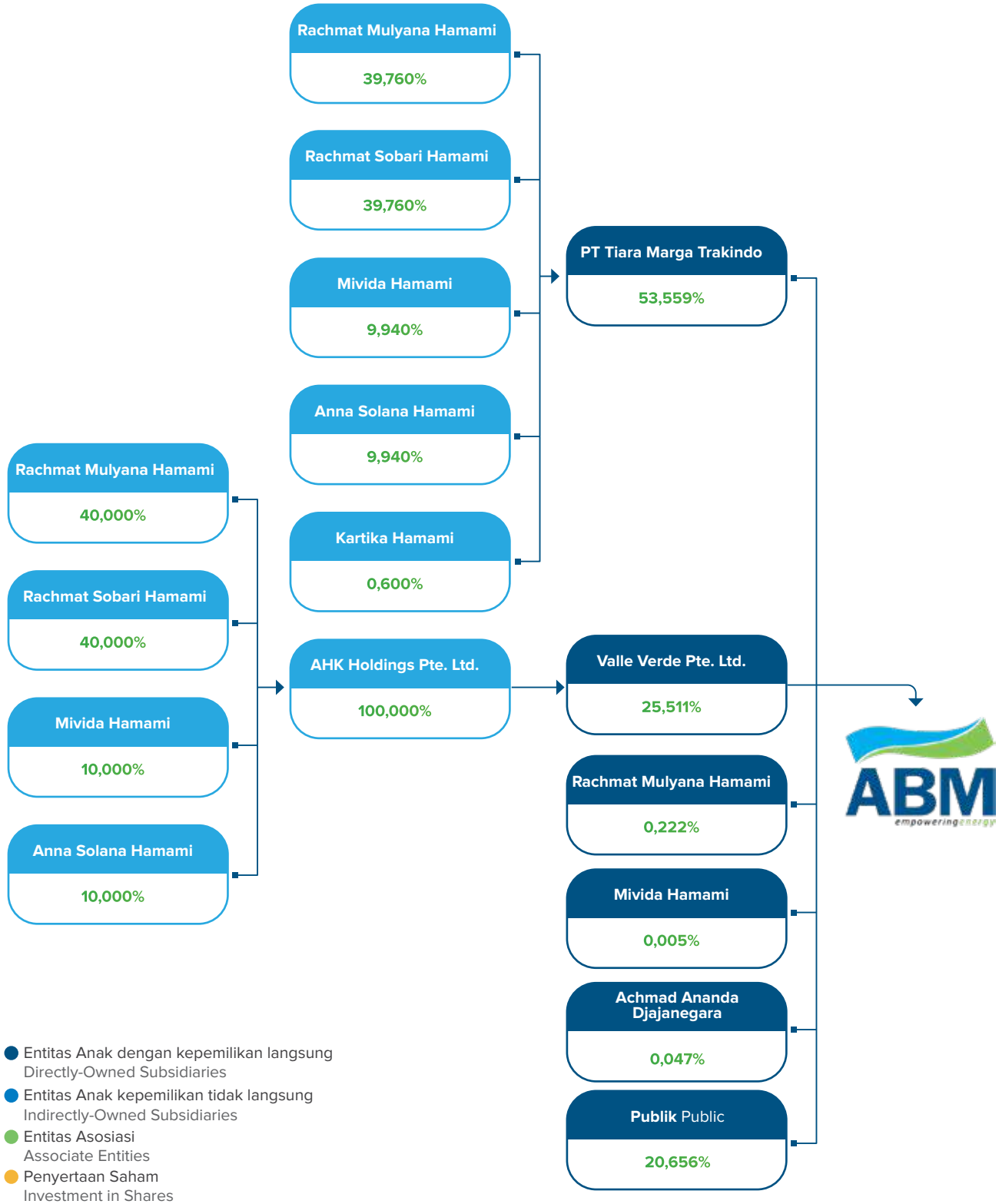

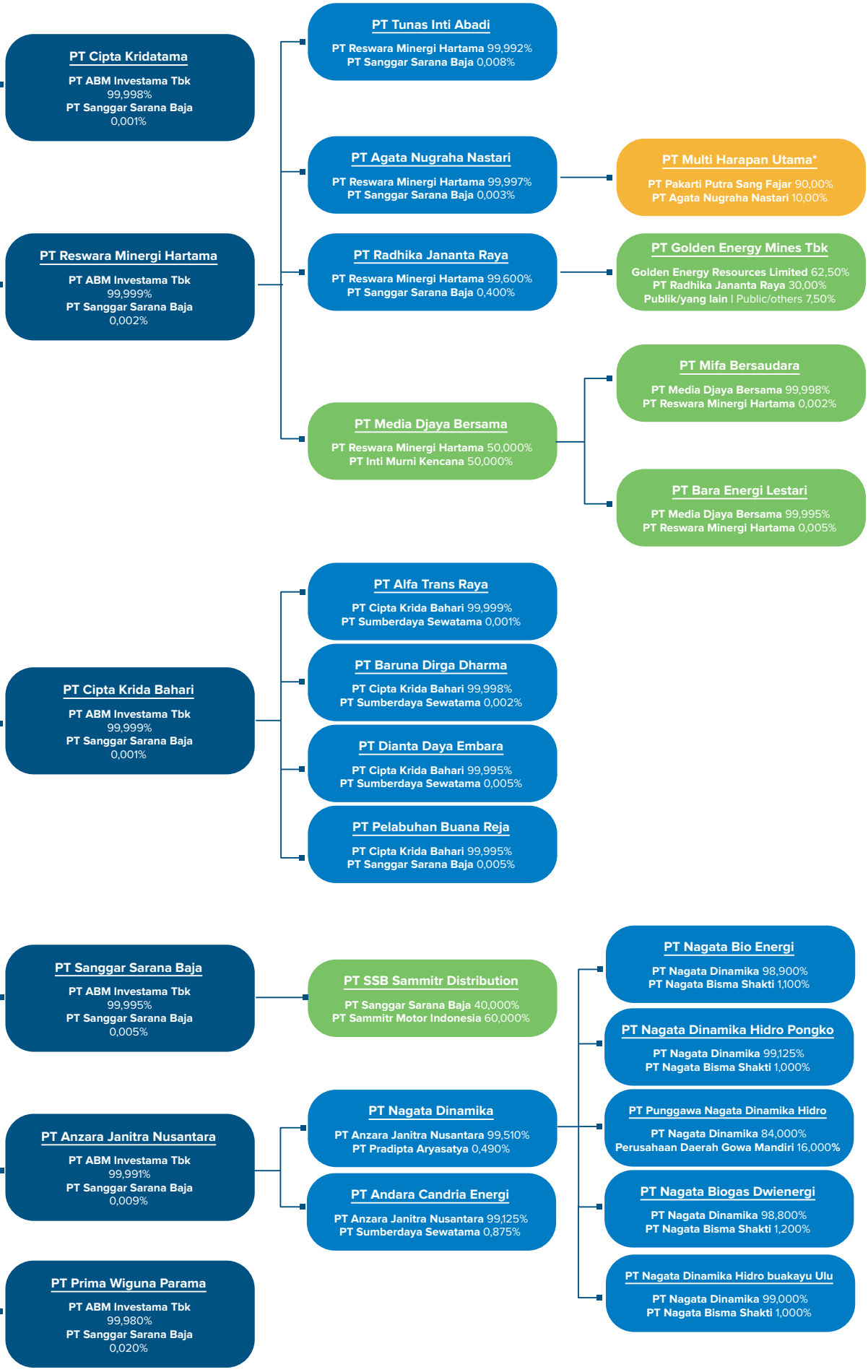
PT Cipta Kridatama
PT ABM Investama Tbk 99,998%
PT Sanggar Sarana Baja 0,001%
PT Tunas Inti Abadi
PT Reswara Minergi Hartama 99,992%
PT Sanggar Sarana Baja 0,008%
PT Agata Nugraha Nastari
PT Reswara Minergi Hartama 99,997%
PT Sanggar Sarana Baja 0,003%
PT Multi Harapan Utama*
PT Pakarti Putra Sang Fajar 90,00%
PT Agata Nugraha Nastari 10,00%
PT Reswara Minergi Hartama
PT ABM Investama Tbk 99,999%
PT Sanggar Sarana Baja 0,002%
PT Radhika Jananta Raya
PT Reswara Minergi Hartama 99,600%
PT Sanggar Sarana Baja 0,400%
PT Golden Energy Mines Tbk
Golden Energy Resources Limited 62,50%
PT Radhika Jananta Raya 30,00%
Publik/yang lain | Public/others 7,50%
PT Media Djaya Bersama
PT Reswara Minergi Hartama 50,000%
PT Inti Murni Kencana 50,000%
PT Mifa Bersaudara
PT Media Djaya Bersama 99,998%
PT Reswara Minergi Hartama 0,002%
PT Bara Energi Lestari
PT Media Djaya Bersama 99,995%
PT Reswara Minergi Hartama 0,005%
PT Cipta Krida Bahari
PT ABM Investama Tbk 99,999%
PT Sanggar Sarana Baja 0,001%
PT Alfa Trans Raya
PT Cipta Krida Bahari 99,999%
PT Sumberdaya Sewatama 0,001%
PT Baruna Dirga Dharma
PT Cipta Krida Bahari 99,998%
PT Sumberdaya Sewatama 0,002%
PT Dianta Daya Embara
PT Cipta Krida Bahari 99,995%
PT Sumberdaya Sewatama 0,005%
PT Pelabuhan Buana Reja
PT Cipta Krida Bahari 99,995%
PT Sanggar Sarana Baja 0,005%
PT Sanggar Sarana Baja
PT ABM Investama Tbk 99,995%
PT Sanggar Sarana Baja 0,005%
PT SSB Sammitr Distribution
PT Sanggar Sarana Baja 40,000%
PT Sammitr Motor Indonesia 60,000%
PT Nagata Bio Energi
PT Nagata Dinamika 98,900%
PT Nagata Bisma Shakti 1,100%
PT Nagata Dinamika Hidro Pongko
PT Nagata Dinamika 99,125%
PT Nagata Bisma Shakti 1,000%
PT Anzara Janitra Nusantara
PT ABM Investama Tbk 99,991%
PT Sanggar Sarana Baja 0,009%
PT Nagata Dinamika
PT Anzara Janitra Nusantara 99,510%
PT Pradipta Aryasatya 0,490%
PT Punggawa Nagata Dinamika Hidro
PT Nagata Dinamika 84,000%
Perusahaan Daerah Gowa Mandiri 16,000%
PT Andara Candria Energi
PT Anzara Janitra Nusantara 99,125%
PT Sumberdaya Sewatama 0,875%
PT Nagata Biogas Dwienergi
PT Nagata Dinamika 98,800%
PT Nagata Bisma Shakti 1,200%
PT Nagata Dinamika Hidro buakayu Ulu
PT Nagata Dinamika 99,000%
PT Nagata Bisma Shakti 1,000%
PT Prima Wiguna Parama
PT ABM Investama Tbk 99,980%
PT Sanggar Sarana Baja 0,020%

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/*JOINT VENTURE*

List of Subsidiaries and Associate Entities/Joint Venture

	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyetoran Modal oleh ABM Year of Capital Deposit by ABM	Kepemilikan ABM (%) ABM Ownership (%)		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (ribuan AS$) Total Assets Before Elimination (thousands of US$)		Status Operasi Operational Status
				2023	2022	2023	2022	
Entitas Anak **Subsidiaries**								
PT Cipta Kridatama ("CK") Gedung TMT 2, 3rd Floor Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6866 (+62 21) 2997 6867 www.ciptakridatama.co.id	Kontraktor pertambangan Mining contractor	1999	2009	99,99	99,99	1.097.488	734.360	Beroperasi Has operated
PT Reswara Minergi Hartama ("Reswara") Gedung TMT 1, 9th Floor, Suite 902 Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta, 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6733 (+62 21) 2997 6731/6732 www.reswara.co.id	Perdagangan Trading	2010	2010	99,99	99,99	761.718	980.877	Beroperasi Has operated
PT Cipta Krida Bahari ("CKB Logistics") Gedung TMT 1, 7th Floor, Suite 701 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6777/6788 (+62 21) 2997 6797 www.ckb.co.id	Jasa logistic Logistic services	1997	2009	99,99	99,99	168.985	147.591	Beroperasi Has operated
PT Sanggar Sarana Baja ("SSB") Gedung TMT 1, 5th Floor, Suite 501 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6830 (+62 21) 2997 6835 www.ptssb.co.id	Perencanaan rekayasa mesin, pengembangan, dan pembuatan perlengkapan penunjang alat-alat berat, dan alat angkut bahan Planning for mechanical engineering, development and manufacture of supporting equipment for heavy equipment and transporting materials	1977	2009	99,99	99,99	86.354	89.301	Beroperasi Has operated
PT Anzara Janitra Nusantara ("AJN") Gedung TMT 1, 18th Floor, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6767 (+62 21) 2997 6768	Industri pembangkit listrik *energy thermal* Thermal energy IPP	-	2016	99,99	99,99	10.185	4.229	Belum Beroperasi Has not operated yet
PT Prima Wiguna Parama ("PWP") Gedung TMT 1, 18th Floor, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6777/6788 (+62 21) 2997 6797	Jasa dan perdagangan umum Services and general trading	2017	2016	99,99	99,99	76.872	60.356	Beroperasi Has operated

	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyetoran Modal oleh ABM Year of Capital Deposit by ABM	Kepemilikan ABM (%) ABM Ownership (%)		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (ribuan AS$) Total Assets Before Elimination (thousands of US$)		Status Operasi Operational Status
				2023	2022	2023	2022	
Kepemilikan Tidak Langsung melalui Reswara **Indirect Ownership through Reswara**								
PT Tunas Inti Abadi ("TIA") Gedung TMT 1, Lt. 9 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, Indonesia (+62 21) 2997 6756 www.tiacoal.co.id	Pengembangan dan pertambangan sumber daya, terutama batu bara Development and mining resources, principally coal	2009	2010	99,99	99,99	159.737	165.127	Beroperasi Has operated
PT Agata Nugraha Nastari ("ANN") Gedung TMT 1, Lt. 18 Suite 1802 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560, Indonesia	Perdagangan Trading	2020	2019	99,99	99,99	23.376	45.895	Beroperasi Has operated
PT Radhika Jananta Raya ("RJR") Gedung TMT 1, 18th Floor, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Perdagangan Trading	2022	2022	99,60	99,60	524.431	488.631	Beroperasi Has operated
PT Mifa Bersaudara ("MIFA")	Pertambangan batu bara Coal mining	2012	2011	-	50,00	-	285.973	Beroperasi Has operated
PT Bara Energi Lestari ("BEL")	Pertambangan batu bara Coal mining	2011	2011	-	50,00	-	45.198	Beroperasi Has operated
Kepemilikan Tidak Langsung melalui CKB Logistics **Indirect Ownership through CKB Logistics**								
PT Alfa Trans Raya ("ATR") Gedung TMT 2, 2nd Floor Suite 201, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560Alamat	Trasnportasi laut Sea trasportation	2007	2006	99,99	99,99	5.215	4.270	Beroperasi Has operated
PT Baruna Dirga Dharma ("BDD") Gedung TMT 2, 2nd Floor Suite 201, Jl. Cilandak KKO No. 1	Trasnportasi laut domestik Domestic sea trasportation	2011	2011	99,99	99,99	35.113	31.226	Beroperasi Has operated
PT Dianta Daya Embara ("DDE") Gedung TMT 2, 2nd Floor Suite 201, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560	Bongkaran muat barang dan pelayanan kepelabuhan laut Stevedoring and sea port services	2017	2015	99,99	99,99	8.827	8.715	Beroperasi Has operated
PT Pelabuhan Buana Reja ("PBR") Gedung TMT 2, 2nd Floor Suite 201, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560	Pelayanan jasa kapal Ship operational service	2018	2010	99,99	99,99	22.498	20.273	Beroperasi Has operated
Kepemilikan Tidak Langsung melalui AJN **Indirect Ownership through AJN**								
PT Nagata Dinamika ("ND") Gedung TMT 2, 2nd Floor, Suite 201 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	-	2012	99,51	99,51	3.876	4.020	Belum Beroperasi Has not operated yet
PT Nagata Bio Energi ("NBE") Gedung TMT 2, 2nd Floor, Suite 201 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	2020	2014	98,90	98,90	3.562	3.848	Beroperasi Has operated

	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyetoran Modal oleh ABM Year of Capital Deposit by ABM	Kepemilikan ABM (%) ABM Ownership (%)		Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (ribuan AS$) Total Assets Before Elimination (thousands of US$)		Status Operasi Operational Status
				2023	2022	2023	2022	
PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu Ulu ("NDHBU") Gedung TMT 2, 2nd Floor, Suite 201, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	-	2014	99,00	99,00	29	29	Belum Beroperasi Has not operated yet
PT Nagata Dinamika Hidro Pongko ("NDHP") Gedung TMT 2, 2nd Floor, Suite 201 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	-	2014	99,00	99,00	18	18	Belum Beroperasi Has not operated yet
PT Punggawa Niagata Dinamika Hidro ("PNDH") Jl. Habibu DG Kulle No. 3 Sunggu Minasa, Somba Opu Gowa Sulawesi Selatan, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	-	2014	42,84	42,84	587	576	Belum Beroperasi Has not operated yet
PT Nagata Biogas Dwienergi ("NBD") Gedung TMT 2, 2nd Floor, Suite 201 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	-	2015	98,80	98,80	6	6	Belum Beroperasi Has not operated yet
PT Andara Candria Energi ("ACE") Gedung TMT 1, 18th Floor, Suite 1802 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560, Indonesia	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan Renewable energy IPP	-	2016	99,12	99,12	7.468	1.278	Belum Beroperasi Has not operated yet
Entitas Asosiasi **Associated Entity**								
Melalui Reswara **Through Reswara**								
PT Media Djaya Bersama ("MDB")	Perdagangan, pengembangan dan industri Trading, development and industry	2017	2011	-	50,00	-	89.569	Beroperasi Has operated
Melalui SSB **Through SSB**								
PT SSB Sammitr Distribution ("SSD")	Perdagangan dan distributor utama barang dagangan Trading and main distributorship of trading goods	2017	2017	40,00	40,00	-	-	Beroperasi Has operated
Melalui RJR **Through RJR**								
PT Golden Energy Mines Tbk ("GEMS")	Bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batu bara Coal mining through its subsidiaries and coal trading activities	2010	2022	30,00	30,00	1.312.042	1.129.087	Beroperasi Has operated

	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operation	Tahun Penyetoran Modal oleh ABM Year of Capital Deposit by ABM	Kepemilikan ABM (%) ABM Ownership (%)		Status Operasi Operational Status
				2023	2022	
Penyertaan Saham **Invesment in Shares**						
Langsung **Direct**						
PT Sumberdaya Sewatama ("Sewatama")	Penyewaan mesin pembangkit tenaga listrik Rental of a power plant	1992	2009	0,124	0,124	Beroperasi Has operated
Melalui ANN **Through ANN**						
PT Multi Harapan Utama ("MHU")	Pertambangan batu bara Coal mining	1992	2019	10,00	10,00	Beroperasi Has operated

PT CIPTA KRIDATAMA ("CK")

CK didirikan 8 April 1997 sebagai pengembangan jasa penyewaan dan penggunaan alat berat PT Trakindo Utama. Tumbuhnya industri pertambangan di Indonesia mendorong perusahaan mengubah haluan bisnisnya ke jasa pertambangan terpadu "dari tambang hingga pelabuhan" pada 2003. Pada tahun 2013, CK juga mengembangkan bisnisnya ke area jasa konstruksi. Pengembangan ini bertujuan memperluas jaringan bisnis sekaligus menyediakan solusi terintegrasi bagi seluruh klien atau calon klien di berbagai pertambangan.

CK adalah salah satu kontraktor pertambangan terkemuka di Indonesia yang didukung lebih dari 8.070 karyawan kompeten di bidangnya, 2.346 unit alat berat dan penunjangnya, serta sistem dan teknologi termodern. CK memegang sertifikasi ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, dan ISO 9001:2008, yang mencerminkan praktik-praktik berstandar tinggi dalam kualitas ketatalaksanaan, keselamatan, Kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan. Di tahun 2023, produksi pemindahan tanah CK mencapai lebih kurang 277,3 juta bcm.

CK was founded on April 8 1997 as a development service for the heavy equipment rental and use of PT Trakindo Utama. The growth of the mining industry in Indonesia encouraged the company to change its business direction to integrated mining services "from mine to port" in 2003. In 2013, CK also expanded its business into the construction services, aiming to broaden its business network while providing integrated solutions to clients across various mining ventures.

CK is one of the leading mining contractors in Indonesia which is supported by more than 8,070 skilled employees in their fields, 2,346 heavy equipment and supporting units, as well as the most modern systems and technology. CK holds ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 and ISO 9001:2008 certifications, which reflect high standard practices in management quality, safety, occupational health and environmental management. In 2023, CK's earthmoving production reached approximately 277.3 million bcm.

Alamat dan Kontak CK
Address and Contact of CK

Gedung TMT 2, 3rd Floor
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta, 12560, Indonesia
(+62 21) 2997 6866
(+62 21) 2997 6867
www.ciptakridatama.co.id

Komposisi Kepemilikan CK
Composition of CK Ownership

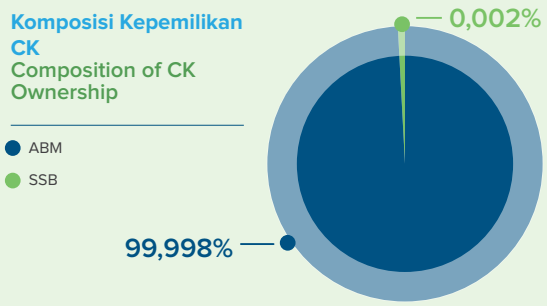

PT RESWARA MINERGI HARTAMA ("RESWARA")

Reswara merupakan perusahaan pengelola tambang batu bara termal dengan kandungan kalori yang rendah di Indonesia. Konsesi pertambangan batu bara di bawah Reswara terletak di provinsi Kalimantan Selatan melalui TIA serta di provinsi Aceh melalui MIFA di Aceh Barat dan BEL di Nagan Raya.

Dengan luas konsesi 3.085 hektar dan 0,64 juta ton sumber daya batu bara di akhir tahun 2023, TIA melakukan penambangan terbuka batu bara termal yang memenuhi persyaratan sebagai '*Compliant Coal*' dan dipasarkan secara global, baik dalam negeri dan luar negeri seperti ke India, Tiongkok, dan beberapa negara di Asia Tenggara untuk digunakan sebagai batu bara campuran.

Reswara is a company that manages thermal coal mines with low calorie content in Indonesia. Coal mining concessions under Reswara are located in South Kalimantan province through TIA as well as in Aceh province through MIFA in West Aceh and BEL in Nagan Raya.

TIA, spanning a concession area of 3,085 hectares and boasting 0.64 million tons of coal resources by the end of 2023, conducts open-pit mining of thermal coal that meets the requirement as 'Compliant Coal.' This coal is marketed globally, both domestically and internationally, including to India, China, and various Southeast Asian countries, for use as mixed coal.

Alamat dan Kontak Reswara
Address and Contact of Reswara

Gedung TMT 1, 9th Floor, Suite 902
Jl. Cilandak KKO No. 1,
Jakarta, 12560, Indonesia
(+62 21) 2997 6733
(+62 21) 2997 6731/6732
www.reswara.co.id

Komposisi Kepemilikan Reswara
Composition of Reswara Ownership

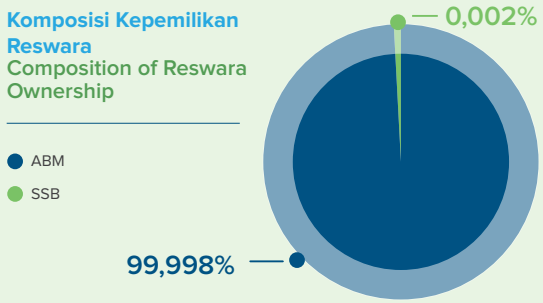

PT CIPTA KRIDA BAHARI ("CKB LOGISTICS")

CKB Logistics menyediakan jasa layanan logistik terpadu nasional dan memiliki spesialisasi pada *Project Logistics* dan Total *Solution Logistics*. Didirikan tahun 1997, saat ini CKB Logistics tersebar di 45 lokasi di seluruh Indonesia, termasuk di kota dan area yang sulit dijangkau transportasi komersial. Tidak hanya di Indonesia, CKB Logistics juga memiliki *Global Network* yang tersebar di 40 *Strategic Global Partners* pada 7 wilayah, dan di tahun 2023 CKB Logistics membuka beberapa fasilitas pergudangan baru di Kalimantan, Sumatra dan Nusa Tenggara.

CKB Logistics memegang lisensi dari Pemerintah Indonesia sebagai operator Pengelola Logistik Berikat (PLB) dan Sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) dari World Customs Organization. Selain itu, CKB Logistics memegang izin Badan Usaha Pelabuhan, yaitu PBR yang bergerak di bidang manajemen kepelabuhanan di Indonesia.

CKB Logistics is a provider of national integrated logistics services, specializing in Project Logistics and Total Solution Logistics. Established in 1997, CKB Logistics has established a presence across 45 locations in Indonesia, including areas that are challenging to access via conventional transportation means. Beyond Indonesia, CKB Logistics maintains a Global Network encompassing 40 Strategic Global Partners spanning 7 regions, and in 2023 CKB Logistics opened several new warehousing facilities in Kalimantan, Sumatra and Nusa Tenggara.

CKB Logistics is licensed by the Indonesian Government as a Bonded Logistics Management (PLB) operator and holds an Authorized Economic Operator (AEO) certification from the World Customs Organization. Additionally, CKB Logistics holds a Port Business Entity license through PBR, which operates in the field of port management in Indonesia.

Alamat dan Kontak CKB Logistics
Address and Contact of CKB Logistics

Gedung TMT 1, 7th Floor, Suite 701
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta, 12560, Indonesia
(+62 21) 2997 6777/6788
(+62 21) 2997 6797
www.ckb.co.id

Komposisi Kepemilikan CKB Logistics
Composition of CKB Logistics Ownership

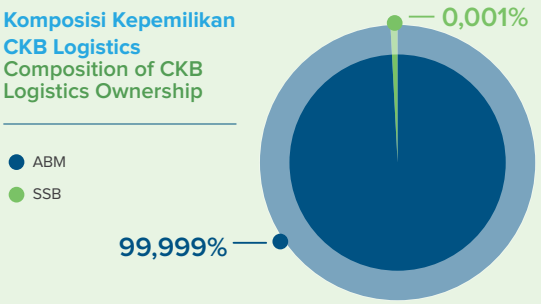

PT SANGGAR SARANA BAJA ("SSB")

SSB telah membangun reputasi unggul di industri manufaktur komponen alat berat dan jasa lainnya selama lebih dari empat dekade. Sejak didirikan pada 19 Maret 1977, SSB terus mengembangkan kompetensinya sebagai produsen komponen alat berat dari produk Caterpillar milik Trakindo hingga menjadi fabrikator ternama di industri minyak dan gas, serta pertambangan. Kemudian, SSB melakukan ekspansi bisnis dengan merambah industri migas, pertambangan, industrial, peralatan transportasi, rekondisi komponen alat berat, dan jasa pengelasan serta permesinan langsung di lokasi (*on-site*) operasional pelanggan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Perseroan senantiasa meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan melalui berbagai terobosan dalam penggunaan sumber daya, material, dan teknologi, serta pengelolaan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman. Dalam mendukung kegiatan operasional Perseroan, dan untuk memberikan layanan terbaik untuk para pelanggan, SSB memiliki *plant, workshop, sites* yang tersebar di 9 provinsi. Pada 2023, SSB dibagi berdasarkan *Sales & Operations West Indonesia; Sales, Operations & Export East Indonesia;* dan *Special Project Management* yang masing-masing ditopang oleh segmen usaha *Business Services & Recondition, Product, Product Support,* dan *Project.*

SSB has established a strong reputation in the heavy equipment component manufacturing and related services sector for over four decades. Since its inception on March 19, 1977, SSB has continuously enhanced its capabilities, evolving from a producer of heavy equipment components for Trakindo's Caterpillar products to a renowned fabricator in the oil and gas as well as mining industries. Over time, SSB expanded its scope by venturing into oil and gas, mining, industrial, transportation equipment, heavy equipment component reconditioning, and providing welding and machining services directly at customers' operational sites (on-site).

To ensure the quality of its products and services, SSB has made significant advancements in resource utilization, materials, technology, and the management of its skilled workforce. The company has established plants, workshops, and sites across nine provinces to support its operational activities and deliver excellent customer service. In 2023, SSB's operations are structured into Sales & Operations divisions for West Indonesia and East Indonesia, along with a Special Project Management division. These divisions are further supported by segments such as Business Services & Recondition, Product, Product Support, and Project management.

Alamat dan Kontak SSB
Address and Contact of SSB

Gedung TMT 1, 5th Floor, Suite 501
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta, 12560, Indonesia
(+62 21) 2997 6830
(+62 21) 2997 6835
www.ptssb.co.id

Komposisi Kepemilikan SSB
Composition of SSB Ownership

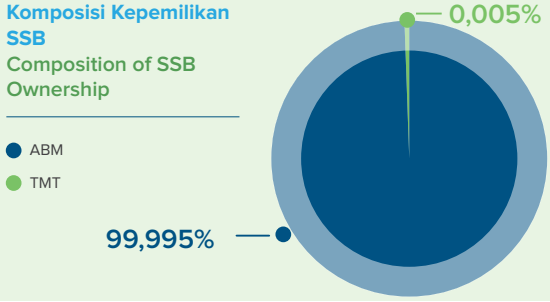

PT ANZARA JANITRA NUSANTARA ("AJN")

Didirikan pada tahun 2014, AJN awalnya didirikan dengan nama PT Pradipa Aceh Daya. Pada tahun 2016 namanya berubah menjadi nama yang sekarang. AJN merupakan induk usaha dari perusahaan produsen listrik swasta (*Independent Power Producer*, IPP) yang menyediakan solusi ketenagalistrikan.

Pada tahun 2016, AJN melalui beberapa entitas anak usahanya telah menandatangani dan melakukan proses negosiasi perjanjian penyediaan tenaga listrik dengan beberapa pihak, seperti PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN Kalselteng) untuk pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg); dan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara Barat untuk pembangkit listrik tenaga minihidro di daerah Lembang Ma'dong Denpina, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, salah satu anak usaha AJN, yaitu NBE telah beroperasi secara penuh dalam menyediakan pasokan listrik kepada PLN melalui PLTBg di wilayah Sukadamai, Kalimantan Selatan.

Founded in 2014, AJN was initially established under the name PT Pradipa Aceh Daya. In 2016 the name changed to its current name. AJN is the holding company of a private electricity producer company (Independent Power Producer, IPP) which provides electricity solutions.

In 2016, AJN, along with several subsidiary entities, entered into negotiations and signed electricity supply agreements with various parties, such as PT PLN (Persero) for the South Kalimantan and Central Kalimantan Region (PLN Kalselteng) for biogas power plants; and PT PLN (Persero) in the region of South, Southeast, and West Sulawesi for a mini hydro power plant in the Lembang Ma'dong Denpina area, North Toraja, South Sulawesi. In 2023, one of AJN's subsidiaries, namely NBE, was fully operational in providing electricity supplies to PLN through PLTBg in the Sukacepat area, South Kalimantan.

Alamat dan Kontak AJN
Address and Contact of AJN

Gedung TMT 1, 18th Floor,
Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta, 12560, Indonesia
(+62 21) 2997 6767
(+62 21) 2997 6768

Komposisi Kepemilikan AJN
Composition of AJN Ownership

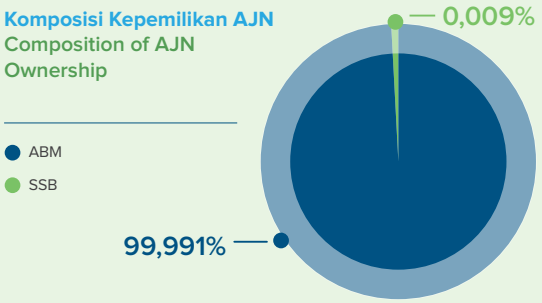

PT PRIMA WIGUNA PARAMA ("PWP")

Didirikan pada tahun 2011, awalnya PWP merupakan anak usaha dari SSB, bagian dari Grup ABM. Pada tahun 2017, PWP diakuisisi oleh Perusahaan dengan tujuan untuk mengelola usaha pengadaan bahan bakar dan jasa terkait. Di tahun yang sama PWP telah memperoleh Izin Niaga Umum (INU) dari Kementerian ESDM Ditjen Migas untuk menjalankan transaksi jual beli bahan bakar di wilayah Indonesia. PWP telah mulai beroperasi secara penuh di bulan Juni 2017.

Di akhir tahun 2023, PWP telah melakukan penjualan bahan bakar solar sebanyak 348,11 juta liter untuk berbagai perusahaan yang tersebar di 28 lokasi. Selain melakukan usaha pengadaan bahan bakar, saat ini PWP juga telah mengembangkan usahanya pada penyaluran Pelumas pada salah satu entitas anak Perusahaan. Total penyaluran volume Pelumas sebesar 4,73 juta liter yang tersebar di 27 lokasi.

Established in 2011, PWP initially operated as a subsidiary of SSB, a member of the ABM Group. In 2017, the Company acquired PWP with the objective of managing the fuel procurement business and related services. In the same year, PWP obtained a General Trading Permit (INU) from the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Oil and Gas, enabling it to conduct fuel buying and selling transactions within Indonesian territory. PWP commenced full operations in June 2017.

At the end of 2023, PWP has sold 348.11 million liters of diesel fuel to various companies spread across 28 locations. In addition to its fuel procurement business, currently PWP has also expanded its business to include the distribution of lubricants to one of the Company's subsidiaries. The total volume of lubricant distribution is 4.73 million liters spread across 27 locations.

Alamat dan Kontak PWP
Address and Contact of PWP

Gedung TMT 1, 18th Floor,
Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta, 12560, Indonesia
(+62 21) 2997 6777/6788
(+62 21) 2997 6797

Komposisi Kepemilikan PWP
Composition of PWP Ownership

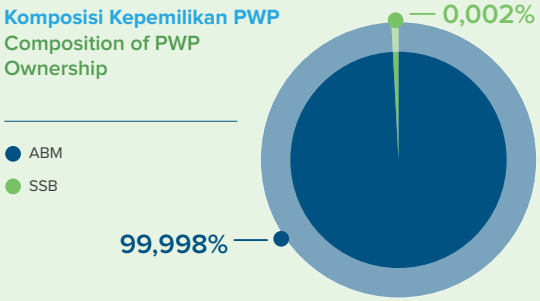

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Listing Chronology of Other Securities

Di bawah ini rincian Surat Utang yang diterbitkan oleh Perusahaan dan tercatat di *Singapore Stock Exchange*.

Below are details of Securities issued by the Company and listed on the Singapore Stock Exchange.

Nama Efek Lainnya Securities Name	**Tahun Penerbitan** Issuance Year	**Tanggal Penerbitan** Issuance Date	**Nilai** (AS$) Value (US$)	**Tenor** Tenor	**Tingkat Bunga/ Imbalan** Coupon Rate	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date	**Peringkat** Rating		**Status**
							2023	**2022**	
AS$200.000.000 9,500% Senior Notes	2021	5 Agustus 2021 August 5, 2021	200.000.000	60 Bulan 60 months	9,500% per tahun 9,500% per year	5 Agustus 2026 August 5, 2026	"B1" by Moody's Investor Service	"B1" by Moody's Investor Service Inc "B+" by Fitch Ratings Ltd	Aktif/belum Jatuh Tempo Active/ has not mature yet
Total			**200.000.000**						

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions and Professions

LEMBAGA PENUNJANG SUPPORTING INSTITUTIONS

Biro Administrasi Efek Share Register		
Nama Name	:	PT Datindo Entrycom
Alamat Address	:	Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta, 10120 T: (+62 21) 350 8077 F: (+62 21) 350 8078
Jasa yang Diberikan Services Rendered	:	Menyediakan jasa administrasi efek secara *in-house* In-house securities administration services.
Periode Penugasan Period of Assignment	:	Desember 2022 s.d November 2023 December 2022 until November 2023

Wali Amanat Trustee		
Nama Nama	:	Bank of New York Mellon
Alamat Address	:	101 Barclay Street, Floor 4th, East New York 10286, Amerika Serikat
Jasa yang Diberikan Services Rendered	:	*Trustee agent* untuk *bonds issuance* Trustee agent for bonds issuance
Periode Penugasan Period of Assignment	:	Agustus 2023 s.d Agustus 2024 August 2023 until August 2024

Pemeringkat Efek Ratings Agency		
Nama Name	:	Fitch Ratings Ltd
Alamat Address	:	30 North Colonnade London E14 5GN
Jasa yang Diberikan Services Rendered	:	Jasa pemeringkatan obligasi Bonds rating services
Periode Penugasan Period of Assignment	:	28 Februari 2023 s.d 27 Februari 2024 February 28, 2023 until February 27, 2024

Nama Name	:	Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd.
Alamat Address	:	50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore, 048623
Jasa yang Diberikan Services Rendered	:	Jasa pemeringkatan obligasi Bonds rating services
Periode Penugasan Period of Assignment	:	Juli 2022 s.d. Juli 2023 July 2022 until July 2023

PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING PROFESSIONS

Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant And Public Accounting Firm		
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	:	Purwantono, Sungkoro dan Surja Registrasi KMK: 603/KM.1/2015
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	:	Chang Hartono Registrasi: AP.1833
Jasa yang Diberikan Services Rendered	:	Jasa Audit: audit umum atas Laporan Keuangan tahun 2023 Jasa Non Audit: Tidak ada Audit Services: general audit for the 2023 Financial Report Non-Audit Services: None
Periode Penugasan Period of Assignment	:	8 September 2023 s.d 27 Maret 2024 September 8, 2023 until March 27, 2024
Waktu Terbit Laporan Report Issuance Date	:	30 Maret 2024 March 30, 2024
Biaya Fee	:	Jasa Audit: Rp875.000.000 *exclude* VAT dan OPE Jasa Non Audit: Tidak ada Audit Services: general audit for the 2023 Financial Report Non-Audit Services: None

Notaris Notary		
Nama Name	:	Jose Dima Satria S.H., M. Kn.
Alamat Address	:	Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11a, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
Jasa yang Diberikan Services Rendered	:	Jasa kenotariatan untuk pembuatan akta Perusahaan Notary services for preparation of company deeds
Periode Penugasan Period of Assignment	:	1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 January 1, 2023 until December 31, 2023

Konsultan Hukum Law Consultant		
Nama Name	:	Assegaf Hamzah & Partners
Alamat Address	:	Capital Place, Level 36 & 37 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710
Periode Penugasan Period of Assignment	:	1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023 January 1, 2023 until December 31, 2023

Jasa Penilai Appraiser Service		
Nama Name	:	KJPP Stefanus Tonny Hardi dan Rekan KJPP Stefanus Tonny Hardi and Partner
Alamat Address	:	Graha STH
Periode Penugasan Period of Assignment	:	13 Februari 2024-28 Maret 2024 February 13, 2024-March 28, 2024

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK PERIODE 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Akuntan Publik Laporan Keuangan Perusahaan 5 (lima) tahun berturut-turut untuk tahun buku 2019 hingga 2023 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

LIST OF PUBLIC ACCOUNTING FIRMS AND PUBLIC ACCOUNTANTS FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS

For transparency purposes, the table below presents the Public Accountants responsible for auditing the Company's Financial Reports over the past five consecutive years, covering the financial years from 2019 to 2023.

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp) Audit Service Fee (Rp)
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja No. Registrasi: 603/K.1/2015	Chang Hartono No. Izin: AP.1833	Jasa Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan Tahun 2023 General Audit Services for 2023 Financial Reports	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Present fairly, in all material respects	875.000.000
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja No. Registrasi: 603/KM.1/2015	Benyanto Suherman No. Izin: AP.0685	Jasa Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan Tahun 2022 General Audit Services for 2022 Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material aspects	750.000.000
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja No. Registrasi: 603/KM.1/2015	Sinarta No. Izin: AP.0701	Jasa Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan Tahun 2021 General Audit Services for 2021 Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material aspects	630.000.000
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja No. Registrasi: 603/KM.1/2015	Sinarta No. Izin: AP.0701	Jasa Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan Tahun 2020 General Audit Services for 2020 Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material aspects	600.000.000
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja No. Registrasi: 603/KM.1/2015	Sinarta No. Izin: AP.0701	Jasa Pemeriksaan Umum Laporan Keuangan Tahun 2019 General Audit Services for 2019 Financial Reports	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material aspects	450.000.000

Daftar Bursa Perdagangan Saham dan Efek Lainnya
List of Stock and Other Securities Exchanges

Bursa Efek Indonesia Indonesian Stock Exchange		
Nama Name	:	Bursa Efek Indonesia
Alamat Address	:	Gedung Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 515 0515 *Email*: callcenter@idx.co.id *Website*: www.idx.co.id
Perdagangan Trading	:	Perdagangan Saham Perusahaan (kode saham: ABMM) The Company's Shares (ticker code: ABMM)

Bursa Efek Singapura Singapore Stock Exchange		
Nama Name	:	Singapore Exchange Limited
Alamat Address	:	SGX Centre Office 2 Shenton Way, #02-02SGX Centre 1 Singapore 068804 11 North Buona Vista Drive #06-07 The Metropolis Tower 2 Singapore, 138589 Tel.: (+65) 6236 8888 Faksimile: (+65) 6536 6994 *Website*: www.sgx.com
Perdagangan Trading	:	Penerbitan dan Perdagangan Surat Utang Issuance and Securities Trading

SITUS WEB PERUSAHAAN
Company Website

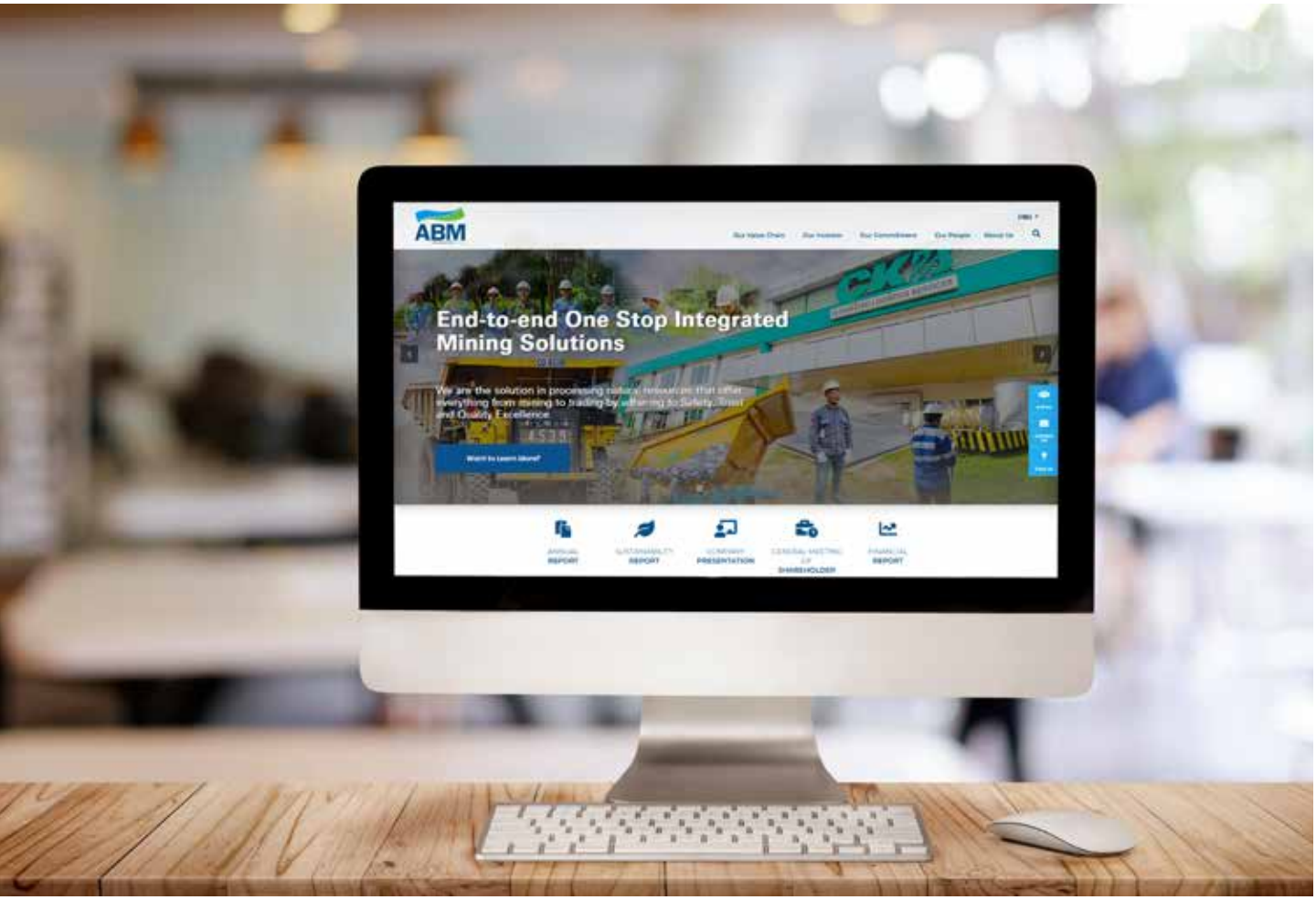

ABM memiliki situs web resmi, yaitu www.abm-investama.com yang menyediakan informasi yang lengkap dan luas kepada publik serta sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk menerapkan prinsip transparansi, dimana web resmi ini memuat berbagai informasi yang telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:

- Informasi perusahaan, memuat Visi dan Misi Perusahaan, *Holding* dan Entitas Anak, organisasi, serta tim manajemen kunci;
- Hubungan investor, memuat informasi untuk investor seperti Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, informasi pergerakan saham, serta informasi RUPS Tahunan;
- *Whistleblowing System*, memuat informasi mengenai mekanisme pelaporan pelanggaran melalui situs web dan surat elektronik Perusahaan;
- Tata Kelola Perusahaan, memuat informasi mengenai komposisi Pemegang Saham, perangkat-perangkat tata kelola perusahaan, hasil penilaian tata kelola perusahaan, ASEAN CG *Scorecard*, Komite Dewan Komisaris, kehadiran rapat dewan, kalender perusahaan, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, keterbukaan informasi, serta penghargaan dan sertifikasi;
- Tanggung jawab sosial perusahaan, memuat informasi mengenai kebijakan dan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan;
- Keterbukaan informasi, memuat berita dan rilis media mengenai aktivitas Perusahaan;

ABM has an official website, namely www.abm-investama.com, which provides complete and extensive information to the public and is part of the Company's efforts to implement the principle of transparency. This official website contains various information that complies with Financial Services Authority Regulation no. 8/POJK.04/2015 concerning Issuer or Public Company Websites, including:

- Corporate information, containing Corporate Vision and Mission, holding and Subsidiaries, organization, as well as key management team members;
- Investor relations, containing information to investors, among which are Annual Report, Financial Report, stock movement, and information about Annual GMS;
- Whistleblowing System, containing information about the whistleblowing mechanism on the corporate website and electronic mails;
- Corporate Governance, containing information about Shareholder composition, organs of corporate governance, assessment results of corporate governance, ASEAN CG Scorecard, Committees of Board of Commissioners, attendance at board meetings, corporate calendar, Corporate Secretary, Internal Audit, information disclosure, as well as awards and certifications;
- Corporate social responsibilities, containing information about corporate social responsibility policies and programs to the communities and environment;
- Information disclosure, containing news and press releases about the Company's activities;

- Tab informasi karier, memuat informasi mengenai sumber daya manusia Perusahaan; dan
- Tab kontak, memuat informasi mengenai alamat kontak/ nomor telepon Perusahaan yang mempermudah publik untuk menghubungi Perusahaan.

- Career information tab, containing information about the Company's human resources; and
- Contact tab, containing information about addresses/phone numbers of the Company to ease the public to contact the Company.

Melalui situs web tersebut, publik dapat mengakses beragam informasi mengenai Perusahaan, di antaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Through the corporate website, the public can access various information about the Company, as disclosed in the following table:

Uraian Description	**Ketersediaan** Availability	**Keterangan** Note
Informasi Pemegang Saham sampai dengan Pemilik Akhir Individu Information on Shareholders up to the Individual Ultimate Beneficiaries	√	Terdapat pada halaman Tentang Kami > Struktur Perusahaan About Us > Corporate Structure.
Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	√	Terdapat pada halaman Tentang Kami > Struktur Perusahaan About Us > Corporate Structure.
Analisis Kinerja Keuangan Financial Performance Analysis	√	Terdapat pada halaman Untuk Investor > Presentasi Perusahaan For Investor > Company Presentations.
Kode Etik dan Perilaku Code of Ethics and Conduct	√	Terdapat pada halaman Tata Kelola Perusahaan > Perangkat-Perangkat GCG > Pedoman Etika dan Perilaku Corporate Governance > GCG Soft Structure > Code of Conduct.
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	√	Terdapat pada halaman Untuk Investor > RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) For Investor > General Meetings of Shareholders.
Laporan Keuangan Tahunan (5 tahun terakhir) Annual Financial Reports (Past 5 Years)	√	Terdapat pada halaman Untuk Investor > Laporan Keuangan For Investor > Financial Reports .
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors	√	Terdapat pada halaman Tentang Kami > Tim Manajemen. About Us > Management Team.
Piagam Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit	√	**Piagam Dewan Komisaris** Terdapat pada halaman Komitmen Kami > Tata Kelola > Perangkat-Perangkat GCG > Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi **Board of Commissioners Charter** Our Commitment > Governance > GCG Soft Structure > Board of Commissioners and Board of Directors Charters. **Piagam Direksi** Terdapat pada halaman Komitmen Kami > Tata Kelola > Perangkat-Perangkat GCG > Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi **Board of Directors Charter** Our Commitment > Governance > GCG Soft Structure > Board of Commissioners and Board of Directors Charters. **Piagam Komite Dewan Komisaris** Terdapat pada halaman Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris **Board of Commissioners Committees Charters** Our Commitment > Governance > Board of Commissioners Committees. **Piagam Audit Internal** Terdapat pada halaman Komitmen Kami > Tata Kelola > Audit Internal **Internal Audit Charter** Our Commitment > Governance > Internal Audit.

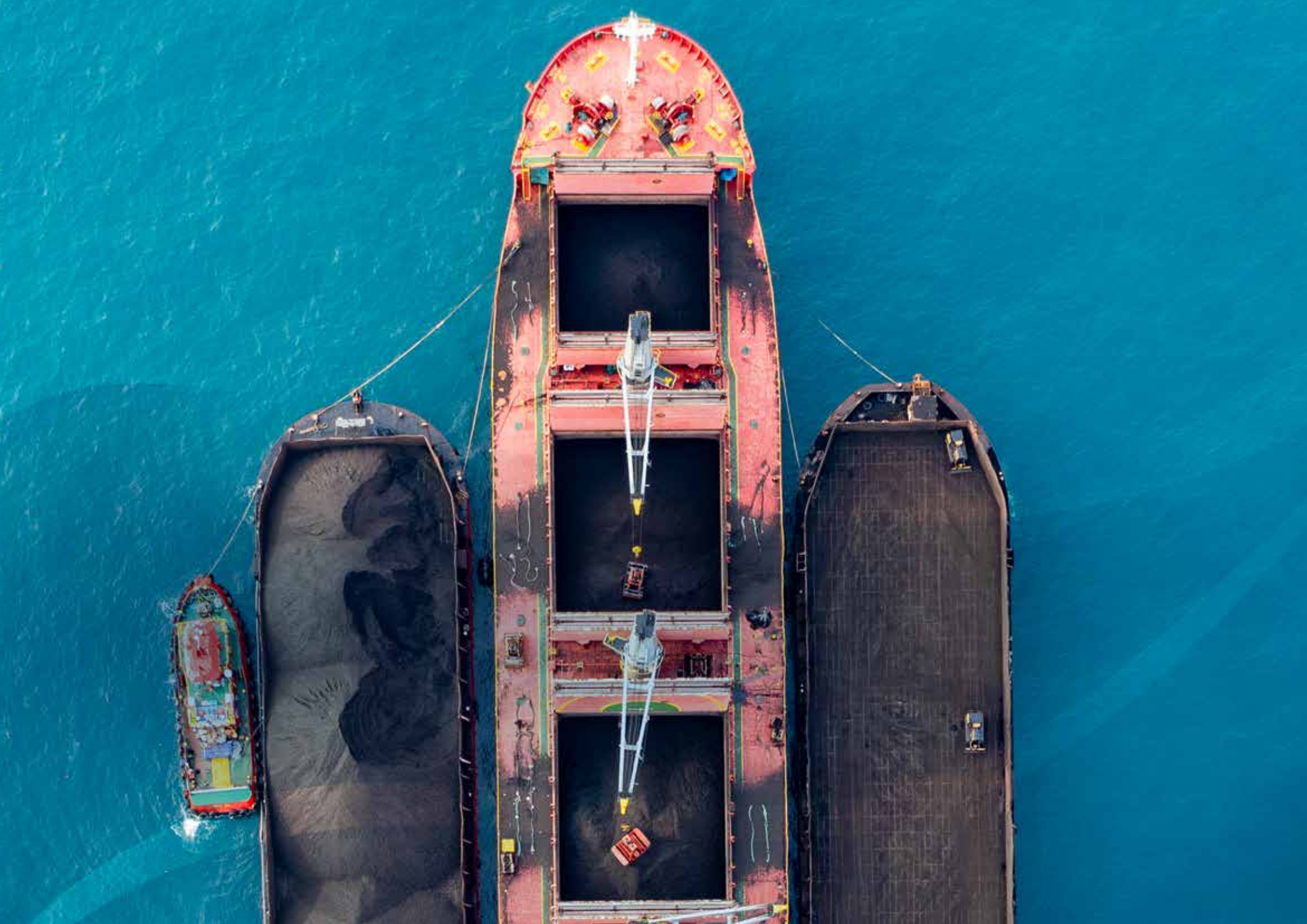



276,56

juta bcm | million bcm

Volume Pemindahan Lapisan Penutup

Overburden Displacement Volume

04

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Economic and Industrial Overview



Perekonomian dunia di tahun 2023 memberikan gambaran atas tantangan yang terus terjadi, khususnya terkait pemulihan atas pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 dan dinyatakan telah menjadi endemi pada pertengahan tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen *World Economic Outlook* (WEO), perekonomian global tahun 2023 diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3%, melambat dari tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 3,5%. Berbagai gejolak mewarnai perekonomian dunia di sepanjang tahun 2023, seperti inflasi yang masih terus terjadi sejak tahun 2022 terutama akibat rentannya pasokan komoditas global pasca pandemi COVID-19, hingga krisis geopolitik baik di Rusia-Ukraina maupun Timur Tengah.

IMF juga memperkirakan perekonomian negara-negara maju mengalami perlambatan dari 2,6% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun 2023, di mana faktor inflasi memicu serangkaian pengetatan kebijakan moneter. Demikian pula perekonomian negara-negara berkembang diperkirakan mengalami stagnansi, dari 4,1% pada tahun 2022 menjadi 4% pada tahun 2023. Meskipun IMF mencatat adanya penurunan inflasi dunia, faktor inflasi masih menjadi tantangan serius yang berdampak terhadap perekonomian dunia dalam beberapa waktu ke depan. Inflasi global diperkirakan akan terus menurun, dari 8,7% pada tahun 2022 menjadi 6,9% pada tahun 2023.

The global economy in 2023 serves as an illustration of the ongoing challenges, particularly in the recovery from the COVID-19 pandemic that began in 2020 and was declared endemic by mid-2023. According to data released by the International Monetary Fund (IMF) in the World Economic Outlook (WEO) report, global economic growth in 2023 was projected to reach only 3%, down from 3.5% in 2022. Various upheavals are expected to characterize the world economy throughout 2023, including persistent inflation since 2022, largely due to the vulnerability of global commodity supplies post-pandemic, as well as geopolitical crises in both the Russia-Ukraine and the Middle East regions.

The IMF also anticipates a slowdown in the economies of developed countries, from 2.6% growth in 2022 to 1.5% in 2023, triggered by inflationary pressures leading to monetary policy tightening. Similarly, developing countries are forecasted to experience stagnation, with growth expected to dip from 4.1% in 2022 to 4% in 2023. Despite a decrease in global inflation, it remains a significant challenge that will continue to impact the world economy for the foreseeable future. Global inflation is projected to decline from 8.7% in 2022 to 6.9% in 2023.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah antisipatif. Di samping berbagai kebijakan yang berupaya mendorong penguatan sektor industri dan pelaku UMKM, kunci penting dari respon Pemerintah Indonesia terlihat dari kebijakan inflasi nasional yang menunjukkan tren normalisasi dengan perlambatan inflasi terjadi lebih cepat dari perkiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Desember 2023 ditutup di level 2,61% dengan inflasi inti yang rendah pada level 1,80%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51%.

Menurut data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia di tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,31%. Meskipun mengalami perlambatan, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan jauh di atas perekonomian dunia. Industri nasional secara keseluruhan mampu tumbuh dengan baik meskipun sebagian besar mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%, diikuti Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,7%, Jasa Lainnya sebesar 11,1%, serta Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,9%. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya tumbuh 4,64%.

Sedangkan Pertambangan dan Penggalian mencatat pertumbuhan sebesar 6,12%, yang terutama diliputi dengan gejolak komoditas pasca melambungnya harga komoditas di tahun sebelumnya. Dinamika sektor mineral dan batu bara ("minerba") sebagai komoditas penting dalam perdagangan dunia memberikan gambaran atas terganggunya pasokan global tersebut. Khususnya batu bara yang mengalami ledakan permintaan di tahun 2022, pada tahun 2023 justru komoditas batu bara mengalami normalisasi persediaan dan permintaan, yang kemudian berimbas pada penyesuaian harga batu bara sejak awal tahun 2023. Harga Newcastle Coal mengalami penurunan, dari AS$251,75 per ton di awal tahun 2023 menjadi AS$146,40 per ton pada Desember 2023. Demikian pula Harga Batu Bara Acuan (HBA) mengalami penyesuaian, dari AS$305,21 per ton di awal tahun 2023 menjadi AS$117,38 per ton pada Desember 2023.

Menariknya, di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, Indonesia berupaya membentuk fondasi pembangunan ke depan melalui pengembangan ekosistem ketenagalistrikan berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung tercapainya target Pemerintah Indonesia untuk dapat menurunkan sumber daya energi berbasis fosil yang pada akhirnya mampu mewujudkan *net zero emission* yang ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2060.

In response to these conditions, the Indonesian Government has implemented various preemptive measures. Apart from policies aimed at bolstering the industrial sector and supporting micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs), a key aspect of the Indonesian Government's strategy lies in its national inflation policy, which reflects a trend towards normalization with inflation slowing down more rapidly than anticipated. The Consumer Price Index (CPI) inflation for December 2023 stood at 2.61%, with low core inflation at 1.80%, lower than the CPI inflation rate in 2022, which was recorded at 5.51%.

According to data published by the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy in 2023 registered a growth rate of 5.05%, a slight deceleration compared to 2022's 5.31%. Despite this slowdown, Indonesia's economic growth significantly outpaced that of the global economy. The national industry, on the whole, experienced robust growth, albeit most sectors experienced a slowdown compared to the previous year. In terms of production, the highest growth was observed in the Transportation and Warehousing sector at 13.96%, followed by Other Services at 11.1%, and Accommodation and Food Services at 10.9%. Meanwhile, the processing industry, which plays a dominant role in Gross Domestic Product (GDP) formation, grew by only 4.64%.

In contrast, Mining and Quarrying recorded a growth rate of 6.12%, primarily influenced by commodity disruptions following the surge in commodity prices the previous year. The dynamics within the mineral and coal sector, vital commodities in global trade, exemplify the disruptions in global supply chains. Notably, coal experienced a surge in demand in 2022, followed by a normalization of supply and demand in 2023, leading to price adjustments since the beginning of the year. The price of Newcastle Coal declined from US$251.75 per ton at the beginning of 2023 to US$146.40 per ton in December 2023. Similarly, the Reference Coal Price (HBA) saw an adjustment from US$305.21 per ton at the start of 2023 to US$117.38 per ton by December 2023.

In spite of this, amid uncertain economic conditions, Indonesia is striving to lay the groundwork for future development by fostering an electricity ecosystem based on New and Renewable Energy. This initiative aims to support the Indonesian Government's target of reducing reliance on fossil-based energy resources, ultimately striving for net-zero emissions by 2060.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operational Review of Each Business Segment

Perusahaan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri pertambangan dengan produk utama batu bara yang terbagi atas 4 segmen usaha utama yang meliputi kontraktor tambang dan tambang batu bara, jasa, pabrikasi, serta lain-lainnya. Pengelompokkan segmen usaha ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Teraudit.

Berikut disampaikan struktur grup dalam pengelompokan segmen usaha Grup ABM.

The Company operates within the mining industry, with coal being its primary product. This is divided into four main business segments: mining and coal mining contractors, services, manufacturing and other. This segmentation aligns with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), as outlined in the Audited Financial Report. Below is the group structure of the ABM Group's business segment grouping.

Below are the profitability and contribution of business segments to the Company's consolidated financial performance.

Pengelompokan Segmen Usaha Grup ABM
ABM Group Business Segment Grouping

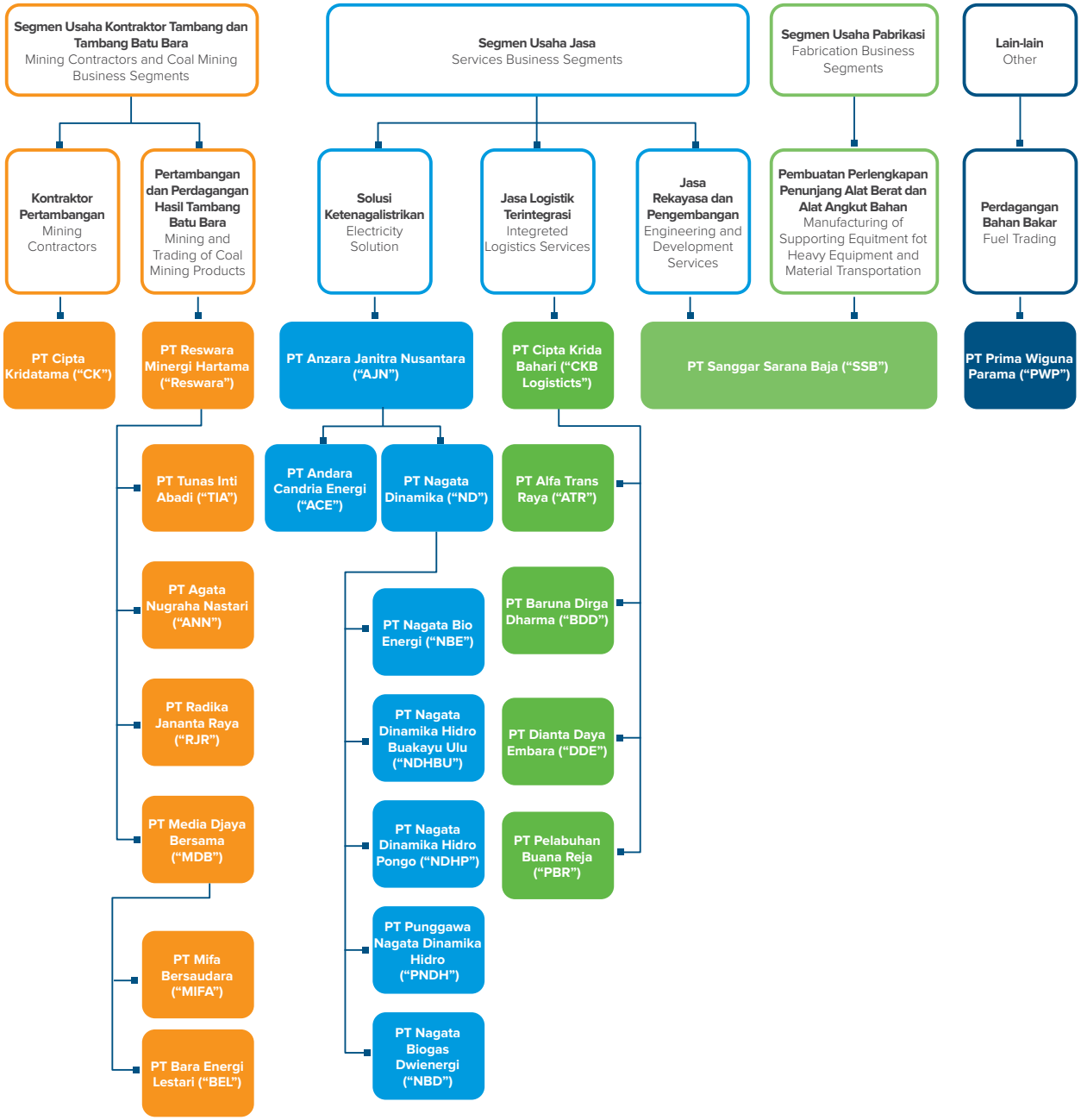

Jumlah dan Kontribusi Segmen Usaha terhadap Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Grup ABM
Total and Contributions of Business Segments to Revenue Based on Contracts with ABM Group's Customers

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara Coal Mining and Mining Contractors	1.360.526	91,13	1.343.176	92,92	17.351	1,29
Jasa Services	233.229	15,62	226.482	15,67	6.747	2,98
Pabrikasi Manufacturing	45.304	3,03	34.980	2,42	10.324	29,51
Lainnya Others	295.727	19,81	228.288	15,79	67.440	29,54
Eliminasi Elimination	(441.788)	(29,59)	(387.398)	(26,80)	(54.390)	14,04
Jumlah Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Konsolidasian Total Consolidated Revenue from Contracts with Customers	1.492.999	100,00	1.445.527	100,00	47.471	3,28

Komposisi Pendapatan Segmen Usaha Terhadap Jumlah Pendapatan Konsolidasian
Composition of Business Segment Revenue to Total Consolidated Revenue

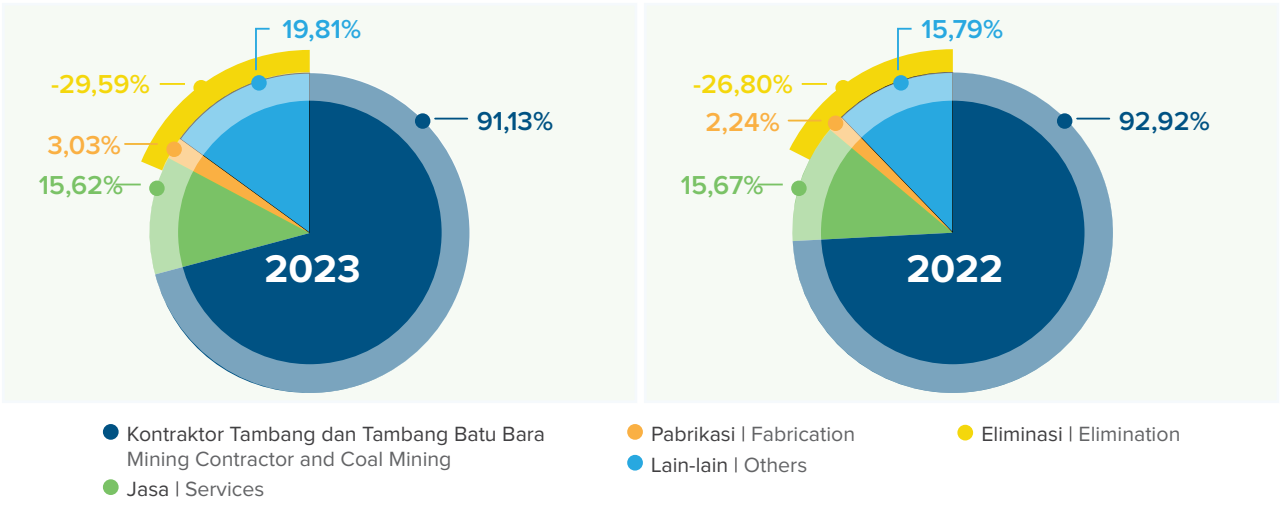

Jumlah dan Kontribusi Laba Bruto Segmen Usaha terhadap Laba Bruto Grup ABM
Total and Contribution of Business Segment Gross Profit to ABM Group Gross Profit

Segmen Segments	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara Coal Mining and Mining Contractors	323.808	82,59	487.599	93,43	(163.791)	(33,59)
Jasa Services	45.216	11,53	41.966	8,04	3.249	7,74
Pabrikasi Manufacturing	6.733	1,72	5.328	1,02	1.405	26,37
Lainnya Others	23.677	6,04	13.646	2,61	10.031	73,51
Eliminasi Elimination	(7.387)	(1,88)	(26.634)	(5,10)	19.247	(72,26)
Jumlah Laba Bruto Konsolidasian Total Consolidated Gross Profit	392.046	100,00	521.904	100,00	(129.858)	(24,88)

Komposisi Laba Usaha Segmen Usaha Terhadap Laba Bruto Konsolidasian
Composition of Business Segment Operating Profit to Consolidated Gross Profit

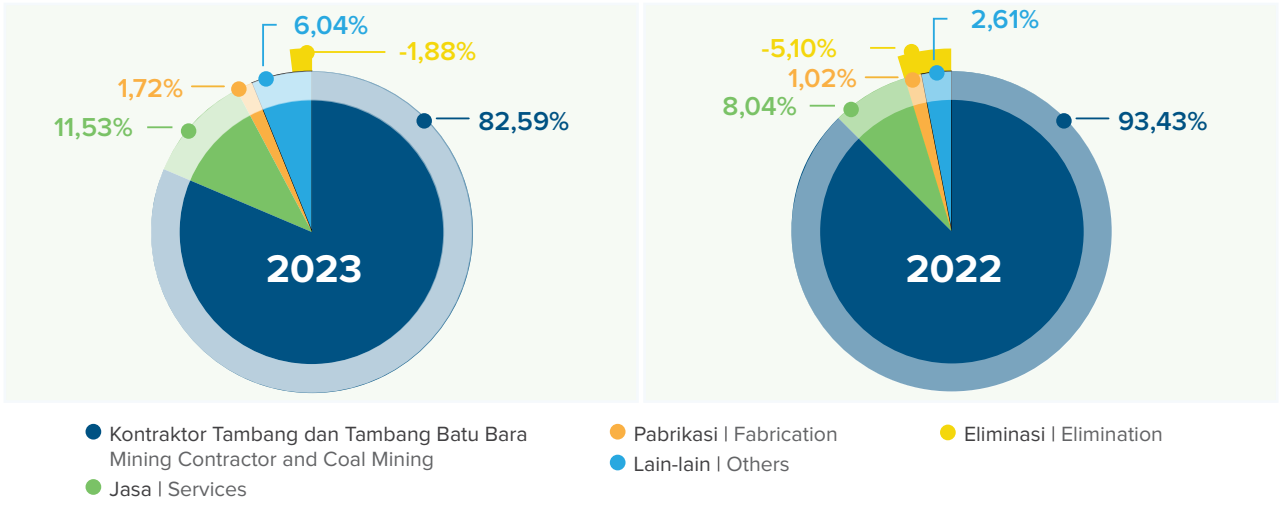

Jumlah dan Kontribusi Aset Segmen Usaha terhadap Aset Grup ABM
Total and Contributions of Business Segment Assets to ABM Group Asset

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara Coal Mining and Mining Contractors	1.859.206	86,21	1.715.236	86,52	143.970	8,39
Jasa Services	205.103	9,51	185.755	9,37	19.348	10,42
Pabrikasi Manufacturing	60.421	2,80	55.367	2,79	5.054	9,13

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Lainnya Others	538.307	24,96	573.776	28,94	(35.469)	(6,18)
Eliminasi Elimination	(506.350)	(23,48)	(547.556)	(27,62)	41.206	(7,53)
Jumlah Aset Konsolidasian Total Consolidated Assets	2.156.688	100,00	1.982.579	100,00	174.109	8,78

Komposisi Aset Segmen Usaha Terhadap Aset Konsolidasian
Composition of Business Segment Assets to Consolidated Assets

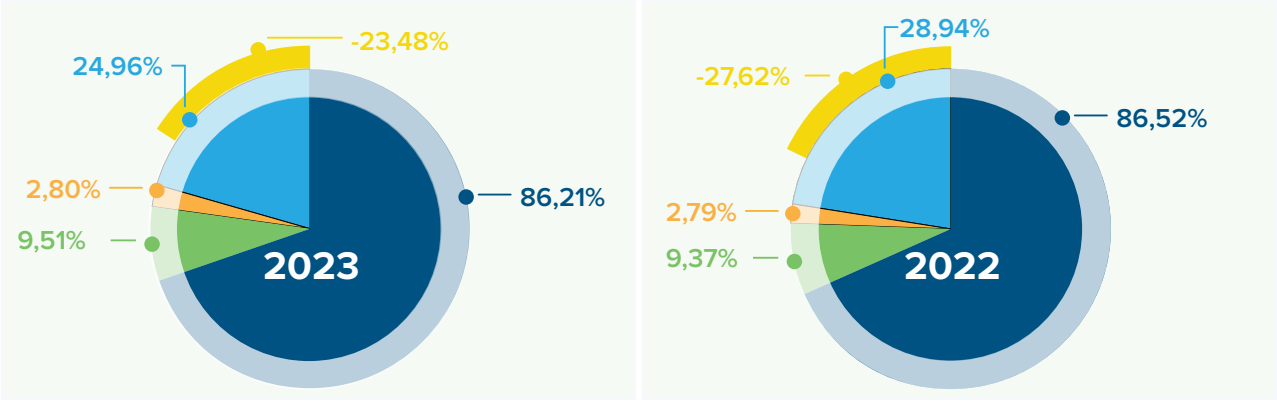

Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa segmen Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara menjadi bisnis inti dari kegiatan usaha yang dijalankan Perusahaan dan entitas anak. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, berikut disampaikan kegiatan operasi dan profitabilitas masing-masing segmen.

Based on the table and graph provided, it's evident that the Mining Contractors and Coal Mining segment serves as the primary focus of the Company's operations and its subsidiaries. To provide a comprehensive understanding, below are the operational activities and profitability of each segment.

KONTRAKTOR TAMBANG DAN TAMBANG BATU BARA

Bisnis utama Perusahaan adalah segmen usaha kontraktor tambang dan tambang batu bara yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan operasional yang dijalankan oleh entitas anaknya. Kegiatan kontraktor tambang batu bara dijalankan oleh CK, sedangkan kegiatan operasional pertambangan dan perdagangan batu bara dijalankan oleh Reswara dan entitas anak yang bernaung di bawahnya.

COAL MINING AND MINING CONTRACTORS

The primary business of the Company revolves around two operational activities within the mining contractor and coal mining segment, each managed by its respective subsidiaries. Coal mining contracting operations are conducted by CK, while coal mining and trading activities are handled by Reswara and its subsidiary entities.

Pengembangan Segmen Usaha Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara Grup ABM
Development of the ABM Group Mining and Coal Mining Contractor Business Segment

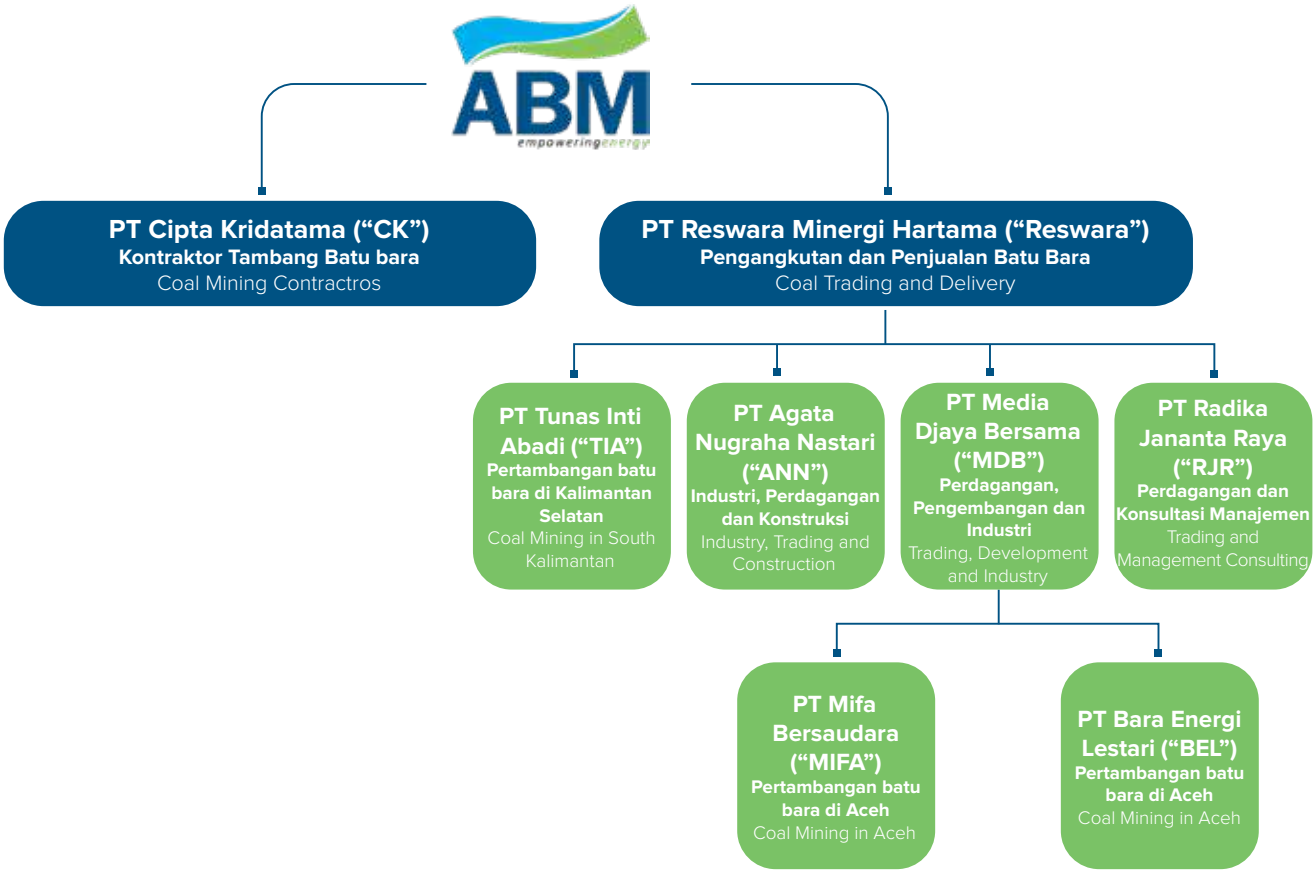

Kontraktor Tambang Batu Bara

CK menjalankan kegiatan usaha yang meliputi jasa pertambangan dari hulu sampai ke hilir, dimulai dari pemindahan lapisan penutup, penyewaan alat untuk pengambilan batu bara, eksplorasi, pengangkutan batu bara, peledakan, dan sebagainya.

Kegiatan operasional CK didukung oleh ratusan unit alat berat dan alat penunjang lainnya seperti *excavator, dump truck, dozer, grader, wheel loader*, *compactor*, serta sistem dan teknologi dengan standar terbaru.

Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa kontraktor pertambangan terdepan di Indonesia, CK telah mempunyai beberapa sertifikasi sebagai perusahaan jasa pertambangan yang memiliki kualitas terbaik, yaitu:

1. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan;
2. ISO 45001:2018 tentang Sertifikasi Manajemen untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
3. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

Coal Mining Contractor

CK carries out business activities which include mining services from upstream to downstream, starting from overburden removal, equipment rental for coal extraction, exploration, coal transportation, blasting, and etc.

ide supplementary machinery such as excavators, dump trucks, dozers, graders, wheel loaders, compactors; and technology adhering to the latest standards.

As one of Indonesia's foremost providers of mining contractor services, CK holds several certifications attesting to its commitment to quality, including:

1. ISO 14001:2015, addressing Environmental Management Systems;
2. ISO 45001:2018, emphasizing Management Certification for Occupational Health and Safety; and
3. ISO 9001:2015, focusing on Quality Management Systems.





Pada akhir tahun 2023, melalui kegiatan penambangan di 9 lokasi yang tersebar di 5 provinsi, volume pemindahan lapisan penutup dan volume penyewaan alat untuk pengambilan batu bara CK mencapai 276,56 bcm dan 34,07 juta ton. Jumlah volume pemindahan lapisan penutup menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 202,90 juta bcm.

By the end of 2023, through mining operations spanning across 9 locations throughout several provinces, CK aimed to achieve a volume of overburden removal and equipment rental for coal extraction totaling 276.56 billion cubic meters (bcm) and 34.07 million tonnes, respectively. This represents an increase/decrease in the total volume of overburden removal compared to 2022 with 202.90 million bcm.

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	%
Volume Pemindahan Lapisan Penutup (juta bcm) Volume of Overburden Removal (million bcm)	276,56	202,90	73,66	36,30
Volume Penyewaan Alat untuk Pengambilan Batu Bara (juta ton) Volume of Equipment Rental and Coal Extraction (million tons)	34,07	28,38	5,68	20,02

Tabel di bawah ini menunjukkan pelanggan-pelanggan CK selama tahun 2023:

The table below lists CK's customers throughout 2023:

Pelanggan Customer	Kategori Category
PT Tunas Inti Abadi	Pemindahan lapisan penutup dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara Overburden removal and equipment rental for coal extraction
PT Mifa Bersaudara	Pemindahan lapisan penutup, dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara serta pengangkutan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction and coal transportation
PT Multi Harapan Utama	Pemindahan lapisan penutup, dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara serta pengangkutan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction and coal transportation
PT Binuang Mitra Bersama	Pemindahan lapisan penutup dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction
PT Berkat Murah Rejeki	Pemindahan lapisan penutup dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction
PT Energi Batubara Lestari	Pemindahan lapisan penutup dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction
PT Dizamatra Powerindo	Pemindahan lapisan penutup, dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara serta pengangkutan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction and coal transportation
PT Kuansing Inti Makmur	Pemindahan lapisan penutup, dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara serta pengangkutan batu bara Overburden removal, equipment rental for coal extraction and coal transportation
PT Borneo Indobara	Pemindahan lapisan penutup, dan penyewaan alat untuk pengambilan batu bara Overburden removal, and equipment rental for coal extraction

Pertambangan dan Perdagangan Batu Bara

Reswara melalui 2 Entitas Anaknya, yaitu TIA dan MDB, menjalankan kegiatan pertambangan dan perdagangan batu bara. TIA memiliki konsesi tambang yang berlokasi di Kalimantan Selatan, sedangkan MDB, melalui Entitas Anak, yaitu MIFA dan BEL memiliki konsesi tambang di Aceh. Baik TIA maupun MDB menghasilkan batu bara termal dengan kalori rendah.

Coal Mining and Trading

Reswara, through its 2 subsidiaries, TIA and MDB, engages in coal mining and trading activities. TIA holds a mining concession situated in South Kalimantan, while MDB, via its subsidiaries MIFA and BEL, possesses a mining concession in Aceh. Both TIA and MDB specialize in the production of low-calorie thermal coal.

Lokasi Konsesi Pertambangan
Locations of Mining Concessions



Wilayah konsesi penambangan TIA seluas 3.085 hektare di Sungai Loban dan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan cadangan batu bara tercatat sebesar 0,64 juta ton hingga akhir Desember 2023.

The TIA mining concession area spans 3,085 hectares in Sungai Loban and Kusan Hulu, Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan, with coal reserves totaling 0.64 milion tonnes as of December 2023.

TIA *Compliant Coal* merupakan produk batu bara TIA yang memiliki kalori sekitar 4.200 kkal/kg (adb) dengan nama "TIA *Compliant Coal*". TIA memasarkan produk ini kepada perusahaan-perusahaan pembangkit listrik di pasar domestik maupun luar negeri, seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Filipina, yang juga digunakan sebagai batu bara campuran.

"TIA Compliant Coal" is a product of TIA coal, boasting approximately 4,200 kcal/kg (adb) in calorific value. TIA markets this product to power generation companies both domestically and internationally, including China, Thailand, Vietnam, and the Philippines, where it is utilized as a blend of coal.





Guna memenuhi kebutuhan pelanggan, baik domestik maupun luar negeri, TIA menjalankan beberapa mekanisme produksi untuk menghasilkan batu bara dengan kualitas terbaik yang meliputi:

1. Melakukan penambangan dengan metode penambangan terbuka (*open cut mining*);
2. Menambang dan mengangkut batu bara melalui jalan angkut sepanjang 27 kilometer ke pelabuhan untuk dipindahkan ke *mother vessel* di Pelabuhan Bunati; serta
3. Mengoperasikan sejumlah fasilitas, seperti *crushing plant* berkapasitas 1.500 ton per jam, *stockpile* untuk 120.000 ton, pelabuhan sendiri, dan laboratorium pengujian batu bara.

Sementara itu, MDB melakukan kegiatan bisnis Perusahaan melalui 2 Entitas Anak, yaitu MIFA dan BEL yang telah beroperasi sejak 2012. Kedua perusahaan ini beroperasi di Provinsi Aceh dengan area konsesi seluas 3.134 hektare di Kabupaten Aceh Barat dan 1.495 hektare di Kabupaten Nagan Raya. Sejak bulan Mei 2015, MIFA dan BEL mulai memproduksi batu bara dalam skala komersial untuk memenuhi kebutuhan batu bara di pasar domestik dan luar negeri, seperti India, Tiongkok, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Per 31 Desember 2023, total cadangan batu bara yang dimiliki MIFA dan BEL secara total mencapai 193,53 juta ton.

To fulfill both domestic and overseas customer demands, TIA employs various production methods to ensure the production of top-quality coal. These methods include:

1. Implementing open-cut mining techniques;
2. Conducting coal mining and transportation through a 27-kilometer haul road to the port for transshipment to the mother vessel at Bunati Harbor; and
3. Operating multiple facilities, including a crushing plant with a capacity of 1,500 tons per hour, a stockpile capable of holding 120,000 tons, an in-house port, and a coal testing laboratory.

Meanwhile, MDB conducts its business operations through two subsidiaries, namely MIFA and BEL, established since 2012. These entities operate in Aceh Province, with concession areas spanning 3,134 hectares in West Aceh Regency and 1,495 hectares in Nagan Raya Regency. Since May 2015, MIFA and BEL have commenced coal production on a commercial scale to cater to the coal demands of both domestic and foreign markets, including India, China, and several Southeast Asian countries. As of December 31, 2023, the combined coal reserves owned by MIFA and BEL reaching 193.53 million tonnes.

Volume Produksi 2022-2023
Production Volume in 2022-2023

juta ton | million tonnes

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	%
TIA	2,43	3,41	(0,97)	(28,57)
MDB	9,10	8,79	0,31	3,54
Jumlah Total	**11,54**	**12,20**	**(0,66)**	**(5,42)**

Volume Penjualan Batu Bara 2022-2023
Coal Sales Volume in 2022-2023

juta ton | million tonnes

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	%
TIA	2,41	3,43	(1,02)	(29.85)
MDB	8,89	9,23	(0,34)	(3,68)
Jumlah Total	**11,30**	**12,66**	**(1,36)**	**(10,77)**

Rasio Kupas Rata-Rata 2022-2023
Coal Stripping Ratio in 2022-2023

satuan | unit

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	%
TIA	8,40	6,55	1,85	28,33
MIFA	4,33	4,00	0,33	8,26
BEL	5,34	5,59	(0,25)	(4,5)

Komposisi Negara Tujuan dan Volume Pengiriman Batu Bara TIA 2022-2023
Composition of Destination Countries and Shipment Volume of TIA's Coal Product in 2022-2023

persen | percentage

	2023	2022	Selisih Deviation
Tiongkok China	74,43	59,82	14,61
India India	-	6,33	(6,33)
Domestik Domestic	25,57	27,56	(1,99)
Lain-Lain Others	-	6,28	(6,28)
Jumlah **Total**	100,00	100,00	

Profitabilitas Segmen Usaha Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perusahaan dari segmen usaha kontraktor tambang dan tambang batu bara pada tahun 2023 mencapai AS$1,36 miliar, meningkat 1,29% atau AS$17,35 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$1,34 miliar.

Profitability of Coal Mining and Mining Contractor Business Segments

The revenue from contracts with the Company's customers in the coal mining and mining contractor business segments reached US$1.36 billion in 2023. This represented a 1.29% increase, equivalent to US$17.35 million, compared to the US$1.34 billion recorded in 2022.

Profitabilitas Segmen Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara serta Kontribusinya terhadap Kinerja Grup ABM
Profitability of the Coal Mining and Mining Contractor Business Segment and Its Contribution to ABM Group's Performance

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Pelanggan Eksternal Revenue from Contracts with External Customers	1.239.654	83,03	1.230.196	85,10	9.458	0,77
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Antar Segmen Revenue from Contracts with Inter-Segment Customers	120.872	8,10	112.980	7,82	7.893	6,99
Total Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from Contracts with Customers	1.360.526	91,13	1.343.176	92,92	17.351	1,29
Laba Bruto Gross Profit	323.808	82,59	487.599	93,43	(163.791)	(33,59)
Total Aset Assets Total	1.859.206	86,21	1.715.236	86,52	143.970	8,39

Kontribusi Segmen Kontraktor Tambang dan Tambang Batu Bara terhadap Profitabilitas Grup ABM 2021-2023
Contribution of Coal Mining and Mining Contractor Business Segment to ABM Group's Profitability in 2022-2023

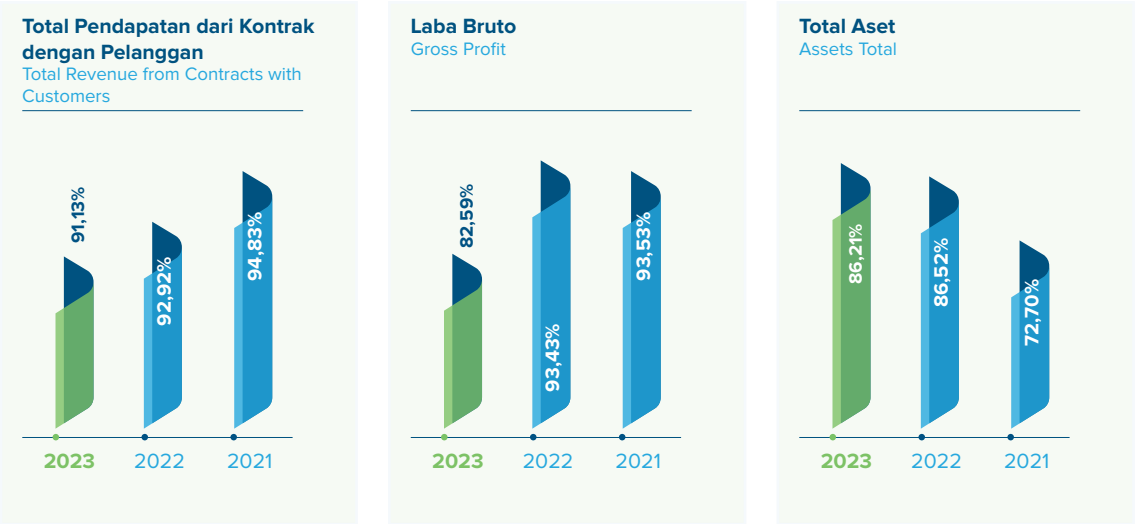

Penurunan kontribusi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari segmen kontraktor tambang dan tambang batu bara terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas batu bara dan penurunan volume penjualan batu bara. Namun peningkatan volume pemindahan lapisan penutup dari bisnis kontraktor tambang dapat mempertahankan kontribusi pendapatan dari segmen ini pada level di atas 90%.

Penurunan kontribusi laba bruto dari segmen kontraktor tambang dan tambang batu bara terutama disebabkan oleh kenaikan *stripping ratio* di konsesi pertambangan di Kalimantan Selatan maupun di Aceh. Namun segmen ini masih memberikan kontribusi laba profit terbesar bagi Perusahaan.

Segmen kontraktor tambang dan tambang batu bara juga masih berkontribusi terhadap total aset terbesar bagi Perusahaan yang mencapai 86,21% di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk mengembangkan bisnis kontraktor tambang melalui investasi barang modal berupa pembelian alat-alat berat untuk meningkatkan kapasitas produksi pemindahan lapisan penutup.

The decline in revenue contribution from contracts with customers from the mining contractor and coal mining segments was mainly due to the decrease in coal commodity prices and sales volume. However, the increase in overburden removal volume from the mining contracting business has helped maintain the revenue contribution from this segment at over 90%.

The decrease in gross profit from the coal mining and mining contractor business segment stemmed mainly from an increase in the stripping ratio in mining concessions in South Kalimantan and Aceh. Nevertheless, this segment continues to provide the highest profit contribution for the Company.

The coal mining and mining contractor business segment remained the primary contributor to the Company, reaching 86.21% in 2023. This is in line with the Company's strategy to develop the mining contractor business by investing in capital goods, such as purchasing heavy equipment to increase production capacity for overburden removal.

JASA

Segmen usaha jasa merupakan hasil pengembangan bisnis Grup ABM yang terbagi dalam 3 kegiatan usaha yang dioperasikan melalui Entitas Anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Jasa logistik terintegrasi, dikembangkan oleh Entitas Anak yang dimiliki oleh CKB Logistics;
2. Jasa rekayasa dan pengembangan, dijalankan oleh SSB; serta
3. Solusi ketenagalistrikan, dijalankan oleh AJN dan Entitas Anak yang mengembangkan jasa industri tenaga listrik terbarukan melalui *Independent Power Producer* (IPP).

SERVICES

The services business segment is an outcome of ABM Group's business development which is divided into 3 business activities operated through Subsidiaries with details as follows:

1. Integrated logistics services, developed by subsidiaries owned by CKB Logistics;
2. Engineering and development services, facilitated by SSB;
3. Electricity solutions, overseen by AJN and its subsidiaries, focusing on the advancement of renewable electricity industry services through Independent Power Producers (IPP).

Pengembangan Segmen Usaha Jasa Grup ABM
Development of ABM Group's Services Business Segment

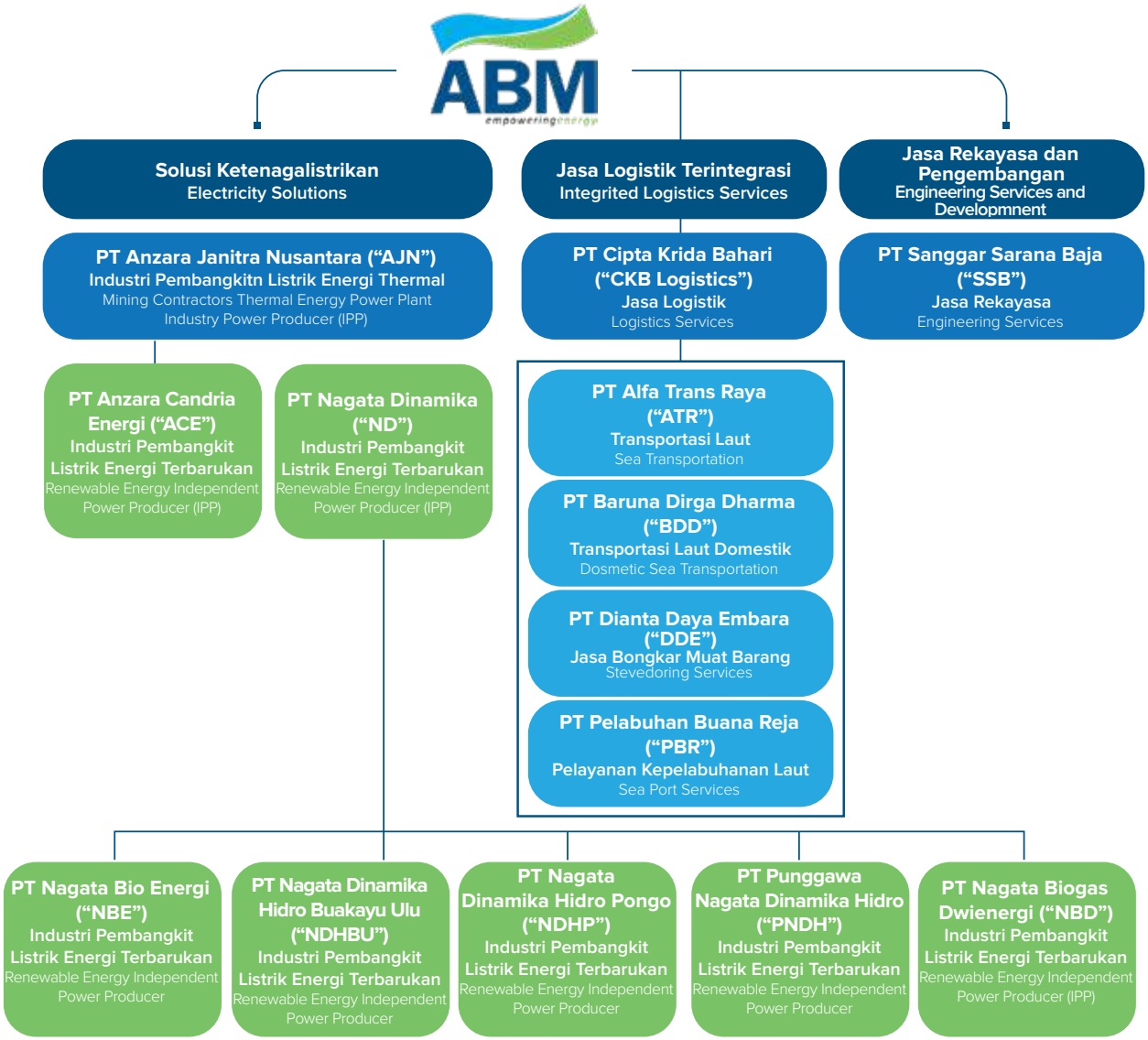

Jasa Logistik Terintegrasi

CKB Logistics didirikan pada tahun 1997 untuk menjalankan kegiatan usaha jasa logistik terpadu (*Total Solution Logistics*) dengan konsentrasi pelanggan pada sektor energi. CKB Logistics memiliki sejumlah portofolio kegiatan usaha yang terdiri dari 9 bidang, yakni:

1. *Freight Management*, jasa pengiriman barang untuk tujuan internasional dan domestik yang meliputi jasa kepabeanan dan pengiriman reguler melalui transportasi darat, laut, udara, dan transportasi multimoda;
2. *Project Logistics*, layanan manajemen transportasi khusus untuk pengiriman barang dengan kelebihan berat dan ukuran (*over weight over sized*) seperti pengiriman alat berat, mesin, peralatan pabrik, dan pembangkit tenaga listrik, khususnya yang membutuhkan penanganan khusus dan distribusi ke wilayah yang sulit dijangkau;
3. *Warehouse Management*, layanan manajemen gudang yang kegiatannya mencakup penyimpanan, manajemen inventaris, dan solusi distribusi;

Integrated Logistics Services

Established in 1997, CKB Logistics specializes in providing integrated logistics services, known as Total Solution Logistics, primarily catering to the energy sector. The company boasts a diverse portfolio of nine business activities:

1. Freight Management, offering delivery services for goods destined for both international and domestic locations, including customs clearance and regular delivery via land, sea, air, and multimodal transportation;
2. Project Logistics, managing special transportation needs for oversized and overweight goods, such as heavy equipment, machinery, and power plants, especially those requiring specialized handling and distribution to remote or inaccessible areas;
3. Warehouse Management, providing services encompassing storage, inventory management, and distribution solutions;

4. *Bonded Logistics Center*, layanan penyimpanan dan pengelolaan gudang multifungsi untuk menimbun barang yang berasal dari luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali;
5. *Supply Base/Remote Site Services*, layanan pengelolaan logistik dan material terpadu untuk mendukung industri sumber daya dan energi, seperti kegiatan pengeboran, eksplorasi, dan produksi yang berlokasi khusus di wilayah yang sulit dijangkau dan operasi lepas Pantai;
6. *Industrial Shipping*, layanan menyeluruh, termasuk kepemilikan dan pengelolaan kapal, penyewaan kapal berdasarkan waktu atau pelayaran, perawatan kapal, dan layanan perbaikan kapal yang dijalankan melalui Entitas Anak, yaitu ATR;
7. *Dry Bulk Logistics*, layanan yang terdiri dari pengangkutan kargo curah kering, kargo umum, pemindahan muatan, pengiriman antar pulau, layanan keagenan, layanan bongkar muat, derek kapal, dan logistik yang dijalankan melalui Entitas Anak, yaitu BDD;
8. *Stevedoring dan Sea Port Services*, merupakan penyedia jasa dan solusi bongkar muat (*stevedoring*) untuk proses *transshipment* kargo batu bara yang dijalankan melalui Entitas Anak, yaitu DDE;
9. *Sea Port Services*, layanan kepelabuhanan laut berupa pengoperasian terminal/dermaga, termasuk layanan manajemen teknis dan operasional untuk penanganan, penyimpanan, bongkar muat barang dan orang yang berhubungan dengan angkutan perairan/kapal, yang dijalankan melalui Entitas Anak, yaitu PBR.

4. Bonded Logistics Center, operating multifunctional storage and warehouse management services for storing goods from outside the customs area or goods originating from within, accompanied by various activities for release;
5. Supply Base/Remote Site Services, offering integrated logistics and material management services tailored to support the resources and energy industry, particularly in remote and offshore locations;
6. Industrial Shipping, comprehensive services including ship ownership, management, rental, maintenance, and repair, managed through a subsidiary named ATR;
7. Dry Bulk Logistics, handling dry bulk cargo transportation, general cargo, transshipment, inter-island delivery, agency services, loading and unloading services, ship cranes, and logistics via BDD;
8. Stevedoring and Sea Port Services is a provider of stevedoring services and solutions for the transshipment of coal cargoes through its subsidiary, DDE;
9. Sea Port Services offers seaport services by operating terminals/docks, including technical and operational management services for handling, storage, loading and unloading of goods and people related to water/ship transportation, which is operated through its Subsidiary, PBR.

Sejak Maret 2016, CKB Logistics memiliki lisensi sebagai pengelola Pusat Logistik Berikat (PLB) dari pemerintah Indonesia atas kinerja perusahaan yang baik serta didukung oleh teknologi terbaru di bidang inventori pergudangan. Selain itu, CKB Logistics juga mempunyai sertifikasi *Authorized Economic Operator* (AEO) yang diberikan oleh World Customs Organization yang hanya dimiliki oleh 3 perusahaan logistik di Indonesia.

Since March 2016, CKB Logistics has held a license as a Bonded Logistics Center (PLB) manager from the Indonesian government, recognized for its excellent performance and supported by cutting-edge warehousing inventory technology. Additionally, CKB Logistics holds Authorized Economic Operator (AEO) certification from the World Customs Organization, a distinction held by only three logistics companies in Indonesia.





Pendukung CKB Logistics
CKB Logistics' Supporting Fleet

Jenis Armada Fleet Type	Jumlah Total
Armada Truk Truck Fleet	• 192 Truk kapasitas 0,5 ton s.d 15 ton 192 Trucks of 0.5 tons to 15 tons capacity • 20 Trailers, 20' *40' FlatBed Trailers 20 Trailers, 20'*40' FlatBed Trailers • 9 Low Bed, Low Loader kapasitas 20 ton s.d 80 ton 9 Low Bed, Low Loader capacity 20 tons to 80 tons
Peralatan Berat Heavy Equipment	• 29 Forklift, kapasitas 1,6 ton, 1,7 ton, 1,8 ton, 2 ton, 2,5 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton, 12 ton dan 16 ton 29 Forklifts, with capacities of 1.6 tons, 1.7 tons, 1.8 tons, 2 tons, 2.5 tons, 3 tons, 5 tons, 10 tons, 12 tons and 16 tons • 2 Unit Heavy Duty Loader: Multi Axle (10 axles) 2 Units of Heavy Duty Loader: Multi Axle (10 axles) • 21 Unit Dozer & 7 Unit Wheel Loader 21 Units Dozer & 7 Units Wheel Loader • 8 unit Hydraulic Roller & Jacking Tools 8 Units of Hydraulic Roller & Jacking Tools
Kapal Vessels	• 1 Kapal Kargo 78 dan 102 TEUS 1 78 Cargo Vessels and 102 TEUS • 2 unit LCT dengan kapasitas antara 1.000 DWT s.d 4.500 DWT 2 units of LCT with capacity between 1,000 DWT and 4,500 DWT • 8 unit Kapal Tunda dan Tongkang ukuran 300 feet 8 units of Tugs and Barges of 300 feet size • 2 unit Tug Boat 2400 hp 2 units of Tug Boat with 2400 hp

Indikator Kinerja CKB Logistics
CKB Logistics Performance Indicator

	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	%
Total *Delivery Advice* (unit) Total Delivery Advice (unit)	620.649	627.053	(6.404)	(1,02)
Total Koli (unit) Total Colli (unit)	1.235.420	1.307.550	(72.130)	(5,51)
Total Berat (kg) Total Weight (kg)	57.417.329	55.929.901	(1.487.428)	(2,65)
Total Manifes (unit) Total Manifest (unit)	224.689	235.480	(10.791)	(4,58)

Jasa Rekayasa

Melalui SSB yang didirikan tahun 1977, Perusahaan menjalankan kegiatan usaha jasa rekayasa yang terdiri dari pengelasan dan permesinan, perbaikan, modifikasi, serta perancangan dan pabrikasi khusus. SSB merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa rekayasa yang unggul di Indonesia dan mengembangkan jasa tersebut melalui *business services*, yang meliputi tahapan atau perbaikan teknis di lokasi proyek atau bengkel (*workshop*).

Engineering Services

Established in 1977, SSB conducts engineering service activities encompassing welding, machining, repairs, modifications, as well as specialized design and manufacturing. As a prominent player in the Indonesian market, SSB offers comprehensive engineering services and further enhances its offerings through on-site technical support and workshop improvements.





Solusi Ketenagalistrikan

Kegiatan operasi jasa pengadaan pembangkit listrik dijalankan oleh AJN yang didirikan pada tahun 2014. Dalam menjalankan kegiatan operasinya, AJN mendirikan Entitas Anak untuk mendukung pengembangan bisnisnya. Melalui Entitas Anak tersebut, AJN telah menyelesaikan dan mengoperasikan satu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang dapat membantu elektrifikasi wilayah sekitar dan menambah bauran energi listrik dari Energi Terbarukan secara nasional.

Hingga akhir tahun 2023, AJN memiliki 7 Entitas Anak, yaitu ND, NBE, NDHBU, NDHP, PNDH, NBD dan ACE. Saat ini, kegiatan operasi solusi ketenagalistrikan yang dijalankan AJN difokuskan pada pengusahaan pengadaan pembangkit listrik melalui IPP.

Electricity Solutions

Established in 2014, AJN is responsible for the operation of power plant procurement services. In carrying out its operations, AJN established Subsidiaries to support its business development. Through this subsidiary, AJN successfully completed and commenced operations of a Biogas Power Plant (PLTBg) in South Kalimantan in 2020, contributing to the electrification of the surrounding area and bolstering the national mix of electrical energy from Renewable Energy sources.

By the end of 2023, AJN had expanded its portfolio to include two subsidiaries, namely NBE, NDHBU, NDHP, PNDH, NBD and ACE. Presently, AJN's efforts in the electricity solutions sector are concentrated on procuring power plants through IPP.





Profitabilitas Segmen Usaha Jasa

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perusahaan dari segmen usaha jasa pada tahun 2023 mencapai AS$233,23 juta, meningkat 2,98% atau AS$6,75 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$226,48 juta.

Profitability of Service Business Segment

The revenue generated from contracts with the Company's customers within the service business segment amounted to US$233.23 million in 2023. This reflects a 2.98% increase, equivalent to US$6.75 million, compared to the 2022 figure of US$226.48 million.

Profitabilitas Segmen Jasa dan Kontribusinya terhadap Kinerja Grup ABM
Profitability and Contribution of Service Business Segment to ABM Group's Performance

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Pelanggan Eksternal Revenue from Contracts with External Customers	200.496	13,43	179.526	12,42	20.971	11,68
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Antar Segmen Revenue from Contracts with Inter-Segment Customers	32.732	2,19	46.956	3,25	(14.224)	(30,29)
Total Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Net Revenue from Contracts with Customers	233.229	15,62	226.482	15,67	6.747	2,98
Laba Bruto Gross Profit	45.216	11,53	41.966	8,04	3.249	7,74
Total Aset Assets Total	205.103	9,51	185.755	9,37	19.348	10,42

Kontribusi Segmen Jasa terhadap Profitabilitas Grup ABM 2021-2023
Contribution of Service Business Segment to ABM Group's Profitability for the Period of 2021-2023

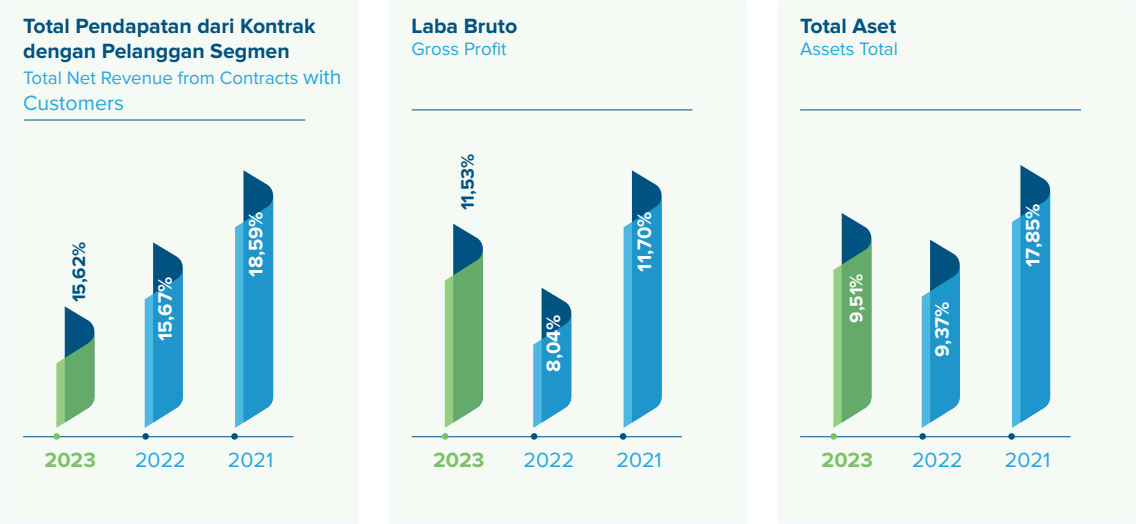

Kontribusi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari segmen jasa dapat dipertahankan pada level sekitar 15% di tahun 2023 ini. Namun segmen jasa berhasil meningkatkan kontribusi laba profit dari 8,04% pada tahun 2022 menjadi 11,53% pada tahun 2023 ini. Meskipun terjadi kenaikan kontribusi pada laba profit, namun kontribusi total aset dari segmen jasa tidak mengalami kenaikan yang signifikan selama tahun 2023 ini dan dapat dipertahankan pada level sekitar 9%.

The revenue contribution from contracts with customers in the services business segment was maintained at around 15% in 2023. However, the services business segment managed to increase its profit contribution from 8.04% in 2022 to 11.53% in 2023. Despite the profit increase, the contribution of total assets from the services business segment did not increase significantly during 2023, it was maintained at approximately 9%.

PABRIKASI

SSB menjalankan kegiatan usaha pabrikasi yang meliputi perancangan dan pembuatan peralatan transportasi, industri untuk pertambangan, minyak dan gas bumi, industri, perbaikan dan remanufaktur komponen utama, serta alat berat untuk operasional pertambangan.

MANUFACTURING

SSB engages in manufacturing activities, encompassing the design and production of transportation equipment, as well as machinery for mining, oil and gas industries. Additionally, SSB specializes in the repair and remanufacturing of key components, along with the manufacture of heavy equipment tailored for mining operations.

PT Sanggar Sarana Baja ("SSB")
Pembuatan Perlengkapan Penunjang Alat Berat dan Alat Angkut Bahan
Manufacturing of Heavy Equipment Attactment and Materials Handling Products





Profitabilitas Segmen Usaha Pabrikasi

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perusahaan dari segmen usaha pabrikasi pada tahun 2023 mencapai AS$45,30 juta, meningkat 29,51% atau AS$10,32 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$34,98 juta.

Profitability of Manufacturing Business Segment

The revenue from contracts with the Company's customers within the manufacturing business segment totaled US$45.30 million in 2023. This signifies a notable increase of 29.51%, amounting to US$10.32 million, compared to the 2022 figure of US$34.98 million.

Profitabilitas Segmen Pabrikasi dan Kontribusinya terhadap Kinerja Grup ABM
Profitability and Contribution of Manufacturing Business Segment to ABM Group's Performance

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Pelanggan Eksternal Revenue from Contracts with External Customers	37.659	2,52	29.626	2,05	8.033	27,11
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Antar Segmen Revenue from Contracts with Inter-Segment Customers	7.645	0,51	5.354	0,37	2.291	42,79
Total Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Segmen Total Net Revenue from Contracts with Customers	45.304	3,03	34.980	2,42	10.324	29,51
Laba Bruto Segmen Segment Gross Profit	6.733	1,72	5.328	1,02	1.405	26,37
Aset Segmen Segment Assets	60.421	2,80	55.367	2,79	5.054	9,13

Kontribusi Segmen Pabrikasi terhadap Profitabilitas Grup ABM 2021-2023
Contribution of Manufacturing Business Segment to ABM Group's Profitability in 2021-2023

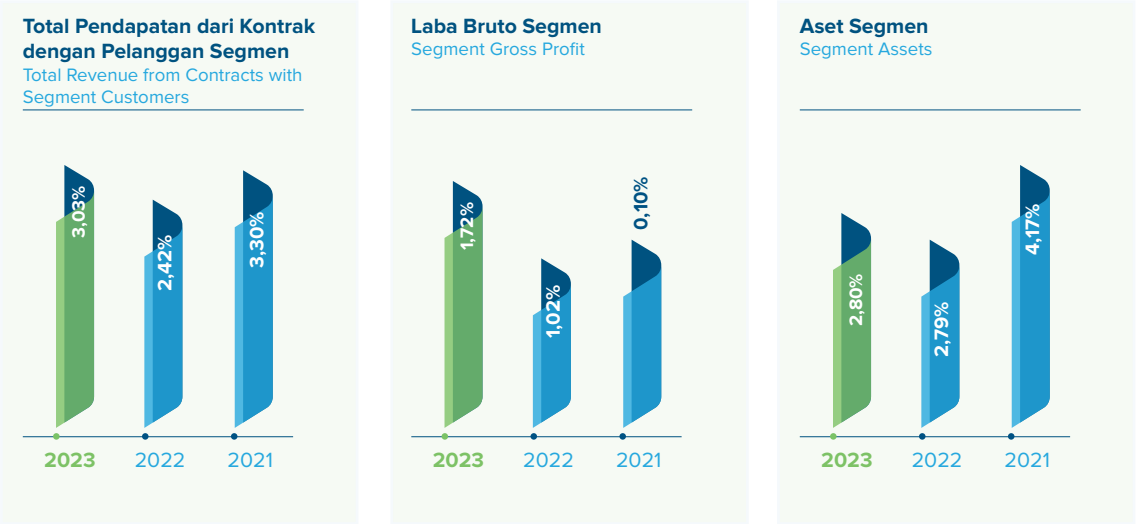

Kontribusi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari segmen pabrikasi meningkat dari 2,42% menjadi 3,03% ditahun 2023 ini. Kenaikan kontribusi pendapatan ini dikuti oleh kenaikan kontribusi laba bruto dari 1,02% tahun lalu menjadi 1,72%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penjualan produk produk SSB, seperti Optiload. Meskipun terjadi kenaikan kontribusi pada laba profit, namun kontribusi total aset dari segmen pabrikasi tidak mengalami kenaikan yang signifikan selama tahun 2023 ini dan dapat dipertahankan pada level sekitar 2,80%.

Revenue contribution from contracts with customers in the manufacturing business segment increased from 2.42% to 3.03% in 2023. This increase in revenue contribution was followed by an increase in gross profit contribution from 1.02% last year to 1.72%. This growth was driven by increased sales of SSB products, such as Optiload. Even though there was an increase in contribution to profit, the contribution of total assets from the manufacturing business segment did not increase significantly during 2023, it was maintained at around 2.80%.

LAIN-LAIN

Selain 3 (tiga) segmen usaha yang telah dijelaskan sebelumnya, Grup ABM juga memiliki kegiatan usaha lainnya, yaitu perdagangan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan operasi dalam ruang lingkup bisnis internal yang dijalankan melalui PWP.

PWP mulai beroperasi sejak Juni 2017 dan telah memiliki Izin Niaga Umum (NU) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menjalankan kegiatan jual beli bahan bakar di wilayah Indonesia. Sejak bulan April 2018, PWP mengembangkan bisnisnya pada penyaluran pelumas.

OTHERS

In addition to the 3 (three) business segments described above, ABM Group also has other business activities, namely fuel trading to meet the needs of operations within the scope of internal business run through PWP.

PWP commenced operations in June 2017 and holds a General Trading License (NU) from the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, Directorate General of Oil and Gas, authorizing fuel buying and selling activities within Indonesian territory. Since April 2018, PWP has expanded its operations to include lubricant distribution.





Hingga akhir tahun 2023, PWP telah melakukan penjualan bahan bakar solar sebanyak 348,11 juta liter yang tersebar di 18 lokasi dari 7 provinsi. Selain itu, PWP juga berhasil melakukan penyaluran volume pelumas sebanyak 4,73 juta liter, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 3,33 juta liter.

Until the end of 2023, PWP has sold 348.11 million liters of diesel fuel, distributed across 18 locations in 7 provinces. Additionally, PWP successfully distributed 4.73million liters of lubricant, marking an increase compared to 2022, which stood at 3.33 million liters.

Profitabilitas Segmen Usaha Lain-Lain

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Perusahaan dari segmen usaha lain-lain pada tahun 2023 mencapai AS$295,73 juta, meningkat 29,54% atau AS$67,44 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$228,29 juta.

Profitability of Other Business Segments

The revenue from contracts with the Company's customers within other business segments totaled US$295.73 million in 2023. This represents a significant increase of 29.54%, amounting to US$67.44 million, compared to the 2022 figure of US$228.29 million.

Profitabilitas Usaha Lain-Lain dan Kontribusinya terhadap Kinerja Grup ABM
Profitability and Contribution of Other Business Segments to ABM Group's Performance

Segmen Segment	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Pelanggan Eksternal Revenue from Contracts with External Customers	15.190	1,02	6.180	0,43	9.010	145,80
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan - Antar Segmen Revenue from Contracts with Inter-Segment Customers	280.538	18,79	222.108	15,37	58.430	26,31
Total Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Segmen Total Net Revenue from Contracts with Customers	295.727	19,81	228.288	15,79	67.440	29,54
Laba Bruto Gross Profit	23.677	6,04	13.646	2,61	10.031	73,51
Total Aset Assets Total	538.307	24,96	573.776	28,94	(35.469)	(6,18)

Kontribusi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dari segmen lain lain meningkat dari 15,79% menjadi 19,81% ditahun 2023 ini. Kenaikan kontribusi pendapatan ini dikuti oleh kenaikan kontribusi laba bruto yang signifikan dari 2,61% tahun lalu menjadi 6,04%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan penjualan volume bahan bakar sebesar 48,00% dibandingkan tahun lalu, sejalan dengan peningkatan volume pemindahan lapisan penutup. Segmen lain-lain tidak melakukan investasi barang modal selama tahun 2023 sehingga menurunkan kontribusi total aset dari segmen lain-lain terhadap total aset perusahaan.

Revenue contribution from contracts with customers from other segments increased from 15.79% to 19.81% in 2023. This increase in revenue contribution was followed by a significant increase in gross profit contribution from 2.61% last year to 6.04%. This was due to an increase in fuel volume sales by 48.00% compared to last year, in line with the increase in overburden removal volume. The Other segment did not invest in capital goods during the year, thus reducing the contribution of total assets from the Other segment to the company's total assets.

ASPEK PEMASARAN



Penurunan harga komoditas batu bara pada tahun 2023 mendorong Perusahaan untuk mengoptimalkan penjualan yang diiringi oleh efektivitas biaya. Mayoritas penjualan ekspor Batu bara tetap dilakukan kepada India dan Tiongkok sebagai negara-negara dengan permintaan batu bara terbesar. Namun Perusahaan tetap menjalankan komitmen untuk memperluas area pelanggan ke negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Perusahaan juga terus mengoptimalkan rantai nilai dan ekosistem usaha batu bara Grup ABM yang berawal dari proses penambangan sampai dengan proses pengapalan yang dikenal sebagai *Mining Value Chain* (MVC) serta meningkatkan utilitas infrastruktur pertambangan yang ada oleh tambang-tambang batu bara yang ada di sekitar konsesi tambang Perusahaan.

The decline in coal commodity prices in 2023 pushed the Company to optimize its sales and cost effectiveness. Its majority of coal export sales continued to be made to India and China, as they were the two countries with the largest demand for coal. At the same time, the Company remained committed to expanding its customer area to other countries in Southeast Asia. It also continued to optimize the value chain and ecosystem of ABM Group's coal business, all the way from the mining process to the shipping process known as the Mining Value Chain (MVC) as well as by boosting its utility of existing mining infrastructure through coal mines around the Company's mining concessions.

Dengan semakin terbatasnya cadangan batu bara pada konsesi pertambangan di Kalimantan Selatan, bisnis kontrak pertambangan menjadi kontributor pendapatan utama bagi Perusahaan di tahun 2023. Sejalan dengan strategi Perusahaan untuk terus meningkatkan kapasitas produksi lapisan penutup dan *coal getting* melalui belanja modal alat berat selama dua tahun terakhir, CK berhasil mencapai volume pemindahan lapisan penutup tertinggi yang pernah dicapai Perusahaan. Perusahaan juga tetap berkomitmen dalam mengimplementasikan *Good Mining Practice* pada operasi kontrak pertambangan yang berfokus pada keselamatan kerja, kualitas layanan yang baik dengan bantuan data analitik produksi berbasis komputasi *machine learning* seiring dengan bauran harga yang kompetitif kepada para pelanggan.

Due to increasingly limited coal reserves in its mining concessions in South Kalimantan, the mining contract business will serve as the Company's main revenue contributor in 2023. In line with the Company's strategy to continue to increase its overburden production capacity and coal getting through heavy equipment capital expenditure over the last two years, CK succeeded in achieving the Company's highest-ever overburden removal volume. The Company also remained committed to implementing Good Mining Practices in its mining contract operations that focused on work safety, good service quality (with the help of machine learning-based production analytical data), along with a competitive price mix for customers.

Jasa pengapalan batu bara melalui BDD dan DDE terus berupaya mendukung optimalisasi rantai nilai dan ekosistem batu bara serta meningkatkan pertumbuhan bisnis dengan rencana akusisi *tug & barge* serta *floating crane* guna mendapatkan kontrak jangka panjang dari pelanggan eksternal, khususnya di area Kalimantan. Demikian pula untuk jasa penyedia bahan bakar melalui PWP yang terus berkomitmen mendukung operasi pertambangan Perusahaan dengan selalu mengedepankan keselamatan kerja. Selama tahun 2023, PWP juga mulai melakukan penjualan kepada pelanggan eksternal yang berlokasi di sekitar area kerja Perusahaan.

Coal shipping services through BDD and DDE continued with efforts to support the optimization of coal value chains and ecosystems. They also worked to increase business growth by way of plans to acquire tugs, barges and floating cranes as a means to obtain long-term contracts from external customers, especially ones in the Kalimantan area. The same was true for fuel provider services through PWP, which continued its commitment to supporting the Company's mining operations by always prioritizing work safety. Throughout 2023, PWP also began efforts to push for sales to external customers located around the Company's work area.

Dalam rangka membangun *brand awareness*, CKB Logistics melanjutkan efektivitas strategi pemasaran di tahun sebelumnya, yaitu dengan mengkombinasikan strategi promosi baik secara *online* maupun *offline*. Kegiatan promosi melalui jalur-jalur pemasaran *online* dilakukan dengan memaksimalkan aset digital yang dimiliki Perseroan, yaitu situs resmi perusahaan, akun resmi CKB Logistics di platform Instagram, LinkedIn dan YouTube. Sementara itu, kegiatan promosi secara *offline* dilakukan dengan berpartisipasi di berbagai acara pameran dan *event*, baik di dalam maupun luar kota, serta publikasi di beragam media cetak.

In order to build brand awareness, CKB Logistics continued with its previous year's marketing efforts. It did this by combining promotional strategies (both online and offline). Online marketing was carried out by maximizing the Company's digital assets, specifically, its official website, CKB Logistics official account on the Instagram, and LinkedIn and YouTube platforms. Offline promotional activities were carried out by participating in various exhibitions and events, both inside and outside the city.

SSB terus berupaya untuk memperluas area pemasaran dengan melakukan pemasaran ekspor beserta layanan purna jualnya. SSB juga melakukan kegiatan promosi secara *offline* dengan berpartisipasi di berbagai acara pameran dan *event* yang dihadiri oleh pelanggan-pelanggan potensial SSB yang berasal dari industri kontraktor pertambangan dan bisnis konsesi pertambangan. Pada saat bersamaan, SSB juga terus memperkuat kemampuan tim produksi agar dapat terus beradaptasi terhadap permintaan pelanggan yang dinamis seperti pembukaan *workshop* Sebamban dan *hub* Surabaya. Selain itu, dalam rangka meningkatan *customers experience,* SSB berinisiatif melakukan reorganisasi yang menitikberatkan pada *sales and operations* yang lebih mandiri di setiap area operasional.

SSB continued to work in expanding its marketing area by conducting export marketing to the East Asia area, especially for Optiload products and for after-sales services. SSB also carried out offline promotional activities by participating in various exhibitions and in events that were attended by potential SSB customers from the mining contractor industry and mining concession business. At the same time, SSB also continued to strengthen its production team's capabilities so that it can continue to adapt to dynamic customer demands. This strategy will also helped SSB maintain its relevance and its technological prowess in producing sophisticated and appropriate solutions for various customer needs.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
Financial Review



STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan Laporan Tahunan 2023 ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Grup ABM untuk tahun-tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan penanggung jawab Chang Hartono, CPA dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2024 dengan opini "wajar, dengan semua hal yang material".

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND CONFORMITY TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The analysis and discussion of the financial performance in this 2023 Annual Report are based on the ABM Group's Consolidated Financial Reports for the years ending December 31, 2023, and December 31, 2022. These reports encompass the consolidated financial performance and cash flows, which have been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm. Chang Hartono, CPA, oversaw the audit, and his report dated March 27, 2024, with an unqualified opinion.

The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements adhere to the Financial Accounting Standards in Indonesia, specifically the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) published by the Indonesian Accountants Association (IAI).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Posisi keuangan Perusahaan pada tahun 2023 cukup solid dengan jumlah aset yangmencapai AS$2,16 miliar, meningkat 8,78% dari tahun sebelumnya. Struktur permodalan Perusahaan masih terdiri dari porsi liabilitas yang lebih besar, yaitu sebesar 64,81% dan porsi ekuitas sebesar 35,19%.

The Company's financial position in 2023 remained quite solid, with total assets having reached US$2.16 billion. This number marked an increase of 8.78% from the previous year. The Company's capital structure still consisted of a larger liability portion at 64.81%, with an equity portion of 35.19%.

Posisi Keuangan Financial Position	**2023 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**2022 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	**Persentase** Percentage (%)
Aset Assets	2.156.688	1.982.579	174.109	8,78
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity				
Liabilitas Liabilities	1.397.761	1.365.057	32.704	2,40
Ekuitas Equity	758.927	617.521	141.406	22,90
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liabilities and Equity**	**2.156.688**	**1.982.579**	**174.109**	**8,78**

Berikut diuraikan kinerja dari Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan:

The performance of the Company's assets, liabilities, and equity is as follows:

Aset | Assets

Total Aset Perusahaan tahun 2023 mencapai AS$2,16 miliar, meningkat 8,78% dibandingkan Total Aset tahun 2022 sebesar AS$1,98 miliar. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2019-2023, Total Aset Perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 20,35%.

The Company's Total Assets in 2023 reached US$2.16 billion, reflecting an increase of 8.78% compared to the Total Assets in 2022, which amounted to US$ 1.98 billion. Over the period from 2019 to 2023, the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for the Company's Total Assets stood at 20.35%.

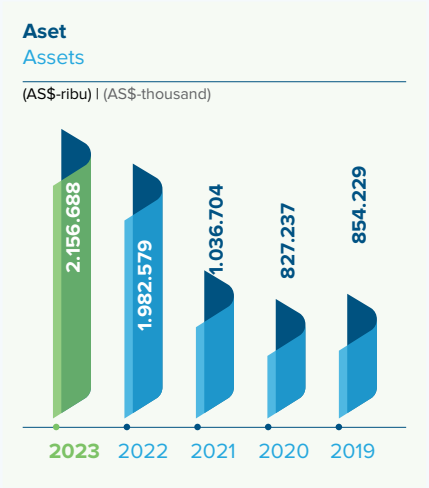

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Aset **Assets**				
Aset Lancar **Current Assets**				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	188.577	221.566	(32.989)	(14,89)
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Financial Assets	5.674	99.390	(93.716)	(94,29)
Piutang Usaha **Trade Receivables**				
Pihak Ketiga - Neto Third Parties - Net	153.555	171.182	(17.628)	(10,30)
Pihak Berelasi - Neto Related Parties - Net	159.987	84.442	75.545	89,46
Piutang Non-Usaha **Non-Trade Receivables**				
Pihak Ketiga - Neto Third Parties - Net	485	325	160	49,12
Pihak Berelasi - Neto Related Parties - Net	30.529	10.880	19.649	180,60
Persediaan - Neto Inventories - Net	53.278	55.643	(2.365)	(4,25)
Uang Muka Advances	5.959	6.167	(208)	(3,38)
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	3.109	4.390	(1.281)	(29,17)
Pajak Pertambahan Nilai Dibayar di Muka Prepaid Value-Added Taxes	19.219	51.132	(31.913)	(62,41)
Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual Non-Current Assets Held for Sale	1.000	-	1.000	-
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	1.351	1.547	(196)	(12,68)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	622.722	706.664	(83.942)	(11,88)
Aset Tidak Lancar **Non-Current Assets**				
Investasi pada Saham Investments in Shares	16.731	23.619	(6.888)	(29,16)
Investasi pada Entitas Asosiasi Investments in Assosiates	589.643	480.947	108.696	22,60
Aset Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Assets - Net	9.357	9.196	161	1,75
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	725.355	567.333	158.022	27,85
Aset Hak-Guna - Neto Right of Use Assets - Net	119.755	86.715	33.040	38,10
Taksiran Tagihan Pajak - Neto Estimated Claims for Tax Refund - Net	44.580	13.611	30.969	227,53
Properti Pertambangan - Neto Mining Properties - Net	3.697	41.358	(37.661)	(91,06)

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Aset Takberwujud - Neto Intangible Assets - Net	14.071	16.189	(2.119)	(13,09)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	10.775	36.944	(26.169)	(70,83)
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.533.966	1.275.914	258.052	20,22
Jumlah Aset	2.156.688	1.982.579	174.109	8,78

Kinerja Aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Total aset lancar pada tahun 2023 mengalami penurunan 11,88% dibandingkan dengan tahun 2022, sedangkan total aset tidak lancar mengalami kenaikan 20,22% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Asset performance is influenced by both Current Assets and Non-Current Assets. In 2023, compared to 2022, Total Current Assets experienced a decrease of 11.88%, while Total Non-Current Assets saw an increase of 20.22%.

Aset Lancar

Aset lancar Perusahaan pada tahun 2023 sebesar AS$622,72 juta, mengalami penurunan 11,88% atau setara dengan AS$83,94 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$706,66 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penggunaan kas dan setara kas untuk pembelian aset tetap dan pembayaran kewajiban serta dampak dari dekonsolidasi MDB dari buku Grup ABM yang terjadi di akhir tahun 2023.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Current Assets

The Company's current assets in 2023 amounted to US$622.72 million. This number marked a decrease of 11.88% or an equivalent of US$83.94 million compared to 2022's current assets of US$706.66 million. This decrease was mainly the result of the use of cash and cash equivalents for purchasing fixed assets and paying liabilities. It was also the result of MDB's deconsolidation from ABM Group's books, which occurred at the end of 2023.

The performance of the Company's assets, liabilities, and equity is as follows:

Aset Lancar 2019-2023
Current Assets in 2019-2023

(AS$-ribu) I (US$ thousand)

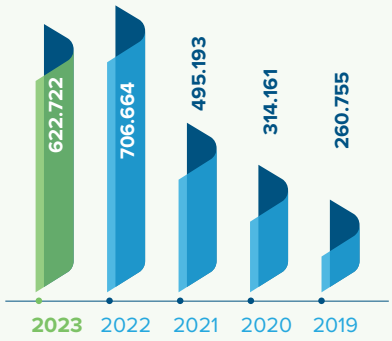

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas Perusahaan terdiri dari kas, kas dan bank, serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang, sejak penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya. Pada tahun 2023, kas dan setara kas Perusahaan tercatat sebesar AS$188,58 juta, mengalami penurunan 14,89% atau setara dengan AS$32,99 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$221,57 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penggunaan kas untuk kegiatan investasi Perusahaan berupa pembelian aset tetap seta pembayaran kewajiban serta dampak dari dekonsolidasi MDB dari buku Grup ABM yang terjadi di akhir tahun 2023.

Cash and Cash Equivalents

The Company's cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks, and time deposits with maturities of 3 months or less, which are not restricted in use. In 2023, the Company's cash and cash equivalents were recorded at US$188.58 million, reflecting a decrease of 14.89% or US$32.99 million compared to 2022's US$221.57 million. This decrease was mainly due to the use of cash for the Company's investment activities in the form of purchasing fixed assets and paying liabilities as well as the impact of the deconsolidation of MDB from the ABM Group's books which occurred at the end of 2023.

Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$313,54 juta, mengalami kenaikan 22,66% atau setara dengan AS$57,92 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$255,62 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha dengan pihak berelasi.

Persediaan - Neto

Persediaan Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$53,28 juta, mengalami penurunan 4,25% atau setara dengan AS$2,36 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$55,64 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan suku cadang, sejalan dengan operasi kontrak pertambangan yang semakin efisien.

Uang Muka

Uang muka Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$5,96 juta, mengalami penurunan 3,38% atau setara dengan AS$208,46 ribu dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$6,17 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pembayaran royalti seiring dengan menurunnya volume penjualan batu bara TIA dan dampak dari dekonsolidasi MDB.

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$1,53 miliar, mengalami kenaikan 20,22% atau setara dengan AS$258,05 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$1,28 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan nilai investasi pada entitas asosiasi dan peningkatan nilai aset tetap.

Perkembangan Jumlah Aset Tidak Lancar Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Trade Receivables

The Company's trade receivables in 2023 amounted to US$313.54 million, marking an increase of 22.66% or US$57.92 million compared to 2022's US$255.62 million. This increase is This increase was mainly a result of an increase in trade receivables from related parties.

Inventories - Net

The Company's inventories in 2023 amounted to US$53.28 million, showing a decrease of 4.25% or US$2.36 million compared to 2022's US$55.64 million. This decrease was mainly a result of a reduction in spare parts inventories, in line with mining contract operations that have become more and more efficient.

Advances

The Company's advances in 2023 amounted to US$5.96 million, representing a decrease of 3.38% or US$208.46 thousand compared to 2022's US$6.17 million. This decrease was the result of a reduction in royalty payments that were in line with the decline in TIA's coal sales volume and MDB's deconsolidation impact.

Non-Current Assets

The Company's non-current assets in 2023 amounted to US$1.53 billion, reflecting an increase of 20.22% or US$258.05 million compared to 2022's US$1.28 billion. This increase was a result of a rise in investment value in associated entities and a boost in the value of fixed assets.

Overall, these adjustments help maintain consistency and clarity throughout the descriptions of the Company's financial components.

Aset Tidak Lancar 2019-2023
Non-Current Assets in 2019-2023
(AS$-ribu) I (US$ thousand)

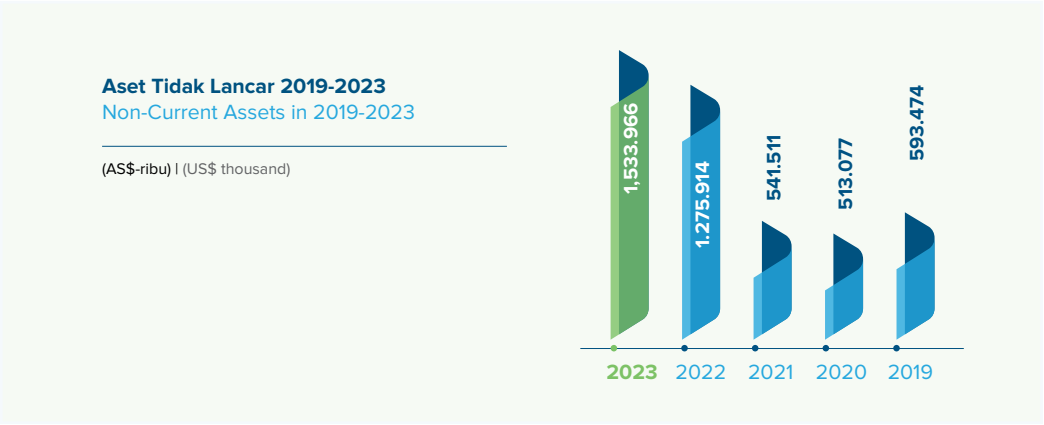

Investasi pada Entitas Asosiasi

Pada tahun 2023, investasi pada entitas asosiasi tercatat sebesar AS$589,64 juta, mengalami kenaikan 22,60% atau setara dengan AS$108,70 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$480,95 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh performa yang baik dari investasi anak Perusahaan di GEMS serta pencatatan MDB dalam investasi pada entitas asosiasi Perusahaan seiring dengan realisasi dekonsolidasi MDB.

Investments in Associates

In 2023, investments in associated entities amounted to US$589.64 million, marking a 22.60% increase or US$108.70 million compared to 2022's US$480.95 million. This increase was a result of good performance within the Company's subsidiary investment in GEMS. It was also the result of MDB investments in the Company's associated entities. This was in line with the realization of MDB's deconsolidation.

Aset Tetap - Neto

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa. Pada tahun 2023 aset tetap - neto Perusahaan sebesar AS$725,35 juta, mengalami kenaikan 27,85% atau setara dengan AS$158,02 juta dibandingkan aset tetap - neto Perusahaan tahun 2022 sebesar AS$567,33 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pembelian aset tetap terutama alat berat dalam rangka mendukung pertumbuhan kapasitas produksi untuk pemindahan lapisan penutup di CK.

Fixed Assets - Net

Fixed assets are tangible assets utilized in the production or provision of goods or services. In 2023, the Company's fixed assets - net are projected to total US$725.35 million, reflecting a 27.85% increase or US$158.02 million compared to the Company's fixed assets - net in 2022, which amounted to US$567.33 million. This increase is This increase was a result of the purchase of fixed assets, especially when it came to heavy equipment, as a means to support a growth in production capacity for overburden removal at CK.

Liabilitas

Total Liabilitas Perusahaan tahun 2023 mencapai AS$1,40 miliar mengalami kenaikan 2,40% dibandingkan Total Liabilitas tahun 2022 sebesar AS$1,36 miliar.

The Company's Total Liabilities in 2023 reached US$1.40 billion, a 2.40% increase compared to the Total Liabilities in 2022, which amounted to US$1.36 billion

Liabilities

Total Liabilitas 2019-2023
Total Liabilities

(AS$-ribu) I (AS$-ribu)

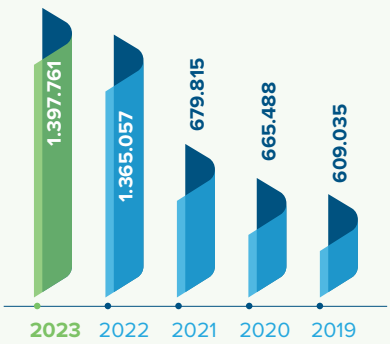

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas **Liabilities**				
Liabilitas Jangka Pendek **Short-term Liabilities**				
Utang Bank Jangka Pendek Short-term Bank Loans	69.420	60.044	9.376	15,61
Utang Usaha Trade Payables				
Pihak Ketiga Third Parties	93.813	91.857	1.955	2,13
Pihak Berelasi Related Parties	161.639	134.596	27.042	20,09
Utang Non-Usaha Non-Trade Payables				
Pihak Ketiga Third Parties	3.495	4.415	(920)	(20,83)
Pihak Berelasi Related Parties	953	2.492	(1.539)	(61,75)
Utang Pajak Taxes Payable	9.567	31.992	(22.425)	(70,10)
Beban Akrual Accrued Expenses	35.843	113.553	(77.709)	(68,43)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Short-Term Employee Benefits Liabilities	17.439	19.700	(2.261)	(11,48)

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Uang Muka Pelanggan Advances from Customers				
Pihak Ketiga Third Parties	635	535	99	18,54
Pihak Berelasi Related Parties	1.171	204	967	473,45
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: Current Maturities of Long-Term Liabilities				
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans	186.938	120.419	66.519	55,24
Liabilitas Sewa Lease Liabilities				
Pihak Ketiga Third Parties	22.002	10.847	11.155	102,84
Pihak Berelasi Related Parties	28.766	26.278	2.488	9,47
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Short-term Liabilities**	631.681	616.934	14.747	2,39
Liabilitas Jangka Panjang **Long-term Liabilities**				
Provisi untuk Kewajiban Restorasi Lingkungan Provision for Environmental Restoration Obligation	2.085	4.575	(2.491)	(54,44)
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun: **Long-Term Liabilities - Net of Current Maturities:**				
Utang Obligasi Bonds Payable	155.359	153.914	1.445	0,94
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans	502.336	516.363	(14.027)	(2,72)
Liabilitas Sewa **Lease Liabilities**				
Pihak Ketiga Third Parties	41.607	12.111	29.497	243,56
Pihak Berelasi Related Parties	33.748	38.766	(5.018)	(12,94)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto Deferred Tax Liabilities - Net	6.361	3.089	3.272	105,93
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Long-Term Employee Benefits Liabilities	24.584	19.306	5.278	27,34
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Long-term Liabilities**	766.080	748.123	17.957	2,40
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	1.397.761	1.365.057	32.704	2,40

Jumlah liabilitas Perusahaan dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Jumlah liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 mengalami kenaikan 2,39% dibandingkan tahun 2022, sedangkan liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 2,40% sebagaimana diuraikan di bawah ini.

The Company's total liabilities were influenced by short-term liabilities and long-term liabilities. Total short-term liabilities in 2023 saw an increase by 2.39% compared to that of 2022, while long-term liabilities increased by 2.40%, as has been explained below.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tahun 2023, liabilitas jangka pendek Perusahaan tercatat sebesar AS$631,68 juta, mengalami kenaikan 2,39% atau setara dengan AS$14,75 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$616,93 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang bank dan utang usaha kepada pihak berelasi.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Short-term Liabilities

In 2023, the Company's short-term liabilities amounted to US$631.68 million, a 2.39% increase or US$14.75 million compared to US$616.93 million recorded in 2022. This increase is primarily This was mainly due to an increase in bank loans and trade payables to related parties.

The development of the Company's Total Short-term Liabilities can be seen in the chart below:

Liabilitas Jangka Pendek 2019-2023
Short-term Liabilities in 2019-2023

(AS$-ribu) I (US$ thousand)

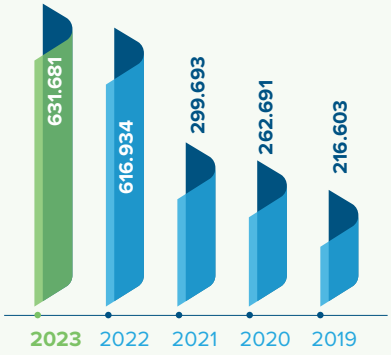

Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$69,42 juta, mengalami kenaikan 15,61% atau setara dengan AS$9,38 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$60,04 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan modal kerja Perusahaan.

Short-Term Bank Loans

The Company's short-term bank loans in 2023 amounted to US$69.42 million, a 15.61% increase or US$9.38 million compared to US$60.04 million recorded in 2022. This increase was a result of a rise in the Company's working capital requirements.

Utang Usaha

Utang usaha Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$255,45 juta, mengalami kenaikan 12,81% atau setara dengan AS$29,00 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$226,45 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dari pihak berelasi.

Trade Payables

The Company's trade payables in 2023 totaled US$255.45 million, reflecting a 12.81% increase or US$29.00 million compared to 2022's US$226.45 million. This increase was a result of a rise in trade payables from related parties.

Liabilitas Sewa (Jangka Pendek)

Liabilitas sewa Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$50,77 juta, mengalami kenaikan 36,75% atau setara dengan AS$13,64 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$37,13 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa dari pihak ketiga.

Lease Liabilities (Short Term)

The Company's lease liabilities in 2023 amounted to US$50.77 million, marking a 36.75% increase or US$13.64 million compared to US$37.12 million recorded in 2022. This increase was a result of a rise in rental liabilities from third parties.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar AS$766,08 juta, mengalami kenaikan 2,40% atau setara dengan AS$17,96 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$748,12 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa dan utang bank jangka panjang.

Long-Term Liabilities

The Company's long-term liabilities in 2023 reached US$766.08 million, representing a 2.40% increase or US$17.96 million compared to US$748.12 million recorded in 2022. This increase was mainly due to an increase in lease liabilities and long-term bank debt.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Company's Total Long-term Liabilities can be seen in the chart below.

Liabilitas Jangka Panjang 2019-2023
Long-term Liabilities in 2019-2023

(AS$-ribu) I (US$ thousand)

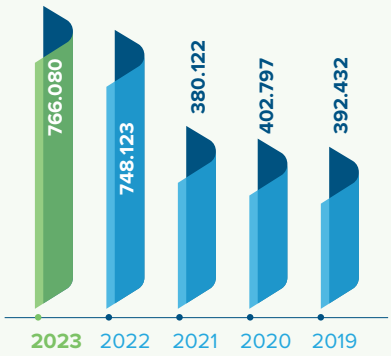

Utang Obligasi

Utang obligasi Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$155,36 juta, mengalami kenaikan 0,94% atau setara dengan AS$1,45 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$153,91 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh amortisasi beban emisi utang.

Bonds Payable

The Company's bonds payable in 2023 amounted to US$155.36 million, indicating a 0.94% increase or US$1.45 million compared to US$153.91 million recorded in 2022. This increase was a result of amortization of debt issuance costs.

Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$502,34 juta, mengalami penurunan 2,72% atau setara dengan AS$14,03 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$516,36 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran utang bank jangka panjang.

Long-term Bank Loans

The Company's long-term bank loans in 2023 reached US$502.34 million, reflecting a decrease of 2.72% or US$14.03 million compared to US$516.36 million recorded in 2022. This decrease was a result of long-term bank debt payments.

Liabilitas Sewa (Jangka Panjang)

Liabilitas sewa Perusahaan tahun 2023 sebesar AS$75,36 juta, mengalami kenaikan 48,11% atau setara dengan AS$24,48 juta dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar AS$50,88 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa kepada pihak ketiga.

Lease Liabilities (Long Term)

The Company's lease liabilities in 2023 amounted to US$75.36 million, marking a 48.11% increase or US$24.48 million compared to US$50.88 million recorded in 2022. This increase was a result of a rise in rental liabilities to third parties.

EKUITAS

EQUITY

Total Ekuitas Perusahaan tahun 2023 mencapai AS$758,93 juta, mengalami kenaikan 22,90% dibandingkan Total Ekuitas tahun 2022 sebesar AS$617,52 juta. Pada Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan atau *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) 2019-2023, Total Ekuitas Perusahaan mengalami pertumbuhan 25,35%

The Company's Total Equity in 2023 reached US$758.93 million, a 22.90% increase compared to Total Equity in 2022, which amounted to US$617.52 million. Over the period from 2019 to 2023, the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for the Company's Total Equity stood at 25.35%

Total Ekuitas 2019-2023
Total Equity in 2019-2023

(AS$-ribu) I (AS$-ribu)

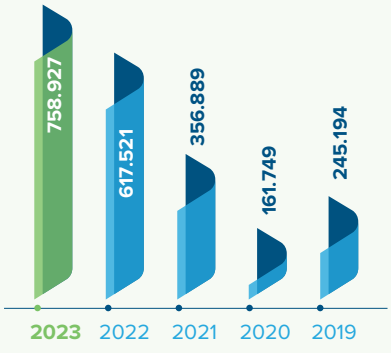

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Ekuitas **Equity**				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk **Equity Attributable to Owners of the Parent Compay**				
Modal Saham Share Capital	146.555	146.555	-	-
Tambahan Modal Disetor - Neto Additional Paid-In Capital - Net	115.087	115.087	-	-
Selisih dari Transaksi Dengan Kepentingan Non-Pengendali Differences Arising from Transactions with Non-Controlling Interest	8.330	8.330	-	-
Komponen Lainnya dari Ekuitas Other Components of the Equity	20	20	-	-
Saldo Laba **Retained Earnings**				
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	710	610	100	16,39
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	556.789	342.888	213.901	62,38
Rugi Komprehensif Lain Other Comprehensive Loss	(68.470)	(63.128)	(5.342)	(8,46)
Sub-Total	759.021	550.363	208.658	37,91
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(94)	67.159	(67.253)	(100,14)
Jumlah Ekuitas - Neto Total Equity - Net	758.927	617.521	141.406	22,90

Ekuitas Perusahaan tahun 2023 mengalami kenaikan 22,90% atau AS$141,41 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar AS$617,52 juta menjadi AS$758,93 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang menunjukkan fundamental operasional Perusahaan yang baik.

The Company's equity in 2023 experienced an increase of 22.90%, amounting to US$141.41 million compared to the previous year's equity of US$617.52 million, reaching a total of US$758.93 million. This was mainly a result of an increase in undetermined retained earnings, which demonstrated that the Company's operational fundamentals remained at good levels.

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

Di tengah kondisi perekonomian dan harga komoditas yang begitu dinamis, Perusahaan tetap dapat menjaga profitabilitasnya dengan baik, yang tercermin dari kenaikan laba tahun berjalan.

Against the backdrop of dynamic economic conditions and commodity prices, the Company has been able to maintain its profitability, as reflected in the increase in profit for the year.

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Revenue from Contracts with Customers	1.492.999	1.445.527	47.471	3,28

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(1.100.953)	(923.623)	177.330	19,20
Laba Bruto Gross Profit	392.046	521.904	(129.858)	(24,88)
Beban Penjualan, Umum, dan Administrasi Selling General and Administrative Expenses	(110.371)	(105.068)	5.303	5,05
Pendapatan Lainnya Other Income	47.754	15.283	32.471	212,47
Beban Lainnya Other Expenses	(23.802)	(36.387)	(12.586)	(34,59)
Laba Usaha Profit from Operations	305.627	395.732	(90.105)	(22,77)
Bagian atas Laba Entitas Asosiasi Share of Profit of Associates	143.997	66.588	77.409	116,25
Pendapatan Dividen Dividend Income	25.000	22.500	2.500	11,11
Pendapatan Keuangan - Neto Finance Income - Net	4.813	2.596	2.217	85,39
Biaya Keuangan Finance Charges	(106.107)	(52.481)	53.626	102,18
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	373.329	434.934	(61.605)	(14,16)
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(1.839)	(1.873)	(34)	(1,83)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	371.491	433.061	(61.571)	(14,22)
Beban Pajak Penghasilan - Neto Income Tax Expense - Net	(55.867)	(91.158)	(35.291)	(38,71)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	315.624	341.904	(26.280)	(7,69)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain **Comprehensive Income (Loss) for the Year**				
Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: **Item that will be reclassified to Profit or Loss:**				
Selisih Kurs dari Penjabaran Laporan Keuangan Exchange Difference from Financial Statements Translation	3.449	(12.579)	16.028	127,42
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan Other comprehensive income of associates - foreign exchange differences on translation of financial statements	(302)	129	(431)	(333,42)
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi: **Item that will not be reclassified to Profit or Loss:**				
Perubahan Nilai Aset Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain Changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income	(6.888)	(3.034)	3.854	127,03
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement of Defined Benefit Plan	(1.965)	975	(2.940)	(301,55)
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	432	(215)	647	301,55

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi - pengukuran kembali atas program imbalan pasti Other comprehensive loss of associates - remeasurement of defined benefit plans	(69)	(44)	25	57,39
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income (Loss) for the Year	310.282	327.137	(16.855)	(5,15)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Profit (Loss) for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company	289.001	269.910	19.091	7,07
Kepentingan Non-Pengendali Non- Controlling Interests	26.623	71.994	(45.370)	(63,02)
	315.624	341.904	(26.280)	(7,69)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: **Total Comprehensive Income (Loss) for the Year Attributable to:**				
Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent Company	283.658	255.181	28.477	11,16
Kepentingan Non-Pengendali Non- Controlling Interests	26.623	71.956	(45.332)	(63,00)
	310.282	327.137	(16.855)	(5,15)
Laba (Rugi) per Saham Dasar (dalam AS$ Penuh) Basic Earning (Loss) per Share (in full US$ amount)	0,10497	0,09804	0,00693	7,07

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Pada tahun 2023, Perusahaan membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar AS$1,49 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 3,28% atau setara dengan AS$47,47 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$1,45 miliar. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Tinjauan Operasi per Segmen Usaha, kenaikan pendapatan perusahaan didorong oleh kinerja operasional anak usaha Perusahaan terutama sektor kontraktor pertambangan.

Revenue from Contracts with Customers

In 2023, the Company booked revenue from contracts with customers amounting to US$1.49 billion, an increase of 3.28% or equivalent to US$47.47 million compared to US$1.45 billion in 2022. As explained in the Operating Review section by Business Segment, the increase in the Company's revenue was driven by the operational performance of the Company's subsidiaries, especially the mining contractor sector.

Perkembangan Jumlah Pendapatan Konsolidasian 2019-2023
Development of Total Consolidated Income in 2019-2023

(AS$-ribu) I (US$ thousand)

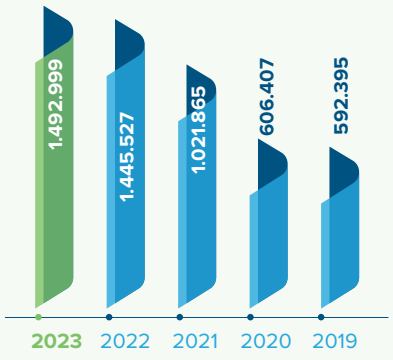

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perusahaan terdiri dari beban kontraktor tambang dan tambang batu bara, beban jasa logistik dan sewa kapal, beban jasa atas divisi Site Services dan Repabrikasi, sewa mesin pembangkit tenaga listrik, biaya pabrikasi serta beban perdagangan bahan bakar.

Pada tahun 2023, beban pokok pendapatan Perusahaan mencapai AS$1,10 miliar, mengalami kenaikan 19,20% atau setara dengan AS$177,33 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$923,62 juta.

Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Beban penjualan, umum dan administrasi Perusahaan terdiri dari beban gaji dan kesejahteraan karyawan, honorarium tenaga ahli, biaya penjualan, beban informasi dan teknologi, beban penyusutan dan amortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang non-usaha, penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha - neto, beban sewa, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan dan fasilitas, biaya telekomunikasi, serta beban lain-lain. Hingga akhir tahun 2023, beban tersebut tercatat sebesar AS$110,37 juta, mengalami kenaikan sebesar 5,05% atau setara dengan AS$5,30 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$105,07 juta.

Laba Usaha

Laba usaha Perusahaan pada tahun 2023 sebesar AS$305,63 juta, mengalami penurunan sebesar 22,77% atau setara dengan AS$90,11 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$395,73 juta.

Laba Tahun Berjalan

Dengan memperhitungkan bagian laba atas entitas asosiasi, pendapatan dividen, pendapatan keuangan-neto, biaya keuangan, beban pajak final serta beban pajak penghasilan-neto, Perusahaan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk selama tahun 2023 sebesar AS$289,00 juta, mengalami kenaikan 7,07% atau setara dengan AS$19,09 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$269,91 juta.

Cost of Revenue

The Company's cost of revenues consists of mining and coal mining contractor expenses, logistics and vessel rental services, Site Services and Fabrication division services, power plant machinery rental, manufacturing costs and fuel trading expenses.

In 2023, the Company's cost of revenue reached US$1.10 billion, reflecting a 19.20% increase or an equivalent of US$177.33 million compared to US$923.62 million recorded in 2022.

Sales, General and Administrative Expenses

The Company's sales, general and administrative expenses comprise salaries and employee benefits, honorarium of experts, selling expenses, information and technology expenses, depreciation and amortization expenses, allowance for expected credit losses on non-trade receivables, allowance for expected credit losses on trade receivables - net, rental expenses, official travel expenses, equipment and facilities expenses, telecommunication expenses, and other expenses. By the end of 2023, these expenses amounted to US$110.37 million, an increase of 5.05% or equivalent to US$5.30 million compared to US$105.07 million in 2022.

Operating Profit

The Company's operating profit in 2023 amounted to US$305.63 million, a decrease of 22.77% or equivalent to US$90.11 million compared to 2022 of US$395.73 million.

Profit for the Year

Upon computing the share of profit from associated entities, dividend income, financial income - net, financial costs, final tax expense, and income tax expense - net, the Company recorded a profit for the year 2023 of US$315.62 million, marking a decrease of 7.69% or the equivalent of US$26.28 million compared to 2022's figure of US$341.90 million.

Perkembangan Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 2019-2023
Development of Profit (Loss) for the Year in 2019-2023

(AS$-ribu) I (US$ thousand)

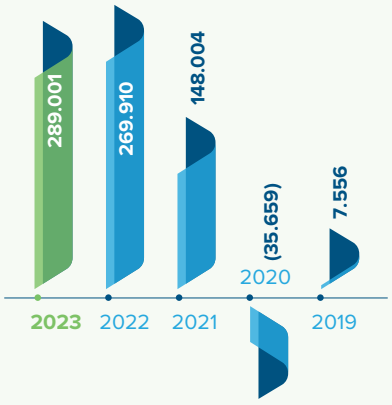

Laba (Rugi) per Saham Dasar

Laba per Saham Dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

Basic Earnings (Loss) per Share

Basic Earnings per Share is calculated by dividing the net profit attributable to the owners of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding in the relevant year. Diluted earnings per share, on the other hand, are calculated by dividing the net profit attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares adjusted for the impact of all potential dilutive ordinary shares.

Berikut disampaikan perhitungan Laba per Saham Dasar tahun 2023 dan 2022.

Below is the calculation of Basic Earnings per Share in 2023 and 2022.

Laba per Saham Dasar Basic Earnings per Share	**2023 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**2022 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	**Persentase** Percentage **(%)**
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perusahaan (AS$-ribu) Profit for the Year Attributable to Owners of the Company (US$-thousand)	289.001	269.910	19.091	7,07
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar (lembar)' Weighted Average Shares Outstanding (shares)	2.753.165.000	2.753.165.000	-	-
Laba per Saham Dasar (AS$ nilai penuh) Basic Earnings per Share (US$ full amount)	0,10497	0,09804	0,00693	7,07

Laba per Saham Dasar tahun 2023 sebesar AS$0,10497 per lembar saham, mengalami kenaikan 7,07% atau setara dengan AS$0,00693 per lembar saham dibandingkan Laba per Saham Dasar tahun 2022 sebesar AS$0,09804 per lembar saham.

In 2023, Basic Earnings per Share amounted to US$0.10497 per share, marking an increase of 7.07% or the equivalent of US$0.00693 per share compared to Basic Earnings per Share in 2022, which was US$0.09804 per share.

Perkembangan Laba (Rugi) per Saham Dasar 2019-2023
Development of Basic Earning (Loss) per Share in 2019-2023

(AS$/lembar saham) I (US$ per share)

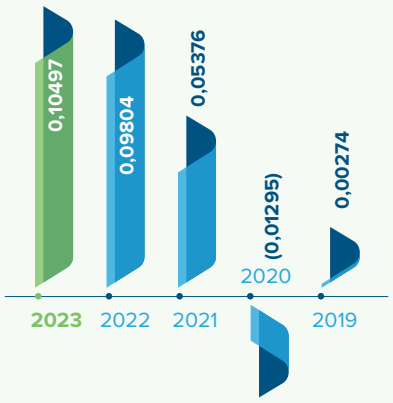

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Penurunan saldo kas dan setara kas Perusahaan terutama disebabkan oleh komitmen Perusahaan untuk melunasi sejumlah pinjaman bank

The decrease in the Company's cash and cash equivalent balance primarily stemmed from its commitment to repay several bank loans

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	**2022 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	**Persentase** Percentage **(%)**
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	387.302	421.690	(34.388)	(8,15)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(268.709)	(798.069)	529.360	66,33
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(153.254)	368.329	(521.584)	(141,61)

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Penurunan Neto Kas dan Setara Kas Net Decrease In Cash and Cash Equivalents	(34.661)	(8.049)	(26.612)	(330,62)
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas Net Effect of Changes in Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents	1.672	(7.605)	9.277	121,99
Kas dan Bank Awal Tahun Cash and Bank at Beginning of Year	221.566	237.220	(15.654)	(6,60)
Kas dan Bank Akhir Tahun Cash and Bank at End of Year	188.577	221.566	(32.989)	(14,89)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2022-2023
Cash Flows from Operating Activities in 2022-2023

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	1.405.439	1.341.413	64.026	4,77
Pembayaran kepada Pemasok dan Lainnya Payments to Suppliers and Others	(717.665)	(676.498)	(41.167)	(6,09)
Pembayaran kepada Karyawan Payments to Employees	(190.650)	(150.575)	(40.075)	(26,61)
Kas diperoleh dari Operasi Cash Generated from Operations	497.124	514.341	(17.217)	(3,35)
Tagihan Pajak Tax Refund	8.714	21.654	(12.940)	(59,76)
Pendapatan Bunga Interest Income	4.813	2.596	2.217	85,39
Pembayaran atas Pajak Penghasilan Payments for Income Taxes	(123.349)	(116.901)	(6.448)	(5,52)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	387.302	421.690	(34.388)	(8,15)

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,15% atau setara dengan AS$34,39 juta, dari sebelumnya sebesar AS$421,69 juta menjadi AS$387,30 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga batu bara, perlambatan periode rata-rata penagihan piutang serta peningkatan pembayaran biaya operasi, terutama disebabkan oleh kenaikan *Stripping Ratio* pada konsesi tambang batu bara.

Net cash provided by operating activities in 2023 decreased by 8.15% or equivalent to US$34.39 million, from US$421.69 million to US$387.30 million. This was due to a decrease in coal prices, longer average collection period of receivables and an increase in operating cost payments, mainly due to an increase in the stripping ratio of coal mining concessions.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi Dividend Received from Associates	124.500	30.000	94.500	315,00
Penerimaan Dividen dari Investasi pada Saham Dividend Received from Investment in Shares	20.000	22.500	(2.500)	(11,11)
Penerimaan Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sale of Fixed Assets	17.243	2.024	15.219	751,82

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Penerimaan Penjualan Aset Tetap dari Piutang Proceeds from Sale of Fixed Assets through Receivables	-	33	(33)	(100,00)
Penurunan (Kenaikan) Aset Keuangan Lancar Lainnya Decrease (Increase) in Other Current Financial Assets	28.554	(99.290)	127.843	128,76
Perolehan Aset Tetap Acquisitions of Fixed Assets	(333.462)	(237.244)	(96.218)	(40,56)
Perolehan Aset Pertambangan Acquisition of Mining Properties	(16.438)	(19.305)	2.867	14,85
Pembayaran Utang atas Perolehan Aset Takberwujud Payment of Payables related to the Acquisition of Intangible Assets	(1.364)	(2.203)	839	38,07
Kenaikan Aset Tidak Lancar Lainnya Increase in Other Non-Current Assets	(1.695)	(26.623)	24.928	93,63
Pembayaran Utang atas Perolehan Aset Tetap Payment of Payables on Acquisition of Fixed Assets	(80.648)	(19.659)	(60.989)	(310,23)
Perolehan Aset Tak Berwujud Acquisitions of Intangible Assets	(1.097)	(2.743)	1.646	60,02
Penambahan Uang Muka Pembelian Aset Tetap Addition to Advances for Purchase of Fixed Assets	(1.767)	(1.306)	(460)	(35,22)
Perolehan Investasi Entitas Asosiasi Acquisitions of Investment in Associates	-	(444.251)	444.251	100,00
Penerimaan penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual Proceeds from Sale of non-current assets held for sale	5.250	-	5.250	-
Kas dan setara kas yang dilepaskan dari dekonsolidasi entitas anak Cash and cash equivalents released from deconsolidation of subsidiaries	(27.784)	-	(27.784)	-
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(268.709)	(798.069)	529.360	66,33

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 66,33% atau setara dengan AS$529,36 juta, dari sebelumnya sebesar AS$798,07 juta menjadi AS$268,71 juta. Penurunan penggunaan kas untuk aktivitas investasi ini disebabkan adanya aksi korporasi berupa akuisisi 30% saham GEMS pada tahun 2022.

Net cash used in investing activities in 2023 decreased by 66.33% or equivalent to US$529.36 million, from US$798.07 million to US$268.71 million. The decrease in the use of cash for investing activities was due to the corporate action in the form of the acquisition of 30% of GEMS shares in 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2022-2023
Cash Flows from Financing Activities in 2022-2023

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Perolehan dari: **Proceeds from:**				
Utang Bank Jangka Pendek Short-term bank loans	258.143	168.770	89.373	52,96
Utang Bank Jangka Panjang Long-term bank loans	260.807	535.186	(274.379)	(51,27)

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Pembayaran untuk: **Payments of:**				
Utang Bank Jangka Pendek Short-term bank loans	(242.292)	(113.087)	(129.206)	(114,25)
Utang Bank Jangka Panjang Long-term bank loans	(175.518)	(23.600)	(151.918)	(643,72)
Utang Obligasi Bonds payable	-	(40.000)	40.000	100,00
Bunga Interest	(102.385)	(56.452)	(45.933)	(81,37)
Liabilitas Sewa Lease liabilities	(54.909)	(35.983)	(18.926)	(52,60)
Dividen Dividend	(97.100)	(66.505)	(30.595)	(46,00)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities	(153.254)	368.329	(521.584)	(141,61)

Pada tahun 2023, Perusahaan menggunakan kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar AS$153,25 juta. Hal ini menyebabkan kas bersih pada aktivitas pendanaan Perusahaan mengalami penurunan sebesar 141,61% atau setara dengan AS$521,58 juta dibandingkan tahun 2022, di mana Perusahaan memperoleh kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar AS$368,33 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kewajiban Perusahaan.

In 2023, the Company utilized net cash for financing activities amounting to US$153.25 million. This led to a decrease in net cash from the company's financing activities by 141.61% or the equivalent of US$521.58 million compared to 2022, when the company obtained net cash from financing activities totaling US$368.33 million. This was mainly due to the increase in payment of the Company's liabilities.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Dengan perhitungan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, Perusahaan mencatat penurunan kas dan setara kas sebesar 14,89% atau setara dengan AS$32,99 juta menjadi AS$188,58 juta pada akhir tahun 2023 dibandingkan dengan posisi kas pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar AS$221,57 juta.

End of Year Cash and Cash Equivalents

After computing cash flow from operating activities, investment activities, and financing activities, the Company recorded a decrease in cash and cash equivalents by 14.89% or equivalent to US$32.99 million to US$188.58 million at the end of 2023 compared to the cash position at the end of 2022 which amounted to US$221.57 million.

Perkembangan Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2019-2023
Development of Cash and Cash Equivalents as of the End of 2019-2023

(AS$-ribu) I (US$ thousand)

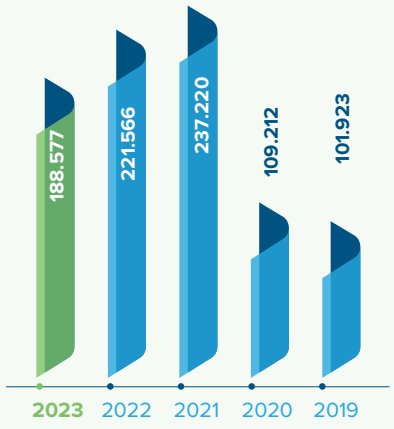

KEMAMPUAN PROFITABILITAS/ MENGHASILKAN KEUNTUNGAN

Profitability/Profit Generating Ability

Perusahaan menggunakan beberapa rasio untuk dapat memberikan gambaran tentang profitabilitas atau kemampuan dalam menghasilkan keuntungan.

The Company utilizes several ratios to offer an overview of profitability or the ability to generate profits.

Rasio Profitabilitas Profitability Ration	**2023**	**2022**	**Selisih** Deviation
Laba Bersih terhadap Jumlah Aset (%) Net Profit to Total Assets (%)	13,96	17,88	(3,92)
Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) Net Profit to Equity (%)	38,08	43,71	(5,63)
Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) Net Profit to Revenue (%)	19,36	18,67	0,69

Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset dan Ekuitas mengalami penurunan di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan strategi Perusahaan untuk melakukan belanja modal atas mesin dan peralatan untuk pengembangan bisnis kontrak pertambangan. *Return* atas investasi ini baru akan mulai dirasakan di tahun-tahun mendatang.

The ratio of Net Profit to Total Assets and Equity decreased in 2023. This is consistent with the Company's strategy to make capital expenditures on machinery and equipment for the development of the contract mining business. The return on this investment will only begin to materialize in the coming years.

Rasio laba bersih terhadap pendapatan tetap mengalami peningkatan di tahun 2023 terlepas dari penurunan harga batu bara serta penurunan volume penjualan batu bara. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan laba bersih bisnis kontrak pertambangan dan investasi Perusahaan yang tergambar pada bagian atas laba entitas asosiasi yang berhasil mendorong kenaikan laba bersih Perusahaan.

The ratio of net profit to revenue continued to increase in 2023 despite the decline in coal prices and lower coal sales volume. This was a result of the increase in net profit of the Company's contract mining and investment business as reflected in the share of profit of associates which successfully drove the increase in the Company's net profit.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Ability to Pay Debts

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang diukur menggunakan rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perusahaan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang jangka pendek.

The Company's ability to pay debts is assessed using two key ratios: the solvency ratio and liquidity ratio. The solvency ratio evaluates the company's capacity to settle all its debts, encompassing both short and long-term obligations. On the other hand, the liquidity ratio gauges the company's ability to meet short-term debt.

RASIO LIKUIDITAS: KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK

Kemampuan membayar utang jangka pendek Perusahaan dicerminkan dengan rasio likuiditas di mana tingkat likuiditas dapat dilihat dari rasio lancar dan rasio kas, sebagaimana terlihat di bawah ini:

LIQUIDITY RATIO: ABILITY TO PAY SHORT-TERM DEBTS

The Company's capacity to fulfill short-term debt obligations is evaluated through the liquidity ratio, which considers the level of liquidity via metrics such as the current ratio and cash ratio, detailed below:

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	**2022 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	**Persentase** Percentage **(%)**
Rasio Lancar (kali) Current Ratio (Times)	0,99	1,15	(0,16)	(13,94)
Rasio Cepat (kali) Quick Ratio (Times)	0,90	1,06	(0,15)	(14,57)

Rasio lancar dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek yang masing-masing nilainya di tahun 2023 adalah sebesar AS$622,72 juta dan AS$631,68 juta. Rasio Lancar Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar 0,99 kali, turun 13,94% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,15 kali. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek yang diikuti oleh penurunan aset lancar.

Current ratio is calculated by dividing current assets by current liabilities which amounted to US$622.72 million and US$631.68 million in 2023, respectively. The Company's Current Ratio in 2023 was recorded at 0.99 times, a decrease of 13.94% compared to the previous year of 1.15 times. This was attributed to an increase in current liabilities followed by a decrease in current assets.

Sementara itu, rasio cepat mengalami penurunan sebesar 14,57% menjadi 0,90 kali dari sebelumnya sebesar 1,06 kali. Rasio cepat dihitung dengan membagi selisih antara total aset lancar dan persediaan dengan liabilitas jangka pendek.

Meanwhile, the quick ratio decreased by 14.57% to 0.90 times from the previous 1.06 times. The quick ratio is calculated by dividing the difference between total current assets and inventories with current liabilities.

RASIO SOLVABILITAS: KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

SOLVENCY RATIO: ABILITY TO PAY SHORT-TERM AND LONG-TERM DEBT

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya terlihat dari rasio solvabilitas yang terdiri dari beberapa rasio sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

The Company's ability to meet all its obligations is reflected in the solvency ratio, comprising the Debt to Equity Ratio (DER) and the Debt to Asset Ratio (DAR), as detailed below:

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Utang Berbunga Neto terhadap Ekuitas (kali) Net Interest-Bearing Debt to Equity (Times)	1,11	1,00	0,11	11,42
Utang Berbunga Neto terhadap EBITDA (kali) Net Interest-Bearing Debt to EBITDA (Times)	1,73	1,09	0,64	58,93
Liabilitas terhadap Ekuitas (kali) Liabilities to Equity (times)	1,37	1,52	(0,15)	(9,84)
Liabilitas terhadap Aset (kali) Liabilities to Assets (times)	0,48	0,47	0,01	1,86

Sebagian besar rasio solvabilitas Perusahaan selama tahun 2023 mengalami kenaikan, kecuali untuk rasio liabilitas terhadap ekuitas yang mengalami penurunan sebesar 9,84%. Adapun rasio utang berbunga neto terhadap ekuitas naik 11,42% menjadi 1,11 kali dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,00 kali. Sementara itu, rasio utang berbunga neto terhadap EBITDA tercatat sebesar 1,73 kali, naik 58,93% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,09 kali.

Most of the Company's solvency ratios during 2023 increased, except for the ratio of liabilities to equity which decreased by 9.84%. The ratio of net interest-bearing debt to equity increased by 11.42% to 1.11 times compared to the previous year of 1.00 times. Meanwhile, the ratio of net interest-bearing debt to EBITDA was recorded at 1.73 times, up 58.93% compared to the previous year of 1.09 times.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Collectability of Receivables

Perusahaan menghitung periode rata-rata penagihan piutang dengan membagi piutang usaha - neto dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan konsolidasian, kemudian mengalikan hasilnya dengan 365 hari (jumlah hari dalam setahun). Pada tahun 2023, periode rata-rata penagihan piutang Perusahaan selama 77 hari, lebih lambat 12 hari dibandingkan tahun 2022, yaitu selama 65 hari.

Sementara itu, rasio perputaran piutang usaha dihitung dengan membagi pendapatan dari kontrak dengan pelanggan konsolidasian dengan rata-rata piutang usaha - neto. Rasio perputaran piutang usaha Perusahaan selama 5,25 kali, lebih lambat 1,79 kali dibandingkan tahun 2022 selama 7,03 kali.

The Company calculates the average receivable collection period by dividing accounts receivable - net by revenue from contracts with consolidated customers, then multiplying the result by 365 days (the number of days in a year). In 2023, the average period for collecting the Company's receivables reached 77 days, slower 12 days than 2022, which was 65 days.

Meanwhile, the trade receivables turnover ratio is computed by dividing revenue from contracts with consolidated customers by the average trade receivables - net. The Company's trade receivable turnover ratio for 5,25 times, was slower 1.79 times than 2022, which was 7.03 times.



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Capital Structure and Management Policy

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN

Manajemen Perusahaan memiliki kebijakan yang secara teliti dan menitikberatkan pada pengelolaan ketidakstabilan industri dan pasar (*managing volatility*), serta perbaikan struktur permodalan Perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Mencari keseimbangan yang optimum antara tingkat utang dan kinerja Perusahaan;
2. Meningkatkan ekuitas; dan
3. Memaksimalkan aset-aset agar tetap dan terus bekerja yang akan berdampak positif pada neraca keuangan.

Tujuan utama dari pengelolaan modal grup adalah untuk memastikan agar Perusahaan mampu mempertahankan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimumkan nilai pemangku kepentingan. Modal grup terdiri dari modal saham dan saldo laba. Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian pada perubahan kondisi ekonomi dan memenuhi persyaratan dari pihak pinjaman. Grup ABM mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*) dengan membagi utang neto dengan total ekuitas.

Selain itu, kebijakan grup adalah menjaga rasio pengungkit pada tingkat yang sehat sehingga dapat memperoleh pendanaan yang dapat dimaksimalkan. Grup menyertakan pinjaman neto, utang bank jangka pendek, liabilitas sewa dan utang obligasi dikurangi kas dan setara kas sebagai definisi utang. Sementara yang termasuk dalam modal adalah modal saham dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.

Manajemen secara berkala melakukan kajian atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari kajian tersebut, Manajemen mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Rincian struktur permodalan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

MANAGEMENT POLICY ON COMPANY CAPITAL STRUCTURE

The Company's management implements a comprehensive policy aimed at effectively managing industrial and market volatility while enhancing the Company's capital structure to ensure resilience and growth in its business endeavors. This strategy involves:

1. Seeking an optimal balance between debt levels and company performance;
2. Increasing equity; and
3. Maximizing asset utilization to maintain ongoing functionality, thereby positively impacting financial equilibrium.

The primary goal of group capital management is to maintain a robust capital ratio to support business operations and enhance stakeholder value. Group capital comprises share capital and retained earnings. The Group actively manages its capital structure, adjusting to evolving economic conditions and meeting the requirements of lenders. The ABM Group assesses capital through a gearing ratio, calculated by dividing net debt by total equity.

Furthermore, the group's policy emphasizes maintaining the leverage ratio at a healthy level to maximize funding opportunities. Debt includes net loans, short-term bank loans, lease liabilities, and bonds payable minus cash and cash equivalents, while capital encompasses share capital and equity attributable to the Parent Entity's owners.

The Management conducts regular reviews of the Company's capital structure, considering both the cost of capital and associated risks. Details of the capital structure as of December 31, 2023, and 2022 are provided below:

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	**2022 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	**Persentase** Percentage **(%)**
Modal dari Utang Berbasis Bunga: **Capital from Interest-Based Debt:**				
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	69.420	60.044	9.376	15,61
Utang Obligasi Bond Payable	155.359	153.914	1.445	0,94
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans	689.274	636.782	52.492	8,24
Liabilitas sewa Lease Liabilities	126.124	88.002	38.122	43,32

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	2022 (AS$-ribu) (US$ thousand)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Modal dari Utang Berbasis Bunga – bersih Total Capital from Interest-Based Debt - net	1.040.176	938.742	101.434	10,81
Dikurangi: Kas dan Setara Kas Less: Cash and Cash Equivalents	(194.251)	(320.957)	(126.705)	(39,48)
Utang Neto Net Debts	845.925	617.785	228.140	36,93
Ekuitas Neto Net Equity	758.927	617.521	141.406	22,90
Jumlah Struktur Modal Total Capital Structure	1.604.852	1.235.307	369.545	29.92
Rasio Pengungkit (kali) Gearing Ratio (Times)	1,11	1,00	0,11	11,42
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas (kali) Debt to Equity Ratio (Times)	1,37	1,52	(0,15)	(9,84)

Komposisi Struktur Modal 2022-2023
Composition of Capital Structure in 2022-2023

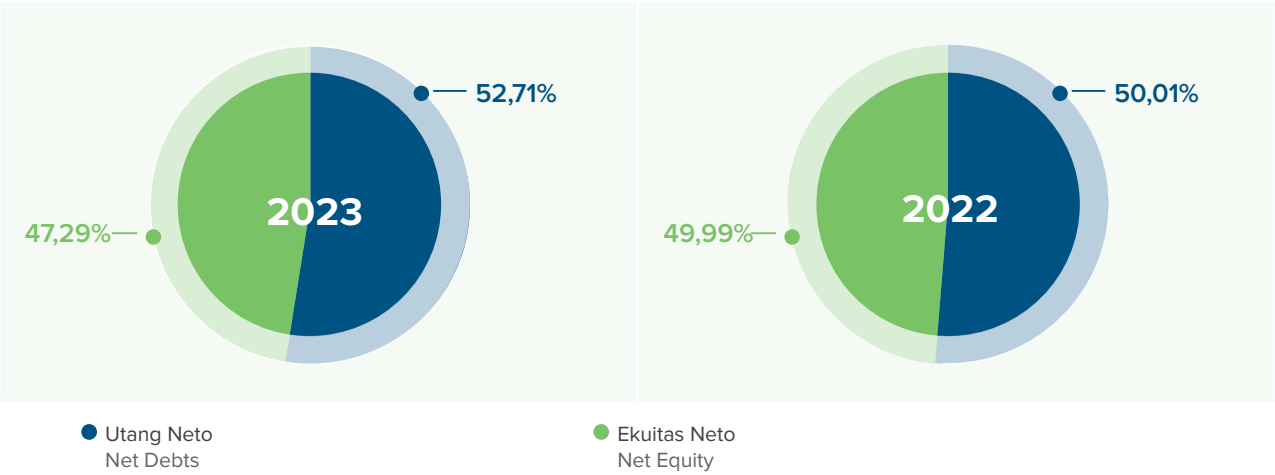

Komposisi struktur modal Perusahaan di tahun 2023 tidak berubah banyak dibandingkan dengan tahun 2022, dimana porsi utang neto dan ekuitas memiliki porsi yang masih cukup seimbang. Peningkatan utang sejalan dengan strategi Perusahaan untuk mengembangkan bisnis kontrak pertambangan. Namun peningkatan ekuitas memang belum sebesar peningkatan utang karena bisnis kontrak pertambangan masih pada fase *ramp-up* selama dua tahun terakhir ini. *Return* atas investasi diharapkan mulai dapat dirasakan maksimal pada tahun 2024 ke depan.

The composition of the Company's capital structure in 2023 did not change much compared to 2022, where the proportion of net debt and equity is still quite balanced. The increase in debt is in line with the Company's strategy to develop the contract mining business. However, the increase in equity has not been as substantial as the increase in debt because the contract mining business is still in the ramp-up phase for the past two years. Return on investment is expected to be maximized in 2024 onwards.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitments for the Capital Goods Investment

Sepanjang Tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

Throughout 2023, the Company has no material commitment for capital goods investment.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Realization of Capital Goods Investment

Realisasi investasi barang modal dimiliki dari penambahan aset tetap Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, realisasi investasi barang modal diungkapkan pada tabel berikut:

The realization of investment in capital goods is owned from the addition of the Company's fixed assets. Throughout 2023, the realization of investment in capital goods is disclosed in the following table:

Investasi Barang Modal Capital Good Investment	**Tujuan Investasi** Investment Objectives	**Nilai** (AS$-ribu) Value (AS$-thousand)
Kepemilikan Langsung **Direct Ownership**		
Tanah Land	Pendukung Operasional Operational Support	2.944
Jalan dan Infrastruktur Road and Infrastructure	Pendukung Operasional Operational Support	1.016
Bangunan dan Prasarana Building and Facilities	Pendukung Operasional Operational Support	954
Perlengkapan, Perabotan dan Peralatan Kantor Office Supplies, Furniture and Equipment	Pendukung Operasional Operational Support	2.783
Kendaraan Vehicles	Pendukung Operasional Operational Support	4.614
Kapal Ships	Perbaikan dan Pemeliharaan Repair and Maintenance	274
Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment	Perbaikan dan Pemeliharaan Repair and Maintenance	20.958
Subtotal **Subtotal**		**33.544**
Aset dalam Penyelesaian Assets under Construction	Perbaikan dan Pemeliharaan Repair and Maintenance	377.605
Jumlah **Total**		**411.149**

Jumlah investasi barang modal tahun 2023 sebesar AS$411,15 juta, mengalami kenaikan 29,07% atau setara dengan AS$92,6 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar AS$318,54 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh strategi Perusahaan dalam mengembangkan bisnis kontrak pertambangan yang padat modal. Dampak dari investasi pada mesin dan perlatan tersebut dapat terlihat dari adanya pergeseran sumber Pendapatan Perusahaan dan peningkatan volume operasional dari sektor Kontrak Pertambangan.

Total investment in capital goods in 2023 was recorded at US$411.15 million an increase of 29.07% or the equivalent of US$92.6 mollion compared to US$318.54 million recorded in 2022. This increase was mainly due to the Company's strategy in developing the capital-intensive contract mining business. The impact of the investment in machinery and equipment is evident from the shift in the Company's revenue sources and the increase in operating volume from the Contract Mining sector.

	2023 (AS$-ribu) (US$ thousand)	**2022 (AS$-ribu)** (US$ thousand)	**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
			Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand)	**Persentase** Percentage **(%)**
Realisasi Investasi Barang Modal	411.149	318.536	92.613	29,07

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts Post Accounting Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi pada periode sejak tanggal laporan akuntan tertanggal 27 Maret 2024 hingga ditandatanganinya Laporan Tahunan ini tertanggal 22 April 2024.

There is no material information and facts that occurred in the period from the date of the accountant's report dated March 27, 2024 until the signing of this Annual Report dated April 22, 2024.

PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2023

Target Accomplishments in 2023

Pencapaian Target Tahun 2023
Target Accomplishments in 2023

Perihal	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian Target Tahun 2023 (%)
Kinerja Operasional **Operational Performance**			
Pertambangan Batu Bara **Coal Mining**			
Volume Produksi (juta ton) Production Volume (million tons)	11,54	13,24	87,13
Volume Penjualan (juta ton) Sales Volume (million tons)	11,30	13,01	86,83
Kontrak Pertambangan **Mining Contract**			
Pengupasan dan Pemindahan (juta bcm) Stripping and Overburden Removal (million bcm)	276,56	260,17	106,30
Penyewaan Alat untuk Pengambilan Batu Bara (juta ton) Rental Equipment for Coal Extraction (million tons)	34,07	15,31	222,46
Kinerja Keuangan (AS$ ribu) **Financial Performance (US$ thousand)**			
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Revenues from Contracts with Customers	1.492.999	1361.910	109,63
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	289.001	81.969	352,57
Struktur Modal **Capital Structure**			
Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas (kali) Liabilities to Equity Ratio (Times)	1,37	1,49	92,25

Kinerja Operasional

Pencapaian volume produksi dan volume penjualan batu bara sedikit berada di bawah target terutama dikontribusi oleh MIFA dan BEL. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan cuaca yang cukup signifikan, baik di darat maupun di laut, sehingga jumlah hari operasi menjadi lebih sedikit daripada target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, realisasi operasional dari sektor kontrak pertambangan mencapai rekor tertinggi yang pernah dicapai oleh Perusahaan, khususnya untuk volume pengupasan dan pemindahan lapisan penutup. Hal ini merupakan dampak dari strategi Perusahaan untuk melakukan Belanja Modal dalam meningkatkan kapasitas produksi CK selama dua tahun terakhir.

Penjualan dan Laba Bersih

Realisasi kinerja keuangan mencapai hasil yang sangat baik di tahun 2023. Selain dampak dari harga batu bara yang bertahan pada level yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan target, hal ini juga dipengaruhi oleh kinerja operasional yang baik serta struktur biaya yang cukup efisien selama tahun 2023.

Struktur Modal

Perusahaan berhasil mencapai struktur modal yang membaik di tahun 2023 yang tergambar melalui rasio kewajiban terhadap ekuitas. Hal ini terjadi karena Perusahaan berhasil menurunkan hutang dan meningkatkan laba selama tahun 2023 dibandingkan dengan targetnya

Operational Performance

Coal production and sales volumes were slightly below target mainly contributed by MIFA and BEL. This was due to significant weather disruptions, both on land and at sea, resulting in fewer operating days than the set targets.

Meanwhile, operational realization from the contract mining sector reached the highest record ever achieved by the Company, particularly for overburden stripping and removal volume. This is a result of the Company's strategy to make capital expenditures to increase CK's production capacity over the past two years.

Sales and Net Profit

Financial performance realization achieved excellent results in 2023. In addition to the impact of coal prices that remained at a fairly high level compared to target, this was also influenced by favorable operational performance and a fairly efficient cost structure during 2023.

Capital Structure

The Company managed to achieve an improved capital structure in 2023 as reflected by the ratio of liabilities to equity. This resulted from the Company's success in reducing debt and increasing profits during 2023 compared to its target.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

Business Prospects and Company Performance Projections for 2024

PROSPEK USAHA TAHUN 2024

Perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai ketidakpastian global di tahun 2024, mulai dari risiko perlambatan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat, ketegangan geopolitik Ukraina - Rusia dan konflik Timur Tengah yang dapat menyebabkan meningkatnya harga minyak dunia, volatilitas harga komoditas, inflasi global, kenaikan suku bunga serta ancaman perubahan iklim. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan International Monetary Fund (IMF) pada bulan April 2024, pemulihan ekonomi global akan berlangsung stabil namun lambat dan berbeda-beda di setiap wilayah. Kondisi global tersebut tentu dapat memberikan dampak yang signifikan apabila langkah antisipatif tidak disiapkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan masih akan tetap stabil selama tahun 2024 di kisaran 5%. Hal ini juga diproyeksikan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti World Bank (4,9%), ADB dan IMF (5%) serta OECD (5,2%). Pemerintah indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah seiring dengan pelaksanaan pemilihan umum. Namun beberapa tantangan perlu diwaspadai selama tahun 2024 ini, diantaranya adalah tingkat inflasi yang mungkin meningkat serta melemahnya nilai tukar Rupiah. Pemerintah Indonesia sendiri optimis bahwa tingkat inflasi Indonesia masih akan terus terkendali selama tahun 2024, yaitu berada di bawah 2,80%.

Kebutuhan batu bara sebagai sumber energi masih cukup dominan baik itu di Indonesia maupun dunia. Setelah peningkatan produksi batu bara Indonesia di tahun 2023 yang merupakan level tertinggi selama 9 tahun terakhir, bisnis batu bara di tahun 2024 diprediksi masih meningkat. Hal ini sejalan dengan target produksi batu bara tahun 2024 sebesar 922 juta ton yang lebih tinggi dari realisasi produksi tahun 2023. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi produksi batu bara tahun 2023 mencapai 751 juta ton atau 108,23% dari target sebesar 695 juta ton. Namun di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan, diantaranya adalah biaya operasional yang meningkat, kewajiban penempatan Dana Hasil Ekspor (DHE) dan skema pungutan Dana Kompensasi Batubara (DKB). Oleh karena itu, para pelaku usaha harus

BUSINESS OUTLOOK IN 2024

The global economy is poised to grapple with a multitude of uncertainties throughout 2024. These include the potential for economic slowdowns in both China and the United States, geopolitical tensions such as those between Ukraine and Russia, as well as conflicts in the Middle East, all of which may drive up world oil prices. Additionally, factors like commodity price fluctuations, global inflation, escalating interest rates, and the looming threat of climate change further compound these uncertainties. According to the World Economic Outlook (WEO) report released by the International Monetary Fund (IMF) in April 2024, while global economic recovery is expected to progress steadily, its pace will vary across different regions. These prevailing global conditions underscore the imperative need for proactive measures to mitigate their potential impact.

Indonesia's economy is forecasted to maintain stability throughout 2024, with growth hovering around 5%. This projection is in line with estimations from various international institutions, such as the World Bank (4.9%), the Asian Development Bank (ADB), the International Monetary Fund (IMF), and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), all indicating a growth rate of around 5%. Meanwhile, the Indonesian government has set a target of 5.2% economic growth for the year. The growth of Indonesia's economy primarily hinges on the upsurge in household consumption and government expenditure, particularly due to the momentum of general elections. Nonetheless, several challenges are on the horizon for 2024, including the potential for an uptick in inflation and a depreciation of the Rupiah exchange rate. Despite these challenges, the Indonesian government remains sanguine about maintaining control over the country's inflation rate, aiming to keep it below 2.80% throughout 2024.

The demand for coal as an energy source remains strong both in Indonesia and globally. Following a notable increase in Indonesia's coal production in 2023, reaching its highest level in nine years, the coal industry is projected to continue its growth in 2024. This aligns with the set target of 922 million tons for coal production in 2024, surpassing the previous year's output. According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources' Minerba One Data Indonesia (MODI), coal production in 2023 exceeded expectations, reaching 751 million tons, which is 108.23% of the targeted 695 million tons. However, businesses in this sector are encountering several challenges, such as rising operational costs and regulatory requirements like the Export Proceeds Fund (DHE) and the Coal Compensation Fund (CCF) levy. Consequently, businesses are urged to enhance their productivity and adaptability to overcome

berusaha meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan usaha ini. Sejalan dengan tren transisi energi, para pelaku usaha pertambangan batu bara juga sudah mulai mengarah kepada diversifikasi usaha. Sebagian besar mulai mengeksplorasi potensi investasi pada nikel, *hydro power*, aluminimum serta kendaraan listrik.

Sumber:
Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024, tanggal 22 Februari 2024, oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
World Economic Outlook, Steady but Slow: Resilience Amid Divergence, April 2024, oleh International Monetary Fund (IMF)
Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pemerintah Optimis Indonesia Tumbuh Solid di 2024
dan Lebih Baik Lagi di 2025, 29 Februari 2024
https://industri.kontan.co.id/news/kebutuhan-batubara-diramal-masih-naik-di-2024

these obstacles. Concurrently, in response to the global shift towards cleaner energy sources, many coal mining enterprises are diversifying their portfolios. They are exploring investments in alternative sectors like nickel, hydro power, aluminum, and electric vehicles.

Source:
Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024, tanggal 22 Februari 2024, oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
World Economic Outlook, Steady but Slow: Resilience Amid Divergence, April 2024, oleh International Monetary Fund (IMF)
Siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Pemerintah Optimis Indonesia Tumbuh Solid di 2024
dan Lebih Baik Lagi di 2025, 29 Februari 2024
https://industri.kontan.co.id/news/kebutuhan-batubara-diramal-masih-naik-di-2024

RENCANA STRATEGIS DAN PROYEKSI KINERJA PERUSAHAAN TAHUN 2024

Strategi Bisnis Tahun 2024

Di tahun 2024 ini, Perusahaan memasuki fase baru yaitu fase ke-3 dalam *milestone* rencana strategis 5 tahunan Perusahan yaitu fase *growth story*. Dalam fase ini Perusahaan akan mengoptimalkan realisasi pertumbuhan usaha untuk dapat mencapai tujuan strategis Perusahaan dalam rangka mewujudkan nilai tambah yang optimal bagi para pemangku kepentingan Perusahaan. Rencana pengembangan usaha Perusahaan tahun 2024 ini akan berfokus pada:

1. Menjalankan program penguatan dan optimalisasi transaksi sinergi lintas entitas dalam Grup TMT sebagai salah satu inisiatif utama dalam mencapai target pertumbuhan bisnis Perusahaan
   - Perusahaan terus menggalakkan kolaborasi operasional lintas entitas;
   - Perusahaan akan mendorong pencapaian *cross selling* antar entitas.
2. Memperkuat implementasi dari model bisnis yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan produktifitas dan profitabilitas operasional, baik untuk bisnis terkait rantai nilai pertambangan (di bawah Direktorat MVC) dan juga bisnis terkait logistik, layanan rekayasa dan energi terbarukan (di bawah Direktorat LENB).
   - Perusahaan akan terus memperkuat sinergi di MVC dengan terus berupaya memperkuat operasional tambang batu bara, mencari sumber daya baru, talenta yang mumpuni dan penerapan teknologi pertambangan yang sesuai;
   - Perusahaan tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan secara organik untuk bisnis logistik, layanan rekayasa dan energi terbarukan (LENB). Perusahaan juga tengah mencari sumber pendapatan baru yang dapat melengkapi bisnis inti perusahaan sebagai bagian dari rencana jangka panjang Perusahaan untuk diversifikasi usaha.
3. Menerapkan inisatif-inisiatif terkait ESG dan penguatan kesiapan organisasi dengan menjalankan kegiatan operasional yang berkelanjutan dan bertanggungjawab, untuk dapat mencapai target kinerja keuangan dan operasional yang telah dicanangkan;
4. Mempercepat penerapan teknologi berbasis otomatisasi dan analitik baik untuk bisnis di bawah MVC maupun LENB, sehingga Perusahaan dapat mengoptimalkan produktivitas operasional serta meningkatkan layanan kepada pelanggan.

STRATEGIC PLAN AND PROJECTED COMPANY PERFORMANCE IN 2024

Business Strategy in 2024

In 2024, the Company entered a new phase, namely the 3rd phase in the milestone of the Company's 5-year strategic plan, namely the growth story phase. In this phase, the Company will optimize the realization of business growth to achieve the Company's strategic objectives in order to realize optimal added value for the Company's stakeholders. The Company's business development plan for 2024 will focus on:

1. Implementing a program to strengthen and optimize cross-entity synergy transactions within the TMT Group as one of the key initiatives in achieving the Company's business growth targets.
   - The Company continues to promote cross-entity operational collaboration;
   - The Company will encourage the achievement of cross selling between entities.
2. Strengthen the implementation of a sustainable business model by driving increased operational productivity and profitability, both for mining value chain related businesses (under the MVC Directorate) as well as logistics, engineering services and renewable energy related businesses (under the LENB Directorate).
   - The Company will continue to strengthen synergies in MVC by continuing to strengthen coal mining operations, seeking new resources, qualified talents and the application of appropriate mining technology;
   - The Company continues to seek organic growth for its logistics, engineering services and renewable energy (LENB) businesses. The Company is also looking for new sources of revenue that can complement its core business as part of the Company's long-term plan for business diversification.
3. Implement ESG-related initiatives and strengthen organizational readiness by conducting sustainable and responsible operations, in order to achieve the set financial and operational performance targets;
4. Accelerate the implementation of automation and analytics-based technologies for both businesses under MVC and LENB, allowing the Company to optimize operational productivity and improve customer service.

Proyeksi Tahun 2024

Terdapat pergeseran kontributor pendapatan pada bisnis ABM di tahun 2024, dari sebelumnya didominasi oleh pendapatan dari pertambangan batu bara menjadi pendapatan dari kontrak pertambangan sebagai kontributor utama. Kontrak pertambangan memroyeksikan volume pengupasan dan pemindahan lapisan penutup sebesar 275 s.d 285 juta bcm di tahun 2024, meningkat dari realisasi tahun 2023 sebesar 276,56 juta BCM yang merupakan pencapaian tertinggi yang pernah dicapai oleh ABM. Pergeseran kontribusi pendapatan ini tak lepas dari dampak dekonsolidasi MDB dari Perusahaan yang terjadi pada akhir tahun 2023.

Terlepas dari proyeksi harga batu bara yang sedikit mengalami penurunan dari level di tahun 2023, Perusahaan diproyeksikan masih mampu menjaga tingkat pendapatan pada level di atas AS$1 miliar. ABM akan berfokus pada bidang *safety* dan *cost effectiveness* di tahun 2024. Dari sisi laba, kinerja Perusahaan juga akan ditopang oleh bagian atas laba entitas asosiasi di tahun 2024 yang merupakan hasil dari investasi RJR di GEMS. Dengan mempertimbangkan hal di atas, Perusahaan memroyeksikan laba tahun 2024 pada kisaran AS$100 juta s.d AS$150 juta.

Meskipun kinerja finansial diproyeksikan cukup menantang di tahun 2024, ABM tetap optimis dapat mencapai struktur modal yang lebih baik, yang tergambar dari rasio utang terhadap ekuitas yang membaik dari 1,37 kali di tahun 2023 menjadi sekitar 1,05 kali hingga 1,10 kali di tahun 2024. ABM juga tetap berkomitmen untuk mencari area tambang batu bara baru untuk menggantikan cadangan batu bara TIA yang akan habis di tahun 2024.

ABM tetap berkomitmen untuk dapat terus memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Pada tahun 2024, Perusahaan memroyeksikan dapat membayarkan dividen maksimal 35% dari laba bersih sebagai realisasi dari kebijakan dasar yang dimiliki Perusahaan.

2024 Projection

In 2024, there will be a notable transition in revenue sources for the ABM business. Previously, revenue was predominantly derived from coal mining activities, but now mining contracts are poised to become the primary revenue generator. The mining contract projects anticipate a volume of stripping and overburden removal ranging from 275 to 285 million bcm in 2024. This marks an increase from the achieved volume of 276.56 million bcm in 2023, which stands as ABM's highest achievement to date. This shift in revenue contribution is closely linked to the Company's MDB deconsolidation, which took place at the end of 2023.

Despite a slight projected decrease in coal prices compared to 2023 levels, the Company is expected to maintain its revenue above the US$1 billion mark. In 2024, ABM will prioritize safety and cost-effectiveness initiatives. Furthermore, the Company's profit performance will be bolstered by the top-line earnings of its associate entities, particularly the returns from RJR's investment in GEMS. Taking these factors into account, the Company projects a profit range of US$100 million to US$150 million for the year 2024.

Despite the anticipated financial challenges in 2024, ABM maintains optimism regarding achieving an enhanced capital structure. This optimism is underscored by the projected improvement in the debt-to-equity ratio, which is expected to decrease from 1.37 times in 2023 to approximately 1.05 to 1.10 times in 2024. Additionally, ABM remains steadfast in its commitment to identifying new coal mining areas to substitute for TIA's depleting coal reserves, which are slated to exhaust in 2024.

ABM reaffirms its dedication to delivering added value to shareholders. In 2024, the Company anticipates being able to distribute dividends up to a maximum of 35% of net profit, aligning with the Company's fundamental policy.

PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

Taxation and Contribution to the State

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan pembayaran pajak penghasilan mencapai AS$123,35 juta, meningkat 5,52% atau AS$6,45 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar AS$116,90 juta.

In 2023, the Company incurred income tax payments of US$123.35 million, an increase of 5.52% or US$6.45 million compared to the previous year of US$116.90 million.

KEBIJAKAN DIVIDEN DAN PEMBAYARANNYA

Dividend and Its Payment Policy

DASAR PEMBAGIAN DIVIDEN

Mengacu pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan melakukan pembagian dividen harus berdasarkan keputusan RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa. Sebelum tahun buku keuangan berakhir, Perusahaan juga dapat membagikan dividen interim yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sepanjang diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan.

Perusahaan memiliki kebijakan rasio pembayaran dividen ditetapkan sebanyak-banyaknya 35% dari laba bersih untuk waktu selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Prospektus pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Dalam hal ini, Perusahaan harus mendapat persetujuan RUPS, namun Direksi dapat sewaktu-waktu mengubah kebijakan pembagian dividen Perusahaan. Sementara itu, untuk pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, di antaranya:

1. Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

PEMBAGIAN DIVIDEN YANG DILAKUKAN DAN KRONOLOGIS PEMBAGIAN DIVIDEN 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023, pemegang saham memutuskan bahwa pemegang saham menyetujui antara lain, sebagai berikut:

1. Penambahan Cadangan umum atas saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar AS$100.000; dan

BASICS OF DIVIDEND DISTRIBUTION

Pursuant to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the Company distribute dividends based on the decisions of the Annual GMS or Extraordinary GMS. Before the end of the fiscal year, the Company may also distribute interim dividends determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners as long as the distribution takes into account the Company's Articles of Association.

The Company has established a dividend payment policy which sets a maximum of 35% of net profit for the following period, as stated in the Prospectus at the time of the Initial Public Offering. In this case, the Company must obtain approval from the GMS, but the Board of Directors may change the Company's dividend distribution policy at any time. Meanwhile, the payment of the dividend in future years will depend on various factors, including:

1. Retained earnings, operational and financial performance, financial condition, liquidity conditions, future business prospects, cash requirements, business opportunities; as well as
2. Compliance with applicable laws and regulations, as well as other factors that the Board of Directors sees as relevant.

DIVIDEND DISTRIBUTION AND CHRONOLOGY OF DIVIDEND DISTRIBUTION FOR THE LAST 5 (FIVE) YEARS

Upon the approval by shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2022 fiscal year, which was held on May 10, 2023, shareholders decided and agreed, to the following matters:

1. Addition to the general reserve for predetermined retained earnings amounting to US$100,000; and

2. Pembagian dividen kas sejumlah AS$75.000.000 atau setara dengan Rp1.101.266.000.000 yang diambil dari laba tahun 2022 yang dapat didiatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada bulan Juni 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas dividen kas.
3. Kronologis pembagian dan pembayaran dividen tahun 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut.

2. Distribution of cash dividends in the amount of US$75,000,000 or equivalent to IDR1,101,266,000,000 from 2022 profits attributable to owners of the parent company. The Company paid the cash dividends in June 2023.
3. The chronology of dividend distribution and payments from 2019 to 2023 is as follows.

Tahun Pembagian Dividen Year of Dividend Distribution	**Tahun Buku Dividen** Dividend Fiscal Year	**Tanggal Pengumuman** Date of Announcement	**Tanggal Pembayaran** Date of Payment	**Dividen Kas yang Dibagikan (Rp)** Cash Dividend being Distributed (IDR)	**Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham)** Dividend per Share (IDR per share)	**Rasio Pembagian Dividen (%)** Dividend Distribution Ratio (%)
2023	2022	10 Mei 2023 May 10, 2023	9 Juni 2023 June 9, 2023	1.101.266.000.000	400	27,78
2022	2021	11 Mei 2022 May 11, 2022	30 Juni 2022 June 30, 2022	735.095.055.000	267	18,71
2021	2020	7 Mei 2021 May 7, 2021	Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2021, para pemegang saham menyetujui untuk tidak melakukan pembagian sisa hasil usaha dan penyisihan cadangan karena Perusahaan belum memiliki saldo laba bersih positif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Following the resolution of the Annual General Meeting held on May 7, 2021, shareholders have agreed not to distribute the remaining operating results and reserve provisions. This decision stems from the Company's lack of a positive net profit balance for the fiscal year ending December 31, 2020.			
2020	2019	18 Juni 2020 June 18, 2020	22 Juli 2020 July 22, 2020	36.250.000.000	13,17	33,39
2019	2018	3 Mei 2019 May 3, 2019	28 Mei 2019 May 28, 2019	100.000.000.000	36,32	9,31

Jumlah Dividen yang Dibayarkan Periode 2019-2023
Total Dividends Paid for 2019-2023 Period

(Rp-juta) I (IDR million)

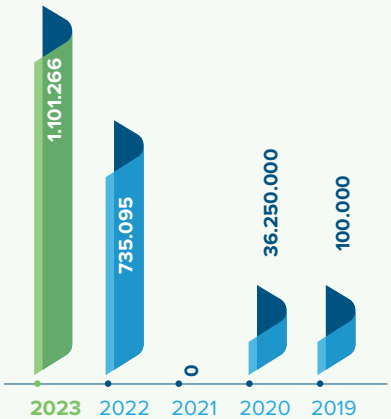

Jumlah Dividen Per Saham Periode 2019-2023
Total Dividends per share for 2019-2023 Period

((Rp/saham) I (IDR per share)

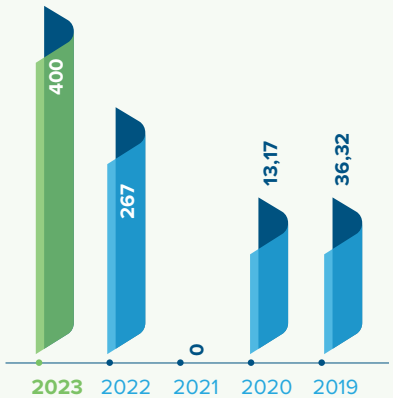

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of the Use of Proceeds of Public Offering

Di tahun 2023 Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Seluruh hasil Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 2011 telah digunakan sepenuhnya hingga tahun 2014 dan telah disampaikan dan disetujui oleh RUPS Tahunan pada tahun 2015.

In 2023, the Company was not obligated to submit a report on the realization of the use of proceeds from the public offering as per OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding Reports on the Realization of Use of Public Offering Proceeds. All proceeds from the Initial Public Offering conducted in 2011 were fully utilized by 2014 and were submitted for approval by the Annual General Meeting of Shareholders in 2015.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Material Information about Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

INFORMASI MATERIAL TENTANG DIVESTASI

Pada tanggal 11 Desember 2023, Reswara dan PT Inti Murni Kencana (“IMK”) menandatangani Amandemen Kesepakatan Bersama, di mana kedua belah pihak bersepakat bahwa IMK diberikan kekuasaan dan hak penuh terkait pengambilan keputusan atas jalannya operasional dan kebijakan terkait penentuan imbal hasil dari Grup MDB, efektif tanggal 29 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak lagi dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan konsolidasian ABM. Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan telah menyampaikan surat No. ABMCSC/ 001/RDN/I/2024 ke OJK atas keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik terkait dekonsolidasi MDB sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Tidak terdapat informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/ Modal do sepanjang tahun 2023.

MATERIAL INFORMATION ABOUT INVESTMENT

On December 11, 2023, Reswara and PT Inti Murni Kencana (“IMK”) signed an Amendment to a Joint Agreement. Through this amendent, both parties agreed that IMK was to be given full power and rights regarding decision making in the course of operations and policies related to determining returns from MDB Group. This amendment was made effective on December 29, 2023.

On December 31, 2023, MDB Group was no longer to be consolidated as part of ABM’s consolidated Financial Statements. On January 2, 2024, the Company submitted Letter No. ABMCSC/001/ RDN/I/2024 to the Financial Services Authority (OJK). This letter disclosed information that the public needed to know regarding MDB’s deconsolidation in accordance with OJK Regulation No. 31/ POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENTS, EXPANSION, MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

There is no material information regarding Investment, Expansion, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring during 2023.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliates/Related Parties

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Pihak yang memiliki hubungan relasi dengan Grup ABM, jika:
Langsung atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak:

1. Mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Grup;
2. Memiliki kepentingan dalam Grup yang memberikan pengaruh signifikan atas Grup; dan
3. Memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan.
4. Suatu pihak adalah Entitas Asosiasi Grup.
5. Suatu pihak adalah Ventura Bersama dimana Grup sebagai *Venture*.
6. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau Entitas Induk Grup.
7. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir 1 atau 4.
8. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan atau di mana hak suara signifikan dimiliki oleh langsung maupun tidak langsung, individu seperti yang diuraikan dalam butir 4 atau 5.
9. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.

POLICY ON RELATED PARTIES

Related parties to the ABM Group are defined as follows:
Any party that, directly or indirectly through one or more intermediaries:

1. Controls, is controlled by, or is under common control with the Group;
2. Holds an interest in the Group that provides significant influence over the Group; and
3. Exercises joint control over the Company.
4. Any entity associated with the Group.
5. Any joint venture where the Group acts as the venture.
6. Any member of the key management personnel of the Company or its parent entity.
7. Any close family member of individuals described in points 1 or 4.
8. Any entity controlled, jointly controlled, significantly influenced, or in which significant voting rights are owned directly or indirectly by individuals described in points 4 or 5.
9. Any post-employment benefits program for employee benefits of the Group or related entities.

NAMA PIHAK BERELASI BERTRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN

Nama-nama pihak berelasi dan bertransaksi, beserta sifat hubungan dengan Grup ABM diungkapkan dalam tabel berikut.

IDENTIFICATION OF RELATED PARTY TRANSACTIONS AND NATURE OF RELATIONSHIPS

The table below presents the names of related parties, details of transactions, and the nature of their relationship with the ABM Group.

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Valle Verde Pte. Ltd., Singapura (“VV”)	Pemegang saham Perusahaan Company Shareholders	Tidak ada transaksi No transaction
PT Tiara Marga Trakindo ("TMT")	Entitas Induk perusahaan Parent Entity of the Company	Piutang usaha; utang usaha; utang non-usaha; liabilitas sewa; beban akrual; sewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan; sewa alat berat; penambahan aset hak-guna; pembelian suku cadang dan lain-lain; dan biaya keuangan Trade receivables; trade payables; non-trade payable; lease liabilities; accrued expenses; rented office space, parking spaces and vehicles; rented heavy equipment; addition of right of use assets; purchase of spare parts and others and finance charges

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapura	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha; utang usaha; beban akrual; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan serta pembelian suku cadang dan lain-lain Trade receivables; trade payables; accrued expenses; revenue from contracts with customers and purchase of spare parts and others
Pan Terra Pte Ltd., Singapura	Entitas sepengendali Entity under common control	Utang usaha serta pembelian suku cadang dan lain-lain Trade payables and purchase of spare parts and others
Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapura	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha; utang usaha dan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; trade payables and revenue from contracts with customers
PT Pradipa Aryasatya	Entitas sepengendali Entity under common control	Tidak ada transaksi No transaction
PT Trakindo Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha; piutang non-usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; utang non-usaha; uang muka pelanggan; liabilitas sewa; beban akrual; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; sewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan; sewa alat berat; pembelian aset tetap; penambahan aset hak- guna; pembelian suku cadang dan lain-lain; biaya keterlambatan pembayaran; dan biaya keuangan Trade receivables; non-trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; non-trade payables; advances from customers; lease liabilities; accrued expenses; revenue from contracts with customers; rented office space, parking spaces and vehicles; rented heavy equipment; purchase of fixed assets; addition of right of use assets; late payment charges and finance charges
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha; utang usaha; utang non-usaha; liabilitas sewa; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; pembelian jasa teknologi dan informasi; serta biaya keuangan Trade receivables; trade payables; non-trade payables, lease liabilities, revenue from contracts with customers; purchase of technology and information services; and finance charges
PT Chakra Jawara	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha; piutang non-usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; utang non-usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; pembelian aset tetap; pembelian suku cadang dan lain-lain; serta sewa alat berat Trade receivables; non-trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; revenue from contracts with customers; purchase of fixed assets; purchase of spare parts and others; and rented heavy equipment

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Chitra Paratama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha; piutang non-usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; pembelian aset tetap; pembelian suku cadang dan lain-lain; serta sewa alat berat Trade receivables; non-trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; revenue from contracts with customers; purchase of fixed assets; purchase of spare parts and others; and rented heavy equipment
PT Tri Swardana Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; pembelian aset tetap; serta pembelian suku cadang dan lain-lain Trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; revenue from contracts with customers; purchase of fixed assets and purchase of spare parts and others
PT Triyasa Propertindo	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; utang non- usaha; serta sewa ruang kantor, tempat parkir, dan kendaraan Advances and prepaid expenses; trade payables; nontrade payables; and rented office space, parking spaces and vehicles
PT Mitra Solusi Telematika	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; utang non-usaha; liabilitas sewa; beban akrual; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; sewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan; pembelian aset tetap; pembelian aset tak berwujud; penambahan aset hak-guna; pembelian jasa teknologi dan informasi dan biaya keuangan Trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; non-trade payables; lease liabilities; accrued expenses; revenue from contracts with customers; rented office space, parking spaces and vehicles; purchase of fixed assets; purchase of intangible assets, addition of right of use assets; purchase of technology and information services and finance charges
Dana Pensiun PT Trakindo Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Program pensiun manfaat pasti Defined benefits pension plans
PT Karya Kharisma Mandiri	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Utang usaha; sewa alat berat dan pembelian aset tetap Trade payables; rented heavy equipment and purchase of fixed assets
PT Mahadana Dasha Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Tidak ada transaksi No transaction
PT Roda Nusantara GTJ	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Tidak ada transaksi No transaction
Glorioso Trading, LDA	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Tidak ada transaksi No transaction
PT Nagata Bisma Shakti	Entitas yang dikendalikan oleh TMT Entity controlled by TMT	Piutang usaha Trade receivables

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Multi Harapan Utama	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha; piutang non-usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; dan pendapatan jasa konsultasi Trade receivables; non-trade receivables; advances and prepaid expenses; revenue from contracts with customers; and consultation fee income
PT Sumberdaya Sewatama	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha; piutang non-usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; utang non-usaha; uang muka pelanggan; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; sewa ruang kantor, tempat parkir dan kendaraan; sewa alat berat; pembelian aset tetap dan pembelian suku cadang dan lain-lain Trade receivables; non-trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; non-trade payables; advances from customers; revenue from contracts with customers; rented office space, parking spaces and vehicles; rented heavy equipment and purchase of fixed assets and purchase of spare parts and others
PT Energi Alamraya Semesta	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha Trade receivables
PT Agro City Kaltim	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang non-usaha Non-trade receivables
PT Wargi Santosa	Entitas sepengendali Entity under common control	Piutang usaha; piutang non-usaha; uang muka dan biaya dibayar di muka; utang usaha; utang non-usaha; liabilitas sewa; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan; sewa alat berat; pembelian aset tetap; penambahan aset hak- guna serta biaya keuangan Trade receivables; non-trade receivables; advances and prepaid expenses; trade payables; non-trade payables; lease liabilities; revenue from contracts with customers; rented heavy equipment; purchase of fixed assets; addition of right of use assets and finance charges
PT SSB Sammitr Distribution	Entitas Asosiasi melalui SSB Associated Entity through SSB	Piutang usaha; uang muka pelanggan dan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; advances from customers and revenue from contracts with customers
PT Golden Energy Mines Tbk (“GEMS”)	Entitas asosiasi melalui RJR Associated entity through RJR	Tidak ada transaksi No transaction
PT Roundhill Capital Indonesia	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Tidak ada transaksi No transaction
PT Kuansing Inti Makmur	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Piutang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; revenue from contracts with customers
PT Trisula Kencana Sakti	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Tidak ada transaksi No transaction
GEMS Trading Resources Pte. Ltd	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Tidak ada transaksi No transaction
PT Borneo Indobara	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Piutang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; revenue from contracts with customers

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Karya Cemerlang Persada	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Piutang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; revenue from contracts with customers
PT Bungo Bara Utama	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Piutang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; revenue from contracts with customers
PT Bara Harmonis Batang Asam	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Tidak ada transaksi No transaction
PT Bungo Bara Makmur	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Piutang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; revenue from contracts with customers
PT Bara Sentosa Lestari	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS Entity controlled by GEMS	Tidak ada transaksi No transaction
PT Media Djaya Bersama*	Entitas asosiasi melalui Reswara Associated entity through Reswara	Utang Dividen Dividend Payable
PT Mifa Bersaudara*	Entitas asosiasi melalui Reswara Associated entity through Reswara	Piutang usaha; piutang non-usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; non-trade receivables; revenue from contracts with customers
PT Bara Energi Lestari*	Entitas asosiasi melalui Reswara Associated entity through Reswara	Piutang usaha; pendapatan dari kontrak dengan pelanggan Trade receivables; revenue from contracts with customers
Dewan Komisaris dan Direksi	Manajemen kunci Perusahaan Company's Key Management	Gaji dan imbalan kerja jangka pendek Short-term salary and employee benefits

*) Pihak berelasi pada tanggal 29 Desember 2023
Related Parties as of December 29, 2023

Penjelasan Kewajaran Transaksi

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap sebagai pihak yang berelasi dengan Grup ABM karena adanya kesamaan pemilik. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Explanation of Fairness in Transactions

In the course of normal business operations, the Company engages in transactions with related parties. These entities are considered related to the ABM Group due to shared ownership. The pricing for goods or services exchanged between related parties is determined based on mutually agreed-upon terms.

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan kegiatan bisnis Grup ABM.

Purpose of Transactions

Transactions with related parties align with the operational requirements and business objectives of the ABM Group.

Realisasi Transaksi dan Saldo Transaksi

Realisasi transaksi dan saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan manajemen kunci, serta sifat hubungannya diungkapkan dalam tabel berikut.

Execution and Balance of Transactions

Details regarding the realization and balance of transactions with related parties and key management personnel, along with the nature of their relationships, are outlined in the table below.

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Balances and Transactions with Related Parties in Assets	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Piutang Usaha Trade Receivables	159.987	7,42	84.442	4,26	75.545	89,46
Piutang Non-Usaha Non-Trade Receivables	30.529	1,42	10.880	0,55	19.649	180,60

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset Balances and Transactions with Related Parties in Assets	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Jumlah (AS$-ribu)** Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Nominal (AS$-ribu)** (US$ thousand))	**Persentase** Percentage (%)
	(1)		**(2)**		**(3=1-2)**	**(3/2)**
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	1.143	0,05	615	0,03	529	85,99
Uang Jaminan Security deposit	4.181	0,19	2.961	0,15	1.219	41,18
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	260.436	12,08	301.327	15,20	(40.891)	(13,57)
Pembelian Aset Takberwujud Purchase of Intangible Assets	-	-	1.060	0,05	(1.060)	-
Penambahan Aset Hak-guna Addition of Right of Use Assets	27.502	1,28	41.223	2,08	(13.721)	(33,29)
Total Aset dari Pihak-Pihak Berelasi Total Assets from Related Parties	483.778	22,43	442.508	22,32	41.270	9,33
Total Aset Total Assets	2.156.688		1.982.579		174.109	8,78

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balances and Transactions with Related Parties in Liabilities	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Jumlah (AS$-ribu)** Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Nominal (AS$-ribu)** (US$ thousand))	**Persentase** Percentage (%)
	(1)		**(2)**		**(3=1-2)**	**(3/2)**
Utang Usaha Trade Payables	161.639	11,56	134.596	9,86	27.042	20,09
Utang Non-Usaha Non-Trade Payables	953	0,07	2.492	0,18	(1.539)	(61,75)
Uang Muka Pelanggan Advances From Customers	1.171	0,08	204	0,01	967	473,45
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	62.514	4,47	65.044	4,76	(2.530)	(3,89)
Beban Akrual Accrued Expenses	68	0,00	87	0,01	(20)	(22,42)
Total Liabilitas dari Pihak-Pihak Berelasi Total Liabilities from Related Parties	226.345	16,19	202.423	14,83	23.921	11,82
Total Liabilitas Total Liabilities	1.397.761		1.365.057		32.704	2,40

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Balances and Transactions with Related Parties in Revenue from Contracts with Customers	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Jumlah (AS$-ribu)** Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Nominal (AS$-ribu)** (US$ thousand))	**Persentase** Percentage (%)
	(1)		**(2)**		**(3=1-2)**	**(3/2)**
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dari Pihak Berelasi Revenue from contracts with customers - Related Parties	484.276	32,44	312.107	21,59	172.168	55,16
Total Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dari Pihak Berelasi Total Revenue from contracts with customers - Related Parties	484.276	32,44	312.107	21,59	172.168	55,16
Total Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Total Revenue from contracts with customers	1.492.999		1.445.527		47.471	3,28

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Jumlah (AS$-ribu)** Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Nominal (AS$-ribu)** (US$ thousand))	**Persentase** Percentage (%)
	(1)		**(2)**		**(3=1-2)**	**(3/2)**
Sewa Alat Berat Heavy Equipment Rental	34.656	3,15	32.538	3,52	2.118	6,51
Pembelian Suku Cadang dan Lain-Lain Spare Parts and Miscellaneous Purchases	96.614	8,78	70.717	7,66	25.897	36,62
Total Beban Pokok Pendapatan dari Pihak-Pihak Berelasi Total Cost of Revenue from Related Parties	131.271	11,92	103.255	11,18	28.016	27,13
Total Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue	1.100.953		923.623		177.330	19,20

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Usaha Balances and Related Party Transactions in Operating Expenses	**2023**		**2022**		**Kenaikan (Penurunan)** Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Jumlah (AS$-ribu)** Total (US$ thousand)	**Kontribusi** Contribution (%)	**Nominal (AS$-ribu)** (US$ thousand))	**Persentase** Percentage (%)
	(1)		**(2)**		**(3=1-2)**	**(3/2)**
Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan kunci Remuneration for the Board of Commissioners, Directors and key employees	9.998	9,06	5.825	5,54	4.173	71,63
Sewa Ruang Kantor, Tempat Parkir, dan Kendaraan Rental of Office Space, Parking Space and Vehicles	185	0,17	905	0,86	(720)	(79,53)
Pembelian Jasa Teknologi dan Informasi Purchase of Technology and Information Services	1.914	1,73	2.438	2,32	(524)	(21,50)

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Usaha Balances and Related Party Transactions in Operating Expenses	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Total Beban Usaha dari Pihak-pihak Berelasi Total Operating Expenses from Related Parties	12.097	10,96	9.168	8,73	2.929	31,95
Total Beban Usaha Total Operating Expenses	110.371		105.068		5.303	5,05

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan Lainnya Balance and Transactions of Related Parties in Other Income	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Pendapatan Jasa Konsultasi Consultation Fee Income	-	-	3.793	24,82	(3.793)	-
Pendapatan Pemeliharaan Jalan Hauling Batu Bara	5.846	12,24	3.268	21,38	2.578	78,90
Pendapatan Fasilitas Pelabuhan Port Facility Income	8.927	18,69	1.793	11,73	7.133	397,73
Total Pendapatan Lainnya dari Pihak-Pihak Berelasi	14.772	30,93	8.854	57,93	5.919	66,85
Total Pendapatan Lainnya	47.754		15.283		32.471	212,47

Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Keuangan Balances and Related Party Transactions in Financial Expenses	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Jumlah (AS$-ribu) Total (US$ thousand)	Kontribusi Contribution (%)	Nominal (AS$-ribu) (US$ thousand))	Persentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Biaya Keuangan Finance Charges	6.881	6,49	5.777	11,01	1.105	19,12
Total Beban Keuangan dari Pihak-pihak Berelasi	6.881	6,49	5.777	11,01	1.105	19,12
Total Beban Keuangan	106.107		52.481		53.626	102,18

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme *Review* atas Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Direksi memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi/berelasi yang dilakukan oleh ABM dalam kelompok usahanya telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi/berelasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*). Melalui koordinasi dan rapat gabungan, Dewan Komisaris dan Komite Audit memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi/berelasi yang dilakukan oleh ABM dalam kelompok usahanya telah melalui prosedur yang memadai untuk memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*).

Company Review Mechanism Policies for Transactions and Fulfillments of Related Regulations and Provisions

The Board of Directors ensures that all affiliated/related transactions carried out by ABM within its business group have gone through all the necessary procedures. It also ensures that all affiliated/related transactions have been carried out in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the “arm’s length” principle. The Board of Commissioners and the Audit Committee have also coordinated to ensure that all affiliated/related transactions carried out by ABM within its business group have gone through adequate procedures to comply with thos very same arm’s length principle.

Seluruh transaksi afiliasi/berelasi yang dilakukan oleh ABM dalam kelompok usahanya, sebagaimana disampaikan di atas, merupakan transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. ABM telah menyampaikan seluruh transaksi afiliasi/berelasi dalam Laporan Keuangan teraudit untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) pada catatan 33. Laporan Keuangan teraudit dapat dilihat pada bagian lampiran dari Laporan Tahunan ini, atau dapat diakses melalui situs web ABM.

Di tahun 2023 tidak terdapat transaksi afiliasi/berelasi maupun transaksi benturan kepentingan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen.

All affiliated/related transactions carried out by ABM within its business group, as stated above, serve as business activities carried out in order to generate business income. These activities have been carried out routinely, repeatedly and/or continuously. The Company has also documented all of its affiliated/related transactions in its audited Financial Report for the year that ended on December 31, 2023, which has been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) in Note 33. This audited Financial Report can be seen in the attachment section of this Annual Report. It can also be accessed via ABM's website.

There were no affiliated/related transactions or conflict of interest transactions in 2023 that required approval from independent shareholders.



INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Financial Information Containing Extraordinary and Infrequent Events

Sepanjang tahun 2023, tidak ada informasi keuangan yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

Throughout 2023, there was no financial information of an extraordinary or infrequent nature.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Changes in Accounting Policy and the Impacts on the Company

Di tahun 2023 ABM pertama kali menerapkan sejumlah standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023. Namun demikian, penerapan atas sejumlah standar baru dan/atau yang direvisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian ABM.

In 2023 ABM initially adopted a number of new and/or revised standards that are effective for periods beginning on or after January 1, 2023. However, the adoption of these new and/or revised standards did not have a significant impact on ABM's consolidated financial statements.

Rincian perubahan kebijakan akuntansi disajikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian ABM tahun buku 2023 pada bagian Catatan 2.b, sebagaimana terlampir di bagian belakang Laporan Tahunan ini.

Details of changes in accounting policies are presented in ABM's Consolidated Financial Statements for the 2023 fiscal year in Note 2.b, as attached at the back of this Annual Report.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

Changes in Regulations and the Impacts on the Company's Performance

PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Dalam proses pemantauan terhadap perubahan peraturan perundangan maupun peraturan yang baru terbit, perusahaan juga dibantu oleh pihak ketiga dengan berlangganan sistem aplikasi berbayar yang memberikan informasi pembaharuan peraturan-peraturan yang berlaku. Begitu pula, jika diperlukan tindak lanjut dalam pemenuhan perijinan yang harus didapatkan.

MONITORING AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS

In the process of monitoring changes in laws and regulations and newly issued regulations, the company is also assisted by a third party by subscribing to a paid application system that provides information on updates to applicable regulations. This is also the case if follow-up is required in fulfilling the licenses that must be obtained.

PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERBIT DI TAHUN 2023

Dalam periode tahun 2023, berikut beberapa peraturan yang terbit yang memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan di Grup ABM, diantaranya:

LEGISLATION ISSUED IN 2023

In the 2023 period, the following regulations have an impact on the performance of companies in the ABM Group. Those include:

Peraturan Menteri Keuangan No. 66 Tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan
Minister of Finance Regulation No. 66 Year 2023 concerning income tax treatment of reimbursement or compensation in connection with work or services received or obtained in the form of natura and/or enjoyment

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	:	Pedoman dan petunjuk teknis yang terkena perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta yang mendapat kategori pengecualian. Guidelines and technical instructions that are subject to income tax treatment on reimbursement or compensation in connection with work or services received or obtained in the form of in-kind and/or enjoyment, as well as those that are categorized as exempt.
Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	:	Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan Reimbursement or compensation in relation to work or services received or obtained in the form of natura and/or enjoyment is income that is the object of Income Tax.

Peraturan Menteri Perdagangan No.33 Tahun 2023 tentang Pencabutan Permendag No. 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu
Minister of Trade Regulation No. 33 of 2023 on the Revocation of Minister of Trade Regulation No. 94 of 2018 on Provisions for the Use of Letter of Credit for the Export of Certain Goods

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	:	Barang ekspor tertentu yang merupakan sumber daya alam diantaranya batu bara yang sebelumnya diharuskan menggunakan cara pembayaran *Letter of Credit* (L/C) menjadi tidak wajib. Certain export goods that are natural resources, including coal, which were previously required to use the Letter of Credit (L/C) payment method, are not mandatory.
Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	:	Menambah tipe pembeli/importir yang tidak bisa melakukan pembayaran melalui L/C dan mengurangi biaya penerbitan L/C, serta Meningkatkan resiko gagal bayar oleh importir jika pembayaran sepenuhnya melalui metode Telegraphic Transfer (T/T) setelah dokumen pengapalan terbit. Increase the types of buyers/importers who cannot make payment through Telegraphic Transfer (T/T) and reduce the cost of issuing L/C, as well as increase the risk of default by importers if payment is fully made through T/T method after the shipment document is issued.

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Government Regulation No.35 of 2023 on General Provisions of Regional Taxes and Retributions

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	:	Pedoman bagi Pemda dalam Menyusun Perda dan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guidelines for Local Governments in Preparing Local Regulations and Regulations of Local Heads on Local Taxes and Retributions.
Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	:	Pajak Daerah yang berdampak diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan. Local taxes that have an impact include Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, Heavy Equipment Tax, and Surface Water Tax.

Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Government Regulation No.36 of 2023 concerning the Foreign Exchange of Export Proceeds from the Activities of Concession, Management, and/or Processing of Natural Resources

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	:	Eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan wajib memasukkan Devisa berupa Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia. Exporters in the mining, plantation, forestry and fisheries sectors are required to put foreign exchange in the form of Natural Resources Export Proceeds (DHE SDA) into the Indonesian financial system.
Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	:	DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan Eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama 3 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA DHE SDA that has been entered and placed by exporters into a special DHE SDA account must remain placed at least 30% in the Indonesian financial system for 3 months after placement in a special DHE SDA account.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara
Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 10 of 2023 concerning the Procedures for Preparation, Submission, and Approval of Work Plans and Budget Costs as well as Procedures for Reporting on the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enacted Laws and/or Regulations	:	Peraturan Menteri ini mengatur antara lain bahwa pemilik Izin Pertambangan Operasi Produksi, wajib melakukan Kegiatan Pertambangan sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya ("RKAB") yang telah disetujui, dan pemilik Izin Pertambangan tersebut juga dilarang untuk melakukan produksi batu bara-mineral melebihi dari besaran rencana produksi setiap tahunnya yang telah disetujui dalam RKAB. Kemudian diatur juga mengenai Masa Berlaku RKAB untuk pemilik Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus, yaitu: 1. Tahap Eksplorasi: 1 tahun 2. Tahap Operasi Produksi: a. Reguler: 3 tahun b. Masa Berlaku Izin Pertambangan kurang dari 3 tahun: Disesuaikan dengan masa berlaku Izin Pertambangan This Ministerial Regulation stipulates, among others, that the owner of a Production Operation Mining License is obliged to carry out Mining Activities in accordance with the approved Work Plan and Budget ("RKAB"), and the owner of the Mining License is also prohibited from producing coal-mineral in excess of the amount of production plan each year that has been approved in the RKAB. It also regulates the validity period of the RKAB for the owner of a Mining Business License or Special Mining Business License, namely: 1. Exploration Stage: 1 year 2. Production Operation Stage: c. Regular: 3 years d. Mining License validity period less than 3 years: Adjusted to the validity period of the Mining License
Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	:	Sehubungan dengan RKAB Operasi Produksi yang berlaku 3 (tiga) tahun, Perseroan wajib memperhitungkan kembali secara lebih cermat dan menyeluruh terkait rencana dan realisasi dari penambangan dan produksi batu bara nya, termasuk biaya kegiatan penambangan, kegiatan pemasaran, ekspor, sampai dengan Domestic Market Obligations (DMO) In connection with the Production Operation RKAB which is valid for 3 (three) years, the Company must recalculate more carefully and thoroughly related to the plan and realization of its coal mining and production, including the costs of mining activities, marketing activities, exports, up to Domestic Market Obligations (DMO).

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

HAL YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Perusahaan memastikan bahwa tidak terdapat hal-hal apapun baik internal ataupun eksternal yang memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan operasional Perusahaan sepanjang tahun 2023. Hal tersebut merupakan hasil dari efektivitas pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko Perusahaan.

ASSESSMENT MANAJEMEN UNTUK MENGELOLA POTENSI YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN

Manajemen telah melakukan *assessment* terhadap kapabilitas Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usaha di masa depan. Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan, Manajemen berkesimpulan bahwa tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat memengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usaha.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM *ASSESSMENT*

Dalam melakukan *assessment*, manajemen menggunakan sejumlah asumsi yang meliputi:

1. Kinerja keuangan.
2. Kinerja operasional.
3. Struktur modal.
4. Regulasi.
5. Berbagai risiko, seperti:
    a. Risiko bisnis;
    b. Risiko operasional;
    c. Risiko sumber daya;
    d. Risiko kepatuhan/*legal*;
    e. Risiko keuangan; serta
    f. Risiko-risiko lainnya yang disebabkan oleh faktor eksternal.

THINGS THAT HAVE A SIGNIFICANT INFLUENCE ON BUSINESS CONTINUITY

The Company confirms that there are no internal or external factors expected to significantly impact its operational activities throughout 2023. This outcome reflects the effectiveness of the risk management conducted by the Company's Risk Management Unit.

MANAGEMENT ASSESSMENT TO MANAGE SIGNFICANT POTENTIAL

The Management has conducted an assessment of the Company's capacity to sustain its business operations in the future. Based on the findings of this assessment, Management has concluded that there are no significant uncertainties that could impede the Company's ability to continue its business activities.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT IN ASSESSMENT

In conducting the assessment, the Management has applied a number of assumptions, including:

1. Financial performance.
2. Operational performance.
3. Capital structure.
4. Regulation.
5. Various risks, such as:
    a. Business risk;
    b. Operational risk;
    c. Resource risk;
    d. Compliance/legal risks;
    e. Financial risk; and
    f. Other risks caused by external factors.

OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Optimization

Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kegiatan operasional Grup ABM dan merupakan sarana dalam menjalankan kegiatan usaha serta menerapkan *Mining Value Chain*. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam hal pengambilan keputusan, analisis data, serta pelaporan dalam skala korporat yang dilakukan dalam ABM maupun Entitas Anak, maka pengelolaan TI Grup ABM dilakukan secara terintegrasi yang mencakup seluruh aspek bisnis, termasuk aspek tata kelolanya.

Pengelolaan TI ABM dijalankan oleh Departemen *Digital and Analytics* (DNA) yang bertanggung jawab langsung kepada *Chief Information Officer*. Sejak transformasi pada DNA dilakukan pada tahun sebelumnya, peran DNA semakin besar sebagai *business driver*. Melalui rangkaian inovasi yang menjadi bagian dari proses transformasi digital, DNA berhasil membantu ABM untuk melakukan otomatisasi seluruh proses bisnisnya secara bertahap dalam rangka pencapaian tujuan yang sesuai dengan visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Mengoptimalkan produktivitas bisnis dan meraih keunggulan kompetitif melalui *data intelligence* terintegrasi terbaik di kelasnya dan otomatisasi teknologi dengan kemampuan analitik tingkat lanjut yang membantu pengambilan keputusan berbasis informasi (*intelligent decisioning*).

MISI

Menyediakan dasar teknologi kuat yang sesuai dan integrasi data untuk analitik data tingkat lanjut;

1. Secara kolaboratif membangun otomatisasi *end-to-end intelligent process* untuk menghilangkan intervensi manual; dan
2. Mengatur inovasi teknologi yang mempunyai nilai tambah bermanfaat di seluruh lini bisnis.

Sebagaimana dicanangkan untuk periode 2022-2023, ABM memasuki tahapan Otomasi Proses Bisnis di mana pengembangan TI berfokus pada *Robotic Process Automation* (RPA), memaksimalkan *data science* dalam seluruh kegiatan operasi, serta *fleet management* di CK. ABM melakukan berbagai Pengembangan TI sesuai dengan rencana yang berfokus pada Otomasi Proses Bisnis tersebut yang meliputi:

Information Technology (IT) Governance plays a pivotal role in supporting the sustainability of operational activities within the ABM Group and serves as a conduit for conducting business operations and implementing the Mining Value Chain. To ensure effectiveness and efficiency in decision-making, data analysis, and corporate-scale reporting across ABM and its subsidiaries, IT management within the ABM Group is integrated, encompassing all facets of the business, including governance.

ABM's IT management is overseen by the Digital and Analytics (DNA) Department, reporting directly to the Chief Information Officer. Following DNA's transformation in the preceding year, its role as a catalyst for business advancement has expanded significantly. Through a series of innovations integral to the digital transformation journey, DNA has facilitated ABM's gradual automation of all business processes, aligning with the following vision and mission:

VISION

To optimize business productivity and achieve competitive advantage through best-in-class integrated data intelligence and technology automation, leveraging advanced analytical capabilities to facilitate information-driven decision-making (intelligent decisioning).

MISSION

Provision of a robust technology foundation and seamless data integration for advanced data analytics.

1. Collaborative development of end-to-end intelligent process automation to streamline operations and eliminate manual intervention.
2. Management of technological innovations that add value and enhance utility across all business segments.

In line with the objectives set for the 2022-2023 period, ABM is embarking on the Business Process Automation phase, with IT development focused on Robotic Process Automation (RPA), extensive utilization of data science in operational activities, and CK fleet management. ABM is implementing various IT initiatives aligned with plans centered on Business Process Automation, including:

Grup ABM	1. *SAP Planning and Consolidation upgrade*; 2. *Software-Defined Infrastructure (Network optimization)*; 3. *Intelligent Decision Dashboard (Digital Boardroom)*; dan 4. RPA *in refined process*.
Mining Value Chain	1. *Equipment management planning & execution system*; 2. *Operations Technology: MineStar Fleet Management system*; dan 3. MVC *operation and financial analytical dashboard*.
***Logistic Services* (CKB Logistics)**	Ramco *Transport Module for* CKB Logistics *Logistic solution*.
***Engineering and Services* (SSB)**	1. *Optimize* CRM *system*; dan 2. *Industrial IoT and automation*.
Business Support Functions	1. *SAP Success Factors Human Capital implementation Phase* 2 & 3; 2. *Risk Management Framework and dashboard*; dan 3. *E-procurement optimization*.

PENGEMBANGAN *SOFTWARE* APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR SECARA BERTAHAP

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menuntut ABM untuk senantiasa melakukan berbagai pengembangan dan inovasi-inovasi baru yang meliputi:

1. **Implementasi SAP Success Factors**
   ABM menerapkan SAP *Success Factors* sebagai bagian dari upaya pengembangan sistem *Human Capital* (HC) yang terintegrasi.
   Dengan adanya teknologi SAP *Success Factors* sebagai solusi sistem HC yang terintegrasi, ABM dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik, dimana para karyawan juga dapat bekerja dengan baik, serta dapat menemukan talenta yang tepat dan mengembangkan kompetensi mereka.
   Implementasi SAP *Success Factors* memungkinkan ABM untuk membangun proses dan sistem manajemen talenta yang lebih kuat sehingga diharapkan dapat mencapai hasil-hasil sebagai berikut:
   - Proses-proses HC yang lebih ramping;
   - Teknik pemusatan data pada satu sumber (*single source of truth*);
   - Pelaporan HC yang efisien;
   - Memungkinkan adanya akses mobilitas dari mana saja (*mobility enabled*); dan
   - Manajemen talenta HC yang efektif.

Penerapan modul-modul SAP *Success Factors* dilakukan dalam 3 tahap:

Tahap 1 Stage 1	**Tahap 2** Stage 2	**Tahap 3** Stage 3
• *Employee Central* (EC) • *Learning* (LMS) • *Recruitment* (RCM & RMK)	• *Performance & Goal Management* (PMGM) • *Succession & Career Development Plan* • *Compensation* (CMP)	• *Onboarding* (ONB) • *Workforce Analysis* (WFA) & SAC *Planning*

2. **Peningkatan keamanan (*security*) di ABM**
   Peningkatan keamanan digital di lingkungan ABM menjadi sebuah keharusan mengingat *cyber crime* dan *email phishing* yang semakin marak sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam merespons hal tersebut, ABM menambahkan 2-*factor authentication* yang memungkinkan verifikasi melalui SMS OTP guna meningkatkan keamanan akun *email*, *Office*,

GRADUAL DEVELOPMENT OF APPLICATION SOFTWARE AND INFRASTRUCTURE

The rapid evolution of information technology necessitates ABM to continually pursue various new developments and innovations, which encompass:

1. **Implementation of SAP Success Factors**
   ABM implements SAP Success Factors as part of efforts to develop an integrated Human Capital (HC) system.

   With SAP Success Factors technology as an integrated HC system solution, ABM can run business better, where employees can also work well, and can find the right talent and develop their competencies.

   The implementation of SAP Success Factors allows ABM to build stronger talent management processes and systems that are expected to achieve the following results:

   - Streamlined HC processes;
   - Technique for concentrating data on one source (single source of truth);
   - Efficient HC reporting;
   - Allows mobility access from anywhere (mobility enabled); and
   - Effective HC talent management.

The implementation of SAP Success Factors modules is carried out in 3 stages, as follows:

2. **Enhanced Security Measures at ABM**
   As cybercrime and phishing emails become more prevalent with the advancements in information technology, bolstering digital security within the ABM environment is imperative. In response, ABM has introduced two-factor authentication, enabling verification via SMS OTP to fortify the security of email, Office, OneDrive, and Teams accounts. Furthermore, security

OneDrive, dan *Teams*. Selain itu, peningkatan pengamanan akses ke sistem SAP dilakukan di CK yang disesuaikan dengan susunan organisasi terbaru melalui pengaturan ulang SAP *User Profile & Roles* agar sesuai dengan fungsi kerja dan posisi setiap *user*.

3. **Implementasi data platform dan *data science***
   Dalam rangka menghasilkan *Dashboard* dan *Report* yang lebih aktual dan komprehensif serta meningkatkan efisiensi kegiatan operasional Grup, ABM membuat *data platform* terbaru yang mengombinasikan sejumlah data di entitas anak dari berbagai sistem. ABM dapat menggunakan data-data historis selama beberapa tahun terakhir dari gudang data yang ada untuk digabungkan dengan *data science* sehingga dapat membuat prediksi ke depannya secara analitik, misalkan memprediksi biaya *repair maintenance* untuk alat berat.

4. **Peningkatan kinerja jaringan**
   ABM menerapkan *Software Derived Wide Area Network* (SD-DWAN) sebagai upaya untuk menyempurnakan seluruh rute dan aspek atas koneksi dari wilayah operasi ke kantor pusat. Dengan adanya kualitas jaringan yang semakin baik menggunakan teknologi SD-WAN, Grup ABM dapat menggunakan *bandwidth* secara efisien untuk mengatasi biaya operasional yang tinggi serta memudahkan instalasi serta pengaturan di setiap entitas, bahkan wilayah operasi yang sulit terjangkau sekalipun. Dengan demikian, karyawan di wilayah operasi tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke Kantor Pusat. Keandalan teknologi ini juga sudah teruji dengan adanya kesiapan *backup link* dengan fitur *auto fail-over* tanpa mengesampingkan fitur keamanan seperti: *filtering, antivirus & firewall*, serta *user access control*.

Penerapan SD-WAN dilakukan melalui 2 tahap sebagai berikut:

Tahap 1 Stage 1	**Tahap 2** Stage 2
Site to Site VPN *Failover Link* *Load Balancing* *Traffic Shaping (Traffic Rule)*	*Web Filtering* *User Access Control* *Application Control* *Firewall & IPS Activation* *Antivirus Activation*

5. **Implementasi *Contract Life-cycle Management System***
   Sistem terintegrasi di Grup untuk permintaan dan kajian pembuatan kontrak termasuk termin penjualan yang sangat menunjang kinerja Departemen Legal. Hal ini dikarenakan setiap karyawan di departemen tersebut dilengkapi dengan *dashboard*, fitur pengingat masa tenggat kontrak, serta penyimpanan dokumen secara *online*.

enhancements have been made to access the SAP system at CK, aligning with the latest organizational structure. This includes resetting the SAP User Profile & Roles to align with the job functions and positions of individual users.

3. **Implementation of Data Platforms and Data Science**
   To generate more current and comprehensive Dashboards and Reports and enhance the efficiency of the Group's operational activities, ABM has established a new data platform amalgamating data from subsidiary entities across various systems. Leveraging historical data from existing data warehouses, ABM combines it with data science to make predictive analytics for the future. For instance, predicting repair maintenance costs for heavy equipment.

4. **Enhanced Network Performance:**
   ABM has deployed Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) technology to optimize all routes and connectivity aspects from operational areas to the head office. With improved network quality using SD-WAN technology, the ABM Group efficiently utilizes bandwidth to mitigate high operational costs and streamline installation and setup in every entity, including remote operational areas. Consequently, employees in operational regions no longer need to commute to the Head Office. Additionally, the reliability of this technology is underscored by the availability of a backup link with an auto fail-over feature, ensuring uninterrupted operations while maintaining robust security features such as filtering, antivirus & firewall, and user access control.

The SD-WAN implementation is carried out in two stages, as follows:

5. **Implementation of Contract Life-cycle Management System:**
   The introduction of the Group's integrated system for requesting and reviewing contracts, including sales terms, significantly enhances the performance of the Legal Department. Each employee in this department is equipped with a dashboard, a reminder feature for contract deadlines, and online document storage, streamlining contract management processes.

AUDIT TI

Guna mengukur efektivitas dan efisiensi sistem TI dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang dinamis, ABM melaksanakan audit atas penerapan TI pada triwulan keempat setiap tahunnya sejalan dengan TMT IT *Security Policy* yang berlaku di seluruh Grup ABM dan Grup TMT. Audit TI mencakup audit sistem keuangan oleh eksternal audit, audit proses pada sistem oleh Audit Internal Grup ABM, dan audit sistem operasi pada Entitas Anak oleh Tim ISO.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY OF IT

Untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan kepada karyawan yang merupakan pengguna dari produk dan jasa TI, Departemen *Digital and Analytics* secara rutin melaksanakan *Customer Satisfaction Survey of* IT sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dengan indikator penilaian mencakup:

1. *Application*;
2. *Helpdesk*;
3. ICT *Infrastructure*;
4. *Innovation*;
5. *Overall* ICT/DNA *score*; dan
6. SAP *System*.

Karyawan ABM dan entitas anaknya yang menjadi peserta survei tercatat sebanyak 562 orang atau mewakili 18,4% dari total pengguna layanan di Grup ABM sebanyak 3.053 orang. Berdasarkan entitas, karyawan CKB Logistics menjadi peserta survei terbesar, yaitu sebanyak 33% dari total peserta.

Hasil survei di tahun 2023 mencapai 3,82 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa layanan ICT/DNA sudah melebihi target dan akan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGELOLA TI

Pengelola TI mengikuti program pengembangan kompetensi berupa pengembangan *soft skill* yang sesuai kurikulum ABM *Group Learning* yang hasilnya langsung diimplementasikan dalam bentuk *On-job Training* bersama pengembangan *hard skill* yang didesain sesuai dengan rencana kerja Departemen Digital and Analytics.

IT AUDIT

To measure the effectiveness and efficiency of IT systems in supporting dynamic business growth, ABM conducts IT audits in the fourth quarter of each year in accordance with the TMT IT Security Policy, applicable throughout the ABM Group and TMT Group. These audits encompass financial system audits by external auditors, system process audits by the ABM Group Internal Audit, and operational system audits of subsidiaries by the ISO Team.

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY OF IT

To measure the quality of services provided to employees who are users of IT products and services, the Digital and Analytics Department routinely conducts a Customer Satisfaction Survey of IT twice a year, by taking into account the following assessment indicators:

1. Application;
2. Helpdesk;
3. ICT Infrastructure;
4. Innovation;
5. Overall ICT/DNA score; And
6. SAP System.

There were 562 people consisting of ABM's employees and subsidiaries participated in the survey, or representing 18,4% of the total service users in the ABM Group comprising 3,053 people. Measured from the aspect of the entity, employees of CKB Logistics were the largest survey participants, with the percentage of 33% of the total participants.

The survey results in 2023 scored at 3.82 on a scale of 5, which demonstrates that ICT/DNA services have exceeded the target and will continue to improve in the following years.

IT MANAGER COMPETENCY DEVELOPMENT

IT managers participate in a competency development program such as soft skill development in accordance with the ABM Group Learning curriculum. The results of which are directly implemented through on-job training along with hard skill development designed in accordance with the work plan of the Digital and Analytics Department.





Top 50

dari 100 biggest company in Indonesia versi Fortune Indonesia

out of the 100 biggest companies in Indonesia according to Fortune Indonesia

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DI LINGKUP ABM

Basic Reference for the Implementation of Corporate Governance in ABM



Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG), menjadi aspek fundamental bagi pelaku industri dalam menjalankan praktik usaha yang berbasis etika bisnis, bertanggung jawab, dan berkesinambungan. Tak hanya itu, bagi ABM, prinsip GCG ditempatkan dalam konteks membangun hubungan dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG telah diperluas dengan mengedepankan aspek-aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*), atau yang lebih dikenal dengan pendekatan ESG. Oleh karena itu, ABM berupaya menyesuaikan berbagai kebijakan dan strateginya agar sesuai dengan standar ESG global untuk kemudian diterapkan dalam seluruh mata rantai kegiatan operasionalnya. Penerapan ESG menjadi landasan ABM beserta seluruh entitas anak usahanya, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs nasional (*Sustainability Development Goals*).

Pembahasan lebih rinci terkait Tata Kelola dapat dilihat pada Bab ini, sedangkan untuk dua aspek lainnya, yaitu Sosial dan Lingkungan disajikan secara komprehensif dalam Laporan Keberlanjutan yang disusun sebagai dokumen tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental aspect for industry players in conducting business practices that are grounded in ethics, responsibility, and sustainability. Furthermore, for ABM, GCG principles are integral to fostering relationships with stakeholders. Consequently, the application of GCG principles has expanded to prioritize environmental, social, and governance aspects, commonly referred to as the ESG approach. Thus, ABM endeavors to align its various policies and strategies with global ESG standards and subsequently integrate them across its operational activities. The implementation of ESG serves as the foundation for ABM and all its subsidiary entities, supporting the government's efforts to achieve the targets of the national Sustainable Development Goals (SDGs).

Further about GCG will be discussed in details in this chapter, while for two other aspects, namely Social and Environment, they will be presented comprehensively in the Sustainability Report which is submitted separately from this Annual Report.

LANDASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dasar acuan penerapan dan pengembangan prinsip GCG oleh ABM berpedoman pada sejumlah regulasi serta pedoman internasional, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Peraturan No. I-A.1 Kep-00100/BEI/10-2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu bara;
5. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021;
6. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan;
7. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
8. Anggaran Dasar Perusahaan; dan
9. Pedoman dan kebijakan perusahaan lainnya.

IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Upaya penerapan prinsip GCG mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang dipublikasikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berikut prinsip Tata Kelola yang dianut oleh Perusahaan:

- **Perilaku Beretika**
  Dalam melaksanakan kegiatannya, korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

- **Akuntabilitas**
  Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

FUNDAMENTAL REFERENCE FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The implementation and development of GCG principles by ABM are guided by several international regulations and guidelines, including:

1. Constitution of the Republic of Indonesia of Year 1945;
2. Law No. 40 of Year 2007 concerning Limited Liability Company;
3. Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1995 concerning the Capital Market;
4. Relevant regulations of the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, such as the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Financial Services Authority Regulation No. 33/ POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/ SEOJK.04/2015 concerning Governance Guidelines for Public Companies, and Regulation No. I-A.1 Kep-00100/ BEI/10-2014 concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by Companies in the Mineral and Coal Mining Sector;
5. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021;
6. The Roadmap of Indonesian Corporate Governance issued by the Financial Services Authority;
7. The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
8. Articles of Association of the Company; and
9. Other corporate guidelines and policies.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Efforts to implement GCG principles refer to the 2021 General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) published by the National Governance Policy Committee (KNKG). The following outlines the governance principles adhered to by the Company:

- **Ethical Behaviour**
  In carrying out its activities, the corporation always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfils commitments, consistently estabslishes as well as maintains moral values and trusts. The corporation pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principle of fairness and equality and is managed independently so that each company organ does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.

- **Accountability**
  The corporation is accountable for its performance in a transparent and reasonable manner. Therefore, the corporation must be managed properly, measurably and in accordance with corporate interests while taking into account the interest of shareholders and stakeholders. Accountability is the prerequisite needed to achieve sustainable performance.

- **Transparansi**
  Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Keberlanjutan**
  Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan.

- **Transparency**
  To maintain objectivity in carrying out its businesses, the corporation provides material and relevant information that are easily accessible and understood by stakeholders. The corporation took an initiative to not only disclose issues that are required by the laws, but also issues that are important for decision making by shareholders, creditors and other stakeholders.

- **Sustainability**
  The corporation adheres to the laws and regulations as well as committed to carry out its responsibility towards public and environment in order to contribute to sustainable development by cooperating with all relevant stakeholders to improve their well-being by aligning with their business interests and the sustainable development agenda.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang Perseroan Terbatas), organ Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan forum pemegang saham untuk mengambil keputusan penting dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk penunjukan akuntan publik sebagai pihak independen yang akan mengkaji dan memberikan opini atas laporan keuangan Perusahaan. Sementara itu, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan ABM.

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi, dan Komite ESG. Sementara itu, Direksi dibantu oleh Komite dan unit tugas/fungsi seperti Komite *Group Executive Management*, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko.

STRUCTURE AND MECHANISMS OF GOVERNANCE

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Director. The GMS serves as a forum for shareholders to make critical decisions, guided by the provisions outlined in the Articles of Association and relevant laws and regulations. This includes decisions such as the appointment of a public accountant to independently review and provide opinions on the Company's financial reports. Meanwhile, the Board of Commissioners and Directors are tasked with the supervision and management of ABM.

To support the implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) Committees, namely the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the Investment Committee, and ESG Committee. In addition, the Board of Directors receives support from committees and task/function units, such as the Group Executive Management Committee, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management.

Struktur Tata Kelola Perusahaan ABM
Corporate Governance Structure of ABM

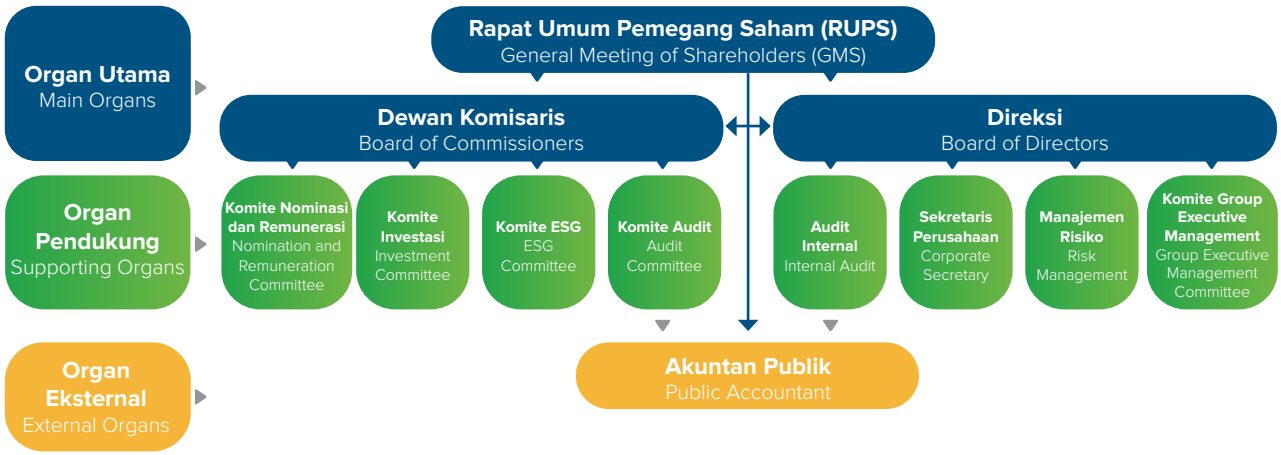

To facilitate effective collaboration among the various governance

Agar berbagai organ tata kelola di atas dapat bekerja sama dengan baik, Perusahaan memiliki mekanisme tata kelola yang tertuang dalam *Soft Structure* Tata Kelola Perusahaan. Penyusunan *soft structure* bertujuan untuk memastikan peningkatan kualitas penerapan GCG Perusahaan. ABM secara berkala menyempurnakan dan mengkaji efektivitas *soft structure* GCG yang terdiri dari perangkat dan kebijakan Tata Kelola Perusahaan, untuk memastikan penerapan GCG dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan perkembangan dunia usaha yang dinamis.

organs mentioned above, the Company has established a governance mechanism known as the Corporate Governance Soft Structure. The development of this soft structure is intended to enhance the quality of the Company's implementation of Corporate Governance (GCG). ABM consistently refines and reviews the effectiveness of the GCG soft structure, which comprises Corporate Governance tools and policies, to ensure optimal GCG implementation in accordance with the dynamic development of the business environment.

Komponen *Soft Structure* Soft Structure Components	**Keterangan** Description
Anggaran Dasar Articles of Association	Bagian dari Akta Pendirian Perusahaan yang memuat kedudukan dan fungsi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 52 tanggal 10 Mei 2023 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0067388 tanggal 24 Mei 2023. Part of the Deed of Establishment of the Company which contains the position and functions of the Shareholders, Board of Commissioners, and Directors where the latest changes were made based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 52 dated May 10, 2023 and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a Letter No. AHU-AH.01.03-0067388 dated May 24, 2023.
Piagam GCG GCG Charter	Disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berdasarkan keputusan Direksi No. 002/ABM-BOC-CIR/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang memuat arahan strategis bagi Dewan Komisaris dan Direksi terkait prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan. Piagam GCG bertujuan untuk menjadi suatu sistem kebijakan yang bersifat holistik dan terintegrasi dan memiliki kedudukan sebagai induk dari semua kebijakan. Dengan demikian seluruh peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Perusahaan harus merujuk dan menyebut GCG *Charter* sebagai standar dan pedoman dasar dalam pembentukannya. Ratified by the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company based on the decree of the Board of Directors No. 002/ABM-BOC-CIR/I/2013 dated January 31, 2013 which contains strategic directions for the Board of Commissioners and Board of Directors regarding the principles of management of the Company. The GCG Charter aims to become a holistic and integrated policy system and serves as the basic reference of all policies. Thus, all regulations, decisions or policies issued by the Company must refer to and mentions the GCG Charter as the basic standard and guideline in its formation.
Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct	Disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan, Pedoman Etika dan Perilaku yang menjadi pedoman yang memuat sejumlah komitmen yang meliputi etika bisnis dan etika kerja seluruh karyawan yang berlaku bagi seluruh karyawan di ABM, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Setiap tahun, setiap karyawan Perusahaan wajib menandatangani dan memperbarui komitmen pribadi mereka. Hingga saat ini, Pedoman Etika dan Perilaku yang telah disahkan pada tanggal 21 Oktober 2011 masih berlaku. Prepared based on the Vision, Mission, and Corporate Culture, the Code of Ethics and Conduct which serves as a guideline that contains a number of commitments including business ethics and work ethics of all employees that apply to all employees at ABM, including Board of Commissioners and Board of Directors. Each year, every employee of the Company is obliged to sign and renew their personal commitments. Until now, the Code of Ethics and Conduct that was passed on October 21, 2011, is still in force.
Board Manual: Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Board Manual: Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors	Merupakan pedoman pokok pelaksanaan hubungan antar organ Perusahaan yang meliputi tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat, pengambilan keputusan, serta prinsip pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Saat ini *Board Manual* sedang dalam proses pembaruan. It is the main guideline for the implementation of relations between company organs which includes duties, responsibilities, authorities, meeting mechanisms, decision making, as well as the principles of control and supervision carried out by the Board of Directors, Board of Commissioners, and General Meetings of Shareholders. Currently the Board Manual is in the process of being updated.
Peraturan Perusahaan Company Regulations	Berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan Perusahaan yang memuat informasi tentang hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, serta jangka waktu berlakunya. Peraturan Perusahaan yang ada saat ini telah disesuaikan dengan Nilai-Nilai Inti Perusahaan dan telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. e-0697 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024. This serves as a guide for all Company employees. It contains information about the rights and obligations of employers, the rights and obligations of workers, as well as work conditions, company regulations, and information on validity periods. These current Company Regulations have been adapted to the Company's Core Values and have been ratified through the Decree of the Head of the DKI Jakarta Provincial Manpower, Transmigration and Energy Service No. e-0697 of 2024 dated March 27, 2024.

Komponen *Soft Structure* Soft Structure Components	Keterangan Description
Kebijakan Perusahaan Company Policy	Selain mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan GCG dalam seluruh aktivitas bisnis, kebijakan perusahaan juga merupakan penjabaran dari hukum, peraturan, dan sasaran yang ditetapkan oleh Direksi sebagai pegangan manajemen dalam melakukan kegiatan bisnis. Setiap kebijakan ditetapkan berlandaskan pada nilai-nilai inti dan sifat-sifat kepemimpinan ABM. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan atau pembaruan terkait kebijakan perusahaan. In addition to reflecting the Company's commitment to implement GCG in all business activities, the company's policies are also an elaboration of the laws, regulations, and targets set by the Board of Directors as management's handle in carrying out business activities. Each policy is defined based on ABM's core values and leadership traits. Throughout 2023, there were no changes or updates on the corporate policies.
Prosedur Perusahaan (Standar Operasional Prosedur/SOP) Company Procedure (Standard Operating Procedure/SOP)	Berfungsi sebagai panduan guna memastikan aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dari waktu ke waktu, seluruh SOP ABM dan Entitas Anak senantiasa ditelaah, disesuaikan, dan distandarisasi secara berkesinambungan. Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan memiliki 109 SOP terupdate dan aktif yang digunakan sebagai panduan aktivitas Perusahaan. Serves as a guide to ensure operational activities run in accordance with established procedures. For years, all SOPs of ABM and Subsidiaries have been continuously reviewed, adjusted, and standardized. Throughout 2023, the Company has 109 updated and active SOPs which are used as a guide for the Company's activities.

PETA ARAH TATA KELOLA PERUSAHAAN

ABM telah merancang Peta Arah GCG sebagai gambaran tahapan pengembangan GCG yang terbagi atas 4 (empat) tahapan.

ROADMAP OF CORPORATE GOVERNANCE

ABM has designed a GCG Direction Map, illustrating the stages of GCG development divided into four phases.

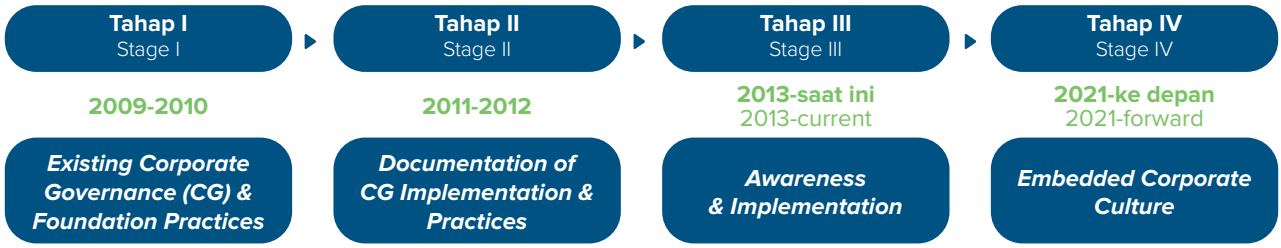

Saat ini ABM berada pada tahapan lanjutan yang berfokus pada penyelarasan dengan praktik terbaik yang berlaku saat ini, baik acuan terhadap PUGKI 2021 serta perkembangan prinsip ESG. ABM juga secara aktif melakukan tolok ukur terhadap perkembangan penerapan GCG dari perusahaan tercatat lainnya.

ABM is currently at an advanced stage to focus on aligning with current best practices, both references to the 2021 General Guidelines for PUGKI as well as developments in ESG principles. ABM also actively benchmarks the development of GCG implementation from other listed companies.

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan *Environmental Social Governance* (ESG)

ABM mendorong program internalisasi dan sosialisasi di mana seluruh pihak diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan GCG agar sejalan dan bersinergi dengan nilai-nilai yang telah ada di ABM. Di sepanjang tahun 2023, sosialisasi dilakukan secara *online* di seluruh entitas yang tergabung dalam Grup ABM dengan topik "*GCG Refreshment*". Para karyawan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait penerapan GCG kepada atasan langsung, Departemen Corporate Human Capital, Departemen Corporate Legal, Sekretaris Perusahaan, atau Direksi apabila terdapat hal-hal yang kurang dimengerti.

IMPROVEMENT OF QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE

Socialization of Corporate Governance and Environmental Social Governance (ESG) Policies

ABM advocates for internalization and socialization programs, inviting all stakeholders to contribute input toward the development of GCG that aligns seamlessly and synergistically with existing ABM values. In 2023, online socialization sessions on the topic of "GCG Refreshment" will be conducted across all entities within the ABM Group. Employees will have the opportunity to pose questions regarding GCG implementation to their immediate superiors, the Corporate Human Capital Department, Corporate Legal Department, Corporate Secretary, or Directors, should they encounter any areas of uncertainty.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam memantau perkembangan penerapan GCG, ABM melakukan *self-assessment* dengan menggunakan kriteria OJK, dengan hasil 100% *comply* sebagaimana dapat dilihat pada tabel Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka pada laporan tahunan ini.

Dalam memantau perkembangan penerapan GCG, ABM mendapatkan penilaian dari Indonesian Institute for Corporate Director (IICD) atas penerapan GCG di tahun 2023. Penilaian dilakukan melalui metode yang dikembangkan oleh IICD untuk mengukur perkembangan penerapan GCG yang telah dilakukan oleh ABM. Berdasarkan penilaian tersebut, Perusahaan mendapatkan penghargaan "*Best Non Financial Sector*" dalam IICD Corporate Governance Award 2023 yang diberikan oleh IICD pada 18 September 2023.

Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) Terintegrasi

ABM secara aktif menerapkan GRC untuk mendorong citra perusahaan yang terpercaya dan memiliki daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, ABM senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap proses keputusan dilakukan dengan benar, sesuai dengan risiko serta kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta melalui penyelarasan strategi, proses, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang didukung oleh GRC secara terintegrasi.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai bagian dari upaya ABM untuk meningkatkan kualitas GCG, di tahun 2022 ABM mengambil sertifikasi ISO 37001:2016 Anti Penyuapan (*Anti-Bribery*) guna memperkuat sistem manajemen anti penyuapan. Di tahun 2023, SGS Indonesia kembali melakukan *assessment* atas ISO 37001:2016 untuk mengevaluasi peningkatan dan perbaikan performa anti penyuapan di ABM, dengan hasil memuaskan.

Selain itu di tahun 2023, entitas anak, CK, SSB dan CKB Logistics telah mendapatkan pula sertifikasi ISO 37001:2016. Di tahun 2024 direncanakan PWP akan mengambil sertifikasi yang sama.

Assessment of the Implementation of Corporate Governance

In monitoring the progress of GCG implementation, ABM conducted a self-assessment based on OJK criteria, yielding a result of 100% compliance. This information is detailed in the Implementation of Public Company Governance Guidelines table included in this annual report.

ABM has been assessed by the Indonesian Institute for Corporate Directors (IICD) as a means to review its GCG implementation in 2023. This assessment is part of the Company's efforts to monitor developments when it comes to GCG implementation. The assessment was carried out using a method developed by IICD to measure ABM's progress when it came to carrying out GCG implementation. The results of this assessment saw the Company worthy of receiving a "Best Non-Financial Sector" award during the IICD Corporate Governance Awards 2023 on September 18, 2023.

Implementation of Integrated Governance, Risk and Compliance (GRC)

ABM actively implements Integrated GRC practices to cultivate a company image that is trustworthy and highly competitive. Consequently, ABM consistently endeavors to ensure that every decision-making process adheres to applicable policies, regulations, and risk considerations. This is achieved through the integrated alignment of strategy, processes, technology, and human resources (HR), supported by GRC principles.

Developments in Corporate Governance Implementation

In 2022, as part of its efforts to improve its GCG quality, ABM took part in an ISO 37001:2016 Anti-Bribery certification process to strengthen its own anti-bribery management system. In 2023, SGS Indonesia conducted an assessment of this certification process to evaluate improvements in ABM's anti-bribery performance and found satisfying assessment results.

In addition, in 2023, the subsidiaries, CK, SSB and CKB Logistics have also received ISO 37001:2016 certification. In 2024, it is planned that PWP will take the same certification.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders



PENYELENGGARAN RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2023

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022 yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023.

GMS IMPLEMENTATION IN 2023

Throughout 2023, the Company held 1 (one) GMS, namely the Annual GMS (AGMS) for the 2022 Fiscal Year which was held on May 10 2023.

Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022
Compliance with the Implementation of Annual GMS for Financial Year 2022

Keterangan Remark	Kepatuhan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Compliance of AGMS for Financial Year 2022
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator Notify the Regulator about the GMS implementation	27 Maret 2023 March 27, 2023
Pengumuman RUPS GMS Announcement	3 April 2023 April 3, 2023
Pemanggilan RUPS Summons for GMS	18 April 2023 April 18, 2023

Keterangan Remark	Kepatuhan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Compliance of AGMS for Financial Year 2022
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation	10 Mei 2023, Pk. 14.32 s.d. 15.15 WIB Pandawa Ballroom, Ra Suites Simatupang, Lantai 2, Cilandak Barat, Jakarta Selatan May 10, 2023 from 14:32 until 15:15 Pandawa Ballroom, Ra Suites Simatupang, Second Floor, West Cilandak, South Jakarta
Pihak Independen untuk melakukan proses penghitungan suara dan validasinya Independent party to calculate and validate the voting results	Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom as Securities Administration Bureau
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Announcement GMS Minutes Meeting	11 Mei 2023, melalui situs web ABM dan situs web Bursa Efek Indonesia May 11, 2023, through the ABM website and the Indonesian Stock Exchange website
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK Submission of GMS Minutes to OJK	9 Juni 2023 June 9, 2023

Kewajiban pelaporan di atas dilakukan oleh ABM menggunakan sistem pelaporan elektronik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Bapak Arief Tarunakarya Surowidjojo selaku Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 10 April 2023.

Jumlah kehadiran pemegang saham pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 ini sebanyak 2.350.044.050 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 85,35% dari jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 ini adalah sebagai berikut:
- **Dewan Komisaris:**
  - Rachmat Mulyana Hamami (Komisaris Utama)*
  - Mivida Hamami (Komisaris)*
  - Arief Tarunakarya Surowidjojo (Komisaris Independen)
  - Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
- **Direksi:**
  - Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama)
  - Adrian Erlangga (Direktur)
  - Haris Mustarto (Direktur)

*) Hadir secara daring melalui video telekonferensi.

Hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 51 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Adapun hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

ABM fulfils its reporting obligation using electronic reporting system of PT Bursa Efek Indonesia and Financial Service Authorities.

The 2022 Annual GMS was led by Mr. Arief Tarunakarya Surowidjojo as Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners dated 10 April 2023.

The number of shareholders attended the Extraordinary GMS for the 2022 fiscal year was 2,350,044,050 shares or 85.35% of the number of shares with valid voting rights issued by the Company.

The attendance of the Board of Commissioners and Directors serving at this Extraordinary GMS for the 2022 fiscal year is as follows:
- **Board of Commissioners:**
  - Rachmat Mulyana Hamami (President Commissioner)*
  - Mivida Hamami (Commissioner)*
  - Arief Tarunakarya Surowidjojo (Independent Commissioner)
  - Manggi Taruna Habir (Independent Commissioner)
- **Board of Directors:**
  - Achmad Ananda Djajanegara (President Director)
  - Adrian Erlangga (Director)
  - Haris Mustarto (Director)

*) Present online via video teleconference.

The resolution of the Annual GMS have been stated in the Deed of GMS Minutes No. 51 dated May 10, 2023 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

The resolution of the Annual GMS and their realization by the management as of 2023 is as follows:

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions

Agenda Mata Acara 1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.

Penanya:
Tidak ada.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 1.608.226 (0,06843%)
Tidak Setuju: 5.000 (0,00021%)
Setuju: 2.348.430.824 (99,93135%)
Total Setuju: 2.350.039.050 (99,99979%)

Keputusan Mata Acara 1:
1. Menyetujui laporan tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2022.

2. Mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan No. 00482/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan selama tahun buku 2022 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2022.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Persetujuan oleh pemegang saham atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perusahaan dan Entitas Anak serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah dituangkan dalam Akta No. 51 tanggal 10 Mei 2023.

First Agenda:
Approval for the Company's Annual Report and Ratification of the Audited Consolidated Financial Report of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year ending on December 31, 2022, as well as the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the financial year 2022.

Questioner:
None.

Voting Results:
Abstained: 1.608.226 (0,06843%)
Disagree: 5.000 (0,00021%)
Agree: 2.348.430.824 (99,93135%)
Total agree: 2.350.039.050 (99,99979%)

First Agenda Resolution:
1. Approve the Company's annual report for the 2022 financial year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2022 financial year.
2. Ratify the Company's financial report for the 2022 financial year which were audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with Report No. 00482/2.1032/AU.1/10/0685-1/1/III/2023 dated March 31, 2023 with the opinion of "presented fairly in all material respects" as well as providing full discharge and release of responsibilities (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company during the financial year 2022 as long as it was disclosed in the Company's financial report for the financial year 2022.

Implementation on the Resolution:
Approval by shareholders of the Company's Annual Report and the Audited Consolidated Financial Report of the Company and Subsidiaries as well as the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the Financial Year Ending on December 31, 2022 has been stated in Deed No. 51 dated May 10, 2023.

Agenda Mata Acara 2:
Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perusahaan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2022.

Penanya:
Tidak ada.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 1.117.300 (0,04754%)
Tidak Setuju: 5.000 (0,00021%)
Setuju: 2.348.921.750 (99,95224%)
Total Setuju: 2.350.039.050 (99,99979%)

Keputusan Mata Acara 2:
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022 yang seluruhnya berjumlah AS$269.909.926,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
   a. Membagikan Dividen Tunai sejumlah AS$75.000. 000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau senilai Rp 1.101.266.000.000,- (satu triliun seratus satu miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 9 Juni 2023 kepada para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan (*recording date*) pada tanggal 23 Mei 2023.

Second Agenda:
Determination of the Company's Operating Results for the Financial Year ending on December 31, 2021.

Questioner:
None.

Voting Results:
Abstained: 1.117.300 (0,04754%)
Disagree: 5.000 (0,00021%)
Agree: 2.348.921.750 (99,95224%)
Total agree: 2.350.039.050 (99,99979%)

Second Agenda Resolution:
1. Approve the use of the Company's Net Profit for the financial year 2022, which amounted to US$269,909,926 (two hundred and sixty-nine million nine hundred and nine thousand nine hundred and twenty-six US dollars) as follows:
   a. Distribute cash dividends in the amount of US$75,000,000 (seventy five million US dollar) or IDR 1,101,266,000,000 (one trillion one hundred and one billion two hundred and sixty-six million rupiah) which distributed proportionally on June 9, 2023 to the Company's shareholders whose names were recorded in the Company's Register of Sharaeholders (recording date) on May 23, 2023.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions	
b. Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS$100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perusahaan. c. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perusahaan. 2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan.	b. Set aside as a reserve of US$100,000.00 (one hundred thousand US dollars) as required by Article 70 of the Company Law and in accordance with Article 25 of the Company's Articles of Association c. The remaining Net Profit would be added to the Retained Earnings for the development of the Company's business activities. 3. Approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedures for distributing dividends and announce them by taking into account the regulations applicable to the stock exchange where the shares were listed.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Perusahaan telah melakukan pembagian dividen tunai atas penggunaan laba bersih tahun buku 2022 senilai Rp1.101.266.000.000,- sesuai dengan hasil keputusan RUPS ini dan telah dibagikan pada tanggal 9 Juni 2023.	**Implementation on the Resolution:** The company has distributed cash dividends amounting to Rp1,101,266,000,000 from the net profit of the 2022 fiscal year, in accordance with the resolution of this GMS, and was distributed on June 9, 2023.
Agenda Mata Acara 3: Penunjukan Akuntan Publik Perusahaan Untuk Tahun Buku 2023.	**Third Agenda:** The Appointment of Company's Public Accountant for Financial Year 2023.
Penanya: Tidak ada.	**Questioner**: None.
Hasil Pemungutan Suara: Abstain: 1.116.300 (0,04750%) Tidak Setuju: 6.891.145 (0,29323%) Setuju: 2.342.036.605 (99,65926%) Total Setuju: 2.343.152.905 (99,70677%)	**Voting Results:** Abstained: 1.116.300 (0,04750%) Disagree: 6.891.145 (0,29323%) Agree: 2.342.036.605 (99,65926%) Total agree: 2.343.152.905 (99,70677%)
Keputusan Mata Acara 3: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023. 2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.	**Third Agenda Resolution:** 1. Appoint Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as the Public Accounting Firm that would audit the Company's Financial Report for the financial year 2023. 2. Authorize the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of auditor service fees by taking into account the fairness and scope of audit works and appoint a substitute public accountant if the appointed accounting firm was unable to carry out its duties within the scope of provisions applicable to the capital market in Indonesia.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Melalui Surat No.0067/PSS/09/2023 tanggal 8 September 2023, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja telah ditunjuk sebagai Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023. Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 telah dipublikasikan pada 27 Maret 2024.	**Implementation on the Resolution:** Through Letter No.0067/PSS/09/2023 dated September 8, 2023, the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm has been appointed as the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Report for the 2023 financial year. The Company's Financial Report for the 2023 financial year has been published in date in March 27, 2024.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions

Agenda Mata Acara 4: Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.	**Fourth Agenda:** Determination of Salaries/Honorarium and other Allowances for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.
Penanya: Tidak ada.	**Questioner:** None.
Hasil Pemungutan Suara: Abstain: 1.443.820 (0,06144%) Tidak Setuju: 7.600 (0,00032%) Setuju: 2.348.592.630 (99,93824%) Total Setuju: 2.350.036.450 (99,99968%)	**Voting Results:** Abstained: 1.443.820 (0,06144%) Disagree: 7.600 (0,00032%) Agree: 2.348.592.630 (99,93824%) Total agree: 2.350.036.450 (99,99968%)
Keputusan Mata Acara 4: 1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp13.163.604.631,- (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2023.	**Fourth Agenda Resolution:** 1. Determine honorarium and allowances for the Board of Commissioners in an amount of Rp13.163.604.631,- (thirteen billion one hundred and sixty three million six hundred and four thousand six hundred and thirty one rupiah) before tax deduction, for the financial year 2023 to further be distributed to members of the Board of Commissioners, as well as authorize the Board of Commissioners to determine the distribution among members of the Board of Commissioners. 2. Authorize the Board of Commissioners to determine honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the financial year 2023.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Perusahaan telah membayarkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS ini.	**Implementation on the Resolution:** The Company has paid honorarium and allowances to the Board of Commissioners in accordance with the resolution of this GMS decision.
Agenda Mata Acara 5: Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.	**Fifth Agenda:** The amendment the Company's Articles of Association to comply with OJK Regulation no. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies.
Penanya: Tidak ada.	**Questioner:** None.
Hasil Pemungutan Suara: Abstain: 1.116.300 (0,04750%) Tidak Setuju: 5.000 (0,00021%) Setuju: 2.348.922.750 (99,95228%) Total Setuju: 2.350.039.050 (99,99979%)	**Voting Results:** Abstained: 1.116.300 (0,04750%) Disagree: 5.000 (0,00021%) Agree: 2.348.922.750 (99,95228%) Total agree: 2.350.039.050 (99,99979%)
Keputusan Mata Acara 5: 1. Menyetujui perubahan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perusahaan sehingga setelah berubah menjadi sebagai berikut: "Perusahaan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan, laporan tengah tahunan atau laporan keuangan berkala lain yang ditentukan oleh peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal, di dalam situs web Perusahaan dan media lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pasar modal." 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan, dengan hak substitusi penuh, baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, untuk melakukan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perusahaan agar sesuai dengan peraturan OJK dimaksud, termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan seluruh keputusan Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut ke dalam Akta Notaris dalam rangka memperoleh persetujuan dari lembaga atau pejabat pemerintah yang relevan untuk itu.	**Fifth Agenda Resolution:** 1. Approve the amendment to Article 23 paragraph 6 of the Company's Articles of Association so that it is changed to the following: "The Company is obliged to announce the annual financial report, semi-annual report, or other periodic financial reports as determined by regulations and provisions related to the capital market, on the Company's website and other media as regulated in the provisions, regulations, and legislation governing the capital market." 2. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with full substitution rights, either jointly or individually, to rearrange the Company's Articles of Association in order to comply with the OJK regulations, including taking all necessary actions related to all Resolutions of this Meeting, as well as restating all amendments to the Company's Articles of Association in a Notarial Deed in order to obtain approval from the relevant government agencies or officials.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Hasil Keputusan RUPS Tahunan dituangkan dalam Akta Risalah No. 52 tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.	**Implementation on the Resolution:** The resolutions of the Annual GMS are stated in Minutes Deed No. 52 dated May 10, 2023 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

Penyelenggaran RUPS di Sepanjang Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, ABM menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yaitu RUPS Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 12 Januari 2022, dan RUPS Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021 pada tanggal 11 Mei 2022, dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

GMS Implementation in 2022

Throughout 2022, ABM held 2 (two) GMS, consisting of Extraordinary GMS (EGMS) on January 12, 2022, and the Annual GMS (AGMS) for the 2021 Financial Year on May 11 2022, with details of the implementation as follows:

RUPS Luar Biasa Tanggal 12 Januari 2022

Extraordinary GMS dated January 12, 2022

Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa
Compliance with the Implementation of Extraordinary GMS

Keterangan Remark	Kepatuhan RUPSLB Compliance of EGMS
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator The Notification of GMS Implementation to Regulator	26 November 2021 November 26, 2021
Pengumuman RUPS GMS Announcement	6 Desember 2021 December 6, 2021
Pemanggilan RUPS Summoning for GMS	21 Desember 2021 December 21, 2021
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation	12 Januari 2022, Pk 13.31 s.d. 14.00 WIB Ruang Pertemuan Tiara 5 & 6, Gedung TMT 1 Lantai Dasar, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta January 12, 2022, 13:31 - 14:00 WIB Tiara Meeting Room 5 & 6, TMT Building 1 Ground Floor, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta
Pihak Independen untuk melakukan proses penghitungan suara dan validasinya Independent party to calculate and validate the voting results	Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom as Securities Administration Bureau
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Announcement of GMS Minutes Meeting	13 Januari 2022, melalui situs web ABM dan situs web Bursa Efek Indonesia January 13 2022, through ABM website and the Indonesian Stock Exchange website
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK Submission of GMS Minutes to OJK	14 Februari 2022 February 14, 2022

Kewajiban pelaporan di atas dilakukan oleh ABM menggunakan sistem pelaporan elektronik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

ABM fulfils its reporting obligation using electronic reporting system of PT Bursa Efek Indonesia and Financial Service Authorities.

RUPS Luar Biasa dipimpin oleh Arief Tarunakarya Surowidjojo selaku Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 3 Januari 2022.

The Extraordinary GMS was led by Arief Tarunakarya Surowidjojo as the Company's Independent Commissioner based on the Decree of the Board of Commissioners dated January 3, 2022.

Jumlah kehadiran pemegang saham pada RUPS Luar Biasa sebanyak 2.181.594.520 lembar saham atau 79,23% dari jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

The number of shareholders attended the Extraordinary GMS was 2,181,594,520 shares or 79.23% of the number of shares with valid voting rights issued by the Company.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada RUPS Luar Biasa ini adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris:**
  - Arief Tarunakarya Surowidjojo (Komisaris Independen)
  - Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
- **Direksi**:
  - Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama)
  - Adrian Erlangga (Direktur)
  - Haris Mustarto (Direktur)

The attendance of the Board of Commissioners and Directors serving at this Extraordinary GMS is as follows:

- **Board of Commissioners:**
  - Arief Tarunakarya Surowidjojo (Independent Commissioner)
  - Manggi Taruna Habir (Independent Commissioner)
- **Board of Directors:**
  - Achmad Ananda Djajanegara (President Director)
  - Adrian Erlangga (Director)
  - Haris Mustarto (Director)

Hasil RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 60 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa dan realisasinya oleh manajemen hingga akhir tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.

The resolution of the Extraordinary GMS have been stated in the Deed of GMS Minutes No. 60 dated January 12, 2022 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The resolution of the Extraordinary GMS and their realization by the management as of 2023 is as follows.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions

Agenda Mata Acara Tunggal:
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terkait Perubahan Pasal 18 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dan pasal 21 Mengenai Tugas dan Wewenang Komisaris.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 30.000 (0,001%)
Tidak Setuju: 3.643.920 (0,167%)
Setuju: 2.177.920.600 (99,832%)
Total Setuju: 2.177.950.600 (99,834%)

Keputusan:
1. Menyetujui Perubahan Pasal 18 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 21 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yaitu berupa Penambahan Ayat pada masing-masing Pasal dimaksud.

   Sehingga dalam anggaran dasar Perusahaan menjadi berbunyi sebagai berikut:
   a. Pasal 18 ayat 7
      Direksi berwenang untuk membentuk komite-komite sebagai pendukung Direksi dalam menjalankan fungsinya dengan melakukan konsultasi bersama Dewan Komisaris. Jenis, bentuk, dan kriteria lainnya terkait komite akan diatur tersendiri oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan.
   b. Pasal 21 ayat 10
      Dewan Komisaris berwenang untuk membentuk komite-komite sebagai pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Jenis, bentuk dan kriteria lainnya terkait komite akan diatur tersendiri oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan internal Perusahaan.
2. Menyetujui dan menerima laporan Direksi mengenai komposisi pemegang saham sebagai berikut: Masyarakat sebesar 2.753.165.000 lembar saham. Sehubungan dengan susunan pemegang saham Perusahaan tersebut, maka mengubah status Perusahaan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah dan menyesuaikan usulan perubahan anggaran dasar Perusahaan yang diajukan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta praktik terbaik yang ada, membuat serta menandatangani segala akta, dokumen, dan surat sehubungan dengan keputusan Rapat ini baik kepada pihak yang berwenang maupun untuk menghadap ke Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Hasil Keputusan RUPS Tahunan dituangkan dalam Akta Risalah No. 60 tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Single Agenda:
Approval to Amendments of the Company's Articles of Association relating to the Changes in Article 18 about the Duties and Authorities of the Board of Directors and Article 21 concerning the Duties and Authorities of the Board of Commissioners.

Voting Results:
Abstain: 30,000 (0.001%)
Disagree: 3,643,920 (0.167%)
Agree: 2,177,920,600 (99.832%)
Total Agree: 2,177,950,600 (99.834%)

Decision:
1. Approve amendments to Article 18 regarding the Duties and Authorities of the Board of Directors and Article 21 regarding the Duties and Authorities of the Board of Commissioners, namely by Adding Paragraphs to each of the said Articles.

   Therefore, in the articles of association of the Company, it reads as follows:
   a. Article 18 paragraph 7
      The Board of Directors is authorized to establish committees to support the Board of Directors to carry out its functions by consulting with the Board of Commissioners. The types, forms, and other criteria about the committees will be presented in separate regulations by the Board of Directors by taking into account the Company's internal policies.
   b. Article 21 paragraph 10
      The Board of Commissioners is authorized to establish committees to support the Board of Commissioners to carry out its functions. The types, forms and other criteria about the committees will be presented in separate regulation by the Board of Commissioners by taking into account the Company's internal policies.
2. Approve and accept the Board of Directors' report on the composition of shareholders as follows: The public ownership amounted to 2,753,165,000 shares. Regarding the composition of the Company's shareholders, it accordingly changed the status of the Company to a Domestic Investment entity.

3. Agree to grant authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly, to take all necessary actions relating to the meeting resolutions, including but not limited to amend and adjust the proposed amendments to the Company's articles of association submitted to ensure the compliance with applicable laws and regulations and existing best practices, to prepare and sign all deeds, documents, and letters relating to the meeting resolutions, to the authorities and to be present before a Notary or an authorized government official.

Implementation on the Resolution:
The resolution of the Annual GMS Decisions were stated in Minutes Deed No. 60 dated 12 January, 2022 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 11 Mei 2022

Annual GMS for Financial Year 2021 dated May 11, 2022

Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021
Compliance with the Implementation of Annual GMS for Financial Year 2021

Keterangan Remark	Kepatuhan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Compliance of AGMS for Financial Year 2021
Pemberitahuan Penyelenggaraan RUPS kepada Regulator Notify the Regulator about the GMS implementation	28 Maret 2022 March 28, 2022
Pengumuman RUPS GMS Announcement	4 April 2022 April 4, 2022
Pemanggilan RUPS Summons for GMS	19 April 2022 April 19, 2022
Penyelenggaraan RUPS GMS Implementation	11 Mei 2022, Pk 14.36 s.d. 15.20 WIB Ruang Pertemuan Tiara 5 & 6, Gedung TMT 1 Lantai Dasar, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta May 11, 2022 14:36 - 15:20 WIB Tiara Meeting Room 5 & 6, TMT Building 1 Ground Floor, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta
Pihak Independen untuk melakukan proses penghitungan suara dan validasinya Independent party to calculate and validate the voting results	Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom as Securities Administration Bureau
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Announcement GMS Minutes Meeting	12 Mei 2022, melalui situs web ABM dan situs web Bursa Efek Indonesia May 12, 2022, through the ABM website and the Indonesian Stock Exchange website
Penyampaian Risalah RUPS kepada OJK Submission of GMS Minutes to OJK	13 Mei 2022 May 13, 2022

Kewajiban pelaporan di atas dilakukan oleh ABM menggunakan sistem pelaporan elektronik Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

ABM fulfils its reporting obligation using electronic reporting system of PT Bursa Efek Indonesia and Financial Service Authorities.

RUPS Tahunan untuk tahun buku 2021 dipimpin oleh Arief Tarunakarya Surowidjojo selaku Komisaris Independen Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 28 April 2022.

The Annual GMS for the 2021 financial year was led by Arief Tarunakarya Surowidjojo as Independent Commissioner of the Company based on the Decree of the Board of Commissioners dated 28 April, 2022.

Jumlah kehadiran pemegang saham pada RUPS Tahunan ini sebanyak 2.292.863.021 lembar saham atau 83,28% dari jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.

The number of shareholders attended the Extraordinary GMS was 2,292,863,021 shares or 83.28% of the number of shares with valid voting rights issued by the Company.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 ini adalah sebagai berikut:

- **Dewan Komisaris:**
  - Rachmat Mulyana Hamami (hadir secara *online* melalui video telekonferensi)
  - Mivida Hamami (hadir secara *online* melalui video telekonferensi)
  - Arief Tarunakarya Surowidjojo (Komisaris Independen)
  - Manggi Taruna Habir (Komisaris Independen)
- **Direksi**:
  - Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama)
  - Adrian Erlangga (Direktur)
  - Haris Mustarto (Direktur)

The attendance of the Board of Commissioners and Directors serving at this Extraordinary GMS for the 2021 fiscal year is as follows:

- **Board of Commissioners:**
  - Rachmat Mulyana Hamami (present online via video teleconference)
  - Mivida Hamami (present online via video teleconference)
  - Arief Tarunakarya Surowidjojo (Independent Commissioner)
  - Manggi Taruna Habir (Independent Commissioner)
- **Board of Directors**
  - Achmad Ananda Djajanegara (President Director)
  - Adrian Erlangga (Director)
  - Haris Mustarto (Director)

Hasil RUPS Tahunan tahun buku 2021 telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS No. 5 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Hasil keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2021 dan realisasinya oleh manajemen hingga akhir tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut.

The resolutions of the Annual GMS for the 2021 financial were stated in the Deed of GMS Minutes No. 5 dated May 11, 2022 made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The resolution of the Annual GMS for the 2021 financial year and their realization by management as of 2022 is presented as follows.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions

Agenda Mata Acara 1:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021.

First Agenda:
Approval for the Company's Annual Report and Ratification of the Audited Consolidated Financial Report of the Company and its Subsidiaries for the Financial Year ending on December 31, 2022, as well as the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners during the financial year 2022.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 761.300 (0,033%)
Tidak Setuju: 530.000 (0,023%)
Setuju: 2.291.571.221 (99,94%)
Total Setuju: 2.291.571.221 (99,94%)

Voting Results:
Abstain: 761,300 (0.033%)
Disagree: 530,000 (0.023%)
Agree: 2,291,571,221 (99.94%)
Total Agree: 2,291,571,221 (99.94%)

Keputusan Mata Acara 1:
1. Menyetujui laporan tahunan Perusahaan untuk tahun buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2021.
2. Mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan 00406/2.1032/AU.1/10/0701-3/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan selama tahun buku 2021 sepanjang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2021.

First Agenda Resolution:
1. Approve the Company's annual report for the 2021 financial year including the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties during the 2021 financial year.
2. Ratify the Company's financial report for the 2021 financial year which were audited by the Public Accounting Firm of Purwantono, Sungkoro & Surja in accordance with Report No. 00406/2.1032/AU.1/10/0701-3/1/III/2022 dated March 31, 2022 with the opinion of "presented fairly in all material respects" as well as providing full discharge and release of responsibilities (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the Company during the financial year 2021 as long as it was disclosed in the Company's financial report for the financial year 2021.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Persetujuan oleh pemegang saham atas Laporan Tahunan Perusahaan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perusahaan dan Entitas Anak serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPST No. 5 tanggal 11 Mei 2022 yang dibuatkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Implementation on the Resolution:
Approval by shareholders of the Company's Annual Report and the Audited Consolidated Financial Report of the Company and Subsidiaries as well as the Report on the Implementation of the Board of Commissioners' Supervisory Duties for the Financial Year Ending on December 31, 2021 has been stated in Deed No. 51 dated May 11, 2022 made by Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions

Agenda Mata Acara 2:
Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 411.600 (0,018%)
Tidak Setuju: 530.500 (0,023%)
Setuju: 2.291.920.921 (99,95%)
Total Setuju: 2.292.332.521 (99,968%)

Keputusan Mata Acara 2:
1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2021 yang seluruhnya berjumlah AS$148.003.867,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:
   a. Membagikan dividen tunai sejumlah Rp735.095.055.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima miliar sembilan puluh lima juta lima puluh lima ribu Rupiah) yang akan didistribusikan secara proporsional pada tanggal 10 Juni 2022 kepada para pemegang saham Perusahaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan (*recording date*) pada tanggal 24 Mei 2022.
   b. Menyisihkan sebagai cadangan sebesar AS$100.000,- (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 70 UUPT dan sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar Perusahaan.
   c. Sisa Laba Bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha Perusahaan.
2. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi Perusahaan untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembagian dividen dimaksud dan mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada bursa efek dimana saham dicatatkan.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Perusahaan telah melakukan pembagian dividen tunai atas penggunaan laba bersih tahun buku 2021 senilai Rp735.095.055.000,- sesuai dengan hasil keputusan RUPS ini dan telah dibagikan pada tanggal 30 Juni 2022.

Second Agenda:
Determination of the Company's Operating Results for the Financial Year ending on December 31, 2022.

Voting Results:
Abstain: 411,600 (0.018%)
Disagree: 530,500 (0.023%)
Agree: 2,291,920,921 (99.95%)
Total Approve: 2,292,332,521 (99.968%)

Second Agenda Resolution:
1. Approve the use of the Company's Net Profit for the financial year 2021, which amounted to US$148,003,867 (one hundred forty eight million three thousand eight hundred and sixty seven US Dollar) as follows:
   a. Distribute cash dividends in the amount of Rp735,095,055,000,- (seven hundred thirty five billion ninety five million fifty five thousand Rupiah) which distributed proportionally on June 10, 2022 to the Company's shareholders whose names were recorded in the Company's Register of Shareholders (recording date) on May 23, 2023.
   b. Set aside as a reserve of US$100,000.00 (one hundred thousand US Dollar) as required by Article 70 of the Company Law and in accordance with Article 25 of the Company's Articles of Association.
   c. The remaining Net Profit would be added to the Retained Earnings for the development of the Company's business activities.
2. Approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to further regulate the procedures for distributing dividends and announce them by taking into account the regulations applicable to the stock exchange where the shares were listed.

Implementation on the Resolution:
The company has distributed cash dividends amounting to Rp735,095,055,000 from the net profit of the 2022 fiscal year, in accordance with the resolution of this GMS, and was distributed on June 30, 2022.

Agenda Mata Acara 3:
Penunjukan Akuntan Publik Perusahaan untuk Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 411.600 (0,018%)
Tidak Setuju: 888.880 (0,039%)
Setuju: 2.291.562.541 (99,94%)
Total Setuju: 2.291.974.141 (99,958%)

Keputusan Mata Acara 3:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Melalui *Engagement Letter* No. 0237/PSS/09/2022 tanggal 19 September 2022, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja telah ditunjuk sebagai Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022. Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah dipublikasikan pada tanggal 31 Maret 2022.

Third Agenda:
The Appointment of Company's Public Accountant for Financial Year 2022.

Voting Results:
Abstain: 411,600 (0.018%)
Disagree: 888,880 (0.039%)
Agree: 2,291,562,541 (99.94%)
Total Approve: 2,291,974,141 (99.958%)

Third Agenda Resolution:
1. Appoint Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as the Public Accounting Firm that would audit the Company's Financial Report for the financial year 2022.
2. Authorize the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of auditor service fees by taking into account the fairness and scope of audit works and appoint a substitute public accountant if the appointed accounting firm was unable to carry out its duties within the scope of provisions applicable to the capital market in Indonesia.

Implementation on the Resolution:
Through Engagement Letter No. 0237/PSS/09/2022 dated September 19, 2022, the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm has been appointed as the Public Accounting Firm that audits the Company's Financial Report for the 2022 financial year. The Company's Financial Report for the 2022 financial year has been published on March 31, 2022.

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat
Meeting Agenda and Decisions as well as Follow-up of the Meeting Decisions

Agenda Mata Acara 4:
Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Hasil Pemungutan Suara:
Abstain: 418.500 (0,018%)
Tidak Setuju: 537.500 (0,023%)
Setuju: 2.291.907.021 (99,96%)
Total Setuju: 2.292.325.521 (99,96%)

Keputusan Mata Acara 4:
1. Menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp10.974.420.377 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian di antara anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perusahaan untuk tahun buku 2022.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:
Perusahaan telah membayarkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS ini.

Fourth Agenda
Determination of Salaries/Honorarium and other Allowances for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Voting Results:
Abstain: 418,500 (0.018%)
Disagree: 537,500 (0.023%)
Agree: 2,291,907,021 (99.96%)
Total Approve: 2,292,325,521 (99.96%)

Fourth Agenda Resolution:
1. Determine honorarium and allowances for the Board of Commissioners in an amount of Rp10.974.420.377,- (ten billion nine hundred seventy four million four hundred twenty thousand three hundred seventy seven Rupiah) before tax deduction, for the financial year 2022 to further be distributed to members of the Board of Commissioners, as well as authorize the Board of Commissioners to determine the distribution among members of the Board of Commissioners.
2. Authorize the Board of Commissioners to determine honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Directors for the financial year 2022.

Implementation on the Resolution:
The Company has paid honorarium and allowances to the Board of Commissioners in accordance with the resolution of this GMS decision.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Dewan Komisaris bertindak sebagai organ GCG dengan peran dan fungsi melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sehubungan dengan pengelolaan Perusahaan, serta memastikan terpenuhinya kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Board of Commissioners serves as a key GCG body, tasked with supervising and advising the Board of Directors on company management. In addition, they ensure that the interests of all stakeholders are upheld in accordance with GCG principles and relevant laws and regulations.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah tiga tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatannya, namun dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
2. Menjabat hingga sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya; serta
   b. Mengisi posisi baru dalam Dewan Komisaris.

Term of Office

The term of office of the Board of Commissioners is three years with the following conditions:

1. Shall serve for a period commencing from the date of the GMS that appoints him/her and that end at the closing of the 3rd year of Annual GMS after his/her appointment, yet opportunity to be re-appointed for the following term;
2. Serving the rest of the term of other members of the Board of Commissioners on the following conditions:
   a. Replacing the members of the Board of Commissioners that resign or are dismissed from the position; as well as
   b. Filing in the new position in the Board of Commissioners.

Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris

Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris. Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2021 yang telah dilembagakan melalui Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021.

Composition and Structure of the Board of Commissioners

Throughout 2023 there was no change in the composition and structure of the Board of Commissioners. The composition of the Board of Commissioners as of 31 December 2023 is in accordance with the decision of the 2020 Annual GMS held on May 7, 2021 which was instituted through Deed No. 39 dated May 7, 2021.

Susunan Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position
Rachmat Mulyana Hamami	Komisaris Utama President Commissioner
Mivida Hamami	Komisaris Commissioner
Arief Tarunakarya Surowidjojo	Komisaris Independen Independent Commissioner
Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen Independent Commissioner

Komisaris Independen

Dari komposisi di atas, dapat terlihat bahwa 50% dari jumlah anggota Komisaris ABM merupakan Komisaris Independen dimana hal ini telah melampaui jumlah minimum yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), yaitu paling kurang 30,0% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Arief Tarunakarya Surowidjojo dan Manggi Taruna Habir telah memenuhi kriteria yang harus dimiliki oleh Komisaris Independen, yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan ABM dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada ABM;

Independent Commissioner

The Board composition confirmed 50% of the total members of the ABM's Board of Commissioners were composed of Independent Commissioners, thus exceeding the minimum amount required in OJK Regulation No. 33/ POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014"), requiring the composition that is at least 30.0% of the total number of members of the Board of Commissioners.

Mr. Arief Tarunakarya Surowidjojo and Mr. Manggi Taruna Habir have met the criteria required to be the Independent Commissioners, namely:

1. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of ABM within the last 6 months, except that he or she is reappointed as Independent Commissioner for the following period;
2. Does not have direct or indirect shares in ABM;

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan ABM, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Saham Mayoritas atau Pemegang Saham Pengendali ABM; serta
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ABM.

3. Have no affiliation with ABM, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Majority Shareholder/Majority Share or Controlling Shareholder of ABM;
4. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to ABM's business activities

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen yang Menjabat Lebih dari 2 Periode
Statement of Independence of Independent Commissioners Who Have Served More Than 2 Periods





Integritas

ABM menjamin seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terdapat anggota Dewan Komisaris terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun termasuk terlibat dalam kejahatan finansial, ABM akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkap Jabatan

Selain itu, Dewan Komisaris juga diperbolehkan memiliki rangkap jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik;
2. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik;
3. Apabila anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain; dan
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris telah disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini. Seluruh rangkap jabatan yang dimiliki Dewan Komisaris tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang diberlakukan.

Pedoman Kerja

ABM memiliki *Board Manual* sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris, di mana Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi No. 009/ABM-RES/DIR/VII/2017 dan No. 032/ABM-BOC-CIR/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.

Integrity

ABM ensures that all members of the Board of Commissioners possess integrity, uphold moral values, and adhere to applicable laws and regulations.

If any member of the Board of Commissioners is proven to have committed violations in any forms, including being involved in financial crimes, ABM will follow up on the violation case in accordance with the provisions in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Concurrent Position

In addition, the Board of Commissioners is allowed to have concurrent positions only if they are not against the prevailing regulations on conditions that:

1. Only at 2 issuers of public companies at most for the members of Board of Director;
2. Only at 2 issuers or public companies at most for the members of Board of Commissioners;
3. If the members of Board of Commissioners do not concurrently serve members of Board of Directors, the members of Board of Commissioners concerned can serve as members of Board of Commissioners only at 4 other issuers or public companies; and
4. Members of Board of Commissioners can concurrently serve as a member of a committee at 5 issuers or public companies where he/she serves as member of Board of Directors or of Board of Commissioners.

Concurrent positions of each member of Board of Commissioners are presented in the section of Profile of Board of Commissioners of the Annual Report. All concurrent positions held by the Board of Commissioners do not violate the applicable rules and regulations.

Board Manual

ABM has a Board Manual serving as a working guide for the Board of Commissioners. The Board of Commissioners and Directors Work Procedure Guidelines in the Board Manual were ratified through Decree No. 009/ABM-RES/DIR/VII/2017 and No. 032/ABM-BOC-CIR/VII/2017 dated August 22, 2017.

Board Manual ini menjadi pedoman pokok bagi pelaksanaan hubungan kerja antar organ Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS ABM yang meliputi tugas, tanggung jawab, wewenang, mekanisme rapat, pengambilan keputusan serta prinsip pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta RUPS.

Informasi lebih lengkap mengenai Board Manual dapat dilihat pada situs web ABM bagian Komitmen Kami> Tata Kelola > Perangkat-Perangkat GCG.

This Board Manual guides the implementation of working relationships between the organs of ABM's Board of Directors, the Board of Commissioners, and the GMS, which includes duties, responsibilities, authorities, meeting mechanisms, decision making as well as the controlling and supervisory principles carried out by the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as GMS.

We present a more comprehensive information about the Board Manual on the ABM's website in the section of Our Commitment> Governance > GCG Devices.

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris di antaranya meliputi:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan ABM oleh Direksi serta memberikan persetujuan atas rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
3. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
4. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan; dan
5. Dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris & Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat menerima bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu tertentu atas biaya ABM.

Adapun pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur secara mandiri yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Duties and Responsibilities

The general duties and responsibilities of the Board of Commissioners include:

1. Supervise the management of ABM by the Board of Directors and give approval to the Company's development plan, Long-Term Work Plan (LTWP), Annual Work Plan (AWP), as well as the implementation of duties, authorities, and responsibilities in line with the provisions of the Articles of Association and decisions of the GMS as well as applicable laws and regulations;
2. Perform duties particularly assigned to him/her according to the Articles of Association, applicable laws and regulations, and/or based on the decision of the GMS;
3. Do research and reviews over the Annual Report prepared by the Board of Directors and sign the report;
4. Provide opinions and suggestions in accordance with the supervisory duties of the Board of Commissioners to the GMS regarding any other issues deemed important to the management of the Company; and
5. And others as stipulated in the Manual of the Board of Commissioners & Board of Directors.

In addition the Board of Commissioners can also assign an expert hired for certain period of assignment at ABM's expense.

The segregation of duties among members of the Board of Commissioners are independently done as seen on the table below:

Jabatan Position	Pembagian Tugas Division of Duties
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama President Commissioner	Mengoordinasi seluruh kegiatan Dewan Komisaris. Memimpin jalannya Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi. To coordinate the whole activities of the Board of Commissioners; and To lead the Meeting of the Board of Commissioners and Joint Meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors.
Mivida Hamami Komisaris Commissioner	Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan ABM oleh Direksi. To supervise the management of ABM run by the Board of Directors.
Arief Tarunakarya Surowidjojo dan Manggi Taruna Habir Komisaris Independen Independent Commissioner	Bertindak selaku ketua Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi perusahaan atau jabatan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acting as Chairman of Audit Committee as well as Nomination and Remuneration Committee of the company or serve other positions required by the prevailing laws.

Program Peningkatan Kompetensi

ABM memiliki kebijakan terkait program peningkatan kompetensi yang diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kompetensi berupa seminar dan pelatihan harus menyajikan presentasi untuk anggota Dewan Komisaris lain guna berbagi informasi dan pengetahuan serta bertanggung jawab membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kompetensi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Competency Improvement Program

ABM has issued policies relating to competency improvement programs as outlined in the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners. Each member of the Board of Commissioners who takes part in the competency improvement programs, such as seminars and trainings, must give a presentation for other members of the Board of Commissioners to share information and knowledge as well as be responsible for making reports on the implementation of competency development programs, which will be further submitted to the Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2023, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh setiap anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, our members of Board of Commissioners have attended the following competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	**Materi Pendidikan dan Pelatihan** Education and Training Materials	**Tempat dan Waktu** Vanue and Date	**Penyelenggara** Organizer
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner	Asean Indo Pacific Forum (AIPF) 2023	Jakarta, 6 September 2023 Jakarta, September 6, 2023	Asean Indo Pacific Forum (AIPF)
Mivida Hamami Komisaris | Commissioner	Technology and Digital Transformations in Business	Jakarta, 28 Juli 2023 Jakarta, July 28, 2023	PT Mahadana Dasha Utama
	Assessment & Quantification of Liability Risk Exposures	Jakarta, 7 Desember 2023 Jakarta, December 7, 2023	PT Mahadana Dasha Utama
Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner	Sesi diskusi publik dengan delegasi Leiden Law School, Leiden University, The Netherlands Public discussion session with delegates from the Leiden Law School of Leiden University, the Netherlands	Jakarta, 12 Mei 2023 Jakarta, May 12, 2023	STHI Jentera
	Sesi pelatihan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Dasar 2 *Batch* 12 tentang *Good Corporate Governance* Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) Basic 2 Batch 12 training session on Good Corporate Governance	Jakarta, 14 Mei 2023 Jakarta, May 14, 2023	STHI Jentera bersama HKHPM Indonesian College of Law Jentera and the Capital Market Legal Consultants Association
	Sesi pelatihan hukum perusahaan untuk staf bagian hukum PT Pertamina Hulu Energi (*Batch* 1) Corporate law training session for the legal staff of PT Pertamina Hulu Energi (Batch 1)	Jakarta, 27 Juni 2023 Jakarta, June 27, 2023	STHI Jentera bersama Pertamina Hulu Energi Indonesian College of Law Jentera and Pertamina Hulu Energi
	Seminar dalam rangka HUT ICEL Ke-30: Mewujudkan Hukum Perubahan Iklim yang Berkeadilan: Pembelajaran dari Gerakan Hukum Lingkungan Indonesia Masa ke Masa Seminar in the context of ICEL's 30th Anniversary: "Realizing Just Climate Change Law: Lessons from the Indonesian Environmental Law Movement from Era to Era"	Jakarta, 24 Agustus 2023 Jakarta, August 24, 2023	ICEL
	Sesi pelatihan hukum perusahaan untuk staf bagian hukum PT Pertamina Hulu Energi (*Batch* 2) Corporate law training session for the legal staff of PT Pertamina Hulu Energi (Batch 2)	Jakarta, 15 September 2023 Jakarta, September 15, 2023	STHI Jentera bersama Pertamina Hulu Energi Indonesian College of Law Jentera and Pertamina Hulu Energi
	Sesi pelatihan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Dasar 2 *Batch* 13 tentang *Good Corporate Governance* *Capital* Market Legal Consultants Association (HKHPM) Basic 2 Batch 13 training session on Good Corporate Governance	Jakarta, 5 November 2023 Jakarta, November 5, 2023	STHI Jentera bersama HKHPM Indonesian College of Law Jentera and the Capital Market Legal Consultants Association
	Seminar Internasional tentang *"the European Union GreenBond Standard"* International Seminar on "the European Union Green Bond Standard"	Jakarta, 16 November 2023 Jakarta, November 16, 2023	STHI Jentera bersama Leiden School of Law Indonesian College of Law Jentera and the Leiden School of Law
	Kuliah Umum *"the Role of Societies in Democracies"* Corporate law training session for the legal staff of PT Pertamina Hulu Energi (Batch 2)	Jakarta, November 20, 2023	STHI Jentera and the School of Law University or Melbourne
	Pelatihan Aspek Hukum Korporasi Dalam Pembentukan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Training on Corporate Legal Aspects in the Formation of Financial Conglomeration Holding Companies	Jakarta, 15 Desember 2023 Jakarta, December 15, 2023	STHI Jentera bersama OJK Indonesian College of Law Jentera and the Financial Services Authority

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Vanue and Date	Penyelenggara Organizer
	SMR *Refreshment: Economic and Political Outlook 2024* Risk Management Certification (SMR) Refreshment: Economic and Political Outlook 2024	Jakarta, 27 Oktober 2023 Jakarta, October 27, 2023	PT Bank Jago Tbk
	Seminar Perkembangan Terbaru *Peer To Peer Lending* (P2P Lending) di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Seminar on the Latest Developments of Peer To Peer Lending (P2P Lending) in Indonesia Based on Financial Services Authority Regulation No. 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services	Jakarta, 15 Februari 2023 Jakarta, February 15, 2023	HKHPM Capital Market Legal Consultants Association

Program Orientasi Bagi Dewan Komisaris Baru

ABM memiliki kebijakan dalam memberikan pemahaman atas kondisi Perusahaan kepada Dewan Komisaris yang baru. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan program orientasi tersebut dengan materi sekurang-kurangnya meliputi:

- Pengenalan kegiatan operasional Perusahaan;
- Peraturan perundang-undangan terkait kegiatan usaha Perusahaan;
- Aspek GCG di Perusahaan;
- Program kerja/kegiatan Dewan Komisaris dalam tahun buku berjalan; serta
- Mekanisme rapat dan pengambilan keputusan Dewan Komisaris.

Pada tahun 2023, tidak terdapat program orientasi yang diberikan mengingat tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris ABM telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi:

1. Mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi secara keseluruhan;
2. Mengawasi proses bisnis rencana investasi yang akan dilakukan oleh ABM;
3. mengawasi penentuan struktur remunerasi eksekutif di Grup ABM;
4. Mengeluarkan 3 Surat Keputusan dan 6 Keputusan Dewan Komisaris terkait persetujuan fasilitas *loan*.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Evaluasi dan penilaian atas organ pendukung dilakukan Dewan Komisaris, yaitu penilaian kinerja Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi serta Komite ESG, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan menggunakan sistem *self-assessment*, *peer evaluation*, atau dengan sistem lain untuk diputuskan dalam rapat internal Dewan Komisaris.

Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan kinerja komite-komite sepanjang tahun buku dengan pencapaian target yang telah dicanangkan dalam rencana kerja tahunan.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi, dan Komite ESG telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan penilaian kinerja yang ditetapkan.

tion Program for New Member of the Board of Commissioners and Directors

ABM has a policy of ensuring that new members of the Board of Commissioners gain a comprehensive understanding of the Company's operations and conditions. The Corporate Secretary is responsible for implementing the orientation program which presents the following materials:

- The Introduction to the Company's operational activities;
- Regulations relating to the Company's business;
- GCG aspect of the Company;
- Activity programs of the Board of Commissioners for the current financial year; and
- Board of Commissioners' meeting and decision making.

In 2023, we did not hold an orientation program as there was no appointment of new member of Board of Directors and/or of Board of Commissioners.

Completion of Duties in 2023

Throughout 2023 ABM's Board of Commissioners has fulfilled the following duties and responsibilities:

1. Overseeing the whole management of the company by the Board of Directors;
2. Overseeing the business process of the investment plan by ABM;
3. Overseeing the determination of the executive remuneration structure within ABM Group; and
4. Issued 3 Decrees and 6 Decrees from the Board of Commissioners regarding approval of loan facilities.

Performance Assessments Upon Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts evaluations and assessments of supporting organs, including the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Investment Committee, and ESG Committee, at least once a year. This assessment utilizes a self-assessment system, peer evaluation, or another system determined during internal meetings of the Board of Commissioners.

The assessment is carried out by comparing the performance of these committees throughout the financial year with the fulfilment of targets set forth in the annual work plan.

The results of the 2023 assessment suggested that the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Investment Committee, and ESG Committee have all carried out their duties and responsibilities properly in accordance with the established procedures. The details of performance assessments are as follows:

DIREKSI
Board of Directors

Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketentuan Masa Jabatan
Masa jabatan anggota Direksi adalah tiga tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menjabat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 setelah pengangkatannya, namun dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya;
2. Menjabat hingga sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya; dan
   b. Mengisi posisi baru dalam Direksi.

Susunan dan Komposisi Direksi
Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi. Susunan Direksi per 31 Desember 2023 sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 7 Mei 2021 yang telah dilembagakan melalui Akta No. 39 tanggal 7 Mei 2021.

Board of Directors is an organ responsible for managing the Company in the interest and the objectives of the Company as well as represent the Company in and outside the court.

Term of Office
Terms of office of members of Board of Directors is three years on the following conditions:
1. To serve for the period starting of the date of the GMS that appoints him/her until the closing of the third GMS after his/her appointment, yet he or she can be reappointed for another subsequent period;
2. To serve until the remaining terms of the other serving members of Board of Directors based on the following conditions:
   a. Replace other members of Board of Directors who resign or are dismissed from the positions; and
   b. Fill in the new positions in the Board of Directors.

Structure and Composition of the Board of Directors
Throughout 2023 there was no change in the structure and composition of the Board of Directors. The composition of the Board of Directors as of December 31, 2023 is in accordance with the resolution of the 2020 Annual GMS held on May 7, 2021 which was instituted through Deed No. 39 dated 7 May 2021.

Susunan Direksi
Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position
Achmad Ananda Djajanegara	Direktur Utama President Director
Adrian Erlangga	Direktur Director
Haris Mustarto	Direktur Director

Integritas
ABM menjamin seluruh anggota Direksi memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat anggota Direksi terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun termasuk terlibat dalam kejahatan finansial, ABM akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rangkap Jabatan
Sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Direksi diperbolehkan memiliki rangkap jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik;
2. Anggota Direksi paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik lain; dan
3. Anggota Direksi dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Integrity
ABM ensures that all members of the Board of Directors maintain integrity, uphold moral values, and adhere to applicable laws and regulations. If any members of the Board of Directors re proven to have committed violations in any forms, including being involved in financial crimes, ABM will follow up on the violation case in accordance with the provisions in the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Concurrent Positions
Pursuant to applicable regulations and legislation, Directors are permitted to hold multiple positions under the following conditions:
1. The members of the Board of Directors can serve other positions at 1 issuer or public company at most;
2. Members of Board of Directors can serve other positions at 3 issuers or companies at most; and
3. Members of Board of Directors can serve as members of committee at 5 issuers or public companies at most, where he/she serves as a member of Board of Directors or a member of Board of Commissioners.

Rangkap jabatan masing-masing anggota Direksi telah disajikan pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Seluruh rangkap jabatan yang dimiliki Direksi tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang diberlakukan.

Concurrent positions of each member of Board of Directors are presented in the Chapter of Company Profile of the Annual Report. All concurrent positions held by the Board of Directors do not violate the applicable rules and regulations.

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada *Board Manual* sebagaimana telah diuraikan pada bagian Dewan Komisaris pada laporan tahunan ini.

Informasi selengkapnya mengenai *Board Manual* dapat dilihat pada laman (situs *web*) bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Perangkat-perangkat GCG.

Work Guidelines

Board of Directors is guided with Board Manual in running the duties and responsibilities as further elaborated in the section of Board of Commissioners on this annual report.

More information about the Board Manual is available on the website in the section of the Our Commitment > Governance > GCG Tools

Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual*, tugas dan tanggung jawab Direksi di antaranya adalah:

1. Melaksanakan pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta mewakili ABM, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
3. Menjaga independensi Direksi dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan;
4. Mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
5. Menyampaikan apabila ada keberatan atau pendapat yang berbeda (*dissenting opinion/comment*) atas keputusan Direksi yang memiliki potensi tidak menguntungkan dan/atau merugikan Perusahaan. Pendapat anggota Direksi yang berbeda menjadi bukti pembebasan tanggung jawab secara internal atas keputusan Direksi yang dimaksud; dan
6. Membentuk komite yang dianggap perlu untuk membantu pengurusan Perusahaan. Komite yang bernaung di bawah Direksi wajib memiliki suatu pedoman kerja yang disetujui Direksi dalam melaksanakan tugasnya.

Duties and Responsibilities

As outlined in the Board Manual, the duties and responsibilities of the Board of Directors encompass:

1. To manage the company in the interests and objectives of the Company and act as the management leader, as well as represent ABM, both inside and outside the court;
2. To maintain and manage the Company's assets;
3. To secure the independence of the Board of Directors by not carrying out activities that may interfere with its independence in managing the Company;
4. To represent the Company inside and outside the court and carry out all actions and deeds within the scope of the management and ownership of the Company's assets and bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, with the restrictions set forth in the Articles of Association;
5. To convey if there are objections or dissenting opinions/comments toward the decisions of the Board of Directors, which are potentially detrimental to the Company. The dissenting opinions among members of the Board of Directors become internal evidence of the release of responsibility for the decision of the Board of Directors concerned; and
6. To establish a necessary committee to assist in the management of the Company. The Committees under Board of Directors have work manual which has been approved by the Board of Directors to guide them in the duty implementation.

Selain itu, terdapat beberapa tindakan Direksi dalam pengelolaan ABM Group membutuhkan persetujuan baik dari Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham melalui RUPS. Tindakan-tindakan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

In addition, the Board of Directors undertakes several actions in managing the ABM Group that require approval from both the Board of Commissioners and Shareholders through the GMS. The actions in question can be seen in the following table.

Tindakan Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan yang Memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris
Board of Directors' Actions that Require written Approval from Board of Commissioners

• Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan;	• To borrow or lend money on behalf of the Company;
• *Merger* atau akuisisi (termasuk akuisisi yang tidak menimbulkan pengambilalihan), *joint venture*, dan *joint operation*;	• Merger or acquisition (including acquisition that does not lead to a takeover), joint venture, and joint operation
• Pendirian Entitas Anak Perusahaan;	• Establishment of the Company's Subsidiaries;
• Membuka cabang Perusahaan;	• Branch opening;
• Menjual saham Entitas Anak;	• Sale of Shares of the Subsidiaries;
• Menjual 50% aset Perusahaan;	• Sale of 50% of the Company's assets;
• Menjaminkan 50% aset Perusahaan;	• To pledge 50% of the Company's assets;
• Investasi/proyek/tender;	• Investment/Project/Tender;
• PHK massal;	• Mass layoff;
• Penggajian dan bonus Direksi;	• Providing salaries and bonuses for Board of Directors;
• Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP);	• Annual Work Plan and Long Term Plan;
• Laporan Tahunan Perusahaan;	• The Company's Annual Report;
• Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan;	• The Company's Annual Financial Statements;
• Penghapusan aset, piutang, dan penagihan (*ad hoc*);	• Write-offs of assets, trade receivables, and collection (adhoc);
• Dividen interim;	• Interim dividend;
• Membeli kembali saham dan/atau menjual surat berharga yang diterbitkan Perusahaan di pasar modal/lembaga keuangan;	• Buy back shares and/or sale of securities issued by the Company in capital market;
• Menyewakan aset untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun;	• Lease of assets for more than 3 years; and
• Mengikat Perusahaan menjadi penjamin.	• To bind the Company as the guarantor.

Tindakan Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan yang Memerlukan Persetujuan RUPS Board of Directors' Actions that Require written Approval from GMS	
• Mengubah Anggaran Dasar; • Penggabungan usaha; • Peleburan; • Pengambilalihan; • Pemisahan usaha; • Pengajuan permohonan pailit; • Perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan; • Pembubaran Perusahaan; • Menjaminkan lebih dari 50% aset Perusahaan; • Meningkatkan/mengurangi modal ditempatkan dan modal disetor; • Membeli kembali saham (*buyback*) atau efek pada pasar modal atau lembaga keuangan lainnya; • Pelepasan serta pelunasan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; • Mengikat Perusahaan menjadi penjamin; • Perubahan pengurus Perusahaan; • Penetapan bonus, gaji, serta tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi; • Penetapan auditor independen atau kantor akuntan publik.	• To amend the Articles of Association; • Consolidation of business; • Merger; • Acquisition; • Spin-off; • Bankruptcy proposal; • Extension of the establishment period of the Company; • The Company dismissal; • To pledge 50% of the Company's assets; • To increase/reduce the issued and paid-up capital; • To buy back shares or securities in the capital market or other financial institutions; • Release and discharge of the responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors; • To bind the Company as the guarantor; • Change of management of the Company; • The determination of bonus, salaries, as well as allowances for Board of Commissioners and Board of Directors; • The determination of independent auditors or public accountant firm.

Pembagian Tugas Direksi	Segregation of Duties Among Board of Directors
Tugas Pokok Direktur Utama Main Duties of President Directors	• Memberikan arahan dan mengendalikan Kebijakan, Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan. To give direction and control over the Company's Policy, Vision, Mission, and Strategy; • Mengoordinasikan pemecahan masalah Perusahaan, kebijakan perencanaan, pengendalian, pencapaian sasaran jangka panjang Perusahaan, kebijakan audit, peningkatan budaya, citra, dan Tata Kelola Perusahaan (GCG). To coordinate the resolutions to the corporate issues, planning, controlling, achieving the Company's long-term goals, audit policies, improving culture, image, and Good Corporate Governance (GCG); • Merumuskan, menyempurnakan, dan melaksanakan rencana pengembangan bisnis baru Grup ABM. To formulate, refine and execute ABM Group's new business development plan; and • Membawahi Unit Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan, serta departemen-departemen *Business Process Improvement*, *Corporate Planning Budgeting*, *Transformation & Growth*, serta Divisi *Strategic Planning & Business Development*. To manage the Internal Audit Unit and Corporate Secretary, as well as the departments of Business Process Improvement, Corporate Planning, Budgeting, Transformation & Growth, and Strategic Planning &; Business Development Division.

Tugas Pokok Direksi[1]
Main Duties of The Board of Directors[1]

- Melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan Perusahaan, bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan[2];
  To manage the Company in the interests and objectives of the Company, act as the management leader, and represent the Company both inside and outside the court[2];
- Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
  To maintain and manage the Company's assets;
- Menjaga independensi Direksi dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan;
  To secure the independence of the Board of Directors by not carrying out activities that may interfere with its independence in managing the Company;
- Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan saham miliknya dan/atau keluarganya di Perusahaan atau Grup ABM berikut perubahannya paling lambat 3 hari kerja sejak terjadinya transaksi dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari kerja sejak terjadinya transaksi[3]. Laporan kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau keluarganya pada perusahaan di luar Perusahaan dan Grup ABM menjadi wajib saat perusahaan dimaksud terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan dan/atau Grup ABM termasuk, namun tidak terbatas dalam bentuk vendor, supplier, atau kerja sama usaha;
  To report to the Company regarding the share ownership by him and/her or his/her family in the Company or ABM Group including the changes no later than 3 working days from the occurrence of the transaction and report it to the Financial Services Authority no later than 10 working days from the transaction date[3]. Reports on the share ownership of members of the Board of Directors and/or their families in companies outside the Company and the ABM Group become mandatory when the company is involved in the business activities of the Company and/or the ABM Group including, but not limited to vendors, suppliers, or business cooperation;
- Melaporkan kepada Perusahaan apabila terdapat potensi benturan kepentingan atas suatu transaksi di Perusahaan atau di Grup ABM paling lambat 5 hari kerja sebelum transaksi dilakukan;
  Report to the Company if there is a potential conflict of interest in a transaction in the Company or in the ABM Group no later than 5 working days before the transaction is made;
- Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan serta dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengikat Perusahaan;
  The Board of Directors secures the rights to represent the Company in and out of court and to carry out all actions and the deeds both regarding the management and ownership of the Company's assets as well as bind the Company with other parties and/or other parties with the Company, with the restrictions set forth in Articles of Association of the Company;
- Anggota Direksi wajib menyampaikan apabila ada keberatan atau pendapat yang berbeda atas keputusan Direksi yang memiliki potensi tidak menguntungkan atau merugikan Perusahaan. Pendapat anggota Direksi yang berbeda menjadi bukti pembebasan tanggung jawab secara internal atas keputusan Direksi yang dimaksud;
  Members of the Board of Directors are required to submit if there are dissenting opinions upon the decisions of the Board of Directors, which are detrimental to the Company. The dissenting opinions among members of the Board of Directors become internal evidence of the release of responsibility for the decision of the Board of Directors concerned; and
- Direksi berhak membentuk komite yang dianggap perlu untuk membantu pengurusan Perusahaan. Komite yang bernaung di bawah Direksi wajib memiliki suatu pedoman kerja yang disetujui Direksi dalam melaksanakan tugasnya;
  The Board of Directors secures the rights to establish the committees deemed necessary to assist in the management of the Company. The Committees under the Board of Directors must have a work guideline approved by the Board of Directors to guide them in the duty implementation.

Keterangan | Notes:
1. Direksi Perusahaan terdiri atas Direktur Utama dan Direktur.
   Board of Directors of the Company consists of President Director and the Directors.
2. Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 18 berdasarkan akta No. 52 tanggal 10 Mei 2023.
   Article 18 of the Company's Articles of Association based on deed no. 52 dated May 10, 2023.
3. Praktik ASEAN ACGS yang dipublikasikan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF) pada bulan Mei 2017.
   ACGS practices published by ASEAN Capital Market Forum (ACMF) in May 2017

Program Peningkatan Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi, ABM memiliki kebijakan terkait program peningkatan kompetensi yang diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kompetensi berupa seminar dan pelatihan harus menyajikan presentasi untuk anggota Direksi lain guna berbagi informasi dan pengetahuan serta bertanggung jawab membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kompetensi untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Competency Development Program

To pursue the more effective duty implementation of the Board of Directors, ABM has already had competency development program which is further elaborated in the Board of Directors' Work Plan and Budget. Each member of Board of Directors participating in competency development programs, such as seminar and training, shall make a presentation for other members of Board of Directors to share information and insights as well as shall be submit a report on the implementation of the competency development program to the Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2023, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh setiap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, the competency development programs in which our Board of Directors participated in were:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama President Director	*Executive Forum: Understanding Risk Management & Insurance*	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	ABM/Willis Towers Watson
	Technology Day: Artificial Intelligence: Shaping the Future of Work	Jakarta, 29 Agustus 2023 Jakarta, August 29, 2023	ABM
Adrian Erlangga Direktur Director	*Insight of Financial Outlook*	Jakarta, 14 Maret 2023 Jakarta, March 14, 2023	Sinarmas Group
	OCBC NISP *Bu siness Forum*	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	Bank OCBC NISP
	Executive Forum : Understanding Risk Management & Insurance	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	ABM
	ASEAN *Energy Business Forum (Coal Award*)	Jakarta, 25 Agustus 2023 Jakarta, August 25, 2023	Departemen Energi & Sumber Daya Mineral RI
	Workshop Port & Barging	Jakarta, 5 September 2023 Jakarta, September 5, 2023	MVC ABM
	Workshop Port & Barging	Jakarta, 12 September 2023 Jakarta, September 12, 2023	MVC ABM
	Sharing session SafeMine program	Jakarta, 6 Oktober 2023 Jakarta, October 6, 2023	McKinsey & Company
Haris Mustarto Direktur Director	*Executive Forum : Understanding Risk Management & Insurance*	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	ABM
	Executive Session : Building a Culture toward Future Proof Organization	Jakarta, 31 Oktober 2023 Jakarta, October 31, 2023	Mahadana Dasha Utama

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

ABM memiliki kebijakan dalam memberikan pemahaman atas kondisi Perusahaan kepada Direksi yang baru. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk melaksanakan program orientasi tersebut dengan materi sekurang-kurangnya meliputi:

- Kondisi industri batu bara dan industri penunjang lainnya;
- Profil Perusahaan;
- Operasional dan produksi Perusahaan; dan
- Kinerja keuangan Perusahaan.

Pada tahun 2023, tidak terdapat program orientasi yang diberikan mengingat tidak terdapat anggota Direksi baru yang diangkat.

Orientation Program for New Members of The Board of Directors

ABM implements a policy aimed at familiarizing new Directors with the Company's operational landscape and conditions. The Corporate Secretary is responsible for implementing the orientation program, which covers the following materials:

- The condition of coal industry and other supporting industries;
- Company Profile;
- The Company's operations and production; and
- The Company's financial statements.

In 2023, we did not hold an orientation program as there was no appointment of new member of Board of Directors and/or of Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Tugas/Fungsi di Bawah Direksi

Secara berkala, Direksi melakukan penilaian terhadap kinerja komite dan unit tugas/fungsi serta seluruh organ pendukung pelaksanaan tugasnya, yaitu Komite *Group Executive Management*, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem *self-assessment*, *peer evaluation*, atau dengan sistem lain untuk diputuskan dalam rapat internal Direksi.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2023, seluruh Komite dan organ-organ pendukung Direksi lainnya telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prosedur dan penilaian kinerja yang ditetapkan.

Assessment of Performance of Committees and Task/ Funciton Units Under Board of Directors

The Board of Directors periodically assesses the performance of committees and task/function units as well as all organs supporting the implementation of their duties, namely the Group Executive Management Committee, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management. The assessment is carried out using a self-assessment system, peer evaluation, or with other systems to be decided in an internal meeting of the Board of Directors.

In 2023, all Committees and supporting organs of Board of Directors have completed their duties and responsibilities in accordance with the standard procedures and performance evaluation.

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Prosedur Penilaian Kinerja Performance Assessment Procedure	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Hasil Penilaian Kinerja Performance Assessment Result
Setiap bulannya, Sekretaris Perusahaan menyampaikan laporan kinerja kepada Direktur Utama. Every month, the Corporate Secretary submits a performance report to the President Director.	Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Conformity between plan and implementation.	• Seluruh program Sekretaris Perusahaan tahun 2023 yang disetujui oleh Direksi telah terlaksana; dan • Tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap pengungkapan informasi berdasarkan peraturan pasar modal. • All Corporate Secretary programs for 2023 approved by the Board of Directors have been implemented; and • There was no non-compliance with the disclosure of information under capital market regulations.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

Prosedur Penilaian Kinerja Performance Assessment Procedure	Kriteria Penilaian Assessment Criteria	Hasil Penilaian Kinerja Performance Assessment Result
Secara mandiri (*self-assessment*) setiap 3 bulan sekali dengan control dan *monitoring* dari Komite Audit dan Direktur Utama Perusahaan. Self-assessment every 3 months with control and monitoring from the Audit Committee and President Director of the Company.	Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan audit, termasuk terkait penanganan pelaporan pelanggaran. Conformity between plan with the implementation of the audit, including related to handling violation reporting.	Program Unit Audit Internal telah disetujui oleh Direksi dan telah terlaksana. The Internal Audit Unit program has been approved by the Board of Directors and has been implemented.

TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Information Transparency of the Board of Commissioners and Board of Directors

Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Selain mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan ABM, ABM juga memperhatikan unsur keberagaman dalam menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Mekanisme nominasi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan melalui *Group Executive Management* (GEM) senantiasa memperhatikan keberagaman pendidikan, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin dengan standar nominasi berbasis kompetensi dan posisi yang dibutuhkan dalam Grup ABM. Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, ABM memerhatikan keberagaman komposisi sebagai bagian dari Kode Etika dan Perilaku Perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi ABM telah memenuhi unsur keberagaman yang dapat dilihat secara rinci pada bagian Profil Dewan Komisaris dan Direksi. Secara ringkas, pemenuhan unsur keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi disajikan pada tabel berikut ini:

Diversity in the Board of Commissioners and Board of Directors

Not only consider ABM's condition and its business needs, we also respect the diversity aspect in determining the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Mechanism of nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors which is done through Group Executive Management (GEM) always respect the diversity in terms of education, work experience, age and gender aspects with competence-based nomination standards and the positions required by the ABM Group. ABM considers diverse composition as part of the Company's Code of Ethics and Conduct during the nomination process of the Board of Commissioners and Directors.

The composition of ABM's Board of Commissioners and Board of Directors has fulfilled the diversity aspect which we detail out in the Profile of Board of Commissioners and Board of Directors. In brief, the fulfilment of diversity aspect in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors is reported in the following table:

Aspek Keberagaman Diversity Aspect	Keterangan Description
Pendidikan Education	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari S1 hingga S2 jurusan Pendidikan Bisnis, Administrasi, Administrasi Niaga, Pemasaran, Administrasi Bisnis, Hukum, Akuntansi, Teknologi Pertanian, dan Keuangan. Members of the Company's Board of Commissioners come diverse educational backgrounds, ranging from the holders of S1 to S2 degrees majoring in Business Education, Administration, Business Administration, Marketing, Law, Accounting, Agriculture Technology, and Finance.
Pengalaman Kerja Work Experience	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pengalaman kerja yang beragam yang berasal dari kalangan profesional, baik dari industri yang sejenis dengan Perusahaan ataupun di luar industri batu bara. Members of the Board of Commissioners bring with him/her a diverse work experience from professionals, both from industries similar to the Company and outside the coal industry.
Usia Age	Rata-rata usia anggota Dewan Komisaris berada di rentang usia antara 59-70 tahun. Sedangkan rata-rata usia anggota Direksi berada di rentang usia 56-58 tahun. The average age of members of the Board of Commissioners ranges between 58-69 years.
Jenis Kelamin Gender	Terdapat 1 orang wanita yang menjabat sebagai Komisaris Perusahaan. There was only one female commissioner of the Company.

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Berikut adalah pengungkapan hubungan afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang Saham Utama.

Affiliate Relations between the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Main and Controlling Shareholders

The affiliate relations between the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Main and Controlling Shareholders are disclosed in the table below:

Nama Name		Dewan Komisaris Board of Commissioners				Direksi Board of Directors			Pemegang Saham Utama Main and Controlling Shareholders
		Rachmat Mulyana Hamami	Mivida Hamami	Arief Tarunakarya Surowidjojo	Manggi Taruna Habir	Achmad Ananda Djajanegara	Adrian Erlangga	Haris Mustarto	
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Rachmat Mulyana Hamami		√	x	x	x	x	x	√
	Mivida Hamami	√		x	x	x	x	x	√
	Arief Tarunakarya Surowidjojo	x	x		x	x	x	x	x
	Manggi Taruna Habir	x	x	x		x	x	x	x
Direksi Board of Directors	Achmad Ananda Djajanegara	x	x	x	x		x	x	x
	Adrian Erlangga	x	x	x	x	x		x	x
	Haris Mustarto	x	x	x	x	x	x		x

√ : Ada/Yes | x = Tidak ada/Nil

Dari sisi penilaian ESG, terdapat risiko hubungan Dewan Komisaris baik dengan Komisaris lainnya maupun dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan individu-individu yang berintegritas dan independen. ABM senantiasa memastikan tidak terdapat pihak yang dirugikan, terutama pemegang saham minoritas. Dewan Komisaris dan Direksi serta Pemegang Saham Utama senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari benturan kepentingan, khususnya yang berhubungan dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini dapat dipastikan melalui keberadaan ISO 37001:2016 Anti Penyuapan (*Anti-Bribery*) yang memberikan jaminan akan penguatan pelaksanaan prinsip tata kelola, khususnya terkait praktik KKN.

From an ESG assessment standpoint, there may be perceived risks in the relationships between the Board of Commissioners, among themselves, and with the Main and Controlling Shareholders. However, it's crucial to note that all members of the Board of Commissioners and Directors are individuals characterized by integrity and independence. ABM always ensures that no party is harmed, especially minority shareholders. The Board of Commissioners, Directors, and Major Shareholders consistently endeavor to prevent conflicts of interest, particularly those associated with Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. This assurance is reinforced by the presence of ISO 37001:2016 Anti-Bribery standards, which offer assurances for enhancing the adherence to governance principles, particularly concerning KKN practices.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS

Meetings of the Board of Commissioners and Directors and Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the GMS

Rapat Dewan Komisaris

Penyelenggaraan rapat internal wajib dilakukan oleh Dewan Komisaris setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali. Namun demikian, rapat dapat dilaksanakan setiap waktu bila memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
2. Terdapat permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Dewan Komisaris; dan
3. Terdapat permintaan tertulis dari 1 atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama memiliki 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat internal. Risalah dan frekuensi kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Meeting of Board of Commissioners

Internal meetings of the Board of Commissioners must be convened at least once every three months. However, meetings can be arranged at any time provided that the following conditions are met:

1. Deemed necessary by one or more members of the Board of Commissioners;
2. There is a written request from one or more members of the Board of Commissioners; and
3. There is a written request from 1 or more Shareholders who jointly own 1/10 or more of the total number of shares that own voting rights.

Throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings with the attendance rates of each member of the Board of Commissioners presented in the following table:

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2023
Minutes of the Board of Commissioners Internal Meeting in 2023

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20 Januari 2023 January 20, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOD - BOC atas Laporan Kinerja Tahun 2022 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its 2022 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
24 Februari 2023 February 24, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja Januari 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its January 2023 Performance Report	1. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 3. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
24 Maret 2023 March 24, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja Februari 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its February 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
20 April 2023 April 20, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOD - BOC atas Laporan Kinerja Kuartal I 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its Quarter I 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
19 Mei 2023 May 19, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja April 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its April 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
26 Juni 2023 June 26, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja Mei 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its May 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
21 Juli 2023 July 21, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOD - BOC atas Laporan Kinerja Kuartal II 2023 Follow-up on the Quarter II 2023 Performance report on results of the joint BOD - BOC meeting	1. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 3. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
18 Agustus 2023 August 18, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja Juli 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its July 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
22 September 2023 September 22, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja Agustus 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its August 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner
20 Oktober 2023 October 20, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOD - BOC atas Laporan Kinerja Kuartal III 2023 Follow-up on the Quarter III 2023 Performance report on results of the joint BOD - BOC meeting	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 3. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
24 November 2023 November 24, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja Oktober 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its October 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner
15 Desember 2023 December 15, 2023	Menindaklanjuti hasil rapat gabungan BOC - BOD atas Laporan Kinerja November 2023 Following up on the results of a BOD-BOC joint meeting on its November 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | Independent Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Internal Dewan Komisaris Tahun 2023
Recapitulation of the Board of Commissioners Attendance at the Board of Commissioners Internal Meeting in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner	12	10	83,00
Mivida Hamami Komisaris | Commissioner	12	10	83,00
Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner	12	12	100,00
Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner	12	11	92,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance Rate			**90,00**

Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan untuk melakukan pembahasan mengenai agenda-agenda yang lebih spesifik. Sepanjang 2023, Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk mengadakan rapat gabungan sebanyak 8 (delapan)

In addition, the Board of Commissioners is also required to hold a joint meeting with the Board of Directors at least once in 4 months to discuss more specific agenda. Throughout 2023, the Board of Commissioners invites the Board of Directors to hold joint meetings 8 (eight) times. The minutes and frequency of attendance of members of the Board

kali. Risalah dan frekuensi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

of Commissioners and Directors can be seen in the table below.

Risalah Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2023
Minutes of Joint Meetings between Board of Commissioners and Board of Directors in 2023

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
24 Februari 2023 February 24, 2023	Januari 2023 *Performance Report* January 2023 Performance Report	1. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 3. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 5. Adrian Erlangga Direktur	Director 6. Haris Mustarto Direktur	Director
24 Maret 2023 March 24, 2023	Februari 2023 *Performance Report* February 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama	President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 6. Adrian Erlangga Direktur	Director 7. Haris Mustarto Direktur	Director
19 Mei 2023 May 19, 2023	April 2023 *Performance Report* April 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama	President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 6. Adrian Erlangga Direktur	Director 7. Haris Mustarto Direktur	Director
26 Juni 2023 June 26, 2023	Mei 2023 *Performance Report* May 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama	President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 6. Adrian Erlangga Direktur	Director
18 Agustus 2023 August 18, 2023	Juli 2023 *Performance Report* July 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama	President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 6. Adrian Erlangga Direktur	Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
22 September 2023 September 22, 2023	Agustus 2023 *Performance Report* August 2023 Performance Report	1. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 3. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 4. Adrian Erlangga Direktur	Director 5. Haris Mustarto Direktur	Director
24 November 2023 November 24, 2023	Oktober 2023 *Performance Report* October 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama	President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 6. Adrian Erlangga Direktur	Director
15 Desember 2023 December 15, 2023	November 2023 *Performance Report* November 2023 Performance Report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama	President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris	Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen	Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen	Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama	President Director 6. Adrian Erlangga Direktur	Director 7. Haris Mustarto Direktur	Director

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Dewan Komisaris Mengundang Direksi Tahun 2023
Recapitulation of the Attendance of Board of Commissioners and Directors at the Board of Directors Meeting Inviting the Board of Commissioners in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner	8	6	75,00
Mivida Hamami Komisaris | Commissioner	8	8	100,00
Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner	8	8	100,00
Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner	8	7	87,50
Direksi **Board of Directors**			
Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director	8	8	100,00
Adrian Erlangga Direktur | Director	8	8	100,00
Haris Mustarto Direktur | Director	8	5	62,50
Rata-rata Kehadiran Average Attendance Rate			**90,00**

Rapat Direksi

Rapat internal Direksi wajib diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis Pemegang Saham. Jadwal rapat Direksi tercantum dalam *Corporate Calendar* yang disusun terlebih dahulu sebelum awal tahun buku berjalan.

Sepanjang tahun 2023, Direksi menyelenggarakan 51 (lima puluh satu) kali rapat internal dengan rincian tingkat kehadiran setiap anggota Direksi sebagai berikut:

Board of Directors Meeting

Internal meetings of Board of Directors must be held at least once at a month or at any time whenever necessary upon request from the Board of Commissioners or upon a written request from the shareholders. The schedules of Board of Directors meetings are put on the Corporate Calendar which is prepared in advance before the beginning of the current financial year.

Throughout 2023 Board of Directors held 51 (fifty one) Internal meetings with attendance rate of each member of Board of Directors reported as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Direksi pada Rapat Internal Direksi Tahun 2023
Recapitulation of Board of Directors Attendance at the Internal Board of Directors Meeting in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director	51	47	92,16
Adrian Erlangga Direktur | Director	51	43	84,31
Haris Mustarto Direktur | Director	51	45	88,24
Rata-rata Kehadiran Average Attendance Rate			88,24

Risalah Rapat Rapat Internal Direksi Tahun 2023
Minutes of Internal Board of Directors Meetings in 2023

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
3 Januari 2023 January 3, 2023	Laporan inisiatif Direktorat ABM oleh *Group Head* ABM Directorate initiative report by Group Head	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
10 Januari 2023 January 10, 2023	1. AJN - ND *Updates* 2. BB *Assignment 2023* 3. HC ABM *Group Organization Approval* 1. AJN - ND Updates 2. 2023 BB Assignment 3. HC ABM Group Organization Approval	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
17 Januari 2023 January 17, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC Subs (MVC) 2. *Joint Board* BOD - BOC Subs SSB 3. *Joint Board* BOD - BOC Subs CKB Logistics 4. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 3. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics ABM 4. Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
24 Januari 2023 January 24, 2023	1. BSC *Updates* 2. IDPP *Updates* 3. *Risk Management* 1. *BSC Updates* 2. *IDPP Updates* 3. *Risk Management*	1. Adrian Erlangga Direktur | Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director
31 Januari 2023 January 31, 2023	AJN *Updates* AJN Updates	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
7 Februari 2023 February 7, 2023	ABM *Directorate Initiative Report* ABM Directorate Initiative Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
14 Februari 2023 February 14, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. Hasil EES 2022 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. Results of the 2022 EES	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
21 Februari 2023 February 21, 2023	1. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 1. ABM Monthly Performance Console Report 2. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC)	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
28 Februari 2023 February 28, 2023	1. AJN *Updates* 2. BSC *Updates* 3. IDPP *Updates* 4. *Risk Management* 5. MBB *Assignment* 6. Persentasi *Guiding Principle Engine 2* 1. AJN Updates 2. BSC Updates 3. IDPP Updates 4. Risk Management 5. MBB Assignment 6. Presentation on Guiding Principle of Engine 2	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director
7 Maret 2023 March 7, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. *Relayout Office & Temporary Movement Plan* 3. Penyampaian Usulan Penyesuaian KPI *Scoring* MVC 2023 - *Operational Excellence Matrix* 1. ABM Directorate Initiative Report 2. Relayout Office & Temporary Movement Plan 3. Submission of Proposed Adjustments to KPI Scoring MVC 2023 - Operational Excellence Matrix	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
14 Maret 2023 March 14, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
21 Maret 2023 March 21, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
28 Maret 2023 March 28, 2023	1. AJN *Updates* 2. BSC *Updates* 3. IDPP *Updates* 4. *Risk Management* 5. Pemaparan ESG *Initiatives* 6. *Branding Updates & Activation Proposal* 7. HC ABM *Group Organization Structure* 1. AJN Updates 2. BSC Updates 3. IDPP Updates 4. Risk Management 5. Presentation on ESG Initiatives 6. Branding Updates & Activation Proposal 7. HC ABM Group Organization Structure	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
4 April 2023 April 4, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. *Branding Update & Activation Proposal* 3. CIO *Office* & MBB *Organization Approval* 1. ABM Directorate Initiative Report 2. Branding Update & Activation Proposal 3. CIO Office & MBB Organization Approval	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director
11 April 2023 April 11, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BCC *Subs* CKB Logistics 3. *Branding Activation Proposal/Timeline & Brand Leader/Organization* 4. *Relayoting Office* Lantai 18 dan Lantai 8 5. Pembagian Bonus 2022 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BCC Subs CKB Logistics 3. Branding Activation Proposal/Timeline & Brand Leader/Organization 4. Re-layouting Office 18th and 8th Floor 5. Distribution of Bonus for the year 2022	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
18 April 2023 April 18, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. Monthly Performance ABM Consol Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
25 April 2023 April 25, 2023	1. AJN *Updates* 2. HSE *Performance* ABM *Group* Kuartal 1-2023 3. BSC *Updates* 4. IDPP *Updates* 5. *Risk Management* 1. AJN Updates 2. HSE Performance ABM Group Quarter 1 -2023 3. BSC Updates 4. IDPP Updates 5. Risk Management	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director
2 Mei 2023 May 2, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. Hasil Survei Bain Organisasi & Tindak Lanjut 1. ABM Directorate Initiative Report 2. Survey Results for Bain Organizations and Follow-up	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
9 Mei 2023 May 9, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. *Final Presentation Relayout office (timeline and budget) and WFH Management* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. Final Presentation on Re-layouting office (timeline and budget) and WFH Management	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
16 Mei 2023 May 16, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
23 Mei 2023 May 23, 2023	1. BSC *Updates* 2. IDPP *Updates* 3. *Risk Management* 1. BSC Updates 2. IDPP Updates 3. Risk Management	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
30 Mei 2023 May 30, 2023	1. AJN *Updates* 2. Presentasi *Guiding Principle Engine 2* 1. AJN Updates 2. Presentation on Guiding Principle of Engine 2	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
6 Juni 2023 June 6, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. Laporan ESG *benchmark* to ANJ oleh ESG *Working Team* 3. *Data Science Projects and Initiatives Progress Update* 4. CK *Debt to Equity Conversion* 5. ABM *Organization* (*with* BAIN) 1. ABM Directorate Initiative Report 2. Report on ESG benchmark to ANJ by ESG Working Team 3. Data Science Projects and Initiatives Progress Update 4. CK Debt to Equity Conversion 5. ABM Organization (with BAIN)	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
13 Juni 2023 June 13, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. PDQA 2022 *Performance and* PDQA 2023 *Proposal* 4. *Key Talent Band* B dan C 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. PDQA 2022 Performance and PDQA 2023 Proposal 4. Band B and C Key Talents	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
20 Juni 2023 June 20, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	Tidak hadir Absent
27 Juni 2023 June 27, 2023	1. BSC *Updates* 2. IDPP *Updates* 3. *Risk Management* 1. BSC Updates 2. IDPP Updates 3. Risk Management	Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director
4 Juli 2023 July 4, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. AJN *Updates*	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director
11 Juli 2023 July 11, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. *Engine 2 Update* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. Engine 2 Update	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
18 Juli 2023 July 18, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
25 Juli 2023 July 25, 2023	1. AJN *Update* oleh Bapak Suryantoro Prakoso 2. BSC *Updates* 3. IDPP *Updates* 4. *Risk Management* 5. *Branding Activatiwon Updates* oleh Tim MakkiMakki 6. BOD - BOC *Evaluation* oleh Bapak Andreas Purnawan 1. AJN Update by Mr. Suryantoro Prakoso 2. BSC Updates 3. IDPP Updates 4. Risk Management 5. Branding Activation Updates by MakkiMakki Team 6. BOD - BOC Evaluation by Mr. Andreas Purnawan	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
1 Agustus 2023 August 1, 2023	ABM *Directorate Initiative Report* ABM Directorate Initiative Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8 Agustus 2023 August 8, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. *Strategy Kick Off Meeting 2023 - Execution Plan* oleh tim OSM 4. BOD - BOC *Evaluation* oleh Ibu Delianti Naim & tim 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. Strategy for 2023 Kick Off Meeting - Execution Plan by OSM team 4. BOD - BOC Evaluation by Ms. Delianti Naim & team	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
15 Agustus 2023 August 15, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Engine 2 Project* oleh Tim S & CG 3. Laporan Kinerja Bulanan Konsol ABM oleh Tim *Finance* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. Engine 2 Project by S & CG Team 3. ABM Monthly Performance Console Report by Finance Team	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
22 Agustus 2023 August 22, 2023	1. BSC *Updates* 2. IDPP *Updates* 3. *Risk Management* 4. BOD - BOC *Evaluation* oleh Ibu Delianti Naim dan Bapak Mikael 1. BSC Updates 2. IDPP Updates 3. Risk Management 4. BOD - BOC Evaluation by Ms. Delianti Naim dan Mr. Mikael	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
29 Agustus 2023 August 29, 2023	MDB *Update* MDB Update	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
5 September 2023 September 5, 2023	ABM *Directorate Initiative Report* ABM Directorate Initiative Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
12 September 2023 September 12, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. ABM *Group Target Setting* 4. ABM *Re-layout progress & Birthday Event proposal* 5. *Organization Development Update* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. ABM Group Target Setting 4. ABM Re-layout progress & Birthday Event proposal 5. Organization Development Update	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
19 September 2023 September 19, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
29 September 2023 September 29, 2023	1. *Organization update (Corporate vs Org Structure for Shared Services function)* 2. BSC *Updates* 3. IDPP *Updates* 4. *Risk Management* 5. AJN *Updates* 1. Organization update (Corporate vs Org Structure for Shared Services function) 2. BSC Updates 3. IDPP Updates 4. Risk Management 5. AJN Updates	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
3 Oktober 2023 October 3, 2023	ABM *Directorate Initiative Report* ABM Directorate Initiative Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director
10 Oktober 2023 October 10, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. Engine 2 Update 4. *Organization update (Corporate vs Org Structure for Shared Services function)* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. Engine 2 Update 4. Organization update (Corporate vs Org Structure for Shared Services function)	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
17 Oktober 2023 October 17, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
24 Oktober 2023 October 24, 2023	1. BSC + IDPP *Updates* 2. *Site Visit Result* 3. *Procurement Transformation* 1. BSC + IDPP Updates by IDPP & Risk Management Team 2. Site Visit Result by Engine 2 team 3. Procurement Transformation	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
31 Oktober 2023 October 31, 2023	AJN *Updates* AJN Updates	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director
7 November 2023 November 7, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. PDQA 2022 *Final Presentation & Awarding Update* 1. ABM Directorate Initiative Report 2. PDQA 2022 Final Presentation & Awarding Update	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director
14 November 2023 November 14, 2023	1. AJN *Update* 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 3. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 4. *Annual Planning Meeting* 2023 - *event update* 1. AJN Update 2. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 3. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 4. 2023 Annual Planning Meeting - event update	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
21 November 2023 November 21, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
28 November 2023 November 28, 2023	1. BSC *Updates* 2. IDPP *Updates* 3. *Risk Management Updates* 4. BB *Assignment* 5. AJN *Update* oleh Bapak Suryantoro Prakoso 6. *Recommendation of Procurement Transformation* 1. BSC Updates 2. IDPP Updates 3. Risk Management Updates 4. BB Assignment 5. AJN Update 6. Recommendation of Procurement Transformation	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
5 Desember 2023 December 5, 2023	1. ABM *Directorate Initiative Report* 2. AJN & ND *Updates* 3. *Handover BB project* 1. ABM Directorate Initiative Report 2. AJN & ND Updates 3. Handover of BB project	1. Adrian Erlangga Direktur | Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director
12 Desember 2023 December 12, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* SSB 2. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* CKB Logistics 3. *Follow-up of Recommendation for Procurement Transformation* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs SSB 2. Joint Board of BOD - BOC Subs CKB Logistics 3. Follow-up of Recommendation for Procurement Transformation	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Adrian Erlangga Direktur | Director 3. Haris Mustarto Direktur | Director
19 Desember 2023 December 19, 2023	1. *Joint Board* BOD - BOC *Subs* (MVC) 2. *Monthly Performance* ABM *Consol Report* 1. Joint Board of BOD - BOC Subs (MVC) 2. ABM Monthly Performance Console Report	1. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director
26 Desember 2023 December 26, 2023	1. AJN *Updates* 2. BSC *Updates* 3. IDPP *Updates* 4. *Risk Management Updates* 1. AJN Updates 2. BSC Updates 3. IDPP Updates 4. Risk Management Updates	1. Adrian Erlangga Direktur | Director 2. Haris Mustarto Direktur | Director

Di samping itu, Direksi juga wajib menyelenggarakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2023, Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk mengadakan rapat gabungan sebanyak 4 (empat) kali. Risalah dan frekuensi kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

In addition, the Board of Directors are also required to hold joint meetings with Board of Commissioners at least 1 (one) time in 4 (four) months. Throughout 2023, the Board of Directors invites the Board of Commissioners to hold joint meetings 4 (four) times. The minutes and frequency of attendance of members of the Board of Commissioners and Directors can be seen in the table below.

Risalah Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris Tahun 2023
Minutes of Board of Directors Meeting Inviting Board of Commissioners in 2023

Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20 Januari 2023 January 20, 2023	Fiscal Year 2022 *Performance report*	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 6. Adrian Erlangga Direktur | Director 7. Haris Mustarto Direktur | Director

Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20 April 2023 April 20, 2023	Kuartal I 2023 Performance report Quarter I 2023 Performance report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner 2. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 3. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner 5. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 6. Adrian Erlangga Direktur | Director 7. Haris Mustarto Direktur | Director
21 Juli 2023 July 21, 2023	Kuartal II 2023 Performance report Quarter II 2023 Performance report	1. Mivida Hamami Komisaris | Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 3. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 5. Adrian Erlangga Direktur | Director 6. Haris Mustarto Direktur | Director
20 Oktober 2023 October 20, 2023	Kuartal III 2023 Performance report Quarter III 2023 Performance report	1. Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner 3. Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner 4. Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director 5. Adrian Erlangga Direktur | Director 6. Haris Mustarto Direktur | Director

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Direksi Mengundang Dewan Komisaris Tahun 2023
Recapitulation of the Attendance of Board of Commissioners and Directors at the Board of Directors Meeting Inviting the Board of Commissioners in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner	4	3	75,00
Mivida Hamami Komisaris | Commissioner	4	3	75,00
Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner	4	4	100,00
Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner	4	4	100,00
Direksi Board of Directors			
Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director	4	4	100,00
Adrian Erlangga Direktur | Director	4	4	100,00
Haris Mustarto Direktur | Director	4	4	100,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance Rate			**92,86**

Tingkat Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023 adalah sebagai berikut.

Attendance Rate of Member of Board Directors at the GMS

The attendance rate of the Board of Commissioners and Directors at the 2022 Annual GMS held on May 10, 2023 is as follows.

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS
Recapitulation of the Attendance of the Board of Commissioners and Directors at the GMS

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Dewan Komisaris **Board of Commissioners**			
Rachmat Mulyana Hamami Komisaris Utama | President Commissioner	1	1	100,00
Mivida Hamami Komisaris | Commissioner	1	1	100,00
Arief Tarunakarya Surowidjojo Komisaris Independen | Independent Commissioner	1	1	100,00
Manggi Taruna Habir Komisaris Independen | Independent Commissioner	1	1	100,00
Direksi Board of Directors			
Achmad Ananda Djajanegara Direktur Utama | President Director	1	1	100,00
Adrian Erlangga Direktur | Director	1	1	100,00
Haris Mustarto Direktur | Director	1	1	100,00
Rata-rata Kehadiran Average Attendance Rate			**100,00**

Nominasi, Penilaian Kinerja, dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination, Performance Assessment and Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Tata Kelola Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
Sebagai Perusahaan Terbuka, komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris ABM ditetapkan oleh RUPS dan peraturan pasar modal dimana sekurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan yang bebas dari pengaruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang salah satunya harus mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau keuangan. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, calon anggota Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan atas pengangkatannya.

Untuk Direksi, anggota Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang di mana salah satunya menjabat sebagai Direktur Utama. Berdasarkan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, calon anggota Direksi diajukan kepada RUPS untuk dimintakan persetujuan atas pengangkatannya.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Grup ABM diprioritaskan berasal dari lingkungan internal (baik yang menjabat sebagai Direktur Entitas Anak ataupun karyawan yang terpilih dari dalam ABM) yang wajib melalui tahapan pengembangan dan penunjukan. Namun demikian, ABM juga memberikan kesempatan

Governance of Nominations for the Board of Commissioners and Board of Directors

Nomination Policy of Board of Commissioners and Board of Directors
As a Public Company, ABM's Board of Commissioners' composition and the number of its members are determined by the GMS and capital market regulations, where at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners must be Independent Commissioners, originating from circles outside the Company and free from the influence of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Controlling Shareholders. Additionally, one of them must possess a background in accounting and/or finance. Recommendations from the Nomination and Remuneration Committee guide the selection process for prospective members of the Board of Commissioners, who are then presented to the GMS for approval.

For the Board of Directors, there must be at least 2 (two) members, with one serving as the President Director. Proposals for prospective members of the Board of Directors are presented to the GMS for approval, based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

Our priority for candidates of Board of Commissioners and Board of Directors of ABM Group is those from the internal organization (either those serving as Director at the Subsidiaries or ABM's internal employees) who are required to follow every step of the development and appointment. Still, ABM is open to recruitment of candidates or

untuk merekrut anggota Dewan Komisaris atau Direksi dari luar Grup ABM apabila tidak ada karyawan internal yang memenuhi syarat, diwajibkan oleh undang-undang atau terdapat kebijakan resmi pemerintah daerah terkait keberadaan perwakilan pemerintah atau putra daerah sebagai salah satu pimpinan pada jajaran Direksi.

1 (satu) atau lebih pemegang saham dengan kepemilikan saham minimal 10% dengan kepemilikan saham yang sah memiliki hak untuk menominasikan anggota Direksi/Dewan Komisaris. Setiap pengajuan nominasi harus disampaikan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi ABM. Setiap nominasi akan diproses berdasarkan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Proses nominasi dari tingkat Komisaris Utama hingga level *General Manager* di dalam Grup ABM diatur dalam Kebijakan *Board & Management* yang secara lengkap dapat dilihat pada situs web bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris.

Kebijakan Suksesi Direksi

ABM memiliki Kebijakan Suksesi yang dirancang untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang yang telah diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari proses penunjukan, pelatihan, dan pemberian motivasi bagi setiap anggota Direksi di Grup ABM. Rencana suksesi dilakukan melalui pembahan setiap tahun di mana pelaksanaan suksesinya dijalankan oleh ABM sesuai dengan kebutuhan. Dalam dalam proses nominasi anggota Direksi Kebijakan Suksesi telah diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta Kebijakan *Board & Management*. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi di lingkup Grup ABM dapat berasal baik dari internal maupun eksternal. Proses seleksi kandidat dari internal ABM adalah sebagai berikut:

1. **Penunjukan**
   Berlaku bagi karyawan 1 tingkatan di bawah Direksi yang telah mengikuti dan lulus Program *Directorship*.
2. **Pengembangan**
   Dimulai dengan pemberian posisi tambahan di Entitas Anak kepada kandidat tersebut yang disertai dengan penilaian prestasi kandidat tersebut dalam Program *Directorship*.

Proses nominasi, seleksi, pengembangan, dan promosi posisi eksekutif di lingkup Grup ABM dilakukan secara terkoordinir dan terpusat oleh *Group Executive Management* (GEM). Pengembangan eksekutif baru dilakukan oleh GEM sesuai dengan kebutuhan ABM sehubungan dengan rencana suksesi manajemen.

Untuk menentukan suksesor sejumlah jabatan penting seperti Direksi dan anggota manajemen di bawah Direksi, GEM melakukan pemetaan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan Direksi dan anggota manajemen yang akan menjadi suksesor untuk menduduki target posisi yang ditentukan. Untuk memastikan program suksesi telah diterapkan sesuai dengan rencana, GEM dapat memantau pelaksanaan program suksesi yang dikelola oleh Departemen Sumber Daya Manusia ABM.

Informasi lebih lengkap mengenai GEM dapat dilihat pada bagian tersendiri dalam Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

Proses suksesi bagi Direksi ABM (sebagai perusahaan induk) diterapkan melalui mekanisme berjenjang sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

Board of Commissioners or Board of Directors from external ABM Group when none of internal employees can meet the requirements, as regulated by laws or local government's official policies regarding the representatives of local government or of the province as one of the members of Board of Directors.

One of more shareholders with minimum 10% ownership with legal voting rights to nominate the candidates of Board of Commissioners /Board of Directors. Each nominee shall be proposed to ABM Nomination and Remuneration Committee. Each nominee will be processed based on policy and procedures of Nomination and Remuneration Committee.

Nomination process starting from President Commissioner up to General Manager of ABM Group is regulated in Board & Management Policy which is presented comprehensively on the website in the section of Our Commitment > Corporate Governance > Board of Commissioners' Committee.

Succession Policy of the Board of Directors

ABM has a Succession Policy in place, strategically designed to facilitate future leadership regeneration in alignment with applicable laws and regulations. This comprehensive plan encompasses the process of appointing, training, and motivating every member of the Board of Directors within the ABM Group. The succession plan is dynamic, undergoing annual updates to cater to the evolving needs of ABM. The implementation of succession initiatives is meticulously managed by ABM according to these identified requirements. In the nomination process for members of the Board of Directors, the Succession Policy is codified within the Nomination and Remuneration Committee Charter and the Board & Management Policy. Candidates for positions within the Board of Commissioners and Directors at ABM may be sourced from both internal and external channels, ensuring a diverse pool of talent. The ABM's internal selection process is done as follows:

1. **Appointment**
   It is eligible for the employees one level under Board of Directors who have joined and passed the Directorship program.
2. **Development**
   Initiated by establishing an additional position in the Subsidiaries for the candidates whose performance will later be assessed in the Directorship program.

The process of nominating, selecting, developing, and promoting executive positions within the ABM Group is carried out in a coordinated and centralized manner by Group Executive Management (GEM). New executive is developed by GEM in accordance with ABM's needs and with respect to the management succession plan.

To determine the successor of a number of important positions such as the Board of Directors and management members under the Board of Directors, GEM will firstly launch a mapping process, and then prepares the Board of Directors and management members who will be the successors to occupy the specified positions. To ensure that the succession program has been implemented according to the plan, GEM monitors the implementation of the succession program by ABM's Human Resources Department.

A comprehensive information about GEM is available a separate section of this Chapter of Corporate Governance.

The succession process for ABM's Board of Directors (as the parent company) is carried out through a tiered mechanism as described in the following diagram:

Proses Suksesi Direksi di Lingkup ABM
Board of Directors Succession Process in the ABM Scope



Pengangkatan, Kriteria dan Persyaratan, serta Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah sebagai berikut:

1. **Proses Nominasi**
   Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengembangan SDM ditugaskan untuk melaksanakan proses nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
2. **Pengajuan Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

   Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi serta Pengembangan SDM menyerahkan daftar nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diputuskan melalui rapat internal Dewan Komisaris.

3. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**
   Pihak yang tercantum dalam daftar calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi selanjutnya harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*). Para calon anggota yang telah lulus penilaian tersebut akan diajukan dalam RUPS.
4. **Penetapan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi**

   Pengangkatan calon yang telah memenuhi kriteria dan lulus *fit and proper test* melalui persetujuan para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan RUPS.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; serta
   d. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat.
4. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
5. Pertanggungjawabannya sebagai Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.

6. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari otoritas yang bertanggung jawab dalam bidang pasar modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada otoritas yang bertanggung jawab di bidang pasar modal.

Appointment, Criteria and Requrirements, as well as Dismissal of Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The stages of appointment of new members of the Board of Commissioners and Directors are as follows:

1. **Nomination Process**
   The Nomination and Remuneration Committee and Human Resources Development are assigned to carry out the nomination process for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
2. **Proposing the Candidates for Members of the Board of Commissioners and Directors**
   Chairman of Nomination and Remuneration Committee and HR Development will propose a list of names of candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors which are decided through internal meetings of the Board of Commissioners.
3. **Fit and Proper Test**
   Those registered in the list of candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors must then take a fit and proper test. The candidates who have passed the test will be presented at the GMS.
4. **Determination of Members of the Board of Commissioners and Board of Directors**
   Appointment of candidates who have met the criteria and passed the fit and proper test based on the approval of the Shareholders during the implementation of the GMS.

The requirements that must be met by each candidate of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

1. Have good morals and integrity;
2. Capable of doing legal acts;
3. In the 5 years prior to appointment and during his/her service:
   a. Never declared bankrupt;
   b. Never been a member of the Board of Commissioners and/or a member of the Board of Directors who is found guilty of leading a company to bankruptcy;
   c. Never been convicted of a criminal offence that is detrimental to the state's finance and/or relating to the financial sector; and
   d. Never been a member of the Board of Commissioners and/or a member of the Board of Directors who during his/her tenure.
4. Never hold an Annual GMS;
5. His/her accountability report as a member of Board of Commissioners and/or a member of the Board of Directors has once not been accepted by the GMS or has not submitted an accountability report as a member of the Board of Commissioners and/or a member of the Board of Directors to the GMS; and
6. Have caused a company that obtains a permit, approval, or registration from the capital market authority to not fulfill the obligation to submit annual report and/or financial statements to the capital market authority.

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh calon anggota Direksi, yaitu:
1. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai proses bisnis Perusahaan dan Grup ABM;
2. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan sistem pengendalian internal;
3. Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja; dan
4. Memiliki kemampuan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan, kepemimpinan, visi dan misi, serta strategi pengembangan Perusahaan, baik jangka panjang ataupun penyelesaian masalah strategis perusahaan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dinyatakan berakhir apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
1. Mengundurkan diri;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
5. Meninggal dunia dalam masa jabatannya;
6. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
7. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
8. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara; serta
9. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, apabila yang bersangkutan:
1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
2. Diindikasi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Perusahaan;
3. Melalaikan kewajibannya; serta
4. Terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Namun demikian, yang bersangkutan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi sejak pengangkatan hingga tanggal pengunduran diri. Selain itu, ABM juga memberikan kesempatan untuk membela diri pada saat pelaksanaan RUPS bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diberhentikan secara paksa.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian oleh RUPS
Secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun, Pemegang Saham ABM melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris disampaikan secara terbuka sejak tanggal pengangkatan para anggotanya, sedangkan kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi tertuang dalam kontrak manajemen yang menjadi target kinerja Direksi, baik secara kolegial maupun individual.

Penilaian Melalui Mekanisme Evaluasi Mandiri (*Self-Assessment*)
Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan penilaian terhadap kinerja mereka melalui metode *Self-Assessment* dengan menggunakan sejumlah *Key Performance Indicator* (KPI) yang sebelumnya telah ditentukan sendiri dan disetujui

In addition, there are several special requirements that must be fulfilled by candidates of the Board of Directors, namely:
1. Have knowledge and skills regarding the business processes of the Company and ABM Group;
2. Have knowledge and skills regarding risk management, corporate governance, and internal control system;
3. Have integrity, namely never directly or indirectly involved in engineered acts and fraud practices, fail to fulfil promises, and other actions that harm the Company where the person concerned serves or once served; and
4. Have the experience in administration and management, leadership, vision and mission, as well as the corporate development strategy, for a long term and giving resolutions to the company's strategic issues.

The term of office of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is declared to end on the following conditions:
1. Resign;
2. His term expires;
3. No longer meets the requirements of the applicable legislation;
4. Dismissed based on the decision of the GMS;
5. Pass away during his/her tenure;
6. Unable to perform his/her duties properly;
7. Being disobedient to the provisions of laws and regulations and/or of the Articles of Association;
8. Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the State; and
9. Found guilty by a court ruling that has legal binding.

The Board of Commissioners is authorized to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if the person concerned:
1. Commit an act that violate the Company's Articles of Association;
2. Commit an alleged action that is detrimental to the Company;
3. Being disobedient to his/her obligations; and/or
4. There are urgent reasons for the Company.

Members of the Board of Commissioners and Board of Directors have the rights to resign from their positions by giving a written notice. However, the person concerned can still be held accountable as a member of the Board of Commissioners and Board of Directors from the date of appointment until the date of resignation. In addition, for members of the Board of Commissioners and Directors who are forcibly dismissed, ABM also provides him/her an opportunity to defend himself/herself before the GMS.

Performance Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Assessment by GMS
implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors respectively, while fulfilling the supervisory and management functions upon the company.

The criteria applied in the assessment of the performance of the Board of Commissioners are transparently presented since the date of appointment of its members, while the criteria used to assess the performance of the Board of Directors are contained in the management contract, which are set as the targets of the Board of Directors of their both collegial and individual performances.

Evaluation Through Self-Assessment Mechanism
In addition, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors also assess their performance through the Self-Assessment method based on a number of Key Performance Indicators (KPIs) that are previously determined by themselves and approved by

oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengisi formulir penilaian yang telah tersedia pada saat melakukan *Self-Assessment*.

members of the Board of Commissioners or Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors is required to fill out the assessment form that is made available when conducting a Self-Assessment.

Indikator Penilaian Kinerja
Indicator of Performance Assessment

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
1. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada. 2. Kontribusi dalam proses pengawasan Perusahaan. 3. Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu. 4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.	1. The attendance rate at meetings of the Board of Commissioners as well as meetings with existing committees; 2. Contribution to the Company's oversight process; 3. Involvement in certain assignments; and 4. Adherence to applicable laws and regulations and the Company's policies.

Direksi Board of Directors	
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar Perusahaan. 2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan sebelumnya. 3. Penilaian kesehatan Perusahaan yang meliputi 3 aspek, yaitu: • Aspek keuangan; • Aspek operasional; dan • Aspek administrasi. 4. Indikator kinerja pendukung lainnya (KPI).	1. Implementation of duties and responsibilities by each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association; 2. Implementation of the previous Annual GMS resolutions; 3. The Company's health assessment including 3 aspects, namely: • Financial aspect; • Operational aspect; and • Administrative aspect. 4. Other supporting performance indicators (KPIs).

Hasil Penilaian Kinerja
Berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah bekerja dengan cukup baik dan mampu memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja yang telah ditetapkan.

Performance Assessment Result
Based on the results of the 2023 performance assessment, the Company's Board of Commissioners and Directors have performed satisfactorily and have met all the performance assessment indicators as determined.

Tata Kelola Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui mekanisme RUPS dan harus memperoleh persetujuan Pemegang Saham. Besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ABM ditentukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti *Key Performance Indicators* (KPI) atau hasil penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kinerja Perusahaan, ukuran bisnis, dan hasil *benchmarking* remunerasi di pasar tenaga kerja.

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ABM secara rinci adalah sebagai berikut:
1. Direksi, atas persetujuan Dewan Komisaris, menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan;
2. Direksi, atas persetujuan Dewan Komisaris, menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan berdasarkan strategi yang sudah disusun;
3. Direksi secara berkala melakukan evaluasi atas kinerja dan target melalui penilaian kinerja bulanan;
4. Direksi melakukan pelaporan evaluasi atas hasil kinerjanya ke Dewan Komisaris secara triwulanan untuk selanjutnya Dewan Komisaris melakukan penilaian serta mengolahnya dengan Komite Nominasi dan Remunerasi;
5. Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengolah hasil evaluasi yang disampaikan Direksi ke Dewan Komisaris di akhir tahun berdasarkan hasil survei pasar dan evaluasi KPI. Untuk selanjutnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris;

Governance of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS and must obtain shareholder approval. The amount of remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of ABM is determined based on the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee by taking into account a number of indicators, such as Key Performance Indicators (KPI) or the results of performance assessments of each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company's performance, business size, and the results of remuneration benchmarking in the labor market.

The procedures for determining the remuneration of ABM Board of Commissioners and Board of Directors are detailed out as follows:
1. The Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, develops the Company's short-term and long-term strategies;
2. The Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, prepares the Company's Key Performance Indicators (KPIs) based on the strategies that have been prepared;
3. The Board of Directors periodically evaluates performance and targets through monthly performance assessments;
4. The Board of Directors presents an evaluation report on the results of its performance to the Board of Commissioners on a quarterly basis for the Board of Commissioners to subsequently assess and process it with the Nomination and Remuneration Committee;
5. The Nomination and Remuneration Committee will process the evaluation results submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners at the end of the year in respect to the results of market surveys and KPI assessments. Furthermore, the Nomination and Remuneration Committee will propose a remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners;

6. Dewan Komisaris akan menyampaikan usulan remunerasi tersebut kepada Pemegang Saham dalam RUPS; serta
7. RUPS memutuskan nominal total remunerasi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Direksi.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 10 Mei 2023 pada Mata Acara 4, pemegang saham menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sebesar Rp13.163.604.631,- (tiga belas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) sebelum dipotong pajak, untuk tahun buku 2023 yang akan dibagikan kepada para anggota Dewan Komisaris, serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. Selain itu, para pemegang saham juga memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi ABM untuk tahun buku 2023.

Perusahaan telah menindaklanjuti hasil keputusan tersebut dengan membayarkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS. Untuk gaji dan tunjangan Direksi telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan hasil keputusan RUPS.

Struktur dan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi selama 2 (dua) tahun terakhir telah sesuai dengan definisi PSAK No. 7 (Revisi 2010) yang tersaji pada tabel berikut ini:

6. The Board of Commissioners will further submit the remuneration proposal to the Shareholders at the GMS; and
7. The GMS decides on the total amount of the remuneration of the Board of Commissioners and authorizes the Board of Commissioners to determine the remuneration of the Board of Directors.

Based on the decision made during the Annual GMS for the 2022 Financial Year on May 10, 2023, on Agenda 4, shareholders determined the honorarium and allowances for the Board of Commissioners totaling RP13,163,604,631,- (thirteen billion one hundred sixty three million six hundred four thousand six hundred thirty one Rupiah) before tax for the 2023 financial year. This amount will be distributed among members of the Board of Commissioners, with the Board of Commissioners granted the authority to determine the distribution among members of the Board of Commissioners. Additionally, shareholders gave the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other benefits for members of the ABM Board of Directors for the 2023 financial year.

The company has followed up on the resolution by paying honorarium and allowances to the Board of Commissioners in accordance with the GMS resolution. The salaries and allowances for Board of Directors have been determined by the Board of Commissioners in accordance with the GMS resolution.

Structure and Amount of Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

The remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors for the last 2 years has been determined in accordance with the definition of PSAK No. 7 (2010 Revision) as described in the following table:

	Jumlah Total **(orang** I person)	**Jumlah** Total **(AS$** I US$)	
		2023	**2022**
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Honorarium dan Imbalan Kerja Jangka Pendek Honorarium and Short-term Benefits	4	1,291,373	1,211,853
Direksi Board of Directors			
Gaji dan Imbalan Kerja Jangka Pendek Salaries and Short-term Benefits	3	8,706,876	4,613,505

Hubungan Antara Remunerasi dengan Kinerja Perusahaan

Pada dasarnya, remunerasi yang diberikan secara adil dan sesuai harapan Dewan Komisaris dan Direksi ABM berbanding lurus dengan kinerja operasional ABM. Melalui penerapan strategi *Mining Value Chain* yang didukung oleh kenaikan harga batu bara yang signifikan,

Relation Between Remuneration and Performance of the Company

In principle, a fair remuneration as expected by both ABM Board of Commissioners and Board of Directors is in line with ABM operational performance. The implementation of Mining Value Chain as well as the significant increase in coal price has allowed ABM to realize



ABM mampu mencapai pertumbuhan kinerja yang lebih baik dari sisi operasional maupun finansial dibandingkan tahun sebelumnya.

Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja serta Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Hingga akhir tahun 2023 Perusahaan belum menerapkan kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan. Perusahaan juga belum melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP). Kebijakan terkait *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) dilakukan di tahun 2011 pada saat IPO.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Terkait Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

ABM memiliki kebijakan pengungkapan kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, di mana kebijakan ini menjadi bagian dari pemberian informasi kepada pemegang saham dan investor secara wajar dan tepat waktu sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan ABM, serta memungkinkan pemegang saham dan investor terlibat secara aktif dengan ABM.

Ketentuan dari kebijakan tersebut mewajibkan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberitahukan atau melaporkan kepemilikan saham dan/atau setiap perubahan kepemilikan saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan dengan tenggat waktu sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 11/2017”), yaitu:

1. Pemberitahuan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan; dan
2. Pelaporan kepada OJK selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham dalam Perusahaan.

Di sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan kepemilikan saham Perusahaan yang dimiliki Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan secara berkala melakukan Keterbukaan Informasi dan melaporkan susunan pemegang saham Perusahaan pada situs web Bursa Efek Indonesia.

a higher growth, both operational and financial performances, compared to those of the previous year.

Performance-Based Long-Term Compensation and Employee/Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

As of 2023, the Company has not implemented a policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees. The company has also not implemented Management Stock Ownership Program (MSOP) and/or Employee Stock Ownership Program (ESOP). Policies related to Management and Employee Stock Allocation (MESA) were implemented in 2011 at the time of the IPO.

Information Disclosure Policy Regarding Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

ABM has implemented a policy for disclosing company share ownership by the Board of Commissioners and Directors. This policy forms an integral part of furnishing shareholders and investors with information in a fair and timely manner. By adhering to this policy, stakeholders can evaluate ABM’s strategy, development, operations, and financial performance effectively. Furthermore, it enables shareholders and investors to actively engage with ABM.

The policy requires all members of the Board of Commissioners and Board of Directors to notify or report their share ownerships and/or any changes in share ownerships, either directly or indirectly, to the Company with the deadline set according to OJK Regulation No. 11/POJK.04/2017 concerning Report of Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Company (“POJK 11/2017”), namely:

1. Notify the Company no later than 3 working days after the change of ownership or any changes in share ownership in the Company; and
2. Report to OJK no later than 10 days from the change of ownership or any changes in share ownership in the Company.

Throughout 2023 there was no change in the Company’s share ownership held by the Board of Commissioners and Directors. The Company periodically carries out Information Disclosure and reports the composition of the Company’s cc



KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees under the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ pendukung yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Investasi, serta Komite ESG.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) supporting organs, namely the Audit Committee, Investment Committee and ESG Committee.



KOMITE AUDIT

Audit Committee

Sebagai komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

As a committee reporting to the Board of Commissioners, the Audit Committee assists the Board of Commissioners in overseeing the implementation of good corporate governance in accordance with GCG principles

Persyaratan Keanggotaan

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota Komite Audit ABM adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, dan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang sesuai dengan bidangnya;
2. Mematuhi Kode Etik Perusahaan;
3. Mampu berkomunikasi dengan baik;
4. Memahami Laporan Keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundangan-undangan, khususnya di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
5. Meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan;
6. Memenuhi syarat sebagai pihak independen, yaitu antara lain adalah:
   a. Bukan orang dalam, termasuk pihak-pihak yang memberikan jasa audit, jasa konsultan, atau jasa- jasa lain kepada Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya;
   b. Tidak memiliki saham dalam Perusahaan;
   c. Tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau usaha dengan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir sebelum pengangkatannya;
   d. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, atau Direksi Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Paling sedikit salah satu anggota Komite Audit berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

Membership Requirements

Each member of the ABM Audit Committee shall adhere to a number of requirements as follows:

1. Possesses high integrity; and the ability; knowledge, and experience in accordance with his/her field;
2. Comply with the Company's Code of Ethics;
3. Excellent communications skills;
4. Understand Financial Statements, the company's business, audit processes, risk management, and existing laws and regulations, particularly in the capital market sector and other related laws and regulations;
5. Continuously improving his/her competency;
6. Qualify as an independent party, such as, among others:
   a. Not an internal party, including parties who provided audit services, consulting services, or other services to the Company within the last 6 months prior to his/ her appointment;
   b. Does not own Company's shares;
   c. Does not have work or business relationship with the Company within the last 6 months prior to his/her appointment; and
   d. Does not have a family relationship with the Major Shareholder, the Board of Commissioners, or the Board of Directors which may cause a conflict of interest.
7. At least one member of the Audit Committee has an educational background and expertise in accounting and finance.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak lebih lama dari masa kerja Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota komite tersebut sewaktu-waktu;
2. Dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya;
3. Dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan pemberhentian tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris minimal dalam jangka 1 (satu) bulan sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut.

Term of Office

The Term of Office of the Audit Committee consists of the following provisions:

1. Is no longer than the Term of Office of the Board of Commissioners without due respect to the rights of the Board of Commissioners to dismiss the committee members at any time;
2. Having the opportunity to be reappointed only for 1 subsequent term of office; and
3. May file for a resignation by submitting a written letter in advance to the Board of Commissioners, namely at least within 1 month prior to the effectiveness of the resignation.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Komite Audit ABM beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Ketua yang merupakan Komisaris Independen ABM serta dua orang anggota yang merupakan pihak independen yang berasal dari luar ABM.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, komposisi Komite Audit yang menjabat untuk periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Structure and Composition of the Audit Committee

ABM Audit Committee consists of 3 (three) members consisting of a Chairman who is an independent ABM Commissioner and two members who are independent parties from outside ABM.

Based on ABM Board of Commissioners Decree No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 dated 9 June 2021, the composition of the Audit Committee serving for the 2021-2024 period is as follows:

Susunan Komite Audit
Composition of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Manggi Taruna Habir	Ketua/Komisaris Independen Chairman/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 ABM Board of Commissioners Decree No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 dated 9 June 2021	2021-2024, Periode I, tahun ke-3 2021-2024, Period I, 3rd year
Ferry DJ Alis	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party		
Agus Yulianto	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party		

Profil Komite Audit
Profile of Audit Committee



Manggi Taruna Habir
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen
Chairman of Audit Committee/Independent Commissioner

Profil Manggi Taruna Habir dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Manggi Taruna Habir's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Agus Yulianto
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Klaten, 24 Juli 1961 | Born in Klaten, June 24, 1961
Usia 62 tahun | 62 years old
Domisili Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | Domicile in South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Education
- Sarjana Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1988); dan
  Bachelor's Degree in Mining Engineering, Bandung Institute of Technology (1988); and
- *Master of Business Administration*, Sekolah Bisnis Manajemen, Institut Teknologi Bandung (2020).
  Master of Business Administration, Sekolah Bisnis Manajemen, Institut Teknologi Bandung (2020).

Sertifikasi Profesi | Certification
- CA (*Charter Accountant*) dari Ikatan Akuntan Indonesia;
  CA (Charter Accountant) from the Institute of Indonesian Chartered Accountants;
- QIA (*Qualified Internal Auditor*) dari YPIA; dan
  QIA (Qualified Internal Auditor) from YPIA; and
- CACP (*Certified Audit Committee Practitioner*) dari IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia).
  CACP (Certified Audit Committee Practitioner) from IKAI (Indonesian Institute of Audit Committee).

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Anggota Komite Audit PT Telkom Indonesia Tbk (2010-2015); dan
  Member of Audit Committee at PT Telkom Indonesia Tbk (2010-2015); and
- Anggota Komite Audit PT Pertamina (Persero) (2015-2020).
  Member of Audit Committee at PT Pertamina (Persero) (2015-2020).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions
Di Luar Perusahaan: Anggota Komite Audit pada PT Pertamina International Shipping (2020-sekarang).
Other than ABM: Member of the Audit Committee at PT Pertamina International Shipping (2020-present).

Di Dalam Perusahaan: tidak ada.
Within ABM: None



Ferry DJ Alis
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Bangka, 8 Agustus 1965 | Born in Bangka, August 8, 1965
Usia 58 tahun | 58 years old
Domisili Bogor, Jawa Barat, Indonesia | Domicile in Bogor, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Education
Sarjana Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1994).
Bachelor's Degree in Mining Technology, Bandung Institute of Technology (1994).

Sertifikasi Profesi | Certification
- Kompetensi Pengawas Operasional Utama (POU), Direktorat Teknik Mineral dan Batubara, No. 0046/47/DTM/2004 (2004).
  Competency of Main Operational Supervisor (POU), Directorate of Mineral and Coal Engineering, No. 0046/47/DTM/2004 (2004).
- Kompetensi Asesor Profesi Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) – PERHAPI, No. Reg. MET.000.000490 (2009).
  Competency of Mineral and Coal Mining Professional Assessors, Professional Certification Institute (LSP) – PERHAPI, No. Reg. MET.000.000490 (2009).
- Certification in Audit Committee Practices (CACP), Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), No. 1051 (2022).
  Certification in Audit Committee Practices (CACP), Indonesian Audit Committee Association (IKAI), No. 1051 (2022).

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Chief Mine Development di PT Berau Coal (2007-2008);
  Chief Mine Development at PT Berau Coal (2007-2008);
- Mine Planning & Control Manager (Acting) di PT Berau Coal (2008-2009);
  Mine Planning & Control Manager (Acting) at PT Berau Coal (2008-2009);
- Kepala Teknik Tambang di PT Telen Orbit Prima (2009-2010);
  Head of Mining Engineering at PT Telen Orbit Prima (2009-2010);
- Mine Development Manager PT Telen Orbit Prima (2009-2013);
  Mine Development Manager at PT Telen Orbit Prima (2009-2013);
- Corporate Engineering Deputy Director di PT Tuah Turangga Agung (2013-2018); dan
  Corporate Engineering Deputy Director at PT Tuah Turangga Agung (2013-2018); and
- Engineering & Infrastructure Deputy Director di PT Tuah Turangga Agung (2018-2020).
  Engineering & Infrastructure Deputy Director at PT Tuah Turangga Agung (2018-2020).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions
Di Luar Perusahaan: Direktur PT Puspa Jaya Mandiri (2020-sekarang).
Other than ABM: Director at PT Puspa Jaya Mandiri (2020-present).

Di Dalam Perusahaan: tidak ada.
Within ABM: None.

Pengungkapan Independensi

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi aspek independensi sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Disclosure of Independence

Each member of the Audit Committee has fulfilled the independence aspect as described in the following table:

Aspek Independensi Independency Aspect	Manggi Taruna Habir	Ferry D.J. Alis	Agus Yulianto
Memiliki saham Perusahaan (kode saham: ABMM). Having Company's shares (shares code: ABMM).	X	X	X
Terdapat hubungan pekerjaan atau usaha dengan Perusahaan dalam 6 bulan terakhir. Having work or business relationship with the Company within the last 6 months.	X	X	X
Terdapat hubungan kekeluargaan dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Perusahaan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Having family relationship with the Major/Controlling Shareholder, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Director which may cause conflict of interest.	X	X	X

√ : Ada | Have | x = Tidak ada | Nil

Kode Etik

Seluruh anggota Komite Audit berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan, menjunjung tinggi independensi dan objektivitas, serta menjaga profesionalisme (berintegritas, jujur, dan kompeten) demi kemajuan Perusahaan dan terlaksananya GCG.

Code of Ethics

All members of the Audit Committee are committed to providing their best capabilities and providing sufficient time to carry out their duties, by always maintaining the confidentiality of the Company's information, upholding their independence and objectivity, and maintaining professionalism (integrity, honesty, and competence) for the progress of the Company and the implementation of GCG.

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah diperbaharui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 012/ABM-BOC-CIR/IV/2018 tanggal 19 April 2018.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Komite Audit ABM dapat dilihat pada laman (situs web) bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Secara kolegial, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan seperti Laporan Keuangan, dan informasi keuangan lainnya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dengan akuntan publik terkait dengan jasa audit yang diberikannya;
4. Melakukan penelaahan atas independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan audit pada tahun buku selama masa kerja Komite Audit;
5. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan KAP untuk meyakinkan bahwa seluruh risiko yang substansial telah tercakup dan dipertimbangkan secara memadai;
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan KAP dengan mempertimbangkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan kewajaran jasa audit, termasuk penunjukan kembali dan/atau pemberhentian;
7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan KAP yang ditunjuk, serta memonitor tindak lanjut oleh Direksi atas temuan para auditor tersebut;
8. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG serta melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perusahaan;
9. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian yang memadai;
10. Melakukan penelaahan atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
11. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas terjadinya potensi benturan kepentingan dengan kepentingan Perusahaan;
12. Mengawasi pelaksanaan *Whistleblowing Systems* (WBS) yang diberlakukan di Perusahaan dan Entitas Anak;
13. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
14. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit.

Sementara itu, wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit mencakup:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, Unit Audit Internal, Unit Manajemen Risiko, Unit Implementasi GCG, bagian hukum, dan auditor eksternal, dalam batas tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Wajib bekerja sama dengan mitra kerja, antara lain Sekretaris Dewan Komisaris, komite lain, unit-unit di bawah Direksi dan/atau unit-unit operasional Perusahaan;

Duties Guidelines

In performing their duties and responsibilities, the Audit Committee is guided by the Audit Committee Charter which has been update based on ABM Board of Commissioners' Decree No. 012/ABM-BOC-CIR/IV/2018 dated 19 April 2018.

The complete information about ABM's Audit Committee Charter is available on (website) Our Commitment > Governance > Board of Commissioners' Committees

Duties, Responsibilities, and Authorities

Collegially, the Audit Committee carries out the following duties and responsibilities:

1. Reviewing the financial information to be issued by the Company such Financial Statements, and other financial information;
2. Reviewing the Company's compliance with the capital market laws and regulations and other related regulations with the Company's activities;
3. Providing an independent opinion in the event of a difference of opinion between the management and the public accountant relating to the audit services provided;
4. Reviewing the independency and the objectivity of the public accounting firm (KAP) in performing the audit in the fiscal year during the Audit Committee's term of office;
5. Reviewing the adequacy of the auditing activities by the public accounting firm to ensure that all substantial risks have been adequately covered and accommodated;
6. Providing recommendation to the Board of the Commissioners on the appointment of the public accounting firm with respect to the independency, the scope of the assignments, and the fairness of the audit services;
7. Reviewing the audit implementation by the internal auditor and the appointed public accounting firm, and monitoring the implementation of follow-ups by the Board of Directors to the auditor's findings;
8. Reviewing the risk management and GCG implementation and reporting to the Board of Commissioners on various risks of the Company;
9. Encouraging the establishment of an adequate control system;
10. Reviewing the accounting and financial reporting processes;
11. Reviewing and reporting to the Board of Commissioners on potential occurrence of conflict of interest with the Company's interest;
12. Supervising the implementation of the Whistleblowing Systems (WBS) applied in the Company and its subsidiaries;
13. Identifying issues that require the attention of the Board Commissioners; and
14. Carrying out other duties as stipulated in the Audit Committee Charter.

Meanwhile, the Audit Committee has the authorities as follow:

1. Accessing employees' record or information, fund, assets, and other Company's resources as required;
2. Engaging in direct communication with employees, the Board of Directors, Internal Audit Unit, Risk Management Unit, GCG Implementation Unit, legal department, and external auditor, within the Audit Committees' scope of duties and responsibilities;
3. Cooperating with other partners is a must, such as the Board of Commissioners' Secretary, other committees, other units reporting to the Board of Directors and/or the Company's other operation units;

4. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, termasuk ahli hukum eksternal atau tenaga profesional lainnya, dengan beban Perusahaan;
5. Menyusun, mengevaluasi, mengubah, dan melaksanakan Piagam, termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Audit, dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. Upon the approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may engage with an independent party other than members of the Audit Committee, who is deemed necessary to assist their duties, including external legal expert or other professionals, at the expense of the Company;
5. Formulating, evaluating, amending, and implementing the Charter, including determining the procedures and scope of work of the Audit Committees, with the approval of the Board of Commissioners; and
6. Performing other authorities as assigned by the Board of Commissioners.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. Selama tahun 2023, Komite Audit telah menyelenggarakan 20 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

Audit Committee Meetings

Audit Committee Meetings must be held at least 4 (four) times in a year. Throughout 2023, the Audit Committee organized 20 meetings with attendance rate of each member of the Audit Committee as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit Tahun 2023
Recapitulation of Audit Committee Attendance at the Audit Committee Meeting in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Manggi Taruna Habir Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner	6	6	100,00
Ferry DJ Alis Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party	6	6	100,00
Agus Yulianto Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party	6	6	100,00
Rata-rata Kehadiran **Average Attendance Rate**			100,00

Risalah Rapat Komite Audit Tahun 2023
Minutes of Audit Committee Meeting in 2023

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
19 Januari 2023 January 19, 2023	Pembahasan Kinerja Operasi dan Keuangan ABM Kuartal IV 2022 Discussion of ABM Operating and Financial Performance of Quarter IV 2022	• Manggi Taruna Habir Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Ferry DJ Alis Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party • Agus Yulianto Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party • Manajemen ABM Management of ABM
20 April 2023 April 20, 2023	Pembahasan Kinerja Operasi dan Keuangan ABM Kuartal I 2023 Discussion of ABM Operating and Financial Performance of Quarter I 2023	• Manggi Taruna Habir Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Ferry DJ Alis Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party • Agus Yulianto Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party • Manajemen ABM Management of ABM
20 Juli 2023 July 20, 2023	Pembahasan Kinerja Operasi dan Keuangan ABM Kuartal II 2023 Discussion of ABM Operating and Financial Performance of Quarter II 2023	• Manggi Taruna Habir Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Ferry DJ Alis Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party • Agus Yulianto Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party • Manajemen ABM Management of ABM

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
19 Oktober 2023 October 19, 2023	Pembahasan Kinerja Operasi dan Keuangan ABM Kuartal III 2023 Discussion of ABM Operating and Financial Performance of Quarter III 2023	• Manggi Taruna Habir Ketua/Komisaris Independen | Chairman/ Independent Commissioner • Ferry DJ Alis Anggota/Pihak Independen | Member/ Independent Party • Agus Yulianto Anggota/Pihak Independen | Member/ Independent Party • Manajemen ABM Management of ABM
20 Maret 2023 March 20, 2023	Pembahasan Audit Plan KAP dan Progress Audit KAP Discussion of KAP Audit Plan and KAP Audit Progress	Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit dengan Auditor Laporan Keuangan ABM 2023 (EY) Audit Committee Chairman and Audit Committee Members with ABM 2023 Financial Statements Auditor (EY)
27 Oktober 2023 October 27, 2023	Pembahasan Audit Plan KAP dan Progress Audit KAP Discussion of KAP Audit Plan and KAP Audit Progress	Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit dengan Auditor Laporan Keuangan ABM 2023 (EY) Audit Committee Chairman and Audit Committee Members with ABM 2023 Financial Statements Auditor (EY)

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Manggi Taruna Habir telah disajikan pada Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Sementara itu, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Audit lainnya tersaji pada tabel berikut ini:

Competence Development Program

Competence improvement program taken by Manggi Taruna Habir had been presented on the Board of Commissioners Competence Improvement Program. Meanwhile, competence improvement program taken by other members of the Audit Committee is:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Ferry DJ Alis Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	*Understanding Risk Management and Insurance*	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	ERM - ABM Group
	Mergers & Acquisitions as Inorganic Growth Strategy	Virtual, 5 Agustus 2023 Virtual, August 5, 2023	The Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia - Indonesia
	Pembuatan Keputusan Bisnis Berbasis Manajemen Risiko (31000:2018) Risk Management Based Business Decision Making (31000:2018)	Virtual, 26 Agustus 2023 Virtual, August 26, 2023	The Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia - Indonesia
	The Art of Corporate Financial Checkup	Virtual, 27 Agustus 2023 Virtual, August 27, 2023	Lean Visi Indonesia
	Anti Korupsi, Gratifikasi & Benturan Kepentingan Anti-Corruption, Gratification and Conflict of Interest	Virtual, 27 November 2023 Virtual, November 27, 2023	Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) - Wilayah Banten
Agus Yulianto Anggota Komite Audit Member of the Audit Committee	*Corporate Diplomacy for Internal Auditor*	Jakarta, 13 April 2023 Jakarta, April 13, 2023	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)
	The Guardian of Corporacy: The Role of Internal Audit in Anti Money Laundering Action	Solo, 22-23 Juni 2023 Solo, June 22-23, 2023	Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)
	Konferensi Nasional 2023 Ikatan Komite Audit Indonesia: Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko 2023 National Conference of the Indonesian Audit Committee Association: Guarding the Company's Sustainability and Growth Through Risk Monitoring and Control	Jakarta, 19 Oktober 2023 Jakarta, October 19, 2023	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

Remunerasi

Khusus untuk anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, besaran honorarium disesuaikan dengan perkembangan bisnis ABM dan ditentukan berdasarkan kebijakan ABM dan dibebankan kepada anggaran Perusahaan.

Remuneration

For members of the Audit Committee who are not members of the Board of the Commissioners, his/her honorarium is adjusted to ABM's business performance and is determined by ABM's policy and is included in the Company's budget.

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Komite Audit tahun buku 2023.
2. Melakukan penelaahan atas penyajian Laporan Keuangan Triwulanan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta memantau agar Laporan Keuangan terbit tepat waktu dan akurat.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan program kerja Internal Audit, serta memberikan masukkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Internal Audit.
4. Melakukan penelaahan atas independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan audit tahun buku 2022.
5. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk meyakini bahwa seluruh risiko yang substantial telah tercakup serta dipertimbangkan secara memadai.
6. Memberikan rekomendasi atas penunjukan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.
7. Melakukan penelaahan terhadap temuan audit, baik oleh auditor internal maupun eksternal, dan memantau tindak lanjut rekomendasi atas temuan audit.
8. Melakukan penelaahan atas keefektifan pengendalian internal dan memberikan masukan yang mendorong terciptanya sistem pengembangan yang efektif.
9. Mengevaluasi, mengidentifikasi dan menyelesaikan laporan untuk perbaikan sistem dan kejadian *fraud* yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System* (WBS). Selama tahun 2023, menerima 18 laporan WBS dan 36 kasus yang dilaporkan telah selesai diaudit.
10. Memantau pengelolaan risiko dan penerapan GCG serta memberikan masukan untuk meningkatkan penerapannya.
11. Melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan secara triwulan.
12. Melakukan beberapa kunjungan kerja atau *site visit* selama tahun 2023 sbb:
    a. Manggi Taruna Habir:
       - 20 Maret 2023 melakukan kunjungan ke SSB di Cikupa.
       - 23 Agustus 2023 melakukan kunjungan ke CKB Logistics di Cakung.
    b. Ferry DJ Alis:
       10-15 Agustus 2023 melakukan kunjungan audit ke CK BMB di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
    c. Agus Yulianto:
       - *Visit* CK lokasi BIB di Kalimantan Selatan tanggal 7 Februari 2023, *walkthrough* proses proses produksi.
       - *Visit* CKB Logistics *Warehouse* dalam rangka peresmian dan pembukaan operasi *warehouse* Banjarmasin tanggal 8 Februari 2023.
       - *Visit Management Walkthrough Warehouse* CKB Logistics Osowilangun tanggal 15 September 2023.
       - *Visit* SSB Tangerang dalam rangka *Join Audit* tanggal 5 Desember 2023.

Completion of Duties in 2023

Throughout 2023, the ABM Nomination and Remuneration Committee have conducted the following activities:

1. Prepare and propose the Audit Committee Work Plan for the 2023 fiscal year.
2. Review the presentation of Quarterly Financial Statements submitted to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, and monitoring that the Financial Statements are published on time and accurately.
3. Review the implementation of the Internal Audit work program, and providing input to improve the efficiency and effectiveness of Internal Audit.
4. Review the independence and objectivity of the Public Accounting Firm (KAP) in conducting the 2022 fiscal year audit.
5. Review the adequacy of the examination carried out by KAP to ensure that all substantial risks have been covered and adequately considered.
6. Provide recommendations on the appointment of KAP that will audit the Financial Statements for the 2023 fiscal year.
7. Review audit findings, both by internal and external auditors, and monitor follow-up recommendations on audit findings.
8. Review the effectiveness of internal controls and provide input that encourages the creation of an effective development system.
9. Evaluate, identify and resolve reports for system improvement and fraud incidents reported through the Whistleblowing System (WBS). During 2023, 18 WBS reports were received and 36 reported cases were audited.
10. Monitor risk management and GCG implementation and provide input to improve its implementation.
11. Report to the Board of Commissioners on activities on a quarterly basis.
12. Conduct several working visits or site visits during 2023 as follows:
    a. Manggi Taruna Habir:
       - March 20, 2023 made a visit to SSB in Cikupa.
       - August 23, 2023 conducted a visit to CKB Logistics in Cakung.
    b. Ferry DJ Alis:
       August 10-15, 2023 conducted an audit visit to CK BMB in Tapin Regency, South Kalimantan.
    c. Agus Yulianto:
       - Visit CK BIB location in South Kalimantan on February 7, 2023, walktrough of production process.
       - Visit CKB Logistics Warehouse in order to inaugurate and open the Banjarmasin warehouse operation on February 8, 2023.
       - Visit CKB Logistics Osowilangun Warehouse Management Walkthrough on September 15, 2023.
       - Visit SSB Tangerang for Join Audit on December 5, 2023.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam bidang yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi. Komite ini bekerja secara independen dan profesional untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan, pemberian nasihat, serta memastikan telah dilaksanakannya proses nominasi, remunerasi, serta pengembangan SDM.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee responsible for assisting the Board of Commissioners in Nomination and Remuneration related mattes. The committee works independently and professionally in providing assistance to the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners, providing advice, and ensuring that the nomination, remuneration, and HR development process have all been completed.

Persyaratan Keanggotaan

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota komite memahami kegiatan usaha ABM dan Entitas Anak untuk dapat membantu pekerjaan dan tugasnya;
2. Anggota komite memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, operasional perusahaan, ketenagakerjaan, serta hubungan industrial;
3. Anggota komite harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang yang dibutuhkan bagi pelaksanaan tugasnya, terutama terkait nominasi dan remunerasi, serta memahami Nilai-Nilai Inti ABM;
4. Anggota komite tidak boleh memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya; dan
5. Anggota Komite tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau eksekutif dan/atau yudikatif dan/atau jabatan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan.

Membership Requirements

Each member of the Nomination and Remuneration Committee shall have a number of requirements as follows:

1. The committee members must have good understanding of the business activities of ABM and its Subsidiaries in order to perform his/her work and duties;
2. The committee members must have adequate knowledge of laws and regulations of the capital market, the company's operations, labor, and industrial relations;
3. The committee members must have effective communication skills, adequate knowledge and experience in the areas that are required to complete his/her duties, especially relating to nomination and remuneration, and understands ABM's Core Values;
4. The committee members must not have a conflict of interest with the Company while performing their duties; and
5. Members of the Committee are not allowed to serve concurrent position as administrator of political parties and/or candidate of legislatives and/or executives and/ or judiciary and/or other positions that may contain a potential conflict of interest.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkatnya, yaitu maksimum selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Term of Office

The term of office of the Nomination and Remuneration Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners who appoint them, which is a maximum of 3 (three) years and can be extended without due respect to the rights of the Board of Commissioner to dismiss them at any time.

Susunan dan Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi ABM terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan minimum 2 (dua) orang anggota dengan komposisi sebagai berikut:

1. Satu orang Komisaris Independen yang menjadi Ketua merangkap anggota; serta
2. Anggota lainnya dapat berasal dari dalam (termasuk anggota Dewan Komisaris lainnya atau karyawan yang menduduki jabatan Manajemen yang membidangi SDM) atau dari luar ABM.

Structure and Composition of the Nomination and Remuneration Committee

The ABM Nomination and Remuneration Committee consists of 1 (one) Chairman and a minimum of 2 (two) members with the following composition:

1. One Independent Commissioner who serves the Chairman as well as the member of the committee.
2. Other members can be individuals from the internal organization (including other members of the Board of Commissioners or employees serving the management positions of the HR department) or the external parties of ABM.

Adapun komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi ABM untuk periode 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The composition of the ABM Nomination and Remuneration Committee for the 2021-2024 period can be seen in the following table.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi
Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Arief Tarunakarya Surowidjojo	Ketua/Komisaris Independen Chairman/ Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 029b/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 ABM Board of Commissioners Decree No. 029b/ ABM-BOC-CIR/VI/2021 dated June 9, 2021
Rachmat Mulyana Hamami	Anggota/Komisaris Utama Member/ President Commissioner	
Mivida Hamami	Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	
Andreas Purnawan	Anggota/Group Head of Corporate Human Capital Member/Group Head of Corporate Human Capital	Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 005/ABM-BOC- CIR/III/2022, tanggal 7 Maret 2022. Menjabat sampai dengan 31 Agustus 2023. ABM Board of Commissioners Decree No. 005/ ABM-BOC- CIR/III/2022, March 7, 2022. Serves until August 31, 2023
Novitri Diah Lista	Anggota/Group Head of Talent, Academy & Culture Member/Group Head of Talent, Academy & Culture	Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 31/ ABM-BOC- CIR/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023 ABM Board of Commissioners Decree No. 31/ ABM-BOC- CIR/XII/2023, December 1, 2023

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Arief Tarunakarya Surowidjojo
Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisawris Independen
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Independent Commissioner

Profil Arief Tarunakarya Surowidjojo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Arief Tarunakarya Surowidjojo's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Rachmat Mulyana Hamami
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi /Komisaris Utama
Member of the Nomination and Remuneration Committee/President Commissioner

Profil Rachmat Mulyana Hamami dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Rachmat Mulyana Hamami's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Mivida Hamami
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi /Komisaris
Member of the Nomination and Remuneration Committee/Commissioner

Profil Mivida Hamami dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Mivida Hamami's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Novitri Diah Lista Wulandari
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Malang, 3 November 1972 | Born in Malang, November 3, 1972
Usia 51 tahun | 51 years old
Domisili Tangerang Selatan, Banten, Indonesia | Domicile in South Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Education
- Bachelor Degree - Electrical Engineering, Majoring: Telecommunication, Malang, Brawijaya University (1996); dan
  Bachelor's Degree in Electrical Engineering, with a specialization in Telecommunications, from Brawijaya University (1996); and
- Magister Management Business of Administration Technology, Majoring: Production, Bandung Institute of Technology (1998).
  Master of Business Administration in Technology Management, with a focus on Production, from Bandung Institute of Technology (1998).

Sertifikasi Profesi | Certification
- Digital Transformation - IMD Executive Program, Switzerland (2021); dan
  Digital Transformation - IMD Executive Program, Switzerland (2021); and
- Advanced Human Certified Professional - Atma Jaya University, Jakarta (2022).
  Advanced Human Certified Professional - Atma Jaya University, Jakarta (2022).

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Engineering Education Project - Assistant Procurement Specialist di Adira Dinamika Multifinance (1998-2001);
  Engineering Education Project - Assistant Procurement Specialist at Adira Dinamika Multifinance (1998-2001);
- Basic Education Project - Procurement Specialist di PT Adira Dinamika Multi Finance (2002-2003);
  Basic Education Project - Procurement Specialist at PT Adira Dinamika Multi Finance (2002- 2003);
- Corporate President Office Manager di PT Adira Dinamika Multi Finance (2003-2006);
  Corporate President Office Manager at PT Adira Dinamika Multi Finance (2003-2006);
- Training Department Head di PT Adira Dinamika Multi Finance (2006-2011);
  Training Department Head at PT Adira Dinamika Multi Finance (2006-2011);
- Deputy GM - Head of Training Centre di PT Adira Dinamika Multi Finance (2011-2013);
  Deputy GM - Head of Training Center at PT Adira Dinamika Multi Finance (2011-2013);
- GM - Head of HC Development di PT Adira Dinamika Multi Finance (2013-2015);
  GM - Head of HC Development at PT Adira Dinamika Multi Finance (2013-2015);
- SVP - Head of Corporate University di PT Adira Dinamika Multi Finance (2015-2023); dan
  SVP - Head of Corporate University at PT Adira Dinamika Multi Finance (2015-2023); and
- SVP - Head of Change Management (Special Assignment) di PT Adira Dinamika Multi Finance (2016-2023).
  SVP - Head of Change Management (Special Assignment) at PT Adira Dinamika Multi Finance (2016-2023).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions
Di Luar Perusahaan: tidak ada.
Other than ABM: None

Di Dalam Perusahaan | Within ABM:
- Group Head of Talent, Academy and Culture di PT ABM Investama (2023-sekarang); dan
  Group Head of Talent, Academy and Culture at PT ABM Investama (2023-present); and
- Group Head of Human Capital Share Serviced di PT ABM Investama (2023-sekarang).
  Group Head of Human Capital Share Serviced at PT ABM Investama (2023-present).

Pengungkapan Independensi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi aspek independensi sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Disclosure of Independence

Each member of the Nomination and Remuneration Committee has fulfilled the independence aspects as described in the following table:

Aspek Independensi Independency Aspect	Arief Tarunakarya Surowidjojo	Rachmat Mulyana Hamami	Mivida Hamami	Andreas Purnawan	Novitri Diah Lista Wulandari
Memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap Perusahaan. Having a conflict of interest towards the Company.	x	√	√	x	x

Aspek Independensi Independency Aspect	Arief Tarunakarya Surowidjojo	Rachmat Mulyana Hamami	Mivida Hamami	Andreas Purnawan	Novitri Diah Lista Wulandari
Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau eksekutif dan/atau yudikatif dan/atau jabatan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan. Concurrently serving as a political party administrator and/or candidate of legislature and/or executive and/or judicial members and/or other positions that may have a potential of a conflict of interest.	x	x	x	x	x

√ : Ada/Have I x = Tidak ada/ Nil

Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan yang diperoleh sewaktu menjabat;
2. Anggota komite yang memiliki saham Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan pribadi; dan
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota komite wajib menaati standar etika Perusahaan dan dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari kegiatan Perusahaan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 033/ABM-RES- BOC/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ABM dapat dilihat pada laman (situs web) bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terbagi 2 (dua) yaitu, dalam hal fungsi nominasi dan fungsi remunerasi yang secara rinci dapat dilihat di bawah ini:

- **Terkait fungsi nominasi, yaitu:**
  1. Melakukan penelaahan dan pemantauan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi, meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen dan seleksi, serta promosi dan sukses;
  2. Menyusun kriteria komposisi, seleksi, kualifikasi, evaluasi, serta syarat-syarat dan prosedur nominasi yang transparan bagi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan para pejabat senior manajemen satu tingkat di bawah Direksi di Perusahaan, yaitu *General Manager* atau setara;
  3. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan kepada RUPS; dan
  4. Menyampaikan rekomendasi dan membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang akan diusulkan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, sesuai dengan kriteria seleksi, *due diligence*, prosedur nominasi yang terdapat dalam Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), serta kebijakan manajemen (*Board & Management Policy*).

Code of Ethics

The key points of Code of Ethics that members of the Nomination and Remuneration Committee must comply are as follows:

1. The committee members must maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information acquired during their tenure;
2. Committee members who hold the Company's shares are not allowed to misuse the Company's confidential information for his/her personal interest; and
3. In performing their duties and responsibility, members of the committee are required to comply with the Company's ethical standards and are prohibited from taking personal advantages, both directly or indirectly, from the Company's activities other than honorarium and other facilities and benefits.

Work Guidelines

In performing the duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee is guided by the Nomination and Remuneration Committee Charter which was ratified based on ABM Board of Commissioners Decree No. 033/ ABM-RES/BOC/VIII/2015 dated August 19, 2015.

The complete information about the Nomination and Remuneration Committee Charter is available on (website) Our Commitment page > Governance > Board of Commissioners' Committees.

Scope of Duties, Responsibility, and Authorities

The Nomination and Remuneration Committee's duties and responsibilities are grouped into 2 (two), namely the nomination function and remuneration function with further details as follows:

- **Related to nomination function, they are:**
  1. Carrying out review and supervisory function to ensure the Company to have established nomination strategy and policy that include organizational analysis process, procedures and criteria for recruitment and selection, and promotion and succession;
  2. Developing the criteria for the composition, selection, qualification, evaluation, as well as requirements and transparent procedures of nomination for membership candidacy of the Board of Commissioners, Board of Directors, and senior management officials one level below the Board of Directors of the Company, namely the General Manager or its equivalent;
  3. Submitting a recommendation to the Board of Commissioners on the candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be further proposed at the GMS; and
  4. Submitting a recommendation and assisting the Board of Commissioners in ensuring that the proposed candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors, both from internal and external parties of the Company, are in accordance with the selection criteria, due diligence, nomination procedures as stipulated in the Board Manual, and the Board and Management Policy.

- **Terkait fungsi remunerasi, yaitu:**
  1. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap, serta berupa tantiem dan insentif yang bersifat *variable*;
  2. Mengkaji kelayakan sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta merekomendasikan penyesuaian yang diperlukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tingkat remunerasi dengan pencapaian target kinerja;
  3. Mengajukan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang sistem dan besaran nominasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat setingkat *General Manager*, berdasarkan hasil evaluasi remunerasi yang transparan;
  4. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat setingkat *Chief*, serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan;
  5. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji atau honorarium, tunjangan serta fasilitas yang bersifat tetap dan variabel, bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat setingkat *Chief*; dan
  6. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi ABM juga memiliki kewenangan untuk beberapa hal berikut ini:
1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap Perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan efektivitas praktik nominasi dan remunerasi, serta pengelolaan SDM di Perusahaan dan Grup ABM;
2. Bekerja sama dengan mitra kerja, di antaranya komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris, tim terkait di level manajemen, Unit Audit Internal, unit-unit operasional Perusahaan, dan unit-unit lain yang terkait;
3. Mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu komite atas biaya Perusahaan melalui persetujuan tertulis Dewan Komisaris, apabila diperlukan; dan
4. Membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya, apabila diperlukan.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sepanjang tahun 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ABM dalam rapat-rapat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- **Related to remuneration function, they are:**
  1. Ensuring that the Company has implemented a transparent remuneration system in terms of salary or honorarium, fixed allowance and facilities, as well as variable bonuses and incentives;
  2. Reviewing the feasibility of the remuneration system for the Board of Commissioners and the Board of Directors, and recommend the necessary adjustments by aligning the remuneration and target accomplishments.
  3. Submitting a recommendation to the Board of Commissioners on the system and the amount of remunerations for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials holding the General Manager position or equivalent, based on the results of a transparent remuneration assessment.
  4. Reviewing the feasibility of the policy for the granting and utilizing the facilities provided for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials of Chief level, and providing recommendation of necessary changes/improvements;
  5. Assisting the Board of Commissioners in formulating and determining remuneration policy that consists of salary or honorarium, fixed and variable benefits and facilities for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials of Chief level or equivalent; and
  6. Performing other duties as stipulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter.

The ABM Nomination and Remuneration Committee is also authorized to:
1. Have a complete, free, and unlimited access to the Company, in relation to the implementation of an effective nomination and remuneration practices, and employee management practices in the Company as well as the ABM Group;
2. Collaborate with its working partners, namely the committees reporting to the Board of Commissioners, related teams at the management level, Internal Audit Unit, the Company's operational units, and other related units;
3. To engage an expert and/or a consultant to assist the committee at the expense of the Company with a written approval from the Board of Commissioners, if necessary; and
4. Establish an ad-hoc team, whose criteria and the assignment period are adjusted to the needs and the scope of work, if necessary.

Nomination and Remuneration Committee Meetings

The Nomination and Remuneration Committee meetings must be held at least once in 4 (four) months. Throughout 2023, the Nomination and Remuneration Committee organized 4 (four) meetings, and the attendance rate of each member of the ABM Nomination and Remuneration Committee in these meetings is reported in the following table:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Recapitulation of Nomination and Remuneration Committee Attendance at the Nomination and Remuneration Committee Meeting in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner	4	4	100,00
Rachmat Mulyana Hamami Anggota/Komisaris Utama | Member/President Commissioner	4	3	75,00
Mivida Hamami Anggota/Komisaris | Member/Commissioner	4	3	75,00
Andreas Purnawan Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party	3	3	100,00

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Novitri Diah Lista Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party	0	0	-
Rata-rata Kehadiran **Average Attendance Rate**			93,75

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2023
Minutes of the Nomination and Remuneration Committee Meeting in 2023

Tanggal Rapat Date of Meeting	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20 Januari 2023 January 20, 2023	• Kuartal IV 2022 *Performance Report* Quartal IV 2022 Performance Report • *Update* KNR *Activity Plan* Update KNR Activity Plan	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Rachmat Mulyana Hamami Anggota/Komisaris Utama | Member/President Commissioner • Mivida Hamami Anggota/Komisaris | Member/Commissioner • Andreas Purnawan Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party
20 April 2023 April 20, 2023	• Kuartal I 2023 *Performance Report* Quartal I 2023 Performance Report • *Update* KNR *Activity Plan* • Update KNR Activity Plan • *Timeline of Board of Director - Board of Commissioner Fiscal Year* 2022 *Assessment* Timeline of Board of Director - Board of Commissioner Fiscal Year 2022 Assessment	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Rachmat Mulyana Hamami Anggota/Komisaris Utama | Member/President Commissioner • Mivida Hamami Anggota/Komisaris | Member/Commissioner • Andreas Purnawan Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party
21 Juli 2023 July 21, 2023	• Kuartal II 2023 *Performance Report* Quartal II 2023 Performance Report • *Update* KNR *Activity Plan* Update KNR Activity Plan • Re Organisasi ABM & *New Assignments* Re Organisasi ABM & New Assignments • *Proposal New Scheme Bonus* Proposal New Scheme Bonus • *Update* PMK 66/2023 Update PMK 66/2023	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Mivida Hamami Anggota/Komisaris | Member/Commissioner • Andreas Purnawan Anggota/Pihak Independen | Member/Independent Party
20 Oktober 2023 October 20, 2023	• Kuartal 2023 *Performance Report* Quartal III 2023 Performance Report • *Update* KNR *Activity Plan* Update KNR Activity Plan • Penjelasan Organisasi ABM Group Penjelasan Organisasi ABM Group • Kandidat Anggota KNR Pengganti Andreas Purnawan Kandidat Anggota KNR Pengganti Andreas Purnawan • *Board of Commissioner - Board of Director Fiscal Year 2022 Assessment result* Board of Commissioner - Board of Director Fiscal Year 2022 Assessment result	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Rachmat Mulyana Hamami Anggota/Komisaris Utama | Member/President Commissioner

Program Peningkatan Kompetensi
Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Arief Tarunakarya Surowidjojo, Rachmat Mulyana Hamami, Mivida Hamami dan Novitri Diah Lista Wulandari selaku Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2023 telah disajikan pada Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris. Sementara itu, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya tersaji pada tabel berikut ini:

Competency Development Program
The competency improvement programs which were attended by Arief Tarunakarya Surowidjojo, Rachmat Mulyana Hamami, Mivida Hamami and Novitri Diah Lista Wulandari as Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee throughout 2023 are presented in the section of Board of Commissioners' Competency Improvement Program. Meanwhile, the competency improvement programs where other members of the Nomination and Remuneration Committee participated in are presented in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Novitri Diah Lista Wulandari Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	*Multiperspective Leadership Solution: How Leaders Shape Future - Ready Workforce*	Virtual, 2023	IDLC - Indonesia Leadership Conference
	New HR Paradigms and Transformation Agenda in the Post Pandemic	Virtual, 2023	Majalah SWA
	Pengembangan SDM secara Daring	Jakarta, 28 Maret 2023 Jakarta, March 28, 2023	Udemy Business

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang 2023, Komite Nominasi dan Remunerasi ABM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Terkait Fungsi Nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi dan membantu pelaksanaan nominasi/seleksi atas Direksi Perusahaan;
   b. Memberikan pendapat nominasi dan remunerasi eksekutif Perusahaan dan Entitas Anak;
   c. Melakukan koordinasi dengan GEM dalam pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi di Perusahaan beserta Entitas Anak. Fungsi nominasi dan remunerasi yang dilakukan bersama GEM pada tahun 2023, yaitu:
      i. Melakukan *assessment* bagi Pejabat Eksekutif dan Direksi Entitas Anak Perusahaan untuk mengetahui potensi kebutuhan pengembangan;
      ii. Melakukan pemetaan Pejabat Eksekutif dan membuat rencana suksesi untuk setiap Entitas Anak Perusahaan; serta
      iii. Melakukan rotasi dan mutasi jabatan Pejabat Eksekutif sesuai dengan kebutuhan pengembangan masing-masing pejabat dan keperluan Perusahaan.

2. Terkait Fungsi Remunerasi
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perusahaan mengenai besaran gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ABM untuk tahun 2023 berdasarkan capaian kinerja; dan
   b. Meninjau ulang kebijakan remunerasi, mengevaluasi kelayakan kebijakan remunerasi dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan berupa:
      i. Penyelarasan sistem *grading*; dan
      ii. Penyelarasan sistem remunerasi.

3. Evaluasi Dewan Komisaris dan Direksi
   Melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dan memfasilitasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk menindak lanjuti hasil evaluasi.

Completion of Duties in 2023

Throughout 2023, the ABM Nomination and Remuneration Committee have conducted the following activities:

1. Related to Nomination Function:
   a. Provide recommendations and assist in the implementation of nomination/selection of the Company's Board of Directors;
   b. Provide opinions on the nomination and remuneration of executives of the Company and its subsidiaries;
   c. Coordinate with GEM in the implementation of nomination and remuneration functions in the Company and its Subsidiaries. The nomination and remuneration functions performed with GEM in 2023, namely:
      i. Conducting assessments for Executive Officers and Directors of the Company's Subsidiaries to determine potential development needs;
      ii. Mapping Executive Officers and creating succession plans for each of the Company's Subsidiaries; and
      iii. Rotating and transferring the positions of Executive Officers in accordance with the development needs of each officer and the needs of the Company.

2. Related to Remuneration Function
   a. Provide recommendations to the Company's Board of Commissioners regarding the amount of salary and honorarium for members of ABM's Board of Commissioners and Board of Directors for 2023 based on performance achievements; and
   b. Review the remuneration policy, evaluate the appropriateness of the remuneration policy and facilities provided to members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and provide recommendations for necessary improvements/changes in the form of:
      i. Alignment of grading system; and
      ii. Alignment of the remuneration system.

3. Evaluation of the Board of Commissioners and Directors
   Evaluate the performance of the Board of Commissioners and Directors and facilitate the Board of Commissioners and Directors to follow up on the evaluation results.

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Evaluasi tata kelola Perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip GCG Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Tahun Buku 2022. Evaluation of the Company's governance and the implementation of GCG principles of the Board of Commissioners and Directors of the Company for the Financial Year 2022.	Hasil survei menunjukkan penilaian yang baik atas praktik tata Kelola dan penerapan prinsip-prinsip GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan selama tahun 2022. The survey results showed a favorable assessment of the governance practices and implementation of GCG principles by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors during 2022.

KOMITE INVESTASI
Investment Committee

Komite Investasi adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terkait investasi yang dilakukan ABM dan anak perusahaan. Keberadaan Komite Investasi memungkinkan aktivitas investasi dapat dilakukan secara objektif, dan dapat memberikan solusi mengenai manajemen risiko yang ada di dalamnya.

Persyaratan Keanggotaan
Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Investasi ABM, yaitu:
1. Memahami kegiatan usaha Perusahaan dan Grup ABM;
2. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya; serta
3. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Ketentuan Masa Jabatan
Masa jabatan Komite Investasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, yaitu maksimum selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan dan Komposisi Komite Investasi
Komite Investasi ABM beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua dan 3 (tiga) anggota yang merupakan Direktur Utama, Direktur, dan *Chief Financial Officer*.

Adapun komposisi Komite Investasi ABM untuk periode 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

The Investment Committee is a committee under the Board of Commissioners, which was established to assist the Board of Commissioners' duty and oversight implementation over the investment activities of ABM and its subsidiaries. The establishment of the Investment Committee ensures that the investment activities to be carried out objectively, and help us manage the investment risk.

Membership Qualification
Members of ABM Investment Committee must fulfill the following requirements, namely:
1. Understanding the Company and ABM Groups' business activities;
2. Having adequate knowledge and experience in accordance with his/her educational background; and
3. Demonstrating good communication skills.

Term of Office
The term of office of the Investment Committee is no longer than the term of office of the Board of Commissioners, which is a maximum of 3 (three) years and can be extended without due respect to dismiss it at any time.

Structure and Composition of the Investment Committee
ABM Investment Committee has 5 (five) members that consist of 2 (two) Independent Commissioner, who also serves as the Chairman, and 3 (three) other members comprising the President Director, Director and Chief Financial Officer.

The composition of ABM Investment Committee is presented in the following table:

Susunan Komite Investasi
Investment Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Rachmat Mulyana Hamami	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 029a/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 dan diubah dengan surat keputusan Dewan Komisaris No. 041/ABM-BOC-CIR/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 ABM Board of Commissioners Decree No. 029a/ABM-BOC-CIR/VI/2021 dated June 9, 2021 and amended by Board of Commissioners Decree No. 041/ABM-BOC-CIR/XII/2022 dated December 20, 2022
Arief Tarunakarya Surowidjojo	Anggota/ Direktur Utama Member/President Director	
Achmad Ananda Djajanegara	Anggota/ Direktur Utama Member/President Director	
Adrian Erlangga	Anggota/Direktur Member/Director	
Hans Christian Manoe	Anggota/Chief Financial Officer Member/Chief Financial Officer	

Profil Komite Investasi
Investment Committee Profile



Rachmat Mulyana Hamami
Ketua Komite Investasi/Komisaris Independen
Chairman of the Investment Committee/Independent Commissioner

Profil Rachmat Mulyana Hamami dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Rachmat Mulyana Hamami's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Arief Tarunakarya Surowidjojo
Anggota Komite Investasi/Komisaris Independen
Member of the Investment Committee/Independent Commissioner

Profil Arief Tarunakarya Surowidjojo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Arief Tarunakarya Surowidjojo's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Achmad Ananda Djajanegara
Anggota Komite Investasi/Direktur Utama (Chief Executive Officer/CEO)
Member of the Investment Committee/President Director (Chief Executive Officer/CEO)

Profil Achmad Ananda Djajanegara dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Achmad Ananda Djajanegara's profile can be seen in the Directors' Profile section in this Annual Report.



Adrian Erlangga
Anggota Komite Investasi/Direktur (Chief Operating Officer/COO)
Member of the Investment Committee/Director (Chief Operating Officer/COO)

Profil Adrian Erlangga dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
Adrian Erlangga's profile can be seen in the Directors' Profile section in this Annual Report.



Hans Christian Manoe
Anggota Komite Investasi/Chief Financial Officer (CFO)
Member of Investment Committee/Chief Financial Officer (CFO)

Profil Hans Christian Manoe dapat dilihat pada bagian Profil pejabat Eksekutif dalam Laporan Tahunan ini.
Hans Christian Manoe's profile can be seen in the Profile of the Executive Officers section in this Annual Report

Pengungkapan Independensi

Seluruh anggota Komite Investasi telah memenuhi aspek independensi sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Disclosure of Independence

Each member of the Investment Committee has fulfilled the independence aspects as described in the following table:

Aspek Independensi Independency Aspect	Rachmat Mulyana Hamami	Arief Tarunakarya Surowidjojo	Achmad Ananda Djajanegara	Adrian Erlangga	Hans Christian Manoe
Memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap Perusahaan. Having a conflict of interest towards the Company.	√	x	x	x	x
Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau calon anggota legislatif dan/atau eksekutif dan/atau yudikatif dan/atau jabatan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan. Concurrently serving as a political party administrator and/ or candidate of legislature and/or executive and/or judicial members and/or other positions that may have a potential of a conflict of interest.	x	x	x	x	x

√ : Ada/Have | x = Tidak ada/ None

Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite Investasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemampuan terbaik, dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan menjunjung tinggi independensi dan profesionalisme, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; serta
2. Mengutamakan integritas, independen, objektivitas, kejujuran, serta memberikan komitmen yang tinggi demi kemajuan Perusahaan dan terlaksananya *Good Corporate Governance*.

Code of Ethics

The key points of Code of Ethics that our members of the Investment Committee must comply are as follows:

1. Giving their best performance by always maintaining the confidentiality of the Company's information while upholding independence and professionalism, and providing sufficient time to carry out their duties; and
2. Putting integrity, independency, objectivity, honesty as priorities and demonstrating a high commitment to promote the growth of the Company and the implementation of Good Corporate Governance.

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi berpedoman pada Piagam Komite Investasi yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 012/ABM-BOC-RES/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Komite Investasi ABM dapat dilihat pada situs web bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris.

Work Guidelines

In performing its duties and responsibilities, the Investment Committee is guided by the Investment Committee Charter which has been ratified through the Decree of the Board of Commissioners No. 012/ABM-BOC-RES/III/2013 dated March 27, 2013.

A complete information on the ABM Investment Committee Charter is available on our website at Our Commitment > Corporate Governance > Board of Commissioners' Committee.

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi adalah sebagai berikut:

1. Menelaah efektivitas pedoman investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi Perusahaan dan Entitas Anak;
2. Menelaah dan mengkaji secara periodik pelaksanaan kegiatan investasi oleh Perusahaan dan Entitas Anak, meliputi kepatuhan pelaksanaan terhadap kebijakan investasi dan petunjuk pelaksanaan, termasuk tingkat risiko dari setiap investasi;
3. Melakukan pengkajian dan penelaahan terhadap kelengkapan piagam serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;
4. Memastikan dibuatnya risalah rapat komite untuk dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara regular; serta
5. Melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi.

Selain itu, Komite Investasi juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
2. Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari mitra kerja, antara lain Sekretaris Dewan Komisaris dan komite lain, Tim Investasi, dan/atau unit-unit operasional Perusahaan, termasuk Entitas Anak;
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris dan Tim Investasi;
4. Menyusun, mengevaluasi, mengubah, dan melaksanakan

Duties, Responsibilities, and Authorities

The duties and responsibilities of the Investment Committee are as follows:

1. Reviewing the effectiveness of the investment guidelines that are determined to guide the investment activities of the Company and its Subsidiaries;
2. Reviewing and assessing the implementation of investment activities by the Company and its Subsidiaries on periodical basis, including the compliance to the investment policies and technical guidance, including the level of risks of each investment;
3. Reviewing the comprehensiveness of the charter and providing recommendations to the Board of Commissioners on the necessary adjustments;
4. Ensuring that minutes of committee meetings are prepared to be further reported to the Board of Commissioners on a regular basis; and
5. Performing other tasks as stipulated in the Investment Committee Charter.

In addition, the Investment Committee is also entitled to the following authorities:

1. Accessing records or information on investments, the use of funds relating to investments, assets and other Company's resources related to the completion of tasks;
2. Requesting and/or accepting cooperation from the business partners, including the Secretary to the Board of Commissioners and other committees, the Investment Team, and/or the Company's operational units, including its Subsidiaries;
3. Engaging in a direct communication with the Board of Commissioners and the Investment Team;
4. Formulating, evaluating, modifying, and implementing the

Piagam, termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan komite, dengan persetujuan Dewan Komisaris; serta
5. Mendapatkan saran dari narasumber yang profesional, apabila diperlukan.

Charter, including determining the procedures and scope of work of the committee, with the approval of the Board of Commissioners; and
5. Accepting advice from professional sources, when needed.

Rapat Komite Investasi

Rapat Komite Investasi wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2023, Komite Investasi menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat tersebut sebagai berikut:

Investment Committee Meeting

Investment Committee meetings must be organized at least once in 3 (three) months. Throughout 2023, the Investment Committee held 4 (four) meetings with the attendance rate of each member at the meetings as follows:

Rekapitulasi Kehadiran Komite Investasi pada Rapat Komite Investasi Tahun 2023
Recapitulation of Investment Committee Attendance at the Investment Committee Meeting in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Rachmat Mulyana Hamami Ketua/Komisaris Utama | Chairman/President Commissioner	4	3	75,00
Arief Tarunakarya Surowidjojo Anggota/Member Independen | Chairman/Independent Commissioner	4	4	100,00
Achmad Ananda Djajanegara Anggota/Direktur Utama | /President Director	4	4	100,00
Adrian Erlangga Anggota/Direktur | Member/Director	4	4	100,00
Hans Christian Manoe Anggota/Chief Financial Officer | Member/Chief Financial Officer	4	4	100,00
Rata-rata Kehadiran **Average Attendance Rate**			**95,00**

Risalah Rapat Komite Investasi Tahun 2023
Minutes of the Investment Committee Meeting in 2023

Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
19 Januari 2023 January 19, 2023	Kuartal IV Fiscal Year 2022 Quarter IV Fiscal Year 2022	1. Rachmat Mulyana Hamami Ketua/Komisaris Utama | Chairman/President Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Anggota/Komisaris Independen | Member/Independent Commissioner 3. Achmad Ananda Djajanegara Anggota/Direktur Utama | Member/President Director 4. Adrian Erlangga Anggota/Direktur | Member/Director 5. Hans Christian Manoe Anggota/Chief Financial Officer | Member/Chief Financial Officer
20 April 2023 April 20, 2023	Kuartal I 2023 Quarter I 2023	1. Rachmat Mulyana Hamami Ketua/Komisaris Utama | Chairman/President Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Anggota/Komisaris Independen | Member/Independent Commissioner 3. Achmad Ananda Djajanegara Anggota/Direktur Utama | Member/President Director 4. Adrian Erlangga Anggota/Direktur | Member/Director 5. Hans Christian Manoe Anggota/Chief Financial Officer | Member/Chief Financial Officer
21 Juli 2023 July 21, 2023	Kuartal II 2023 Quarter II 2023	1. Arief Tarunakarya Surowidjojo Anggota/Komisaris Independen | Member/Independent Commissioner 2. Achmad Ananda Djajanegara Anggota/Direktur Utama | Member/President Director 3. Adrian Erlangga Anggota/Direktur | Member/Director 4. Hans Christian Manoe Anggota/Chief Financial Officer | Member/Chief Financial Officer

Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
20 Oktober 2023 October 20, 2023	Kuartal III 2023 Quarter III 2023	1. Rachmat Mulyana Hamami Ketua/Komisaris Utama | Chairman/President Commissioner 2. Arief Tarunakarya Surowidjojo Anggota/Komisaris Independen | Member/Independent Commissioner 3. Achmad Ananda Djajanegara Anggota/Direktur Utama | Member/President Director 4. Adrian Erlangga Anggota/Direktur | Member/Director 5. Hans Christian Manoe Anggota/Chief Financial Officer | Member/Chief Financial Officer

Program Peningkatan Kompetensi

Program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Rachmat Mulyana Hamami, Arief Tarunakarya Surowidjojo, Achmad Ananda Djajanegara, Adrian Erlangga dan Hans Christian Manoe selaku Ketua dan anggota Komite Investasi sepanjang tahun 2023 telah disajikan pada uraian Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi. Sementara itu, program peningkatan kompetensi yang diikuti oleh anggota Komite Investasi lainnya tersaji pada tabel berikut ini:

Competency Development Program

The competency improvement programs which were attended by Rachmat Mulyana Hamami, Arief Tarunakarya Surowidjojo, Achmad Ananda Djajanegara, Adrian Erlangga and Hans Christian Manoe as Chairman and members of the Investment Committee throughout 2023 are presented in the section of Competency Improvement Program for the Board of Commissioners and Board of Directors. Meanwhile, the competency improvement program where other member of the Investment Committee participated in are presented in the following table:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Hans Christian Manoe Anggota Komite Investasi/Chief Financial Officer (CFO) Member of Investment Committee/ Chief Financial Officer (CFO)	Undangan *Executive Forum: Understanding Risk Management & Insurance* Executive Forum Invitation: Understanding Risk Management & Insurance	Jakarta, 21 Maret 2023 Jakarta, March 21, 2023	ABM/Willis Towers Watson

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang 2023, Komite Investasi melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Menyampaikan risalah kegiatan investasi dan divestasi di sepanjang tahun 2023;
2. Memberikan arahan dan parameter investasi dan divestasi untuk tahun 2023;
3. Menyampaikan informasi terkait fokus investasi dan divestasi untuk tahun 2023;
4. Memaparkan informasi terkait investasi dan divestasi sepanjang semester 1 dan semester 2 tahun 2023;
5. Menyampaikan informasi terkait divestasi Aset CK di MIFA;
6. Menyampaikan informasi terkait divestasi investasi multi-axle CKB Logistics;
7. Menyampaikan informasi terkait investasi *Upgrading capacity Bunati Port* PBR;
8. Menyampaikan informasi terkait proyek Biogas *Powerplant* Sungai Bedaun;
9. Memaparkan perkembangan investasi dan divestasi hingga kuartal keempat 2023;
10. Memaparkan rencana investasi dan divestasi untuk tahun selanjutnya;
11. Memaparkan terkait *approval matrix* untuk investasi dan divestasi.

Completion of Duties in 2023

Throughout 2023, the Investment Committee have performed activities as part of its duties and responsibilities as follows:

1. Provide minutes of investment and divestment activities throughout 2023;
2. Provide investment and divestment directions and parameters for 2023;
3. Provide information related to the investment and divestment focus for 2023;
4. Present information related to investment and divestment during semester 1 and semester 2 of 2023;
5. Provide information on the divestment of CK Assets in MIFA;
6. Present information regarding the divestment of CKB Logistics multi-axle investment;
7. Deliver information regarding investment in Upgrading capacity of Bunati Port PBR;
8. Deliver information on the Bedaun River Biogas Powerplant project;
9. Present the progress of investment and divestment until the fourth quarter of 2023;
10. Present the investment and divestment plan for the following year;
11. Present the approval matrix for investment and divestment.

KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG)

Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee



Komite ESG adalah organ pendukung Dewan Komisaris, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas implementasi ESG di Grup ABM. Hasil kegiatan Komite ESG dalam tahun 2023 diharapkan dapat mendukung Dewan Komisaris ABM dalam melakukan pengawasan atas dan mengawal keberlanjutan implementasi operasi berbasis ESG, termasuk pengelolaan ESG Initiatives di Grup ABM, serta memberikan nasihat kepada Manajemen ABM dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam memastikan keberlanjutan usaha (*business sustainability*) Grup ABM.

Persyaratan Keanggotaan

Sesuai dengan Piagam Komite ESG, para anggota Komite ESG, yang berasal dari berbagai latar belakang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Anggota Direksi atau karyawan tetap atau anggota komite atau penasihat di salah satu Grup ABM atau pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan;
2. Untuk anggota yang merupakan karyawan Grup ABM, telah bekerja di Grup ABM berturut-turut selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Untuk anggota yang merupakan karyawan Grup ABM, tidak pernah diberikan Surat Peringatan (SP) dari perusahaan di Grup ABM terkait dengan kinerja dan/atau pelanggaran atas peraturan, disiplin dan/atau etika kerja; serta
4. Mendapat rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Perusahaan.

The ESG Committee serves as a supporting organ of the Board of Commissioners, with duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in overseeing the implementation of ESG in the ABM Group. The results of the ESG Committee's activities in 2023 are expected to support the ABM Board of Commissioners in supervising and overseeing the sustainability of the implementation of ESG-based operations, including the management of ESG Initiatives in the ABM Group, as well as providing advice to ABM Management in making policies and decisions in ensuring the business sustainability of the ABM Group.

Membership Requirements

In accordance with the ESG Committee Charter, the members of the ESG Committee, who come from various backgrounds, must fulfill the following requirements:

1. Members of the Board of Directors or a permanent employee or a member of a committee or advisory board in one of the ABM Group or the affiliated parties of the Company;
2. For members who are employees of the ABM Group, must have worked in the ABM Group for more than 3 (three) consecutive years;
3. For members who are employees of the ABM Group, has never accepted a Warning Letter (SP) from a company of the ABM Group regarding their performance, and/ or violations of regulations and discipline, and/or work ethics; and
4. Acquire the recommendation from members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa kerja anggota Komite ESG adalah 3 (tiga) tahun tetapi tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perusahaan yang sedang menjabat dan dapat ditunjuk kembali dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan atau tanpa alasan.

Susunan dan Komposisi Komite ESG

Anggota Komite ESG terdiri dari Komisaris Independen, pihak independen, maupun perwakilan karyawan Grup ABM yang menjalankan fungsi pelaksanaan dan/atau pengawasan terhadap operasi perusahaan-perusahaan ABM Grup yang berbasis ESG dan ESG Initiatives.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 036/ABM-BOC-LTR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, Komite ESG yang menjabat untuk periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Term of Office

The term of office of members of the ESG Committee is 3 (three) years or no longer than the term of office of the currently serving Board of Commissioners of the company and can be reappointed without due respect to the rights of the Board of Commissioners to dismiss them at any time, with or without reason.

Structure and Composition of the ESG Committee

Anggota Komite ESG terdiri dari Komisaris Independen, pihak independen, maupun perwakilan karyawan Grup ABM yang menjalankan fungsi pelaksanaan dan/atau pengawasan terhadap operasi perusahaan-perusahaan ABM Grup yang berbasis ESG dan ESG Initiatives.

Based on the Decree of the Board of Commissioners of No. 036/ABM-BOC-LTR/VIII/2021 dated August 10, 2021, the ESG Committee serving for the 2021-2024 period are as follows:

Susunan Komite ESG
ESG Committee Composition

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Arief Tarunakarya Surowidjojo	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 036/ABM-BOC-LTR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 ABM Board of Commissioners Decree No. 036/ABM-BOC-LTR/VIII/2021 dated 10 August 2021
Andradiet I.J. Alis	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	
Rindra Donovan	Anggota/Sekretaris Perusahaan Member/Corporate Secretary	
Emilia Katrina	Anggota/Head of Corporate Communication & CSR Member/Head of Corporate Communication & CSR	
Aris Ahdiat Kartasasmita	Anggota/Group Head of Legal Member/Group Head of Legal	

Profil Komite ESG
Profile of ESG Committee



Arief Tarunakarya Surowidjojo
Ketua Komite ESG/Komisaris Independen
Chairman of the ESG Committee/Independent Commissioner

Profil Arief Tarunakarya Surowidjojo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
Arief Tarunakarya Surowidjojo's profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Rindra Donovan
Anggota Komite ESG/Sekretaris Perusahaan
Member of the ESG Committee/Corporate Secretary

Profil Rindra Donovan dapat dilihat pada bagian Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
Rindra Donovan's profile can be seen in the Corporate Secretary section of this Annual Report



Andradiet I.J. Alis
Anggota Komite ESG
Member of ESG Committee

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Pangkalpinang, 17 Agustus 1963 | Born in Pangkalpinang, August 17, 1963
Usia 60 tahun | 60 years old
Domisili Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Education
- Sarjana Teknik Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (1998);
  Bachelor's Degree in Mining Engineering, Bandung Institute of Technology (1988);
- Master of Business Administration, Sekolah Bisnis Manajemen, Institut Teknologi Bandung (2020); dan
  Master of Business Administration, School of Management Business, Bandung Institute of Technology (2020); and
- Insinyur, Program Profesi Insinyur, Institut Teknologi Bandung (2021).
  Engineer, Engineering Profession Program, Bandung Institute of Technology (2021).

Sertifikasi Profesi | Certificate
- Certification of Audit Committee Practices (CACP) No. 1009, IKAI (Jakarta), tahun 2016;
  Certification of Audit Committee Practices (CACP) No. 1009, IKAI (Jakarta), 2016;
- Insinyur Profesional Madya (IPM) No. 2-14-00-000036-01 dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) No. 2014.21.1.2.00006871, Persatuan Insinyur Indonesia- PII (Jakarta), tahun 2016, s.d. tahun 2026;
  Associate Professional Engineer (IPM) No. 2-14-00-000036-01 and Engineer Registration Certificate (STRI) No. 2014.21.1.2.00006871, Indonesian Engineers Association- PII (Jakarta), 2016, until 2026;
- Ahli Estimasi Cadangan Batubara No. reg. B0513 2114 7 0011007 2022, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tahun 2022, s.d. tahun 2026;
  Coal Reserve Estimation Expert No. reg. B0513 2114 7 0011007 2022, National Professional Certification Agency (BNSP), 2022, to 2026;
- Ahli Estimasi Cadangan Mineral No. reg. B0703 2114 7 0010994 2022, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tahun 2022, s.d. tahun 2026;
  Mineral Reserve Estimation Expert No. reg. B0703 2114 7 0010994 2022, National Professional Certification Agency (BNSP), 2022, to 2026;
- Competent Person Indonesia (CPI) Pelaporan Cadangan Batubara dan Timah No. 9200467.009, PERHAPI (Jakarta); tahun 2012;
  Competent Person Indonesia (CPI) Coal and Tin Reserves Reporting no. 9200467.009, PERHAPI (Jakarta); year 2012;
- Asesor Kompetensi Pertambangan No. reg. MET.000.001648 2008, Badan Nasional Sertifikasi Profesi- BNSP (Jakarta), tahun 2008, s.d. tahun 2025; dan
  Mining Competency Assessor No. reg. MET.000.001648 2008, National Professional Certification Agency - BNSP (Jakarta), 2008, until 2025; and
- Asesor Learning Propensity Assessment Device (LPAD) No. Reg. 53417, The Feuerstein Institute (Jerusalem) tahun 2019.
  Learning Propensity Assessment Device (LPAD) Assessor No. Reg. 53417, The Feuerstein Institute (Jerusalem) in 2019.

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Mine Planning Engineer, PT Kaltim Prima Coal (KPC) (1988-1993);
  Mine Planning Engineer at PT Kaltim Prima Coal (KPC) (1988-1993);
- Mining Development Manager, PT Vietmindo Energitama (1993-1995);
  Mining Development Manager at PT Vietmindo Energitama (1993-1995);
- Anggota Komite Audit PT Timah (Persero) Tbk (2007-2011);
  Member of the Audit Committee at PT Timah (Persero) Tbk (2007-2011);
- Anggota Komite GCG PT TIMAH (Persero) Tbk (2011);
  Member of the GCG Committee at PT TIMAH (Persero) Tbk (2011);
- Anggota Komite Audit PT Sumberdaya Sewatama (2013-2019); dan
  Member of the Audit Committee at PT Sumberdaya Sewatama (2013-2019); and
- Anggota Komite Audit ABM (2011-Mei 2021).
  Member of ABM Audit Committee (2011-May 2021).

Kegiatan Organisasi Profesi
Professional Organization Activities
- Ketua Komite Competent Person PERHAPI (2016-2019);
  Chairman of the PERHAPI Competent Person Committee (2016-2019);
- Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (2010-2016); dan
  Member of the Management Board of the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) (2010-2016); and
- Dewan Kehormatan dan Dewan Sertifikasi IKAI (2016-2019).
  Honorary Board and IKAI Certification Board (2016-2019).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions
Di Luar Perusahaan:
Other than ABM:
- Pengajar (Dosen Luar Biasa) Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Trisakti dan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan modal insani pertambangan (2006-sekarang); dan
  Mining Lecturer (Honorary Lecturer) at Trisakti University and has been active in various mining investment development activities (2006-present); and
- Konsultan dan Business Adviser Pertambangan (1995-sekarang).
  Mining Consultant and Business Advisor (1995-present).

Kegiatan Organisasi Profesi
Professional Organization Activities

- Anggota PERHAPI (1992-sekarang), PII (2006-sekarang), IKAI (2007-sekarang), Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia-Prometindo (2021-sekarang), dan Society of Mining Professor-SOMP (2019-sekarang);
  Member of PERHAPI (1992-present), PII (2006-present), IKAI (2007-present), Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia– Prometindo (2021-present), and Society of Mining Professor-SOMP (2019-present);
- Anggota Dewan Etika Profesi PERHAPI (2021-sekarang); dan
  Member of Board of Ethics of PERHAPI (2021-present); and
- Anggota Komite Etika Profesi Prometindo (2021-sekarang).
  Member of Committee of Ethics of Prometindo (2021-present).

Di Dalam Perusahaan: tidak ada.
Within ABM: None



Aris Ahdiat Kartasasmita
Anggota Komite ESG
Member of ESG Committee

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Subang, 17 April 1975 | Born in Subang, April 17, 1975
Usia 49 tahun | 49 years old
Domisili Depok, Jawa Barat, Indonesia | Domicile in Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Education
- Universitas Indonesia, Fakultas Hukum (2000); dan
  Bachelor's Degree in Law, University of Indonesia (2000); and
- Rijksuniversiteit Groningen, Master Degree (2002).
  Master's Degree, Rijksuniversiteit Groningen (2002).

Sertifikasi Profesi | Professional Certification
Tidak ada.
None

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Associate di HAEYS Associates (2000-2001) dan Roosdiono & Partners (2003-2004);
  Associate at HAEYS Associates (2000-2001) and Roosdiono & Partners (2003-2004);
- PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills Division sebagai Assistant Legal Manager (2004-2007);
  Assistant Legal Manager at PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills Division (2004-2007);
- Associate di Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo (2007-2010);
  Associate at Nurhadian Kartohadiprodjo Noorcahyo (2007-2010);
- Legal Manager ABM (2010-2018); dan
  Legal Manager at ABM (2010-2018); and
- Head of Legal Department ABM (2018-2020).
  Head of Legal Department at ABM (2018-2020).

Rangkap Jabatan | Concurrent Positions
Di Luar Perusahaan: tidak ada.
Other than ABM: None

Di Dalam Perusahaan: Group Head of Legal (2021-sekarang).
Within ABM: Group Head of Legal (2021-present).



Emilia Katrina
Anggota Komite ESG
Member of ESG Committee

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Usia 46 tahun | 46 years old
Kelahiran Jakarta, 20 Februari 1976 | Born in Jakarta, February 20, 1976
Domisili Depok, Jawa Barat, Indonesia | Domicile in Depok, West Java, Indonesia

Riwayat Pendidikan | Education
- La Trobe University, Melbourne-Australia, Bachelor of Economics & Human Resources (1997); dan
  Bachelor's Degree in Economics & Human Resources, La Trobe University, Melbourne-Australia (1997); and
- Swinburne University of Technology, Melbourne-Australia, Master of International Business (1999).
  Master of International Business, Swinburne University of Technology, Melbourne-Australia (1999).).

Sertifikasi Profesi | Certification
- CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA, Jakarta (2021);
  CERG (Certified in Enterprise Risk Governance), ERMA, Jakarta (2021);
- GRI Certified Sustainability Reporting Assessor (CSRA), National Centre of Sustainability for Reporting (NCSR), Jakarta-Amsterdam (2018);
  GRI Certified Sustainability Reporting Assessor (CSRA), National Centre of Sustainability for Reporting (NCSR), Jakarta-Amsterdam (2018);
- Basic First Aid Training (AHA Guideline 2015), Fullerton Health, PT Global Assistance and Healthcare (2018);
  Basic First Aid Training (AHA Guideline 2015), Fullerton Health, PT Global Assistance and Healthcare (2018);
- GRI Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), National Centre of Sustainability for Reporting (NCSR), Jakarta-Amsterdam (2015); dan
  GRI Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), National Centre of Sustainability for Reporting (NCSR), Jakarta-Amsterdam (2015); and
- Certified Project Management (CRISP) Learning, SumTotal, Lutan Edukasi (2009).
  Certified Project Management (CRISP) Learning, SumTotal, Lutan Edukasi (2009).

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Senior Analyst and Team Leader, ANZ Bank, Melbourne-Australia (1997-2003);
  Senior Analyst and Team Leader, ANZ Bank, Melbourne-Australia (1997-2003);
- Director of Resource Development & Communication Habitat for Humanity International-Indonesia Region (2003-2007);
  Director of Resource Development & Communication Habitat for Humanity International-Indonesia Region (2003-2007);
- Director of National Resource Development-World Vision Indonesia (2007-2012); dan
  Director of National Resource Development-World Vision Indonesia (2007-2012); and
- Director of Education and Outreach-Dharma Bermakna (2012-2013).
  Director of Education and Outreach-Dharma Bermakna (2012-2013).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position
Di Luar Perusahaan:
Outside the Company:
Dewan Pengawas Yayasan Yamakindo Indonesia (2020-sekarang).
Yamakindo Indonesia Foundation Supervisory Board (2020-present).

Di Dalam Perusahaan:
Within the Company:
Head of Corporate Communication & CSR (2022-sekarang).
Head of Corporate Communication & CSR (2022-present).

Pengungkapan Independensi

Seluruh anggota Komite ESG telah memenuhi aspek independensi sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Disclosure of Independence

Each member of the ESG Committee has fulfilled the independence aspects as described in the following table:

Aspek Independensi	ATS	AJA	RD	EK	AAK
Memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) terhadap Perusahaan. Having a conflict of interest towards the Company.	X	X	X	X	X
Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau eksekutif dan/atau yudikatif dan/atau jabatan lain yang memiliki potensi benturan kepentingan. Concurrently serving as a political party administrator and/ or candidate of legislature and/or executive and/or judicial members and/or other positions that may have a potential of a conflict of interest.	X	X	X	X	X

√ : Ada/Have | x = Tidak ada/Nil

Keterangan | Notes:
ATS: Arief Tarunakarya Surowidjojo
AJA: Andradiet I.J. Alis
RD: Rindra Donovan
EK: Emilia Katrina
AAK: Aris Ahdiat Kartasasmita

Kode Etik

Pokok-pokok Kode Etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Komite ESG adalah:

1. Anggota Komite ESG berkomitmen untuk memberikan kemampuan terbaik dengan senantiasa menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan Grup ABM serta menjunjung tinggi profesionalitas; dan
2. Anggota Komite ESG bekerja dengan mengutamakan integritas, objektivitas, kejujuran, ketulusan serta komitmen yang tinggi termasuk kemampuan terbaiknya demi kemajuan Perusahaan dan Grup ABM (berdasarkan Nilai-nilai Inti Perusahaan/*Corporate Core Values: Integritas, Continuous Development, Excellence, Proactive, Accountability, Teamwork*).

Code of Ethics

The fundamental points of Code of Ethics that members of the ESG Committee must comply are as follow:

1. Members of the ESG Committee are committed to showing their best capabilities by always maintaining the confidentiality of the information of the Company and ABM Group as well as upholding professionalism; and
2. Corporate Core Values: Integritas, Continuous Development, Excellence, Proactive, Accountability, Teamwork). Members of the ESG Committee are working by prioritizing integrity, objectivity, honesty, sincerity and demonstrating high commitment as well as their best abilities to advance the Company and the ABM Group (based on Corporate Core Values: Integrity, Continuous Development, Excellence, Proactive, Accountability, Teamwork).

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite ESG berpedoman pada Piagam Komite ESG yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 035/ ABM-BOC-LTR/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Komite ESG dapat dilihat pada laman (situs *web*) bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris.

Work Guidelines

To run the duties and responsibilities, the ESM Committee refers to the ESG Committee Charter, which was ratified based on the ABM Board of Commissioners' Decree No. 035/ ABM-BOC-LTR/VIII/2021 dated August 10, 2021.

The complete information about the ESG Committee Charter is available on the website in the section of Our Commitment > Corporate Governance > Board of Commissioners' Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ini terbagi dalam 3 (tiga) bidang kerja, dengan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Bidang Lingkungan (*Environmental*)**
   a. Menyusun dan menetapkan indikator serta target pemenuhan dari sektor lingkungan, yang disyaratkan oleh regulator dan/atau lembaga pemeringkat ESG dengan reputasi yang baik;
   b. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi terkait informasi penerapan lingkungan, yang mendukung komitmen persetujuan Paris *Agreement*; serta
   c. Meningkatkan ESG Rating dalam upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang berdampak pada sektor lingkungan.
2. **Bidang Sosial (*Social*)**
   a. Menyusun dan menetapkan indikator serta target pemenuhan dari sektor sosial yang disyaratkan oleh regulator dan/atau lembaga pemeringkat ESG dengan reputasi yang baik;
   b. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi terkait informasi penerapan sosial baik secara internal (kepada insan grup ABM) dan eksternal (pemangku kepentingan); serta

Duties and Responsibilities

ESG committee is divided into 3 (three) working areas, with the following responsibilities:

1. **Environmental**
   a. Formulating and determining the indicators and targets for compliance of the environmental aspect as required by the regulators and/or the reputable ESG rating agencies;
   b. Carrying out a socialization and consultation about the environmental application information, which supports our commitment to the Paris Agreement; and
   c. Improving the ESG Rating as an effort to increase public trust in the Company's environmentally sound business management.
2. **Social**
   a. Formulating and determining the indicators and targets to achieve in the social sector as required by the regulators and/or the reputable ESG rating agencies;
   b. Conducting socialization and consultation on the information about the social implementation both internally (to ABM group employees) and externally (stakeholders); and

c. Meningkatkan ESG *Rating* dalam upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan bisnis yang berdampak pada sektor sosial termasuk di dalamnya perihal *health and safety*.

3. **Bidang Tata Kelola (*Governance*)**
   a. Menyusun dan menetapkan indikator serta target pemenuhan dari sektor tata kelola yang disyaratkan oleh regulator dan/atau lembaga pemeringkat ESG dengan reputasi yang baik;
   b. Memastikan disusunnya kebijakan dan prosedur-prosedur yang mendukung pelaksanaan ESG agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku;
   c. Melakukan peninjauan (*review*) secara berkala (*reguler*) (serta melakukan revisi apabila diperlukan) terhadap dokumentasi ESG di Grup ABM;
   d. Mempersiapkan dan melaksanakan program serta kegiatan yang mendukung perasi berbasis ESG dan ESG Initiatives bagi kepentingan Grup ABM;
   e. Melaksanakan sosialisasi dan konsultasi terkait informasi penerapan GCG (dan Nilai-Nilai Utama) kepada Grup ABM;
   f. Melakukan riset & perbandingan (benchmarking) dengan perusahaan lain yang berada dalam satu peer, serta survei terhadap pemenuhan operasi berbasisi ESG dan ESG Initiatives di Grup ABM; serta
   g. Melakukan kerja sama dengan fungsi-fungsi lain dalam Grup ABM dengan tujuan tercapainya implementasi ESG dengan baik bagi kepentingan Grup ABM.

Selain itu, Komite ESG juga memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Membentuk tim kerja dan/atau bekerja sama dengan mitra kerja/*department*/unit kerja di Grup ABM dan perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perusahaan yang dipandang perlu untuk menjalankan fungsi *monitoring* dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan operasi berbasis ESG dan ESG *Initiatives* di Grup ABM;
2. Melakukan koordinasi dengan Komite-Komite lainnya yang berada di bawah Dewan Komisaris, Direksi maupun pihak eksternal yang dipandang perlu;
3. Meminta pendapat pihak lain dan/atau menggunakan jasa pihak lain baik dari pihak internal Grup ABM maupun dari pihak eksternal, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan *survey*, *benchmark* serta *assessment*;
4. Memperoleh seluruh data dan/atau dokumen yang dianggap perlu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Komite ESG; serta
5. Melakukan kunjungan kerja ke unit-unit kerja Grup ABM untuk memastikan implementasi dari operasi berbasis ESG dan ESG *Initiatives*.

Rapat Komite ESG

Komite ESG wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2023, Komite ESG menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat tersebut sebagai berikut:

c. Improving the ESG Rating as an effort to increase public trust in the Company's business management that has social impact, including on health and safety issues.

3. **Governance**
   a. Formulating and determining the indicators and targets to achieve in the governance sector as required by the regulators and/or the reputable ESG rating agencies;
   b. Ensuring the formulation of policies and procedures to support the implementation of ESG, which comply with the existing laws and regulations;
   c. Conducting a regular review (and make necessary adjustments if necessary) upon the documentation of the ABM Group's ESG activities;
   d. Preparing and implementing programs and activities that support ESG-based operations and ESG Initiatives for the benefit of the ABM Group;
   e. Conducting socialization and consultation related to the implementation of GCG (and Core Values) of ABM Group;
   f. Conducting research & benchmarking with other peer companies, as well as surveys on the fulfillment of ESG-based operations and ESG Initiatives in the ABM Group; and
   g. Collaborating with other functions within the ABM Group with the goal of realizing the ESG implementation for the benefit of ABM Group.

In addition, the ESG Committee is also entitled to the following authorities:

1. Establishing a working team and/or cooperating with the business partners/departments/units of ABM Group and other affiliated companies if necessary, so as to run the function of monitoring and evaluation (monev) of the implementation of ESG-based operations and ESG Initiatives in the ABM Group;
2. Coordinating with the other Committees under Board of Commissioners, Board of Directors and other external parties if necessary;
3. Requesting opinion of other parties and/or using the services of internal or external parties of ABM Group, including not limited to conduct a survey, benchmark and assessment;
4. Collecting the whole data and/or documents required for ESG Committee to conduct the duties and responsibilities; and
5. Making a visits to ABM Group working units to ensure the implementation of ESG-based operations and ESG Initiatives.

ESG Committee Meetings

The ESG Committee must meet at least once in every 3 (three) months. In the course of 2023, ESG Committee held a total of 4 (four) meetings with attendance rate of each member in those meetings, they were:

Rekapitulasi Kehadiran Komite ESG pada Rapat Komite ESG Tahun 2023
Recapitulation of ESG Committee Attendance at the ESG Committee Meeting in 2023

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner	4	4	100,00
Andradiet J. Alis Anggota/Pihak Independen | Member Independent Party	4	4	100,00
Rindra Donovan Anggota/Sekretaris Perusahaan | Member/Corporate Secretary	4	4	100,00

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran Attendance
Emilia Katrina Anggota/Head of Corporate CSR | Member/Head of Corporate CSR	4	4	100,00
Aris Ahdiat Kartasasmita Anggota/Group Head of Legal | Member/Group Head of Legal	4	4	100,00
Rata-rata Kehadiran **Average Attendance Rate**			**100,00**

Risalah Rapat Komite ESG Tahun 2023
Minutes of ESG Committee Meeting in 2023

Tanggal Rapat Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
18 Januari 2023 January 18, 2023	*Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues,* SHE *Reports & Issues,* CSR *Programs, Legal Issues* dan GCG & *Compliance Reports* - kuartal 4 tahun 2022 Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues dan GCG & Compliance Reports - in fourth quarter of 2022	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Andradiet J. Alis Anggota/Pihak Independen | Member Independent Party • Rindra Donovan Anggota/Sekretaris Perusahaan | Member/Corporate Secretary • Emilia Katrina Anggota/Head of Corporate CSR | Member/Head of Corporate CSR • Aris Ahdiat Kartasasmita Anggota/Group Head of Legal | Member/Group Head of Legal
19 April 2023 April 19, 2023	Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues dan GCG & Compliance Reports - kuartal 1 tahun 2023 Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues and GCG & Compliance Reports - 1st quarter of 2023	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Andradiet J. Alis Anggota/Pihak Independen | Member Independent Party • Rindra Donovan Anggota/Sekretaris Perusahaan | Member/Corporate Secretary • Emilia Katrina Anggota/Head of Corporate CSR | Member/Head of Corporate CSR • Aris Ahdiat Kartasasmita Anggota/Group Head of Legal | Member/Group Head of Legal
20 Juli 2023 July 20, 2023	Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues dan GCG & Compliance Reports - kuartal 2 tahun 2023 Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues and GCG & Compliance Reports - 2nd quarter of 2023	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Andradiet J. Alis Anggota/Pihak Independen | Member Independent Party • Rindra Donovan Anggota/Sekretaris Perusahaan | Member/Corporate Secretary • Emilia Katrina Anggota/Head of Corporate CSR | Member/Head of Corporate CSR • Aris Ahdiat Kartasasmita Anggota/Group Head of Legal | Member/Group Head of Legal
24 Oktober 2023 October 24, 2023	Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues dan GCG & Compliance Reports - kuartal 3 tahun 2023 Sustainability Strategy, Resilience Strategy, Risk & Mitigations, Human Capital Issues, SHE Reports & Issues, CSR Programs, Legal Issues and GCG & Compliance Reports, 2023 - 3rd quarter of 2023	• Arief Tarunakarya Surowidjojo Ketua/Komisaris Independen | Chairman/Independent Commissioner • Andradiet J. Alis Anggota/Pihak Independen | Member Independent Party • Rindra Donovan Anggota/Sekretaris Perusahaan | Member/Corporate Secretary • Emilia Katrina Anggota/Head of Corporate CSR | Member/Head of Corporate CSR • Aris Ahdiat Kartasasmita Anggota/Group Head of Legal | Member/Group Head of Legal

Ketua dan anggota Komite ESG juga diundang dan menghadiri rapat-rapat kuartalan yang diselenggarakan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2023, dengan keseluruhan 16 rapat.

The Chairman and members of the ESG Committee were also invited to and attended quarterly meetings organized by the Audit Committee throughout 2023, with a total of 16 meetings.

Program Peningkatan Kompetensi

Sepanjang tahun 2023, Komite ESG telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi sebagai berikut:

Competency Development Program

Throughout 2023, ESG Committee has joined in the following competence development programs as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Andradiet J. Alis	*Creating System Value with Future Fit Business: Why, What and How*	Virtual, 10 Februari 2023 Virtual, February 10, 2023	Social Investment Indonesia
	Data Analytics	Virtual, 11 Februari 2023 Virtual, February 11, 2023	Lembaga Pelatihan Kompetensi - Teknik dan Manajemen Industri (LPKTMI)
	Let's T(W)alk CSR, When Talking is an Action	Virtual, 17 Maret 2023 Virtual, March 17, 2023	*Social Investment* Indonesia
	Trending Inovasi Pangan dan Energi Food and Energy Innovation Trend	Virtual, 25 Maret 2023 Virtual, March 25, 2023	LPKTMI
	Social Entrepreneurial Ideas; Build Social Impact into Business Activities	Virtual, 31 Maret 2023 Virtual, March 31, 2023	*Social Investment* Indonesia
	Menerobos Batas Dengan Chatgpt: Transformasi Pembelajaran di Era Education 4.0 Breaking Through Boundaries With Chatgpt: Transforming Learning in the Era of Education 4.0	Virtual, 6 Mei 2023 Virtual, May 6, 2023	LPKTMI
	CSR dan SDGs Berdampingan, Bangkit dari Keterpurukan, Menjemput Kesejahteraan CSR and SDGs Side by Side, Emerging from Adversity, Achieving Prosperity	Virtual, 12 Mei 2023 Virtual, May 12, 2023	*Social Investment* Indonesia
	Estimasi dan Pelaporan Cadangan Batu Bara Estimation and Report of Coal Reserve	Jakarta, 22-23 Mei 2023 Jakarta, May 22-23, 2023	PT Edukasi Pengembangan Profesi (Eduwoo)
	Teknologi *Artificial Intelligence* Artificial Intelligence Technology	Virtual, 26 Mei 2023 Virtual, May 26, 2023	LPKTMI
	Menggali Potensi Diri Melalui Konsep *Talents Mapping* Exploring Your Potential Through the Concept of Talents Mapping	Virtual, 17 Juni 2023 Virtual, June 17, 2023	LPKTMI
	Mining Financial Modeling	Jakarta, 26-28 Juli 2023 Jakarta, July 26-28, 2023	Eduwoo
	Mengenal *Life Cycle Assessment* (LCA) Dan Peranan Lca Terhadap Kinerja Perusahaan Understanding Life Cycle Assessment (LCA) and the Role of Lca on Company Performance	Virtual, 31 Agustus 2023 Virtual, August 31, 2023	LPKTMI
	Estimasi Sumberdaya Batu Bara Coal Resource Estimation	Samarinda, 15-16 September 2023 Samarinda, September 15-16, 2023	Eduwoo
	Mining Financial Modeling	Jakarta, 23-24 Oktober 2023 Jakarta, October 23-24, 2023	Eduwoo
	Persiapan Competent Person Pelaporan Sumber Daya dan Cadangan Mineral/ Batu Bara Preparation of Competent Person Reporting on Mineral/Coal Resources and Reserves	Jakarta, 8 Desember 2023 Jakarta, December 8, 2023	Eduwoo
Aris Ahdiat Kartasasmita	*Avoiding and managing international disputes - Practical tips and recent developments from A&O and the ICC*	Jakarta, 4 Juli 2023 Jakarta, July 4, 2023	Allen & Overy
Emilia Katrina	*Gender Mainstreaming: Why and How it influences The Extractive Industry's Market*	Jakarta, 27 Januari 2023 Jakarta, January 27, 2023	WIME (Women In Mining & Energy) Association
	Panduan Penyusunan Laporan Report Preparation Guide	Jakarta, 14 Maret 2023 Jakarta, March 14, 2023	APBI – ICMA (Asosiasi Perusahaan Batu bara Indonesia)
	GRI *Sector Standard for Mining - public consultation*	Virtual, 23 Februari 2023 Virtual, February 23, 2023	GRI International
	Launching Perizinan KBLI 35203 Bahan Bakar Biogas Launching Licensing KBLI 35203 Biogas Fuel	Virtual, 6 Maret 2023 Virtual, March 6, 2023	KLHK
	Sharing Session ESG *in Corporation with* ANJ	Jakarta, 23 Mei 2023 Jakarta, May 23, 2023	ANJ
	Seminar Accelerating Sustainable Development : "Experiences from the Frontlines in Promoting Sustainable Bond/Sukuk Issuances and Investment"	Virtual, 22 Juni 2023 Virtual, June 22, 2023	IDX & OJK
	Conference: Indonesia Most Powerful Women Business Leader 2023	Virtual, 27 Juni 2023 Virtual, June 27, 2023	SWA & SWA network

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
	Sustainability Reporting Workshop	Jakarta, 20 November 2023 Jakarta, November 20, 2023	NCCR
	Media Relation & Communication	Jakarta, 7 Desember 2023 Jakarta, December 7, 2023	Alika Communication
	Technology Day: Artificial Intelligence: Shaping the future of work	Jakarta, 29 Agustus 2023 Jakarta, August 29, 2023	Microsoft & ABM

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite ESG telah menjalankan kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat-rapat kuartalan Komite ESG dan menghadiri rapat-rapat terkait, termasuk rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Komite Audit ABM, dalam rangka pengumpulan informasi mengenai progres implementasi ESG dalam kegiatan operasional Grup ABM, serta proses pendalaman informasi lainnya;
2. Pemantauan perkembangan ABM *Framework of* ESG *Journey*, yang merupakan panduan implementasi ESG dalam kegiatan operasional Grup ABM hingga akhir tahun 2025, sekaligus digunakan sebagai rujukan dalam melakukan pengawasan atas di Grup ABM;
3. Pemantauan progres implementasi strategi *Resiliency* yang difokuskan pada pengelolaan ESG *initiatives* dalam rangka pemenuhan sasaran pada 6 ESG faktor yang meliputi *Employee health & safety* dan *Anti-corruption* (kategori ambisi *distinctive*), *Bio-diversity & land use* dan Material, *chemicals & waste* (kategori *leading*), serta *Energy consumption* & GHG dan *Water use & pollution* (kategori *proactive*);
4. Pemantauan hasil penilaian MSCI atas ESG *Rating* ABM yang diterbitkan pada bulan Oktober 2022 yakni "BB", serta diskusi dan pemantauan upaya yang akan dilakukan oleh Manajemen ABM untuk meningkatkan MSCI ESG *rating* pada tahun 2023;
5. Pemantauan implementasi ABM *Triple Bottom Line Balance Score Card* (ABM TBL BSC) terutama yang terkait hasil pengukuran kinerja yang menggunakan parameter % ESG *project completion* pada perspektif Proses serta GHG *emission reduction* (*intensity*) dan *Safety performance* (*fatality*) pada perspektif *Outcomes*;
6. Pemantauan progres implementasi strategi *Sustainability*, yang merupakan kegiatan diversifikasi usaha berbasis kegiatan *non-coal*, dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha Grup ABM;
7. Melakukan diskusi dengan Manajemen ABM dan ESG *Working Team* dalam rangka pengembangan dan perbaikan organisasi dan program implementasi ESG di Grup ABM;
8. Pemantauan pengelolaan kegiatan-kegiatan Perusahaan yang terkait dengan implementasi ESG yang meliputi *Risk & Mitigations, Human Capital, Safety Health Environmental* (SHE), CSR Program, *Legal* dan GCG & *Compliance*; dan
9. Melaporkan kegiatan Komite ESG ABM kepada Dewan Komisaris ABM termasuk rekomendasi perbaikan implementasi ESG di Grup ABM.

Completion of Duties in 2023

Throughout 2023, the ESG Committee have conducted the following activities:

1. Organize quarterly meetings of the ESG Committee and attend related meetings, including meetings organized by the ABM Audit Committee, in order to gather information on the progress of ESG implementation in the ABM Group's operational activities, as well as other information deepening processes;
2. Monitor the progress of the ABM Framework of ESG Journey, which guides the implementation of ESG in the ABM Group's operations until the end of 2025, as well as being used as a reference in supervising the ABM Group;
3. Monitor the progress of the implementation of the Resiliency strategy which is focused on managing ESG initiatives in order to fulfill the targets on 6 ESG factors which include Employee health & safety and Anti-corruption (distinctive ambition category), Bio-diversity & land use and Materials, chemicals & waste (leading category), as well as Energy consumption & GHG and Water use & pollution (proactive category);
4. Monitor the results of MSCI's assessment of ABM's ESG Rating issued in October 2022 which is "BB", as well as discussion and monitoring of efforts to be made by ABM Management to improve the MSCI ESG rating in 2023;
5. Monitor the implementation of the ABM Triple Bottom Line Balance Score Card (ABM TBL BSC) especially related to the results of performance measurement using the parameters of % ESG project completion in the Process perspective and GHG emission reduction (intensity) and Safety performance (fatality) in the Outcomes perspective;
6. Monitor the progress of the implementation of the Sustainability strategy, which is a business diversification activity based on non-coal activities, in order to support the sustainability of the ABM Group's business;
7. Conduct discussions with ABM Management and ESG Working Team in order to develop and improve the organization and implementation of ESG programs in ABM Group;
8. Monitor the management of the Company's activities related to ESG implementation covering Risk & Mitigations, Human Capital, Safety Health Environmental (SHE), CSR Program, Legal and GCG & Compliance; and
9. Report the activities of the ABM ESG Committee to the ABM Board of Commissioners including recommendations for improvement of ESG implementation in the ABM Group.

KOMITE DAN UNIT TUGAS/FUNGSI PENDUKUNG FUNGSI DAN TUGAS DIREKSI

Committees Supporting the Functions and Duties of the Board of Directors

Agar pengelolaan Perusahaan dapat berjalan sesuai harapan, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, dan Manajemen Risiko. Tentang pelaksanaan Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian "Manajemen Risiko" pada bab ini. Selain itu, Direksi juga membentuk 1 (satu) komite yang mendukung kinerjanya, yaitu Komite *Group Executive Management*.

To ensure the management of the Company run as expected, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management. The details regarding the implementation of Risk Management can be found in the "Risk Management" section of this chapter. Additionally, the Board of Directors has established one committee to supports its performance, known as the Group Executive Management Committee.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berfungsi memastikan penerapan GCG, khususnya terkait keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan yang relevan, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris Perusahaan juga berperan menjembatani interaksi antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

The Corporate Secretary's primary function is to oversee the implementation of GCG, particularly concerning the disclosure of information to relevant stakeholders. In addition, the Corporate Secretary also ensures the Company's adherence to applicable laws and regulations. Moreover, the Corporate Secretary serves as a liaison, facilitating interactions between the Company and its stakeholders.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan persetujuan Dewan Komisaris, yang kemudian diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia selaku regulator pasar modal.

Saat ini jabatan Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Rindra Donovan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/ABM-RES-DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Corporate Secretary Officer

The Corporate Secretary is appointed and directly reports to the President Director, subject to approval by the Board of Commissioners. Subsequently, this appointment is communicated to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange, as the capital market regulator.

Currently the position of Corporate Secretary is entrusted to Rindra Donovan who was appointed based on Board of Directors Decree No. 003/ABM-RES-DIR/II/2018 dated February 12, 2018.



Rindra Donovan
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Jakarta, 25 September 1975 | Born in Jakarta, September 25, 1975
Usia 48 tahun | 48 years old
Domisili Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia | Domicile in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Pengangkatan | Basis of Appointment
Surat Keputusan Direksi No. 003/ABM-RESDIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
Board of Directors Decree No. 003/ ABM-RESDIR/II/2018 dated February 12, 2018.

Riwayat Pendidikan | Education
Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (1999).
Bachelor's Degree in Law, University of Indonesia, Jakarta (1999)

Sertifikasi Profesi | Certification
- Surat Ijin Praktek Beracara (Advocate Permit), dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (2002);
  Advocate Permit, issued by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (2002);
- Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), dari Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) (2018); dan
  Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), awarded by the Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) in 2018; and
- Certified in Enterprise Risk Governance (CERG), dari Enterprise Risk Management Academy (ERMA) (2022).
  Certified in Enterprise Risk Governance (CERG), accredited by the Enterprise Risk Management Academy (ERMA) in 2022.

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Legal Consultant Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (1999-2007);
  Legal Consultant at Lubis Ganie Surowidjojo Law Firm (1999-2007);
- Head of Legal and Corporate Affairs PT Tiara Marga Trakindo (2007-2010); dan
  Head of Legal and Corporate Affairs at PT Tiara Marga Trakindo (2007-2010); and
- Head of Legal Department Perusahaan (2010-2017).
  Head of Legal Department of the Company (2010-2017).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position
Di Luar Perusahaan: tidak ada.
Other than ABM: None

Di Dalam Perusahaan:
Within ABM:
- Head of Corporate Affairs Perusahaan (2018-sekarang); dan
  Head of Corporate Affairs of the Company (2018-present); and
- Anggota Komite ESG (2021-sekarang).
  ESG Committee Member (2021-present).

Struktur dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

Kedudukan Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dan menjalankan fungsi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu *Corporate Secretary*, *Corporate Social Responsibility*, dan *Corporate Communication*. Divisi ini dipimpin oleh seorang *Head of Corporate Affair & Corporate Secretary* yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.

Structure and Position of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is structurally positioned under President Director and runs three functions, they are, Corporate Secretary, Corporate Social Responsibility, and Corporate Communication. Such division is led by Head of Corporate Affair & Corporate Secretary who is appointed and dismissed based on Board of Directors' Decree.



Per 31 Desember 2023, Divisi Corporate Affairs memiliki 3 (tiga) orang karyawan dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2023, the Corporate Affairs Division had 3 (three) employees with the following details:

Jabatan Position	Jumlah Karyawan (orang) Number of employee (people)
Head of Corporate Affairs & Corporate Secretary	1
Corporate Board Office & Governance	3
Corporate Social Responsibility	1
Corporate Communication	1
Jumlah **Total**	**6**

Pedoman Kerja

Direksi telah mengesahkan Piagam Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi ABM No. 016/ABM-RESDIR/VII/2015 tentang Piagam Sekretaris Perusahaan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan. Piagam tersebut memuat kebijakan yang mengatur aspek-aspek terkait fungsi dan peran Sekretaris Perusahaan terhadap Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan pemegang saham ABM, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal, serta penyampaian dan pemberian informasi Perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Sekretaris Perusahaan ABM dapat dilihat pada situs web bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Sekretaris Perusahaan.

Work Guideline

The Board of Directors has officially ratified the Corporate Secretary Charter under ABM Directors' Decree No. 016/ABM-RESDIR/VII/2015. This charter serves as a comprehensive guideline for executing the duties and functions of the Corporate Secretary. It encompasses policies governing various aspects, including the Corporate Secretary's role towards the Board of Directors, Board of Commissioners, committees, and ABM shareholders. Furthermore, it ensures compliance with capital market laws and regulations while facilitating the conveyance and provision of company information to internal and external parties.

Further information about the ABM's Corporate Secretary Charter is available on our website, namely on the sub menu Our Commitment > Corporate Governance > Corporate Secretary.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekertaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan Perusahaan.
6. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan;

Duties and Responsibilities

Pursuant to Financial Services Authority Regulations, the duties and responsibilities of the Corporate Secretary include:

1. Following the developments in the capital market, particularly the applying regulations in capital market;
2. Providing public service with any information about the Company needed by the investors;
3. Providing inputs to both Board of Commissioners and Board of Directors of the Company regarding the regulatory compliance with the capital market regulations;
4. Serving as liaison officer between the Company with the Shareholders, Financial Service Authority, and other stakeholders;
5. Representing the Company in establishing correspondence with capital market authority within the scope of authorities being delegated by the Company; and
6. Assisting the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the corporate governance implementation, including:
   a. Disclosure of information to the public, including providing the information on the Company's website;

b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Dewan Komisaris dan/atau Direksi; serta
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

b. Submitting reports to Financial Service Authority on time;
c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
d. Organizing and documenting the meetings of Board of Commissioners and/or Board of Directors; and
e. Implementing the Company orientation program for Board of Commissioners dan/atau Board of Directors.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, seluruh karyawan pada Divisi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program peningkatan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

Competence Development Program for Corporate Secretary

Throughout 2023, all employees of Corporate Secretary Division have participated in competence development programs with details as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Rindra Donovan Corporate Secretary	*ESG Strategy and Rating*	Virtual, 19 Januari 2023 Virtual, January 19, 2023	PT Bursa Efek Indonesia dengan PwC Indonesia PT Bursa Efek Indonesia with PwC Indonesia
	Sosialisasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Dan Penyelenggaraan Annual Report Award 2022 Dissemination of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance and Implementation of the Annual Report Award 2022	Virtual, 22 Februari 2023 Virtual, February 22, 2023	Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) National Committee on Governance Policy (KNKG)
	Understanding the Key Elements of GSS Bonds	Virtual, 25 Mei 2023 Virtual, May 25, 2023	PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Accelerating* SDGs *Investment in* Indonesia (ASSIST) *Joint Programme* The Indonesia Stock Exchange (IDX) is working with the United Nations Development Programme (UNDP) through the Accelerating SDGs Investment in Indonesia (ASSIST) Joint Program.
	The Future of Sustainability Reporting: An Exclusive Forum for Regulators and Listed Companies in Indonesia	Virtual, 13 Juni 2023 Virtual, June 13, 2023	Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan GRI (*Global Reporting Initiatives*) Indonesia Stock Exchange (IDX) with GRI (Global Reporting Initiatives)
	Pendidikan Dasar I *Corporate Secretary* Basic Education I Corporate Secretary	Virtual, 19, 26 Agustus dan 2 September 2023 Virtual, August 19, 26 and September 2, 2023	*Indonesia Corporate Secretary Association* (ICSA)
	Compliance Refreshment Emiten dan Perusahaan Publik Compliance Refreshment for Issuers and Public Companies	Virtual, 22 Agustus 2023 Virtual, August 22, 2023	Otoritas Jasa keuangan bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) The Financial Services Authority together with the Indonesia Stock Exchange (IDX)
	Perdagangan Karbon di Indonesia oleh Bursa Efek Indonesia Carbon Trading in Indonesia by the Indonesia Stock Exchange	Virtual, 5 Oktober 2023 Virtual, October 5, 2023	Bursa Efek Indonesia (BEI) Indonesia Stock Exchange (IDX)
	Kriteria dan Penilaian ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) 2024 ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024 Criteria and Assessment	Virtual, 20 Desember 2023 Virtual, December 20, 2023	Otoritas Jasa keuangan bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) The Financial Services Authority together with the Indonesia Stock Exchange (IDX) and the Indonesian Public Listed Companies Association (AEI)

Pelaksanaan Tugas Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun kalender perusahaan 2023 agar sesuai dengan siklus bisnis Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
2. Mengoordinasikan rapat rutin untuk 51 (lima puluh satu) kali rapat Direksi, 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris, 4 (empat) kali Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris, serta 8 (delapan) kali rapat Gabungan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Menyusun kunjungan Direksi ke *site* di setiap Entitas Anak selama satu tahun dengan tujuan agar lebih memahami isu-isu operasional yang terjadi di setiap *site*;
4. Mengikuti perkembangan peraturan pasar modal dan memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan di sepanjang 2023;
5. Meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan;
6. Melaksanakan korespondensi dengan regulator pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 51 (lima puluh satu) kali sepanjang 2023;
7. Menyampaikan keterbukaan informasi mengenai Perusahaan, antara lain dalam bentuk siaran pers, dan situs web. Siaran pers yang dikeluarkan tercatat sebanyak 18 (delapan belas) kali;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan paparan publik tahunan bersamaan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan tanggal 10 Mei 2023; dan
9. Menyusun Program Kerja Sekretaris Perusahaan tahun 2024.

HUBUNGAN INVESTOR

Sebagai pendukung Direksi, fungsi Hubungan Investor berperan dalam membantu menjaga hubungan antara Perusahaan dan komunitas pasar modal yang lebih luas. Oleh karena itu, Hubungan Investor harus memastikan memiliki akses ke informasi yang tepat waktu dan akurat terkait dengan kondisi keuangan, saham, kinerja, dan prospek usaha ABM.

Tugas dan Fungsi Hubungan Investor

Tugas dan fungsi Hubungan Investor meliputi:

1. Memberikan layanan informasi dan mengembangkan hubungan yang baik antara Perusahaan dengan para pihak yang berkepentingan terhadap investasi saham, terutama para Pemegang Saham, analisis efek, manajer investasi, broker institusi, ritel, dan media/pers;
2. Mewakili Perusahaan dalam menjalin hubungan dengan para Pemegang Saham, calon Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lain di kalangan investor; serta
3. Menciptakan jalur komunikasi yang konsisten dan membangun hubungan yang baik dengan investor dan calon investor.

Pelaksanaan Tugas Hubungan Investor Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, fungsi Hubungan Investor telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Berkoordinasi dengan Sekretaris Perusahaan dalam menyelenggarakan Paparan Publik;
2. Melakukan publikasi Presentasi Perusahaan;
3. Mengikuti *One-on-One Call;*
4. Mengikuti Konferensi Investor (Virtual); dan
5. Mengadakan acara economic outlook.

ABM memiliki Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham/Investor yang mengatur berbagai bentuk komunikasi antara ABM dengan investor yang dapat dilihat pada situs web ABM pada bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Kebijakan ABM.

Completion of Duties in 2023

Throughout 2023, the Corporate Secretary conducted the following activities:

1. Develop a corporate calendar for 2023 in accordance with the Company's business cycle and Indonesian laws and regulations;
2. Coordinate regular meetings for 51 (fifty one) Board of Directors meetings, 12 (twelve) Board of Commissioners meetings, 4 (four) Joint Board of Directors and Commissioners meetings, and 8 (eight) Joint Board of Commissioners and Board of Directors meetings in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies;
3. Arrange the Board of Directors visits to sites in each Subsidiary for one year with the aim of better understanding the operational issues that occur at each site;
4. Keep abreast of capital market regulations and ensuring the Company's compliance with applicable regulations. The Company published 4 (four) Financial Statements and 1 (one) Annual Report throughout 2023;
5. Improve competency by attending various trainings;
6. Conduct correspondence with capital market regulators (Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange) and other supporting institutions. Correspondence conducted 51 (fifty one) times throughout 2023;
7. Deliver information disclosure regarding the Company, among others in the form of press releases, and websites. Press releases issued were recorded 18 (eighteen) times;
8. Coordinate the implementation of the annual public expose in conjunction with the Annual GMS on May 10, 2023; and
9. Develop the Corporate Secretary Work Program for 2024.

INVESTOR RELATIONS

As a key supporter of the Board of Directors, the Investor Relations function plays a pivotal role in maintaining relations between the Company and the broader capital markets community. To fulfill this role effectively, Investor Relations must ensure access to timely and accurate information regarding ABM's financial condition, shares, performance, and business prospects.

Duties and Functions of Investor Relations

The duties and functions of the Investor Relations, are:

1. Providing information and developing good relationship between the Company and the parties who are interested in stock investment, especially the Shareholders, securities analysts, investment managers, institutional brokers, retailers, and the media;
2. Representing the Company in developing relationships with the Shareholders, prospective Shareholders, and other stakeholders among the investors; and
3. Creating a consistent communication channel and developing good relationship with the investors and potential investors.

Completion of Duties of Investor Relations in 2023

Throughout 2023, the Investor Relations have completed the following activities:

1. Coordinating with the Corporate Secretary in organizing a Public Expose;
2. Publishing the Company's Presentations;
3. Participating in One-on-One Call;
4. Attending an Investor Conference (Virtual); and
5. Holding an economic outlook event.

ABM has Communication Policy with the Shareholders/Investors that regulates a various form of communication between ABM and its investors, which is available at ABM's website on Our Commitment > Governance > ABM Policy.

Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan

Sebagai perusahaan publik, kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja ABM kepada para pemangku kepentingan merupakan hal yang wajib diberikan oleh ABM. Oleh karenanya, ABM berupaya menyediakan beragam sarana komunikasi yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan:

1. Alamat, nomor kontak, serta alamat surel/email yang dapat langsung dihubungi, yaitu:

Kantor Pusat | Head Office
PT ABM Investama Tbk

Gedung TMT 1, 18th Floor, Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta, 12560,
Indonesia

(021) 2997 6767
(021) 2997 6768
corporate.secretary@abm-investama.co.id

2. Situs web resmi ABM yang senantiasa diperbarui, yaitu www.abm-investama.com yang disajikan dalam 2 bahasa (Indonesia dan Inggris). Situs web tersebut berisikan beragam informasi yang telah memenuhi ketentuan regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08/POJK.04/2015), antara lain meliputi profil perusahaan, visi dan misi, bidang usaha, produk dan jasa yang disediakan, informasi keuangan, berita terbaru, tanggung jawab sosial perusahaan, keterbukaan informasi, dan lain-lain.
3. Hubungan media, di mana ABM bekerja sama dengan media massa. Sepanjang tahun 2023, ABM telah mengeluarkan 31 (tiga puluh satu) siaran pers yang dapat dilihat pada situs web resmi Perusahaan.
4. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. Setiap tahun ABM menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang memuat beragam informasi terkait kinerja Perusahaan sepanjang tahun buku. Penyusunan konten untuk kedua laporan tersebut masing-masing mengacu pada Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
5. Penyelenggaraan Paparan Publik menggunakan metode presentasi kepada para pemangku kepentingan. Pada tanggal 10 Mei 2022, ABM mengadakan Paparan Publik Tahunan secara *Hybrid*, baik yang hadir secara tatap muka di RA *Suites* Simatupang Jakarta Selatan maupun melalui *platform Zoom Webinar*. Acara tersebut dihadiri oleh 82 wartawan dan masyarakat serta pihak Manajemen yang diwakili oleh Direktur, Adrian Erlangga, dan Sekretaris Perusahaan, Rindra Donovan.
6. Dalam rangka menjaga komunikasi yang baik dengan Regulator, ABM memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan periodik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia yang berisi informasi keuangan dan non-keuangan yang disajikan secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan prinsip transparansi. Sepanjang tahun 2023 ABM mampu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait keterbukaan informasi. Adapun daftar korespondensi ABM dengan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023 dapat dilihat pada situs web ABM.

Tabel di bawah ini berisi ragam media komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi terkait aktivitas operasional, proses bisnis, pencapaian kinerja, serta informasi lain yang mendukung kelangsungan usaha ABM.

Information Governance and Corporate Data Access

As a public company, providing the ease of access to the stakeholders to the information about ABM's activities and performance is a must. Therefore, ABM strives to provide various media of communication a channel to disclose any information that is accessible for all stakeholders, they are:

1. Addresses, contact numbers, and email/email addresses for direct contact, namely:

2. ABM's official website is constantly updated, i.e. www. abm-investama.com available for access in 2 languages (Indonesian and English). The website contains a variety of information as required by the regulation (Financial Services Authority Regulation No. 08/ POJK.04/2015), including company profile, vision and mission, business fields, list of products and services, financial information, the latest news, corporate social responsibility, information disclosure, and others.
3. Media relations, in which ABM cooperates with the mass media. Throughout 2023, ABM issued 31 (thirty one) press releases which all can be viewed on the Company's official website.
4. Annual Report and Sustainability Report Every year ABM publishes an Annual Report and Sustainability Report which contain a variety of information about the Company's performance for the full year. The content for the two reports is presented with respect to OJK Circular Letter No. 16/ SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers and Public Companies and OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 of 2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.
5. Public Expose applies the presentation method to stakeholders. On May 10, 2022, ABM held a Hybrid Annual Public Expose which took place at the RA Suites Simatupang, South Jakarta, allowing face-to-face participation, and via the Zoom Webinar platform. The event was attended by 82 journalists and the public whereas the Management represented by our Director, Adrian Erlangga and our Corporate Secretary Rindra Donovan.
6. In order to maintain good communication with regulators, ABM is obligated to submit reports on periodical basis to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange containing financial and non-financial information which is presented in full, accurate, and in accordance with the principle of transparency. Throughout 2023, ABM did not receive a warning letter from the capital market authority. This confirmed hat ABM is able to maintain its regulatory compliance. The list of ABM's correspondence with the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority during 2023 is presented on the ABM's official website.

The table below contains a variety of communication media accessible by all stakeholders to obtain information about our operational activities, business processes, performance achievements, and other information that ensures ABM's business sustainability.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Komunikasi Forms of Communication Media
Regulator Regulator	SPEOJK - idxnet dan korespondensi surat menyurat SPEOJK - idxnet and mail correspondence
Pemegang Saham Shareholders	Situs Web ABM ABM Website
Investor Investor	Situs Web ABM ABM Website
Lembaga Publik Public Institutions	Situs Web ABM ABM Website
Pelanggan Consumer	Situs Web ABM ABM Website
Karyawan Employee	Situs Web ABM, *Sharepoints* ABM Website, Sharepoints
Masyarakat/Umum Public in General	Situs Web ABM ABM Website

UNIT AUDIT INTERNAL
Internal Audit Unit

ABM membentuk Unit Audit Internal dengan tujuan meningkatkan nilai tambah melalui pendekatan sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses GCG. Unit Audit Internal bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian internal ABM. Selain itu, Unit Audit Internal juga bertanggung jawab dalam memberikan pandangan, keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif.

Kepala Audit Internal

Kepala Satuan Audit Internal Perusahaan diangkat oleh Direktur Utama. Pengangkatan Kepala Satuan Audit Internal dilakukan sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris, yang kemudian diinformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator pasar modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 008/ABM-RES-DIRUT/V/2015 tanggal 13 Mei 2015, Budi Triastomo diangkat sebagai *Group Head of Group Internal Audit*.

ABM has established an Internal Audit Unit with the objective of enhancing value addition through a systematic approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and GCG processes. The Internal Audit Unit is responsible for monitoring and assessing ABM's internal controls. In addition, it is tasked with providing independent and objective perspectives, opinions, and consultations.

Head of Internal Audit

The Head of the Company's Internal Audit Unit is appointed by the President Director. The appointment of the Head of the Internal Audit Unit is conducted in accordance with the approval of the Board of Commissioners, and subsequently, this appointment is disclosed to the Financial Services Authority as the capital market regulator.

Based on Board of Directors Decree No. 008/ABM-RES-DIRUT/V/2015 dated 13 May 2015, Budi Triastomo was appointed as the Group Head of Group Internal Audit.



Budi Triastomo
Kepala Satuan Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Data Pribadi | Personal Data
Warga negara Indonesia | Indonesian Citizen
Kelahiran Jakarta, 9 Desember 1977 | Born in Jakarta, December 9, 1977
Usia 46 tahun | 46 years old
Domisili Depok, Jawa Barat, Indonesia | Domicile in Depok, West Java, Indonesia

Dasar Pengangkatan | Basis of Appointment
Surat Keputusan Direktur Utama No. 008/ABM-RES-DIRUT/V/2015 tanggal 13 Mei 2015.
President Director Decree No. 008/ABM-RES-DIRUT/V/2015 dated May 13, 2015.

Riwayat Pendidikan | Education
- Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi, Universitas Pancasila, Jakarta (2001);
  Bachelor's Degree in Accounting, Pancasila University, Jakarta (2001);
- Magister Manajemen jurusan Manajemen Keuangan, Universitas Pancasila, Jakarta (2005); dan
  Master's Degree in Financial Management, Pancasila University, Jakarta (2005); and
- Doktor jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya (2021).
  Doctor majoring in Business Administration, Brawijaya University (2021).

Sertifikasi Profesi | Certification
- Certified Risk Management Professional (CRMP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), (2017);
  Certified Risk Management Professional (CRMP) from the National Professional Certification Agency (BNSP), (2017);
- Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) dari ERM Academy (ERMA) (2017);
  Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) from ERM Academy (ERMA) (2017);
- Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2021);
  Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA) from the National Professional Certification Agency (BNSP) (2021);
- Certified Human Resource Management Auditor (CHRMA) dari American Academy of Project Management (AAPM) (2022); dan
  Certified Human Resource Management Auditor (CHRMA) from the American Academy of Project Management (AAPM) (2022); and
- Certified Indonesia Internal Auditor Proctitioner (IIAP) dari The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia (2023).
  Certified Indonesian Internal Auditor Proctitioner (IIAP) from The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia (2023).).

Pengalaman Kerja | Work Experience
- Senior Internal Auditor PT Tiara Marga Trakindo (2003-2008);
  Senior Internal Auditor at PT Tiara Marga Trakindo (2003-2008);
- Accounting Manager PT Trakindo Utama (2009-2011);
  Accounting Manager at PT Trakindo Utama (2009-2011);
- Internal Audit Manager PT Trada Maritime Tbk (2011-2012); dan
  Internal Audit Manager at PT Trada Maritime Tbk (2011-2012); and
- Head of Internal Audit and Risk Management PT Reswara Minergi Hartama (2012-2015).
  Head of Internal Audit and Risk Management at PT Reswara Minergi Hartama (2012-2015).

Rangkap Jabatan | Concurrent Position
Di Luar Perusahaan: tidak ada.
Other than ABM: None

Di Dalam Perusahaan: tidak ada.
Within ABM: None

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Unit Audit Internal berada di bawah Direktur Utama dan didukung oleh Financial & Operational Audit Division Head, Special Project Audit Division Head, dan Internal Audit Specialist.

Structure and Position of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit reports to the President Director and is supported by the Financial & Operational Audit Division Head, Special Project Audit Division Head, and Internal Audit Specialist.

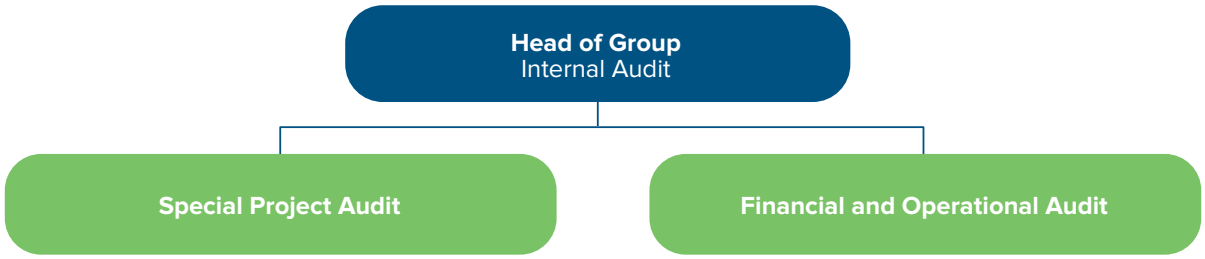

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal dipimpin oleh Group Head of Group Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Formulation of the Internal Audit Unit Charter, the Internal Audit Unit is led by the Group Head of Group Internal Audit who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan Unit Audit Internal ABM tercatat sebanyak 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

As of 31 December 2023, the number of ABM Internal Audit Unit employees was 8 (eight) people with the following details:

Jabatan Position	**Jumlah Karyawan (orang)** Number of employee (people)
Head of Group Internal Audit	1
Financial and Operational Audit	2
Special Project Audit	5
Jumlah **Total**	**8**

Sertifikasi Profesi Audit Internal

Per 31 Desember 2023, para karyawan Unit Audit Internal memiliki sejumlah sertifikasi profesi dengan rincian sebagai berikut:

Internal Audit Professional Certification

As of December 31, 2022, the Internal Audit Unit employees have a number of professional certifications with the following details:

Nama Sertifikat Name of Certification	**Jumlah Sertifikasi** Number of Certification
Certified Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	1
Certified Practitioner of Internal Auditor (CPIA)	1
Certified Risk Management Professional (CRMP)	1
Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP)	1
Certified Fraud Examiners (CFE)	1
Certified Forensic Auditor (CFrA)	1
Certified Human Resource Management Auditor (CHRMA)	5
Certified Lead Auditor for ISO 37001 (PECB – *Canada*)	1
Keanggotaan dari *Institute of Internal Auditor* (IIA *International*)	5
Keanggotaan dari *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE *International*)	3

Hal ini sejalan dengan komitmen ABM untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Unit Audit Internal, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki dari waktu ke waktu.

Jumlah karyawan Unit Audit Internal yang memiliki sertifikasi profesi tercatat sebanyak 5 (lima) orang atau 71% dari jumlah karyawan Unit Audit Internal.

Pedoman Kerja

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/ABM-RES-DIR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang diantaranya mengatur tentang ruang lingkup audit, standar audit, dan kode etik.

Informasi selengkapnya mengenai Piagam Unit Audit Internal dapat dilihat pada situs web bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Audit Internal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan atau Entitas Anak;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, bila diperlukan hasil audit dan laporan disampaikan kepada Direksi;
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya, termasuk integritas dan objektivitas para auditor;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan atas usulan Auditor atau ditugaskan oleh Direksi; serta
10. Menjaga dan merawat aset Perusahaan dan Entitas Anak selama melaksanakan kewenangannya selaku Unit Audit Internal.

This is in line with ABM's commitment to increase the level of professional certification for the employees of the Internal Audit Unit, both for employees who have and do not have professional certification from time to time.

The number of the Internal Audit Unit employees who have professional certification is 5 (five) people or 71% of the total employees. The number is slightly changed compared to the previous year.

Work Guidelines

In performing its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit is guided with the Internal Audit Charter which has been ratified based on the Decree of the Board of Directors No. 002/ABM-RES-DIR/II/2016 dated February 29, 2016 which regulates the scope of the audit, audit standards, and code of ethics.

A complete information on the Internal Audit Unit Charter is available in our website on Our Commitment > Governance > Internal Audit

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Internal Audit Unit are as follows:

1. Formulating and implementing the annual internal audit plan;
2. Examining and evaluating the implementation of internal control and risk management systems in accordance with the Company or Subsidiaries' policy;
3. Examining and assessing the efficiency and effectiveness in the finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;
4. Providing advice for improvement and objective information about audited activities at all levels of management;
5. Creating a report on the results of the audit and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners, if necessary, the results of the audit and the report are submitted to the Board of Directors;
6. Monitoring, analyzing, and reporting the implementation of the follow-up improvements that have been suggested;
7. Collaborating with Audit Committee;
8. Formulating the program to evaluate the quality of the internal audit activities, including the integrity and objectivity of the auditors;
9. Conducting a special inspection, if necessary, based on the recommendation of the Auditor, or assigned by the Board of Directors; and
10. Maintaining and tending the assets of the Company and its Subsidiaries while carrying out their authority as the Internal Audit Unit.

Ruang Lingkup Audit

Unit Audit Internal melaksanakan tugas dengan ruang lingkup meliputi pengendalian internal dan *corporate governance* yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The Scope of Audit

The Internal Audit Unit performs tasks within a scope that encompasses internal control and corporate governance, as detailed in the table below:

Lingkup Pengendalian Internal Internal Control	
1. Memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan memenuhi kriteria akurat, andal, tepat waktu, konsisten, dan bermanfaat; 2. Memastikan bahwa pengamanan dan pemanfaatan aset Perusahaan atau Entitas Anak berjalan sebagaimana mestinya. 3. Memastikan bahwa sumber daya Perusahaan dikelola secara efisien dan efektif; 4. Memastikan bahwa semua elemen Perusahaan atau Entitas Anak taat terhadap kebijakan, prosedur, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku; 5. Membantu memastikan pencapaian target Perusahaan atau Entitas Anak sesuai dengan rencana; 6. Melakukan audit, evaluasi, dan konsultasi tentang kemampuan, efektivitas, ketaatan, dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen operasi termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan tugas pengadaan, pembelian, keuangan, dan pengelolaan risiko; 7. Memberikan jaminan (*assurance*) terhadap keandalan data mencakup kelengkapan, akurasi, klasifikasi, dan otorisasi yang memadai sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tepat waktu, tepat guna, dan bebas dari salah saji material; dan 8. Efektivitas pelaksanaan audit dilaksanakan berdasarkan audit berbasis risiko, dimana pemilihan objek audit (*auditee*) dilakukan dengan tahapan perilaku risiko (*risk assessment*) pada Perusahaan atau Entitas Anak.	1. Ensuring that all information or data that is managed and reported have fulfilled the criteria of accuracy, reliability, timely, consistency, and usefulness; 2. Ensuring the security and utilization of the Company and its Subsidiaries' assets are as expected; 3. Ensuring that the Company's resources are managed efficiently and effectively; 4. Ensuring that all elements of the Company and its Subsidiaries comply with the existing policies, procedures, and applicable laws and regulations; 5. Help to ensure that the realization of the Company or its Subsidiaries' target is in line with plan; 6. Conducting audit, evaluation, and consultation on the capability, effectiveness, compliance, and quality of the implementation of operations management tasks including but not limited to the implementation of procurement, purchasing, finance, and risk management tasks.; 7. Providing assurance on the reliability of data including completeness, accuracy, classification, and adequate authorization so that the financial statements financial statements are timely, appropriate, and free from material misstatement; and material misstatement; and 8. The effectiveness of the implementation of the audit is carried out based on a risk-based audit, in which the selection of the audit object (auditee) is carried out through the stages of risk assessment on the Company or its Subsidiaries.
Lingkup *Corporate Governance* Corporate Governance	
Melaksanakan pengawasan terhadap proses dan implementasi GCG di ABM dan Entitas Anak dengan cara: 1. Memastikan bahwa semua *business process* dalam Perusahaan dan Entitas Anak memenuhi aspek akuntabilitas dan mendeteksi risiko bisnis dengan melakukan evaluasi atas aktivitas-aktivitas yang memengaruhi keputusan bisnis Perusahaan dan Entitas Anak; 2. Memastikan bahwa jajaran manajemen telah menetapkan nilai dan sasaran Perusahaan atau Entitas Anak dan mengomunikasikannya dengan *stakeholders*; 3. Memantau kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan GCG (*soft structure GCG*) di Perusahaan dan Entitas Anak; 4. Memantau kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi Perusahaan dan Entitas Anak; 5. Meninjau praktik GCG di Perusahaan atau Entitas Anak dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius; dan 6. Mendeteksi adanya suatu kesalahan/penyimpangan yang berindikasi ke arah kecurangan (*fraud*).	Monitoring the processes and implementation of GCG within the ABM and its subsidiary by means of: 1. Ensuring that all business process within the Company and its Subsidiaries have fulfilled accountability aspect, and detecting business risks by evaluating activities that may impact the Company and its Subsidiaries' business decision; 2. Ensuring that the management has set the Company and its Subsidiaries' values and target and conveyed it to stakeholders; 3. Monitoring the compliance to the supporting polices of GCG implementation (soft structure policy) within the Company and its Subsidiaries; 4. Monitoring the compliance to the laws and regulations and other regulations applied to the Company and its Subsidiaries; 5. Reviewing GCG practices in the Company or its Subsidiaries and provide reports in the event of serious violations have occurred; and 6. Identifying indications of violations that lead to fraud.

Program Peningkatan Kompetensi

Sepanjang tahun 2023, Unit Audit Internal mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Competency Development Program

Throughout 2023, the Internal Audit Unit participated in various competency development programs with details as follow:

Nama dan Jabatan Name and Position	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat dan Waktu Venue and Date	Penyelenggara Organizer
Budi Triastomo Group Head of Group Internal Audit (GIA)	*Certified Indonesia Internal Auditor Practioner* (IIAP)	Bogor, 12 Desember 2023 Bogor December 12, 2023	The Institute of Internal Auditors (IIA)
	Workshop Sustainability & ESG	Jakarta, 20 November 2023 Jakarta, November 20, 2023	ABM Group Learning
	Legal For Non-Legal	Jakarta, 12 Desember 2023 Jakarta, December 12, 2023	ABM Group Learning

Pelaksanaan Tugas Unit Audit Internal Tahun 2023

Pada tahun 2023, Unit Audit Internal melakukan reguler audit dan *ad-hoc* audit. Kegiatan regular audit merupakan aktivitas terencana yang tertuang dalam rencana kerja audit tahunan, dan dilakukan melalui pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*). Sementara itu *ad-hoc* audit adalah kegiatan audit khusus diluar rencana kerja tahunan dan dilakukan berdasarkan hasil pembahasan atau permintaan dari Manajemen ABM.

Adapun aktivitas audit reguler maupun ad-hoc selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Audit Operasional, Finansial dan Kepatuhan (total 45 aktivitas audit)
   a. Audit atas Kepatuhan atas Standard & Prosedur – 1 *project*;
   b. Audit atas Aktivitas Akuntansi, Keuangan & *Treasury* – 7 *project*;
   c. Audit atas *Human Capital Process* – 8 *project*;
   d. Audit atas Aktivitas Export & Import (EXIM) – 2 *Project*;
   e. Audit atas *Site/Project Operation* – 7 *Project*;
   f. Audit atas *Digital & Analytic – General Control* – 1 *Project*;
   g. Audit atas Aktivitas Pengelolaan Aset & *Inventory* – 4 *Project*;
   h. Audit atas Aktivitas *Operational Safety & Security* – 3 *Project*;
   i. Audit atas Pengelolaan Kesehatan Kerja & Lingkungan Kerja – 2 *Project*;
   j. Audit atas *Utilization & Maintenance Asset* – 3 *Project*;
   k. Audit atas *"Product" & Manufacturing Process* – 2 *Project*;
   l. Audit atas Verdor *Performance* – 1 *Project*;
   m. Audit atas *Tender dan Claim & Complaint* – 2 *Project*;
   n. Audit atas Operational Pertambangan – 2 *Project*.

2. Audit Tujuan Tertentu/*Investigative Audit* (total 20 proyek audit).

Sepanjang tahun 2023, terdapat 36 kegiatan audit khusus/dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaporan dugaan pelanggaran yang diterima. Proses audit ini bertujuan untuk mengungkap dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam aktivitas operasional dilingkungan perusahaan, selanjutnya berdasarkan hasil dari proses audit terhadap 36 kasus tersebut, maka telah dilakukan proses tindak lanjut oleh manajemen ABM Investama dan manajemen anak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Completion of Duties of Internal Audit Unit in 2023

Throughout 2023, the Internal Audit Unit conducted regular audits and ad-hoc audits. Regular audit activities are planned activities outlined in the annual audit work plan, and are carried out through a risk-based audit approach. Meanwhile, ad-hoc audits are special audit activities outside the annual work plan and are conducted based on the results of discussions or requests from ABM Management.

In further details, the regular and ad-hoc audit activities throughout 2023 included the followings:

1. Operational, Financial, and Compliance Audit with a total of 45 (forty-five) audit activities on:
   a. Audit of Compliance with Standards & Procedures – 1 project;
   b. Audit of Accounting, Finance & Treasury Activities – 7 projects;
   c. Audit of Human Capital Process – 8 projects;
   d. Audit of Export & Import (EXIM) Activities – 2 Projects;
   e. Audit of Site/Project Operation – 7 Projects;
   f. Audit of Digital & Analytics – General Control – 1 Project;
   g. Audit of Asset & Inventory Management Activities – 4 Projects;
   h. Audit of Operational Safety & Security Activities – 3 Projects;
   i. Audit of Occupational Health & Work Environment Management – 2 Projects;
   j. Audit of Asset Utilization & Maintenance – 3 Projects;
   k. Audit of "Product" & Manufacturing Process – 2 Projects;
   l. Audit of Verdor Performance – 1 Project;
   m. Audit of Tender and Claim & Complaint – 2 Projects;
   n. Audit of Mining Operations – 2 Projects.

2. Investigative Audit with a total of 20 audits.

Throughout 2023, there were 36 special/specific audit activities carried out as a follow-up to reports of alleged violations received. This audit process aims to uncover alleged violations or fraud that occur in operational activities within the company. Furthermore, based on the results of the audit process of the 36 cases, a follow-up process has been carried out by ABM Investama management and subsidiary management in accordance with applicable regulations.

Adapun pada periode 2023, laporan pengaduan yang diterima Perusahaan diungkapkan pada tabel berikut.

As for the period 2023, the complaint reports received by the Company are disclosed in the following table.

Media Media	Jumlah Keluhan Tahun 2023 Total Complaints in 2023		
	Terselesaikan Resolved	Tidak Terselesaikan Unresolved	Jumlah Total
Email	36	1	37
Surat Mail	-	-	-
Telepon Phone	-	-	-

Jumlah Pengaduan laporan pelanggaran yang diterima oleh Tim WBS selama tahun 2023 sebanyak 37 kasus, dengan rincian proses tindak lanjut sebagai berikut:
1. 36 kasus (97 %) telah selesai ditindaklanjuti; dan
2. 1 kasus (3%) sedang dalam proses pemeriksaan.

The number of complaints of violation reports received by the WBS Team during 2023 was 37 cases, with details of the follow-up process as follows:
1. 36 cases (97%) have been fully followed up; and
2. 1 case (3%) is in the process of examination.

Rapat Unit Audit Internal Bersama Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit

Pada tahun 2023, Internal Audit mengadakan 4 (empat) kali rapat dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit. Adapun agenda rapat Unit Audit Internal meliputi kinerja Unit Audit Internal, pelaksanaan kegiatan audit yang sedang berjalan, kampanye WBS, GRC, dan *Fraud Awareness*.

Internal Audit Unit Meeting with the Board of Commissioners, Directors and Audit Committee

In 2023, Internal Audit held 4 (four) meetings with the Board of Commissioners, Directors and Audit Committee. The agenda for the Internal Audit Unit meeting includes the performance of the Internal Audit Unit, implementation of ongoing audit activities, WBS, GRC and Fraud Awareness campaigns.

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

ABM menggunakan jasa Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atau mengaudit Laporan Keuangan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa informasi dan data yang disampaikan dalam laporan keuangan Perusahaan bersifat akuntabel, independen, dan wajar kepada Pemegang Saham, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya. SAK ini menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan di samping Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

ABM used the services of a Public Accountant to carry out inspections and audits of its Financial Reports to ensure that these reports complied with all Financial Accounting Standards that applied in Indonesia. This was done to ensure that the information and data the Company has submitted in its financial reports were always accountable, independent and fair to Shareholders, regulators and other stakeholders. These accounting standards served as guidelines for preparing Financial Reports. It also prepared its reports in accordance with guidelines established thorugh Decree of the Chairman of the Financial Institution Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 concerning Guidelines for Presentation and Disclosure of Financial Reports of Issuers or Public Companies.

Penunjukan Akuntan Publik dan Proses Koordinasi Akuntan Publik dengan Organ Tata Kelola Perusahaan
Appointment of Public Accountants and Coordination Process of Public Accountants with Corporate Governance Organs



Prosedur Audit Eksternal dan

Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan ABM sesuai standar profesional akuntan publik, yang mencakup seluruh prosedur audit meliputi pengujian, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan, serta penilaian terhadap kesesuaian isi Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan (PSAK).

Proses audit yang harus dilalui oleh Kantor Akuntan Publik adalah melakukan sesi tanya jawab mengenai pernyataan Manajemen yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan dan wajib menyampaikan ketidaksesuaian dalam penyajian laporan tersebut (jika ada) kepada manajemen. Di samping itu, Manajemen juga bertanggung jawab untuk menyetujui kertas kerja pemeriksa Kantor Akuntan Publik terhadap ABM untuk ditelaah oleh badan atau otoritas terkait.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan ABM melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Selanjutnya, penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dilaporkan kepada Satuan Kerja Pengawasan di Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

1. Dokumen penunjukan serta rekomendasi Komite Audit; serta
2. Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan proses audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan/ atau kantor akuntan publik.

Dalam Mata Acara 3 RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023, pemegang saham telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain dan besarnya biaya jasa auditor dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit serta menunjuk akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya terkait dengan ketentuan pasar modal di Indonesia.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut, Perusahaan mengeluarkan Surat No. 0067/PSS/09/2023 tanggal 8 September 2023 untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagai Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 telah dipublikasikan pada tanggal 30 Maret 2024.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Periode 5 Tahun Terakhir

Nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan.

Procedure of External Audit and Audit Standards

The ABM Financial Report Audit follows professional standards for public accountants, encompassing all audit procedures such as testing, examination, and evaluation of the Financial Report. In addition, it involves assessing the conformity of the Financial Report's contents with financial accounting standards (PSAK).

One of the audit processes that must be conducted by the Public Accounting Firm is to organize a question and answer session regarding Management's statements disclosed in the Financial Statements and must convey any discrepancies in the report presentation (if any) to the management. In addition, the Management is also responsible for giving approval to the working papers of the Public Accounting Firm for ABM for further review by the relevant body or authority.

Public Accountant Appointment Mechanism

With reference to OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, ABM appoints Public Accountants and Public Accounting Firms through the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) mechanism. This appointment is made based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee.

The appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm is further reported to the Oversight Unit at the Financial Services Authority by attaching:

1. The documents containing the appointment and recommendations of the Audit Committee; and
2. Results of the Audit Committee's evaluation of the implementation of the audit process carried out by the public accountants and/ or the public accounting firms.

In Agenda 3 of the Annual GMS for the 2022 Financial Year which was held on May 10 2023, shareholders have appointed the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as the Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Report for the 2023 financial year, and gave authorization to the Board of Commissioners to determine other requirements and the amount of auditor service fees by taking into account the fairness and scope of audit works and appoint a substitute public accountant if the appointed accounting firm was unable to carry out its duties within the scope of provisions applicable to the capital market in Indonesia.

Following up on the resolution of the GMS, the Company issued Letter No. 0067/PSS/09/2023 dated September 8, 2023 to appoint the Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm as the Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the 2023 financial year by considering recommendations from the Board of Commissioners and Audit Committee. The Company's Financial Report for the 2023 financial year will be published in March 30, 2024.

List of Public Accounting Firms and Public Accountants for the Last 5 Years

Names of the Public Accounting Firms and Public Accountants that have audited our Annual Financial Statements for the last 5 years is available in the Chapter of Company Profile.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System



ABM berupaya mengelola risiko secara cermat, terintegrasi, dan efektif. Dalam penerapannya, ABM melakukan evaluasi dan penyempurnaan guna memastikan manajemen risiko yang ada cukup memadai dan sesuai dengan perkembangan terkini. Proses manajemen risiko dilakukan dalam kerangka kerja komprehensif, mencakup seluruh risiko yang teridentifikasi sebagai risiko yang dihadapi oleh ABM dan seluruh entitas anak termasuk upaya mitigasinya. Setelah seluruh risiko teridentifikasi, ABM melakukan penilaian dengan skala yang telah diformulasikan secara internal, di mana berbagai risiko yang dianggap penting bagi Grup ABM akan ditabulasi dalam profil risiko yang juga diperbarui secara berkala.

Dalam rangka memastikan penanganan risiko yang komprehensif, Perusahaan menerapkan ISO 31000 sebagai pendekatan pengelolaan risiko korporasi dan seluruh entitas anak dengan proses yang meliputi:

1. Identifikasi risiko, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal;
2. Analisis dan evaluasi berkesinambungan dan tepat waktu untuk menetapkan skala prioritas serta sumber risiko;
3. Penerapan strategi mitigasi risiko secara berkelanjutan serta sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan tersebut;
4. Komunikasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan terkait; serta
5. Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk dipantau dan ditelaah perkembangan dan perubahannya.

ABM is committed to managing risks meticulously, integrating them into its operations in an effective manner. In practice, ABM conducts evaluations and enhancements to ensure that existing risk management practices remain adequate and aligned with the latest developments. The Company's risk management process is carried out within a comprehensive framework that encompasses all things identified as risks faced by ABM and its subsidiaries. This process also includes mitigation efforts. Once all risks have been identified, ABM carries out an assessments using a scale that has been formulated internally. Any risk considered important to ABM Group will be tabulated in a risk profile that is also updated regularly.

Following the identification of all risks, ABM conducts assessments using internally formulated scales. Risks deemed significant to the ABM Group are then compiled into a regularly updated risk profile. To ensure comprehensive risk management, the Company implements ISO 31000 as an approach for managing corporate risk across all subsidiaries. This process includes:

1. Risk identification, taking into account internal and external factors;
2. Continuous and timely analysis and evaluation to establish scale of priorities and sources of risks;
3. Implementation of risk mitigation strategies on an ongoing basis as well as the necessary resources for such risk management;
4. Communication and participation of all relevant stakeholders; and
5. Administering and determining risk profiles to monitor and review the developments and changes.



Identifikasi risiko mempertimbangkan faktor internal dan eksternal
Risk identification, caused by internal and external factors

Analisis dan evaluasi berkesinambungan dan tepat waktu untuk menetapkan skala prioritas
Continuous and timely analysis and evaluation to establish priority scale

Pencatatan dan penetapan profil risiko untuk dipantau dan ditelaah perkembangan dan perubahannya
Recording and determining the risk profile to be monitored and reviewed its developments and changes

Komunikasi dan peran serta seluruh pemangku kepentingan terkait
Communication and participation of all relevant stakeholders

Penerapan strategi mitigasi risiko secara berkelanjutan serta sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan tersebut
Implementation of risk mitigation strategies an ongoing basis and the resources needed for management

Sistem Manajemen Risiko di lingkungan Grup ABM semakin kuat dengan keberadaan Kebijakan Manajemen Risiko yang telah disahkan melalui ERM *Policy* No. ABM-PLC-ERM-001 tanggal 21 Agustus 2021, yang dilengkapi dengan SOP No. ABM-SOP-ERM-001 tanggal 25 September 2021. Kebijakan ini berisi berbagai informasi mengenai Sistem Manajemen Risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

ABM Group's Risk Management System implementation is more enhanced through the issuance of Risk Management Policy which is legalized in ERM Policy No. ABM-PLC-ERM- 001 dated August 21, 2021, which is complemented with the issuance of SOP No. ABM-SOP-ERM-001 dated September 25, 2021. Such policy regulates various information about Risk Management System which comprises the followings:

Tujuan
Purpose

Melindungi dan meningkatkan nilai pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya dalam memaksimalkan pencapaian Perusahaan secara objektif.

Protecting and improving shareholder and stakeholder values in maximizing the company's accomplishments in objective manner

Latar Belakang
Background

Menyadari bahwa risiko akan selalu ada di setiap kegiatan yang dilaksanakan Perusahaan sehingga perlu adanya pengetahuan terkait pengelolaan perusahaan yang baik.

Being aware that every activity of the Company are always exposed to certain risks, thus having good understanding of an effective company management is important.

Filosofi
Philosophy

secara efektif agar tidak mengganggu jalannya usaha Perusahaan. Semua komponen di Perusahaan diharapkan mengetahui dan memahami risiko terkait dengan pekerjaannya secara proaktif.

Risks shall be managed effectively to ensure a smooth business running. All components of the organization shall acknowledge and proactively build awareness of the risks relating to their respective duties.

Akuntabilitas
Accountability

Seluruh karyawan diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi pedoman kerangka kerja manajemen risiko. Direksi memiliki akuntabilitas utama dalam pelaksanaan kerangka kerja dan pengelolaan manajemen risiko.

All employees are obligated to carry out and adhere to the risk management framework. Board of Directors is mostly accountable for the implementation of risk management framework.

Pendekatan Proses
Process Approach

ABM telah menetapkan standar ISO 31000 sebagai pendekatan pengelolaan manajemen risiko Perusahaan dan Entitas Anak.

ABM has applied ISO 31000 standards as an approach to the risk management implementation both in the Company and its Subsidiaries

Struktur Pengelola Risiko dan Departemen Manajemen Risiko Perusahaan

Proses manajemen risiko Grup ABM dilakukan secara sentralisasi agar lebih seragam dan selaras di ABM dan entitas anak usahanya. Dalam rangka mencapai penerapan Manajemen Risiko yang efektif, ABM berpedoman pada *3 lines defense* sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini:

Risk Management Structure and Company Risk Management Department

The risk management process within ABM Group is decentralized to promote standardization and alignment between ABM and its subsidiaries. In order to implement an effective Risk Management, ABM is guided with the 3 lines defense as described in the following diagram:

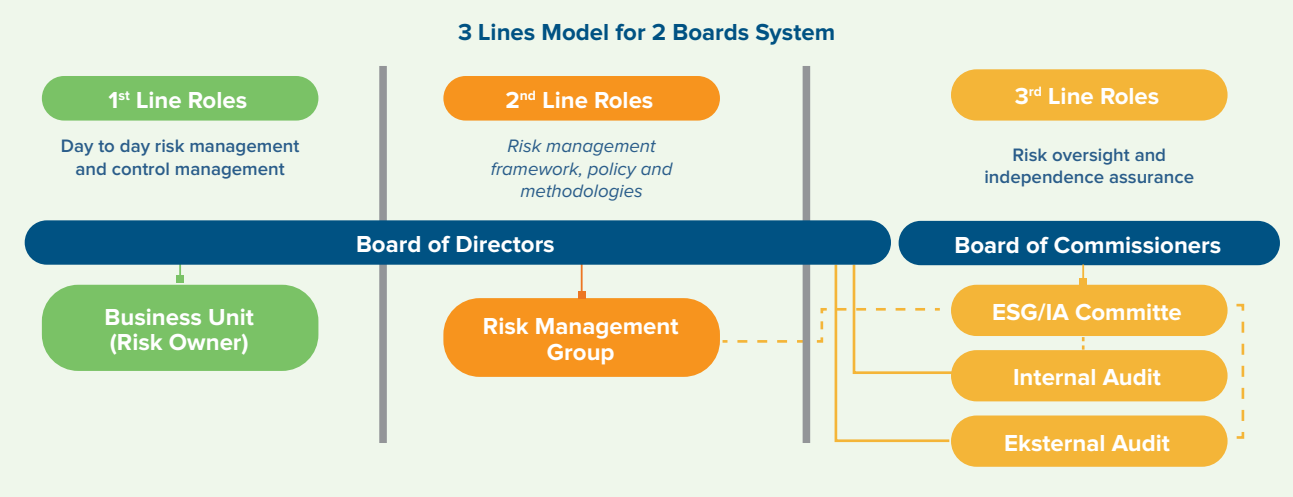

Pada *1st line of defense*, terdapat unit bisnis sebagai *Risk Owner* dengan akuntabilitas dan kewenangan untuk mengelola risiko. Sementara itu, *Risk Management Group* berperan sebagai *2nd line of defense* bertanggung jawab mengawasi aktivitas pengelolaan manajemen risiko pada tahap *1st line of defense* melalui pengembangan kerangka manajemen risiko, pendampingan pengelolaan risiko, dan pemantauan pelaksanaan risiko. Secara struktural, kedudukan *Risk Management Group* berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh Head of *Risk Management Group* yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Kemudian pada *3fd line of defense* terdapat Komite Audit, Audit Internal dan Auditor Independen.

In the 1st line of defense, business units serve as Risk Owner with accountability and authority to manage risks. Meanwhile, the Risk Management Group acts as the 2nd line of defense responsible for overseeing risk management activities at the 1st line of defense stage through the development of risk management framework, risk management assistance, and risk implementation monitoring. Structurally, the position of the Risk Management Group is under the President Director and is led by the Head of Risk Management Group who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The 3rd line of defense is the Audit Committee, Internal Audit and Independent Auditor.

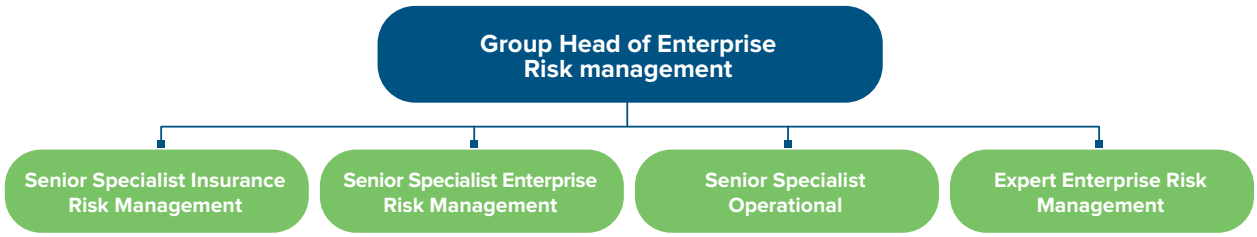

Berdasarkan Surat Pengangkatan No. ABM-HR/022/HMU/01/2021 tanggal 1 Februari 2021, jabatan Group Head of ERM dipegang oleh Bernado Agustono Mochtar dengan masa jabatan yang akan berakhir sesuai dengan hasil evaluasi Direksi.

According to Letter of Appointment No. ABM-HR/022/HMU/01/2021 dated February 1, 2021, the position of Group Head of Enterprise Risk Management (ERM) is held by Bernado Agustono Mochtar, with a term of office subject to the results of the Board of Directors' evaluation.

Pada pertengahan tahun 2023, Sdr. Bernado Agustono Mochtar meninggal dunia. Perusahaan belum mengangkat Group Head of ERM sebagai pengganti. Untuk sementara, pengelolaan Enterprise Risk Management dikelola oleh Direktur, Haris Mustarto. Per 31 Desember 2023, Departemen Manajemen Risiko memiliki 5 (lima) karyawan, terdiri dari 1 (satu) orang *Risk Expert*, 2 (dua) orang *Risk Senior Specialist*, 1 (satu) orang *Risk Specialist* dan 1 (satu) orang *Insurance Senior Specialist* yang memiliki sertifikasi manajemen risiko sebagai berikut:

Unfortunately, in mid-2023, Mr. Bernado Agustono Mochtar passed away. As of now, the Company has not appointed a replacement for the Group Head of ERM. In the interim period, Enterprise Risk Management is being overseen by Director Haris Mustarto. Per As of December 31, 2023, the Risk Management Department was supported by 5 (five) employees, consisting of 1 (one) Risk Expert, 2 (two) Risk Senior Specialist, 1 (one) Risk Specialist and 1 (one) Insurance Sr.Specialist, who each has possessed risk management certifications as the followings:

Jabatan Position	**Sertifikasi** Certification	**Materi Pengembangan Kompetensi** Competency Development Material
Expert Corporate Risk Management	• *Certified Risk Management Professional* (CRMP). • *Business Continuity Management Certified Professional* (BCMCP). • *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS). • *Internal Audit certification for ISO 37001* dari Robere. | Internal Audit certification for ISO 37001 from Robere.	• SMKP • Implementasi dan Audit/ *Implementation and Audit* • *Analytic Capability Development Program.* • *Coaching Knowledge.* • *Key Risk Indicator* • *Influential communication skill* • *Basic Insurance*

Jabatan Position	Sertifikasi Certification	Materi Pengembangan Kompetensi Competency Development Material
Sr. Specialist MVC Risk Management	• *Certified Risk Management Officer* (CRMO). • *Certified Risk Management Professional* (CRMP).	• *Key Risk Indicator* • *Risk Maturity*
Specialist MVC Risk Management	*Certified Risk Management Officer* (CRMO).	*Risk Maturity*
Sr. Specialist SSB Risk Management	• *Certified Risk Management Professional* (CRMP). • *Certified International Project Management Professional* (CIPMP). • *Certified First Aider.* • *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS). • ANZIIF (Assoc.) CIP (*Certified Insurance Professional*). • *Certified Internal Auditor for ISO-OHSAS and SMKP.* • *Business Continuity Management Certified Professional* (BCMCP).	• *Analytic Capability Development Program.* • *PDQA - Development Insurance Dashboard.*
Sr. Specialist Insurance Management	*Certificate of General Insurance on Introduction of the Insurance Principle and Introduction of the Insurance Law*, dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Certificate of General Insurance on Introduction of the Insurance Principle and Introduction of the Insurance Law, from the Association of Indonesian Insurance Management Experts (AAMAI).	• *Service Impact Expert.* • *Insurance Package.*

Kegiatan Manajemen Risiko
Risk Management Activities

Di tahun 2023, Grup ABM melakukan berbagai kegiatan manajemen risiko sebagai berikut:

In 2023, ABM Group has taken a number of risk management activities, they were:

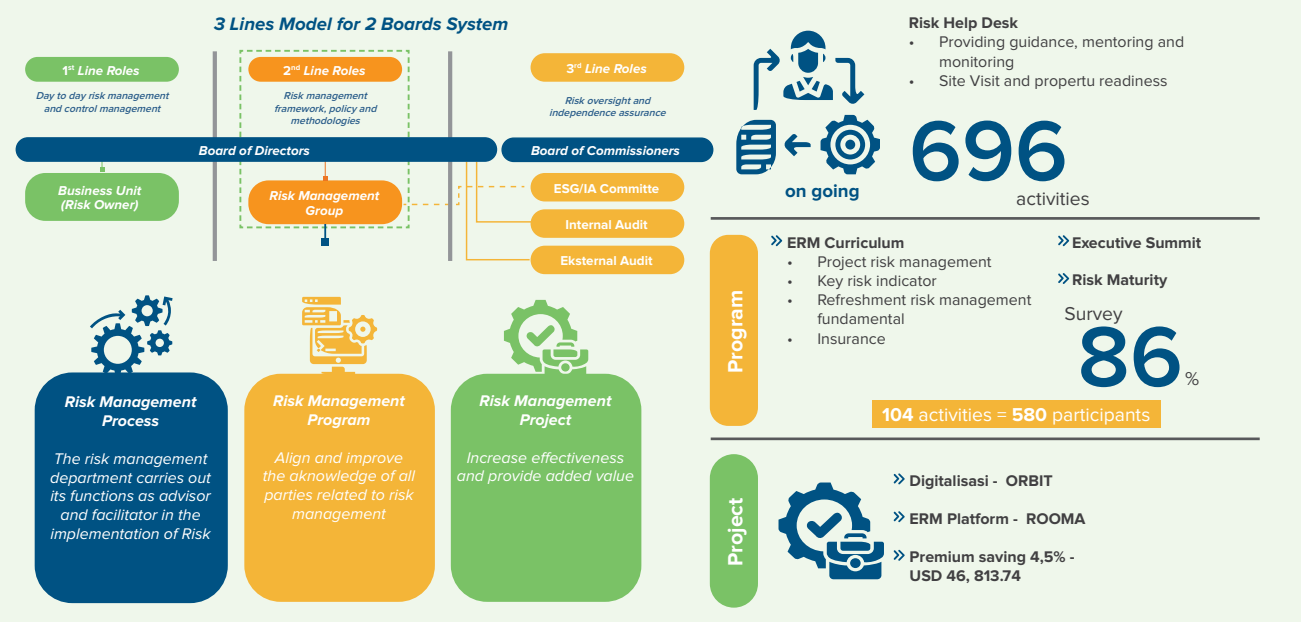

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Penilaian terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko di Grup ABM dilakukan pada masing-masing Entitas Anak melalui beberapa mekanisme, yaitu: melakukan koordinasi dengan organ manajemen risiko di Perusahaan sebagai Entitas Induk; penyelenggaraan rapat ERM secara rutin; dan pembahasan risiko-risiko utama di setiap Entitas Anak.

Overview of the Effectiveness of Risk Management System

To measure the effectiveness of risk management implementation of ABM Group, we have assessed the Subsidiaries' performance using several mechanism, they were: coordinating with risk management organ of the Company as the Parent Entity; the regular implementation of ERM meeting; and the discussion over the main risks of each Subsidiary.

Untuk mengevaluasi manajemen risiko Perusahaan, ERM memiliki sebuah sistem yang meliputi:
1. Proses, terdiri dari:
   a. Identifikasi risiko utama;
   b. Perencanaan, mitigasi, dan implementasi; dan
   c. Efektivitas mitigasi (pemantauan *progress report*).
2. Hasil meliputi hasil evaluasi dan pemantauan manajemen risiko.

So as to evaluate the Company' s risk management, ERM has developed a system, which includes:
1. Process, consisting of:
   a. Identification of main risks;
   b. Planning, mitigation and implementation; and
   c. Effectiveness of mitigation (progress report monitoring).
2. Results including evaluation results and risk management monitoring.

Skor Praktik Manajemen Risiko Korporat

Penilaian dilakukan pada masing-masing entitas anak dihitung berdasarkan realisasi program dan progres mitigasi atas target yang telah ditetapkan. Adapun skor praktik manajemen risiko korporat selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Score of Corporate Risk Management Practices

The assessment in each subsidiary is measured based on realization of program and mitigation progress against the determined targets. Scores for the corporate risk management practices in the last two years are presented in the table below:

Entitas Anak Subsidiaries	Skor Praktik Manajemen Risiko Korporat Tahun 2023 Score of Corporate Risk Management Practice 2023	Skor Praktik Manajemen Risiko Korporat Tahun 2022 Score of Corporate Risk Management Practice 2022
ABM	101%	99%
MVC	105%	102%
Grup CKB CKB Group	101%	100%
SSB	97%	94%

Skor Praktik Manajemen Risiko untuk tahun 2023 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan buah keberhasilan sebagai upaya berkelanjutan ABM untuk meningkatkan kinerja manajemen risiko dari waktu ke waktu, yang dilakukan melalui:
1. Peningkatan frekuensi keterlibatan Unit Manajemen Risiko dalam pengelolaan risiko di setiap proyek pada entitas anak;
2. Pengukuran *maturity* untuk mengetahui seberapa jauh implementasi manajemen risiko di entitas anak;
3. *Workshop* untuk mengukur kebutuhan mitigasi yang diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan proyek;
4. Mengembangkan untuk menetapkan *Early Warning* sebagai pencegahan risiko di masa depan.

The overall Risk Management Practices score for 2023 has improved compared to the previous year. This improvement is a result of ABM's ongoing efforts to improve its risk management performance over time, which are carried out through:

1. Increasing the frequency of the Risk Management Unit's involvement in risk management in each project at subsidiaries;
2. Maturity measurement to determine the extent of risk management implementation in subsidiaries;
3. Workshop to measure the mitigation needs required to improve the success of project implementation;
4. Developing to establish Early Warning as risk prevention in the future.

Profil Risiko Grup ABM Tahun 2023 dan Upaya Mitigasinya

ABM telah mengidentifikasi dan mengelola sejumlah risiko sebagaimana dapat dilihat pada *risk mapping* sebagai berikut:

ABM Group's Risk Profile and Mitigation Efforts in 2023

ABM has identified and managed several risks, as illustrated in the risk mapping below:

ABM Consolidation

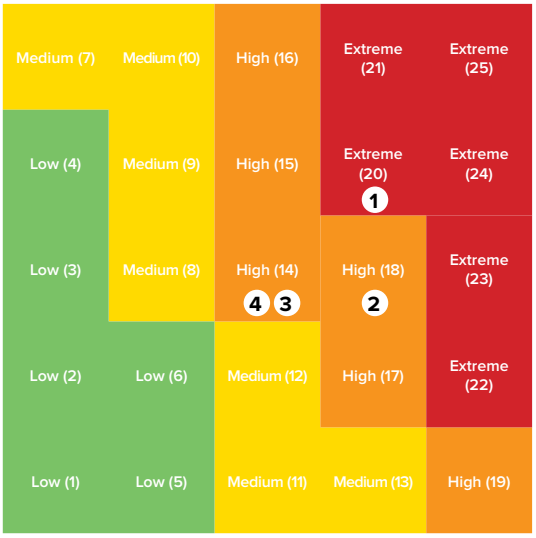

Risk No	Risk Grouping	Risk Detail
1	*Operational Risks*	*High Incident case* *Unachieved operational exellence*
2	*Financial risks*	*Limited to accsess financial resources*
3	*Financial risks*	*Cash flow problem - unable topay interest and/or principal obligation*
4	*ESG Value*	*High energy emission, High energy consumption, Poor waste management, Ub- Comply (regulation and permint). poor Contract Management, theft, fraud, soceial amd reputation issues*

No	Jenis Risiko Types of Risk	Penjelasan Risiko Risk Explanation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	*Operational Risks*	• *Human Health, Accident, LTI, Fatality and Environment Issue* • *Unachieved operational excellence* • *Unachieved Sustainable Profit/Low Margin*	• *Improve safety performance* - *Accident/Safety Alert* - *Provide disciplinary action* - *No Incident Culture (NICE) program* • *Improve service level excellence* - *Asset management monitoring* - *Weekly OCC Meeting* • *Maintain synergy with ABM subs and across TMT Group* • *Growth 3rd party pipeline*
2	***Financial** risks*	***Limited** to access **financial resources***	• *Selected market* • *Approach for additional loan from Indonesia local bank* • *Closed monitoring uses of fund* • *Increase ESG rating*
3	***Financial** risks*	***Cash flow** problem*	• *Maintain current control* - *Speed Up Unbilled Service* - *Maintain collection* - *Selective payment*
4	ESG Value	***High energy emission**, Poor waste management, Un-comply (regulation and permit), Poor Contract Management, theft, fraud, social and reputation issues.*	• *Regulatory Compliance* • *CSR and ESG Program*

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Sistem Manajemen Risiko yang dimiliki ABM telah memadai.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Commissioners and Board of Directors consider that ABM's Risk Management System has been adequate.



SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan mekanisme pengawasan dan pengendalian mencakup operasional ataupun keuangan hingga keseluruhan proses bisnis Perusahaan. Efektivitas penerapan SPI diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 3 (tiga) tujuan utama ABM yang meliputi:

1. **Tujuan Operasional**
   Terciptanya aktivitas operasional yang efektif dan efisien, termasuk di dalamnya adalah *safeguarding assets*.
2. **Tujuan Pelaporan**
   Terciptanya Laporan Keuangan yang akurat dan dapat dipercaya (*accurate and reliable*), baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan; dan
3. **Tujuan Compliance**
   Terciptanya kepatuhan terhadap setiap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengembangan SPI di lingkup ABM mengacu pada *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission* (COSO), kerangka pengendalian yang diakui secara internasional, dengan pendekatan *the three line model* sebagaimana terlihat pada bagan berikut ini:

The Internal Control System (SPI) serves as a monitoring and control mechanism encompassing operations and finances throughout the Company's business processes. The effectiveness of SPI implementation is anticipated to instill adequate confidence in achieving ABM's three main objectives, which include:

1. **Operational Objectives**
   The creation of effective and efficient operational activities, including safeguarding assets;
2. **Reporting Objectives**
   The creation of accurate and reliable Financial Statements, both for internal and external purposes of the Company; and
3. **Compliance Objectives**
   The creation of compliance with every applicable law and regulation.

The development of the Internal Control System (SPI) within ABM adheres to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), a globally acknowledged control framework. This framework employs the three-line model approach, as depicted in the following chart:

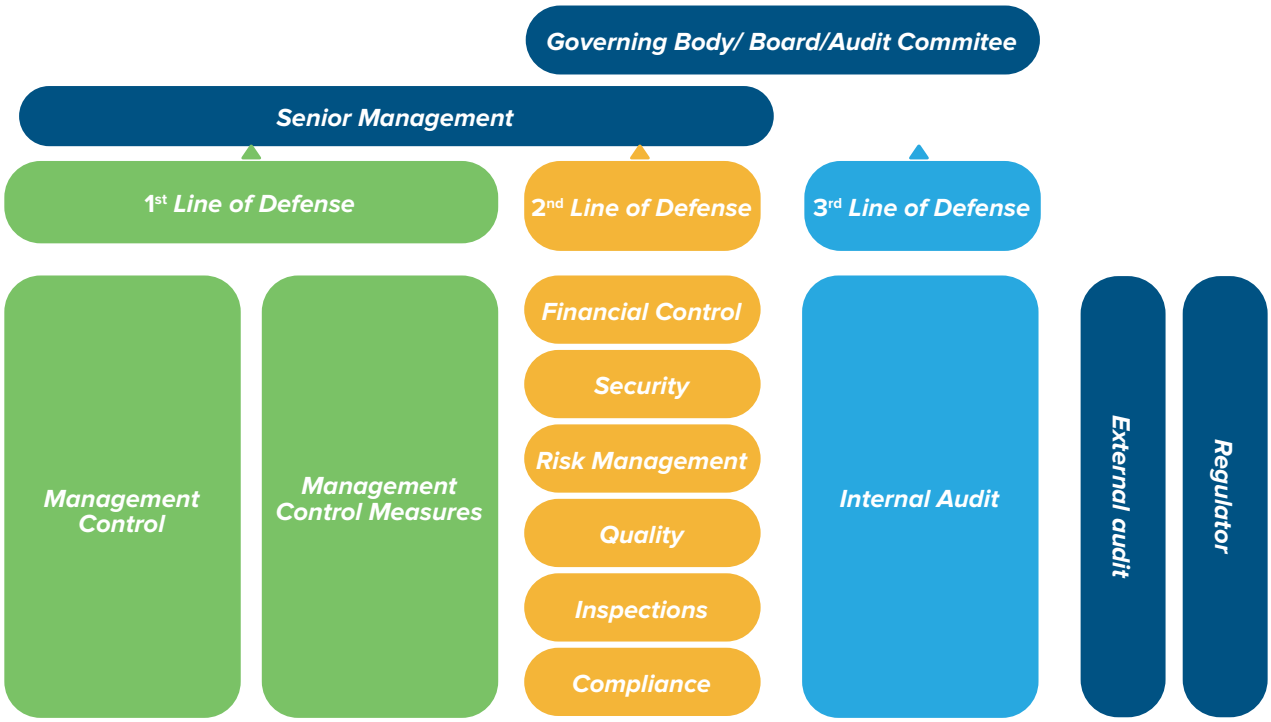

1st Line of Defense	*2nd Line of Defense*	*3rd Line of Defense*
Fungsi yang secara langsung berhadapan dengan risiko. A function that directly contends with the risk.	Fungsi yang berperan dalam memonitor risiko dan proses manajemen risiko serta bertugas untuk memberikan panduan atas manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, identifikasi risiko, memonitor risiko yang terjadi dan memberikan dampak pada *1st Line of Defense*. The function that plays a role in risk monitoring and risk management processes and is tasked with providing guidance on risk management, risk management framework, risk identification, the ongoing risk monitoring and makes an impact on the 1st Line of Defense.	Fungsi yang bersifat independen secara objektif mampu memberikan masukan terhadap perbaikan kontrol risiko yang terjadi di Perusahaan. The function is objectively independent and is able to provide input on the improvement of risk control that occurs in the Company.

Pendekatan *the three lines* model yang dijalankan ABM berpedoman pada 5 komponen SPI yang saling berhubungan sebagai berikut:

The three-line model approach implemented by ABM is guided by 5 interconnected SPI components, as follows:



Penerapan 5 (lima) komponen SPI tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komponen Sistem Pengendalian Internal (SPI) IAU Component	**Uraian** Description	**Penerapan di ABM** Implementation at ABM
Lingkungan Pengendalian Control Environment	Menciptakan lingkungan yang menaungi seluruh Perusahaan sebagai suatu organisasi dengan budaya dan perilaku tertentu. Lingkungan ini dibentuk dengan dasar integritas dan nilai-nilai, etika komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan, struktur organisasi, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja yang baik di seluruh lini Perusahaan. Establishing an environment that accommodates the entire Company as an organization with a certain culture and behavior. This environment is established on the basis of integrity and values, ethics of commitment to competence, leadership, organizational structure, authority, responsibility, and labor relations which is good in all lines of the Company.	Memiliki *core value* yang dibuat dengan menggabungkan kekuatan nilai-nilai yang berasal dari semangat “Hamami Family”. Having core values which are designed by combining the power of values derived from the spirit of the "Hamami Family".
Penilaian Risiko Risk Assessment	Proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang relevan dengan pencapaian tujuan dari Perusahaan, serta menentukan respons atau langkah mitigasi yang tepat untuk menghilangkan, meminimalkan, atau menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. The process of identifying and analyzing risks relevant to the achievement of the Company's objectives, as well as determining the appropriate response or mitigation measures to eliminate, minimize, or determine the acceptable risk levels.	Penyelenggaraan rapat secara rutin melalui ERM untuk membahas berbagai hal yang berpotensi menjadi risiko bagi Perusahaan, melalui pendekatan efektif dan memberikan informasi terkini. Selain itu, ERM juga melakukan sosialisasi terkait manajemen risiko, seperti pelatihan dengan mengundang fungsi lain, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan risiko. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, ERM didukung oleh *Office Strategic Management, Corporate Finance, Controller, Budget & Performance Monitoring*, maupun Unit Audit Internal dalam rangka memperoleh tingkat keyakinan bahwa seluruh risiko dapat diantisipasi dan berjalan secara efektif. Holding regular meetings through ERM to discuss various matters that have the potential to be risks for the Company, through an effective approach and providing the latest information. In addition, ERM also conducts socialization related to risk management, such as training by inviting other functions, both directly and indirectly involved with risk. In carrying out its duties and responsibilities, ERM is supported by Office Strategic Management, Corporate Finance, Controller, Budget & Performance Monitoring, and Internal Audit Unit in order to obtain a level of confidence that all Risks can be anticipated and run effectively.

Komponen Sistem Pengendalian Internal (SPI) IAU Component	**Uraian** Description	**Penerapan di ABM** Implementation at ABM
Aktivitas Pengendalian Control Activities	Dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa setiap strategi dan arahan dari pimpinan dapat berjalan seperti yang diharapkan. In the form of policies and procedures that can help ensure that every strategy and direction from the leadership can work as expected.	• Mengimbau seluruh karyawan untuk mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). • Memiliki kebijakan mengenai *Limit of Authorization* (LoA), *segregation of duties* yang jelas, *three ways matching concept* untuk pembayaran kepada pihak ketiga, *authorization matrix, reconciliation process, general control and application control* yang baik pada *Information Communication and Technology* (ICT). • Urge all employees to comply with the Standard Operational Procedure (SOP); and • Have a clear policy regarding Limit of Authorization (LoA), segregation of duties, three ways matching concept for payments to third parties, authorization matrix, reconciliation process, general control and application control which is good on Information Communication and Technology (ICT).
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	Dalam bentuk sistem dan proses yang mendukung identifikasi, pencatatan dan pertukaran informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok, dalam bentuk formulir atau bentuk lainnya pada waktu tertentu, yang dapat memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban suatu tugas. In the form of systems and processes that support the identification, recording and exchange of information relating to the performance of the main task, in the form of a form or other form at a certain time, which can facilitate the implementation, control, and accountability of a task.	• Memanfaatkan teknologi melalui: - *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang terintegrasi dan ter-update/last upgrade. - *Operations Control Centre* (OCC) yang dapat menginformasikan aktivitas dan pencapaian operasional harian. - Memberikan dukungan penuh berupa ICT pada pihak yang menjalankan fungsi ini, yakni *Corporate Communication*, Sekretaris Perusahaan, dan Hubungan Investor. • Melibatkan semua pihak, baik internal (Unit Audit Internal, Dewan Komisaris, dan Komite Audit) maupun eksternal (Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dll), dalam hal memberikan masukan sebelum terjadinya risiko dan perbaikan dalam rangka menciptakan SPI yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat ini. • Mengoptimalkan pemanfaatan *whistleblower hotline system* (WBS). • Utilizing technology through: - Integrated and updated Enterprise Resource Planning (ERP)/last upgrade; - An Operations Control Centre (OCC) that can inform daily operational activities and achievements; and - Providing full support in the form of ICT to parties carrying out this function, namely Corporate Communication, Corporate Secretary, and Investor Relations. • Involving all parties, both internal (Internal Audit Unit, Board of Commissioners, and Audit Committee) and external (Tax, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, etc.), in terms of providing input before the occurrence of risks and improvements in order to create an effective and efficient SPI in accordance with current conditions; and • Optimizing the utilization of whistleblower hotline system (WBS).

Komponen Sistem Pengendalian Internal (SPI) IAU Component	Uraian Description	Penerapan di ABM Implementation at ABM
Pemantauan Monitoring	Proses yang dilakukan secara rutin guna memastikan dan menilai kinerja dari aktivitas pengendalian internal yang dijalankan dari waktu ke waktu. Tindak lanjut atau *monitoring* atas implementasi dari rekomendasi audit yang diberikan dilakukan 3 bulan (90 hari) setelah laporan hasil audit diterbitkan secara resmi. Internal Audit berkomitmen untuk selalu hadir dalam memastikan dan membantu proses pelaksanaan rekomendasi tersebut pada semua perusahaan dalam grup ABM (*Auditee*). Apabila terdapat kendala dalam implementasi atas rekomendasi tersebut, maka akan dicari solusi yang terbaik bersama dengan manajemen, termasuk eskalasi sampai kepada *Top Management* apabila diperlukan. A process that is carried out regularly to ensure and assess the performance of internal control activities carried out from time to time. Follow-up or monitoring of the implementation of the audit recommendations given is carried out 3 months (90 days) after the audit report is officially published. Internal Audit is committed to always be present in ensuring and assisting the process of implementing these recommendations to all companies in the ABM (Auditee) group. If there are obstacles in the implementation of these recommendations, the best solution will be sought together with management, including escalation to Top Management if necessary.	Melibatkan seluruh pihak, baik internal (Unit Audit Internal, Dewan Komisaris, dan Komite Audit) maupun eksternal (Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan lain-lain), dalam hal memberikan masukan sebelum terjadinya risiko dan perbaikan dalam rangka menciptakan SPI yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi saat ini. Memaksimalkan pemanfaatan *whistleblower hotline system* (WBS). Involving all parties, both internal (Internal Audit Unit, Board of Commissioners, and Audit Committee) and external (Tax, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, etc.), in terms of providing input before the occurrence of risks and improvements in order to create an effective and efficient SPI in accordance with current conditions; and Maximize the utilization of whistleblower hotline system (WBS).

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023

Meskipun kebijakan *Work from Office* (WFO) atau bekerja dari kantor telah diberlakukan secara penuh sejak awal tahun 2023, namun pembatasan atas aktivitas lapangan termasuk dengan kunjungan belum sepenuhnya dibuka. Manajemen mengambil kebijakan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap memberlakukan serangkaian prosedur yang harus dijalani sebagai pemenuhan atas protokol kesehatan, meskipun sudah tidak secara ketat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini, tentu saja masih menjadi tantangan tersendiri terkait dengan penyesuaian, karena aktivitas evaluasi pengendalian internal tetap harus berjalan secara optimal sebagaimana operasional yang juga tetap harus berjalan. Berbagai penyesuaian yang sebelumnya dilakukan termasuk perubahan metode kerja audit internal, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti rekaman suara (*voice recording*), rekaman gambar (*visual recording*), kamera pantau menggunakan drone dan sebagainya, belum sepenuhnya dapat dihentikan.

Konsep *hybrid* juga menjadi istilah atau metode baru dalam bekerja yang mulai diterapkan saat ini, yaitu dengan menggabungkan dua metode secara bersamaan yaitu metode Daring (*Online*) dan Luring (*Offline*). Semua penyesuaian tersebut tetap bertujuan untuk

Overview of the Effectiveness of Risk Management System

the Work from Office (WFO) policy has been fully implemented since the beginning of 2023, restrictions on field activities including visits have not been fully lifted. Management took the policy to prioritize the precautionary principle by still imposing a series of procedures that must be followed as a fulfillment of health protocols, although it is not as strict as in previous years. This condition is obviously still a challenge in itself related to adjustments, because internal control evaluation activities must still run optimally as well as operations that must also continue to run. Various adjustments previously made, including changes in internal audit work methods, by optimizing the use of technology such as voice recording, visual recording, monitoring cameras using drones and so on, have not been completely stopped.

The hybrid concept is also a new term or method of working that is starting to be applied today, namely by combining two methods simultaneously, namely Online and Offline methods. All of these adjustments still aim to ensure that the evaluation of the

memastikan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal dapat tetap berjalan. Perusahaan menilai bahwa sepanjang tahun 2023, sistem pengendalian internal sudah berjalan dan telah memenuhi standar minimal untuk memastikan tingkat efektivitas, efisiensi, keandalan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Namun demikian, masih dan selalu terbuka ruang untuk penyempurnaan. Berbagai perubahan yang terjadi, baik yang dilakukan secara internal maupun yang didorong oleh situasi dan kondisi eksternal, mengharuskan Perusahaan senantiasa siap dan bersedia melakukan perbaikan guna memastikan tersedianya sistem (desain dan penerapan) pengendalian internal yang andal bagi Perusahaan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dan Direksi berpendapat bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan selama ini telah memadai dan memenuhi standar minimum untuk memastikan tingkat efektivitas, efisiensi, keandalan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Walaupun demikian, sistem pengendalian internal akan selalu diupayakan untuk disempurnakan mengingat perubahan yang terjadi begitu pesat, sehingga menuntut ABM untuk senantiasa siap sedia dalam melakukan perbaikan-perbaikan guna memastikan tersedianya sistem pengendalian internal yang andal bagi ABM.

Upaya Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pada Tahun 2023 dan Tahun Mendatang

Terkait dengan peningkatan sistem pengendalian internal pada lingkup Grup ABM, dapat dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas auditor internal dan peningkatan pada sistem dan proses audit internalnya. Untuk peningkatan pada kapasitas dan kapabilitas auditor internal, Group Internal Audit ABM terus mendorong agar semua auditor yang ada saat ini untuk mendapatkan sertifikasi profesi yang berlaku secara internasional yaitu *Certified of Internal Auditor* (CIA) dari *Institute of Internal Audit* (IIA) dan *Certified Fraud Examiner* (CFE) dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang keduanya berpusat di Amerika Serikat. Kedua lembaga tersebut merupakan rujukan dari fungsi audit internal yang diterima dan berlaku diseluruh dunia. Selain itu, terus mendorong agar dilakukan peningkatan skil dan keahlian yang bersifat teknis dan *softskill* melalui pelatihan dan seminar yang dilaksanakan secara internal maupun dari luar Perusahaan.

Sementara itu untuk peningkatan pada proses dan sistem, ditahun 2023 ini telah disusun konsep untuk pemberian *Audit Score* dan *Result Grading*. Konsep ini adalah pemberian skor dan rating atas semua aktivitas audit internal yang akan berjalan di grup ABM guna memperkuat opini audit yang sudah berjalan selama ini. Selain itu juga dikembangkan suatu *Internal Audit Management System* (IAMS) yang terintegrasi dengan nama "GIA – Everest". GIA - Everest merupakan sistem aplikasi internal yang akan menunjang pelaksanaan audit sekaligus menjadi media monitoring atas pelaksanaan rekomendasi audit dari manajemen dan *repository* untuk penyimpanan semua dokumentasi terkait audit internal. Sistem ini telah dirampungkan proses development nya pada bulan November 2023 dan dapat digunakan secara resmi pada bulan Desember 2023, dimana implementasinya juga akan mulai pada tahun 2024. Konsep dari *Audit Score & Result Grading* yang juga akan dijalankan pada tahun 2024 nanti, telah resmi tercakup dalam sistem aplikasi GIA - Everest tersebut. Kedua hal pengembangan yang dilakukan tersebut dimaksudkan agar tetap dapat terus berkontribusi optimal dengan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan proses audit.

implementation of internal control can continue. The Company assesses that throughout 2023, the internal control system has been running and has met the minimum standards to ensure the level of effectiveness, efficiency, reliability, security, and compliance with applicable regulations.

However, there is still and always room for improvement. Various changes that occur, both those carried out internally and those driven by external situations and conditions, requiring the Company to always remain alert and willing to make improvements to ensure the availability of a reliable internal control system (design and implementation) for the Company.

Statements of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Commissioners and Board of Directors are of the opinion that the internal control system implemented so far is adequate and meets the minimum standards to ensure the level of effectiveness, efficiency, reliability, security and compliance with regulations. Nevertheless, the internal control system will always be sought to be refined given the rapid changes that occur, thus requiring ABM to always be ready to make improvements to ensure the availability of a reliable internal control system for ABM.

Efforts to Improve the Internal Control System In 2023 and the Coming Year

Related to the improvement of the internal control system within the ABM Group, can be divided into 2 conditions, namely; increasing the capacity and capability of internal auditors and improving the internal audit system and process. To improve the capacity and capability of internal auditors, ABM's Internal Audit Group continues to encourage all current auditors to obtain internationally accepted professional certifications, namely Certified Internal Auditor (CIA) from the Institute of Internal Audit (IIA) and Certified Fraud Examiner (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), both based in the United States. Both institutions are references of internal audit functions that are accepted and applicable throughout the world. In addition, we continue to encourage the improvement of technical and soft skills and expertise through training and seminars conducted internally and from outside the Company.

Meanwhile, for the improvement of the system, in 2023 a concept has been developed for the provision of Audit Score and Result Grading. This concept is the provision of scores and ratings for all internal audit activities that will run in the ABM group to strengthen the audit opinion that has been running so far. An integrated Internal Audit Management System (IAMS) called "GIA - Everest" was also developed. GIA - Everest is an internal application system that will support the implementation of audits as well as a monitoring medium for the implementation of audit recommendations from management and a repository for storing all documentation related to internal audits. This system has completed its development process in November 2023 and can be officially used in December 2023, where its implementation will also start in 2024. The concept of Audit Score & Result Grading, which will also be implemented in 2024, has been officially included in the GIA - Everest application system. Both developments are intended to continue to contribute optimally with the use of information technology that supports the implementation of the audit process.

PERKARA PENTING
Legal Claims

PERKARA HUKUM YANG MELIBATKAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, SERTA ENTITAS ANAK

Sepanjang periode 2022-2023, jumlah kasus hukum yang dihadapi ABM, Entitas Anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

LEGAL CASES INVOLVING THE COMPANY, BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS, AND SUBSIDIARIES

During the period 2022-2023, the number of legal cases faced by ABM, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the following table:

Permasalahan Hukum Legal Cases	2023		2022	
	Perdata Civil	**Pidana** Crime	**Perdata** Civil	**Pidana** Crime
Perusahaan **Corporate**				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and Already have Permanent Legal Force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In Settlement Process	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Dewan Komisaris dan Direksi The Board of Commissioners and Public				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and Already have Permanent Legal Force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In Settlement Process	-	-	-	-
Jumlah **Total**	**-**	**-**	**-**	**-**
Entitas Anak **Subsidiaries**				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and Already have Permanent Legal Force		-	2	-
Dalam proses penyelesaian In Settlement Process	1	-	-	-
Jumlah **Total**	**1**	**-**	**2**	**-**
Jumlah Keseluruhan **Total Number**	**1**	**-**	**2**	**-**

Berikut adalah informasi mengenai perkara penting yang dihadapi Grup ABM sepanjang tahun 2023:

The following is information about important matters faced by ABM group throughout 2023:

PERKARA #01: CK
CASE #01: CK

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2020, dengan nomor register 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, PT Bangun Olahsarana Sukses (“BOS”), sebagai klien CK, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Maka, CK menjadi salah satu kreditur BOS di PKPU.

   Berdasarkan hasil dari Panel Hakim Pengadilan pada tanggal 16 Februari 2021, kesepakatan penyelesaian yang disepakati pada tanggal 3 Februari 2021, telah sah dan mengikat secara hukum. Pada tanggal 24 Februari 2021, PT Max Extraction Asia, salah satu kreditur BOS mengajukan kasasi atas BOS.

1. Based on the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court dated August 14, 2020, with the register number 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, PT Bangun Olahsarana Sukses (“BOS”), as CK’s client, is under Suspension of Debt Payment Obligation (“PKPU”). As such, CK became one of the creditors of BOS in the PKPU.

   Based on the outcome of the Panel of Court Judges on February 16, 2021, the settlement agreement agreed on February 3, 2021, is valid and legally binding. On February 24, 2021, PT Max Extraction Asia, one of the creditors of BOS filed an appeal against BOS.

Pada tanggal 10 Juni 2021, Makamah Agung mengeluarkan putusannya yang menolak kasasi PT Max Extraction Asia.

Pada tanggal 27 September 2022, Pengadilan Niaga telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh krediturnya dan oleh karenanya status BOS telah berada dalam status pailit.

On June 10, 2021, the Supreme Court issued its decision rejecting PT Max Extraction Asia's cassation.

On September 27, 2022, the Commercial Court has decided to grant the request to cancel the peace agreement filed by its creditors and therefore the status of BOS has been in bankruptcy status.

PERKARA #02: CK
CASE #02: CK

2. CK diajukan sebagai Tergugat III oleh Muhammad Bin Saad di Pengadilan Negeri Martapura dengan register perkara perdata No. 13/Pdt.G/2023/PN.Mtp tertanggal 16 Maret 2023 sehubungan dengan dugaan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah milik Muhammad Bin Saad.

   Pada tanggal 26 April 2023, Muhammad Bin Saad telah mencabut gugatan atas perkara perdata No. 13/Pdt.G/2023/PN.Mtp.

   Namun pada tanggal 16 Mei 2023, Muhammad Bin Saad kembali mengajukan kembali gugatan kepada CK sebagai Tergugat III dengan register perkara No. 24/Pdt.G/2023/PN.Mtp dengan pokok perkara yang sama dengan perkara sebelumnya yakni adanya dugaan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah milik Muhammad Bin Saad.

   Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 24/Pdt.G/2023/PN Mtp tertanggal 16 November 2023, gugatan Penggugat telah menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

   Pada tanggal 30 November 2023 Muhammad Bin Saad mengajukan upaya banding atas Putusan dimaksud. Perkara perdata ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

2. CK was filed as Defendant III by Muhammad Bin Saad at the Martapura District Court under civil case register No. 13/Pdt.G/2023/PN.Mtp dated March 16, 2023 in relation to the alleged unlawful acts committed by the Defendants against a piece of land owned by Muhammad Bin Saad.

   On April 26, 2023, Muhammad Bin Saad had withdrawn the lawsuit on civil case No. 13/Pdt.G/2023/PN.Mtp.

   However, on May 16, 2023, Muhammad Bin Saad re-filed a lawsuit against CK as Defendant III with case register No. 24/Pdt.G/2023/PN.Mtp with the same subject matter as the previous case, namely the alleged unlawful acts committed by the Defendants against a plot of land owned by Muhammad Bin Saad.

   Based on the Decision of the Martapura District Court No. 24/Pdt.G/2023/PN Mtp dated November 16, 2023, the Plaintiff's lawsuit was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard).

   On November 30, 2023 Muhammad Bin Saad filed an appeal against the Decision. This civil case is still under appeal at the Banjarmasin High Court.

SANKSI ADMINISTRATIF

Hingga akhir Desember 2023, tidak terdapat sanksi administratif dalam bentuk apapun yang diterima oleh ABM maupun Dewan Komisaris dan Direksi ABM serta entitas anak.

ADMINISTRATIVE SANCTION

Until the end of December 2023, there were no administrative sanctions in any form received by ABM or the Board of Commissioners and Directors of ABM and its subsidiaries.

PERKARA TERKAIT PERPAJAKAN

Berikut disampaikan beberapa permasalahan terkait perpajakan yang terjadi di lingkup Perusahaan dan kelompok usaha:

1. ABM
   - Keputusan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2021.
2. SSB
   - Keputusan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2021.
   - Keputusan Hasil Peninjauan Kembali PPN Tahun 2016.
3. Reswara
   - Keputusan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2021.
4. CK
   - Keputusan Pemeriksaan Pajak Tahun 2021.
   - Keputusan Banding Pajak Tahun 2018.
5. MIFA
   - Keputusan Banding Pajak Tahun 2018.
   - Keputusan Banding PPh 23/26 Tahun 2018.

Perusahaan telah mengungkapkan seluruh permasalahan pajak yang ada dalam Laporan Keuangan teraudit tahun buku 2023.

TAXATION-RELATED CASES

The following are some issues related to taxation that occur within the scope of the Company and its business groups:

1. ABM
   - Decision on Tax Audit Results for the Year 2021.
2. SSB
   - Tax audit result decision 2021.
   - VAT Reconsideration Result Decision 2016.
3. Reswara
   - Tax audit result decision 2021.
4. CK
   - 2021 Tax Audit Decision.
   - Tax Appeal Decision 2018.
5. MIFA
   - Tax Appeal Decision Year 2018.
   - Income Tax Appeal Decision Year 2018.

The Company has disclosed all existing tax issues in the audited Financial Statements for the 2023 fiscal year.

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat informasi terkait perkara penting di luar aspek hukum yang dihadapi Grup ABM maupun Dewan Komisaris dan Direksi ABM serta entitas anak.

IMPORTANT CASES OUTSIDE THE LEGAL ASPECTS

Throughout 2023, there was no information related to important cases outside the legal aspects faced by ABM Group or the Board of Commissioners and Directors of ABM and its subsidiaries.

KODE ETIK
Code of Conduct

ABM memiliki Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Ethic and Conduct*/ COEC) sebagai pedoman yang berlaku bagi seluruh insan ABM dalam menjalankan perannya pada rantai nilai Perusahaan.

COEC telah menjadi standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnis sesuai dengan visi, misi, nilai, dan budaya yang dimiliki yang diterapkan di seluruh lini usaha.

ABM has a Code of Ethic and Conduct (COEC) as a guideline that applies to all ABM people in carrying out their roles in the Company's value chain.

COEC has become the best ethical standard in carrying out all business activities in accordance with the vision, mission, values, and culture that are applied in all lines of business.



Penerapan COEC
ABM menerbitkan CEOC ABM pada tanggal 31 Januari 2013 dan telah diperbarui pada tanggal 30 Juni 2017. COEC menjadi bagian dari Piagam Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG Charter*). Tidak hanya bagi karyawan ABM, COEC yang dimiliki berlaku bagi dan wajib dipatuhi oleh seluruh Entitas Anak serta afiliasi yang berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Pokok-Pokok COEC
Pokok isi COEC mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Pedoman Perilaku Hubungan antara Anggota Grup ABM;
2. Pedoman Perilaku Hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
3. Pedoman Perilaku Keselamatan, Kesehatan Kerja, serta Lingkungan Hidup;
4. Pedoman Perilaku Perlindungan Aset Perusahaan;
5. Pedoman Perilaku atas Benturan Kepentingan dan Gratifikasi; serta
6. Pedoman Perilaku Umum.

Sosialisasi COEC
Sosialisasi COEC dilakukan ABM secara berkesinambungan kepada seluruh insan ABM dan pemangku kepentingan, yang dilakukan melalui program orientasi dan *refreshment* secara berkala bagi seluruh insan ABM dan program pengenalan Kode Etik kepada karyawan baru. COEC dapat diakses secara mudah oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs web ABM bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Perangkat-Perangkat GCG.

Implementation of COEC
ABM issued the ABM COEC on January 31, 2013 and has been updated on June 30, 2017. The COEC has become part of the Good Corporate Governance Charter (GCG Charter). Not only for ABM employees, the COEC applies to and must be complied with by all subsidiaries and affiliates under the Company's control.

Key Points Of COEC
The key points of COEC regulate the followings:
1. Code of Conduct regulating Relationships between ABM Group Members;
2. Code of Conduct regulating Relations with Stakeholders;
3. Code of Conduct regulating Occupational Health, Safety and Environment;
4. Code of Conduct regulating Protection of the Company's Assets;
5. Code of Conduct on Conflicts of Interest and Gratuities; and
6. General Code of Conduct.

Dissemination of COEC
ABM conducts continuous COEC (Code of Ethics and Conduct) socialization to all employees and stakeholders. This is achieved through regular orientation and refreshment programs for all ABM employees, as well as an introduction program to the Code of Ethics for new employees. The COEC can be easily accessed by all stakeholders through ABM's website under Our Commitment > Governance > GCG Tools.

Prinsip Penegakan COEC dan Peraturan Perusahaan

Prinsip-prinsip dalam upaya penegakan COEC terdiri dari:

Kepatuhan | Compliance
Setiap anggota ABM taat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan/kebijakan Perusahaan.

Every member of ABM complies with laws and regulations and the provisions/policies of the Company.

Keselarasan | Harmony
Setiap anggota ABM mengantisipasi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian independen dan pengambilan keputusan.

Every member of ABM anticipates a conflict of interest that could influence independent judgment and decision making.

COEC Enforcement Principles and Company Regulations

The principles for COEC enforcement consist of:

Kejujuran | Honesty
Setiap anggota ABM memegang teguh prinsip-prinsip etika serta kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan secara konsisten, terukur, dan terpercaya.

Every member of ABM adheres to ethical principles and matches the utterance and actions in a consistent, measurable and reliable manner.

Nama Baik | Corporate Image
Setiap anggota ABM selalu menjaga nama baik (corporate image) perusahaan demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Perusahaan.

Every member of ABM always maintains a positive corporate image in order to secure public trust in the Company.

Sanksi Pelanggaran COEC

Bagi karyawan yang mengetahui adanya pelanggaran COEC dan bermaksud melaporkannya, maka yang bersangkutan perlu berdiskusi dengan Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Hukum, anggota Direksi atau Dewan Komisaris. Selain itu, pelapor dapat memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) yang keamanannya terjamin jika mekanisme internal di atas tidak memungkinkan.

Bagi karyawan ABM yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka karyawan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, berupa teguran, peringatan tertulis, hingga pemutusan hubungan kerja.

Sepanjang tahun 2023, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sanctions for COEC Violation

For employees who become aware of a Code of Ethics and Conduct (COEC) violation and intend to report it, they should discuss it with the Human Resources Department, Legal Department, members of the Board of Directors, or Board of Commissioners. Moreover, if the internal mechanism is not feasible, the reporter can utilize the Whistleblowing System (WBS), which guarantees security.

As for ABM employees found to have violated Company Regulations, sanctions will be imposed based on the severity of the violation. These sanctions may include a reprimand, written warning, or termination of employment.

Throughout 2023, the number of violations of the Company Regulations can be seen in the following table:

Jenis Pelanggaran Type of Violations	**Jumlah** Pelaporan Total Reports	**Selesai Diproses** Finished Processing	**Masih Ditindaklanjuti** In Process		**Tidak** Dilanjutkan Followed Up Further
			Proses Observasi Process Observation	**Proses Investigasi** Investigation Process	
Pemerasan Economic Extorsion	5	5	-	-	-
Balas Jasa Kickbacks	-	-	-	-	-
Penyalahgunaan Aset Asset Misappropriation	1	1	-	-	-
Penyuapan Bribery	6	6	-	-	-
Penipuan dan Penggelapan Fraud and Embezzlement	12	11	-	1	-
Penyalahgunaan Wewenang Abuse of Authority	4	4	-	-	-
Gratifikasi Gratuities	-	-	-	-	-
Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan Violation of the Code of Conduct	7	7	-	-	-
Jumlah **Total**	**37**	**36**	**-**	**1**	**-**

Di tahun 2023 Perusahaan menerima 37 pengaduan atau pelaporan kasus. Dari seluruh pengaduan tersebut, sebanyak 36 kasus telah selesai ditindaklanjuti dan sebanyak 1 (satu) kasus masih dalam penanganan hingga saat ini.

In 2023 the Company received 37 complaints or case reports. Of all these complaints, 36 cases have been followed up and 1 (one) case is still being handled to date.

Pakta Integritas

Seluruh insan ABM yang terdiri dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan jajaran lainnya wajib menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlihat di bawah ini:

Integrity Pact

All ABM personnel, including members of the Board of Commissioners, Directors, Committees, and other levels, are required to sign the Integrity Pact, as illustrated below.

Pakta Integritas
Integrity Pact

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
SN :
Perusahaan :
Departemen :
Lokasi Kerja :

Menyatakan sebagai berikut:

1. Saya telah membaca dan memahami isi Pedoman Etika dan Perilaku (COEC) Perusahaan serta akan mematuhi COEC dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan hasil pekerjaan untuk kemajuan Perusahaan dan Grup ABM.
2. Saya tidak sedang atau tidak akan memangku jabatan rangkap sebagai:
   a. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif, yudikatif atau eksekutif, termasuk sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah (mulai tingkatan kepala daerah yang tertinggi hingga yang terendah yaitu kelurahan);
   b. Direktur, Komisaris atau pemimpin perusahaan di tempat lain, selain yang telah diberitahukan kepada dan diijinkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Departemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.
3. Saya akan selalu menjaga integritas dan menghindari benturan kepentingan yang berpengaruh pada aktivitas fungsi pengelolaan dan pengawasan operasional Perusahaan dan/atau Grup ABM.
4. Saya akan selalu bertindak dan bersikap independen demi kepentingan Perusahaan dan/atau Grup ABM tanpa melanggar COEC dan peraturan lain yang berlaku di Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila saya memiliki masalah yang berpotensi melanggar atau merupakan pelanggaran terhadap COEC, saya akan memberitahukan kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur oleh Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Saya bersedia menerima konsekuensi atas setiap tindakan saya yang bertentangan dengan COEC sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya tandatangani dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan dalam kesadaran penuh tanpa adanya paksaan/tekanan dari siapapun.

GRATIFIKASI DAN KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Gratuities And Anti-Corruption Policy

ABM memiliki Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2016 dan mengacu pada pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tujuan dari Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan ini adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan iklim yang kondusif dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan;
2. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
3. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini; serta
4. Meningkatkan reputasi Perusahaan.

Terkait dengan gratifikasi, dalam situasi tertentu, karyawan diperbolehkan menerima hadiah/imbalan dari pihak ketiga dengan syarat wajib melapor kepada pihak terkait jika penolakan dianggap dapat menimbulkan penghinaan.

Pada tahun 2022, ABM mulai mengimplementasikan ISO 37001 guna memperkuat kebijakan *anti-bribery* yang sudah ada. Hal ini merupakan kelanjutan dari sosialisasi penggunaan aplikasi "*Internal Audit Clinic*" (IA *Clinic*) yang dilakukan oleh *Group of Internal Audit* (GIA) di tahun sebelumnya.

Hingga akhir Desember 2023, ABM tidak menerima laporan pelanggaran gratifikasi yang dapat merugikan Perusahaan atau pihak lain. ABM menerima beberapa laporan terkait pemberian hadiah kecil yang diberikan kepada manajemen dan karyawan di mana laporan terkait dengan hal tersebut telah ditindaklanjuti sepenuhnya.

ABM has an Anti-Corruption and Bribery Policy, issued on August 3, 2016, and is based on Law No. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

The objectives of this Anti-Corruption and Bribery Policy are as follows:
1. Establishing a vibrant work environment and avoiding issues that can cause financial and non-financial losses, including the issues matters that may damage the Company's reputation;
2. Establishing a policy and infrastructure to protect the whistleblowers from retaliation acts from internal and external parties;
3. Reducing potential losses that might occur due to violations through early detection; and
4. Improving the Company's reputation.

Regarding gratuities, in certain situations, employees are allowed to accept gifts/reward from third parties with the condition that they must report to the relevant party if the refusal is considered to cause humiliation.

In 2022, ABM began implementing ISO 37001 to strengthen its existing anti-bribery policy. This was a continuation of the socialization of the use of the "Internal Audit Clinic" (IA Clinic) application conducted by the Group of Internal Audit (GIA) in the previous year.

Until the end of December 2023, ABM did not receive any reports of gratification violations that could harm the Company or other parties. ABM received several reports related to small gifts given to management and employees where the reports related to these matters have been fully followed up.

KEBIJAKAN *INSIDER TRADING*

Insider Trading Policy

Insider Trading atau perdagangan melalui informasi dari orang dalam menjadi hal yang dilarang dalam lingkup ABM. Hal ini tertuang dalam COEC, di mana setiap insan ABM yang memiliki akses informasi orang dalam atau bersifat material, tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya, khususnya terkait:

1. Menyampaikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan investor untuk membeli, menjual, atau saham Perusahaan; dan
2. Menyampaikan informasi material Perusahaan kepada orang-orang yang memiliki hubungan istimewa untuk melakukan tindakan transaksi perdagangan barang/jasa kepada Perusahaan.

Melalui Kebijakan Kepemilikan dan Kerahasiaan Informasi yang dimiliki ABM, diatur bahwa hanya pihak Manajemen yang dapat mengeluarkan seluruh informasi ABM yang bersifat rahasia dan material kepada pihak lain. Untuk itu, seluruh karyawan wajib mematuhi kebijakan tersebut dan bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Insider Trading, or trading based on information from insiders, is strictly prohibited within the ABM framework. This prohibition is outlined in the Code of Ethics and Conduct (COEC), wherein every ABM employee with access to insider or material information must refrain from abusing their position and duties, particularly concerning:

1. Deliver information that may influence investors' decisions to buy, sell, or the Company's shares; and
2. Deliver material information about the Company to people who have special relationships to conduct transactions on trade of goods/services with the Company.

As per ABM's Information Ownership and Confidentiality Policy, only Management is authorized to disclose all confidential and material ABM information to other parties. Therefore, all employees are obligated to adhere to this policy, and individuals found to have violated it will be subject to sanctions.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Information on the Provision of Funding for Political Activities

ABM melarang adanya keterlibatan individu atas nama Perusahaan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Hal ini tertuang dalam COEC yang dimiliki ABM.

Sepanjang tahun 2023, tidak ada pemberian dana dalam bentuk apapun untuk kegiatan politik kecuali untuk berbagai inisiatif keberlanjutan yang dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah.

ABM prohibits individuals from engaging on behalf of the Company in political activities, including making donations for political purposes. This policy is explicitly outlined in ABM's Code of Ethics and Conduct (COEC).

Throughout 2023, there was no funding of any kind for political activities except for various sustainability initiatives which can be seen in the Sustainability Report which is presented separately.

PENGELOLAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Management of Potential Conflict of Interest

Kode etik atau COEC ABM mengatur pengelolaan potensi benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak berelasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan serta melindungi kepentingan ABM dan Pemegang Saham. Sejumlah ketentuan yang tertuang dalam COEC terkait benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Insan ABM harus selalu melaporkan aktivitas di luar ABM atau bisnis lain dalam bentuk apapun dan segala bentuk hubungan yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dengan ABM;
2. Setiap insan ABM yang memiliki benturan kepentingan dilarang berpartisipasi dalam semua diskusi dan proses pengambilan keputusan;
3. Insan ABM harus membuat persetujuan tertulis dari Direktur, Dewan Komisaris, atau SDM sebelum menerima posisi di Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Hukum, atau perusahaan bisnis lainnya; serta
4. Insan ABM harus membuat pernyataan komitmen tahunan terkait hal-hal di atas.

ABM telah mengungkapkan berbagai transaksi dengan pihak berelasi dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan ini.

ABM's Code of Ethics or COEC governs the management of potential conflicts of interest and transactions with related parties, aiming to prevent conflicts of interest and safeguard the interests of ABM and shareholders. Several provisions outlined in the COEC regarding conflicts of interest include:

1. ABM employees must always report activities outside ABM or other businesses in any form, and any form of relationship that may lead to a conflict of interest with ABM;
2. Every ABM employee who has a conflict of interest is prohibited from participating in all discussions and decision-making processes;
3. ABM employees must obtain written approval from the Director, Board of Commissioners or HR before accepting a position at a non-profit organization, law firm, or other companies; and
4. ABM employees must make an annual statement of commitment regarding the matters above.

ABM has disclosed various transactions with related parties in this Financial Report and Annual Report.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Goods and Services Procurement Policy



COEC ABM mengatur tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Di samping itu sejumlah ketentuan seperti Payung Kontrak dan *Evaluation Matrix-Request for Tender* (penilaian pemilihan pemasok/penyedia jasa) juga memuat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sejumlah ketentuan di antaranya adalah:

1. Pemilihan pemasok/penyedia jasa didasarkan pada penilaian faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diatur di dalam *Evaluation Matrix-Request for Tender* di mana penilaian terdiri dari 5 aspek non-harga dan 1 aspek harga;
2. Dokumen Payung Kontrak mengatur hak pemasok atau penyedia jasa yang harus dipenuhi oleh Perusahaan dan sebaliknya, termasuk di dalamnya hak pemasok/penyedia jasa dalam menerima pembayaran tepat waktu dan mengajukan permintaan fasilitas-fasilitas kepada perusahaan;
3. *Procedure Treasury Invoice Payment* diterapkan untuk memastikan pembayaran *vendor* dilaksanakan tepat waktu; serta
4. Untuk menjamin pemasok/penyedia jasa melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, Perusahaan akan melakukan evaluasi 7 (tujuh) indikator kunci yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Selain itu, ABM juga memiliki sejumlah dokumen terkait pengadaan yang terdiri dari:

1. SOP Pengadaan yang mengatur prosedur pengadaan, mulai dari permintaan pengadaan oleh *user* hingga evaluasi *vendor*;
2. Kebijakan Peningkatan Kemampuan *Vendor* yang mengatur proses evaluasi pelaksanaan kewajiban *vendor* terhadap ABM;
3. Pakta Integritas;
4. Perjanjian Kemitraan; dan
5. *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang ditandatangani oleh Direktur *vendor*.

ABM's Code of Ethics (COEC) regulates the Goods and Services Procurement Policy. In addition, several provisions, such as the Contract Umbrella and Evaluation Matrix-Request for Tender, are incorporated into the Goods and Services Procurement Policy. These provisions include:

1. The selection of supplier/service providers is based on an assessment of economic and non-economic factors regulated in the Evaluation Matrix-Request for Tender where the assessment consists of 5 non-price aspects and 1 price aspect.
2. The Contract Umbrella Document regulates the suppliers or service providers' rights that must be fulfilled by the Company and vice versa, including the rights of supplier/service providers to receive payments on time and submit requests for facilities to the company.
3. Treasury Invoice Payment procedures are implemented to ensure payments to vendors completed on time.
4. To ensure that service suppliers/providers carry out their obligations in accordance with the agreement, the Company will evaluate 7 (seven) key indicators set out in the Specific Conditions of the Contract.

In addition, ABM also has a number of documents related to procurement that consist of:

1. Procurement SOP that regulates procurement procedures, starting from procurement requests by users to vendor evaluations;
2. Vendor Capacity Building Policy that regulates the process of evaluating the implementation of vendor obligations towards ABM;
3. Integrity Pact;
4. Partnership Agreement; and
5. Non-Disclosure Agreement (NDA) signed by the vendor's Director.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
Whistleblowing System

ABM menyelenggarakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dengan tujuan agar seluruh insan ABM dapat melakukan penanganan yang tepat atas dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, baik oleh perorangan ataupun kelompok di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan. Dalam menjaga praktik GCG pada level terbaik, WBS ABM memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Penetapan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkup Perusahaan

Sejak tanggal 1 April 2023, telah menyusun dan menerapkan WBS berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 013/ABM-BOCRES/IV/2013 tentang Pemberlakuan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS), ABM mulai menerapkan WBS yang berlaku bagi seluruh karyawan Grup ABM. Dalam rangka penyesuaian dengan Pedoman International Fraud Examiners Manual-2016, Perusahaan mengeluarkan kebijakan baru terkait penerapan WBS pada tanggal 16 Juni 2017.

Penerapan WBS di lingkungan Grup ABM memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Memiliki fungsi sebagai media penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman sesuai dengan prinsip-prinsip dalam WBS;
2. Membangun sifat dan kesadaran menolak atau menghindari perbuatan pelanggaran, serta komitmen untuk meningkatkan kesediaan melaporkan terjadinya pelanggaran, hal mana terbangun dari adanya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang terjamin kerahasiaannya dan efektif;
3. Memberikan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
4. Memberikan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
5. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, hubungan dengan pemerintah, keselamatan kerja, dan reputasi;
6. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran;
7. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan, termasuk regulator, dan masyarakat umum;
8. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan; dan
9. Memotong jalur birokrasi dalam menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran serius yang memerlukan tindakan cepat.

Lingkup Pelaporan WBS

Pelapor dapat menyampaikan adanya dugaan pelanggaran bila hal tersebut termasuk dalam kategori:

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Ketidakjujuran;
4. Gratifikasi;
5. Perbuatan melanggar atau terindikasi hukum pidana (termasuk pencurian, pemalsuan, penipuan, penggelapan, perusakan barang milik Perusahaan, perusakan lingkungan, *mark-up*, *under invoice*, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, dan perbuatan kriminal lainnya);

ABM has implemented a Violation Reporting System, also known as a Whistleblowing System (WBS), designed to enable all ABM personnel to report suspected irregularities or violations occurring within the Company's internal and external environment. This system ensures appropriate handling of such reports, whether they involve individuals or groups. In upholding the highest standards of Good Corporate Governance (GCG), ABM's WBS provides protection for whistleblowers.

Determination of a Violation Reporting System in the Company

Since April 1, 2023, ABM has prepared and implemented a Whistleblowing System (WBS) based on Board of Commissioners Decree No. 013/ABM-BOCRES/IV/2013 concerning the Implementation of the Whistleblowing System (WBS) Policy, ABM began implementing the WBS which applies to all ABM Group employees. In order to adapt to the International Fraud Examiners Manual-2016, the Company issued a new policy regarding the implementation of WBS on June 16 2017.

Implementing WBS in the ABM Group environment provides a number of benefits as follows:

1. To serve the functions of being the medium for delivering important and critical information relating to the Company to the parties who must immediately handle it securely in accordance with the WBS principles;
2. Building the nature and awareness of refusing or avoiding violations, and a commitment to voluntarily reporting the violating acts, which is built upon trust in the reporting system that is guaranteed for the confidentiality and effective;
3. Providing an early warning system for potential problems resulting from a violation;
4. Providing an opportunity to deal with the violations internally, before it is growing into public concern;
5. Reducing the risks faced by the organization, as a result of violations in terms of finance, operations, legal, government relations, work safety, and reputation;
6. Reducing the costs in dealing with the consequences of violations;
7. Improving the Company's reputation among the stakeholders, including the regulators, and the public;
8. Advising the Company to further observe the critical areas and work processes that have weaknesses in internal control, as well as to design the necessary improvement actions; and
9. Cutting the bureaucratic process while following up on the indications of serious violations that require quick actions.

Scope of WBS Reporting

The informant may submit an alleged violation if it falls into the following category:

1. Corruption;
2. Cheating;
3. Dishonesty;
4. Gratuities;
5. Acts that violate or indicate criminal law (including theft, forgery, fraud, embezzlement, destruction of Company property, environmental damage, mark-ups, under invoices, use of violence against employees or leaders, extortion, drug use, harassment, and other criminal acts);

6. Pelanggaran ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat perdata maupun administratif, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan pajak, ketenagakerjaan, peraturan yang menyangkut perizinan, baik pusat maupun daerah, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sejenis;
7. Pelanggaran Pedoman atau prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan Etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma ketertiban umum dan kesopanan pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan yang bermuatan benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang sejenis;
8. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan ABM atau Entitas Anak, Manajemen, karyawan ABM, dan pihak-pihak yang terkait;
9. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap atau merugikan kepentingan atau reputasi ABM atau Entitas Anak;
10. Pelanggaran SOP ABM atau Entitas Anak, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat, dan remunerasi;
11. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas pencucian uang; serta
12. Melanggar prinsip dan praktik usaha yang baik yang berlaku umum.

Media Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran

Setiap pihak yang langsung atau tidak langsung terkait dengan Perusahaan, pihak ketiga di luar Perusahaan atau Entitas Anak yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran berhak menyampaikan laporan melalui surat elektronik atau secara tertulis sebagai berikut:

Alamat Surat Elektronik
E-mail Address

U.p. Komisaris Independen/Komite Audit
U.p. Independent Commissioner/Audit Committee
Email: wbs.abm@gmail.com

Surat Tertulis
Written Letter

U.p. Komisaris Independen/Komite Audit
U.p. Independent Commissioner/Audit Committee
PT ABM Investama Tbk
Gedung TMT 1, Lantai 18 | 18th Floor, Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta Selatan, 12560
Indonesia

Namun demikian, pelapor diharuskan menyampaikan laporan tersebut secara langsung kepada Komisaris Independen atau Komite Audit apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh petugas WBS, maka pelapor harus mengirimkan laporan tersebut secara langsung kepada Komisaris Independen atau Komite Audit.

Pihak yang Mengelola Laporan

Dalam rangka memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi, maka Perusahaan menunjuk pihak yang profesional dan independen, baik dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan atau pihak ketiga agar memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari unsur-unsur kepentingan pribadi. Jika dipandang perlu, Perusahaan juga dapat melakukan seleksi atas kandidat yang akan mengelola WBS. Kandidat yang lolos dari seleksi ini kemudian diajukan ke Dewan Komisaris dan Direksi untuk memperoleh persetujuan.

Kualifikasi yang harus dimiliki oleh Petugas WBS adalah sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas yang tinggi;
2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan investigasi;
3. Kemampuan analisis yang tinggi;
4. Kemampuan melakukan penilaian dengan baik (*sound judgment*);
5. Objektif;

6. Violations of laws and/or other regulations, both civil and administrative, including but not limited to tax regulations, employment, regulations concerning licenses, in both central and local administrations, and other similar violations;
7. Violation of the Guidelines or principles of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Ethics or violations of the norms of public order and decency in general, including but not limited to actions containing conflicts of interest, engaging in prohibited activities and other similar violations;
8. Actions that endanger occupational safety and health, or endanger the security of ABM or its Subsidiaries, Management, ABM employees, and related parties;
9. Actions that can cause financial or non-financial losses to or harm the interests or reputation of ABM or its Subsidiaries;
10. Violation of ABM's or its Subsidiary's SOP, especially related to the procurement of goods and services, provision of benefits, and remuneration;
11. Actions that can be categorized as money laundering activities; and
12. Violating the generally accepted good business principles and practices.

Reporting Media of Alleged Violations

Any party directly or indirectly related to the Company, third parties outside the Company or Subsidiaries who feel disadvantaged or simply wish to report an alleged violation has the right to submit a report via electronic mail or in writing as follows:

However, the reporter is required to submit the report directly to the Independent Commissioner or Audit Committee. If the alleged violation was committed by a WBS officer, the reporter must submit the report directly to the Independent Commissioner or Audit Committee.

Parties Who Manage the Report

To ensure objective, accountable, and impartial results free from personal interests, the Company appoints a professional and independent party, both internal and external to the Company or third parties in order to obtain results that are objective and accountable and free from elements of personal interest. If deemed necessary, the Company can also select candidates who will manage the WBS. Candidates who pass this selection are then submitted to the Board of Commissioners and Directors for approval.

The qualifications that a WBS Officer must have are as follows:

1. Have high integrity;
2. Have the ability to conduct an investigation;
3. Have high analytical ability;
4. Have the ability to make sound judgments;
5. Objective;

6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
7. Memiliki kemampuan melaksanakan WBS dengan baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris ABM No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, Dewan Komisaris menunjuk Komite Audit untuk menjadi Tim Pengelola WBS Perusahaan dengan masa jabatan 2021-2024, yaitu terdiri dari:
Ketua : Manggi Taruna Habir
Anggota : Ferry D.J. Alis
Anggota : Agus Yulianto

6. Have good communication skills; and
7. Have the ability to carry out the WBS properly.

Based on Boar of Commissioners Decree No. 029/ABM-BOC-CIR/VI/2021 dated 9 June 2021, the Board of Commissioners appointed an Audit Committee to become the Company's WBS Management Team with a term of office 2021-2024, consisting of:
Chairman : Manggi Taruna Habir
Member : Ferry D.J. Alis
Member : Agus Yulianto

Perlindungan Terhadap Pelapor

Perusahaan memiliki komitmen yang jelas dan tidak memihak untuk mendukung dan melindungi semua pelapor yang menginformasikan kejadian pelanggaran yang terjadi di lingkungan Grup ABM. Namun demikian, perlindungan ini hanya diberikan kepada pelapor yang beritikad baik dan tidak berlaku bagi Pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Oleh karena itu, Perusahaan akan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelapor pelanggaran yang terbukti melakukan fitnah atau laporan palsu untuk mencegah adanya penyalahgunaan WBS.

Perusahaan memberikan perlindungan tidak hanya bagi pelapor namun juga keluarga pelapor dari ancaman fisik dan psikis, seperti:
1. Pemecatan yang tidak adil dan tidak beralasan;
2. Penurunan jabatan atau pangkat yang tidak beralasan;
3. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
4. Catatan yang merugikan dalam file Perusahaan yang menyangkut data pribadi pelapor (*personal file record*); serta
5. Tekanan atau ancaman dari pihak terlapor dengan memberikan jalur komunikasi tanpa bertatap muka dengan terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan pelanggaran.

Terkait dengan perlindungan terhadap pelapor tersebut, Perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang berwenang dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Pelapor dan Saksi.

Protection to Whistleblower

The Company has a clear and impartial commitment to support and protect all whistleblowers who report violations that occur within the ABM Group. However, this protection is only given to whistleblowers who have good intentions and does not apply to whistleblowers who are proven to have made false reports and/or slander. Therefore, the Company will provide sanctions or punishments for whistleblowers who are proven to have committed slander or false reports to prevent misuse of the WBS.

The Company provides protection not only for the reporter but also the reporter's family from physical and psychological threats, such as:
1. Unfair and unreasonable dismissal;
2. Unreasonable demotion;
3. Harassment or discriminative acts in all forms;
4. Putting adverse information to the personal file record of the whistleblower; and
5. Accepting pressures or threats from the reported party through a communication yet without meeting in person, at every stage of investigation of the violations.

Regarding the protection of whistleblowers, the Company can cooperate with authorized government institutions by referring to the laws and regulations concerning the Protection of Whistleblowers and Witnesses.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Melalui Saluran WBS
Mechanism for Handling Complaints Through the WBS Channel

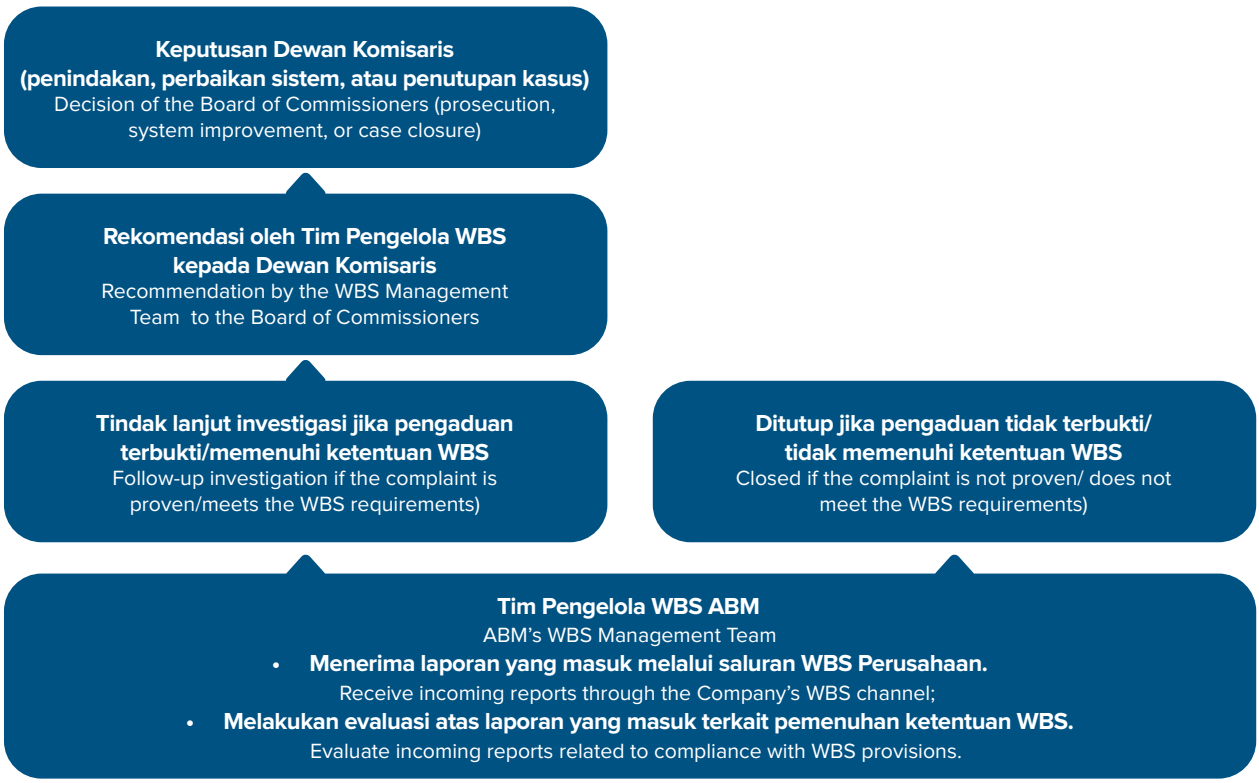

Tim Pengelola WBS mengambil langkah-langkah penanganan pengaduan yang meliputi:
1. Pencatatan atau registrasi atas laporan WBS yang masuk; serta
2. Evaluasi atas laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dan dibuat rekomendasi untuk dilakukan investigasi atau dinyatakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan WBS, untuk kemudian laporan ditutup. Jika ditindaklanjuti dengan investigasi, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan perkembangannya kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris kemudian menerbitkan Surat Keputusan yang berisikan penindakan, perbaikan sistem, atau penutupan kasus.

Penanganan pengaduan pelanggaran yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan juga diayur dalam kebijakan WBS, sebagai berikut:
1. Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai Ketua Komite Audit diajukan kepada Ketua Komite Audit.

2. Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit diajukan kepada Komisaris Utama.
3. Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisaris Utama disampaikan kepada Ketua Komite Audit.
4. Pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota komite baik yang merangkap sebagai anggota Direksi atau tidak diajukan melalui proses pelanggaran umum.
5. Pihak yang menerima laporan dugaan pelanggaran dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah hari kerja wajib menyerahkan laporan kepada Tim Pengelola WBS dan berdasarkan laporan tersebut, tim akan melakukan investigasi sendiri atau apabila perlu menunjuk pihak ketiga yang independen yang hasilnya wajib dilaporkan kepada Tim Pengelola WBS.
6. Tim Pengelola WBS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan investigasi wajib menerbitkan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menindaklanjuti hasil investigasi.
7. Setelah menerima rekomendasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, Dewan Komisaris wajib menerbitkan keputusan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterima. Keputusan yang dibuat sebagai berikut:
   a. Keputusan Dewan Komisaris untuk melakukan tindak lanjut/perbaikan sistem atas dugaan pelanggaran terbukti atau terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris. Keputusan Dewan Komisaris ini dapat berupa rekomendasi yang ditujukan kepada RUPS Perusahaan, atau diputuskan sendiri oleh Dewan Komisaris tanpa melibatkan anggota Dewan Komisaris yang dilaporkan;
   b. Keputusan Dewan Komisaris untuk melakukan tindak lanjut/perbaikan sistem atas dugaan pelanggaran terbukti atau terdapat potensi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yang bukan Anggota Dewan Komisaris, dilakukan sendiri oleh Dewan Komisaris; serta
   c. Keputusan Dewan Komisaris yang menutup kasus karena laporan tidak memenuhi ketentuan WBS atau hasil investigasi tidak membuktikan terjadinya pelanggaran.

8. Surat keputusan atas tindak lanjut/usulan perbaikan sistem wajib ditindaklanjuti paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan.

The WBS Management Team takes certain measures to handle complaints which include:
1. Registering the incoming WBS reports; and
2. Evaluating the incoming reports based on the evidence obtained and recommendations for investigation, or if declared incompliant with the WBS provisions, the report will not be followed up. If the report is followed up with an investigation, the WBS Management Team will submit the investigation process to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners then issues a Decree explaining the actions, system improvements, or case closures.

The WBS policy also encompasses the handling of complaints involving violations by the Company's Board of Commissioners and Directors, as follows:
1. A report on an allegation of violation by a member of the Board of Commissioners who does not concurrently serve as Chairman of the Audit Committee is submitted to the Chairman of the Audit Committee;
2. A report on an allegation of violation by a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as Chairman of the Audit Committee is submitted to the President Commissioner;
3. A report on an allegation of violation by the President Commissioner is submitted to the Chairman of the Audit Committee;
4. A report on an allegation of violation by a member of the committee either concurrently serving as a member of the Board of Directors or not is filed through a general whistleblowing process;
5. Parties who receive reports of alleged violations within a period of no later than 10 (ten) days after working days must submit a report to the WBS Management Team. Based on the report, the team will carry out its own investigation or if necessary, appoint an independent third party, whose results must be reported to the WBS Management Team;

6. The WBS Management Team within a period of no later than 7 (seven) working days after receiving the investigation report must issue a recommendation to the Board of Commissioners to follow up on the results of the investigation;
7. After receiving a recommendation no later than 10 (ten) working days, the Board of Commissioners must issue a decision to follow up on the recommendation. The decisions to be made are as follows:
   a. The Board of Commissioners' decision to follow up/improve the system for the alleged violations that are proven, or there are potential violations committed by members of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners can decide a recommendation to the GMS of the Company, or decide by itself without involving the reported member of the Board of Commissioners;
   b. The decision of the Board of Commissioners to follow up/improve the system for alleged violations that are proven, or potential violations committed by the reported member who is not a member of the Board of Commissioners, is made by the Board of Commissioners itself;
   c. The decision of the Board of Commissioners to close the case since the report does not meet the WBS requirements or the results of the investigation fail to prove any violation; and
8. The decision letter on the follow-up/suggestion for system improvement must be executed no later than 3 days from the effective date of the decision letter.

Jumlah Laporan WBS Tahun 2023 Serta Tindak Lanjutnya

Secara rinci informasi pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS dan tindak lanjutnya dapat dilihat di bawah ini.

The Number of WBS Reports In 2023 and the Follow-Ups

Detailed information on complaints submitted through the WBS mechanism and their follow-up actions is presented below.

Jumlah Pengaduan/Pelaporan dan Tindak Lanjutnya
Number of Complaints/Reports and Follow-up

Perihal Subject	2023	2022
Jumlah pengaduan yang masuk Number of incoming complaints	37	18
Jumlah pengaduan yang diproses Number of complaints processed	36	-
Jumlah pengaduan yang telah selesai diproses Number of completed complaints processed	36	16
Jumlah pengaduan yang belum selesai diproses Number of unfinished complaints processed	1	2

Jumlah pengaduan laporan pelanggaran yang diterima oleh Tim WBS selama tahun 2023 sebanyak 37 kasus, di mana sebanyak 36 kasus (97%) telah selesai ditindaklanjuti, dan 1 (satu) kasus (3%) masih dalam proses pemeriksaan.

The number of complaints of violation reports received by the WBS Team during 2023 was 37 cases, of which 36 cases (97%) have been followed up, and 1 (one) case (3%) is still in the process of examination.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 36 kegiatan audit khusus/dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaporan dugaan pelanggaran yang diterima. Proses audit ini bertujuan untuk mengungkap dugaan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam aktivitas operasional dilingkungan perusahaan, selanjutnya berdasarkan hasil dari proses audit terhadap 36 kasus tersebut, maka telah dilakukan proses tindak lanjut oleh manajemen Perusahaan dan manajemen entitas anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Throughout 2023, there were 36 special/specific audit activities carried out as a follow-up to the reporting of alleged violations received. This audit process aims to uncover alleged violations or fraud that occur in operational activities within the company. Afterwards, based on the results of the audit process of the 36 cases, the follow-up process has been carried out by the Company's management and the management of its subsidiaries in accordance with applicable regulations.



PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Implementation of Good Corporate Governance Guidelines for Public Companies



Penerapan GCG Perusahaan telah disesuaikan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015. Penerapan pedoman tersebut diuraikan sebagai berikut.

The Company's GCG implementation has been adjusted to the Guidelines for Public Company Governance as stipulated in the Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015. The implementation of these guidelines is described as follows.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham **Relationship of Public Company with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights**				
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Improving the Value of Implementation of General Meeting of Shareholders (GMS)			
	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting), baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan Pemegang Saham. The Public Company has a means or technical procedure for voting both open and closed voting mechanisms that uphold the independence and interest of shareholders.	√	Tata cara RUPS GMS Procedures	Tata cara RUPS memuat peraturan terkait pemungutan suara tertutup melalui kartu suara yang diberikan oleh Perusahaan kepada para pemegang saham. Informasi terkait tata cara tersebut tersedia pada situs web Perusahaan bagian Untuk Investor > RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). GMS implementation procedures guides us in closed voting process which uses voting cards distributed by the Company to shareholders. Information about the procedures is available on the Company's website on the section For Investors > GMS (General Meeting of Shareholders).

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual GMS.	√	Daftar Kehadiran di RUPS GMS Attendance Record	RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Informasi terkait daftar hadir yang sah tersedia pada situs web Perusahaan bagian Untuk Investor > RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). The Annual GMS held on May 10, 2023 was attended by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Information regarding the valid attendance list is available on the Company's website under For Investors > GMS (General Meeting of Shareholders).
	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka Summary of GMS minutes of the meeting is provided on the Public Company website	√	Situs *web* Website	Ringkasan risalah RUPS tersedia di situs web Perusahaan sejak tahun 2012. Informasi risalah RUPS tersedia pada situs web Perusahaan bagian Untuk Investor > RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). The summary of GMS minutes is available on the Company's website since 2012. GMS minutes information is available on the Company's website under For Investors > GMS (General Meeting of Shareholders).
2.	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Increasing the Quality of Communications between Public Company and Shareholders/Investors			
	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau investor The Public Company has a communications policy with the shareholders or investors.	√	Kebijakan Komunikasi Communication Policy	ABM memiliki kebijakan menyeluruh mengenai tata cara komunikasi internal dan eksternal bagi seluruh karyawan ABM yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. ABM-SOP-JKT-COM-01 tanggal 31 Maret 2016. Kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah disahkan secara terpisah melalui Surat Keputusan Direksi No. 002/ABM-RES-DIR/III/2017 di bulan Maret 2017. ABM has a comprehensive policy on internal and external communication procedures for all ABM employees as stated in Board of Directors Decree No. ABM-SOP-JKT-COM-01 dated March 31, 2016. The policy on communication with shareholders or investors has been separately approved through Board of Directors Decree No. 002/ABM-RES-DIR/III/2017 in March 2017.
	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau investor dalam situs web. The Public Company discloses its communications policy to the shareholders or investors on the website.	√	Situs *web* Website	Kebijakan komunikasi Perusahaan telah dipublikasikan pada situs web Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Informasi Pemegang Saham > Kebijakan ABM. The Company's communication policy is published on the Company's website under Our Commitment > Governance > Shareholder Information > ABM Policy.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris **Functions and Roles of the Board of Commissioners**				
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners			
	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of the number of members of the Board of Commissioners by taking into account the conditions of the Public Company.	√	Kebijakan *Board & Management* Board & Management Policy	Dalam Kebijakan *Board & Management,* ABM mengatur penentuan struktur anggota Dewan Komisaris berdasarkan besarnya kegiatan usaha, peraturan perundang-undangan, serta struktur kepemilikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur struktur anggota Dewan Komisaris di Grup ABM, sehingga semua anak perusahaan memiliki standar yang sama. Pada saat ini, Dewan Komisaris ABM terdiri dari Komisaris Utama, 1 (satu) anggota Komisaris dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kondisi kinerja ABM serta keahlian dan pengalaman sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi. In the Board & Management Policy, ABM regulates the determination of the structure of the Board of Commissioners based on the size of business activities, laws and regulations, and ownership structure. This policy aims to regulate the structure of the Board of Commissioners in the ABM Group, so that all subsidiaries have the same standards. Currently, ABM's Board of Commissioners consists of the President Commissioner, 1 (one) Commissioner and 2 (two) Independent Commissioners. The number of members of the Board of Commissioners is adjusted to ABM's performance conditions as well as expertise and experience so as to carry out the supervisory function of the Board of Directors.
	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of skills, knowledge and experience required.	√	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Kebijakan *Board & Management* Board of Commissioners and Directors Work Guidelines and Board & Management Policies	Sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris telah disesuaikan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi secara menyeluruh. Keberagaman pada komposisi Dewan Komisaris Perusahaan tersebut dapat dilihat pada profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. As stated in the Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors, the determination of the composition of members of the Board of Commissioners has been adjusted to the skills, knowledge and experience required to carry out the supervisory function of the Board of Directors as a whole. The diversity in the composition of the Company's Board of Commissioners can be seen in the profiles of each Board of Commissioners and Directors.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Improving the Quality of Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners			
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has a self-assessment policy to evaluate its performance.	√	Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Ketentuan mengenai penilaian sendiri (*self assessment*) tercantum dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disusun pada tahun 2016. Sejak tahun 2017, anggota Dewan Komisaris mengisi *self assessment* dan telah berjalan secara berkala setiap tahun hingga saat ini. Mekanisme *self assessment* Dewan Komisaris yang berlaku di Perusahaan memungkinkan setiap anggotanya menilai keterlibatan dan kontribusi anggota lainnya secara rahasia; menilai kesiapan, partisipasi, dan kolaborasi anggota lainnya; mengukur kemampuan unik anggota dan membandingkannya dengan kebutuhan yang ada di Dewan Komisaris; serta mengidentifikasi kekuatan, kontribusi, dan peluang pengembangan diri mereka masing-masing. *Self-assessment* Dewan Komisaris menggunakan metode kuesioner dan hasilnya akan dijadikan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan tata kelola sehingga mampu meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris. Telah tersedia formulir penilaian yang baku untuk diisi oleh anggota Dewan Komisaris, baik untuk mekanisme *self-assessment* maupun *peer assessment*. Provisions regarding self-assessment are contained in the Nomination and Remuneration Committee Charter prepared in 2016. Since 2017, members of the Board of Commissioners have completed the self-assessment and it has been running regularly every year until now. The Board of Commissioners self-assessment mechanism in place in the Company allows each member to confidentially assess the involvement and contribution of other members; assess the readiness, participation and collaboration of other members; measure the unique capabilities of members and compare them with the needs that exist in the Board of Commissioners; and identify their own strengths, contributions and development opportunities. The Board of Commissioners self-assessment uses a questionnaire method and the results will be used as input to make governance improvements so as to increase the effectiveness of the Board of Commissioners' performance. There is a standardized assessment form to be filled in by members of the Board of Commissioners, both for self-assessment and peer assessment mechanisms.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
	Kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to evaluate the Board of Commissioners' performance is disclosed in the annual report of the Public Company.	√	Laporan Tahunan Annual Report	Kebijakan tertulis terkait *self assessment* masih dalam tahap penyusunan. Written policy on self-assessment is still being prepared.
	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners should they be involved in a financial crime.	√	Pedoman Etika dan Perilaku, PedomanKerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan Anggaran Dasar Pasal 17 Code of Ethics and Conduct, Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines, and Article 17 of the Articles of Association	Kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris tercantum dalam Pedoman Komisaris dan Direksi dan Anggaran Dasar, sedangkan moralitas dan budaya beretika terkait kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku. Informasi terkait Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris, dan Anggaran Dasar tersedia pada situs web Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Perangkat- Perangkat GCG. The Board of Commissioners' resignation policy is set out in the Board of Commissioners and Board of Directors' Charter and Articles of Association, while morality and ethical culture related to financial crimes are set out in the Code of Ethics and Conduct. Information related to Ethics and Conduct, the Board of Commissioners Charter, and the Articles of Association are available on the Company's website under Our Commitment > Governance > GCG Tools.
	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the committee carrying out the Nomination & Remuneration function prepares the succession policy in the Board of Directors Nomination process.	√	Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi serta Kebijakan *Board & Management* Nomination and Remuneration Committee Charter and Board & Management Policy	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi diatur dalam Piagam Komite Nominasi & Remunerasi serta *Board & Management*. Rencana suksesi dibahas setiap tahun dan pelaksanaan suksesi dijalankan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan Nominasi dan Remunerasi serta Kebijakan *Board & Management* tersedia pada Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Komite Dewan Komisaris. The succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors is set out in the Nomination & Remuneration and Board & Management Committee Charters. The succession plan is discussed annually and the implementation of succession is carried out as needed. The Nomination and Remuneration Policy and Board & Management Policy are available in the Company's Our Commitment > Governance > Board of Commissioners Committee section.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of the Board of Directors				
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors			
	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka, serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of Board of Directors composition takes into account the Public Company's conditions and efficacy in decision-making.	√	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Kebijakan *Board & Management*. Board of Commissioners and Directors Charter and Board & Management Policy.	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Kebijakan *Board & Management* mengatur penentuan komposisi anggota Direksi berdasarkan besarnya kegiatan usaha, peraturan perundang-undangan, serta struktur kepemilikan. Kebijakan ini berlaku bagi Entitas Induk dan Entitas Anak sehingga memiliki standar yang sama. Saat ini, Direksi Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 2 (dua) orang Direktur. The Board of Commissioners and Board of Directors Charter and Board & Management Policy regulates the determination of the composition of the Board of Directors based on the size of business activities, laws and regulations, and ownership structure. This policy applies to the Parent Entity and Subsidiaries so that they have the same standards. Currently, the Company's Board of Directors consists of 3 (three) persons, namely 1 (one) President Director, and 2 (two) Directors.
	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of the composition of the Board of Directors takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.	√	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Kebijakan *Board & Management*. Board of Commissioners and Directors Charter and Board & Management Policy.	Penentuan anggota Direksi telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Direksi serta Kebijakan *Board & Management*. Komposisi anggota Direksi dipertimbangan berdasarkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan Perusahaan. Hal ini dapat terlihat keberagaman pada komposisi Direksi ABM yang berasal dari sektor keuangan, bisnis, industri sejenis, dan hukum. Informasi keberagaman tersebut telah diuraikan pada profil masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. The determination of the members of the Board of Directors is regulated in the Board of Commissioners & Directors Charter and the Board & Management Policy. The composition of the Board of Directors is based on the skills, knowledge and experience required to run the Company. This can be seen in the diversity of the composition of ABM's Board of Directors who come from the financial, business, similar industry and legal sectors. The diversity information has been described in the profile of each of the Board of Commissioners and Directors.
	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in accounting.	√	Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Work Guidelines for the Board of Commissioners and Directors.	Perusahaan memiliki seorang *Chief Financial Officer* (Hans Christian Manoe) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (Achmad Ananda Djajanegara). Keduanya memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang akuntansi yang dapat dilihat pada profil mereka. The Company has a Chief Financial Officer (Hans Christian Manoe) who reports directly to the President Director (Achmad Ananda Djajanegara). Both have expertise and knowledge in accounting which can be seen in their profiles.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Improving the Quality of Implementation of Board of Directors Duties and Responsibilities			
	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self- assessment)* untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has a selfassessment policy to evaluate its performance	√	Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee Charter	Ketentuan terkait penilaian sendiri (*self assessment*) kinerja Direksi tercantum dalam Piagam Komite Nominasi & Remunerasi yang disusun pada tahun 2015. Sejak tahun 2016, anggota Direksi telah mengisi *self assessment* dan telah berjalan secara berkala hingga saat ini. Jika hal tersebut terpenuhi, maka akan tercipta dinamika dalam rapat Direksi dan menciptakan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kepentingan organisasi sehingga akan tercapai kinerja yang lebih baik. Policy on self-assessment of the Board of Directors' performance is outlined in the Charter of Nomination & Remuneration Committee which was established in 2015. Since 2016, members of Board of Directors have filled in self-assessment, and it runs on gradual basis until today. If the policy is adhered to, then there will be dynamic situation in the meetings of Board of Directors and result in decisions that reflect the organization's interests in order to achieve higher performance.
				Mekanisme *self assessment* Direksi berlaku di ABM memungkinkan setiap anggotanya secara rahasia menilai keterlibatan dan kontribusi anggota lainnya; menilai kesiapan, partisipasi, dan kolaborasi anggota lainnya; mengukur kemampuan unik anggota dan membandingkannya dengan kebutuhan yang ada di Direksi; serta mengidentifikasi kekuatan, kontribusi, dan peluang pengembangan diri mereka masing- masing. *Self assessment* Direksi menggunakan metode kuesioner dan hasilnya akan dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola sehingga meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Telah tersedia formulir penilaian yang baku untuk diisi oleh anggota Direksi, baik untuk mekanisme *self assessment* maupun *peer assessment.* Hasil dari *self assessment* Direksi ditinjau oleh Dewan Komisaris, dan selanjutnya Dewan Komisaris akan memberikan tinjauan dan masukan untuk Direksi. Direksi akan menindaklanjuti tinjauan atau masukan dari Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Kebijakan tertulis yang mengatur *self assessment* masih dalam proses penyusunan. The BOD self-assessment mechanism in place at ABM allows each member to confidentially assess the involvement and contribution of other members; assess the readiness, participation and collaboration of other members; measure the unique capabilities of members and compare them with the needs of the BOD; and identify their own strengths, contributions and development opportunities. The self-assessment of the BOD uses a questionnaire method and the results will be used as input for governance improvements so as to increase the effectiveness of the BOD's performance. There is a standardized assessment form to be completed by members of the BOD, both for the self-assessment and peer assessment mechanisms. The results of the Board of Directors' self-assessment are reviewed by the Board of Commissioners, and subsequently the Board of Commissioners will provide review and input for the Board of Directors. The BOD will follow up on any review or input from the BOC to improve the effectiveness of the BOD's performance. The written policy governing self-assessment is still in the process of being drafted.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
	Kebijakan penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. The self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed in the Annual Report of the public company.	√	Laporan Tahunan Annual Report	Kebijakan tersebut telah diungkapkan pada pembahasan terkait Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di dalam Laporan Tahunan ini. Such policy has been revealed in the discusson about the Assessment of Performance of Board of Commissioners and Board of Directors in this Annual Report.
	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of a member of the Board of Directors if involved in a financial crime.	√	Pedoman Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta Anggaran Dasar Pasal 14 Code of Ethics and Conduct; Board of Commissioners and Board of Directors Work Guidelines; dan Article 14 of the Articles of Association.	Kebijakan pengunduran diri Direksi tercantum dalam Pedoman Komisaris dan Direksi serta Anggaran Dasar, sedangkan moralitas dan budaya beretika terkait kejahatan keuangan diatur dalam Pedoman Etika dan Perilaku. Informasi terkait Etika dan Perilaku, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar tersedia pada situs web Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Perangkat- Perangkat GCG. Resignation policy of Board of Directors is outlined in the Manual of Board of Commissioners and Board of Directors Articles of Association whereas morality and ethical culture regarding financial crime is regulated under Code of Ethics and Conduct. Information about Code of Ethics and Conduct, the Manual of Board of Commissioners and Board of Directors terkait Etika dan Perilaku, and Articles of Association is available on the Company's website on the section of Our Commitment > Governance >
Partisipasi Pemangku Kepentingan **Stakeholders' Participation**				
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan Improving Corporate Governance Aspect via Stakeholders' Participation			
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Company have a policy to prevent insider trading.	√	Pedoman Etika dan Perilaku Code of Ethics and Conduct	Kebijakan terkait *insider trading* tercantum dalam ketentuan Benturan Kepentingan yang dapat di akses pada situs web Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Audit Internal. The policy on insider trading is included in the regulation of Conflict of Interests accessible through the Company's website on the section of Out Commitment > Governance > Internal Audit.
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*. Public Company have anticorruption and anti-fraud policy.	√	Kebijakan Anti Suap & Anti Korupsi Anti Bribery & Anti Corruption Policy	Kebijakan terkait anti korupsi dan *anti-fraud* dapat di akses pada situs web Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola> Audit Internal. Anti corruption and anti fraud policies are accessible on the Company's website on the section of Our Commitment > Governance > Internal Audit.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. The Public Company has a policy regarding the selection and improvement of supplier or vendor capabilities.	√	Kebijakan Vendor *Relationship Management* dan Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Vendor Relationship Management Policy and Procurement for Goods and/or Services Policy	Kebijakan-kebijakan terkait pengadaan barang dan/atau jasa dan kebijakan *Vendor Relationship Management* telah dimiliki Perusahaan sejak tahun 2016. The Company since 2016 has established policies surrounding procurement of goods and/or services and Vendor Relationship Management policy.
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. The Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditors' rights.	√	Kebijakan Hak Kreditur Creditors Rights Policy	Pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pinjaman kepada kreditur. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memenuhi kebijakan tersebut, yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan tertulis mengenai pemenuhan hak-hak kreditur telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 002/ABM-RES-DIR/III/2017. The fulfilment of creditors' rights is used as the guidance for giving loans to cerditors. This is aimed to maintain and comply with the policy, which includes the factors to consider in making agreement, as well as follow-up in the fulfilment of obligation of the Public Company to creditors. A written policy about the fulfilment of creditors' rights is approve by the Board of Directors through a Board of Directors' Decree No. 002/ABM-RES-DIR/III/2017.
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. The Public Company has a whistleblowing system policy.	√	Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting Policy	Kebijakan terkait sistem *whistleblowing* telah dimuat pada situs web Perusahaan bagian Komitmen Kami > Tata Kelola > Audit Internal. Policy related to the whistleblowing system is available on the Company's website under the section of Our Commitments > Governance > Internal Audit.
	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Public Company have a policy of giving long-term initiatives to the Board of Directors and employees.	√	Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Violation Reporting Policy	Perusahaan telah memiliki skema kebijakan pemberian insentif jangka panjang Direksi dan karyawan sebagaimana telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 33/ABM-BOC-CIR/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017. Perusahaan juga memiliki indikator untuk mengukur keberhasilan jangka panjang, yang secara umum dikaitkan dengan pertumbuhan harga saham dan indikator lainnya yang ekuivalen. Indikator tersebut ditinjau sesuai dengan kebutuhan atau prioritas perusahaan. The Company has introduced the long-term incentive policy for Board of Directors and the employees as regulated in the Board of Commissioners' Decree No. 33/ABM-BOC-CIR/VIII/2017 dated August 22, 2017. The Company has established indicators to measure longterm success which is generally related to the stock price increase and other equivalent indicators. Those indicators are monitored according to the company's needs or priorities.

No.	Aspek/Prinsip/Rekomendasi Aspect/Principle/Recommendation	Status Status	Sarana Mechanism	Keterangan Remarks
Keterbukaan Informasi Information Disclosure				
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Enhancing Information Disclosure Implementation			
	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Public Company utilizes information technology more broadly than the website as a means to disclose information.	√	Aplikasi di Play Store dan i-Store Application on Play Store and i-Store	ABM telah memiliki kanal komunikasi mengenai informasi Perusahaan di Linkedin PT ABM Investama Tbk. ABM has established a channel of communication to disseminate information about the Company through PT ABM Investama Tbk's LinkedIn account.
	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali. The Public Company's annual report discloses the ultimate beneficiary of the ownership of its shares for at least 5% ownership as well as the disclosure on the ultimate beneficiary of the ownership of shares of the Public Company via the majority and controlling shareholders.	√	Situs *Web* Laporan Tahunan Website Annual Report	Perusahaan telah mengungkapkan pemilik manfaat pada situs web dan Laporan Tahunan bagian Informasi tentang Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali hingga Nama Pemilik Akhir bab Profil Perusahaan. The Company has disclosed the ultimate beneficiary on the website and in the Annual Report under the section of Information on Majority and Controlling Shareholders to the name of the ultimate beneficiary owner in the Company Profile chapter.

√ = Terpenuhi/fulfilled | x = Tidak Terpenuhi/not fulfilled

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD (ACGS)

Uniformity of Implementation of Corporate Governance to Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

ACGS merupakan *framework* penerapan GCG untuk praktik terbaik yang telah diakui oleh banyak Negara. Perusahaan memantau penerapan GCG dengan mengacu kepada *framework* ACGS sebagaimana disampaikan pada situs web korporasi ABM.

ACGS is a GCG implementation framework for best practices that has been recognized by many countries. The company monitors the implementation of GCG by referring to the ACGS framework as presented on the ABM corporate website.

INDEKS PUGKI

PUGKI Index

Berikut disampaikan Rekomendasi dan Panduan dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 dan penerapannya oleh Perusahaan.

The following are the Recommendations and Guidelines in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021 and their implementation by the Company.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
1	**Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris** **Role and Resposnibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners**				
	1.1 **Peran dan Tanggung Jawab Direksi** **Role and Responsibilities of the Board of Directors**				
	1.1.1		Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. Berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. Beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. Berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (*corporate resilience*) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors exercises its leadership role and strives to achieve the following governance outcomes: a. Competitive and focused on long-term performance; b. Ethical and responsible in conducting business; c. Positively contributing to society and the environment; and having the ability to survive and grow (corporate resilience).	√	
		1.1.1.1	Direksi mewujudkan standar etika bisnis yang tinggi dan memastikan pelaksanaan kode etik yang melahirkan budaya korporasi yang berintegritas. The Board of Directors embodies high standards of business ethics and ensures the implementation of a code of ethics that creates a corporate culture of integrity.	√	
		1.1.1.2	Direksi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa karyawan memahami tanggung jawab mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai korporasi dan standar etika bisnis yang tinggi. The Board of Directors fosters a corporate culture ensuring that employees understand their responsibility to behave consistently with corporate values and high standards of business ethics.	√	
		1.1.1.3	Direksi memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. Direksi mempunyai perencanaan strategis yang jelas dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi. The Board of Directors ensures the fulfillment of corporate social and environmental responsibilities. The Board of Directors has a clear strategic plan in implementing corporate social and environmental responsibility.	√	
		1.1.1.4	Direksi memastikan bahwa korporasi kuat secara finansial dan gesit secara operasional. The Board of Directors ensures that the corporation is financially strong and operationally agile.	√	
	1.1.2		Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors shall ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies, and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	√	
		1.1.2.1	Ketika mengembangkan strategi dan rencana, Direksi mempromosikan inovasi dan penggunaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan daya saing, menanggapi perhatian dan harapan pemangku kepentingan, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. When developing strategies and plans, the Board of Directors promotes innovation and the use of cutting-edge technologies to enhance competitiveness, respond to stakeholder concerns and expectations, and fulfill social and environmental responsibilities.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.1.2.2	Direksi memprioritaskan dan mengedepankan budaya korporasi yang mencakup inovasi dan menyertakan inovasi ke dalam strategi korporasi, perencanaan pengembangan operasional, dan pengawasan operasi. The Board of Directors prioritizes and promotes a corporate culture that encompasses innovation and incorporates innovation into corporate strategy, operational development planning, and operations supervision.	√	
		1.1.2.3	Direksi mendorong inovasi yang meningkatkan penciptaan nilai jangka panjang untuk bisnis dalam lingkungan yang berubah. Inovasi tersebut dapat mencakup merancang model bisnis, produk dan layanan yang inovatif, mempromosikan riset, meningkatkan proses produksi dan operasi, dan berkolaborasi dengan mitra. Directors promote innovation that enhances long-term value creation for the business in a changing environment. Such innovation may include designing innovative business models, products and services, promoting research, improving production and operation processes, and collaborating with partners.	√	
	1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements an appropriate and effective risk management and internal control system that is aligned with the vision, mission, goals, objectives and strategies of the corporation and complies with applicable laws and standards.		√	
	1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information concerning the corporation.		√	
		1.1.4.1	Direksi memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam persiapan dan pengungkapan informasi korporasi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang relevan yang diterbitkan lembaga yang bereputasi. Selain itu, Direksi juga memastikan ketersediaan sumber daya (termasuk karyawan) yang memadai. The Board of Directors ensures that each person involved in the preparation and disclosure of corporate information has the relevant knowledge, skills and experience, reflected among others by the relevant professional certification issued by a reputable institution. In addition, the Board of Directors also ensures the availability of adequate resources (including employees).	√	
		1.1.4.2	Ketika menyetujui pengungkapan informasi (termasuk untuk pengungkapan informasi keuangan berkala), Direksi mempertimbangkan semua faktor yang berikut ini: a. Hasil evaluasi ketepatan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal; b. Opini auditor eksternal atas laporan keuangan, pengamatan atas sistem pengendalian internal, dan pengamatan lainnya melalui sumber lain; c. Pendapat Komite Audit; d. Konsistensi dengan tujuan, strategi, dan kebijakan. When approving information disclosure (including for periodic financial information disclosure), the Board of Directors considers all of the following factors: a. The results of the evaluation of the appropriateness of the design and effectiveness of the implementation of the internal control system; b. The external auditor's opinion on the financial statements, observations on the internal control system, and other observations through other sources; c. Opinion of the Audit Committee; d. Consistency with objectives, strategies, and policies.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.1.4.3	Direksi menyampaikan laporan yang mengomentari Laporan Keuangan Triwulanan dan dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Keuangan Triwulanan sehingga bermanfaat bagi investor dan analis yang akan meninjau fundamental dan kinerja keuangan korporasi. The Board of Directors submits a report commenting on the Quarterly Financial Statements and is published together with the Quarterly Financial Statements so that it is useful for investors and analysts who will review the corporation's financial fundamentals and performance.	√	
	1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared accordingly.		√	
		1.1.5.1	Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan kerangka pelaporan yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas korporasi dan memenuhi standar nasional dan atau global. The sustainability report is prepared based on a reporting framework that is appropriate to the size and complexity of the corporation and meets national and or global standards.	√	
		1.1.5.2	Pelaporan keberlanjutan korporasi mencerminkan praktik korporasi yang mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan. Corporate sustainability reporting reflects corporate practices that support sustainable value creation.	√	
	1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi korporasi. The Board of Directors establishes a framework for corporate information technology (IT) governance that aligns with corporate business needs and priorities, drives business opportunities and performance, strengthens risk management, and supports corporate goals and strategies.		√	
		1.1.6.1	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki kebijakan alokasi sumber daya TI yang memastikan investasi dan alokasi sumber daya TI yang memadai dan optimal. The Board of Directors ensures that the corporation has an IT resource allocation policy that provides adequate and optimal investment and allocation of IT resources.	√	
		1.1.6.2	Direksi memastikan bahwa manajemen risiko korporasi mencakup manajemen risiko TI. The Board of Directors ensures that corporate risk management includes IT risk management.	√	
		1.1.6.3	Direksi memastikan korporasi memiliki kebijakan dan prosedur keamanan TI, termasuk perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data. The Board of Directors ensures that the corporation has IT security policies and procedures, including protection of data security and confidentiality.	√	
	1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.		√	
	1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Directors' Decree.		√	
	1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.		√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
1.2	**Penilaian Kinerja - Direksi dan Anggotanya** *Performance Assessment - Directors and Members*				
	1.2.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu Direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual Director.	√	
		1.2.1.1	Dewan Komisaris menetapkan kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) bagi Direksi untuk menilai kinerja Direksi. Hasil penilaian sendiri disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk dinilai dan bila diperlukan disesuaikan dengan penilaian Dewan Komisaris. The Board of Commissioners establishes a self-assessment policy for the Board of Directors to assess the performance of the Board of Directors. The results of the self-assessment are submitted to the Board of Commissioners for assessment and, if necessary, adjusted to the assessment of the Board of Commissioners.	√	
		1.2.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris berdasarkan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dan sebagai dasar penilaian akuntabilitas Direksi mengenai tingkat keberhasilan Korporasi dalam mencapai target-target kinerja. Tolak ukur yang terpilih dicantumkan ke dalam kontrak kesepakatan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris. The self-assessment policy or other assessment policy is based on specific, measurable, achievable, and relevant assessment benchmarks as determined by the Board of Commissioners based on the consideration of the Nomination and Remuneration Committee and as a basis for assessing the accountability of the Board of Directors regarding the level of success of the Corporation in achieving performance targets. The selected benchmarks are included in the employment agreement contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners.	√	
		1.2.1.3	Skema remunerasi yang berupa saham yang diberikan kepada Direktur, Komisaris, dan karyawan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham. Remuneration schemes in the form of shares granted to Directors, Commissioners and employees must be approved by shareholders.	√	
		1.2.1.4	Perpanjangan masa jabatan direktur didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of a Director's term of office is based on the results of a satisfactory performance evaluation of his or her contribution.	√	
	1.2.2		Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nomination and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	√	
		1.2.2.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa evaluasi kinerja Direktur Utama didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yang telah dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu. Kriteria atau evaluasi kinerja harus memberi insentif kepada Direktur Utama untuk menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian tujuan korporasi dan penciptaan nilai berkelanjutan. The Board of Commissioners ensures that the performance evaluation of the President Director is based on pre-determined criteria that have been communicated to him/her in advance. The criteria or performance evaluation should incentivize the President Director to perform his/her role in supporting the achievement of corporate objectives and sustainable value creation.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.2.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Direktur Utama. Dewan Komisaris atau Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi yang ditunjuk Dewan Komisaris mengkomunikasikan hasil (termasuk area pengembangan) evaluasi kinerja kepada Direktur Utama. With the consideration of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners conducts an annual performance evaluation of the President Director. The Board of Commissioners or the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee appointed by the Board of Commissioners conveys the results (including areas of development) of the performance evaluation to the President Director.	√	
		1.2.2.3	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi menyetujui kriteria evaluasi kinerja anggota Direksi lainnya. Dewan Komisaris memastikan Direktur Utama mengevaluasi kinerja anggota Direksi lainnya secara obyektif dan akurat berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. The Board of Commissioners with the consideration of the Nomination and Remuneration Committee approves the performance evaluation criteria of other members of the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the President Director evaluates the performance of other members of the Board of Directors objectively and accurately based on predetermined performance evaluation criteria.	√	
1.3	**Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** **Role and Responsibilities of the Board of Commissioners**				
	1.3.1		Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	√	
	1.3.2		Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	√	
	1.3.3		Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. Considering the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners suggests, and upon approval by the General Meeting of Shareholders (GMS), decides on the appointment and/or removal of Board of Directors and Board of Commissioners members. In making these proposals, the Board of Commissioners emphasizes diversity, non-discriminatory practices, and equal opportunities regardless of ethnicity, religion, race, class, or gender. Furthermore, the Board of Commissioners guarantees a formal and transparent nomination and election process for both Board of Directors and Board of Commissioners members.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	1.3.4		Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the nominating committee is responsible for drafting a succession policy in the nomination process for Board of Directors members. Annually, the Board of Commissioners evaluates reports on the execution of development and succession plans provided by the President Director.	√	
	1.3.5		**Dewan Komisaris:** mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereviu sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. **The Board of Commissioners:** The Board of Commissioners presents to the General Meeting of Shareholders (GMS), possibly preceded by a proposal from the Remuneration Committee, the remuneration amount for Board of Directors and Board of Commissioners members, aligning with sustainable corporate growth and the corporation's long-term interests, as well as those of the shareholders. The Board of Commissioners conducts periodic evaluations of the remuneration system for both the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	
	1.3.6		Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	√	
		1.3.6.1	Dewan Komisaris memastikan dilakukannya evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan governansi korporat baik secara mandiri maupun menggunakan konsultan eksternal independen. The Board of Commissioners ensures that regular evaluations are carried out on the implementation of corporate governance policies both independently and using independent external consultants.	√	
	1.3.7		Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	√	
		1.3.7.1	Dewan Komisaris memahami sifat dan ruang lingkup risiko utama korporasi, serta secara berkala meninjau dan menyetujui selera risiko (*risk appetite*) korporasi. The Board of Commissioners understands the nature and scope of the corporation's main risks, and periodically reviews and approves the corporation's risk appetite.	√	
		1.3.7.2	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa: a. penetapan dan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah konsisten dengan tujuan, sasaran, strategi, dan selera risiko (*risk appetite*) korporasi; b. kebijakan manajemen risiko dapat memberikan sinyal peringatan dini (*early warning signals*) atas risiko material; c. kebijakan manajemen risiko ditinjau secara berkala, misalnya setiap tahun. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that: a. establishing and implementing risk management policies is consistent with corporate goals, objectives, strategies and risk appetite; b. risk management policies can provide early warning signals for material risks; c. Risk management policies are reviewed periodically, for example every year.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.3.7.3	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan agar risiko utama teridentifikasi melalui pertimbangan faktor internal dan eksternal. The Board of Commissioners monitors and provides input so that main risks are identified through consideration of internal and external factors.	√	
		1.3.7.4	Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan untuk meyakinkan bahwa dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah dinilai, dan bahwa tersedia strategi dan rencana mitigasi risiko yang tepat. The Board of Commissioners monitors and provides input to ensure that the impact and likelihood of risks occurring have been assessed, and that appropriate risk mitigation strategies and plans are in place.	√	
		1.3.7.5	Dewan Komisaris secara teratur memantau efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal korporasi. The Board of Commissioners regularly monitors the effectiveness of risk management and the corporation's internal control system.	√	
	1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.		√	
		1.3.8.1	Sebelum menyetujui laporan keuangan, Dewan Komisaris menerima pernyataan dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan korporasi, bahwa menurut pendapat mereka, catatan keuangan entitas telah dikelola dengan baik dan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan menyajikan secara wajar tentang posisi dan kinerja keuangan korporasi dan bahwa pendapat mereka tersebut dibentuk berdasarkan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang didesain secara tepat dan diimplementasikan secara efektif. Before endorsing the financial report, the Board of Commissioners obtained a statement from the President Director and Finance Director of the corporation. In their view, the financial records of the entity have been adequately managed, and the financial report has been prepared in compliance with relevant accounting standards, accurately reflecting the corporation's financial status and performance. They further asserted that their opinion was based on a suitably designed and efficiently executed risk management and internal control system.	√	
	1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereviu dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners oversees, reviews, and sanctions the corporation's annual reports and sustainability reports to guarantee their accuracy and integrity. Additionally, they supervise the corporate disclosure and communication procedures.		√	
	1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.		√	
	1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.		√	
	1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, obyektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.		√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.3.12.1	Jika Komisaris Utama bukan Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris menunjuk Komisaris Independen atau Komisaris Independen yang senior (jika Komisaris Independen lebih dari satu orang) untuk menjalankan peran Komisaris Utama untuk tugas-tugas Komisaris Utama yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi. Kriteria dalam menunjuk Komisaris Independen senior yaitu: a. mampu menyampaikan pendapat/argumen secara konstruktif kepada Komisaris Utama; b. dibandingkan komisaris lainnya, memiliki pengetahuan lebih tentang korporasi, termasuk kinerja, pasar, dan pemangku kepentingannya; c. mampu memberikan pandangan/pemikiran yang berimbang terhadap isu dan perhatian dari pemegang saham mayoritas. If the President Commissioner is not an Independent Commissioner, the Board of Commissioners appoints either an Independent Commissioner or a senior Independent Commissioner (if there are multiple Independent Commissioners) to assume the duties of the President Commissioner, particularly those involving potential conflicts of interest with affiliated parties. The criteria for appointing a senior Independent Commissioner include: a. able to convey opinions/arguments constructively to the President Commissioner; b. compared to other commissioners, has more knowledge about the corporation, including its performance, market and stakeholders; c. able to provide balanced views/thoughts on the issues and concerns of the majority shareholder.	√	
		1.3.12.2	Dalam menjalankan peran sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris independen agar: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali; c. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan d. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. In carrying out their role as members of the Board of Commissioners, independent Commissioners must: a. Act in the best interests of the corporation; b. Monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders; c. Take independent account of the views of minority shareholders and other stakeholders; And d. Encourage dialogue between management, shareholders and other stakeholders.	√	
		1.3.12.3	Korporasi mengungkapkan alasan berakhirnya tugas komisaris independen yang terjadi sebelum masa jabatan berakhir. The corporation reveals the reasons for the expiration of the independent commissioner's duties which occurred before the term of office ended.	√	
	1.3.13		Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner functions as the coordinator of the Board of Commissioners, overseeing its operations to ensure optimal performance. Meanwhile, the Chief Commissioner cultivates an atmosphere of transparency and constructive communication, fostering the expression of diverse viewpoints. This involves organizing well-suited agendas for board meetings and guaranteeing ample time for thorough discussions on all agenda items. Furthermore, provisions should be made for the Board of Commissioners to convene with the Board of Directors and senior management.	√	
		1.3.13.1	Rincian tugas Komisaris Utama diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web korporasi. Details of the duties of the President Commissioner are disclosed in the annual report and corporate website.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.3.13.2	Komisaris Utama mengkoordinasi pembagian peran pengawasan di antara para anggota Dewan Komisaris, memimpin rapat Dewan Komisaris dan mewakili Dewan Komisaris dalam urusan dengan pihak luar Dewan Komisaris. The President Commissioner coordinates the distribution of supervisory roles among members of the Board of Commissioners, chairs meetings of the Board of Commissioners and represents the Board of Commissioners in matters with parties outside the Board of Commissioners.	√	
		1.3.13.3	Mantan Direktur Utama dan anggota Direksi yang terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris tidak dapat langsung ditetapkan sebagai Komisaris utama. Perlu ada masa jeda 2 (dua) tahun untuk dapat ditunjuk kembali sebagai Komisaris Utama. Jika Dewan Komisaris memutuskan bahwa mantan Direktur Utama/anggota Direksi perlu menjadi Komisaris utama, maka Dewan Komisaris memberikan alasan dan penjelasan dalam Laporan Tahunan. Former Presidents, Directors, and individuals from the Board of Directors who are elected as members of the Board of Commissioners must wait for a cooling-off period of 2 (two) years before being eligible for appointment as President Commissioner. Should the Board of Commissioners determine that a former President or Director is suitable for the role of President Commissioner, the decision must be accompanied by detailed justifications and explanations in the Annual Report.	√	
1.4	**Pembentukan Komite** **Establishment of Committee**				
	1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.		√	
		1.4.1.1	Untuk Komite yang tidak diwajibkan dalam aturan perundangan, jika tidak memiliki Komite, korporasi mengungkapkan fakta tersebut dan mengungkapkan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi Komite tersebut dilaksanakan Dewan Komisaris sebagaimana mestinya. In cases where Committees are not mandated by law, if such Committees are absent, the corporation publicly acknowledges this and provides insight into the methodologies employed to ensure that the Committee's functions are effectively fulfilled by the Board of Commissioners.	√	
	1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.		√	
		1.4.2.1	Komite memiliki piagam yang secara jelas menetapkan perannya dan memberikan kepadanya semua wewenang yang diperlukan untuk menjalankan perannya. Wewenang ini antara lain mencakup hak untuk memperoleh informasi, bertemu dengan pihak terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (dengan atau tanpa kehadiran manajemen), dan meminta nasihat dari konsultan/ahli eksternal independen jika komite menilai diperlukan. The Committee has a charter that clearly defines its role and provides it with all the authority necessary to carry out its role. This authority includes, among other things, the right to obtain information, meet with related parties in connection with the implementation of their duties (with or without the presence of management), and request advice from independent external consultants/experts if the committee deems it necessary.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	1.4.3		Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan obyektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luar biasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	√	
1.5	**Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya** **Performance Assessment - Board of Commissioners and Members**				
	1.5.1		Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara obyektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. The Board of Commissioners conducts an annual formal evaluation objectively to determine the effectiveness of the Board, its committees and each individual commissioner.	√	
		1.5.1.1	Dewan Komisaris dapat mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja sebagai Dewan secara keseluruhan. The Board of Commissioners may have a self-assessment policy to assess performance as a Board as a whole.	√	
		1.5.1.2	Kebijakan penilaian sendiri atau kebijakan penilaian lainnya didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan serta sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Komisaris. Self-assessment policies or other assessment policies are based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable and relevant and in accordance with those determined by the Board of Commissioners.	√	
		1.5.1.3	Perpanjangan masa jabatan Komisaris didasarkan pada hasil evaluasi kinerja yang memuaskan atas kontribusinya. The extension of the Commissioner's term of office is based on satisfactory performance evaluation results regarding his contribution.	√	
		1.5.1.4	Dewan Komisaris melibatkan konsultan eksternal independen secara berkala paling tidak sekali dalam masa jabatan, untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris yang objektif dan jujur. The Board of Commissioners regularly enlists the services of independent external consultants at least once during their tenure to conduct impartial and candid evaluations of the Board's performance, ensuring objectivity and transparency in the assessment process.	X	Hingga tahun 2023 ABM belum menggunakan jasa konsultan eksternal independen untuk memfasilitasi evaluasi kinerja Dewan Komisaris. Until 2023, ABM has not retained the services of an independent external consultant to facilitate the evaluation of the Board of Commissioners' performance.
1.6	**Benturan Kepentingan** **Conflict of Interest**				
	1.6.1		Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	√	
		1.6.1.1	Dewan Komisaris memastikan kebijakan dan pedoman yang jelas bagi anggota Direksi yang menjabat atau ingin menjabat sebagai direktur atau komisaris di korporasi lain. Kebijakan harus menetapkan penunjukan yang diizinkan dan jumlah korporasi yang diizinkan yang di dalamnya mereka dibolehkan untuk secara bersamaan menjabat sebagai direktur atau komisaris. The Board of Commissioners ensures clear policies and guidelines for members of the Board of Directors who serve or wish to serve as directors or commissioners in other corporations. The policy should specify the permitted appointments and the permitted number of corporations in which they are permitted to simultaneously serve as directors or commissioners.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	1.6.2		Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and manages potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	√	
		1.6.2.1	Dewan Komisaris memiliki prosedur untuk memastikan bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait (abstain) benturan kepentingan tersebut. The Board of Commissioners has procedures to ensure that members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who have a conflict of interest do not participate in decision making related to (abstain) the conflict of interest.	√	
		1.6.2.2	Setiap anggota Dewan Komisaris menginformasikan segera kepada Direksi dan Dewan Komisaris jika ada potensi benturan kepentingan, termasuk sebagai akibat dari kedudukannya sebagai konsultan atau pejabat di perusahaan pelanggan, pemasok, kreditur, atau *partner* bisnis lainnya. Each member of the Board of Commissioners immediately informs the Board of Directors and Board of Commissioners if there is a potential conflict of interest, including as a result of their position as a consultant or official in a customer company, supplier, creditor or other business partner.	√	
		1.6.2.3	Semua anggota Direksi mengungkapkan dengan segera potensi benturan kepentingannya kepada Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya serta tidak turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. All members of the Board of Directors immediately disclose potential conflicts of interest to the Board of Commissioners and other members of the Board of Directors and do not participate in decision making in cases where they have a conflict of interest.	√	
		1.6.2.4	Dalam laporannya, Dewan Komisaris menginformasikan kepada RUPS adanya benturan kepentingan material yang terjadi disertai perlakuannya. Benturan kepentingan material yang sifatnya tidak sekadar sementara waktu dapat berakibat pada penghentian jabatan sebagai anggota dewan. The Board of Commissioners conveyed to the General Meeting of Shareholders (GMS) the presence of a significant conflict of interest and outlined its handling. Any substantial and enduring conflict of interest may lead to the removal of a board member from office.	√	
1.7	**Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris** **Improving the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners**				
	1.7.1		Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		1.7.1.1	Direksi memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat menerima program pengenalan yang formal dan memadai serta semua informasi yang relevan dengan peran dan tanggung jawab mereka. The Board of Directors ensures that newly appointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners receive a formal and adequate induction program as well as all information relevant to their roles and responsibilities.	√	
		1.7.1.2	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara teratur menerima program pelatihan dan pengembangan pengetahuan yang relevan, memadai dan berkelanjutan. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive relevant, adequate and sustainable training and knowledge development programs.	√	
		1.7.1.3	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara regular menerima informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas mengenai perkembangan terakhir peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, kewajiban lain yang berlaku, faktor risiko, dan lingkungan bisnis korporasi Members of the Board of Directors and Board of Commissioners regularly receive accurate, timely and clear information regarding the latest developments in relevant laws and regulations and standards, other applicable obligations, risk factors and the corporate business environment.	√	
2	**Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** **Composition and Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners**				
	2.1 **Komposisi Direksi** **Composition of the Board of Directors**				
	2.1.1		Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	√	
	2.1.2		Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		2.1.2.1	Informasi tentang calon Direksi harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: a. identitas calon dan alasan pengangkatan; b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; c. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; e. lama masa jabatan; f. kehadiran dalam rapat Direksi (kecuali untuk Direktur baru); dan g. setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about prospective Directors must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the issuance date the GMS summons until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/or e-GMS, including: a. identity of the candidate and reasons for appointment; b. core competencies, qualifications, and professional background; c. current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/charitable organizations; d. factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; e. length of term of office; f. attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); and g. any share ownership in the corporation.	√	
		2.1.2.2	Komposisi Direksi dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi. The composition of the Board of Directors is structured to ensure that its collective makeup reflects a diverse range of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural backgrounds, and gender, thus enabling the Board to effectively fulfill its duties.	√	
		2.1.2.3	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi korporasi serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determining the number of members of the Board of Directors takes into account the condition of the corporation and effectiveness in decision making.	√	
		2.1.2.4	Setidaknya ada satu direktur yang memiliki pengalaman sebelumnya di sektor utama tempat korporasi beroperasi. There is at least one director who has previous experience in the main sector in which the corporation operates.	√	
		2.1.2.5	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, tercermin antara lain dari sertifikasi profesi yang diterbitkan asosiasi profesi akuntansi yang diakui pemerintah dan terdaftar sebagai anggota di asosiasi profesi tersebut. Members of the Board of Directors who are in charge of accounting or finance have expertise and/or knowledge in the field of accounting, as evident with professional certificates issued by government-recognized accounting professional associations and are registered as members of these professional associations.	√	
	2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.		√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		2.1.3.1	Korporasi melaporkan dalam Laporan Tahunan keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris saat ini, target komposisi yang terukur dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai target tersebut. Informasi harus mencakup referensi tentang bagaimana keberagaman dicapai melalui perencanaan suksesi yang tepat di Direksi dan Dewan Komisaris. In this Annual Report, the Corporation reports information regarding the current diversity of the Board of Directors and Board of Commissioners, measurable composition targets and the progress achieved in achieving these targets. Information should include references to how diversity is achieved through appropriate succession planning in the Board of Directors and Board of Commissioners.	√	
	2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.		√	
		2.1.4.1	Informasi tentang calon Komisaris harus diungkapkan dalam proses pemilihan/pemilihan kembali dan wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS serta dapat diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS, meliputi: a. identitas calon dan alasan pengangkatan; b. kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; c. jabatan saat ini di korporasi lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; d. faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; e. lama masa jabatan; f. kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dan komite (kecuali untuk Komisaris baru); dan g. setiap kepemilikan saham dalam korporasi. Information about prospective Commissioners must be disclosed in the election/re-election process and must be available from the issuance date of the GMS summons until the GMS is held and can be downloaded via the Public Company website and/or e-GMS, including: a. identity of the candidate and reasons for appointment; b. core competencies, qualifications, and professional background; c. current positions at other corporations, as well as key roles at non-profit/charitable organizations; d. factors affecting independence, including relationships with controlling shareholders; e. length of term of office; f. attendance at Board of Directors meetings (except for new Directors); and g. any share ownership in the corporation.	√	
		2.1.4.2	Jika Dewan Komisaris menggunakan konsultan eksternal independen dalam proses nominasi, maka informasi relevan mengenai konsultan eksternal independen diungkapkan di laporan tahunan, termasuk informasi mengenai independensi dan benturan kepentingan. Should the Board of Commissioners uses an independent external consultant in the nomination process, relevant information regarding the independent external consultant is disclosed in the annual report, including information regarding independence and conflicts of interest.	√	
	2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.		√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The formation of the Board of Commissioners must prioritize diversity to ensure that its members collectively possess a broad spectrum of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural backgrounds, and gender representation, aligning with the requirements necessary for the effective execution of the Board's duties.		√	
		2.1.6.1.	Setidaknya ada satu Komisaris memiliki pengalaman sebelumnya pengalaman di sektor utama tempat korporasi beroperasi. At least one Commissioner has previous experience in the main sector in which the corporation operates.	√	
		2.1.6.2.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi korporasi. Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into account the condition of the corporation.	√	
	2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran-peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enhance the Board of Commissioners' capacity to offer impartial guidance and oversight to the Board of Directors, particularly in roles susceptible to conflicts of interest, the Board of Commissioners includes an ample representation of Independent Commissioners. These Independent Commissioners serve limited terms and are required to disclose their tenure on the Board of Commissioners and their independence from a corporate standpoint.		√	
		2.1.7.1	Mantan Direktur Utama/anggota Direksi dapat masuk ke dalam Dewan Komisaris sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former President Directors/members of the Board of Directors can join the Board of Commissioners as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between these positions of at least 2 (two) years.	X	ABM belum memiliki kebijakan terkait hal tersebut. ABM does not yet have a policy regarding this matter.
		2.1.7.2	Mantan Komisaris Independen dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen hanya dalam kondisi luar biasa dan harus ada masa jeda antara jabatan tersebut setidaknya 2 (dua) tahun. Former Independent Commissioners can be reappointed as Independent Commissioners only in extraordinary circumstances and there must be a gap period between positions of at least 2 (two) years.	X	ABM belum memiliki kebijakan terkait hal tersebut. ABM does not yet have a policy regarding this matter.
		2.1.7.3	Masa jabatan Komisaris Independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (sembilan) tahun. Bagi korporasi dengan masa jabatan 5 (lima) tahun maka tidak boleh melebihi batas waktu 10 (sepuluh) tahun. Setelah sembilan/sepuluh tahun, seorang Komisaris Independen dapat terus menjabat hanya sebagai Komisaris. The term of office of an Independent Commissioner may not exceed the time limit of 9 (nine) years. For corporations with a term of office of 5 (five) years, the term of office may not exceed 10 (ten) years. After nine/ten years, an Independent Commissioner may continue to serve only as Commissioner.	X	Komisaris Independen, Arief Tarunakarya Surowidjojo menjabat sejak RUPS tahun 2015. Hingga tahun 2023 masa jabatan beliau belum mencapai 9 tahun dan/atau 10 tahun. Sedangkan Manggi Taruna Habir baru menjabat sejak RUPS tahun 2021. Independent Commissioner, Arief Tarunakarya Surowidjojo has served since the 2015 GMS. Until 2023, his term of office has not reached 9 years and/or 10 years. Meanwhile, Manggi Taruna Habir has only served since the 2021 GMS.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	2.1.8.		Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to enhance investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and promotion of members of the Board of Directors and Board of Commissioners	√	
		2.1.8.1	Tanggung jawab dan peran Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk namun tidak terbatas pada: a. menyusun pedoman untuk memastikan bahwa semua Komisaris mengalokasikan waktu yang cukup kepada korporasi agar dapat menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Pedoman tersebut mencakup diantaranya: b. Dalam penunjukan komisaris utama, Komite Nominasi dan Remunerasi menyiapkan uraian spesifikasi pekerjaan, termasuk persyaratan komitmen waktu yang juga mempertimbangkan kebutuhan komitmen waktu pada saat krisis. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Perubahan komitmen harus segera dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan dampaknya dijelaskan dalam laporan tahunan berikutnya; c. Dalam penunjukan anggota komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan syarat dan ketentuan penunjukan anggota komisaris. Syarat dan ketentuan ini tersedia untuk dilakukan pemeriksaan. Komitmen waktu yang diharapkan dicantumkan dalam Surat penunjukan anggota Komisaris dan anggota Komisaris harus memiliki waktu yang cukup untuk memenuhi komitmen waktu yang diharapkan. Adanya komitmen signifikan lainnya di luar korporasi harus diungkapkan kepada Dewan Komisaris sebelum penunjukan, beserta indikasi komitmen waktu yang diperlukan dan Dewan Komisaris harus diberitahu jika terdapat perubahan atas komitmen tersebut; d. secara proaktif memimpin dan bertanggung jawab atas pengembangan, implementasi, dan reviu berkelanjutan atas perencanaan suksesi Direksi dan Dewan Komisaris; e. menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; f. mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen nominasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
			The responsibilities and roles of the Nomination and Remuneration Committee include but are not limited to: g. develop guidelines to ensure that all Commissioners allocate sufficient time to the corporation to carry out their responsibilities effectively. These guidelines include: h. In appointing the main commissioner, the Nomination and Remuneration Committee prepares a description of the job specifications, including time commitment requirements which also takes into account the need for time commitment in times of crisis. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment and disclosed in the annual report. Changes in commitments must be immediately reported to the Board of Commissioners and their impacts explained in the next annual report; i. In appointing commissioners, the Nomination and Remuneration Committee determines the terms and conditions for appointing commissioners. These terms and conditions are available for inspection. The expected time commitment is stated in the Letter of appointment of Commissioners and Commissioners must have sufficient time to fulfill the expected time commitment. Any other significant commitments outside the corporation must be disclosed to the Board of Commissioners prior to appointment, along with an indication of the time commitment required and the Board of Commissioners must be notified if there are any changes to these commitments; j. proactively lead and be responsible for the development, implementation and ongoing review of succession planning for the Board of Directors and Board of Commissioners; k. uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties; l. consider and be responsible for appointing nominated independent consultants, including the selection and requirements for their assignment, as well as disclosing the identity and costs of consulting services.		
2.2	**Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris** **Remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners**				
	2.2.1	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.		X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.
		2.2.1.1.	Kebijakan remunerasi bersifat wajar dan adil, baik dalam struktur maupun besaran, dan ditentukan dalam konteks nilai-nilai korporasi, struktur penghargaan internal, dan mendorong kompetisi dengan tetap peka terhadap harapan pemangku kepentingan dan norma masyarakat. Remuneration policies are reasonable and fair, both in structure and amount, and are determined in the context of corporate values, internal reward structures, and encourage competition while remaining sensitive to stakeholder expectations and community norms.	X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.
		2.2.1.2.	Korporasi memiliki kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berbasis kinerja dan selaras dengan pencapaian kepentingan jangka panjang korporasi, seperti ukuran kinerja sebagai berikut: opsi kepemilikan saham, bonus yang ditangguhkan, provisi pengembalian sebagian atau seluruh bonus/insentif yang telah dibayar (*clawback*). The corporation has a remuneration policy for members of the Board of Directors that is performance-based and in line with the achievement of the corporation's long-term interests, such as the following performance measures: share ownership options, deferred bonuses, provisions for the return of part or all of the bonuses/incentives that have been paid (clawback).	X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		2.2.1.3.	Direksi tidak menerima fasilitas lain di luar fasilitas yang sudah diberikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham korporasi. The Board of Directors does not receive other facilities apart from the facilities already provided at the corporation's General Meeting of Shareholders.	√	
	2.2.2	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Disamping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The compensation policy for Board of Commissioners members is designed to foster sustainable corporate growth and incentivize the attainment of long-term objectives. The remuneration proposed by the Board to the General Meeting of Shareholders (GMS) is determined by assessing each member's role, economic conditions, and corporate performance. Additionally, factors such as their position as President Commissioner, committee memberships, and chairmanship are taken into account.		X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.
		2.2.2.1	Remunerasi Dewan Komisaris harus berupa remunerasi tetap. Jika anggota Dewan Komisaris diberi remunerasi terkait kinerja maka dasar pemberian harus terkait dengan pengembangan jangka panjang korporasi dan berbeda dengan anggota Direksi. Board of Commissioners' remuneration should be fixed. In cases where performance-related compensation is provided, it must be tied to the long-term advancement of the corporation and distinct from the criteria used for Board of Directors' compensation.	X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.
		2.2.2.2	Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus. Independent Commissioners may not receive stock options, shares linked to performance, or bonuses.	X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.
	2.2.3	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. The Nomination and Remuneration Committee ensures that remuneration packages for directors and commissioners are determined impartially, considering their accomplishments, qualifications, and competencies, along with corporate operational performance, individual contributions, and market conditions. Transparent procedures are established to ensure fairness in determining remuneration policies for both the Board of Directors and the Board of Commissioners.		X	ABM belum memiliki kebijakan tersebut, namun penerapannya telah dilakukan. ABM does not yet have such a policy, but it has been implemented.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		2.2.3.1	Dalam menjalankan perannya Komite Nominasi dan Remunerasi: a. menentukan proporsi yang tepat dan seimbang antara komponen remunerasi yang tetap dan yang terkait kinerja, komponen remunerasi yang dibayar langsung atau yang ditangguhkan. Indikator kinerja, termasuk indikator non-keuangan, dipastikan relevan dan dirancang untuk mendukung pencapaian kinerja jangka panjang korporat. Insentif remunerasi dipastikan sesuai dengan kebijakan risiko korporasi. Selain itu, terdapat penetapan batas atas remunerasi dan batas atas tersebut diungkapkan di laporan tahunan; b. mempertimbangkan apakah direktur dan komisaris memenuhi syarat untuk memperoleh bonus tahunan dan/atau tunjangan dengan skema insentif jangka panjang; c. secara hati-hati mempertimbangkan kewajiban kompensasi (termasuk iuran pensiun dan semua komponen lainnya) yang menjadi hak Direktur/Komisaris jika diberhentikan lebih awal. Tujuannya adalah untuk menghindari pemberian penghargaan atas kinerja yang tidak baik; d. mempertimbangkan konsekuensi kewajiban pensiun dan manfaat jangka panjang lainnya bagi Direktur dan Komisaris bagi korporasi, termasuk dampak kenaikan imbalan kerja tersebut dan perubahan lainnya, terutama untuk Direktur dan Komisaris yang hampir pensiun; e. menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menangani benturan kepentingan (dan potensi benturan kepentingan) di antara anggota komite dalam pelaksanaan tugas Komite; f. mempertimbangkan dan bertanggung jawab dalam menunjuk konsultan independen remunerasi, termasuk pemilihan dan persyaratan dalam penugasannya, serta mengungkapkan identitas dan biaya jasa konsultansi. In carrying out its role the Nomination and Remuneration Committee: a. determine the appropriate and balanced proportion between fixed and performance-related remuneration components, remuneration components that are paid directly or that are deferred. Performance indicators, including non-financial indicators, are ensured to be relevant and designed to support the achievement of long-term corporate performance. Remuneration incentives are ensured in accordance with corporate risk policies. In addition, there is a determination of an upper limit on remuneration and this upper limit is disclosed in the annual report; b. consider whether directors and commissioners qualify for annual bonuses and/or allowances under long-term incentive schemes; c. carefully consider the compensation obligations (including pension contributions and all other components) that the Director/Commissioner is entitled to if dismissed early. The aim is to avoid rewarding poor performance; d. consider the consequences of pension obligations and other long-term benefits for Directors and Commissioners for the corporation, including the impact of increases in employee benefits and other changes, especially for Directors and Commissioners who are nearing retirement; e. uphold the principle of independence in handling conflicts of interest (and potential conflicts of interest) between committee members in carrying out the Committee's duties; f. consider and be responsible for appointing an independent consultant for remuneration, including the selection and requirements for assignment, as well as disclosing the identity and costs of consultancy services.	√	
3.	**Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris** **Work Relations between the Board of Directors and the Board of Commissioners**				
	3.1	**Sifat Hubungan Kerja** **Nature of Work Relations**			
		3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	3.1.2		Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	√	
	3.1.3		Sekretaris Korporasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The Corporate Secretary has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	√	
		3.1.3.1	Peran dan tanggung jawab Sekretaris Korporasi mencakup, namun tidak terbatas pada: a. Memastikan arus informasi yang baik antara Dewan Komisaris dengan komitenya dan antara Dewan Komisaris dengan Direksi; b. memantau perkembangan governansi korporat, termasuk memastikan piagam Dewan Komisaris, Direksi, dan komite dilaksanakan sepenuhnya, membantu serta memberikan advis kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam menerapkan praktik governansi korporat untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan; c. Mengelola semua keperluan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Direksi dengan Dewan Komisaris, komite yang dibentuk Dewan Komisaris, menghadiri dan mencatat risalah semua rapat dan memfasilitasi komunikasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris, termasuk memastikan bahwa pembahasan dan keputusan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dicatat secara akurat dalam risalah; d. Mengatur dan memfasilitasi orientasi Direktur/Komisaris/anggota komite baru dan pengembangan profesional Direktur/Komisaris/anggota komite; e. Mengelola aktivitas hubungan investor untuk menjaga dan meningkatkan komunikasi antara korporasi dengan pemegang saham/investor, baik lokal maupun asing. The roles and responsibilities of the Corporate Secretary include, but are not limited to: a. Ensure a good flow of information between the Board of Commissioners and its committees and between the Board of Commissioners and the Board of Directors; b. monitor the development of corporate governance, including ensuring that the charter of the Board of Commissioners, Directors and committees is fully implemented, assisting and providing advice to the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance practices to meet stakeholder expectations; c. Manage all meeting requirements of the Board of Commissioners, Board of Directors, Directors and Board of Commissioners, committees formed by the Board of Commissioners, attend and record minutes of all meetings and facilitate communication between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including ensuring that discussions and decisions at meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners are recorded accurately in treatise; d. Organize and facilitate the orientation of new Directors/ Commissioners/committee members and professional development of Directors/Commissioners/committee members; e. Manage investor relations activities to maintain and improve communication between corporations and shareholders/ investors, both local and foreign.	√	
		3.1.3.2	Setiap Direktur dan Komisaris dapat berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Korporat dan sebaliknya. Each Director and Commissioner can communicate directly with the Corporate Secretary and vice versa.	√	
		3.1.3.3	Dewan Komisaris memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Korporasi. The Board of Commissioners provides consideration to the Board of Directors in the appointment and dismissal of the Corporate Secretary.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
3.2	**Akses informasi Dewan Komsaris** **Information access of the Board of Commissioners**				
	3.2.1		Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai.Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	√	
		3.2.1.1	Dewan Komisaris memiliki proses yang memungkinkan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen, dapat memiliki akses ke Direksi dan manajemen senior terkait. The Board of Commissioners has a process that allows members of the Board of Commissioners, including Independent Commissioners, to have access to the Board of Directors and related senior management.	√	
		3.2.1.2	Direktur Utama atau Sekretaris Korporat segera menginformasikan kepada Dewan Komisaris tentang peristiwa besar yang material dan penting mengenai kondisi dan kinerja serta pengelolaan korporasi. Jika diperlukan, rapat Dewan Komisaris diadakan untuk membahas peristiwa tersebut. The President Director or Corporate Secretary immediately informs the Board of Commissioners about major material and important events regarding the condition, performance and management of the corporation. If necessary, a Board of Commissioners meeting is held to discuss the incident.	√	
		3.2.1.3	Di antara rapat Dewan, Dewan Komisaris berhubungan secara teratur dengan Direksi agar terus dapat terinformasikan perkembangan korporasi yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Between Board meetings, the Board of Commissioners communicates regularly with the Board of Directors to keep them informed of corporate developments that need the attention of the Board of Commissioners so that the Board of Commissioners can carry out their duties more effectively.	√	
3.3	**Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi** **Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation**				
	3.3.1		Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	√	
		3.3.1.1	Direksi dan Dewan Komisaris memahami struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap pengendalian atas korporasi, termasuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis keluarga sebagai pemegang saham pengendali, perjanjian antar pemegang saham, atau kebijakan grup bisnis dimana korporasi merupakan bagiannya. The Board of Directors and Board of Commissioners understand the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders, and consider the impact on control over the corporation, including written and unwritten family agreements as controlling shareholders, agreements between shareholders, or policies of the business group of which the corporation is a part.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		3.3.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa struktur kepemilikan pemegang saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi tidak mempengaruhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, (termasuk di antaranya dalam kaitannya dengan rencana suksesi Direksi) demi kepentingan terbaik korporasi. The Board of Directors and Board of Commissioners ensure that the shareholder ownership structure and relationships between corporate shareholders do not affect the implementation of the roles and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, (including in relation to the Directors' succession plan) in the best interests of the corporation.	√	
		3.3.1.3	Dewan Komisaris memantau dan Direksi memastikan bahwa informasi diungkapkan dengan benar ketika terdapat kondisi yang berdampak pada pengendalian atas korporasi. The Board of Commissioners monitors and the Board of Directors ensures that information is disclosed correctly when there are conditions that impact control over the corporation.	√	
4.	**Perilaku Etis dan bertanggung jawab** **Ethical and responsible behavior**				
	4.1	**Pedoman Etika dan Perilaku** **Code of Ethics and Conduct**			
	4.1.1		Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: a. Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; b. Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; c. Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. d. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; e. Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; f. Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; g. Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. h. Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. i. Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. j. Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. k. Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.		

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	4.1.1		This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: a. Act in the best interests of the corporation; b. Act honestly and with high standards of integrity; c. Be independent and act on complete information, in good faith, with due diligence and care. d. Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; e. Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; f. Not be involved or participate in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; g. Not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers. h. Not take advantage of his position or the opportunities generated by his position for personal gain. i. Avoid acts of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for oneself or for other people which creates a conflict of interest/providing benefits to third parties in violation of statutory regulations. j. Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. k. Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.	√	
	4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, antikorupsi, antikecurangan (*antifraud*), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi, antikecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other related standards.		√	
		4.1.2.1	Direksi mengembangkan dan menetapkan sistem yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti korupsi, penawaran atau penerimaan suap serta pembayaran atau bujukan-bujukan lainnya untuk melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis. The Board of Directors develops and establishes a system that can be used as an effort to prevent money laundering and terrorist financing, anti-corruption, offering or accepting bribes as well as payments or other inducements to commit acts that violate laws and regulations or are unethical.	√	
		4.1.2.2	Direksi mengkomunikasikan kebijakan anti pencucian uang, anti suap, dan antikorupsi dengan memberi pelatihan kepada staf serta berupaya memperluas upaya anti pencucian uang, anti suap dan antikorupsi kepada pemangku kepentingan. The Board of Directors communicates anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption policies by providing training to staff and making efforts to expand anti-money laundering, anti-bribery and anti-corruption efforts to stakeholders.	√	
		4.1.2.3	Setiap pelanggaran material terhadap kebijakan anti pencucian uang, anti suap, antikorupsi harus diinformasikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris. Any material violation of anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption policies must be informed to the Board of Directors and Board of Commissioners or the Board of Commissioners Committee.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		4.1.2.4	Direksi menetapkan dan meninjau secara teratur kebijakan yang transparan tentang keterlibatan politik, yang mencakup lobi dan donasi untuk tujuan politik atau kandidat jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa manfaat dan risiko dari pendekatan yang diambil dipahami, dipantau, dan ditinjau secara teratur oleh Dewan Komisaris. The Board of Directors establishes and regularly reviews a transparent policy on political engagement, which includes lobbying and donations to political causes or candidates if permitted by law, and ensures that the benefits and risks of the approach taken are understood, monitored and regularly reviewed by Board of Commissioners.	√	
4.2	**Nilai-nilai dan Budaya Organisasi** **Organization Value and Culture**				
	4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values		√	
		4.2.1.1	Korporasi menumbuhkan budaya korporasi yang memastikan bahwa seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta seluruh karyawannya memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman etika dan perilaku The corporation fosters a corporate culture that ensures that all members of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all employees understand and are committed to carrying out their responsibilities to behave in accordance with ethical and behavioral guidelines.	√	
		4.2.1.2	Terdapat pelatihan dan sosialisasi yang memadai di level Direksi dan Dewan Komisaris serta seluruh karyawan korporasi yang disebutkan di atas untuk semua aspek yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan etika korporasi. There is adequate training and outreach at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as all corporate employees mentioned above for all aspects related to corporate culture, values and ethics.	√	
		4.2.1.3	Terdapat penilaian dan program pemantauan agar seluruh Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan korporasi memahami kode etik yang relevan dan menerapkannya secara efektif untuk menghindari keterlibatan korporasi dalam perilaku yang tidak tepat. A comprehensive assessment and monitoring program is established to ensure that all directors, members of the Board of Commissioners, and corporate employees comprehend the relevant code of ethics and implement it effectively. This initiative aims to prevent corporate engagement in inappropriate behavior.	√	
4.3	**Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya** **Communication and Enforcement of Ethics, Values and Culture Guidelines**				
	4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are disseminated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.		√	
		4.3.1.1	Korporasi memiliki pedoman pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan untuk mendorong dilaporkannya perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak etis, yang di dalamnya mencakup juga suatu pedoman tentang bagaimana korporasi melindungi pelapor yang beritikad baik. The Corporation have violation reporting guidelines that can be used to encourage reporting of behavior that violates laws and regulations or is unethical, which also includes a guideline on how the corporation protects whistleblowers who have good intentions.	√	
		4.3.1.2	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan komite segera diberitahu jika terdapat pelanggaran material pedoman etika dan perilaku. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and committees are immediately notified if there is a material violation of ethical and behavioral guidelines.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		4.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Komite segera diberitahu jika terdapat insiden material yang dilaporkan berdasarkan kebijakan pelaporan pelanggaran. The Corporation ensures that the Board of Commissioners and Committees are immediately notified if any material incidents are reported based on the violation reporting policy.	√	
		4.3.1.4	Direksi memastikan bahwa pelanggaran pedoman mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk pemecatan Jika terdapat pelanggaran, Direksi wajib mengambil tindakan preventif agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. The Board of Directors ensures that violations of the guidelines result in disciplinary action, including dismissal. If there is a violation, the Board of Directors is obliged to take preventive action so that the violation does not happen again.	√	
5.	**Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan** **Risk Management, Internal Control and Compliance**				
	5.1	**Pengendalian Internal dan Kepatuhan** **Internal and Compliance Control**			
	5.1.1		Direksi melakukan reviu secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil reviu kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	√	
		5.1.1.1	Reviu berkala yang dilakukan oleh Direksi secara khusus mempertimbangkan: a. Adanya perubahan sejak reviu berkala terakhir tentang sifat dan ruang lingkup risiko signifikan dan kemampuan korporasi dalam merespons perubahan bisnis dan lingkungan eksternalnya; b. Ruang lingkup dan mutu pemantauan yang sedang berjalan atas risiko dan sistem pengendalian internal, peran fungsi audit internal dan penyedia jasa asurans lainnya; c. Cakupan dan frekuensi komunikasi hasil pemantauan di atas kepada Dewan Komisaris (atau kepada Komite Audit) yang memampukan Dewan Komisaris untuk menilai secara menyeluruh tentang kondisi pengendalian internal dan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko; d. Terjadinya kegagalan atau defisiensi dalam pengendalian internal yang ditemukan dalam periode yang direviu dan luasnya dampak kontinjensi yang telah, dapat, atau mungkin terjadi di masa depan, yang berdampak material atas kondisi atau kinerja keuangan korporasi; dan e. Efektivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Periodic reviews carried out by the Board of Directors specifically consider: a. Changes since the last periodic review regarding the nature and scope of significant risks and the corporation's ability to respond to changes in its business and external environment; b. The scope and quality of ongoing monitoring of risks and internal control systems, the role of the internal audit function and other assurance service providers; c. The scope and frequency of communication of the above monitoring results to the Board of Commissioners (or to the Audit Committee) which enables the Board of Commissioners to comprehensively assess the condition of internal control and its effectiveness in risk management; d. The occurrence of failures or deficiencies in internal control discovered in the period reviewed and the extent of contingent impacts that have, can, or may occur in the future, which have a material impact on the corporation's financial condition or performance; And e. Effectiveness of internal controls relating to financial reporting and compliance with applicable laws and regulations.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		5.1.1.2.	Direksi memastikan bahwa korporasi memiliki sebuah fungsi yang berperan untuk senantiasa mengikuti perubahan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan usahanya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya, serta memiliki sistem untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal korporasi. The Board of Directors ensures that the corporation has a function and role to always follow changes in various applicable laws and regulations related to its business and laws and regulations in general, as well as have a system to ensure corporate compliance with applicable laws and regulations of internal corporation.	√	
5.2	**Manajemen Risiko** **Risk Management**				
	5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.		√	
		5.2.1.1	Direksi memimpin penerapan manajemen risiko untuk dimanfaatkan oleh seluruh jajaran manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai bagi korporasi, dengan memberi contoh dan menjadi teladan dalam hal pengendalian dan pengelolaan risiko dalam aktivitas bisnis dan operasional guna menanamkan, memperkuat, dan mengembangkan budaya sadar risiko yang berlandaskan pada kepatuhan dan pengendalian internal yang efektif. The Board of Directors leads the implementation of risk management to be utilized by all levels of management in creating and protecting value for the corporation, by setting an example and being a role model in terms of controlling and managing risks in business and operational activities in order to instill, strengthen and develop a risk-aware culture that is based on compliance. and effective internal control.	√	
		5.2.1.2	Direksi mengungkapkan: risiko-risiko utama yang dihadapi korporasi serta pengelolaannya; dan apakah terdapat eksposur material atas risiko lingkungan atau sosial dan, jika ya, bagaimana mengelola atau intensi dalam mengelola risiko tersebut. The Board of Directors reveals: main risks encountered by corporation and its management; and whether there is material exposure on environment or social risks and, if yes, how to manage or intention to handle the risks.	√	
		5.2.1.3	Direksi memastikan kesesuaian sistem pengendalian internal dan kerangka kerja manajemen risiko dengan karakteristik kebutuhan dan proses bisnis korporasi sehingga proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko terhadap seluruh jenis risiko yang dihadapi korporasi, termasuk di dalamnya komunikasi dan pelaporan tentang risiko, manajemen risiko, pemeriksaannya, serta efektivitasnya, dapat terlaksanakan secara efektif selaras dengan ekspektasi para pemangku kepentingan. The Board of Directors verifies the alignment of the internal control system and risk management framework with the unique requirements and business processes of the corporation. This ensures that internal control and risk management processes encompass all categories of risks encountered by the corporation. This includes effective communication and reporting on risks, conducting risk management activities, overseeing audits, and evaluating their effectiveness. These efforts are aimed at ensuring that these processes meet stakeholder expectations.	√	
		5.2.1.4	Direksi memastikan proses governansi risiko di Teknologi Informasi termasuk gangguan, keamanan *cyber*, pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa semua risiko utama diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. The Board of Directors ensures risk governance processes in Information Technology including disruption, cyber security, disaster recovery. This aims to ensure that all major risks are identified, managed and reported to the Board of Commissioners.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	5.2.2.		Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists in carrying out the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	√	
		5.2.2.1	Peran Komite Pemantau Manajemen Risiko termasuk diantaranya: a. memantau kinerja korporat terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memantau apakah korporasi beroperasi dalam selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; b. memantau pengendalian terhadap risiko-risiko utama, termasuk risiko utama pelaporan keuangan dan risiko kecurangan (*fraud risk*); c. mereviu setiap kejadian material yang melibatkan fraud atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko korporasi, serta pelajaran yang didapat untuk mencegah terulang di masa datang; d. menerima laporan dari auditor internal tentang hasil reviu atas kecukupan proses manajemen risiko korporasi; e. menerima laporan dari manajemen tentang sumber risiko baru dan yang muncul serta pengendalian risiko dan langkah-langkah mitigasi yang telah dilakukan Direksi untuk menangani risiko tersebut; f. menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan perubahan yang harus dilakukan pada kerangka manajemen risiko entitas atau selera risiko yang disetujui oleh Dewan Komisaris; dan g. mengawasi program asuransi korporasi, dengan memperhatikan bisnis korporat dan risiko yang dapat diasuransikan. The role of the Risk Management Monitoring Committee includes: a. monitoring corporate performance against the risk management framework, including monitoring whether the corporation operates within the risk appetite approved by the Board of Commissioners; b. monitoring control of key risks, including major financial reporting risks and fraud risks; c. reviewing any material incidents involving fraud or significant weaknesses in corporate risk control, as well as lessons learned to prevent recurrence in the future; d. receiving reports from internal auditors regarding the results of reviews of the adequacy of corporate risk management processes; e. receiving reports from management regarding new and emerging sources of risk as well as risk control and mitigation steps that have been carried out by the Board of Directors to handle these risks; f. preparing recommendations to the Board of Commissioners regarding changes that must be made to the entity's risk management framework or risk appetite as approved by the Board of Commissioners; and g. overseeing corporate insurance programs, taking into account corporate business and insurable risks.	√	
		5.2.2.2	Jumlah anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah memadai dan mayoritas independen; di antara anggotanya memiliki pengetahuan teknis yang diperlukan dan pemahaman yang memadai tentang industri tempat entitas beroperasi, untuk dapat melaksanakan mandat komite secara efektif. The number of members of the Risk Management Monitoring Committee is adequate and the majority are independent; several members have the necessary technical knowledge and sufficient understanding of the industry in which the entity operates, allowing them to carry out the committee's mandate effectively.	X	Dewan Komisaris ABM belum memiliki Komite Pemantau Manajemen Risiko. Namun demikian, Dewan Komisaris membentuk Komite Investasi dan Komite ESG yang berperan memantau risiko pada masing-masing bidang terkait. ABM's Board of Commissioners does not yet have a risk management monitoring committee. However, the Board of Commissioners has established an Investment Committee and an ESG Committee whose role is to monitor risks in each of the relevant areas.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
5.3.	**Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan** **Integration of Governance, Risk Management, and Compliance**				
	5.3.1		Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has developed an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	√	
		5.3.1.1	Direksi memastikan adanya koordinasi dan peningkatan kapabilitas di antara sistem utama GRC yang meliputi sistem governansi, manajemen strategi, manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen kepatuhan, dan sistem audit internal agar korporasi tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuannya. The Board of Directors ensures coordination and increased capability between the main GRC systems which include governance systems, strategic management, performance management, risk management, compliance management and internal audit systems so that the corporation remains on the right track in achieving its goals.	√	
	5.3.2		Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	√	
5.4.	**Audit Internal** **Internal Audit**				
	5.4.1		Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	√	
		5.4.1.1	Audit internal dilakukan secara objektif dan independen dari manajemen korporasi dan dari fungsi yang diauditnya. Dengan demikian, Audit Internal secara fungsional bertanggungjawab dan melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit, memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris dan dapat berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris dengan atau tanpa kehadiran Direksi. Internal audits are carried out objectively and independently from corporate management and from the function being audited. Thus, Internal Audit is functionally responsible and reports to the Board of Commissioners through the Audit Committee, has direct access to the Audit Committee and Board of Commissioners and can communicate and meet directly with the Audit Committee and Board of Commissioners with or without the presence of the Board of Directors.	√	
		5.4.1.2	Dewan Komisaris melalui komite audit memastikan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif. The Board of Commissioners, through the audit committee, ensures that the internal audit function has adequate authority, resources and access to information to carry out its role effectively.	√	
		5.4.1.3	Komite Audit merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentian Kepala Audit Internal, lingkup pekerjaan, dan anggaran untuk fungsi Audit Internal. The Audit Committee recommends to the Board of Commissioners the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit, scope of work, and budget for the Internal Audit function.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		5.4.1.4	Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern dan mengevaluasi kinerja Audit Internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Setiap tiga tahun sekali, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk konsultan eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja Audit Internal. The Audit Committee reviews the effectiveness of internal audit implementation and evaluates Internal Audit performance every year and submits the results to the Board of Commissioners. Every three years, taking into account the recommendations of the Audit Committee, the Board of Commissioners appoints an independent external consultant to review the performance of the Internal Audit.	√	
		5.4.1.5	Audit internal membuat rencana audit, yang melibatkan Direktur Utama, Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Audit. Rencana audit internal disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Internal audit creates an audit plan, involving the President Director, Board of Commissioners with consideration by the Audit Committee. The internal audit plan is submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners for approval.	√	
		5.4.1.6	Komite Audit memastikan pelaksanaan audit internal dilakukan berdasarkan standar profesional audit internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi kode etik profesi serta kode etik organisasi. The Audit Committee ensures that the implementation of internal audits is carried out based on applicable internal audit professional standards and by upholding the professional code of ethics and the organization's code of ethics.	√	
6.	**Pengungkapan dan Transparansi** **Disclosure and Transparency**				
	6.1 **Kebijakan Pengungkapan** **Disclosure Policy**				
		6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets	√	
		6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner relevant material information about the corporation must be fulfilled.	√	
		6.1.2.1	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan tertulis dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan secara terus-menerus/ keterbukaan informasi berdasarkan peraturan berlaku. The Corporation has and discloses written policies in carrying out continuous disclosure obligations/information disclosure based on applicable regulations.	√	
	6.2 **Laporan Keuangan dan Keberlanjutan** **Annual and Sustainability Report**				
		6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direviu oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		6.2.1.1	Pengungkapan sistem dan prosedur paling tidak mencakup: pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk laporan keuangan interim; peran fungsi manajemen risiko/kepatuhan/pengawasan manajemen dan fungsi audit internal dalam memastikan integritas laporan keuangan interim; peran Komite Audit dalam mereviu laporan keuangan interim yang akan dipublikasikan. Disclosure of systems and procedures includes at least: internal control over financial reporting, including interim financial reports; the role of the risk management/compliance/management oversight function and the internal audit function in ensuring the integrity of interim financial reports; the role of the Audit Committee in reviewing interim financial reports to be published.	√	
	6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include giving recommendation on the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.		√	
		6.2.2.1	Proses seleksi auditor eksternal yang melalui tender dilakukan secara transparan sehingga pemegang saham dapat mengamati dan memantau proses jika mereka menginginkannya. The external auditor selection process through tender is carried out transparently so that shareholders can observe and monitor the process if they wish.	√	
		6.2.2.2	Komite Audit memastikan bahwa dalam kontrak dengan auditor tidak terdapat klausula yang dapat mengganggu independensi atau kompetensi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan. The Audit Committee ensures that the contract with the auditor does not include clauses that could interfere with the auditor's independence or competence in carrying out the financial statement audit.	√	
		6.2.2.3	Komite Audit melakukan dialog yang memadai dengan auditor eksternal tanpa kehadiran manajemen dan memantau interaksi antara manajemen dan auditor eksternal, termasuk mereviu *management letter* yang diberikan oleh auditor eksternal dan mengawasi tanggapan manajemen; The Audit Committee carries out adequate dialogue with the external auditor without the presence of management and monitors interactions between management and the external auditor, including reviewing the management letter provided by the external auditor and monitoring management's response;	√	
		6.2.2.4	Dewan Komisaris, atau Komite Audit, memastikan agar auditor eksternal segera menginformasikan semua temuan dan masalah signifikan yang ditemukan auditor eksternal selama pelaksanaan audit. The Board of Commissioners, or Audit Committee, ensures that the external auditor immediately informs all significant findings and problems discovered by the external auditor during the audit.	√	
		6.2.2.5	Komite Audit mereviu setiap jasa nonaudit yang diberikan oleh auditor eksternal dan afiliasinya serta biaya terkait, untuk memastikan bahwa layanan tersebut tidak mengganggu independensi auditor. The Audit Committee reviews every non-audit service provided by the external auditor and its affiliates and related costs, to ensure that such services do not compromise the auditor's independence.	√	
	6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability report must be prepared and disclosed accurately and prepared in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.		√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		6.2.3.1	Laporan keberlanjutan diberikan asurans oleh pihak eksternal yang independen dan kompeten. Sustainability report is provided with assurance by independent and competent external parties.	√	
	6.2.4		Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perusahaan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has explained the Company's sustainability performance covering economic, social, environmental and governance aspects, which is presented in comparison for 3 years. The report is expected to help shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	√	
6.3	**Diseminasi Informasi** **Information Dissemination**				
	6.3.1		Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	√	
		6.3.1.1	Korporasi secara berkala mengadakan pertemuan dengan analis keuangan. Corporations regularly hold meetings with financial analysts.	√	
		6.3.1.2	Korporasi memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara efektif dan lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. The Corporation utilizes information technology effectively and more widely apart from websites as a medium for information disclosure.	√	
		6.3.1.3	Korporasi memastikan bahwa informasi yang disebarkan dijaga dan terproteksi keamanannya. The corporation ensures that the security of the information it disseminates is maintained and protected.	√	
	6.3.2		Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years.	√	
	6.3.3		Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal *cross listing*, kriteria dan prosedur *cross listing*, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan *listing* untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. Corporations listed on capital markets in jurisdictions other than their home jurisdiction must transparently disclose the applicable corporate governance laws and regulations. In cases of cross-listing, clear criteria and procedures for cross-listing, as well as for recognizing listing requirements for the primary listing, must be documented and transparent.	√	
7.	**Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham** **Protection from Shareholders' Rights**				
7.1	**Hak Pemegang Saham** **Shareholders' Rights**				
	7.1.1		Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor. The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		7.1.1.1	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, diperbolehkan untuk melakukan konsultasi satu dengan lainnya tentang isu mengenai hak-hak dasar pemegang saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Prinsip ini, namun hal ini tidak boleh disalahgunakan. Shareholders, including institutional shareholders, are permitted to consult with each other on issues regarding basic shareholder rights as stipulated in these Principles, but this must not be abused.	√	
		7.1.1.2	Korporasi mendorong adanya dialog konstruktif antara pemegang saham (terutama investor institusional) dengan manajemen. Korporasi menanggapi permintaan dari pemegang saham untuk terlibat dalam dialog untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai korporasi dalam jangka menengah hingga panjang. The Corporation encourage constructive dialogue between shareholders (especially institutional investors) and management. The Corporation responded to requests from shareholders to engage in dialogue to support sustainable growth and increase corporate value in the medium to long term.	√	
		7.1.1.3	Korporasi menyediakan wadah atau platform dialog konstruktif antara seluruh pemegang saham dengan manajemen. Corporations provide a forum or platform for constructive dialogue between all shareholders and management.	√	
		7.1.1.4	Korporasi segera mengungkapkan kepada publik semua fakta baru yang material yang tersedia bagi analis keuangan dan pihak lainnya yang serupa. The Corporation promptly discloses to the public all material new facts that are available to financial analysts and other similar parties.	√	
		7.1.1.5	Korporasi mengungkapkan kebijakan komunikasi korporasi dengan pemegang saham atau investor dalam situs web dan laporan. The corporation discloses corporate communication policies with shareholders or investors in websites and reports.	√	
	7.1.2		Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sepengendali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		7.1.2.1	Kerangka kerja dan kebijakan governansi korporat di entitas anak termasuk kebijakan tertulis antara lain mengenai: a. wewenang untuk menunjuk komisaris dan direktur. Umumnya, untuk entitas anak dengan ukuran relatif besar, Dewan Komisaris perlu dilibatkan dalam penunjukkan pengurus di entitas anak. Untuk entitas anak yang lebih kecil, Direksi yang berwenang melaksanakannya; b. efektivitas sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas informasi material entitas anak, termasuk informasi keuangan, transaksi dengan pihak berelasi dan informasi material lainnya. d. Jika korporasi memiliki/membentuk entitas berbadan hukum selain perseroan terbatas, korporasi memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas tersebut disesuaikan dengan konteks jenis badan hukumnya. Corporate governance framework and policies in subsidiaries include written policies regarding, including: a. authority to appoint Commissioners and Directors. Generally, the Board of Commissioners needs to be involved in appointing management in the relatively large-scale subsidiaries. For smaller subsidiaries, the Board of Directors has the authority to implement it; b. effectiveness of the internal control system and compliance with applicable laws and regulations; And c. timely and accurate disclosure of material information on subsidiaries, including financial information, transactions with related parties and other material information. d. If a corporation owns/forms a legal entity other than a limited liability company, the corporation ensures that its corporate governance policies apply to that entity according to the context of the type of legal entity.	√	
		7.1.2.2	Untuk investasi di entitas anak yang signifikan namun di bawah mayoritas (seperti kepemilikan antara 20 persen sampai 50 persen saham), Direksi memastikan bahwa terdapat perjanjian pemegang saham atau perjanjian lain yang memungkinkan korporasi memantau kinerja korporasi dan berpartisipasi dalam kepengurusan, termasuk untuk persetujuan transaksi dan keputusan yang signifikan. Hal ini diperlukan antara lain untuk memastikan bahwa korporasi memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu di entitas anak. For investments in subsidiaries that are substantial but fall below the majority ownership threshold (typically between 20 percent to 50 percent of shares), the Board of Directors ensures the existence of a shareholder agreement or similar arrangement. This agreement empowers the corporation to monitor corporate performance and actively participate in management activities, including the approval of significant transactions and decisions. Such measures are essential to ensure that the corporation receives sufficient, accurate, and timely information regarding its subsidiaries.	√	
	7.1.3		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. The corporation has rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	√	
		7.1.3.1	Korporasi secara jelas mengungkapkan aturan dan prosedur tersebut sehingga investor memahami hak-hak mereka dan hak untuk memperoleh kompensasi. The corporation clearly discloses these rules and procedures so that investors understand their rights and the right to obtain compensation.	√	
		7.1.3.2	Taktik yang mencegah pengambilalihan (*anti-take-over devices*) tidak boleh digunakan untuk melindungi manajemen dan Dewan Komisaris dari akuntabilitas. Tactics that prevent takeover (anti-takeover devices) must not be used to protect management and the Board of Commissioners from accountability.	X	ABM belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur hal tersebut. ABM does not have a specific policy governing this matter.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
7.2	**Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham** **Equal Treatment to Shareholders**				
	7.2.1		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara; b. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memeroleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The corporation has rules and procedures ensuring that: a. All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally; b. Disclosure of these rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	√	
		7.2.1.1	Untuk memastikan transparansi hak pemegang saham untuk memperoleh bagian dari laba, korporasi mengungkapkan kebijakan dividen yang terukur, misalnya target rasio pembayaran dividen/dividen per saham. To ensure transparency of shareholders' rights to obtain a share of profits, the corporation discloses measurable dividend policies, for example the target dividend payment ratio/dividends per share.	√	
		7.2.1.2	Para investor memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri maupun kelas saham sebelum mereka membelinya. Setiap perubahan dalam nilai ekonomi saham atau hak suara mendapat persetujuan dari kelas saham yang terdampak secara negatif. Investors obtain information about the rights attached to all series and classes of shares before they purchase them. Any change in the economic value of shares or voting rights requires the approval of the class of shares negatively affected.	√	
		7.2.1.3	Agar pemegang saham dapat mengetahui pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) korporasi dengan kepemilikan signifikan, korporasi mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham melalui pemegang saham utama dan pengendali serta pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% (lima persen). The corporation discloses information regarding the ultimate beneficial owner in share ownership, including details about the main controlling shareholders and any ultimate beneficial owner holding at least 5% (five percent) ownership stake. This disclosure enables shareholders to identify the ultimate beneficial owner(s) of the corporation, particularly those with significant ownership interests.	√	
		7.2.1.4	Korporasi mengungkapkan: a. perjanjian antar pemegang saham; b. *voting cap*; c. *multiple voting rights*; d. perikatan lain yang memungkinkan pemegang saham tertentu memiliki hak suara di atas kepemilikannya di korporasi. The corporation reveals: a. agreement between shareholders; b. voting cap; c. multiple voting rights; d. other agreements that allow certain shareholders to have voting rights over their ownership in the corporation.	X	ABM tidak memiliki mekanisme/prosedur tersebut. ABM does not have such mechanism/procedure.
		7.2.1.5	Korporasi menyediakan mekanisme/prosedur yang memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka sesuai dengan aturan perundangan berlaku dengan biaya yang wajar dan tanpa penundaan yang berlebihan. The corporation provides mechanisms/procedures that allow shareholders the opportunity to obtain effective redress for violations of their rights in accordance with applicable laws and regulations at a reasonable cost and without undue delay.	X	ABM belum memiliki mekanisme/prosedur tersebut. ABM does not have such mechanism/procedure.

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
	7.2.2		Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The corporation has rules and procedures that ensure related party transactions are approved and executed in a manner that ensures conflicts of interest are appropriately managed, and protects the interests of the corporation and its shareholders.	√	
		7.2.2.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur operasional baku bahwa transaksi dengan pihak berelasi dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa transaksi adalah adil dan wajar (*arm's length transaction*). The corporation has standard operating policies and procedures that transactions with related parties are conducted in such a way as to ensure that the transaction is fair and reasonable (arm's length transaction).	√	
		7.2.2.2	Transaksi pihak berelasi yang material, termasuk perjanjian jasa konsultasi dan jasa atau pekerjaan lainnya antara direktur/komisaris dan afiliasinya dengan korporasi harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan aturan perundangan berlaku. Selain yang sudah diatur persetujuannya dalam aturan perundangan, transaksi pihak berelasi yang material memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemberian persetujuan. Material transactions involving related parties, such as consulting agreements or services rendered by Directors/Commissioners and their affiliated entities, require approval in alignment with relevant laws and regulations. Beyond transactions stipulated for approval in legal frameworks, significant related party transactions must also be approved by the Board of Commissioners. Commissioners facing conflicts of interest abstain from participating in the approval process.	√	
		7.2.2.3	Korporasi memiliki kebijakan bahwa transaksi yang sudah pasti merugikan pemegang saham publik/minoritas dilarang. Contoh transaksi tersebut: Bantuan/subsidi keuangan kepada Direksi atau Komisaris pada tingkat bunga di bawah kewajaran; kalaupun ada pemberian pinjaman harus dilakukan pada tingkat bunga dan syarat wajar dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; Bantuan/subsidi keuangan kepada entitas selain entitas yang dimiliki sepenuhnya oleh korporasi. The corporation has a policy that prohibits transactions that inevitably harm public/minority shareholders. These transactions include: Financial assistance/subsidies to Directors or Commissioners at interest rates below fairness; even if there is a loan, it must be made at a reasonable interest rate and terms and approved by the Board of Commissioners; Financial assistance/subsidies to entities other than entities wholly owned by the corporation.	√	
		7.2.2.4	Dewan Komisaris mengungkapkan kebijakan proses untuk menyetujui, meninjau dan memantau transaksi pihak berelasi dan setiap konflik kepentingan yang melekat. The Board of Commissioners discloses the policy process for approving, reviewing and monitoring related party transactions and any inherent conflicts of interest.	√	
		7.2.2.5	Kesimpulan kajian Komite Audit atas transaksi pihak berelasi/benturan kepentingan yang signifikan diungkapkan dalam Laporan Tahunan korporasi. The conclusions of the Audit Committee's review of related party transactions/significant conflicts of interest are disclosed in the corporation's Annual Report.	√	
	7.2.3		Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar. The corporation has and discloses policies to prevent insider trading. The corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by directors, commissioners and insiders to ensure that no one may benefit directly or indirectly from information that is not/not yet available in the market.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
7.3	**Rapat Umum Pemegang Saham** **General Meeting of Shareholders**				
	7.3.1		Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi The corporation summons the GMS with the agenda and materials of the GMS as complete and early as possible (at least 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed through electronic means such as the corporation's website.	√	
		7.3.1.1	Dalam materi atas agenda RUPS, korporasi menyampaikan informasi relevan dan lengkap yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, termasuk penjelasan dan justifikasi (*rationale*) atas keputusan yang diusulkan untuk disetujui dalam RUPS. In the material on the agenda of the GMS, the corporation conveys relevant and complete information required for decision making, including explanation and justification (rationale) for the decision proposed to be approved in the GMS.	√	
	7.3.2		Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	√	
		7.3.2.1	Korporasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan kehadiran seluruh pemegang saham domestik maupun asing, termasuk investor institusi dalam RUPS. The corporation provides infrastructure that enables the presence of all domestic and foreign shareholders, including institutional investors, at the GMS.	√	
		7.3.2.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan. All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners attended the Annual GMS.	√	
		7.3.2.3	Ketua Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, serta komite lainnya siap memberikan tanggapan yang berarti atas pertanyaan yang ditujukan kepada mereka dalam RUPS. The Chairmen of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, as well as other committees are poised to provide meaningful responses to questions addressed to them at the GMS.	√	
		7.3.2.4	Pemegang saham memiliki kesempatan, dalam batas kewajaran, untuk: Mengajukan pertanyaan dalam RUPS, termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan hasil audit eksternal tahunan; Memasukkan suatu acara ke dalam agenda RUPS; dan Mengajukan usulan resolusi. Shareholders have the opportunity, within reasonable limits, to: Ask questions in the GMS, including questions relating to the results of the annual external audit; Include an item on the agenda of the GMS; and Submit a resolution proposal.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		7.3.2.5	Korporasi memiliki cara atau prosedur teknis pemungutan suara (*voting*) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham, yaitu: a. Lokasi RUPS yang mudah diakses sebagian besar pemegang saham; b. Pemungutan secara tertutup (*poll-voting*) dan bukan dengan mengacungkan tangan (*show of hands*); c. Memastikan tidak ada syarat dan prosedur RUPS yang menghambat pemegang saham untuk turut serta mengambil keputusan. The corporation has a technical voting method or procedure that emphasizes independence, and the interests of shareholders, namely: a. The location of the GMS is easily accessible to most shareholders; b. Poll-voting and show of hands; c. Ensuring that there are no GMS requirements and procedures that prevent shareholders from participating in making decisions.	√	
		7.3.2.6	Korporasi mengupayakan prosedur pemungutan suara secara elektronik serta mengambil langkah untuk membangun infrastruktur yang memungkinkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan infrastruktur yang telah tersedia di ekosistem dalam pemungutan suara. The corporation pursues electronic voting procedures and takes steps to build infrastructure that enables electronic voting or uses infrastructure already available in the ecosystem for voting.	√	
		7.3.2.7	Setiap pemungutan suara dalam RUPS hanya untuk satu keputusan, tidak ada penggabungan beberapa keputusan ke dalam resolusi yang sama (*bundling*). Each vote in the GMS is only for one resolution. There is no bundling of multiple resolutions into the same resolution.	√	
		7.3.2.8	Korporasi menunjuk pihak independen (pengawas/inspektur) untuk menghitung dan/atau mengesahkan suara dalam RUPS dan mengungkapkannya dalam risalah RUPS. The corporation appoints an independent party (supervisor/inspector) to count and/or certify the votes in the GMS and disclose them in the GMS minutes.	√	
		7.3.2.9	Jika resolusi yang disetujui oleh pemegang saham pengendali bertentangan dengan sebagian besar suara pemegang saham nonpengendali, maka pasca RUPS, korporasi mengungkapkan tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi hal yang menjadi perhatian pemegang saham nonpengendali yang menyebabkannya memberikan suara yang berbeda dari pemegang saham pengendali. If a resolution sanctioned by the controlling shareholders contradicts the majority votes cast by the non-controlling shareholders, the corporation, following the General Meeting of Shareholders (GMS), discloses the steps taken to comprehend and address the concerns of the non-controlling shareholders that led to their divergent voting pattern compared to the controlling shareholders.	√	
	7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.		√	
		7.3.3.1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan pemeriksaan yang mendalam atas kandidat Direktur dan Komisaris serta menyampaikan semua informasi relevan yang material mengenai kandidat kepada pemegang saham dalam proses pemilihan anggota dewan. Informasi yang diungkapkan termasuk informasi mengenai jabatan Direktur atau Komisaris di korporasi lain, dan apakah mereka dinilai independen dari sudut pandang korporasi. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee conducts in-depth examinations of Director and Commissioner candidates and discloses all material relevant information about the candidates to shareholders in the process of selecting board members. The information disclosed includes information regarding Directors' or Commissioners' positions in other corporations, and whether they are considered independent from a corporate perspective.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		7.3.3.2	Direktur dan Komisaris dicalonkan untuk pemilihan setidaknya sekali setiap tiga tahun atau lima tahun bagi korporasi yang peraturannya mengharuskan lima tahun. Akan lebih baik jika pencalonan dilakukan setiap setahun sekali. Directors and Commissioners are nominated for election at least once every three years or five years for corporations whose by-laws require five years. It would be preferable if nominations are made once every year.	√	
		7.3.3.3	Pemegang saham melakukan pemungutan suara terpisah untuk tiap-tiap kandidat Direktur dan Komisaris. Shareholders cast separate votes for each Director and Commissioner candidate.	√	
	7.3.4		Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of the external auditor at the GMS.	√	
		7.3.4.1	Dalam panggilan RUPS, korporasi mengidentifikasi dan menginformasikan calon auditor eksternal yang akan ditunjuk atau ditunjuk kembali dalam RUPS. In the GMS call, the corporation identifies and informs the external auditor candidate to be appointed or reappointed in the GMS.	√	
		7.3.4.2	Korporasi memastikan bahwa auditor eksternal menghadiri RUPS dan berkewajiban menjawab pertanyaan dari pemegang saham terkait dengan audit atas laporan keuangan. The corporation ensures that the external auditor attends the AGM and is obligated to answer questions from shareholders related to the audit of the financial statements.	√	
	7.3.5		Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. The submission of voting results and a complete summary of the GMS minutes are announced to the public on the next business day.	√	
		7.3.5.1	Risalah RUPS diinformasikan kepada pemegang saham selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS. The minutes of the GMS shall be informed to the shareholders no later than 30 working days after the GMS.	√	
		7.3.5.2	Risalah RUPS memuat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan oleh pimpinan rapat atau pihak yang menjawab. The minutes of the GMS contain the questions asked by the shareholders and the answers given by the chairman of the meeting or the party answering.	√	
		7.3.5.3	Penyelenggaraan RUPS, beserta semua materi rapat, laporan dan dokumen terkait yang meliputi antara lain laporan tahunan dan hasil pemungutan suara, termasuk agenda rapat yang bersangkutan dimuat di laman atau media digital komunikasi resmi korporasi dan tersedia selama paling tidak 10 (sepuluh) tahun. The organization of the GMS, along with all meeting materials, reports and related documents which include the annual report and voting results, including the relevant meeting agenda, are published on the corporation's official communication website or digital media and are available for at least 10 (ten) years.	√	
8.	**Pemangku Kepentingan Lainnya** **Other Stakeholders**				
8.1	**Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (*stakeholder engagement*)** **Key Stakeholder Engagment**				
	8.1.1		Korporasi melalui Sekretaris Korporasi melaksanakan komunikasi yang regular, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation through the Corporate Secretary conducts regular, transparent and effective communication with key stakeholders and engages them to understand their expectations and complaints as well as the corporation's impact on them.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		8.1.1.1	Korporasi mengungkapkan proses dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan kunci yang akan dilibatkan. The corporation discloses the process for identifying and selecting key stakeholders to engage.	√	
		8.1.1.2	Korporasi mengungkapkan pendekatan dan kegiatan dalam menangani keterlibatan pemangku kepentingan kunci termasuk frekuensinya berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan kunci. The corporation discloses its approach and activities in addressing key stakeholder engagement including its frequency by key stakeholder type and group.	√	
		8.1.1.3	Korporasi menyediakan saluran yang dapat digunakan para pemangku kepentingan kunci (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll) untuk menyampaikan pendapat dan masukan, menyuarakan keluhan dan/atau pengaduan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka. The corporation provides channels that key stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public, etc.) can use to express their opinions and inputs, voice their complaints and/or complaints for possible violations of their rights.	√	
		8.1.1.4	Korporasi mengungkapkan pandangan, masukan dan keluhan signifikan yang disampaikan para pemangku kepentingan kunci yang diperoleh dari keterlibatan pemangku kepentingan kunci, termasuk: Respon korporasi; dan Kelompok pemangku kepentingan kunci yang menyampaikan pandangan dan masukan. The corporation discloses significant views, inputs and complaints submitted by key stakeholders obtained from key stakeholder engagement, including: Corporate response; and Key stakeholder groups that submit views and inputs.	√	
8.2	**Integrasi Keberlanjutan dalam Model Bisnis** **Sustainable Integration in Business Model**				
	8.2.1		Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners and the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including setting corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners incorporate sustainability considerations when carrying out their roles, and in the development and implementation of corporate strategies, business plans, key action plans and risk management.	√	
		8.2.1.1	Direksi memastikan bahwa strategi, prioritas dan target keberlanjutan korporasi serta kinerja terhadap target ini dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures that corporate sustainability strategies, priorities and targets and performance against these targets are communicated to stakeholders.	√	
		8.2.1.2	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mengikuti dan memahami masalah keberlanjutan yang relevan bagi korporasi dan bisnisnya. The Board of Directors and Board of Commissioners continue to follow and understand sustainability issues relevant to the corporation and its business.	√	
		8.2.1.3	Evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris mencakup kinerja mereka dalam mengawasi dan menangani risiko serta peluang yang signifikan tentang keberlanjutan korporasi. The evaluation of the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners includes their performance in overseeing and addressing significant risks and opportunities regarding the sustainability of the corporation.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		8.2.1.4	Direksi menunjuk seseorang dalam manajemen yang berperan khusus dalam mengelola secara strategik keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam kegiatan korporasi. The Board of Directors appoints a person in management with a special role in strategically managing sustainability, including integrating sustainability considerations in corporate activities.	√	
8.3	**Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan** **Stakeholder Protection**				
	8.3.1		Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that the corporation's operations reflect the application of high ethical, social and environmental responsibility standards throughout the corporation and ensures that appropriate policies and procedures are in place to respect and comply with the rights of stakeholders.	√	
		8.3.1.1	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan tentang tanggung jawab korporasi kepada pelanggan termasuk antara lain mempertimbangkan keamanan informasi pelanggan, etika dan perilaku penjualan, layanan purna jual sesuai dengan umur produk/masa layanan, serta menindaklanjuti tingkat kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Iklan dan hubungan masyarakat harus mempromosikan konsumsi yang bertanggung jawab dan dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk menghindari penyesatan pelanggan, atau menyebabkan kesalahpahaman tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh korporasi. The corporation implements and discloses policies on the corporation's responsibilities to customers including considering the security of customer information, sales ethics and behavior, after-sales service in accordance with product life/service life, and following up on customer satisfaction levels to improve product and service quality. Advertising and public relations should promote responsible consumption and be carried out responsibly, including the avoidance of misleading customers, or causing misunderstandings about the products and services offered by the corporation.	√	
		8.3.1.2	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan kebijakan yang meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok. Korporasi juga memiliki kebijakan yang mendorong dan memantau pemasok untuk menghormati hak asasi manusia, menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memperlakukan karyawan, staf, dan pekerja mereka secara adil, serta memastikan bahwa pemasok telah menerapkan kebijakan dan prosedur bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai berkelanjutan. The corporation maintains and discloses policies covering criteria for supplier selection, transparent procurement mechanisms, supplier capacity building efforts, and fulfillment of supplier-related rights. The corporation also has policies that encourage and monitor suppliers to respect human rights, carry out social and environmental responsibilities, treat their employees, staff and workers fairly, and ensure that suppliers have implemented sustainable and sustainable value-based business policies and procedures.	√	
		8.3.1.3	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman bisnis korporasi untuk mengembangkan dan menghasilkan kegiatan tanggung jawab sosial yang secara kongkrit memberikan nilai tambah bagi masyarakat termasuk mendorong kemandirian masyarakat. The corporation carries out and discloses social responsibility by applying corporate business knowledge and experience to develop and produce social responsibility activities that concretely provide added value to society including encouraging community independence.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		8.3.1.4	Korporasi menjalankan dan mengungkapkan tanggung jawab lingkungan dengan mencegah, mengurangi, dan mengelola hal-hal berdampak negatif terhadap lingkungan dari semua aspek operasi korporasi, termasuk dalam penggunaan: a. Bahan baku; b. Energi; c. Penggunaan air; d. Pemanfaatan sumber daya terbarukan; e. Pemanfaatan serta rehabilitasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah dan penurunan dampak gas rumah kaca serta emisi karbon. The corporation carries out and discloses environmental responsibility by preventing, mitigating, and managing matters negatively impacting the environment from all aspects of the corporation's operations, including in the use of: a. Raw materials; b. Energy; c. Water usage; d. Utilization of renewable resources; e. Utilization and rehabilitation of biodiversity, waste management and reduction of greenhouse gas impacts and carbon emissions.	√	
		8.3.1.5	Korporasi melaksanakan dan mengungkapkan kebijakan persaingan yang sehat dengan mengedepankan perilaku bisnis yang etis dan tidak melakukan praktik anti persaingan untuk mendapatkan atau melindungi posisi pasar. The corporation implements and discloses fair competition policies by promoting ethical business behavior and not engaging in anti-competitive practices to gain or protect market position.	√	
		8.3.1.6	Direksi memiliki kebijakan guna melindungi hak para kreditur. a. Dewan Komisaris mengawasi dan Direksi memonitor likuiditas dan solvabilitas keuangan korporasi. b. Direksi memastikan bahwa risiko terhadap posisi keuangan atau kesulitan keuangan segera teridentifikasi, dikelola, dimitigasi serta dilaporkan. Dewan Komisaris memantau penanganan Direksi atas risiko atau kesulitan keuangan dan menerima laporan rutin. The Board of Directors has a policy to protect the rights of creditors. a. The Board of Commissioners supervises and the Board of Directors monitors the financial liquidity and solvency of the corporation. b. The Board of Directors ensures that risks to the financial position or financial difficulties are promptly identified, managed, mitigated and reported. The Board of Commissioners monitors the Board of Directors' handling of financial risks or difficulties and receives regular reports.	√	
	8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritize sustainability.		√	
		8.3.2.1	Korporasi memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada karyawan, yang mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan. The Corporation has a policy of providing long-term incentives to employees, which encourages sustainable value creation.	√	
		8.3.2.2	Remunerasi berbasis kinerja untuk karyawan harus memperhatikan unsur risiko, termasuk mengukur imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko (*risk-adjusted return*), untuk memastikan bahwa tidak ada insentif yang diberikan untuk pengambilan risiko yang tidak diinginkan. Performance-based remuneration for employees should take into account the element of risk, including measuring risk-adjusted returns, to ensure that no incentives are provided for undesirable risk-taking.	√	
		8.3.2.3	Direksi mengelola dengan baik benturan kepentingan yang mungkin timbul antara karyawan sebagai penerima manfaat dana pensiun dengan korporasi sebagai pengelola dana pensiun. The Board of Directors properly manages conflicts of interest that may arise between employees as beneficiaries of the pension fund and the corporation as the pension fund manager.	√	

Prinsip Principles	Rekomendasi Recommendation	Panduan Guidelines	Uraian Description	*Apply or Explain*	Keterangan Penerapan Implementation Remark
		8.3.2.4	Direksi memastikan korporasi memiliki program pengembangan dan manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk memastikan bahwa korporasi memiliki karyawan dalam jumlah yang memadai dan yang berpengetahuan, terampil, dan berpengalaman. The Board of Directors ensures the corporation has an effective human resource development and management program to ensure that the corporation has an adequate number of knowledgeable, skilled and experienced employees.	√	
		8.3.2.5	Pada saat mengisi posisi manajerial dalam korporasi, Direksi mempertimbangkan unsur keberagaman, nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan jender. Kebijakan keberagaman tersebut disertai dengan tujuan yang terukur. When occupying managerial positions in the corporation, the Board of Directors considers elements of diversity, nondiscrimination and provides equal opportunities to all candidates without discriminating against ethnicity, religion, race, class and gender. The diversity policy is complemented by measurable objectives.	√	


CAT
CE 6251
CAT
CE 3192


Umur
PT. TUNAS INTI ABADI
NURSERY AREA
SITE SEBAMBAN



16

Program Unggulan CSR ABM

ABM's CSR Leading Program

06

RUJUKAN KEBERLANJUTAN

Sustainability Reference

Sebagai perusahaan energi terintegrasi melalui investasi strategis di sektor pertambangan, logistik dan jasa rekayasa industri untuk mendukung keseluruhan rantai nilai industri energi, ABM berupaya mewujudkan prinsip lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*), atau yang lebih dikenal dengan pendekatan ESG. Pendekatan ini ditempuh dalam rangka mendorong penerapan keberlanjutan dalam seluruh aspek operasi dan bisnis ABM, mulai dari aktivitas tambang dan bisnis turunannya yang mematuhi seluruh peraturan termasuk aturan mengenai K3 serta mengindahkan dampak lingkungan. ABM selalu berupaya untuk menjalankan kerja yang efisien terhadap penggunaan energi, menjaga keluaran produk dan layanan yang berstandar serta berkualitas tinggi, hingga memastikan bahwa keberadaan ABM memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

ABM, as an integrated energy company with strategic investments in mining, logistics, and industrial engineering services across the energy value chain, is committed to upholding the principles of Environmental, Social, and Governance (ESG) in its operations. This approach is taken in order to encourage the implementation of sustainability in all aspects of ABM's operations and business, starting from mining activities and derivative businesses that comply with all regulations including regulations regarding the OHS and pay attention to environmental impacts. ABM aims to carry out work that is efficient in energy use, maintain standard and high quality product and service output, ensuring that the ABM presence makes the best contribution to the environment and society.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Sustainability Development Goals (SDGs)

TPB yang telah ditetapkan dalam Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2012, telah menjadi dasar bagi seluruh negara di dunia untuk menghadapi tantangan lingkungan, politik dan ekonomi, agar dapat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup semua makhluk di muka bumi.

Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* yang perlu diperhatikan dan dijalankan oleh setiap negara yaitu:

SDGs which were established at the United Nations (UN) Conference on Sustainable Development in 2012, have become the basis for all countries in the world to face environmental, political and economic challenges, in order to improve and enhance their welfare and standard of life of all creatures on earth.

There are 17 (seventeen) objectives/goals that each country needs to pay attention to and implement, namely:



Dengan komitmen dan ratifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap warga negara, termasuk ABM, berkewajiban pula untuk mendukung dan meraih tujuan TPB tersebut sebagai bagian dari warga dunia.

With the commitment and ratification that has been carried out by the Government of the Republic of Indonesia, every citizen, including ABM, is also obliged to support and achieve the goals of the TPB as part of world citizens.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Komitmen ABM terhadap TPB diimplementasikan dengan berbagai program kegiatan yang berkontribusi langsung pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Sepanjang tahun 2023, Grup ABM telah menjalankan setidaknya 16 program CSR, baik berupa program baru maupun merupakan program keberlanjutan dari tahun-tahun sebelumnya.

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

ABM's commitment to SDGs is implemented with various activity programs that contribute directly to the economic and social growth and development of communities around operational areas through Corporate Social Responsibility (CSR) implementation policies.

Throughout 2023, ABM Group has implemented at least 16 CSR programs, both new and existing sustainability programs from the previous years

Ringkasan Program CSR Unggulan Grup ABM Tahun 2023
Summary of ABM Group's Top CSR Programs in 2023

Pilar CSR CSR Pillar	Sasaran Target	Sinergi Program Program Synergy	GRI/SDG Linkage
Pendidikan Education	Meningkatkan Kapabilitas Talenta Lokal Elevating Local Talent Capability	Program Pelatihan Pengelasan dan Program Pelatihan Permesinan - SSB Welding Development Program (WDP) and Machining Development Program (MDP) - SSB	
		Program Peningkatan Kompetensi bagi guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan Nasional area Tapin Selatan untuk inovasi pertanian ramah lingkungan - CK Competency Improvement Program for teachers and students of National Vocational High Schools in South Tapin area for environmentally friendly agricultural innovations - CK	
		Program Peningkatan kapasitas guru untuk sekolah berkebutuhan khusus (Rumah Autis) - CKB Logistics Teacher capacity building program for special needs schools (Rumah Autis) - CKB Logistics	
		Program Peningkatan Kompetensi bagi guru dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan area Meulaboh, Aceh untuk kurikulum pendidikan terkait Pertambangan - CK Competency Improvement Program for teachers and students of Vocational High Schools in the Meulaboh area, Aceh for educational curriculum related to Mining - CK	
		Program Pelatihan Dasar Operator dan Mekanik Alat Berat Fresh Green Operator (FGO) & Fresh Green Mechanic (FGM) - CK Basic Training Program for Heavy Equipment Operators and Mechanics Fresh Green Operator (FGO) & Fresh Green Mechanic (FGM) - CK	
		Pemberian beasiswa pendidikan tinggi bagi beberapa mahasiswa/i di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan - TIA Providing higher education scholarships for several students in Tanah Bumbu, South Kalimantan - TIA	
		Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa/i di Mimika, Papua - CKB Logistics Providing school supplies for students in Mimika, Papua - CKB Logistics	
Lingkungan dan Dampak Ekologi Environment and Ecological Impact	Terlibat dalam Pelestarian Keanekaragaman Hayati Engage Biodiversity Preservation	Program Penanaman Mangrove di Romokalisari, Jawa Timur - CKB Logistics Mangrove Planting Program in Romokalisari, East Java - CKB Logistics	
		Program Penanaman mangrove di Kariangau, Kalimantan Timur - SSB Mangrove Planting Program in Kariangau, East Kalimantan - SSB	
		Program pendampingan SMAN 1 Sungai Loban, Kalimantan Selatan menuju Sekolah Calon Adiwiyata Mandiri (SCAM) - TIA Mentoring program from SMAN 1 Sungai Loban, South Kalimantan towards the Independent Adiwiyata Candidate School (SCAM) - TIA	
		Program kesukarelawanan untuk mengelola tanaman pangan secara mandiri di Pondok Cabe, Tangerang Selatan Volunteer program to manage food crops independently in Pondok Cabe, South Tangerang	
Pemberdayaan Ekonomi Economic Empowerment	Membangun Kesejahteraan masyarakat Building Welfare Communities	Program Konservasi Batik Sasirangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan - TIA Sasirangan Batik Conservation Program in Tanah Bumbu, South Kalimantan - TIA	
		Program Budidaya Perikanan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan - TIA Fisheries Cultivation Program in Tanah Bumbu, South Kalimantan - TIA	
		Program Budidaya dan Pengolahan Kopi di Tiwingan, Kalimantan Selatan - TIA Coffee Cultivation and Processing Program in Tiwingan, South Kalimantan - TIA	
Kesehatan Masyarakat dan Infrastruktur Community Health and Infrastructure	Mengembangkan Penghidupan Masyarakat Develop Community Livelihood	Program pendidikan tentang Stunting di Angsana, kalimantan Selatan - TIA Educational program about Stunting in Angsana, South Kalimantan - TIA	
		Program pendidikan tentang Stunting di Cakung, Jakarta Utara - CKB Logistics Educational program about Stunting in Cakung, North Jakarta - CKB Logistics	

Lebih lanjut tentang upaya ABM dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta mewujudkan keberlanjutan pada aspek lingkungan (*environmental*) dan sosial (*social*) dapat dilihat pada Laporan Keberlanjutan tahun 2023 sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini. Sedangkan rincian tentang tata kelola (*governance*) dapat dilihat pada bab "Tata Kelola Perusahaan yang Baik" dalam Laporan Tahunan ini.

Further, ABM keeps making concrete initiativees in social and environmental responsibility, while realizing sustainability in environmental and social aspects are presented in the 2023 Sustainability Report as an integral document of this Annual Report. Meanwhile Details on governance are provided in the "Good Corporate Governance" chapter of this Annual Report.





07

Laporan Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Statement

PT ABM Investama Tbk
dan Entitas Anaknya/*and its Subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements as of December 31, 2023
and for the year then ended
with independent auditor's report

PT ABM Investama Tbk.
Gedung TMT 1, 18th Fl. Suite 1802,
Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta 12560, Indonesia
Telephone +62-21-2997-6767, Facsimile +62-21-2997-6768
www.abm-investama.com
A member of Tiara Marga Trakindo Group

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ABM INVESTAMA TBK (PERSEROAN) DAN ENTITAS ANAK TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT ABM INVESTAMA TBK (THE COMPANY) AND SUBSIDIARIES AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/
We, the undersigned:

1. Nama/*Name* : **Achmad Ananda Djajanegara**
   Alamat kantor/*Office Address* : Gedung TMT 1, 18th fl, Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Selatan 12560
   Alamat domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas lain/*Domicile as stated in ID card.* : Jl. Pejaten Barat I No. 4E, Pejaten Barat Pasar Minggu - Jakarta Selatan
   Nomor telepon kantor/*Office Phone number* : + 62-21-2997 6767
   Jabatan/*Position* : Direktur Utama/ *President Director*

2. Nama/*Name* : **Adrian Erlangga**
   Alamat kantor/*Office address* : Gedung TMT 1, 18th fl, Jl. Cilandak KKO No.1 Jakarta Selatan 12560
   Alamat domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas lain/*Domicile as stated in ID card* : Jl. Bangka VII No. 8, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
   Nomor telepon kantor/*Office Phone Number* : +62-21-2997 6767
   Jabatan/*Position* : Direktur/ *Director*

Menyatakan bahwa/*Declare that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak;

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries;*

2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

2. *The Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT ABM INVESTAMA TBK (PERSEROAN) DAN ENTITAS ANAK TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF PT ABM INVESTAMA TBK (THE COMPANY) AND SUBSIDIARIES AS OF DECEMBER 31, 2023 AND FOR THE YEAR THEN ENDED

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. a. *All information in the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*

   b. *The Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries do not contain any incorrect material information or facts, nor do they omit any material information and facts;*

4. *We are responsible for the Company's and Subsidiaries internal control system.*

The above statements are made truthfully.

Jakarta, 27 Maret 2024/ *Jakarta, March 27, 2024*

Direktur Utama/ *President Director*	Direktur / *Director*
Achmad Ananda Djajanegara	**Adrian Erlangga**

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi

Halaman/
Page

Table of Contents

Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7 - 8	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 228	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

EY
Building a better working world

Purwantono, Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT ABM Investama Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ABM Investama Tbk. ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditor's Report

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024

The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT ABM Investama Tbk.

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT ABM Investama Tbk. (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Penentuan nilai wajar dari investasi pada entitas asosiasi

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan pada Catatan 1c atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 29 Desember 2023, Grup kehilangan pengendalian atas Grup MDB dimana Grup mencatat sisa kepemilikannya di Grup MDB sebagai investasi pada entitas asosiasi. Sesuai dengan PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian" (sejak tanggal 1 Januari 2024 dirujuk sebagai PSAK 110), Grup menghentikan pengakuan aset dan liabilitas Grup MDB dari laporan keuangan konsolidasian Grup dan mengakui investasi pada entitas asosiasi pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian. Hal ini signifikan terhadap audit kami karena nilainya material terhadap laporan keuangan konsolidasian dan penentuan bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi *investee* pada tanggal hilangnya pengendalian memerlukan pertimbangan dan estimasi manajemen yang signifikan.

Kebijakan akuntansi signifikan untuk prinsip-prinsip konsolidasi dan investasi pada entitas asosiasi diungkapkan pada Catatan 1c dan 2ac atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Determination of fair value of investment in associates

Description of the key audit matter:

As described in Note 1c to the accompanying consolidated financial statements, on December 29, 2023, the Group lost its control over the MDB Group and has accounted for its retained interest in MDB Group as investment in associates. In accordance with PSAK 65 "Consolidated Financial Statements" (since January 1, 2024 referred to as PSAK 110), the Group derecognized the assets and liabilities of MDB Group from the consolidated financial statements of the Group and recognized investment in associates at its fair value on the date control was lost. This matter is significant to our audit because the amount is material to the consolidated financial statements and the determination of the Group's share of the net fair value of the investee's identifiable assets and liabilities at the date the control was lost requires significant management judgment and estimates.

The significant accounting policies of principle of consolidations and investment in associates are disclosed in Notes 1c and 2ac to the accompanying consolidated financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Respons audit:

Kami menilai apakah investasi Grup setelah hilangnya pengendalian diakui pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian". Kami melibatkan pakar auditor dalam menilai kelayakan metodologi dan input utama yang digunakan dalam menentukan nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi, antara lain tingkat diskonto, proyeksi harga jual, biaya produksi dan estimasi cadangan batubara. Kami membandingkan tingkat diskonto dan proyeksi harga jual dengan data pasar eksternal yang tersedia. Kami menilai kewajaran biaya produksi dengan membandingkan ke data historis. Kami mencocokan estimasi cadangan batubara ke laporan pakar manajemen. Kami mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, kualifikasi dan pengalaman yang relevan dari pakar manajemen. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Key audit matters (continued)

Audit response:

We assessed whether the Group's investment after the loss of control is recognized at fair value in accordance with PSAK 65 "Consolidated Financial Statements". We involved our auditor's experts in assessing the reasonableness of the methodology and key inputs used in determining the net fair value of identifiable assets and liabilities, including the discount rate, projected selling prices, production costs and coal reserves estimates. We compared discount rate and projected selling prices to available external market data. We assessed reasonableness of production costs by comparing to historical data. We agreed the coal reserves estimates to the report of management's expert. We evaluated the competence, capabilities, qualifications, and relevant experience of the management's expert. We evaluated the adequacy of the related disclosures in the accompanying consolidated financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report (the "Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Building a better working world

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00337/2.1032/AU.1/10/1833-1/1/III/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Chang Hartono, CPA
Registrasi Akuntan Publik No.: AP.1833/*Public Accountant Registration No.: AP.1833*

27 Maret 2024/*March 27, 2024*

00337

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	188.576.976	2f,2v,4	221.566.137	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan lancar lainnya	5.674.289	2g,2v,5	99.390.434	*Other current financial assets*
Piutang usaha		2v,6		*Trade receivables*
Pihak ketiga - neto	153.554.779		171.182.389	*Third parties - net*
Pihak berelasi - neto	159.986.877	2h,33	84.442.184	*Related parties - net*
Piutang non-usaha		2v		*Non-trade receivables*
Pihak ketiga - neto	484.614		324.980	*Third parties - net*
Pihak berelasi - neto	30.529.082	2h,33	10.879.958	*Related parties - net*
Persediaan - neto	53.278.069	2j,7	55.642.836	*Inventories - net*
Uang muka	5.958.953	8,33	6.167.411	*Advances*
Biaya dibayar di muka	3.108.948	2k,8,33	4.389.574	*Prepaid expenses*
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	19.218.958	2r	51.132.001	*Prepaid value added taxes*
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.000.000	2ab,9	-	*Non-current assets held for sale*
Aset lancar lainnya	1.350.554	2v,33	1.546.589	*Other current assets*
TOTAL ASET LANCAR	**622.722.099**		**706.664.493**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada saham	16.731.209	2v,10	23.619.168	*Investment in shares*
Investasi pada entitas asosiasi	589.642.728	2ac,11	480.946.941	*Investment in associates*
Aset pajak tangguhan - neto	9.357.407	2r,23e	9.196.419	*Deferred tax assets - net*
Aset tetap - neto	725.355.336	2m, 2n,2o,12	567.333.151	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	119.755.436	2l,2n,15	86.715.289	*Right of use assets - net*
Taksiran tagihan pajak - neto	44.580.395	2r,23a	13.611.156	*Estimated claims for tax refund - net*
Properti pertambangan - neto	3.697.274	2n,2s,13	41.358.383	*Mining properties - net*
Aset takberwujud - neto	14.070.698	2aa,14	16.189.305	*Intangible assets - net*
Aset tidak lancar lainnya	10.775.313	2v,16,33	36.944.259	*Other non-current assets*
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	**1.533.965.796**		**1.275.914.071**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
TOTAL ASET	**2.156.687.895**		**1.982.578.564**	***TOTAL ASSETS***

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank jangka pendek	69.419.564	18	60.043.975	*Short-term bank loans*
Utang usaha		2v,17		*Trade payables*
Pihak ketiga	93.812.596		91.857.356	*Third parties*
Pihak berelasi	161.638.568	2h,33	134.596.398	*Related parties*
Utang non-usaha		2v		*Non-trade payables*
Pihak ketiga	3.495.284		4.415.150	*Third parties*
Pihak berelasi	953.237	2h,33	2.491.926	*Related parties*
Utang pajak	9.567.298	2r,23b	31.992.410	*Taxes payable*
Beban akrual	35.843.429	2v,19,33,39	113.552.514	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17.439.132	2v,19	19.700.460	*Short-term employee benefits liability*
Uang muka pelanggan		2p,20		*Advances from customers*
Pihak ketiga	634.713		535.436	*Third parties*
Pihak berelasi	1.170.801	2h,33	204.169	*Related parties*
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		2v		*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank jangka panjang	186.938.153	18	120.419.068	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa		2l,22		*Lease liabilities*
Pihak ketiga	22.002.167		10.847.112	*Third parties*
Pihak berelasi	28.765.821	2h,33	26.277.977	*Related parties*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**631.680.763**		**616.933.951**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan	2.084.562	2t,21	4.575.062	*Provision for environmental restoration obligation*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		2v		*Long-term liabilities - net of current maturities:*
Utang obligasi	155.359.128	2x,24	153.914.040	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	502.335.698	18	516.363.178	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa		2l,22		*Lease liabilities*
Pihak ketiga	41.607.468		12.110.615	*Third parties*
Pihak berelasi	33.748.489	2h,33	38.766.080	*Related parties*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	6.360.888	2r,23e	3.088.800	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	24.583.932	2u,32	19.305.563	*Long-term employee benefits liability*
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**766.080.165**		**748.123.338**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
TOTAL LIABILITAS	**1.397.760.928**		**1.365.057.289**	***TOTAL LIABILITIES***

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2023/ ***December 31, 2023***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2022/** ***December 31, 2022***	
EKUITAS				***EQUITY***
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				***EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT COMPANY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham Modal dasar - 9.360.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.753.165.000 saham	146.554.908	25	146.554.908	*Share capital - Rp500 par value per share Authorized capital - 9,360,000,000 shares Issued and fully paid capital - 2,753,165,000 shares*
Tambahan modal disetor - neto	115.087.198	2x,26	115.087.198	*Additional paid-in capital - net*
Selisih dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali	8.330.039	1c	8.330.039	*Difference arising from transactions with non-controlling interests*
Komponen lainnya dari ekuitas	19.855	23f	19.855	*Other components of equity*
Saldo laba				*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	710.278		610.278	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	556.788.784		342.888.227	*Unappropriated*
Rugi komprehensif lain	(68.470.029)	2q,2v	(63.127.749)	*Other comprehensive loss*
Sub-total	759.021.033		550.362.756	*Sub-total*
Kepentingan non-pengendali	(94.066)	1c,2c,27	67.158.519	*Non-controlling interests*
EKUITAS NETO	**758.926.967**		**617.521.275**	***NET EQUITY***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**2.156.687.895**		**1.982.578.564**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN	1.492.998.856	2h,2p,29,33	1.445.527.371	***REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.100.952.827)	2h,2p 12,13,14 15,30,33,35	(923.623.100)	***COST OF REVENUE***
LABA BRUTO	**392.046.029**		**521.904.271**	***GROSS PROFIT***
Beban penjualan, umum dan administrasi	(110.370.850)	2h,2p,6,12 14,15,31,33	(105.067.870)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan lainnya	47.753.670	2p,2q 12,33,35	15.282.698	*Other income*
Beban lainnya	(23.801.736)	9,12,23	(36.387.450)	*Other expenses*
LABA USAHA	**305.627.113**		**395.731.649**	***PROFIT FROM OPERATIONS***
Bagian atas laba entitas asosiasi	143.996.935	11	66.587.832	*Share in profit of associates*
Pendapatan dividen	25.000.000		22.500.000	*Dividend income*
Pendapatan keuangan - neto	4.812.848	2p	2.596.132	*Finance income - net*
Biaya keuangan	(106.107.407)	2h,2p 2q,14,18,33	(52.481.411)	*Finance charges*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	**373.329.489**		**434.934.202**	***PROFIT BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX***
Beban pajak final	(1.838.566)	2r	(1.872.758)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**371.490.923**		**433.061.444**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan - neto	(55.867.030)	2r,23c,23e	(91.157.937)	*Income tax expense - net*
LABA TAHUN BERJALAN	**315.623.893**		**341.903.507**	***PROFIT FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Item that will be reclassified to profit or loss:***
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	3.449.191	2q	(12.578.869)	*Exchange difference from financial statements translation*
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	(301.807)	11	129.296	*Share of other comprehensive income of associate - exchange difference from financial statements translation*
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				***Item that will not be reclassified to profit or loss:***
Perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(6.887.959)	2v,10	(3.033.909)	*Changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.965.162)	2u,32	975.025	*Remeasurement of defined benefit plan*
Pajak penghasilan terkait	432.336	2r	(214.506)	*Related income tax*
Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi - pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(68.879)	11	(43.762)	*Share of other comprehensive loss of associates - remeasurement of defined benefit plan*
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**310.281.613**		**327.136.782**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				*Profit for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	289.000.557		269.909.926	*Owners of the parent company*
Kepentingan non-pengendali	26.623.336	2c	71.993.581	*Non-controlling interests*
TOTAL	**315.623.893**		**341.903.507**	***TOTAL***
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	283.658.277		255.181.125	*Owners of the parent company*
Kepentingan non-pengendali	26.623.336	2c,27	71.955.657	*Non-controlling interests*
TOTAL	**310.281.613**		**327.136.782**	***TOTAL***
LABA PER SAHAM DASAR	**0,10497**	2w	**0,09804**	***BASIC EARNING PER SHARE***

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

		Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas I					
	Catatan/ *Notes*	Modal Saham - Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Share Capital - Issued and Fully Paid*	Tambahan Modal Disetor - Neto/ *Additional Paid-in Capital - Net*	Selisih dari Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali/ *Difference Arising from Transactions with Non-controlling Interests*	Komponen Lainnya dari Ekuitas/ *Other Components of Equity*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*	
						Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentuka Penggunaannya *Unappropriated*
Saldo, 1 Januari 2022		**146.554.908**	**115.087.198**	**8.330.039**	**19.855**	**510.278**	**123.582.9**
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	269.909.9
Pembentukan cadangan umum	28	-	-	-	-	100.000	(100.0
Dividen kepada kepentingan non-pengendali	1c	-	-	-	-	-	
Dividen kas	28	-	-	-	-	-	(50.504.6
Saldo, 31 Desember 2022		**146.554.908**	**115.087.198**	**8.330.039**	**19.855**	**610.278**	**342.888.2**
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	-	-	289.000.5
Pembentukan cadangan umum	28	-	-	-	-	100.000	(100.0
Dekonsolidasi entitas anak	1c	-	-	-	-	-	
Dividen kepada kepentingan non-pengendali	1c	-	-	-	-	-	
Dividen kas	28	-	-	-	-	-	(75.000.0
Saldo, 31 Desember 2023		**146.554.908**	**115.087.198**	**8.330.039**	**19.855**	**710.278**	**556.788.7**

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian ini.

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan dari pelanggan	1.405.439.242		1.341.413.378	*Receipts from customers*
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(717.665.178)		(676.497.813)	*Payments to suppliers and others*
Pembayaran kepada karyawan	(190.649.759)		(150.574.671)	*Payments to employees*
Kas diperoleh dari operasi	497.124.305		514.340.894	*Cash generated from operations*
Penerimaan dari:				*Receipts from:*
Tagihan pajak	8.714.333		21.654.228	*Tax refund*
Pendapatan bunga	4.812.848		2.596.132	*Interest income*
Pembayaran atas pajak penghasilan	(123.349.269)		(116.901.001)	*Payments for income taxes*
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**387.302.217**		**421.690.253**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	124.500.000	11	30.000.000	*Dividend received from associates*
Penurunan (kenaikan) aset keuangan lancar lainnya	28.553.596		(99.289.782)	*Decrease (increase) in other current financial assets*
Penerimaan dividen dari investasi pada saham	20.000.000	10	22.500.000	*Dividend received from investment in shares*
Penerimaan penjualan aset tetap	17.242.906	12	2.024.248	*Proceeds from sale of fixed assets*
Penerimaan penjualan aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	5.250.000	9	-	*Proceeds from sale of non-current assets held for sale*
Perolehan aset takberwujud	(1.096.650)	14	(2.742.795)	*Acquisitions of intangible assets*
Pembayaran utang atas perolehan aset takberwujud	(1.364.360)		(2.203.136)	*Payment of payables related to the acquisition of intangible asset*
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	(1.695.442)		(26.623.323)	*Increase in other non-current assets*
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(1.766.568)	16	(1.306.466)	*Addition to advances for purchase of fixed assets*
Perolehan properti pertambangan	(16.438.396)	13	(19.305.473)	*Acquisitions of mining properties*
Kas dan setara kas yang dilepaskan dari dekonsolidasi entitas anak	(27.783.650)	1c	-	*Cash and cash equivalents disposed from deconsolidation of a subsidiary*
Pembayaran utang atas perolehan aset tetap	(80.648.118)		(19.659.359)	*Payment of payables related to the acquisition of fixed assets*
Perolehan aset tetap	(333.462.387)	12	(237.244.026)	*Acquisitions of fixed assets*
Penerimaan penjualan aset tetap dari piutang	-		32.709	*Proceeds from sale of fixed assets through receivables*
Perolehan investasi entitas asosiasi	-	11	(444.251.363)	*Acquisitions of investment in associates*
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(268.709.069)**		**(798.068.766)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

PT ABM INVESTAMA TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT ABM INVESTAMA TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in United States Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*			
	2023	**Catatan/ *Notes***	**2022**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Perolehan dari:				*Proceeds from:*
Utang bank jangka panjang	260.807.209	38	535.185.820	*Long-term bank loans*
Utang bank jangka pendek	258.142.550	38	168.769.526	*Short-term bank loans*
Pembayaran untuk:				*Payments of:*
Utang bank jangka pendek	(242.292.332)	18,38	(113.086.516)	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	(175.517.980)	18,38	(23.600.000)	*Long-term bank loans*
Bunga	(102.385.213)		(56.452.091)	*Interest*
Dividen kas	(97.100.000)	1c,28	(66.504.624)	*Cash dividend*
Liabilitas sewa	(54.908.582)	38	(35.982.702)	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-		(40.000.000)	*Bonds payable*
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(153.254.348)**		**368.329.413**	***Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities***
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS	**(34.661.200)**		**(8.049.100)**	***NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	**1.672.039**		**(7.605.204)**	***NET EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**221.566.137**		**237.220.441**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**188.576.976**	4	**221.566.137**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Tambahan informasi arus kas disajikan dalam Catatan 41.

Supplementary cash flow information is presented in Note 41.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT ABM Investama Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Asih Wahyuni Martaningrum, S.H., No. 01 tanggal 1 Juni 2006 di Depok, Indonesia dengan nama PT Adiratna Bani Makmur. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-22790.HT.01.01.TH.2006 tanggal 3 Agustus 2006.

Berdasarkan Akta Notaris Dwi Yulianti, S.H., No. 5 tanggal 31 Agustus 2009, nama Perusahaan diubah dari PT Adiratna Bani Makmur menjadi PT ABM Investama. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-50239.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 16 Oktober 2009.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 52 tanggal 10 Mei 2023 mengenai perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tentang pelaporan laporan keuangan Perusahaan. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0067388 tanggal 24 Mei 2023.

Perusahaan berkedudukan di Gedung Tiara Marga Trakindo I lantai 18, Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, Indonesia. Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 2006.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan jasa konsultasi manajemen bisnis, termasuk perencanaan dan desain dalam rangka pengembangan manajemen bisnis, dan jasa penyewaan.

PT Tiara Marga Trakindo adalah entitas induk akhir dari Perusahaan dan entitas anaknya.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT ABM Investama Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed of Asih Wahyuni Martaningrum, S.H., No. 01 dated June 1, 2006 in Depok, Indonesia under the name PT Adiratna Bani Makmur. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. C-22790.HT.01.01.TH.2006 dated August 3, 2006.

Based on Notarial Deed of Dwi Yulianti, S.H., No. 5 dated August 31, 2009, the Company's name was changed from PT Adiratna Bani Makmur to PT ABM Investama. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-50239.AH.01.02.Year 2009 dated October 16, 2009.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest of which was based on Notarial Deed No. 52 dated May 10, 2023 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., regarding changes in reporting of the Company's financial report. The amendment was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter No. AHU-AH.01.03-0067388 dated May 24, 2023.

The Company is domiciled in Tiara Marga Trakindo I building, 18th floor, Jl. Cilandak KKO No. 1, South Jakarta 12560, Indonesia. The Company started its operations in 2006.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is conducting business management consultancy services, including planning and design for development of business management, and rental services.

PT Tiara Marga Trakindo is the ultimate parent entity of the Company and its subsidiaries.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") dalam surat No. S-12687/BL/2011 tanggal 24 November 2011, untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 550.633.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp500 per saham dengan harga sebesar Rp3.750 per saham. Pada tanggal 6 Desember 2011, Perusahaan mencatatkan seluruh saham yang telah diterbitkan di Bursa Efek Indonesia.

c. Struktur Entitas Anak

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. The Company's Public Offerings

The Company obtained the effective statement from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") in its letter No. S-12687/BL/2011 dated November 24, 2011 to conduct public offering of its 550,633,000 shares with nominal value of Rp500 per share at a price of Rp3,750 per share. On December 6, 2011, the Company listed all of its issued shares on the Indonesia Stock Exchange.

c. Structure of the Subsidiaries

The percentages of ownership, either directly or indirectly, of the Company, and total assets of the subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Ruang Lingkup Usaha/ *Scope of Activities*	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ *Domicile, Date of Establishment*	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan (Langsung/ Tidak Langsung)/ *Percentage of Ownership (Direct/Indirect)*		Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*	
				31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Kepemilikan langsung:/ *Direct ownership:*							
PT Cipta Kridatama ("CK")	Kontraktor Pertambangan/ *Mining contractor*	Jakarta, 8 April 1997/ *April 8, 1997*	1999	100%	100%	1.097.488.230	734.359.621
PT Reswara Minergi Hartama ("Reswara")	Perdagangan/ *Trading*	Jakarta, 19 Oktober 2010/ *October 19, 2010*	2010	100%	100%	761.717.905	980.876.812
PT Cipta Krida Bahari ("CKB")	Jasa logistik/ *Logistic services*	Jakarta, 9 Mei 1997/ *May 9, 1997*	1997	100%	100%	168.985.033	147.591.072
PT Sanggar Sarana Baja ("SSB")	Perencanaan rekayasa mesin, pengembangan, dan pembuatan perlengkapan penunjang alat-alat berat dan alat angkut bahan/ *Engineering, development and manufacture of heavy equipment attachment and materials handling products*	Jakarta, 19 Maret 1977/ *March 19, 1977*	1977	99,99%	99,99%	86.354.209	89.301.426
PT Anzara Janitra Nusantara ("AJN") Dahulu/*formerly* PT Pradipa Aceh Daya ("PAD")	Industri pembangkit listrik energi *thermal*/ *Thermal energy IPP*	Jakarta, 31 Desember 2014/ *December 31, 2014*	-	100%	100%	10.184.755	4.229.360
PT Prima Wiguna Parama ("PWP")	Jasa dan perdagangan umum/ *Services and General trading*	Jakarta, 20 Juni 2011/ *June 20, 2011*	2017	100%	100%	76.871.733	60.355.540

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

The percentages of ownership, either directly or indirectly, of the Company, and total assets of the subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Ruang Lingkup Usaha/ *Scope of Activities*	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ *Domicile, Date of Establishment*	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan (Langsung/ Tidak Langsung)/ *Percentage of Ownership (Direct/Indirect)*		Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*	
				31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Melalui Reswara:/ *Through Reswara*:							
PT Tunas Inti Abadi ("TIA")	Pengembangan dan pertambangan sumberdaya, terutama batubara/ *Development and mining resources principally coal*	Jakarta, 11 November 2003/ *November 11, 2003*	2009	100%	100%	159.736.802	165.126.524
PT Agata Nugraha Nastari ("ANN") Dahulu/*formerly* PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu ("NDHB")	Perdagangan/ *Trading*	Jakarta, 28 Oktober 2014/ *October 28, 2014*	2020	100%	100%	23.376.540	45.894.698
PT Radhika Jananta Raya ("RJR")	Perdagangan/ *Trading*	Jakarta, 29 Juli 2022/ *July 29, 2022*	2022	100%	100%	524.431.196	488.631.219
PT Media Djaya Bersama ("MDB")[a)]	Perdagangan, pengembangan dan industri/ *Trading, development, and industry*	Jakarta, 6 Mei 2005/ *May 6, 2005*	-	-	50%	-	340.972.725
PT Mifa Bersaudara ("MIFA")[a)]	Pertambangan batubara/ *Coal mining*	Nanggroe Aceh Darussalam, 14 Januari 2002/ *January 14, 2002*	2012	-	50%	-	285.973.587
PT Bara Energi Lestari ("BEL")[a)]	Pertambangan batubara/ *Coal mining*	Nanggroe Aceh Darussalam, 24 Juni 2005/ *June 24, 2005*	2011	-	50%	-	45.197.150
Melalui CKB:/*Through CKB*:							
PT Alfa Trans Raya ("ATR")	Transportasi laut/ *Sea transportation*	Jakarta, 28 November 2006/ *November 28, 2006*	2007	99,99%	99,99%	5.214.980	4.270.402
PT Baruna Dirga Dharma ("BDD")	Transportasi laut domestik/ *Domestic sea transportation*	Jakarta, 24 Mei 2011/ *May 24, 2011*	2011	99,99%	99,99%	35.112.588	31.226.477
PT Dianta Daya Embara ("DDE")	Bongkar muat barang dan pelayanan kepelabuhan laut/ *Stevedoring and sea port services*	Jakarta, 15 Juni 2015/ *June 15, 2015*	2017	99,99%	99,99%	8.827.198	8.714.817
PT Pelabuhan Buana Reja ("PBR")	Pelayanan jasa kapal/ *Ship operational services*	Jakarta, 2 Desember 2010/ *December 2, 2010*	2018	100%	100%	22.497.727	20.273.312

[a)]Tidak dikonsolidasi pada penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023/*Deconsolidated in the Group's consolidated financial statements as of December 31, 2023*

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

Persentase kepemilikan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan total aset entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

The percentages of ownership, either directly or indirectly, of the Company, and total assets of the subsidiaries as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Ruang Lingkup Usaha/ *Scope of Activities*	Kedudukan, Tanggal Pendirian/ *Domicile, Date of Establishment*	Tahun Usaha Komersial Dimulai/ *Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan (Langsung/ Tidak Langsung)/ *Percentage of Ownership (Direct/Indirect)*		Total Aset Sebelum Eliminasi/ *Total Assets Before Elimination*	
				31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*
Kepemilikan tidak langsung:/ *Indirect ownership:*							
Melalui AJN:/*Through AJN*:							
PT Nagata Dinamika ("ND")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 18 Januari 2012/ *January 18, 2012*	-	99,5%	99,5%	3.875.684	4.020.469
PT Nagata Bio Energi ("NBE")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 15 September 2014/ *September 15, 2014*	2020	98,8%	98,8%	3.562.398	3.847.762
PT Nagata Dinamika Hidro Buakayu Ulu ("NDHBU")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 28 Oktober 2014/ *October 28, 2014*	-	99%	99%	29.576	28.983
PT Nagata Dinamika Hidro Pongko ("NDHP")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 28 Oktober 2014/ *October 28, 2014*	-	99%	99%	18.330	17.963
PT Punggawa Nagata Dinamika Hidro ("PNDH")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 22 Januari 2014/ *January 22, 2014*	-	42,8%	42,8%	587.080	575.534
PT Nagata Biogas Dwienergi ("NBD")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 1 Juli 2015/ *July 1, 2015*	-	98,8%	98,8%	5.815	5.706
PT Andara Candria Energi ("ACE")	Industri pembangkit listrik energi yang terbarukan/ *Renewable energy IPP*	Jakarta, 15 November 2014/ *November 15, 2014*	-	99,1%	99,1%	7.468.241	1.277.935

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

TIA

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, TIA memiliki "Izin Usaha Pertambangan" ("IUP") sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

TIA

As of December 31, 2023 and 2022, TIA has mining business rights ("Izin Usaha Pertambangan"/ "IUP") as follows:

				Dalam Jutaan Ton - Tidak Diaudit/ *In Million Tonnes - Unaudited*			
Lokasi/ *Location*	**Kode Wilayah/*Area Code***	**Luas (ha)/ *Area (ha)***	**IUP Operasi Produksi/ *IUP Production Operations***	**Total Cadangan/ *Total Reserves***	**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ *For the Year Ended December 31, 2023***	**Total Akumulasi Produksi pada Tanggal 31 Desember 2023/*Total Accumulated Production as of December 31, 2023***	**Sisa Cadangan/ *Remaining Reserves***
Kecamatan/ *sub-district* Kusan Hulu dan/and Sungai Loba	TB.07 OKTPR 45	3.085	No. 503/53-IUP/ DPMPTSP/IV/IV/2019 Berlaku sampai 5 Maret 2031/ *Valid until March 5, 2031*	55,68	2,43	55,04	0,64

				Dalam Jutaan Ton - Tidak Diaudit/ *In Million Tonnes - Unaudited*			
Lokasi/ *Location*	**Kode Wilayah/*Area Code***	**Luas (ha)/ *Area (ha)***	**IUP Operasi Produksi/ *IUP Production Operations***	**Total Cadangan/ *Total Reserves***	**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *For the Year Ended December 31, 2022***	**Total Akumulasi Produksi pada Tanggal 31 Desember 2022/*Total Accumulated Production as of December 31, 2022***	**Sisa Cadangan/ *Remaining Reserves***
Kecamatan/ *sub-district* Kusan Hulu dan/and Sungai Loba	TB.07 OKTPR 45	3.085	No. 503/53-IUP/ DPMPTSP/IV/IV/2019 Berlaku sampai 5 Maret 2031/ *Valid until March 5, 2031*	56,16	3,41	52,61	3,55

Pada tanggal 31 Desember 2023, total cadangan didasarkan pada hasil perhitungan per 30 April 2023 yang dilakukan oleh PT Prasetya Abdi Persada Consultants, pihak eksternal, sebagaimana dijelaskan dalam laporannya tertanggal 9 Mei 2023.

As of December 31, 2023, total reserves are based on the results of calculation as of April 30, 2023, performed by PT Prasetya Abdi Persada Consultants, an external party, as described in its report dated May 9, 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022, total cadangan didasarkan pada hasil perhitungan per 30 September 2022 yang dilakukan oleh PT Prasetya Abdi Persada Consultants, pihak eksternal, sebagaimana dijelaskan dalam laporannya tertanggal 2 November 2022.

As of December 31, 2022, total reserves are based on the results of calculation as of September 30, 2022, performed by PT Prasetya Abdi Persada Consultants, an external party, as described in its report dated November 2, 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/255/DISTAMBEN/2013 tanggal 29 April 2013, TIA telah mendapatkan persetujuan penggabungan IUP Operasi Produksi Batubara.

Based on Decision Letter of Tanah Bumbu Regent No. 188.45/255/DISTAMBEN/2013 dated April 29, 2013, TIA has obtained approval for merging its Coal Production Operations IUP.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

TIA (lanjutan)

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 30 Oktober 2013 telah menetapkan status "*Clear and Clean*" ("CnC") No. 117/Bb/03/2013 atas IUP OP TIA. TIA telah memenuhi persyaratan dalam UU No. 4/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 23/2010 termasuk tidak terdapatnya tumpang tindih area IUP dengan pihak lain serta dokumentasi IUP yang telah sesuai dengan peraturan.

Pada tanggal 1 April 2019, berdasarkan surat nomor 503/53-IUP/DPMPTSP/IV/IV/2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menyetujui perpanjangan tahap kedua IUP Operasi Produksi Perusahaan yang akan berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2031.

Pada tanggal 11 April 2019, berdasarkan surat No SK.284/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019, Kementerian Kehutanan telah menyetujui perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH") TIA yang mulai berlaku tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2031.

Pada tanggal 31 Desember 2023, TIA telah memperoleh "Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan" ("IPPKH") dari Kementerian Kehutanan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

TIA (continued)

The Directorate General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate the Clear and Clean ("CnC") status No. 117/Bb/03/2013 for TIA's IUP OP on October 30, 2013. TIA has met the requirements set in Law No. 4/2009 and Government Regulation No. 23/2010 including no overlapping of IUP area and the IUP documentations are in accordance with the regulation.

On April 1, 2019, based on letter number 503/53-IUP/DPMPTSP/IV/IV/2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan has approved the extension of phase two on the Company's IUP Operation Production which will be valid until March 5, 2031.

On April 11, 2019, based on letter No SK.284/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2019, Ministry of Forestry has approved the extension of TIA's "Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan" ("IPPKH") which will be valid start from June 24, 2019 until March 5, 2031.

As of December 31, 2023, TIA has obtained permit "Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan" ("IPPKH") from the Ministry of Forestry as follows:

Lokasi/ *Location*	Luas (ha)/ *Area (ha)*	Nomor IPPKH/ *IPPKH Number*	Berlaku Sampai/ *Valid Until*
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan/ *Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province*	300	SK.284/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/ 2019	5 Maret 2031/ *March 5, 2031*
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan/ *Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province*	142	SK.1239/Menlhk/Setjen/ PLA.0//12/2022	17 Desember 2026/ *December 17, 2026*
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan/ *Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province*	309	SK.206/1/KLHK/2021	5 Maret 2031/ *March 5, 2031*
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan/ *Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province*	995	SK.212/1/KLHK/2021	5 Maret 2031/ *March 5, 2031*

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 483 Tahun 2010, TIA memperoleh persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri selama pelabuhan tersebut dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok TIA.

Based on a decision from Minister of Transportation No. 483 Tahun 2010, TIA obtained an approval to operate special port for internal use as long as the usage of such port is to support TIA's main business activities.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

MIFA

Pada tanggal 31 Desember 2022, MIFA memiliki IUP, sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

MIFA

As of December 31, 2022, MIFA has IUP, as follows:

Lokasi/ *Location*	Kode Wilayah/*Area Code*	Luas (ha)/ *Area (ha)*	IUP Operasi Produksi/ *IUP Production Operations*	Dalam Jutaan Ton - Tidak Diaudit/ *In Million Tonnes - Unaudited*			
				Total Cadangan/ *Total Reserves*	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *For the Year Ended December 31, 2022*	Total Akumulasi Produksi pada Tanggal 31 Desember 2022/*Total Accumulated Production as of December 31, 2022*	Sisa Cadangan/ *Remaining Reserves*
Meureubo, Aceh Barat/*West Aceh*	KW 020505/MB	3.134	No. 117.b Tahun 2011 Berlaku sampai 13 April 2025/ *Valid until April 13, 2025*	200,05	6,97	40,05	160,00

Pada tanggal 31 Desember 2022, total cadangan didasarkan pada hasil perhitungan per 31 Desember 2022 yang dilakukan oleh Hadi Firmansah S.T (Nomor CPI: 1604300-089), *Competent Person Indonesia*, pada bulan Desember 2022.

MIFA memperoleh Izin Eksplorasi No. 157 tanggal 30 Agustus 2003 untuk wilayah pertambangan seluas 3.000 hektar di Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Izin Pertambangan Eksploitasi No. 96 tanggal 1 Agustus 2005 dan Izin untuk Mengangkut dan Menjual Barang Tambang No. 95 tanggal 1 Agustus 2005 dari Bupati Aceh Barat.

MIFA juga memperoleh izin lokasi untuk wilayah penambangan batubara seluas 3.134 hektar di Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang terakhir diubah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 179 Tahun 2008, tanggal 31 Mei 2008.

Izin-izin tersebut terakhir kali diubah melalui IUP No. 117.b Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 untuk wilayah pertambangan seluas 3.134 hektar di Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.

As of December 31, 2022, total reserves are based on the result of calculation as of December 31, 2022, performed by Hadi Firmansah S.T (CPI Number: 1604300-089), Competent Person Indonesia, in December 2022.

MIFA holds Mining Exploration Permit No. 157 dated August 30, 2003 for a mining area of 3,000 hectares at Meureubo and Kaway XVI Sub-districts, West Aceh Regency, Aceh Province, Mining Exploitation Right No. 96 dated August 1, 2005 and Mining Right for Loading and Selling for Mining No. 95 dated August 1, 2005 from the Regent of West Aceh.

MIFA also has a location permit for coal mining area of 3,134 hectares in Meureubo and Kaway XVI Sub-districts, West Aceh Regency, Aceh Province which was last amended based on Decision Letter of West Aceh Regent No. 179 Tahun 2008, dated May 31, 2008.

The licenses were last amended by IUP No. 117.b Tahun 2011 dated March 30, 2011 for a mining area of 3,134 hectares at Meureubo Sub-districts, West Aceh Regency, Aceh Province.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

MIFA (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat No. 117.b Tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011, MIFA mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian yang akan berakhir pada tanggal 13 April 2025, dan izin dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun dan sudah termasuk rencana konstruksi 2 tahun.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 18 Juli 2014 telah menetapkan status "*Clear and Clean*" ("CnC") No. 234/Bb/03/2014 atas IUP OP MIFA. MIFA telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU No. 4/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 23/2010 termasuk tidak terdapatnya tumpang tindih area IUP dengan pihak lain serta dokumentasi IUP yang telah sesuai dengan peraturan.

BEL

Pada tanggal 31 Desember 2022, BEL memiliki IUP, sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

MIFA (continued)

Based on Decision Letter of West Aceh Regent No. 117.b Tahun 2011 dated March 30, 2011, MIFA has rights for construction, production, hauling and selling which included coal processing and refining which will expire on April 13, 2025, and could be extended twice by 10 years each, which already included 2 years of construction plans.

The Directorate General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate the Clear and Clean ("CnC") status No. 234/Bb/03/2014 for MIFA's IUP OP on July 18, 2014. MIFA has met the requirements set in Law No. 4/2009 and Government Regulation No. 23/2010 including no overlapping of IUP area and the IUP documentations are in accordance with the regulation.

BEL

As of December 31, 2022, BEL has IUP, as follows:

				Dalam Jutaan Ton - Tidak Diaudit/ *In Million Tonnes - Unaudited*			
Lokasi/ *Location*	**Kode Wilayah/ *Area Code***	**Luas (ha)/ *Area (ha)***	**IUP Operasi Produksi/ *IUP Production Operations***	**Total Cadangan/ *Total Reserves***	**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *For the Year Ended December 31, 2022***	**Total Akumulasi Produksi pada Tanggal 31 Desember 2022/*Total Accumulated Production as of December 31, 2022***	**Sisa Cadangan/ *Remaining Reserves***
Seunagan dan/*and* Suka Makmue, Nagan Raya	KW Sng 01 Ep 2007	1.495	No. 545/DPMPTSP/ 1355/IUP-OP/2017 Berlaku sampai 26 September 2027/ *Valid until September 26, 2027*	38,77	1,82	6,01	33,53

Pada tanggal 31 Desember 2022, total cadangan didasarkan pada hasil perhitungan per 31 Desember 2022 yang dilakukan oleh Hadi Firmansah S.T (Nomor CPI: 1604300-089), *Competent Person Indonesia*, pada bulan Desember 2022.

As of December 31, 2022, total reserves are based on the result of calculation as of December 31, 2022, performed by Hadi Firmansah S.T (CPI Number: 1604300-089), Competent Person Indonesia, in December 2022.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

BEL (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Kabupaten Nagan Raya No. 545/41/SK/IUP-OP/2010 tanggal 18 Maret 2010, BEL telah memperoleh persetujuan untuk perubahan izin pertambangan eksploitasi menjadi IUP dan BEL mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian yang akan berakhir pada tanggal 26 September 2017, dan izin dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 tahun dan sudah termasuk rencana konstruksi selama 2 tahun.

Izin tersebut terakhir kali diubah melalui Keputusan Gubernur Aceh No. 545/DPMPTSP/1355/IUP-OP/2017 tanggal 9 Juni 2017 untuk pemberian perpanjangan izin usaha seluas 1.495 hektar yang akan berakhir pada tanggal 26 September 2027 di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 28 Agustus 2014 telah menetapkan status "*Clear and Clean*" ("CnC") No. 255/Bb/03/2014 atas IUP OP BEL. BEL telah memenuhi persyaratan dalam UU No. 4/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 23/2010 termasuk tidak terdapatnya tumpang tindih area IUP dengan pihak lain serta dokumentasi IUP yang telah sesuai dengan peraturan.

MDB

Berdasarkan Akta Notaris Bayu Nirwana Sari S.H., M.Kn., No. 33 tanggal 16 September 2021, para pemegang MDB menyetujui pengalihan saham sejumlah 15.500 saham yang dimiliki oleh Reswara kepada PT Inti Murni Kencana ("IMK"), kepentingan non-pengendali, dengan harga transaksi sebesar Rp121,0 miliar (setara dengan AS$8.500.000) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Saham yang telah disepakati pada tanggal 18 Oktober 2021. Transaksi ini menyebabkan kepemilikan Reswara atas MDB turun menjadi 50%.

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

BEL (continued)

Based on Nagan Raya Regency Decree No. 545/41/SK/IUP-OP/2010 dated March 18, 2010, BEL obtained an approval for a change of its mining exploitation right to become IUP and BEL has rights for construction, production, hauling and selling which included coal processing and refining which will expire on September 26, 2017, and could be extended twice by 10 years each, which already included 2 years of construction plans.

The license was last amended by Aceh Governor Decree No. 545/DPMPTSP/1355/IUP-OP/2017 dated June 9, 2017 for business right extension of 1,495 hectares which will expire on September 26, 2027 at Seunagan Sub-districts, Nagan Raya Regency, Aceh Province.

The Directorate General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources stipulate on the Clear and Clean ("CnC") status No. 255/Bb/03/2014 for BEL's IUP OP on August 28, 2014. BEL has met the requirements set in Law No. 4/2009 and Government Regulation No. 23/2010 including no overlapping of IUP area and the IUP documentations are in accordance with the regulation.

MDB

Based on Notarial Deed of Bayu Nirwana Sari S.H., M.Kn., No. 33 dated September 16, 2021, the shareholders of MDB approved the transfer of 15,500 shares owned by Reswara to PT Inti Murni Kencana ("IMK"), a non-controlling interests, with transaction value amounting to Rp121.0 billion (equivalents to US$8,500,000) which have been agreed in accordance with the Sales and Purchase of Shares Agreement dated October 18, 2021. Accordingly, Reswara's share ownership to MDB decreased to 50%.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

MDB (lanjutan)

Pada tanggal 18 Oktober 2021, Reswara dan IMK menandatangani Kesepakatan Bersama, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa Reswara diberikan kekuasaan dan hak penuh terkait pengambilan keputusan atas jalannya operasional dan kebijakan terkait penentuan imbal hasil dari MDB dan entitas anaknya ("Grup MDB"), sehingga Reswara masih memegang kendali atas Grup MDB.

Selisih antara imbalan yang diterima dan nilai tercatat 20% dari investasi di MDB sebesar AS$8.504.905 dicatat sebagai akun "Selisih dari Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, Perusahaan telah menyampaikan surat No. ABM-CSC/036/RDN/X/2021 ke OJK atas keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik sesuai dengan ketentuan Peraturan POJK No.31/POJK.04/2015.

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 20 April 2022, para pemegang saham MDB menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah AS$12.000.000 yang diambil dari saldo laba tahun buku 2021.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada bulan Mei, Juli dan September 2022, Dewan Komisaris menyetujui Direksi MDB untuk memberikan persetujuan pembagian dividen tunai masing-masing AS$6.000.000, AS$4.000.000 dan AS$10.000.000 yang diambil dari saldo laba periode interim 2022.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada bulan April dan Juni 2023, Dewan Komisaris menyetujui Direksi MDB untuk memberikan persetujuan pembagian dividen tunai masing-masing sebesar AS$14.000.000 dan AS$8.000.000 yang diambil dari saldo laba periode interim 2023.

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

MDB (continued)

On October 18, 2021, Reswara and IMK signed Collective Agreement, whereby both parties agreed that Reswara was given full power and rights regarding decision-making on the course of operations and policies related to determining returns from MDB and its subsidiaries ("MDB Group"), therefore Reswara still has control over the MDB Group.

The difference between the consideration received and carrying amount of 20% of investments in MDB amounting to US$8,504,905 should be recorded as "Difference Arising from Transactions with Non-controlling Interests" account in the consolidated statement of financial position.

On October 21, 2021, the Company have submitted a letter No. ABM-CSC/036/RDN/X/2021 to OJK for the disclosure of information that the public needs to know in accordance with POJK No.31/POJK.04/2015.

Based on Notarial Deed No. 24 dated April 20, 2022, MDB shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to US$12,000,000 taken from retained earnings for the 2021 financial year.

Based on the Decisions of the Board of Commissioners in May, July and September 2022, the Board of Commissioners approved the Board of Directors of MDB to approve the distribution of cash dividends of US$6,000,000, US$4,000,000 and US$10,000,000, respectively to be taken from retained earnings for the interim period 2022.

Based on the Decisions of the Board of Commissioners in April and June 2023, the Board of Commissioners approved the distribution of cash dividends of US$14,000,000 and US$8,000,000, respectively, taken from retained earnings for the interim period 2023.

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

MDB (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., No. 15 tanggal 26 Desember 2023, para pemegang saham MDB menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar AS$22.200.000 yang diambil dari saldo laba tahun buku 2022.

Pada tanggal 11 Desember 2023, Reswara dan IMK menandatangani Amandemen Kesepakatan Bersama, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa IMK diberikan kekuasaan dan hak penuh terkait pengambilan keputusan atas jalannya operasional dan kebijakan terkait penentuan imbal hasil dari Grup MDB, efektif tanggal 29 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 2 Januari 2024, Perusahaan telah menyampaikan surat No. ABM-CSC/001/RDN/I/2024 ke OJK atas keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik sesuai dengan ketentuan Peraturan POJK No.31/POJK.04/2015.

Berdasarkan laporan valuasi KJPP Stefanus, Tonny, Hardi dan Rekan tanggal 21 Maret 2024, jumlah nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang dipertahankan atas 50% kepemilikan saham Grup MDB pada tanggal 29 Desember 2023 adalah sebesar AS$89.569.084.

Rincian perhitungan keuntungan dari hilangnya pengendalian atas Grup MDB adalah sebagai berikut:

Nilai wajar investasi pada entitas asosiasi yang dipertahankan	89.569.084
Nilai tercatat aset neto Grup MDB yang dihentikan pengakuannya - setelah eliminasi	78.714.389
Keuntungan dari hilangnya pengendalian atas Grup MDB	**10.854.695**

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

MDB (continued)

Based on Notarial Deed of Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., No. 15 dated December 26, 2023, the shareholders of MDB agreed to distribute dividends amounting to US$22,200,000 taken from retained earnings for the 2022.

On December 11, 2023, Reswara and IMK signed Amendment of Collective Agreement, whereby both parties agreed that IMK was given full power and rights regarding decision-making on the course of operations and policies related to determining returns from MDB Group, effective December 29, 2023.

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements.

On January 2, 2024, the Company have submitted a letter No. ABM-CSC/001/RDN/I/2024 to OJK for the disclosure of information that the public needs to know in accordance with POJK No.31/POJK.04/2015.

Based on the valuation report of KJPP Stefanus, Tonny, Hardi dan Rekan dated March 21, 2024, fair value of investment in associates retained for the 50% ownership in MDB Group on December 29, 2023 was US$89,569,084.

The detail calculation of gain on lost control over MDB Group is as follows:

Fair value of investment in associates retained	
Carrying amount of MDB Group net assets derecognized - after elimination	
Gain on lost control over MDB Group	

1. UMUM (lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

MDB (lanjutan)

Keuntungan dari hilangnya pengendalian atas Grup MDB, dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

RJR

Berdasarkan Akta Notaris Bayu Nirwana Sari S.H., M.Kn., No. 35 tanggal 29 Juli 2022 Reswara dan SSB mendirikan RJR dengan total modal disetor awal sebesar Rp250.000.000 dengan komposisi masing-masing sebesar 99,60% dan 0,40%. Pendirian RJR tersebut telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0051881.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 2 Agustus 2022.

PNDH

Keuntungan Berdasarkan Akta Notaris Bayu Nirwana Sari S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 8 Juli 2021, para pemegang PNDH menyetujui pengalihan saham sejumlah 2.588.964 saham yang dimiliki oleh Asian Energy Hydro Power Pte. Ltd., Singapura (pihak ketiga) kepada ND, dengan nilai transaksi sebesar Rp2,3 miliar (setara dengan AS$162.805). Transaksi ini menyebabkan kepemilikan ND atas PNDH naik menjadi 84%.

Selisih antara imbalan yang dibayarkan dan nilai tercatat 41,16% dari investasi di PNDH sebesar (AS$174.866) dicatat sebagai akun "Selisih dari Transaksi dengan Kepentingan Non-pengendali" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

c. Structure of the Subsidiaries (continued)

MDB (continued)

Gain on lost control over MDB Group has recorded as part of "Other income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023.

RJR

Based on Deed of Notary Bayu Nirwana Sari S.H., M.Kn., No. 35 dated July 29, 2022 Reswara and SSB established RJR with a total initial paid-up capital of Rp250,000,000 with a composition of 99.60% and 0.40%, respectively. The establishment of the RJR has obtained the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0051881.AH.01.01. Tahun 2022 dated August 2, 2022.

PNDH

Based on Notarial Deed of Bayu Nirwana Sari S.H., M.Kn., No. 21 dated July 8, 2021, the shareholders of PNDH approved the transfer of 2,588,964 shares owned by Asian Energy Hydro Power Pte. Ltd., Singapore (third party) to ND, with transaction value amounting to Rp2.3 billion (equivalents to US$162,805). Accordingly, ND's share ownership to PNDH increase to 84%.

The difference between the consideration paid and carrying amount of 41.16% of investments in PNDH amounting to (US$174,866) recorded as "Difference Arising from Transactions with Non-controlling Interests" account in the consolidated statement of financial position.

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Boards of Commissioners and Directors and Audit Committee of the Company are as follows:

Dewan Komisaris/*Board of Commissioners*:		
Komisaris Utama	Rachmat Mulyana Hamami	*President Commissioner*
Komisaris	Mivida Hamami	*Commissioner*
Komisaris Independen	Arief Tarunakarya Surowidjojo	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Manggi Taruna Habir	*Independent Commissioner*
Direksi/*Board of Directors*:		
Direktur Utama	Achmad Ananda Djajanegara	*President Director*
Direktur	Adrian Erlangga	*Director*
Direktur	Haris Mustarto	*Director*
Komite Audit/*Audit Committee*:		
Ketua	Manggi Taruna Habir	*Chairman*
Anggota	Ferry A.J Alis	*Member*
Anggota	Agus Yulianto	*Member*

Pembentukan Komite Audit Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015.

The establishment of the Company's Audit Committee is in compliance with Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 55/POJK.04/2015.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mempunyai jumlah karyawan tetap masing-masing sebanyak 7.725 orang dan 6.982 orang dan karyawan kontrak sebanyak 3.298 dan 2.758 orang (tidak diaudit).

As of December 31, 2023 and 2022, the Group had a total of 7,725 and 6,982 permanent employees and 3,298 and 2,758 contract employees (unaudited), respectively.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 Maret 2024.

e. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 27, 2024.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Grup menggunakan Dolar Amerika Serikat ("AS$") sebagai mata uang penyajian yang juga merupakan mata uang fungsional kecuali untuk beberapa entitas anak.

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan dari setiap entitas yang terdapat dalam Grup disajikan dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional").

Perubahan mata uang pelaporan Perusahaan dan entitas anak tertentu telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Presentation of the Consolidated Financial Statements

*The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("*SAK*"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan* Ikatan Akuntan Indonesia *or* "DSAK IAI"*) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*" or "* OJK*").*

The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis, and the measurement basis used is historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the relevant Notes to the Consolidated Financial Statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The Group uses United States dollar ("US$") as the presentation currency, which is also the functional currency except for certain subsidiaries.

Accounts included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency").

The change of reporting currency of the Company and certain subsidiaries has been approved by the Directorate General of Tax ("DGT").

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian item apa pun dalam laporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

b. Changes in Accounting Policies

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

Amendment of PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use

The amendments prohibit entities from deducting from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup: (lanjutan)

Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan (lanjutan)

Grup menerapkan amandemen tersebut secara retrospektif hanya untuk aset tetap yang dibuat supaya aset siap digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas item-item yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal.

Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group: (continued)

Amendment of PSAK 16: Fixed Assets - Proceeds before Intended Use (continued)

The Group applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented.

Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Amendments to PSAK 46: Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup: (lanjutan)

Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development* ("OECD"), dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in Accounting Policies (continued)

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group: (continued)

Amendments to PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development ("OECD"), and include:

- *An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and*
- *Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.*

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

(a) kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*;
(b) eksposur, atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan

(c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

(a) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*;
(b) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain; dan
(c) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

(a) power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee;
(b) exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
(c) the ability to use its power over the investee to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company and its subsidiary considers all relevant facts and circumstances in assessing whether they has power over an investee, including:

(a) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee;
(b) Rights arising from other contractual arrangements; and
(c) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during a certain year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan output.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Business Combinations and Goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan output, dan input yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan output.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 71, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 71 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi item yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business Combinations and Goodwill (continued)

The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 71, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 71. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 71 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business Combinations and Goodwill (continued)

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

e. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan direalisasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, atau

iv) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business Combinations and Goodwill (continued)

Business combinations under common control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

e. Current and non-current classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

i) expected to be realized, or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) expected to be realized within 12 (twelve) months after the reporting period, or
iv) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 (twelve) months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period, or
iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 (twelve) months after the reporting period.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Klasifikasi lancar dan tidak lancar (lanjutan)

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan akun-akun kas yang tidak dibatasi penggunaannya.

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

g. Aset Keuangan Lancar Lainnya

Aset keuangan lancar lainnya terdiri dari:

a. Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penempatan.

b. Kas yang dibatasi penggunaannya yang merupakan kas di bank yang telah ditentukan penggunaannya atau dibatasi penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.

h. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 33.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Current and non-current classification (continued)

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and non-current liabilities.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents represents cash accounts which are not restricted in use.

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 (three) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

g. Other Current Financial Assets

Other current financial assets consist of:

a. Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not exceeding 1 (one) year at the time of placement.

b. Restricted cash represent cash in banks which have been restricted for use or which cannot be used freely.

h. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 33.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah akhir periode yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuai), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah akhir periode yang bukan peristiwa penyesuaian diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian, jika material.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

i) Bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;

ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban *overhead* berdasarkan kapasitas operasi normal, namun tidak termasuk biaya pinjaman.

Sehubungan dengan pembelian bahan baku, biaya perolehan awal persediaan termasuk pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas kualifikasian, diakui dalam PKL.

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Events after the Reporting Period

Post period-end events that provide additional information about the Group's financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the Notes to the consolidated financial statements, when material.

j. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follows:

i) Raw materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;

ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity, but excluding borrowing costs.

Initial cost of inventories includes the transfer of gains and losses on qualifying cash flow hedges, recognized in OCI, in respect of the purchases of raw materials.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai penyewa

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset Hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi pada Catatan 2n - Penurunan nilai aset non-keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right of use assets representing the right to use the underlying assets.

Right of use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

The right of use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Note 2n - Impairment of non-financial assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the implicit interest rate in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

m. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Leases (continued)

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

m. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation (except for land that is not depreciated) and impairment losses, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied.

All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

	Tahun/*Years*	
Jalan dan infrastruktur	10	*Road and infrastructure*
Bangunan dan prasarana	5 - 20	*Building and improvements*
Kendaraan	3 - 8	*Vehicles*
Peralatan dan inventaris kantor	3 - 5	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kapal	3 - 16	*Vessels*
Mesin dan peralatan	3 - 14	*Machinery and equipment*

Entitas anak tertentu (CK) menghitung penyusutan untuk mesin dan peralatan tertentu, dengan metode durasi pemakaian. Estimasi durasi pemakaian atas mesin dan peralatan tertentu antara 6.000 jam sampai dengan 150.000 jam.

Certain subsidiaries (CK) computed depreciation for certain machinery and equipment, based on duration of use method. Estimated duration of use for certain machinery and equipment range from 6,000 hours to 150,000 hours.

Mulai dari 2022, CK mengubah kebijakan akuntansinya untuk depresiasi kelompok aset tetap “mesin dan peralatan” menjadi metode garis lurus. Menurut kajian manajemen, metode garis lurus diharapkan akan lebih menggambarkan kesesuaian antara nilai buku bersih dan kondisi fisik mesin dan peralatan. Umur ekonomis mesin dan peralatan diestimasi berkisar antara 2 sampai 14 tahun.

Starting 2022, CK changed its accounting policy for depreciating the "machinery and equipment" group of fixed assets to straight-line method. Based on management's assessment, the straight-line method is more appropriate in reflecting the net book value of machinery and equipment based on its physical condition. The economic useful life of machinery and equipment is estimated to be between 2 to 14 years.

Dampak dari perubahan metode penyusutan mesin dan peralatan terhadap beban penyusutan CK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar AS$2.045.666 (dari AS$23.846.444 dengan metode lama menjadi AS$25.892.109 dengan metode baru). Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai buku bersih atas mesin dan peralatan yang dimiliki sebelum diberlakukannya perubahan metode penyusutan adalah sebesar AS$138.837.859 dan akan disusutkan dengan estimasi sisa umur manfaat berkisar antara 1 sampai 13 tahun.

The impact of the change in the depreciation method for machinery and equipment on CK’s depreciation expense for the year ended December 31, 2022, amounted to US$2,045,666 (from US$23,846,444 using the previous method to US$25,892,109 using the new method). As of December 31, 2022, the net book value of machinery and equipment, which were owned before the change in depreciation method was implemented, amounted to US$138,837,859 and will be depreciated with an estimated remaining useful life ranging from 1 to 13 years.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Tanah, termasuk biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat masa berlakunya selesai.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Fixed Assets (continued)

Construction in-progress is stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statement of financial position. The accumulated costs of construction in-progress will be reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is substantially completed and the constructed asset is ready for its intended use.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

Residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

Land, including legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially, is stated at cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable the titles of land rights can be renewed/extended upon expiration.

The extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP are deferred and amortized over the shorter between the land rights' legal life and the economic life of the land, and presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

Kecuali seperti disebutkan pada Catatan 12, 13, dan 14, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai pada aset tetap dan aset non-keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Impairment of Non-financial Assets (continued)

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

Except as described in Notes 12, 13, and 14, management believes that there is no indication of impairment in values for fixed assets and other non-current non-financial assets presented in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Kapitalisasi Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Pengakuan Pendapatan

Grup menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Capitalization of Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

p. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

Revenue Recognition

Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, yang pada umumnya terjadi pada saat yang bersamaan dengan pengiriman dan penerimaan barang.

Pendapatan Jasa

- Pendapatan dari jasa pertambangan dan penyewaan mesin pembangkit tenaga listrik diakui pada saat jasa diberikan.
- Pendapatan dari jasa logistik, jasa penanganan kargo dan kontainer, dan dari kegiatan keagenan dan terminal diakui pada saat jasa diberikan.
- Pendapatan sewa kapal (*time charter*) diakui selama masa perjanjian sewa kapal. Pendapatan dari jasa pengangkutan batu bara diakui berdasarkan jumlah muatan dalam metrik ton.
- Pendapatan dari penyediaan jasa *forwarding* angkutan laut diakui pada saat jasa diberikan.

Aset kontrak adalah hak untuk mendapatkan imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan ke pelanggan. Jika Grup melaksanakan transfer barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk imbalan yang diperoleh yang bersyarat.

Aset kontrak pada awalnya diakui untuk pendapatan yang diperoleh dari jasa instalasi karena penerimaan imbalan bergantung pada keberhasilan penyelesaian instalasi. Pada saat penyelesaian instalasi dan penerimaan oleh pelanggan, jumlah yang diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Revenue Recognition (continued)

Sales of Goods

Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's products is recognized at the time when the significant risks and rewards of ownership of the products have been passed to the buyer, which generally coincides with delivery and acceptance of goods.

Revenues from Services

- *Revenues from mining services and rental of power engine are recognized when the services are rendered.*
- *Revenues from logistic services, container equipment and cargo handling services, and from agency and terminal activities are recognized when the services are rendered.*
- *Time charter revenue is recognized over the period of the time charter agreement. Revenue from coal affreightment is recognized based on metric ton measurement.*
- *Revenues from rendering sea freight forwarding services are recognized when the services are rendered.*

A contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Group transfers goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for the earned consideration that is conditional.

A contract asset is initially recognized for revenue earned from installation services because the receipt of consideration is conditional on successful completion of the installation. Upon completion of the installation and acceptance by the customer, the amount recognized as contract assets is reclassified to trade receivables.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan Jasa (lanjutan)

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Mengacu pada kebijakan akuntansi aset keuangan dalam bagian 2v Instrumen keuangan - pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Penghasilan/Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu tingkat suku bunga digunakan mendiskontokan secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan arus kas di masa yang akan datang selama umur ekspektasian dari instrumen keuangan, atau jika lebih sesuai, selama periode yang lebih singkat, untuk jumlah tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Revenue Recognition (continued)

Revenues from Services (continued)

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in section 2v Financial instruments - initial recognition and subsequent measurement.

Interest Income/Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expense Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Transaksi dan saldo Mata Uang Asing

Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya, jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Untuk tujuan konsolidasi, aset dan liabilitas dari entitas anak tertentu yang dicatat dalam Rupiah sebagai mata uang fungsionalnya, dijabarkan ke Dolar Amerika Serikat ("AS$") dengan menggunakan kurs tukar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Akun-akun pendapatan dan biaya dijabarkan dengan menggunakan kurs tukar rata-rata periode tersebut. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain.

Transaksi dalam mata uang selain AS$ dicatat ke dalam mata uang AS$ berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain AS$ disesuaikan ke dalam AS$ menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan di tahun berjalan.

Kurs yang digunakan untuk menjabarkan aset dan liabilitas moneter pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency, if indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgments to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

For consolidation purpose, assets and liabilities of certain subsidiaries which are recorded in Rupiah as the functional currency, are translated into United States dollar ("US$") using the prevailing exchange rates at such statement of financial position date. Income and expenses accounts are translated using prevailing average exchange rate for the period. Differences arise from such exchange rates are presented as part of other comprehensive income.

Transactions involving other currencies other than US$ are recorded in US$ at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US$ are adjusted to US$ using the middle rates published by Bank Indonesia at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to current year.

The exchange rates used to translate the monetary assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
1 Euro (EUR)/AS$1	1,111800	1,062425	*1 Euro (EUR)/US$1*
1 Dolar Australia (AUD)/AS$1	0,685326	0,672621	*1 Australian Dollar (AUD)/US$1*
1.000 Rupiah Indonesia (Rp)/AS$1	0,064867	0,063569	*1,000 Indonesian Rupiah (Rp)/US$1*
1 Dolar Singapura (SGD)/AS$1	0,759706	0,741148	*1 Singapore Dollar (SGD)/US$1*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009, penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan final. Peraturan ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2008.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.04/1996 dan No. 417/KMK.04/1996 tanggal 14 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. 29/PJ.4/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pendapatan dari jasa pengangkutan dan sewa kapal yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan bersifat final masing-masing sebesar 1,20% dan 2,64% dari pendapatan, serta biaya sehubungan dengan kegiatan di atas tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction are recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Based on Government Regulation No. 51 Tahun 2008 dated July 20, 2008 which was amended by Government Regulation No. 40 Tahun 2009 dated June 4, 2009, income derived from construction services is subject to final income tax. This regulation is effective on August 1, 2008.

Based on the Decision Letters No.416/ KMK.04/1996 and No.417/KMK.04/1996 dated June 14, 1996 of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and Circular Letter No. 29/PJ.4/1996 dated August 13, 1996 of the Directorate General of Taxation, revenues from freight operations and charter of vessels are subject to final income tax computed at 1.20% and 2.64% of the revenues for domestic and foreign companies, respectively, and the related costs and expenses are considered non-deductible for income tax purposes.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final (lanjutan)

Pendapatan entitas anak tertentu dikenakan pajak bersifat final sebesar 1,20% oleh karena entitas anak yang bersangkutan merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri.

Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan yang diakui pada tahun berjalan untuk tujuan akuntansi dan dicatat sebagai "Beban Pajak Final" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selisih antara pajak penghasilan final yang telah dibayar dengan beban pajak penghasilan final pada tahun berjalan diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam SPT sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation (continued)

Final Tax (continued)

Certain subsidiaries' revenues are subject to final income tax at 1.20% since those subsidiaries are domestic shipping companies.

Current tax expense related to income subject to final income tax is recognized in proportion to total income recognized during the current year for accounting purposes and is recorded as "Final Tax Expense" in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The difference between the final income tax paid and the final income tax expense for the current year is recognized as prepaid tax or tax payable.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation (continued)

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognized subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban dan aset yang diakui neto atas jumlah PPN, kecuali:
- Ketika PPN yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat dikreditkan menurut ketentuan perpajakan. Dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban yang bersangkutan.
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

s. Properti Pertambangan

Pengeluaran Sebelum Perolehan Izin

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan izin penambangan dibebankan pada saat terjadinya.

Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai "aset eksplorasi dan evaluasi" untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan terkait masih berlangsung.

Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset takberwujud.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Taxation (continued)

Value Added Tax

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT, except:
- *When the VAT incurred on purchase of assets or services is not recoverable according to tax regulations. In which case the VAT is recognized as the part of the cost of acquisition of the asset or as the part of the related expense item.*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the consolidated statement of financial position.

s. Mining Properties

Pre-license Costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

Exploration and Evaluation Expenditures

Exploration and evaluation expenditures are capitalized and recognized as "exploration and evaluation assets" for each area of interest when mining rights are obtained and still valid and: (i) the costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest, or (ii) where activities in the area of interest have not reached the stage that allow a reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to, the area of interest are continuing.

These expenditures include materials and fuel used, surveying costs, drilling and stripping costs before the commencement of production stage and payments made to contractors. Exploration and evaluation assets are subsequently measured using cost model and classified as tangible assets, unless they are qualified to be recognized as intangible asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Properti Pertambangan (lanjutan)

Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi (lanjutan)

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset".

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Properti Pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

Pengeluaran untuk Tambang dalam Pengembangan

Pengeluaran untuk tambang dalam pengembangan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu daerah pengembangan setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi pada area yang bersangkutan, dikapitalisasi ke "Tambang dalam Pengembangan" sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi.

Tambang pada Tahap Produksi

Pada saat tambang dalam pengembangan diselesaikan dan tahap produksi dimulai, tambang dalam pengembangan ditransfer ke "Tambang pada Tahap Produksi" pada akun "Properti Pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Deplesi tambang pada tahap produksi adalah berdasarkan metode "unit produksi" sejak daerah pengembangan tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya IUP.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Mining Properties (continued)

Exploration and Evaluation Expenditures (continued)

The ultimate recoupment of deferred exploration expenditure is dependent upon successful development and commercial exploitation of the related area of interest. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of the assets may exceed its recoverable amount. In such a case, an entity shall measure, present and disclose any resulting impairment losses in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2014), "Impairment of Assets".

Exploration and evaluation assets are transferred to "Mines under Construction" in the "Mining Properties" account after the mines are determined to be economically viable to be developed.

Expenditures for Mines under Construction

Expenditures for mines under construction and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of production stage in the respective area, are capitalized to "Mines under Construction" as long as they meet the capitalization criteria.

Producing Mines

Upon completion of mines under construction and the production stage is commenced, the mines under construction are transferred into "Producing Mines" in the "Mining Properties" account, which are stated at cost, less depletion and accumulated impairment losses.

Depletion of producing mines are based on "unit-of-production" method from the date of commercial production of the respective area of interest over the lesser of the life of the mine and the remaining terms of IUP.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Properti Pertambangan (lanjutan)

Aktivitas Pengupasan Tanah

Grup menerapkan ISAK No. 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Pertambangan Terbuka", yang mengatur akuntansi biaya pemindahan material yang timbul dalam aktivitas penambangan terbuka selama tahap produksi.

Biaya pengupasan tanah pada tahap produksi dapat dikapitalisasi dalam aset aktivitas pengupasan lapisan tanah apabila memenuhi semua kriteria berikut:

a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan (peningkatan akses menuju lapisan batubara) yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah akan mengalir kepada Grup;

b) Grup dapat mengidentifikasi komponen lapisan batubara yang aksesnya telah ditingkatkan; dan

c) biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah pada awalnya diukur pada biaya perolehan, biaya ini merupakan biaya-biaya yang secara langsung terjadi untuk melakukan aktivitas pengupasan lapisan tanah yang meningkatkan akses terhadap komponen batubara yang teridentifikasi, ditambah alokasi biaya *overhead* yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, aset tersebut disusutkan atau diamortisasi menggunakan dasar yang sistematis, selama masa manfaat yang diharapkan dari komponen mineral yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah.

Perubahan atas estimasi teknis dan/atau parameter ekonomi lain yang mempengaruhi cadangan batubara akan mempengaruhi kapitalisasi dan amortisasi lanjutan dari biaya pengupasan lapisan tanah. Perubahan estimasi ini akan diperlakukan prospektif sejak tanggal perubahan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Mining Properties (continued)

Stripping Activities

The Group applied ISAK No. 29, "Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mining", which prescribes the accounting for costs of waste removal incurred in the production phase of a surface mines.

Stripping costs in the production phase are capitalized as stripping activity asset where all of the following criteria are met:

a) it is probable that the future economic benefit (improved access to the coal seam) associated with the stripping activity will flow to the Group;

b) the Group can identify the component of the coal seam for which access has been improved; and

c) the costs relating to the stripping activity associated with that component can be measured reliably.

The stripping activity asset should be initially measured at cost, those costs directly incurred to perform the stripping activity that improve access to the identified component of coal, plus an allocation of directly attributable overhead costs.

After initial recognition, the asset is depreciated or amortized on a systematic basis, over the expected useful life of the identified component of the coal seam that becomes more accessible as a result of the stripping activity.

Changes in the estimated technical and/or other economic parameters that impact coal reserves will also have an impact upon capitalization and subsequent amortization of the deferred stripping costs. These changes in estimates are accounted for prospectively from the date of change.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Properti Pertambangan (lanjutan)

Properti Pertambangan dari Kombinasi Bisnis

Properti pertambangan merupakan penyesuaian nilai wajar properti pertambangan yang diperoleh pada tanggal akuisisi dan dinyatakan sebesar harga perolehan. Properti pertambangan diamortisasi selama umur manfaat properti dengan menggunakan metode "unit produksi" sejak tanggal akuisisi berdasarkan basis estimasi cadangan. Umur manfaat properti pertambangan yang timbul dari hak kontraktual tidak lebih lama dari masa hak kontraktual tersebut, kecuali jika hak kontraktual dapat diperbarui dengan tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Perubahan dalam estimasi cadangan dilakukan secara prospektif, dimulai sejak awal periode terjadinya perubahan.

Aset takberwujud diperoleh dari kombinasi bisnis dan diakui terpisah dari *goodwill* dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui pajak tangguhan yang timbul dari properti pertambangan.

t. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika kemungkinan besar tidak terjadi arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Mining Properties (continued)

Mining Properties from Business Combination

Mining properties represent the fair value adjustment of mining properties acquired at the date of acquisition and are stated at cost. Mining properties are amortized over the life of the property using "unit-of-production" method from the date of the acquisition based on estimated reserves. The useful life of mining properties pertaining to contractual rights is not longer than the validity period of such rights, except if the contractual rights can be renewed upon expiration without incurring significant costs for such renewal. Changes in estimated reserves are accounted for on a prospective basis, from the beginning of the period in which the change occurs.

Intangible assets acquired in a business combination and recognized separately from goodwill are initially recognized at their fair value at the acquisition date.

The Group recognizes the deferred tax arising from mining properties.

t. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Provisi (lanjutan)

Restorasi, rehabilitasi dan pengeluaran lingkungan lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Grup memiliki kewajiban tertentu untuk memulihkan dan merehabilitasi daerah pertambangan setelah selesai produksi. Kewajiban tersebut diakru menggunakan metode "unit produksi" sepanjang umur tambang sehingga akrual tersebut akan cukup untuk memenuhi kewajiban ketika produksi dari sumber daya selesai. Perubahan dalam estimasi biaya restorasi dan lingkungan yang harus dibayarkan dicatat secara prospektif selama sisa umur tambang.

u. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi:

Program Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan dan entitas-entitas anak tertentu, mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Pembayaran program manfaat pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada saat pekerja telah memberikan jasa mereka, dimana mereka memperoleh hak atas iuran. Pembayaran kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan diperhitungkan sebagai pembayaran untuk program iuran pasti di mana kewajiban Perusahaan dan anak perusahaan tertentu berdasarkan program tersebut setara dengan kewajiban yang timbul dalam program manfaat pensiun iuran pasti.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Provisions (continued)

Restoration, rehabilitation, and other environmental expenditures incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.

The Group has certain obligations to restore and rehabilitate mining areas following the completion of production. Such obligations are being accrued using the "unit-of-production" method over the life of the mine so that the accrual will be adequate to meet those obligations once production from the resource is completed. Changes in estimated restoration and environmental costs to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

u. Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits of the Group consists of the following:

Defined Contribution Pension Plan

The Company's and certain subsidiaries have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognised as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions. Payments made to Dana Pensiun Lembaga Keuangan are accounted for as payments to defined contribution plans where the obligations of Company and certain subsidiaries under the plans are equivalent to those arising in a defined contribution retirement benefit plan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi: (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Imbalan Pasca-kerja Lainnya

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "*Projected Unit Credit*".

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun berupa *jubilee* yang tidak didanai.

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Grup menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Long-term Employee Benefits Liability (continued)

Long-term employee benefits of the Group consists of the following: (continued)

Defined Benefit Pension Plan, Labor Law and Other Post-employment Benefits

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Company Regulation, Collective Labor Agreement and Job Creation Law No. 11/2020 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

The Group also provides long-term employee benefits other than pension named unfunded jubilee.

Termination Benefits

Termination benefits are payable whenever an employee's employment is terminated before the normal retirement date. The Group recognizes termination benefits when it is demonstrably committed to terminate the employment of current employees according to a detailed formal plan with a low possibility of withdrawal.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Intepretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19*). Grup telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Mulai 2022 berdasarkan siaran pers, Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material di bawah program tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Long-term Employee Benefits Liability (continued)

Changes in Accounting Policy

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board (DSAK IAI) issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Imbalan Kerja which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). The Group has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

In prior years, the Group attribute benefit under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. Starting from 2022, based on the press release, the Group change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2p.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2p.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or Fair Value through Other Comprehensive Income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang non-usaha, aset lancar lainnya tertentu, dan aset tidak lancar lainnya tertentu.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes are cash and cash equivalents, other current financial assets, trade receivables, non-trade receivables, certain other current assets, and certain other non-current assets.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir; Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired; Or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dilklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, dan utang lain-lain jangka panjang - pihak ketiga.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, bonds payable, long-term banks loan, lease liabilities, and long-term non-trade payables - third parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

w. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode berjalan, yaitu 2.753.165.000 saham.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

w. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The amount of earnings per share is calculated by dividing the income for the period attributable to owners of the parent company by the weighted-average number of shares outstanding during the current period of 2,753,165,000 shares.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Biaya Emisi Saham dan Obligasi

Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang terhadap "Tambahan Modal Disetor - Neto" pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan konsolidasian.

Biaya emisi obligasi dan sukuk ijarah dikurangkan dari hasil penerbitan obligasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai diskonto dan diamortisasi menggunakan metode SBE selama jangka waktu obligasi dan sukuk ijarah.

Biaya emisi obligasi wajib tukar dicatat sebagai pengurang modal.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi intragrup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

z. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Shares and Bond Issuance Costs

Shares issuance costs are presented as a reduction to "Additional Paid-in Capital - Net" under the equity section of the consolidated statement of financial position.

Bonds and sukuk ijarah issuance costs are directly deducted from the issue proceeds in the consolidated statement of financial position as a discount and are amortized using the EIR method over the period of the bonds and sukuk ijarah.

Issuance costs of mandatory convertible bond are accounted for as a deduction from equity.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and transactions are eliminated as part of consolidation process.

z. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Aset takberwujud

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal, tidak termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi, tidak dikapitalisasi dan pengeluaran terkait tercermin dalam laba rugi pada periode ketika pengeluaran terjadi.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji untuk penurunan setiap tahun, baik secara individu atau pada tingkat unit penghasil kas. Penilaian masa manfaat yang tidak terbatas ditinjau setiap tahun untuk menentukan apakah masa manfaat yang tidak terbatas tetap dapat didukung. Jika tidak, perubahan dalam masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas dilakukan secara prospektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Intangible Assets

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. The cost of intangible assets acquired in a business combination is their fair value at the date of acquisition. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortization and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalized development costs, are not capitalized and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.

Intangible assets with finite lives are amortized over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortization period and the amortization method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortization period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortization expense on intangible assets with finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are tested for impairment annually, either individually or at the cash-generating unit level. The assessment of indefinite life is reviewed annually to determine whether the indefinite life continues to be supportable. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Ringkasan kebijakan yang diterapkan pada aset takberwujud Grup adalah sebagai berikut:

	Perangkat lunak/ *Software*	
Umur manfaat	5 tahun/*years*	*Useful lifes*
Metode amortisasi	Garis lurus/ *Straight-line*	*Amortization method*
Diperoleh melalui	Akuisisi/*Acquisition*	*Acquired by*

Entitas anak tertentu menghitung amortisasi untuk aset takberwujud dengan metode "unit produksi".

ab. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual

Aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika nilai tercatatnya akan terpulihkan terutama melalui transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut.

Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Dalam hal ini, aset harus berada dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum untuk penjualan aset tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi.

ac. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Intangible Assets (continued)

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

A summary of the policies applied to the Group's intangible assets are as follows:

Certain subsidiary computed amortization for intangible assets based on "unit-of-production" method.

ab. Non-current Assets Held for Sale

Non-current asset is classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use.

Non-current asset classified as held for sale is measured at the lower of its carrying amount and fair value less costs to sell.

For this to be the case, the asset must be available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets and its sale must be highly probable.

ac. Investment in Associates

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan non-pengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ac. Investment in Associates (continued)

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of associates is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associates.

The financial statements of the associates are prepared in the same reporting period of the Group.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

ad. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur aset biologis, termasuk produk (agrikultur) dari tanaman produktif, pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ac. Investment in Associates (continued)

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

ad. Fair Value Measurement

The Group measures biological assets, including produce of bearer plants, at fair value at each reporting date. The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Fair Value Measurement (continued)

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ad. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

ae. Standar Akuntansi yang telah Disahkan namun belum berlaku Efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (”DSAK”) Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* (“IFRS”) yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ad. Fair Value Measurement (continued)

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

ae. Accounting Standards Issued but not yet Effective

The following are several accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (“DSAK”) that are considered relevant to the financial reporting of the Group but are not yet effective for consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for year then ended:

Effective beginning on or after January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. *Pillar 1 International Financial Accounting Standards,*
2. *Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),*
3. *Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and*
4. *Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.*

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of International Financial Reporting Standards (“IFRS”) which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ae. Standar Akuntansi yang telah Disahkan namun belum berlaku Efektif (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut: (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (continued)

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ae. Accounting Standards Issued but not yet Effective (continued)

The following are several accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Group but are not yet effective for consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for year then ended: (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- *what is meant by a right to defer settlement,*
- *the right to defer must exist at the end of the reporting period,*
- *classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and*
- *only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.*

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ae. Standar Akuntansi yang telah Disahkan namun belum berlaku Efektif (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut: (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan (lanjutan)

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ae. Accounting Standards Issued but not yet Effective (continued)

The following are several accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Group but are not yet effective for consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for year then ended: (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants (continued)

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ae. Standar Akuntansi yang telah Disahkan namun belum berlaku Efektif (lanjutan)

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut: (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ae. Accounting Standards Issued but not yet Effective (continued)

The following are several accounting standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Group but are not yet effective for consolidated financial statements as of December 31, 2023 and for year then ended: (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed.The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2023 adalah sebesar AS$5.041.468 (2022: AS$26.318.380). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 23.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS$44.580.395 (2022: AS$13.611.156). Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 23.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas beroperasi. Manajemen menentukan bahwa mata uang fungsional Grup adalah Dolar AS, kecuali untuk beberapa entitas anak tertentu. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2023 was US$5,041,468 (2022: US$26,318,380). Further details regarding taxation are disclosed in Note 23.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Group's claims for tax refund and tax assessments under appeal as of December 31, 2023 was US$44,580,395 (2022: US$13,611,156). Further explanations regarding this account are provided in Note 23.

Determination of Functional Currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. Management determined that the functional currency of the Group is US dollar, except for certain subsidiaries. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 15 dan 22.

Kontinjensi

Grup saat ini terlibat dalam proses hukum tertentu. Estimasi kemungkinan biaya penyelesaian klaim ini telah dikembangkan melalui konsultasi dengan penasihat luar dan didasarkan pada analisis potensi hasil. Grup saat ini tidak yakin sidang ini akan berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. Hal ini dimungkinkan, namun, hasil operasi di masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas strategi dalam melanjutkan sidang ini. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 35.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 15 and 22.

Contingency

The Group is currently involved in certain legal proceedings. The estimate of the probable costs for the resolution of this claim has been developed in consultation with outside counsel handling the defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. The Group currently does not believe these proceedings will have a material effect on the Group's consolidated financial statements. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceeding. Further details are disclosed in Note 35.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Grup akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Grup sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar AS$323.233.692 (2022: AS$266.325.901). Penjelasan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Cadangan Penurunan Nilai Persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup sebelum cadangan penurunan nilai pasar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar AS$56.505.905 dan AS$59.086.615. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 7.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Group will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Group's trade receivables before allowance for impairment as of December 31, 2023 was US$323,233,692 (2022: US$266,325,901). Further details on trade receivables are disclosed in Note 6.

Allowance for Decline in Value of Inventories

Allowance for decline in value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the physical conditions of the inventories owned, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amounts of the Group's inventories before allowance for decline in market values as of December 31, 2023 and 2022 amounted to US$56,505,905 and US$59,086,615 respectively. Further details are disclosed in Note 7.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dan durasi pemakaian berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dan durasinya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis dan durasi pemakaian aset tetap sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2m. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Grup sebelum rugi penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar AS$731.335.857 dan AS$577.848.614. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 12.

Amortisasi aset takberwujud

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor yang relevan, antara lain, kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya amortisasi masa depan mungkin direvisi.

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis and duration of use method over their estimated useful lives and duration. Management estimates the useful lives and duration of use of these fixed assets as disclosed in Note 2m. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amounts of the Group's fixed assets before impairment losses as of December 31, 2023 and 2022 amounted to US$731,335,857 and US$577,848,614, respectively. Further details are disclosed in Note 12.

Amortization of intangible assets

The Group performed review of the useful lives of the intangible assets periodically, based on relevant factors, among others, technical condition and technological development in the future. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future amortization charges could be revised.

Depreciation of right of use assets

The costs of right of use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these right of use assets to be within 2 (two) to 10 (ten) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan dan entitas anak tertentu memiliki rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan penghasilan kena pajak di masa depan sampai dengan lima tahun sejak rugi fiskal tersebut dilaporkan sebesar AS$164.263.677 (2022: AS$121.443.991).

Pada tanggal 31 Desember 2023, untuk sebagian dari jumlah rugi fiskal yang dapat dikompensasi di atas, yaitu sebesar AS$ 160.330.354 (2022: AS$121.443.991), Grup tidak mengakui aset pajak tangguhannya karena tidak memenuhi syarat pengakuan. Apabila aset pajak tangguhan tersebut dapat diakui, maka saldo laba akan meningkat sebesar AS$35.272.678 (2022: AS$26.717.677).

Ketidakpastian Liabilitas Perpajakan

Dalam situasi tertentu, Grup tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan oleh otoritas perpajakan yang masih berlangsung.

Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan apakah liabilitas pajak atas beban pajak yang belum diakui harus diakui.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

As of December 31, 2023, the Company and certain subsidiaries have tax losses carried forward which can be utilized against future taxable income up to five years since the tax loss reported amounting to US$164,263,677 (2022: US$121,443,991).

As of December 31, 2023, for a portion of the above-mentioned tax loss carried forward, amounting US$160,330,354 (2022: US$121,443,991), the Group does not recognize the related deferred tax assets that do not fulfill recognition criteria. If these deferred tax assets are recognized, retained earnings would be increased by US$35,272,678 (2022: US$26,717,677).

Uncertain Tax Liabilities

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by the taxation authority.

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine whether a tax liability of unrecognized tax expense should be recognized.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Tambang dalam Pengembangan

Kebijakan akuntansi TIA, MIFA dan BEL ("Grup Pertambangan Batubara") untuk biaya eksplorasi menyebabkan adanya beberapa biaya yang dikapitalisasi untuk suatu daerah pengembangan dimana biaya tersebut dianggap dapat dipulihkan melalui kegiatan eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan belum mencapai tahap yang memungkinkan penilaian yang wajar atas keberadaan cadangan.

Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu sehubungan peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi ekstraksi yang ekonomis dapat dilaksanakan. Setiap perkiraan dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika, setelah biaya dikapitalisasi, kemungkinan kecil biaya dapat dipulihkan, maka biaya yang dikapitalisasi tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Manajemen melakukan pertimbangan untuk menentukan kapan suatu proyek layak dikembangkan secara ekonomis. Dalam melaksanakan pertimbangan tersebut, manajemen perlu membuat estimasi dan asumsi tertentu seperti yang dijelaskan di atas untuk biaya eksplorasi yang dikapitalisasi. Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika, setelah memulai kegiatan pengembangan, dinilai bahwa terdapat penurunan nilai aset pengembangan, jumlah penurunan nilai akan dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 13.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Mines under Construction

TIA, MIFA and BEL's ("Coal Mining Group") accounting policy for exploration expenditure results in certain items of expenditure being capitalized for an area of interest where it is considered likely to be recoverable by future exploitation or sale or where the activities have not yet reached a stage which permits a reasonable assessment of the existence of reserves.

This policy requires management to make certain estimates and assumptions as to future events and circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having capitalized the expenditure under the policy, a judgment is made that recovery of the expenditure is unlikely, the capitalized amount will be charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Development activities commence after project acknowledgement by the appropriate level of management. Judgment is applied by management in determining when a project is economically viable. In exercising this judgment, management is required to make certain estimates and assumptions similar to those described above for capitalized exploration expenditure. Any such estimates and assumptions may change as new information becomes available. If, after having commenced the development activity, a judgment is made that a development asset is impaired, the appropriate amount will be charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Further details are disclosed in Note 13.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Cadangan

Cadangan merupakan estimasi jumlah batubara yang dapat diekstraksi secara ekonomis dan legal dari wilayah kuasa pertambangan milik Grup Pertambangan Batubara.

Grup Pertambangan Batubara menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam "Standar Nasional Indonesia". Dalam memperkirakan cadangan batubara diperlukan beberapa asumsi seperti faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar mata uang.

Karena asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan dalam membuat estimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan karena tambahan data geologis dihasilkan selama periode operasi, maka jumlah estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup Pertambangan Batubara dalam berbagai cara, di antaranya:

- Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dapat berubah jika biaya tersebut ditentukan berdasarkan basis unit produksi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Reserve Estimates

Reserves are estimates of the quantity of coal that can be economically and legally extracted from the Coal Mining Group's mining authorization areas.

The Coal Mining Group determines and reports its coal reserves under the principles incorporated in the "Standar Nasional Indonesia". In order to estimate coal reserves, assumptions are required about a range of geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transport costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates.

Due to the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data are generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Coal Mining Group's financial results and positions in a number of ways, including the following:

- *Depreciation and amortization charged in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income may change where such charges are determined on the unit-of-production basis.*

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Cadangan (lanjutan)

Karena asumsi-asumsi ekonomi yang digunakan dalam membuat estimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan karena tambahan data geologis dihasilkan selama periode operasi, maka jumlah estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup Pertambangan Batubara dalam berbagai cara, di antaranya: (lanjutan)

- Provisi untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup dapat berubah karena perubahan estimasi cadangan mempengaruhi ekspektasi atas saat atau biaya kegiatan-kegiatan tersebut.

Provisi untuk Biaya Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Kebijakan akuntansi Grup Pertambangan Batubara dalam pengakuan nilai provisi untuk biaya pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup membutuhkan estimasi dan asumsi yang signifikan, seperti persyaratan hukum dan regulasi yang relevan, serta waktu, cakupan dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan perbedaan atas biaya aktual di masa mendatang dengan jumlah yang dicadangkan saat ini.

Pencadangan yang diakui untuk setiap lokasi ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan pada fakta dan keadaan pada saat itu. Saldo provisi ini dicatat sebagai bagian dari "Provisi untuk Kewajiban Restorasi Lingkungan". Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 21.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Reserve Estimates (continued)

Due to the economic assumptions used to estimate reserves change from period to period, and because additional geological data are generated during the course of operations, estimates of reserves may change from period to period. Changes in reported reserves may affect the Coal Mining Group's financial results and positions in a number of ways, including the following: (continued)

- *Provision for environmental and reclamation costs may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.*

Provision for Environmental and Reclamation Costs

The Coal Mining Group's accounting policy for the recognition of provision for environmental and reclamation costs requires significant estimates and assumptions, such as requirements of the relevant legal and regulatory framework, and the timing, extent and costs of required environmental and reclamation activity. These uncertainties may result in future actual expenditure differing from the amounts currently provided.

The provision recognized for each location is periodically reviewed and updated based on the facts and circumstances available at that time. The balance of the provision is recorded as part of "Provision for Environmental Restoration Obligation". Further details are disclosed in Note 21.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Biaya Pengupasan Tangguhan

Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan diamortisasi selama umur tambang berdasarkan pada unit produksi. Ketika kegiatan penambangan mengoperasikan beberapa *pit* terbuka yang dianggap sebagai operasi terpisah untuk tujuan perencanaan tambang, biaya pengupasan tanah awal dicatat secara terpisah dengan mengacu pada *coal seam* dari setiap *pit* yang terpisah. Namun, jika *pit* tersebut saling terintegrasi, maka biaya pengupasan tanah awal dari *pit* kedua dan selanjutnya dianggap sebagai pengupasan tanah tahap produksi. Penentuan Grup apakah beberapa tambang dianggap sebagai operasi terpisah atau terintegrasi tergantung pada keadaan spesifik setiap tambang.

Tanggal Mulai Produksi

Grup Pertambangan Batubara menilai kondisi setiap tambang dalam tahap pengembangan untuk menetapkan kapan suatu tambang dipindahkan ke tahap produksi yaitu saat dimana tambang tersebut secara substansial telah dikembangkan dan siap untuk berproduksi secara komersial. Kriteria yang digunakan untuk menentukan tanggal mulai produksi didasarkan pada kondisi masing-masing tambang, seperti kompleksitas dan lokasi tambang yang dimaksud. Grup mempertimbangkan beberapa kriteria dalam menentukan kapan tahap produksi dapat dimulai dan mereklasifikasi nilai terkait dari "Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tambang Ditangguhkan Sehubungan dengan Daerah Pengembangan yang belum Mencapai Tahap Produksi Komersial" menjadi "Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tambang Ditangguhkan Sehubungan dengan Daerah Pengembangan ("*Area of Interest*") yang telah Mencapai Tahap Produksi Komersial".

Berikut beberapa kriteria yang digunakan, termasuk namun tidak terbatas:

- Besaran belanja modal yang telah terjadi dibandingkan dengan estimasi biaya konstruksi awal;
- Penyelesaian periode pengujian yang memadai atas tambang beserta peralatannya;
- Kemampuan untuk memproduksi hasil tambang dalam bentuk siap jual (dengan spesifikasi tertentu); dan
- Kemampuan untuk mempertahankan kesinambungan produksi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Deferred Stripping Costs

Stripping costs are amortized over the life of the mine on a units of production basis. Where a mine operates several open pits that are regarded as separate operations for the purpose of mine planning, initial stripping costs are accounted for separately by reference to the coal seam from each separate pit. If, however, the pits are highly integrated, the initial stripping of the second and subsequent pits is considered to be production phase stripping. The Group's determination of whether multiple pit mines are considered separate or integrated operations depends on each mine's specific circumstances.

Production Start Date

The Coal Mining Group assesses the stage of each mine under development to determine when a mine moves into the production stage, being the time when the mine is substantially developed and ready for commercial production. The criteria used to assess the start date of production are determined based on the unique nature of each mine construction project, such as the complexity of a plant and its location. The Group considers various relevant criteria to assess when the production phase is considered to commence and all related amounts are reclassified from "Deferred Mining Exploration and Development Costs Related to Area of Interest which have not yet Reached the Commercial Production Stage" to "Deferred Mining Exploration and Development Costs related to Areas of Interest which have Reached the Commercial Production Stage".

Some of the criteria used will include, but are not limited to, the following:

- *Level of capital expenditure incurred compared to the original construction cost estimates;*
- *Completion of a reasonable period of testing of the mine plant and equipment;*
- *Ability to produce metal in saleable form (within specifications); and*
- *Ability to sustain ongoing production.*

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Tanggal Mulai Produksi (lanjutan)

Pada saat sebuah tambang dalam tahap pengembangan/konstruksi dipindahkan ke tahap produksi, kapitalisasi biaya pengembangan tambang dihentikan dan biaya yang timbul dicatat sebagai bagian dari beban pokok pendapatan, kecuali untuk biaya yang memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sehubungan dengan penambahan atau pengembangan properti pertambangan atau pengembangan cadangan tambang. Pada tahap ini penyusutan/amortisasi dimulai.

Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diperoleh dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model "*discounted cash flow*". Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Production Start Date (continued)

When a mine development/construction project moves into the production stage, the capitalization of certain mine development/ construction costs ceases and costs are either regarded as forming part of the cost of revenue, except for costs that qualify for capitalization relating to mining asset additions or improvements or mineable reserve development. It is also at this point that depreciation/ amortization commences.

Fair Value of Financial Instruments

When the fair value of financial assets and financial liabilities recorded in the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair value is determined using valuation techniques including the "discounted cash flow" model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

Pension and Employee Benefits

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pensiun dan Imbalan Kerja (lanjutan)

Parameter yang paling sering mengalami perubahan adalah tingkat diskonto. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, manajemen mempertimbangkan hasil pasar (pada akhir periode pelaporan) pada obligasi pemerintah dan diekstrapolasi sebagaimana diperlukan sepanjang kurva imbalan (*yield curve*) untuk memenuhi jangka waktu yang diharapkan dari kewajiban imbalan pasti. Mata uang dan jangka waktu obligasi pemerintah konsisten dengan mata uang dan estimasi jangka waktu dari kewajiban imbalan pasca kerja.

Angka kematian didasarkan pada Tabel Mortalitas Indonesia ("TMI") 2019. Tabel mortalitas tersebut cenderung berubah hanya pada interval yang sejalan dengan perubahan demografi. Tingkat kenaikan penghasilan didasarkan pada inflasi yang diharapkan di masa depan, produktivitas dan kemajuan normal karyawan dalam suatu kelompok tertentu dan promosi.

Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar AS$24.583.932 dan AS$19.305.563. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 32.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat dari aset atau UPK melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berdasarkan data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam sebuah transaksi wajar dari aset serupa atau harga pasar yang dapat diobservasi dikurangi biaya pelepasan untuk menjual aset tersebut. Perhitungan nilai pakai berdasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum dilakukan oleh Grup atau investasi signifikan di masa datang yang akan memutakhirkan kinerja aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Pension and Employee Benefits (continued)

The parameter most subject to change is the discount rate. In determining the appropriate discount rate, management considers the market yields (at the end of the reporting period) on government bonds and extrapolated as needed along the yield curve to correspond with the expected term of the defined benefit obligation. The currency and term of the government bonds are consistent with the currency and estimated term of the post-employment benefit obligations.

The mortality rate is based on Indonesian Mortality Table ("TMI") 2019. Those mortality tables tend to change only at intervals in response to demographic changes. Salary growth rate is based on expected future inflation, productivity and normal progress of employees within a given group and promotions.

The carrying amounts of the Group's long-term employee benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 amounted to US$24,583,932 and US$19,305,563, respectively. Further details are disclosed in Note 32.

Impairment of Non-financial Assets

Impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The cash flows data are derived from budget for the next five years and do not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Selain aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, aset tetap tertentu, properti pertambangan dan aset takberwujud yang telah terjadi penurunan nilai (Catatan 9, 12, 13 dan 14), pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset non-keuangan.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of Non-financial Assets (continued)

Other than non-current assets held for sale, certain fixed assets, mining properties and intangible assets deemed to be impaired (Notes 9, 12, 13 and 14), as of December 31, 2023 and 2022, management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate any impairment of non-financial assets value.

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Kas			*Cash on hand*
Dolar Amerika Serikat	10	10	*United States dollar*
Rupiah	29.076	33.443	*Rupiah*
Sub-total	29.086	33.453	*Sub-total*
Bank			*Cash in banks*
Dolar Amerika Serikat			*United States dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.379.526	61.038.366	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.072.142	63.542.017	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	5.585.124	63.949	*PT Bank Permata Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	4.065.229	-	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.428.474	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	811.570	1.984.254	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	69.082	59.839	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	29.867	30.090	*PT Bank Sinarmas Tbk*
Standard Chartered Bank, Indonesia	16.430	24.690	*Standard Chartered Bank, Indonesia*
Citibank N.A., Indonesia	2.094	2.094	*Citibank N.A., Indonesia*
PT Bank DBS Indonesia	2.089	1.684	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	987	986	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia	-	930.384	*PT Bank Syariah Indonesia*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.839.573	26.446.063	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	2.473.715	4.884.190	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.300.336	11.130.985	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Permata Tbk	296.812	343.244	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank DBS Indonesia	296.467	574.375	*PT Bank DBS Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	211.825	9.600.407	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Citibank N.A., Indonesia	33.643	4.814	*Citibank N.A., Indonesia*
PT Bank Sinarmas Tbk	27.547	32.600	*PT Bank Sinarmas Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.434	451	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Standard Chartered Bank, Indonesia	4.426	22.575	*Standard Chartered Bank, Indonesia*
PT Bank UOB Indonesia	1.883	1.338	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Syariah Indonesia	70	979.779	*PT Bank Syariah Indonesia*
Dolar Singapura			*Singapore dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	196	549	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Euro			*Euro*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.187	3.107	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Mata uang lainnya	1.306	1.751	*Other foreign currency*
Sub-total	134.959.034	181.704.581	*Sub-total*

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

Akun ini terdiri dari: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Dolar Amerika Serikat			*United States dollar*
PT Bank ANZ Indonesia	5.650.000	-	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.000.000	8.017.550	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Permata Tbk	3.000.000	3.000.000	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	100.000	-	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia	-	1.000.000	*PT Bank Syariah Indonesia*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	28.866.113	-	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.189.414	10.743.119	*PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk*
PT Bank Permata Tbk	4.508.303	6.484.012	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	3.243.383	10.552.412	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	31.643	31.010	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Sub-total	53.588.856	39.828.103	*Sub-total*
Total	**188.576.976**	**221.566.137**	***Total***

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

The ranges of interest rates on time deposits per annum are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Rupiah	2,70% - 6,50%	2,37% - 5,00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,23% - 5,00%	0,20% - 3,00%	*United States Dollar*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no cash and cash equivalents balances placed to any related party.

5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA / *5. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pihak ketiga			*Third party*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Permata Tbk	66.940	65.599	*PT Bank Permata Tbk*
Kas di bank yang dibatasi penggunaannya			*Restricted cash in banks*
Pihak ketiga			*Third party*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.580.209	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	71.453.862	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.140	27.384	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Sinarmas Tbk	-	27.843.589	*PT Bank Sinarmas Tbk*
Total	**5.674.289**	**99.390.434**	***Total***

5. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan) / *5. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS (continued)*

Tingkat suku bunga deposito berjangka per tahun adalah sebagai berikut:

The interest rates on time deposits per annum is as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Rupiah	4,50%	3,00%	*Rupiah*

Deposito berjangka yang ditempatkan merupakan deposito berjangka dengan jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

Time deposits which are placed represents time deposits with maturity more than 3 (three) months.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas di bank milik CKB pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar Rp418 juta (setara dengan AS$27.140) dan Rp430 juta (setara dengan AS$27.384) dibatasi penggunaannya khusus untuk pembayaran surat keterangan fiskal *(tax clearance)* sehubungan dengan proses pengeluaran barang di pelabuhan.

As of December 31, 2023 and 2022, CKB's cash in bank balance in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp418 million (equivalent to US$27,140) and Rp430 million (equivalent to US$27,384), respectively, are restricted and solely used for the payments of tax clearance in connection with goods handling activities in port.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo kas di bank milik TIA pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar AS$5.580.209 merupakan dana yang ditempatkan pada rekening khusus terkait dengan dana hasil ekspor dari penjualan batubara. Grup telah menjalankan kewajibannya terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 (Catatan 39).

As of December 31, 2023, TIA's cash in bank balance in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to US$5,580,209 represents balance placed in certain account for proceeds from export coal sales. The Group has fulfilled its obligation in compliance with Government Regulation No. 36 Tahun 2023 (Note 39).

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo kas di bank Grup pada PT Bank Sinarmas Tbk dibatasi penggunaannya sehubungan dengan akuisisi PT Golden Energy Mines Tbk (Catatan 11).

As of December 31, 2022 the Group cash in bank in PT Bank Sinarmas Tbk is restricted in connection with the acquisition PT Golden Energy Mines Tbk (Note 11).

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo kas di bank Grup pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dibatasi penggunaannya sehubungan dengan perjanjian utang bank jangka panjang (Catatan 18).

As of December 31, 2022 the Group cash in bank in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is restricted in connection with long-term bank loans agreement (Note 18).

6. PIUTANG USAHA - NETO / *6. TRADE RECEIVABLES - NET*

Piutang usaha terdiri dari:

Trade receivables consists of:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Piutang usaha			*Trade receivables*
Pihak ketiga	162.029.245	181.007.632	*Third parties*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(8.474.466)	(9.825.243)	*Allowance for expected credit losses*
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	153.554.779	171.182.389	*Trade receivables - third parties - net*
Pihak berelasi (Catatan 33)	161.204.447	85.318.269	*Related parties (Note 33)*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(1.217.570)	(876.085)	*Allowance for expected credit losses*
Piutang usaha - pihak berelasi - neto	159.986.877	84.442.184	*Trade receivables - related parties - net*
Piutang usaha - neto	**313.541.656**	**255.624.573**	***Trade receivables - net***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

Rincian piutang usaha pihak ketiga berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables from third parties based on customers are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua	71.304.590	34.672.225	*PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua*
PT Energi Batubara Lestari	14.018.429	9.580.190	*PT Energi Batubara Lestari*
PT Berkat Murah Rejeki	13.146.290	21.165.150	*PT Berkat Murah Rejeki*
PT Dizamatra Powerindo	11.645.560	6.508.127	*PT Dizamatra Powerindo*
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	6.259.928	1.728.029	*PT Amman Mineral Nusa Tenggara*
China Bai Gui International Trade Ltd., Hong Kong	4.284.280	6.402.867	*China Bai Gui International Trade Ltd., Hong Kong*
PT Bangun Olahsarana Sukses	4.080.438	4.080.250	*PT Bangun Olahsarana Sukses*
PT Tri Sapta Sejahtera	3.173.993	3.110.436	*PT Tri Sapta Sejahtera*
PT Mutiara Tanjung Lestari	3.074.728	-	*PT Mutiara Tanjung Lestari*
PT Berkat Nusantara Indah	3.074.728	-	*PT Berkat Nusantara Indah*
PT Bukit Makmur Mandiri Utama	2.625.059	1.449.378	*PT Bukit Makmur Mandiri Utama*
PT Freeport Indonesia	2.304.222	5.138.036	*PT Freeport Indonesia*
PT Kaltim Prima Coal	1.962.944	5.007.142	*PT Kaltim Prima Coal*
PT Saptaindra Sejati	1.880.021	283.408	*PT Saptaindra Sejati*
PT Vale Indonesia Tbk	1.653.885	2.056.069	*PT Vale Indonesia Tbk*
PT Antareja Mahada Makmur	1.438.524	209.879	*PT Antareja Mahada Makmur*
PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero)	1.352.533	2.170.311	*PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") (Persero)*
PT IMR Anugrah Maju	105.092	2.125.809	*PT IMR Anugrah Maju*
PT Inti Murni Kencana	-	27.668.304	*PT Inti Murni Kencana*
Agarwal Coal Corp PVT. Ltd., India	-	9.220.995	*Agarwal Coal Corp PVT. Ltd., India*
Pan Asia Trade Link Pte. Ltd., Singapura	-	6.310.754	*Pan Asia Trade Link Pte. Ltd., Singapore*
IMR Metallurgical Resources Pte. Ltd., Swiss	-	3.957.796	*IMR Metallurgical Resources Pte. Ltd., Switzerland*
A.T Trade Overseas PVT. Ltd., India	-	3.216.180	*A.T Trade Overseas PVT. Ltd., India*
CTPL Pte. Ltd., Singapura	-	2.938.100	*CTPL Pte. Ltd., Singapore*
Lain-lain (masing-masing di bawah AS$1.000.000)	14.644.001	22.008.197	*Others (below US$1,000,000 each)*
Total	**162.029.245**	**181.007.632**	***Total***

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on currencies are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Rupiah	286.655.903	132.256.610	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	36.469.128	134.069.291	*United States dollar*
Mata uang lainnya	108.661	-	*Other currency*
Total	**323.233.692**	**266.325.901**	***Total***
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(9.692.036)	(10.701.328)	*Allowance for expected credit losses*
Neto	**313.541.656**	**255.624.573**	***Net***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of aging of the trade receivables are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Belum jatuh tempo	242.657.446	215.359.314	*Not past due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	16.247.746	8.256.799	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	23.871.321	8.913.779	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	14.315.495	3.666.557	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	26.141.684	30.129.452	*More than 90 days*
Total	**323.233.692**	**266.325.901**	***Total***
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(9.692.036)	(10.701.328)	*Allowance for expected credit losses*
Neto	**313.541.656**	**255.624.573**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The movements of allowance for expected credit losses on trade receivables are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*			
	Individual/ *Individual*	**Kolektif/ *Collective***	**Total/*Total***	
Saldo awal	10.649.086	52.242	10.701.328	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	3.764.065	1.525.368	5.289.433	*Provision during the year (Note 31)*
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 31)	(3.641.110)	(44.915)	(3.686.025)	*Reversal during the year (Note 31)*
Penghapusan	(69.666)	(656.401)	(726.067)	*Write-off*
Selisih translasi	72.766	10.326	83.092	*Translation difference*
Dekonsolidasi Grup MDB (Catatan 1c)	(1.969.725)	-	(1.969.725)	*Deconsolidation MDB Group (Note 1c)*
Saldo akhir	**8.805.416**	**886.620**	**9.692.036**	***Ending balance***

	Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*			
	Individual/ *Individual*	**Kolektif/ *Collective***	**Total/*Total***	
Saldo awal	7.926.708	74.574	8.001.282	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	3.922.313	-	3.922.313	*Provision during the year (Note 31)*
Pembalikan selama tahun berjalan (Catatan 31)	(1.010.391)	(17.924)	(1.028.315)	*Reversal during the year (Note 31)*
Penghapusan	(104.452)	-	(104.452)	*Write-off*
Selisih translasi	(85.092)	(4.408)	(89.500)	*Translation difference*
Saldo akhir	**10.649.086**	**52.242**	**10.701.328**	***Ending balance***

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements of allowance for expected credit losses on trade receivables are as follows: (continued)

Berdasarkan hasil penelaahan individual dan kolektif atas saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Based on the individual and collective assessment on the outstanding receivables as of December 31, 2023 and 2022, the Group's management believes that the allowance for expected credit losses on trade receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts.

7. PERSEDIAAN - NETO / *7. INVENTORIES - NET*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Bahan baku dan barang setengah jadi	26.800.083	26.439.588	*Raw materials and semi-finished goods*
Suku cadang	11.781.502	14.781.899	*Spare parts*
Barang dalam proses	10.392.168	11.145.545	*Work in process*
Batubara	6.711.650	5.628.351	*Coal*
Lain-lain	820.502	1.091.232	*Others*
Total	**56.505.905**	**59.086.615**	***Total***
Cadangan atas keusangan persediaan	(3.227.836)	(3.443.779)	*Allowance for obsolescence of inventories*
Persediaan - neto	**53.278.069**	**55.642.836**	***Inventories - net***

Mutasi cadangan atas keusangan persediaan adalah sebagai berikut: / *The movements of allowance for obsolescence of inventories are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	3.443.779	4.020.460	*Beginning balance*
Penyisihan selama tahun berjalan	1.054.661	1.246.091	*Provision during the year*
Pembalikan selama tahun berjalan	(1.196.662)	(1.323.108)	*Reversal during the year*
Penghapusan selama tahun berjalan	(141.420)	(162.663)	*Write-off during the year*
Selisih translasi	67.478	(337.001)	*Translation difference*
Saldo akhir	**3.227.836**	**3.443.779**	***Ending balance***

7. PERSEDIAAN - NETO (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada setiap akhir tahun, manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan atas keusangan persediaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul dari tidak terpulihkannya persediaan yang lambat pergerakannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, persediaan tertentu milik entitas anak tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS$9.283.152 dan AS$9.283.152. Manajemen Grup berkeyakinan bahwa nilai tersebut cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut.

7. INVENTORIES - NET (continued)

Based on the assessment of the condition of inventories at the end of each year, the Group's management believes that the allowance for obsolescence of inventories is adequate to cover possible losses that may arise from non-recoverability of slow-moving inventories.

As of December 31, 2023 and 2022, certain inventories of certain subsidiaries are covered by insurance against losses by fire and other risks totalling to US$9,283,152 and US$9,283,152, respectively. The Group's management believes that the above coverage is sufficient to cover possible losses arising from those risks.

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Uang Muka

Akun ini terutama merupakan uang muka yang dibayarkan Grup kepada pemasok untuk pembelian persediaan dan kepada sub-kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Biaya Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

Advances to Suppliers

This account mainly represents advances paid by the Group to suppliers for purchase of inventories and to sub-contractors in relation to the performance of project.

Prepaid Expenses

This account consists of:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perizinan	1.211.647	295.420	*License*
Sewa	869.750	514.128	*Rent*
Asuransi	90.972	113.776	*Insurance*
Royalti	-	2.559.044	*Royalty*
Lain-lain	936.579	907.206	*Others*
Total	**3.108.948**	**4.389.574**	***Total***

9. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

9. NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

Rincian aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual adalah sebagai berikut:

The details of non-current assets held for sale are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Nilai tercatat neto	5.756.824	13.223.112	*Net carrying amount*
Dikurangi rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya	(5.756.824)	(5.623.112)	*Less previously recognized impairment loss*
Dikurangi rugi penurunan nilai selama tahun berjalan	-	(7.600.000)	*Less impairment losses during the year*
Ditambah pembalikan penurunan nilai selama tahun berjalan	1.000.000	-	*Add reversal impairment during the year*
Nilai wajar	**1.000.000**	**-**	***Fair value***

Pada bulan Desember 2021, manajemen ACE memutuskan untuk menjual 1 set Peralatan Pembangkit Listrik *Heavy Fuel Oil* ("HFO") yang sudah tidak terpakai dengan nilai buku neto sebesar Rp185,50 miliar (atau setara dengan AS$13.223.112). Berdasarkan penawaran yang diterima sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atas aset tersebut sebesar AS$7.600.000 dan selisihnya diakui ACE sebagai rugi penurunan nilai dan telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

In December 2021, the management of ACE decided to sell 1 set of unused Heavy Fuel Oil ("HFO") Power Plant Equipment with net book value amounting to Rp185.50 billion (or equivalent to US$13,223,112). Based on the offering price received until December 31, 2021, the fair value less cost to sell of such assets amounting to US$7,600,000 and the difference is recognized by ACE as an impairment of assets and has recorded it in "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2021.

Manajemen ACE berkeyakinan bahwa proses penjualan aset akan diselesaikan kurang dari waktu satu tahun. Dengan demikian, ACE mereklasifikasi aset tersebut menjadi bagian dari "Aset tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021.

ACE's management believes that the assets selling process will be settled within one year period. Accordingly, ACE has reclassified those assets as part of "Non-current Assets Held for Sale" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2021.

Pada tanggal 1 April 2022, ACE telah menandatangani perjanjian dengan Orient Energy Systems FZCO, UAE yang menyetujui nilai pembelian senilai AS$7.600.000. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, transaksi ini tidak terlaksana.

On April 1, 2022, ACE signed an agreement with Orient Energy Systems FZCO, UAE which agreed to a purchase value of US$7,600,000. However, as of December 31, 2022, this transaction has not yet executed.

Berdasarkan penilaian manajemen, dengan mempertimbangkan situasi saat ini, sulit untuk menemukan calon pembeli karena spesifikasi aset tersebut. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa aset tersebut harus diturunkan nilainya secara penuh.

Based on the management assessment, by considering the current situation, it's difficult to find potential buyer due to the specification of such assets. Accordingly, management believes such assets should be fully impaired.

ACE mencatat rugi penurunan nilai tersebut sebesar AS$7.600.000 dan telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

ACE recorded an additional impairment losses amounting to US$7,600,000 and has recorded in "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

9. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL (lanjutan)

Pada tanggal 28 November 2023, ACE telah menandatangani perjanjian dengan USPE ME Trading L.L.C, Dubai ("USPE") yang menyetujui total komitmen nilai pembelian aset ACE senilai AS$6.250.000.

Pada tanggal 14 Desember 2023, ACE telah menyelesaikan sebagian proses penjualan aset senilai AS$5.250.000 dan telah mencatat keuntungan atas penjualan aset tersebut sebagai bagian dari "Pendapatan Lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Manajemen ACE berkeyakinan bahwa proses penjualan aset yang tersisa senilai AS$1.000.000 kepada USPE akan diselesaikan kurang dari waktu satu tahun. Dengan demikian, ACE menyajikan aset tersebut menjadi bagian dari "Aset tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023.

9. NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE (continued)

On November 28, 2023, ACE has signed an agreement with USPE ME Trading L.L.C, Dubai ("USPE") which agreed to purchase ACE's assets with total commitment value of US$6,250,000.

On December 14, 2023, ACE has partially completed the selling process of its assets amounting to US$5,250,000 and has recorded gain on sale of such assets as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023.

ACE's management believes that the remaining assets selling process of US$1,000,000 to USPE will be settled within one year period. Accordingly, ACE has presented those assets as part of "Non-current Assets Held for Sale" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023.

10. INVESTASI PADA SAHAM

Rincian investasi pada saham adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENT IN SHARES

The details of investment in shares are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Multi Harapan Utama	16.591.729	23.479.688	*PT Multi Harapan Utama*
PT Sumberdaya Sewatama	139.480	139.480	*PT Sumberdaya Sewatama*
Total	**16.731.209**	**23.619.168**	***Total***

PT Multi Harapan Utama ("MHU")

Pada tanggal 31 Oktober 2019, ANN memiliki investasi strategis senilai AS$60.000.000 pada MHU, pihak berelasi, yang memiliki konsesi batubara berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. ANN memiliki komposisi kepemilikan sebesar 10% dengan total 551 lembar saham yang terdiri dari 1 lembar saham Seri B dan 550 lembar saham Seri C. Sehubungan dengan investasi ini, ANN dan CK juga menandatangani Kontrak Jasa Konsultasi dan Amendemen I atas Kontrak Jasa Pertambangan dengan MHU (Catatan 33).

PT Multi Harapan Utama ("MHU")

On October 31, 2019, ANN owned a strategic investment of US$60,000,000 in MHU, a related party, which has a coal concession located in the Province of East Kalimantan. ANN has 10% ownership with total of 551 shares consisting of 1 share Series B and 550 shares Series C. In relation with ANN's Investment to MHU, ANN and CK also signed the Consultation Fee Agreement and Amendment I of Mining Services Contract with MHU (Note 33).

10. INVESTASI PADA SAHAM (lanjutan)

Transaksi di atas telah dinilai kewajarannya oleh KJPP Syarif, Endang & Rekan, penilai independen, tertanggal 31 Oktober 2019.

Pada tanggal 6 November 2019, Perusahaan telah menyampaikan surat No. ABM-CSC/032/RDN/XI/2019 ke OJK atas keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. X.K.1.

Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn No. 81 tanggal 22 Desember 2022, Pemegang Saham MHU menyetujui penerbitan 290 saham baru dalam bentuk saham Seri D. ANN mengambil 29 saham seri D tersebut dengan melakukan konversi piutang kepada MHU sebesar AS$3.190.000.

Berdasarkan laporan valuasi KJPP Stefanus, Tonny, Hardi dan Rekan tanggal 21 Maret 2024, jumlah terpulihkan atas investasi ANN pada MHU pada tanggal 31 Desember 2023 dinilai dengan menggunakan model arus kas masa depan terdiskonto, Grup mengakui rugi perubahan nilai atas investasi pada saham ke MHU sebesar AS$6.887.959 dan dicatat sebagai "Perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan laporan valuasi KJPP Stefanus, Tonny, Hardi dan Rekan tanggal 27 Maret 2023, jumlah terpulihkan atas investasi ANN pada MHU pada tanggal 31 Desember 2022 dinilai dengan menggunakan model arus kas masa depan terdiskonto, Grup mengakui rugi perubahan nilai atas investasi pada saham ke MHU sebesar AS$3.033.909 dan dicatat sebagai "Perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

10. INVESTMENT IN SHARES (continued)

The above transaction has been appraised for its fairness by KJPP Syarif, Endang & Rekan, an independent appraiser, dated October 31, 2019.

On November 6, 2019, the Company submitted a letter No. ABM-CSC/032/RDN/XI/2019 to OJK for the disclosure of information that the public needs to know in accordance with BAPEPAM-LK No. X.K.1.

Based on Notarial Deed of Anastasia Anne Augusta S.H., M.Kn No. 81 dated December 22, 2022, the Shareholders of MHU has approved the issuance of 290 new shares in the form of Series D shares. ANN acquired the 29 series D shares by converting receivables to MHU amounting to US$3,190,000.

Based on the valuation report of KJPP Stefanus, Tonny, Hardi dan Rekan dated March 21, 2024, the recoverable amount of ANN's investment in shares on MHU as of December 31, 2023 was assessed using discounted future cash flows model, the Group recognized loss on investment in shares on MHU amounting to US$6,887,959 and recorded as "Changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023.

Based on the valuation report of KJPP Stefanus, Tonny, Hardi dan Rekan dated March 27, 2023, the recoverable amount of ANN's investment in shares on MHU as of December 31, 2022 was assessed using discounted future cash flows model, the Group recognized loss on investment in shares on MHU amounting to US$3,033,909 and recorded as "Changes in value of financial assets at fair value through other comprehensive income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

10. INVESTASI PADA SAHAM (lanjutan)

PT Multi Harapan Utama ("MHU") (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., No. 44 tanggal 29 Mei 2023, para pemegang saham MHU menyetujui dan meratifikasi atas seluruh tindakan Direksi dan atau Dewan Komisaris sehubungan dengan pemberian dividen dibayar dimuka tahun buku 2022 dengan keseluruhan berjumlah AS$250.000.000 sebagaimana tercantum dalam Keputusan sebagai berikut:

- Keputusan Sirkuler Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan MHU tanggal 17 Oktober 2022 untuk sejumlah AS$100.000.000.
- Keputusan Sirkuler Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MHU tanggal 27 Januari 2023 untuk sejumlah AS$100.000.000.
- Keputusan Sirkuler Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MHU tanggal 16 Februari 2023 untuk sejumlah AS$50.000.000.

Selanjutnya menyetujui jumlah Dividen Tahun 2022 menjadi sebesar AS$350.000.000 yang diambil dari laba tahun 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, ANN mencatat pendapatan dividen sebesar AS$25.000.000 dan telah menerima pembayaran atas dividen tersebut sejumlah AS$20.000.000 selama tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan MHU tanggal 27 Mei 2022, para pemegang saham MHU menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah AS$125.000.000 yang diambil dari saldo laba tahun buku 2021 dan seluruhnya telah dibayarkan di tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahunan MHU tanggal 17 Oktober 2022, para pemegang saham MHU menyetujui pembagian dividen dibayar dimuka tahun buku 2022 sejumlah AS$100.000.000. ANN telah menerima pembayaran atas dividen dibayar dimuka tersebut selama tahun 2022.

10. INVESTMENT IN SHARES (continued)

PT Multi Harapan Utama ("MHU") (continued)

Based on Notarial Deed of Anastasia Anne Augusta, S.H., M.Kn., No. 44 dated May 29, 2023, MHU shareholders approve and ratify all actions of the Board of Directors and/or Board of Commissioners in relation to the prepaid dividends for the 2022 financial year totalling to US$250,000,000 as stated in the following Decree:

- *Circular Resolution Extraordinary Circular Resolutions in lieu of MHU's Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 17, 2022 amounting to US$100,000,000.*
- *Circular Resolution Extraordinary Circular Resolutions in lieu of MHU's Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders dated January 27, 2023 amounting to US$100,000,000.*
- *Circular Resolution Extraordinary Circular Resolutions in lieu of MHU's Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders dated February 16, 2023 amounting to US$50,000,000.*

Likewise, it approved the amount of Dividends for for the 2022 financial year to be US$350,000,000 taken from profits for 2022. For the year ended December 31, 2023, ANN recorded dividend income of US$25,000,000 and has received payment for these dividends in the amount of US$20,000,000 during 2023.

Based on the Extraordinary Circular Resolution in lieu of the Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders of MHU dated 27 May 2022, MHU shareholders agreed to distribute cash dividends in the amount of US$125,000,000 taken from retained earnings for the 2021 fiscal year and all of have been paid in 2022.

Based on Circular Resolution Extraordinary Circular Resolutions in lieu of MHU's Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders dated October 17, 2022, MHU's shareholders agreed to distribute prepaid dividends for the 2022 financial year in the amount of US$100,000,000. ANN has received payment of the prepaid dividends during 2022.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI / *11. INVESTMENT IN ASSOCIATES*

Rincian dari investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of investments in associates are as follows:

Entitas Asosiasi/ *Associates*	Domisili/ *Domicile*	Awal Operasi Komersial/ *Start of Commercial Operations*	Kegiatan Usaha/ *Business Activities*	Persentase Kepemilikan Efektif Grup (%)/ *Effective Percentage of Ownership of the Group (%)*		Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment in Associates*	
				2023	2022	2023	2022
Dimiliki Melalui RJR/ *Held through RJR*							
PT Golden Energy Mines Tbk ("GEMS")	Provinsi DKI Jakarta/ *Province of DKI Jakarta*	2010	Bidang pertambangan melalui penyertaan pada entitas anaknya dan perdagangan batubara/ *coal mining through its subsidiaries and coal trading activities*	30%	30%	500.050.978	480.924.729
Dimiliki Melalui Reswara/ *Held through Reswara*							
PT Media Djaya Bersama ("MDB")	Provinsi DKI Jakarta/ *Province of DKI Jakarta*	2017	Perdagangan, pengembangan dan industri/*Trading, development, and industry*	50%	-	89.569.084	-
Dimiliki Melalui SSB/ *Held through SSB*							
PT SSB Sammitr Distribution ("SSD")	Provinsi DKI Jakarta/ *Province of DKI Jakarta*	2017	Perdagangan umum dan distributor perdagangan/ *General trading and sole distributor trading*	40%	40%	22.666	22.212

Rincian investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of investment in associates are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	2022	
PT Golden Energy Mines Tbk	500.050.978	480.924.729	*PT Golden Energy Mines Tbk*
PT Media Djaya Bersama	89.569.084	-	*PT Media Djaya Bersama*
PT SSB Sammitr Distribution	22.666	22.212	*PT SSB Sammitr Distribution*
Total	**589.642.728**	**480.946.941**	***Total***

Berikut ini adalah rincian bagian atas laba entitas asosiasi:

The following describes the details of share in profit of associates:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	2022	
PT Golden Energy Mines Tbk	143.996.935	66.587.832	*PT Golden Energy Mines Tbk*

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) / *11. INVESTMENT IN ASSOCIATES (continued)*

Berikut ini adalah rincian bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi:

The following describes the details of share of other comprehensive income of associates:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PT Golden Energy Mines Tbk	(370.686)	85.534	*PT Golden Energy Mines Tbk*

GEMS / ***GEMS***

Pada tanggal 15 September 2022, RJR mengakuisisi 1.764.705.900 saham GEMS (dengan nilai nominal sebesar Rp3.536 per saham) dari GMR Coal Resources Pte. Ltd. Dengan total nilai akuisisi sebesar AS$444.251.363, yang mewakili 30% kepemilikan saham di GEMS.

On September 15, 2022, RJR acquired 1,764,705,900 shares of GEMS (at par value of Rp3,536 per share) from GMR Coal Resources Pte. Ltd. With total acquistion value of US$444,251,363, which representing 30% equity ownership in GEMS.

Berdasarkan laporan valuasi KJPP Kusnanto dan Rekan tanggal 27 Maret 2023, jumlah nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi atas 30% kepemilikan saham GEMS pada tanggal 15 September 2022 adalah sebesar AS$377.511.798.

Based on the valuation report of KJPP Kusnanto dan Rekan dated March 27, 2023, net fair value of identifiable assets and liabilities for the 30% ownership in GEMS on September 15, 2022 was US$377,511,798.

Selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian RJR atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari GEMS dicatat sebagai *goodwill* yang termasuk dalam jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi.

The difference between the acquisition cost of the investment and RJR's share of the net fair value of GEMS' identifiable assets and liabilities is recorded as goodwill which is included in the carrying amount of the investment in the associate.

Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham RJR pada GEMS:

The following describes detail of share ownership of RJR in GEMS:

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Nilai perolehan investasi	444.251.363	444.251.363	*Cost of investment*
Akumulasi bagian atas laba	210.584.767	66.587.832	*Accumulated share in profit*
Akumulasi dividen	(154.500.000)	(30.000.000)	*Accumulated dividend*
Akumulasi bagian penghasilan komprehensif lain	(285.152)	85.534	*Accumulated share of other comprehensive income*
Nilai tercatat investasi	**500.050.978**	**480.924.729**	***Carrying value of investment***

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan) / *11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)*

GEMS (lanjutan) / ***GEMS (continued)***

Rincian total aset, liabilitas, penjualan neto, dan total penghasilan komprehensif periode berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of total assets, liabilities, net sales, and total comprehensive income for the period of the associate are as follows:

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian: / *Summarized consolidated statements of financial position:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Aset			***Assets***
Aset lancar	841.974.182	724.319.768	*Current assets*
Aset tidak lancar	470.068.063	404.767.036	*Non-current assets*
Total aset	**1.312.042.245**	**1.129.086.804**	***Total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek	615.377.620	473.259.004	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	33.552.551	97.583.161	*Non-current liabilities*
Total liabilitas	**648.930.171**	**570.842.165**	***Total liabilities***
Kepentingan non-pengendali	9.361.664	6.639.270	*Non-controlling interests*
Aset neto	**653.750.410**	**551.605.369**	***Net assets***

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian: / *Summarized consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	2.901.836.296	2.919.964.403	*Revenue from contracts with customers*
Laba tahun berjalan	518.380.664	695.908.034	*Profit for the year*
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(557.824)	1.412.259	*Other comprehensive income (loss) for the year, net of tax*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**517.822.840**	**697.320.293**	***Total comprehensive income for the year***

MDB / ***MDB***

Pada tanggal 11 Desember 2023, Reswara dan IMK menandatangani Amandemen Kesepakatan Bersama, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa keputusan dan kebijakan terkait operasional dan penetapan imbal hasil dari Grup MDB akan diberikan kepada IMK, efektif tanggal 29 Desember 2023.

On December 11, 2023, Reswara and IMK signed Amendment of Collective Agreement, whereby both parties agreed that the decision and policies related to operational and determination of returns of MDB Group would be given to IMK, effective December 29, 2023.

11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)

11. INVESTMENTS IN ASSOCIATES (continued)

MDB (lanjutan)

MDB (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian dan dicatat sebagai bagian dari "Investasi pada Entitas Asosiasi" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 (Catatan 1c).

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements and recorded as part of "Investments in Associates" in consolidated statement of financial position as of December 31, 2023 (Note 1c).

Rincian total aset, liabilitas, penjualan neto, dan total penghasilan komprehensif periode berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The details of total assets, liabilities, net sales, and total comprehensive income for the period of the associate are as follows:

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian:

Summarized consolidated statements of financial position:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
Aset		***Assets***
Aset lancar	178.944.305	*Current assets*
Aset tidak lancar	201.120.133	*Non-current assets*
Total aset	**380.064.438**	***Total assets***
Liabilitas		***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek	222.653.807	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	14.206.232	*Non-current liabilities*
Total liabilitas	**236.860.039**	***Total liabilities***
Kepentingan non-pengendali	6.614	*Non-controlling interests*
Aset neto	**143.197.785**	***Net assets***

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

Summarized consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	364.081.995	*Revenue from contracts with customers*
Laba tahun berjalan	53.205.512	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(107.281)	*Other comprehensive loss for the year, net of tax*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	**53.098.231**	***Total comprehensive income for the year***

12. ASET TETAP - NETO / *12. FIXED ASSETS - NET*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: / *The details of fixed assets are as follows:*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/*Year Ended December 31, 2023*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Translasi/ *Translation Differences*	Dekonsolidasi Grup MDB/ *Deconsolidation of MDB Group*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan								***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung								*Direct ownership*
Tanah	27.558.971	2.943.779	-	-	110.645	(21.210.161)	9.403.234	*Land*
Jalan dan infrastruktur	162.351.358	1.016.388	-	591.579	-	(132.643.148)	31.316.177	*Road and infrastructure*
Bangunan dan prasarana	67.743.617	954.386	(137.855)	7.004.205	347.111	(23.073.984)	52.837.480	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	21.480.734	2.783.103	(723.108)	(6.529)	185.010	(2.556.446)	21.162.764	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	69.168.770	4.614.212	(3.872.729)	34.289.647	211.847	(1.395.541)	103.016.206	*Vehicles*
Kapal	44.677.305	274.364	(4.081.732)	-	751.047	-	41.620.984	*Vessels*
Mesin dan peralatan	712.036.594	20.957.648	(76.120.322)	340.060.961	873.929	(7.348.675)	990.460.135	*Machinery and equipment*
Sub-total	1.105.017.349	33.543.880	(84.935.746)	381.939.863	2.479.589	(188.227.955)	1.249.816.980	*Sub-total*
Aset dalam penyelesaian	42.296.092	377.605.190	(96.558)	(382.123.741)	246.489	(7.533.138)	30.394.334	*Construction in-progress*
Total biaya perolehan	1.147.313.441	411.149.070	(85.032.304)	(183.878)	2.726.078	(195.761.093)	1.280.211.314	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan								***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung								*Direct ownership*
Jalan dan infrastruktur	89.236.632	8.117.847	-	-	-	(66.920.228)	30.434.251	*Road and infrastructure*
Bangunan dan prasarana	36.560.829	4.577.090	(76.895)	(737)	231.008	(9.086.743)	32.204.552	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	18.637.728	2.118.687	(718.952)	(8.097)	139.589	(1.748.919)	18.420.036	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	43.767.432	8.711.447	(3.532.301)	1.506.581	103.851	(232.084)	50.324.926	*Vehicles*
Kapal	34.026.130	2.196.643	(1.805.285)	-	542.575	-	34.960.063	*Vessels*
Mesin dan peralatan	347.236.076	88.412.511	(47.240.156)	(1.497.747)	795.485	(5.174.540)	382.531.629	*Machinery and equipment*
Total akumulasi penyusutan	569.464.827	114.134.225	(53.373.589)	-	1.812.508	(83.162.514)	548.875.457	*Total accumulated depreciation*
Rugi penurunan nilai								***Impairment losses***
Kapal	4.994.151	-	(2.058.193)	-	123.543	-	3.059.501	*Vessels*
Mesin dan peralatan	5.521.312	87.918	(2.689.859)	-	1.649	-	2.921.020	*Machinery and equipment*
Nilai tercatat neto	**567.333.151**						**725.355.336**	***Net carrying amount***

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan) / *The details of fixed assets are as follows: (continued)*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/*Year Ended December 31, 2022*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Translasi/ *Translation Differences*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Tanah	27.815.927	662.370	-	-	(919.326)	27.558.971	*Land*
Jalan dan infrastruktur	158.218.930	1.486.215	-	2.646.213	-	162.351.358	*Road and infrastructure*
Bangunan dan prasarana	66.150.711	688.562	(65.918)	3.386.253	(2.415.991)	67.743.617	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	19.669.465	2.929.582	(367.205)	(7.491)	(743.617)	21.480.734	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	52.099.120	4.398.027	(2.380.778)	16.289.735	(1.237.334)	69.168.770	*Vehicles*
Kapal	37.025.853	2.138.968	(148.574)	9.743.948	(4.082.890)	44.677.305	*Vessels*
Mesin dan peralatan	521.596.452	42.181.459	(62.403.950)	213.605.569	(2.942.936)	712.036.594	*Machinery and equipment*
Sub-total	882.576.458	54.485.183	(65.366.425)	245.664.227	(12.342.094)	1.105.017.349	*Sub-total*
Aset dalam penyelesaian	9.941.632	264.050.640	(331)	(231.351.871)	(343.978)	42.296.092	*Construction in-progress*
Total biaya perolehan	892.518.090	318.535.823	(65.366.756)	14.312.356	(12.686.072)	1.147.313.441	*Total acquisition cost*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Kepemilikan langsung							*Direct ownership*
Jalan dan infrastruktur	80.652.318	8.584.314	-	-	-	89.236.632	*Road and infrastructure*
Bangunan dan prasarana	33.878.156	3.873.255	(36.556)	3.362	(1.157.388)	36.560.829	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	18.326.834	1.304.590	(345.878)	(27.650)	(620.168)	18.637.728	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	42.606.112	3.916.708	(2.063.761)	20.849	(712.476)	43.767.432	*Vehicles*
Kapal	29.321.319	3.139.345	(148.574)	4.868.972	(3.154.932)	34.026.130	*Vessels*
Mesin dan peralatan	327.515.777	65.264.893	(44.276.567)	1.932.742	(3.200.769)	347.236.076	*Machinery and equipment*
Total akumulasi penyusutan	532.300.516	86.083.105	(46.871.336)	6.798.275	(8.845.733)	569.464.827	*Total accumulated depreciation*
Rugi penurunan nilai							***Impairment losses***
Kapal	1.058.649	-	-	4.267.286	(331.784)	4.994.151	*Vessels*
Mesin dan peralatan	9.963.822	2.418.063	(6.860.573)	-	-	5.521.312	*Machinery and equipment*
Nilai tercatat neto	**349.195.103**					**567.333.151**	***Net carrying amount***

Rincian laba penjualan aset tetap - neto adalah sebagai berikut: / *The details of gain on sale of fixed assets - net are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Hasil penjualan aset tetap	17.242.906	2.024.248	*Proceeds from sale of fixed assets*
Nilai tercatat neto aset tetap	(1.983.431)	(1.646.902)	*Net carrying amounts of fixed assets*
Laba penjualan aset tetap - neto	**15.259.475**	**377.346**	***Gain on sale of fixed assets - net***

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Laba penjualan aset tetap - neto dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Nilai tercatat aset tetap yang dihapus untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar AS$24.927.232 dan AS$9.987.945 dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

31 Desember 2023	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost*	Perkiraan Waktu Penyelesaian/ *Estimated Time of Completion*	
Mesin dan peralatan	2% - 99%	23.163.201	Januari 2024 - Maret 2024/ *January 2024 - March 2024*	*Machinery and equipment*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	40%	3.802.879	Mei 2024/ *May 2024*	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kapal	94%	2.314.031	Februari 2024 - *February 2024*	*Vessels*
Bangunan dan prasarana	10% - 90%	1.114.223	Januari 2024 - April 2024/ *January 2024 - April 2024*	*Building and improvements*
Total		**30.394.334**		***Total***

31 Desember 2022	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost*	Perkiraan Waktu Penyelesaian/ *Estimated Time of Completion*	
Mesin dan peralatan	50% - 98%	37.199.729	Januari 2023 - Maret 2023/ *January 2023 - March 2023*	*Machinery and equipment*
Kapal	94%	2.314.031	Februari 2023 /*February 2023*	*Vessels*
Bangunan dan prasarana	25% - 95%	1.792.252	Januari 2023 - Desember 2023/ *January 2023 - December 2023*	*Building and improvements*
Jalan dan infrastruktur	65% - 95%	573.270	Februari 2023 - *Juni 2023/ February 2023 - June 2023*	*Road and infrastructure*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	40% - 80%	416.810	Januari 2023 - Mei 2023/ *January 2023 - May 2023*	*Office furniture, fixtures and equipment*
Total		**42.296.092**		***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat hambatan yang signifikan dalam penyelesaian aset dalam penyelesaian di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap masing-masing sebesar AS$33.550.865 dan AS$43.323.300.

12. FIXED ASSETS - NET (continued)

Gain on sale of fixed assets - net is recorded as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023 and 2022.

Carrying amounts of fixed assets that were written-off for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounted to US$24,927,232 and *US$9,987,945, respectively is recorded as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023 and 2022.*

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

Construction in-progress

Construction in-progress consists of the following:

As of December 31, 2023 and 2022, there were no significant obstacles in the completion of the construction in-progress.

As of December 31, 2023 and 2022, contractual commitment to acquire fixed assets amounting to US$33,550,865 and US$43,323,300, respectively.

12. ASET TETAP - NETO (lanjutan) / *12. FIXED ASSETS - NET (continued)*

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: / *Allocation of depreciation expense are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban pokok pendapatan	112.320.512	85.501.129	*Cost of revenue*
Beban penjualan, umum dan administrasi	1.813.713	581.976	*Selling, general and administrative expenses*
Total	**114.134.225**	**86.083.105**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengakui rugi penurunan nilai atas aset tetap masing-masing sebesar AS$87.918 dan AS$2.418.063, disajikan sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Group recognized impairment losses on fixed assets value amounting to US$87,918 and US$2,418,063, respectively, presented as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Kapal Grup diasuransikan terhadap kerusakan lambung dan mesin kapal dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar AS$24.210.321 pada tanggal 31 Desember 2023 dan AS$20.785.384 pada tanggal 31 Desember 2022.

The Group's vessels are covered by insurance against damage of hull and machinery and other various risks under blanket policies amounting to US$24,210,321 as of December 31, 2023 and US$20,785,384 as of December 31, 2022.

Grup mengasuransikan aset tetapnya, kecuali tanah dan kapal sebagaimana dijelaskan di atas, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar AS$699.668.698, dan Rp256 miliar (setara dengan AS$16.647.195) pada tanggal 31 Desember 2023 dan AS$863.634.680, dan Rp122,3 miliar (setara dengan AS$7.777.522) pada tanggal 31 Desember 2022. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

The Group has insured its fixed assets, except land and vessels as stated above, against losses from fire and other various risks with a total insurance coverage of US$699,668,698 and Rp256 billion (equivalent to US$16,647,195) as of December 31, 2023 and US$863,634,680 and Rp122.3 billion (equivalent to US$7,777,522) as of December 31, 2022, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Entitas anak tertentu memiliki bidang tanah dengan Hak Guna Bangunan ("HGB") yang akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2059. Manajemen berpendapat bahwa HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat berakhirnya hak tersebut.

Certain subsidiaries have parcels of land with Hak Guna Bangunan ("HGB"), which will expire on various dates from 2023 until 2059. Management believes that the landrights can be extended on their respective expiration dates.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 aset tetap tertentu direklasifikasi ke aset takberwujud masing-masing sejumlah AS$183.878 dan AS$38.393 (Catatan 14).

For the year ended December 31, 2023 and 2022, certain fixed assets has been reclassified to intangible assets amounting to US$183,878 and US$38,393, respectively (Note 14).

Mesin dan peralatan tertentu milik CK digunakan sebagai jaminan atas utang sindikasi (Catatan 18).

Certain of CK's machinery and equipment are used as collateral for syndicated loans (Note 18).

13. PROPERTI PERTAMBANGAN - NETO / *13. MINING PROPERTIES - NET*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	Tambang dalam Pengembangan/ *Mines under Construction*	Properti Tambang pada Tahap Produksi/ *Producing Mines*	Biaya Pengupasan Tanah yang Ditangguhkan/ *Deferred Stripping Cost*	Pertambangan dari Kombinasi Bisnis/ *Mining Properties from Business Combination*	Total/ *Total*	
Harga perolehan pada tanggal 31 Desember 2021	**5.551.632**	**19.539.158**	**60.915.293**	**49.414.420**	**135.420.503**	***Cost as of December 31, 2021***
Penambahan tahun berjalan	148.341	-	19.157.132	-	19.305.473	*Addition during the year*
Harga perolehan pada tanggal 31 Desember 2022	**5.699.973**	**19.539.158**	**80.072.425**	**49.414.420**	**154.725.976**	***Cost as of December 31, 2022***
Penambahan tahun berjalan	777.423	-	15.660.973	-	16.438.396	*Addition during the year*
Dekonsolidasi Grup MDB (Catatan 1c)	(6.477.396)	(4.634.424)	(48.436.358)	(49.414.420)	(108.962.598)	*Deconsolidation MDB Group (Note 1c)*
Harga perolehan pada tanggal 31 Desember 2023	**-**	**14.904.734**	**47.297.040**	**-**	**62.201.774**	***Cost as of December 31, 2023***
Akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2022	**-**	**(15.895.635)**	**(56.351.857)**	**(3.900.997)**	**(76.148.489)**	***Accumulated amortization as of December 31, 2022***
Amortisasi tahun berjalan	-	(584.030)	(13.775.457)	(520.693)	(14.880.180)	*Amortization during the year*
Dekonsolidasi Grup MDB (Catatan 1c)	-	1.648.937	26.453.542	4.421.690	32.524.169	*Deconsolidation MDB Group (Note 1c)*
Akumulasi amortisasi pada tanggal 31 Desember 2023	**-**	**(14.830.728)**	**(43.673.772)**	**-**	**(58.504.500)**	***Accumulated amortization as of December 31, 2023***
Kerugian penurunan nilai properti pertambangan pada tanggal 31 Desember 2022	**-**	**(2.170.971)**	**(1.169.319)**	**(33.878.814)**	**(37.219.104)**	***Impairment losses on mining properties as of December 31, 2022***
Dekonsolidasi Grup MDB (Catatan 1c)	-	2.170.971	1.169.319	33.878.814	37.219.104	*Deconsolidation MDB Group (Note 1c)*
Kerugian penurunan nilai properti pertambangan pada tanggal 31 Desember 2023	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Impairment losses on mining properties as of December 31, 2023***
Nilai tercatat neto pada tanggal 31 Desember 2022	**5.699.973**	**1.472.552**	**22.551.249**	**11.634.609**	**41.358.383**	***Net carrying amount as of December 31, 2022***
Nilai tercatat neto pada tanggal 31 Desember 2023	**-**	**74.006**	**3.623.268**	**-**	**3.697.274**	***Net carrying amount as of December 31, 2023***

Amortisasi properti pertambangan diakui sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Amortization of mining properties are presented as part of "Cost of Revenue" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai properti pertambangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai properti pertambangan.

Management believes that the allowance for impairment losses in the value of mining properties as of December 31, 2023 and 2022 is adequate to cover any losses from the impairment of mining properties.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

14. ASET TAKBERWUJUD - NETO / *14. INTANGIBLE ASSETS - NET*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/*Year Ended December 31, 2023*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Translasi/ *Translation Differences*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Akuisisi kontrak	13.265.848	-	-	-	-	13.265.848	*Contract acquisition*
Perangkat lunak	11.322.325	756.340	-	687.609	22.445	12.788.719	*Software*
Sub-total	**24.588.173**	**756.340**	**-**	**687.609**	**22.445**	**26.054.567**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian Perangkat lunak	3.491.930	340.310	-	(503.731)	42.932	3.371.441	*Construction in progress - Software*
Total biaya perolehan	**28.080.103**	**1.096.650**	**-**	**183.878**	**65.377**	**29.426.008**	***Total acquisition cost***
Akumulasi amortisasi							***Accumulated amortization***
Akuisisi kontrak	4.159.970	1.879.469	-	-	-	6.039.439	*Contract acquisition*
Perangkat lunak	7.373.556	1.571.702	-	-	6.041	8.951.299	*Software*
Total akumulasi amortisasi	**11.533.526**	**3.451.171**	**-**	**-**	**6.041**	**14.990.738**	***Total accumulated amortization***
Rugi penurunan nilai							***Impairment losses***
Perangkat lunak	357.272	-	-	-	7.300	364.572	*Software*
Nilai tercatat neto	**16.189.305**					**14.070.698**	***Net carrying amount***

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/*Year Ended December 31, 2022*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Translasi/ *Translation Differences*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Akuisisi kontrak	13.265.848	-	-	-	-	13.265.848	*Contract acquisition*
Perangkat lunak	8.511.834	2.890.229	-	38.393	(118.131)	11.322.325	*Software*
Sub-total	**21.777.682**	**2.890.229**	**-**	**38.393**	**(118.131)**	**24.588.173**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian Perangkat lunak	2.508.101	1.216.926	-	-	(233.097)	3.491.930	*Construction in progress - Software*
Total biaya perolehan	**24.285.783**	**4.107.155**	**-**	**38.393**	**(351.228)**	**28.080.103**	***Total acquisition cost***
Akumulasi amortisasi							***Accumulated amortization***
Akuisisi kontrak	2.887.720	1.272.250	-	-	-	4.159.970	*Contract acquisition*
Perangkat lunak	5.328.516	2.089.638	-	-	(44.598)	7.373.556	*Software*
Total akumulasi amortisasi	**8.216.236**	**3.361.888**	**-**	**-**	**(44.598)**	**11.533.526**	***Total accumulated amortization***
Rugi penurunan nilai							***Impairment losses***
Perangkat lunak	393.879	-	-	-	(36.607)	357.272	*Software*
Nilai tercatat neto	**15.675.668**					**16.189.305**	***Net carrying amount***

Pada tanggal 31 Oktober 2019, CK menandatangani Kontrak Pengalihan Jasa Pertambangan dengan PT Artamulia Tatapratama ("ATP") dimana ATP mengalihkan hak untuk melakukan pekerjaan jasa pertambangan pada PT Kuansing Inti Makmur ("KIM"), PT Karya Cemerlang Persada ("KCP"), PT Bungo Bara Utama ("BBU") dan PT Bungo Bara Makmur ("BBM") (secara bersama-sama disebut "Grup KIM"). Berdasarkan perjanjian tersebut, CK dapat melakukan pekerjaan langsung di lokasi tambang Grup KIM sejak tanggal 1 November 2019. Atas pengambilalihan kontrak jasa pertambangan Grup KIM dari ATP, CK akan membayar ATP sebesar AS$15.000.000 secara bertahap sampai dengan Desember 2022.

On October 31, 2019, CK signed Mining Services Transfer Contract with PT Artamulia Tatapratama ("ATP") where ATP transfers the rights to perform mining services in PT Kuansing Inti Makmur ("KIM"), PT Karya Cemerlang Persada ("KCP"), PT Bungo Bara Utama ("BBU") and PT Bungo Bara Makmur ("BBM") (collectively referred as "KIM Group"). Based on the agreement, CK is eligible to directly perform services in KIM Group mining areas since November 1, 2019. On the mining services transfer of KIM Group from ATP, CK will pay ATP amounting to US$15,000,000 in installments until December 2022.

14. ASET TAKBERWUJUD - NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya perolehan kontrak tersebut dicatat setara dengan harga tunai biaya perolehannya sebesar AS$13.265.848 dan dicatat sebagai bagian dari "Aset Takberwujud - Neto" dan liabilitas yang muncul terkait kontrak tersebut diakui sebagai bagian dari "Utang Lain-lain Jangka Panjang - Pihak Ketiga" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada bulan April 2022, CK telah melunasi seluruh utang terkait akuisisi kontrak kepada ATP.

Beban bunga atas biaya perolehan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar AS$Nihil dan AS$282.248 dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Amortisasi kontrak akuisisi dihitung menggunakan metode unit produksi. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sisa amortisasi unit produksi masing-masing sebesar 127.167.534 BCM dan 159.329.103 BCM.

Amortisasi aset takberwujud pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar AS$3.451.171 dan AS$3.361.888 dibebankan pada operasi sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dan "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi".

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada aset takberwujud yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman.

14. INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

On December 31, 2019, the acquisition cost of contract is recorded in its cash equivalents amount amounting to US$13,265,848 and is recorded as part of "Intangible Assets - Net" and liabilities arising from the contract transfer is recorded as part of "Long-term Non-trade Payables - Third Parties" in the consolidated statement of financial position.

In April 2022, CK has fully paid all outstanding payables related to contract acquisition to ATP.

The interest expenses from the acquisition cost for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounting to US$Nil and US$282,248, respectively is recorded as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The amortization of contract acquisition is calculated using the unit of production method. As of December 31, 2023 and 2022, the remaining unit of production amortization amounted to 127,167,534 BCM and 159,329,103 BCM, respectively.

The amortization of intangible assets in 2023 and 2022 amounted to US$3,451,171 and US$3,361,888, respectively, and was charged to operation as part of "Cost of Revenue" and "Selling, General and Administrative Expenses".

As of December 31, 2023 and 2022, none of the intangible assets are used as collateral for loans.

15. ASET HAK-GUNA - NETO / *15. RIGHT OF USE ASSETS - NET*

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut: / *The details of right of use assets are as follows:*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/*Year Ended December 31, 2023*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Dekonsolidasi Grup MDB/ *Deconsolidation of MDB Group*	Selisih Translasi/ *Translation Difference*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan								*Acquisition cost*
Bangunan dan prasarana	39.086.439	10.733.890	-	-	(737.784)	557.071	49.639.616	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	1.663.404	418.944	-	-	(22.698)	16.457	2.076.107	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	36.720.745	7.928.143	(76.150)	-	(2.377.855)	111.444	42.306.327	*Vehicles*
Mesin dan peralatan	97.192.811	72.725.165	(562.821)	-	(11.384.422)	55.602	158.026.335	*Machineries and equipment*
Total biaya perolehan	**174.663.399**	**91.806.142**	**(638.971)**	**-**	**(14.522.759)**	**740.574**	**252.048.385**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan								*Accumulated depreciation*
Bangunan dan prasarana	21.250.403	8.585.311	-	-	(685.118)	296.050	29.446.646	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan Peralatan kantor	1.190.929	616.437	-	-	(22.620)	8.966	1.793.712	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	25.109.817	10.574.826	(63.516)	-	(1.999.074)	86.265	33.708.318	*Vehicles*
Mesin dan peralatan	40.396.961	37.603.356	(88.189)	-	(10.612.420)	44.565	67.344.273	*Machineries and equipment*
Total biaya perolehan penyusutan	**87.948.110**	**57.379.930**	**(151.705)**	**-**	**(13.319.232)**	**435.846**	**132.292.949**	***Total accumulated depreciation***
Nilai buku neto	**86.715.289**						**119.755.436**	***Net book value***

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/*Year Ended December 31, 2022*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Selisih Translasi/ *Translation Difference*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Biaya perolehan							*Acquisition cost*
Bangunan dan prasarana	26.315.660	17.824.611	(2.761.141)	-	(2.292.691)	39.086.439	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	936.295	803.560	-	-	(76.451)	1.663.404	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	25.391.641	11.884.644	-	-	(555.540)	36.720.745	*Vehicles*
Kapal	10.040.668	-	-	(9.634.461)	(406.207)	-	*Vessels*
Mesin dan peralatan	65.746.362	36.571.339	-	(4.716.289)	(408.601)	97.192.811	*Machineries and equipment*
Total biaya perolehan	**128.430.626**	**67.084.154**	**(2.761.141)**	**(14.350.750)**	**(3.739.490)**	**174.663.399**	***Total acquisition cost***
Akumulasi penyusutan							*Accumulated depreciation*
Bangunan dan prasarana	16.902.349	7.425.259	(1.465.268)	-	(1.611.937)	21.250.403	*Building and improvements*
Perlengkapan, perabot dan peralatan kantor	523.825	713.759	-	-	(46.655)	1.190.929	*Office furniture, fixtures and equipment*
Kendaraan	15.376.548	10.153.509	-	-	(420.240)	25.109.817	*Vehicles*
Kapal	4.695.865	363.086	-	(4.868.972)	(189.979)	-	*Vessels*
Mesin dan peralatan	22.173.528	20.414.575	-	(1.929.304)	(261.838)	40.396.961	*Machineries and equipment*
Total akumulasi penyusutan	**59.672.115**	**39.070.188**	**(1.465.268)**	**(6.798.276)**	**(2.530.649)**	**87.948.110**	***Total accumulated depreciation***
Rugi penurunan nilai							*Impairment losses*
Kapal	4.447.202	-	-	(4.267.286)	(179.916)	-	*Vessels*
Nilai tercatat neto	**64.311.309**					**86.715.289**	***Net carrying amount***

15. ASET HAK-GUNA - NETO (lanjutan) / *15. RIGHT OF USE ASSETS - NET (continued)*

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: / *Allocation of depreciation expense is as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Beban pokok pendapatan	55.083.176	36.733.658	*Cost of revenue*
Beban penjualan, umum dan administrasi	2.296.754	2.336.530	*Selling, general and administrative expenses*
Total	**57.379.930**	**39.070.188**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

16. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *16. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

Rincian aset tidak lancar lainnya adalah sebagai berikut:

The details of other non-current assets are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Uang jaminan	6.116.459	5.920.816	*Security deposit*
Jaminan reklamasi	2.224.195	2.982.551	*Reclamation deposit*
Uang muka pembelian aset tetap	1.766.568	1.306.466	*Advance for purchase of fixed assets*
Biaya ditangguhkan	522.247	1.163.110	*Deferred charges*
Uang muka investasi	-	25.000.000	*Advance for investment*
Aset lainnya	145.844	571.316	*Other assets*
Total	**10.775.313**	**36.944.259**	***Total***

Pada tanggal 1 Agustus 2022, MDB dan IMK menandatangani Perjanjian Kerja Sama Investasi dimana MDB melakukan uang muka investasi sebesar AS$25.000.000 kepada IMK untuk mengidentifikasi dan memperoleh wilayah pertambangan di Indonesia, khususnya wilayah pertambangan batubara serta melakukan kegiatan eksplorasi dan untuk lebih lanjut dikembangkan menjadi tahap operasi produksi.

On August 1, 2022, MDB and IMK signed an Investment Cooperation Agreement whereby MDB made an advance for investment of US$25,000,000 to IMK to identify and acquire mining areas in Indonesia, especially coal mining areas as well as carry out exploration activities and for further develop them into production operations stage.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

As of December 31, 2023, MDB is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

17. UTANG USAHA / *17. TRADE PAYABLES*

Utang usaha merupakan utang atas pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup, dengan rincian sebagai berikut:

Trade payables represent payables for purchase of goods and services required for the Group's operations, with details as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak ketiga	93.812.596	91.857.356	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 33)	161.638.568	134.596.398	*Related parties (Note 33)*
Total	**255.451.164**	**226.453.754**	***Total***

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

The details of trade payables to third parties based on suppliers are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Pertamina Patra Niaga	30.959.006	32.369.237	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT AKR Corporindo Tbk	7.352.929	2.506.617	*PT AKR Corporindo Tbk*
PT Sefas Pelindotama	3.371.119	2.384.925	*PT Sefas Pelindotama*
PT Bagong Dekaka Makmur	2.437.414	993.974	*PT Bagong Dekaka Makmur*
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	2.152.182	1.869.244	*PT Hexindo Adiperkasa Tbk*
PT Hanwha Mining Services Indonesia	1.276.744	1.594.852	*PT Hanwha Mining Services Indonesia*
PT United Tractors Tbk	1.161.815	2.319.759	*PT United Tractors Tbk*
PT Dahana (Persero)	1.036.370	539.671	*PT Dahana (Persero)*
PT Andakara Niaga Bumi	-	2.161.688	*PT Andakara Niaga Bumi*
PT Tirta Nusa Buana	-	1.662.753	*PT Tirta Nusa Buana*
Lain-lain (masing-masing di bawah AS$1.000.000)	44.065.017	43.454.636	*Others (below US$1,000,000 each)*
Total	**93.812.596**	**91.857.356**	***Total***

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

The details of trade payables based on currencies are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Dolar Amerika Serikat	162.085.584	3.801.717	*United States dollar*
Rupiah	91.257.272	222.001.413	*Rupiah*
Euro	1.335.332	203.370	*Euro*
Mata uang lainnya	772.976	447.254	*Other foreign currencies*
Total	**255.451.164**	**226.453.754**	***Total***

17. UTANG USAHA (lanjutan) / *17. TRADE PAYABLES (continued)*

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut: / *The details of aging of trade payables are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Belum jatuh tempo	243.549.597	210.382.926	*Not past due*
Lewat jatuh tempo:			*Overdue:*
1 - 30 hari	6.924.058	10.263.382	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	2.888.474	1.660.707	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	1.078.405	1.507.444	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	1.010.630	2.639.295	*More than 90 days*
Total	**255.451.164**	**226.453.754**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha di atas. / *As of December 31, 2023 and 2022, there were no collateral provided by the Group for the above trade payables.*

18. UTANG BANK / *18. BANK LOANS*

Utang bank jangka pendek / *Short-term bank loans*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Dolar Amerika Serikat			*United States dollar*
PT Bank Negara Indonesia	28.500.000	-	*PT Bank Negara Indonesia*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26.000.000	48.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Sub-total	54.500.000	48.000.000	*Sub-total*
Rupiah			*Rupiah*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia	8.432.797	-	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.486.767	12.043.975	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Sub-total	14.919.564	12.043.975	*Sub-total*
Total	**69.419.564**	**60.043.975**	***Total***

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

SSB

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 56 tanggal 11 November 2021, SSB menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan *Demand Loan* dengan OCBC dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp285.000.000.000.

Pada tanggal 8 November 2022, SSB menandatangani Perubahan Perjanjian Pinjaman dengan OCBC, yang mengubah beberapa ketentuan berikut:

i. Menambah dan mengubah jumlah batas maksimum fasilitas menjadi:
   - Fasilitas *Demand Loan* ("DL") dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp185.000.000.000, digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional SSB.
   - Fasilitas *Trade Purchase Financing* ("TPF *Sublimit* TPF AP") jumlah batas maksimum sebesar Rp100.000.000.000, digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja SSB.

Pada tanggal 7 Desember 2023, SSB menandatangani Perubahan Perjanjian Pinjaman dengan OCBC terkait dengan fasilitas *Demand Loan*, dengan perubahan sebagai berikut:

- Penurunan jumlah batas Fasilitas TPF dengan jumlah batas menjadi sebesar Rp85.000.000.000.
- Penambahan jumlah batas Fasilitas DL dengan jumlah batas menjadi sebesar Rp200.000.000.000.
- Perjanjian ini berlaku sampai dengan 15 Desember 2024.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

SSB

Based on Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 56 dated November 11, 2021, SSB entered into Demand Loan Banking Facility Agreement with OCBC with maximum limit of Rp285,000,000,000.

On November 8, 2022, SSB entered into Amendment of Loan Agreement with OCBC, which change several terms as follows:

i. Add and changes the maximum credit limit to become:
   - *Demand Loan ("DL") Facility with maximum credit limit amounting to Rp185,000,000,000, to be utilized for operational purposes of SSB.*
   - *Trade Purchase Financing ("TPF Sublimit TPF AP") Facility with maximum credit limit amounting to Rp100,000,000,000, to be utilized for working capital of SSB.*

On December 7, 2023, SSB entered into Amendment of Loan Agreement with OCBC related to Demand Loan facility, with changes as follows:

- *Decrease in TPF Facility limit to became Rp85,000,000,000.*
- *Addition in DL Facility limit to became Rp200,000,000,000.*
- *This agreement is valid until December 15, 2024.*

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (lanjutan)

SSB (lanjutan)

Untuk setiap penarikan pinjaman, SSB harus memberikan surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar yang ditandatangani oleh SSB dan Perusahaan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang tertentu per tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$734.070 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo utang bank atas fasilitas ini sebesar Rp100.000.000.000 (setara dengan AS$6.486.767).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SSB juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, SSB telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

PWP

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 159 tanggal 31 Januari 2022, PWP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Trade Purchase Financing* ("Fasilitas TPF") dengan OCBC dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp155.000.000.000.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (continued)

SSB (continued)

For each loan withdrawal, SSB is required to submit notification letter and payment commitment signed by SSB and the Company.

This loan bears a certain floating interest rate per annum.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$734,070 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, bank loan balance related to this facility amounted to Rp100,000,000,000 (equivalent to US$6,486,767).

Based on the loan agreement, SSB is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, SSB has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

PWP

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 159 dated January 31, 2022, PWP entered into Trade Purchase Financing Facility ("TPF Facility") Agreement with OCBC with maximum limit of Rp155,000,000,000.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (lanjutan)

PWP (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 33/ILS-JKT/PK/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, PWP dan OCBC setuju untuk:

a) Mengalihkan Fasilitas TPF kedalam Fasilitas *Trade* Gabungan.
b) Menambah Fasilitas Bank Garansi ("Fasilitas BG") dalam Fasilitas *Trade* Gabungan; sehingga Fasilitas *Trade* Gabungan menjadi sebagai berikut:
   i. Fasilitas TPF dengan jumlah batas maksimal Rp155.000.000.000.
   ii. Fasilitas BG dengan jumlah batas maksimal Rp600.000.000.000.

   Jumlah penggunaan Fasilitas TPF dan Fasilitas BG dengan jumlah batas maksimal bersama-sama tidak melebihi Rp600.000.000.000.
c) Memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 07/ILS-JKT/PK/I/2023 tanggal 16 Januari 2024, PWP dan OCBC setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.

Untuk setiap penarikan pinjaman, PWP harus memberikan surat pemberitahuan penarikan dan janji bayar yang ditandatangani oleh PWP dan Perusahaan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang tertentu per tahun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$Nihil.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo yang digunakan adalah sebesar AS$Nihil.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, PWP juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, PWP telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (continued)

PWP (continued)

Based on Amendment Loan Agreement No. 33/ILS-JKT/PK/I/2023 dated January 27, 2023, PWP and OCBC agreed to:

a) Transfering TPF Facility to Joint Trade Facility.
b) Adding Bank Guarantee Facility ("BG Facility") in the Joint Trade Facility; so that the Joint Trade Facility becomes as follows:
   i. TPF Facility with a maximum limit of Rp155,000,000,000.
   ii. BG Facility with a maximum limit of Rp600,000,000,000.

   Total use of the TPF Facility and BG Facility with a total maximum limit together not exceeding Rp600,000,000,000.
c) Extending the term of the loan facility until January 31, 2024.

Based on Amendment Loan Agreement No. 07/ILS-JKT/PK/I/2023 dated January 16, 2024, PWP and OCBC agreed to extend the term of the loan facility until January 31, 2025.

For each loan withdrawal, PWP is required to submit notification letter and payment commitment signed by PWP and the Company.

This loan bears a certain floating interest rate per annum.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$Nil.

As of December 31, 2023, the Loan Facility used amounted to US$Nil.

Based on the loan agreement, PWP is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, PWP has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (lanjutan)

Grup CKB

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 160 tanggal 31 Januari 2022, CKB, ATR, BDD, PBR dan DDE ("Debitur") menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Demand Loan* dengan OCBC dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp60.000.000.000, dengan ketentuan sebagai berikut:

- CKB dapat melakukan penarikan sampai dengan Rp25.000.000.000.
- ATR dapat melakukan penarikan sampai dengan Rp4.000.000.000.
- BDD dapat melakukan penarikan sampai dengan Rp60.000.000.000.
- PBR dapat melakukan penarikan sampai dengan Rp25.000.000.000.
- DDE dapat melakukan penarikan sampai dengan Rp60.000.000.000.

Dimana pada setiap waktu total penggunaan fasilitas *demand loan* secara bersama-sama oleh CKB, ATR, BDD, PBR dan DDE tidak melebihi batas Rp60.000.000.000.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga mengambang tertentu per tahun.

Fasilitas ini berakhir pada 30 Januari 2023.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 41 tanggal 26 Maret 2021, Perusahaan, TIA dan CK ("Debitur") menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Mandiri untuk penyediaan Kredit Modal Kerja sebesar AS$50.000.000 dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional entitas anak. Fasilitas ini berakhir pada 25 Maret 2022.

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 6 tanggal 13 Mei 2022, Perusahaan, TIA dan CK ("Debitur") menandatangani ulang Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Mandiri untuk penyediaan Kredit Modal Kerja sebesar AS$50.000.000 dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional entitas anak.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") (continued)

CKB Group

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 160 dated January 31, 2022, CKB, ATR, BDD, PBR and DDE ("Debtor") entered into Demand Loan Facility Agreement with OCBC with maximum limit of Rp60,000,000,000 with the following terms:

- *CKB can withdraw up to Rp25,000,000,000.*
- *ATR can withdraw up to Rp4,000,000,000.*
- *BDD can withdraw up to Rp60,000,000,000.*
- *PBR can withdraw up to Rp25,000,000,000.*
- *DDE can withdraw up to Rp60,000,000,000.*

When the demand loan facility is used altogether by CKB, ATR, BDD, PBR and DDE is not exceeding the maximum limit of Rp60,000,000,000.

This loan bears certain floating interest rate per annum.

This facility end on January 30, 2023.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Based on the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 41 dated March 26, 2021, the Company, TIA and CK ("Debtor") entered into Banking Facilities Agreement with Mandiri related to the availability of Working Capital Loan Facilities amounting to US$50,000,000 used for the operational activities. This Facility end at March 25, 2022.

Based on the Notarial Deed of Muhammad Hanafi, S.H., No. 6 dated May 13, 2022, the Company, TIA and CK ("Debtor") re-entered into Banking Facilities Agreement with Mandiri related to the availability of Working Capital Loan Facilities amounting to US$50,000,000 used for the operational activities.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

Berdasarkan Adendum II perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 18 April 2023, fasilitas ini akan berakhir pada 24 April 2024.

Berdasarkan Adendum III perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 24 Mei 2023, beberapa ketentuan diubah menjadi:

- Limit maksimum Fasilitas Kredit Modal Kerja menjadi sebesar AS$100.000.000 dan bisa ditarik dalam mata uang Rupiah Indonesia atau Dolar Amerika Serikat.
- Menambahkan PWP sebagai *co-borrower.*

Untuk setiap penarikan pinjaman, CK, TIA, PWP harus memberikan surat pemberitahuan penarikan yang ditandatangani oleh CK, TIA, PWP dan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, fasilitas ini dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$1.563.707 dan AS$803.686 dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$26.000.000 dan AS$48.000.000.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

Based on the Addendum II to the Working Capital Facility Agreement dated April 18, 2023, this facility will end at April 24, 2024.

On May 24, 2023, based on Addendum III to the Working Capital Facility Agreement there are several clause is changed to:

- *Maximum limit of the Working Capital Loan Facilities increased to US$100,000,000 and can be drawn in Indonesian Rupiah or United States dollar.*
- *Adding PWP as co-borrower.*

For each loan withdrawal, CK, TIA, PWP are required to submit notification letter signed by CK, TIA, PWP and the Company.

Based on the agreement, this facility bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$1,563,707 and US$803,686 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this loan facility is amounting to US$26,000,000 and US$48,000,000, respectively.

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Berdasarkan Akta Notaris Arry Supratno, S.H., No. 6 tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan BNI dengan jumlah batas maksimum pinjaman sebesar AS$50.000.000 yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional entitas anak.

Berdasarkan Akta Notaris Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., No. 9 tanggal 11 Februari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit, Fasilitas Kredit Modal Kerja *existing* bersifat *co-borrower* yang dapat digunakan oleh TIA dan CK dengan limit maksimum pembagian sebagai berikut:

- TIA sebesar AS$10.000.000
- CK sebesar AS$40.000.000

Untuk setiap penarikan pinjaman, TIA dan CK harus memberikan surat pemberitahuan penarikan yang ditandatangani oleh TIA, CK dan Perusahaan.

Penggunaan maksimum *sharing limit* bersifat *interchangable* atau limitasi maksimum yang digunakan oleh *co-borrower* dapat disesuaikan dengan kebutuhan *co-borrower* selama limit maksimum penggunaan tidak melebihi batas maksimal fasilitas kredit sebesar AS$50.000.000.

Pada tanggal 9 Mei 2023, Perusahaan menandatangani amendemen perjanjian pinjaman dengan BNI, untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya fasilitas sampai dengan tanggal 10 Mei 2024.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, fasilitas ini dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$567.397 dan AS$412.529 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$28.500.000 dan AS$Nihil.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Based on Notarial Deed of Arry Supratno S.H., No. 6 dated May 11, 2021, the Company entered into a Working Capital Loan Facility with BNI, with maximum limit of US$50,000,000 which can be used for the operations activities of the Company's subsidiaries.

Based on Notarial Deed of Bayu Nirwana Sari, S.H., M.Kn., No. 9 dated February 11, 2022, regarding to Amendment Loan Agreement, the existing Working Capital Loan Facility is co-borrower which can be used by TIA and CK with maximum distribution limit as follows:

- *TIA amounting to US$10,000,000*
- *CK amounting to US$40,000,000*

For every loan drawdown, TIA and CK are required to submit a letter of drawdown notice signed by TIA, CK and the Company.

The sharing limit maximum drawdown is interchangeable or maximum limit used by co-borrower can be adjusted according to their needs as long as the maximum drawdown is not exceeding the maximum credit facility amounting to US$50,000,000.

On May 9, 2023, the Company amended the loan agreement with BNI, to extend the availability period of the facilities up to May 10, 2024.

Based on the agreement, this facility bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$567,397 and US$412,529 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this loan is amounting to US$28,500,000 and US$Nil, respectively.

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Berdasarkan Akta Notaris Irma Devita Purnamasari, S.H., No. 26 tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan, CK, TIA, dan Reswara menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Permata, pihak ketiga, untuk Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* mencakup fasilitas *revolving loan*, LC/SKBDN, *post import financing* dan bank garansi dengan jumlah batas maksimum fasilitas sebesar AS$10.000.000.

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perusahaan menandatangani amendemen perjanjian pinjaman dengan Permata untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya fasilitas sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.

Untuk setiap penarikan pinjaman, CK, TIA dan Reswara harus memberikan surat pemberitahuan penarikan yang ditandatangani oleh CK, TIA, Reswara dan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, fasilitas ini dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar AS$Nihil.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$Nihil.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Based on the Notarial Deed of Irma Devita Purnamasari, S.H., No. 26 dated June 29, 2021, the Company, CK, TIA, and Reswara entered into Banking Facilities Agreement with Permata, a third party, for Omnibus Revolving Loan Facility including revolving loan facility, LC/SKBDN, post-import financing and bank guarantee with a maximum facility limit of US$10,000,000.

On June 26, 2023, the Company amended the loan agreement with Permata, to extend the availability period of the facilities up to January 29, 2024.

For every loan drawdown, CK, TIA and Reswara are required to submit a letter of drawdown notice signed by CK, TIA, Reswara and the Company.

Based on the agreement, this facility bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$Nil, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this loan facility is amounting to US$Nil, respectively.

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

KMK - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria No. 123 tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan dan beberapa entitas anaknya (CK, Reswara, TIA dan PWP) menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan BRI, untuk penyediaan fasilitas Kredit Modal Kerja RK dengan batas maksimum sebesar AS$50.000.000 kepada Perusahaan, CK, Reswara, TIA dan PWP untuk keperluan modal kerja dengan jangka waktu 12 bulan.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK, Reswara, TIA dan PWP harus terlebih dahulu mendapatkan counter-sign dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Perbankan dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$239.486 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar AS$Nihil.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

KMK - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria S.H., M.Kn., No. 123 dated May 24, 2023, the Company and certain subsidiaries (CK, Reswara, TIA and PWP) entered into Working Capital Facility Agreement with BRI, for the availability of Working Capital facility with maximum credit limit amounting to US$50,000,000, where this facility is used for working capital and with terms 12 months.

For every request credit withdrawal made by CK, Reswara, TIA and PWP it must first obtain a countersign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Banking Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$239,486 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, the outstanding balance of this loan is amounting to US$Nil.

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka pendek (lanjutan)

KMK - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")

Berdasarkan surat keterangan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., tanggal 21 Desember 2023, Perusahaan dan CK menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor dengan LPEI dengan batas maksimum sebesar Rp500.000.000.000, dimana fasilitas ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja ekspor. Fasilitas ini akan berakhir 12 bulan sejak penanda-tanganan perjanjian kredit. Jangka waktu per penarikan maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat di*rollover* minimal 6 (bulan) bulan.

Pada tanggal 18 Desember 2023, Perusahaan dan CK menandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor dengan LPEI dengan batas maksimum sebesar Rp500.000.000.000, dimana fasilitas ini digunakan untuk kebutuhan modal kerja ekspor. Fasilitas ini akan berakhir 12 bulan sejak penanda-tanganan perjanjian kredit. Jangka waktu per penarikan maksimal 3 (tiga) bulan dan dapat di*rollover* minimal 6 (enam) bulan.

Untuk setiap penarikan pinjaman, CK harus memberikan surat pemberitahuan penarikan yang ditandatangani oleh CK dan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Perbankan dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$7.111 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas ini sebesar AS$8.432.797.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Short-term bank loans (continued)

KMK - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")

Based on Notary Statement of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dated December 21, 2023, the Company and CK entered into Export Working Capital Facility with LPEI with maximum credit limit amounting to Rp500,000,000,000, where this facility is utilized for export working capital. This facility will mature in 12 months since the signing agreement date. The maturity term of each withdrawal is maximum 3 (three) months and can be rolled-over minimum for 6 (six) months.

On December 18, 2023, the Company and CK entered into Export Working Capital Facility with LPEI with maximum credit limit amounting to Rp500,000,000,000, where this facility is utilized for export working capital. This facility will mature in 12 months since the signing agreement date. The maturity term of each withdrawal is maximum 3 (three) months and can be rolled-over minimum for 6 (six) months.

For every loan drawdown, CK is required to submit a letter of drawdown notice signed by CK and the Company.

Based on the agreement, the Banking Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$7,111 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, the outstanding balance of this loan is amounting to US$8,432,797.

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan) / *18. BANK LOANS (continued)*

Utang bank jangka pendek (lanjutan) / *Short-term bank loans (continued)*

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Payments made for short-term bank loans are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Working capital loan	149.999.000	45.500.000	*Working capital loan*
PT Bank Rakyat Indonesia			*PT Bank Rakyat Indonesia*
Working capital loan	35.000.000	-	*Working capital loan*
PT Bank OCBC NISP Tbk			*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Revolving	28.793.332	22.086.516	*Revolving*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Working capital loan	28.500.000	45.500.000	*Working capital loan*
Total	**242.292.332**	**113.086.516**	***Total***

Utang bank jangka panjang / *Long-term bank loans*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perusahaan			***The Company***
Dolar Amerika Serikat			*United States dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27.415.000	45.625.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27.415.000	45.625.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(173.427)	(377.523)	*Unamortized transaction cost*
Sub-total	54.656.573	90.872.477	*Sub-total*
Entitas Anak			***Subsidiaries***
Dolar Amerika Serikat			*United States dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	242.931.549	305.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	100.000.000	-	*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	98.181.829	120.000.000	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*
PT Bank Permata Tbk	50.000.000	-	*PT Bank Permata Tbk*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	20.013.640	20.000.000	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	19.275.000	109.150.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	105.635.868	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank OCBC NISP	3.892.060	-	*PT Bank OCBC NISP*
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(5.312.668)	(8.240.231)	*Unamortized transaction cost*
Sub-total	634.617.278	545.909.769	*Sub-total*
Total	689.273.851	636.782.246	*Total*
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(186.938.153)	(120.419.068)	*Less: Current maturities*
Bagian jangka panjang	**502.335.698**	**516.363.178**	***Long-term portion***

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Pinjaman Kredit Sindikasi - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 15 tanggal 26 Oktober 2021, Perusahaan dan CK ("Debitur") menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Mandiri dan BNI sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("MLA") untuk penyediaan Fasilitas *Tranche A* dan Fasilitas *Tranche B*. Fasilitas *Tranche A* sebesar AS$100.000.000 digunakan untuk pembiayaan kembali sebagian Notes 2022 dan Fasilitas *Tranche B* sebesar AS$50.000.000 digunakan sebagai belanja modal. Fasilitas ini akan berakhir pada 23 Desember 2025.

Untuk setiap penarikan pinjaman Fasilitas *Tranche B*, CK harus memberikan surat pemberitahuan penarikan yang ditandatangani oleh CK dan Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Kredit Bergulir Pinjaman Kredit Sindikasi dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$11.827.164 dan AS$9.206.579 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$93.380.000 dan AS$141.250.000.

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

Pinjaman Kredit Sindikasi dijamin dengan aset tetap tertentu berupa mesin dan peralatan (Catatan 12).

18. BANK LOANS (continued)

***Long-term bank loans* (continued)**

Syndicated Credit Facility - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Based on the Notarial Deed of Fathiah Helmi, S.H., No. 15 dated October 26, 2021, the Company and CK ("Debtor") entered into Banking Facilities Agreement with Mandiri and BNI as a Mandated Lead Arrangers ("MLA") related to the availability of Tranche A and Tranche B Facilities. Tranche A Facility amounting to US$100,000,000 is used to partially refinance 2022 Notes and Tranche B Facility amounting to US$50,000,000 is used for capital expenditures. This Facility will end on December 23, 2025.

For every loan drawdown of Tranche B Facilities, CK is required to submit a letter of drawdown notice signed by CK and the Company.

Based on the agreement, the Revolving Credit Facility Syndicated Credit Facility bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this loan facility is amounting to US$11,827,164 and US$9,206,579 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this loan is amounting to US$93,380,000 and US$141,250,000, respectively.

The Banking Facilities Agreement provides several negative covenants for the Company. The Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

The Syndicated Credit Facility is secured by certain fixed assets in the form of machinery and equipment (Note 12).

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Term Loan Facility ("TLF") - Mandiri

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 29 tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan dan CK ("Debitur") menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan Mandiri untuk penyediaan Fasilitas *Term Loan* sebesar AS$50.000.000 yang digunakan untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin yang digunakan pada *Permitted Business*. Fasilitas ini akan berakhir pada 23 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan sampai dengan 23 Maret 2027.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK harus terlebih dahulu mendapatkan *counter-sign* dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas *Term Loan* dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar AS$4.351.099 dan AS$1.023.724 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$39.449.371 dan AS$50.000.000.

Perjanjian Fasilitas *Term Loan* tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

Term Loan Facility ("TLF") - Mandiri

Based on the Notarial Deed of Muhammad Hanafi, S.H., No. 29 dated May 27, 2022, the Company and CK ("Debtor") entered into Banking Facilities Agreement with Mandiri related to the availability of Term Loan Facilities amounting to US$50,000,000 used for financing heavy equipment and/or machinery acquisition which used in Permitted Business. This Facility will end on June 23, 2026 with an option to extend to March 23, 2027

For every request credit withdrawal made by CK, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Term Loan Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$4,351,099 and US$1,023,724, respectively and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this loan facility is amounting to US$39,449,371 and US$50,000,000, respectively.

The Term Loan Facilities provides several negative covenants for the Company. The Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

TLF Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 157 dan 158 tanggal 27 Juni 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas LPEI Konvensional untuk Kredit Investasi Ekspor sebesar AS$25.000.000 yang digunakan untuk pembelian alat baru dan bekas serta mesin-mesin yang akan digunakan oleh anak usaha yaitu CK dan Fasilitas LPEI Syariah untuk Pembiayaan Investasi Ekspor sebesar AS$25.000.000 yang digunakan untuk pembelian alat baru dan bekas serta mesin-mesin yang akan digunakan oleh anak usaha yaitu CK.

Fasilitas ini akan berakhir pada 25 Juni 2026 dengan opsi perpanjangan sampai dengan 25 Maret 2027.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK harus terlebih dahulu mendapatkan *counter-sign* dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Kredit Investasi Ekspor dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$4.158.720 dan AS$1.200.414 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$41.000.000 dan AS$50.000.000.

Perjanjian Fasilitas *Term Loan* tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

TLF Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 157 and 158 dated June 27, 2022, The Company entered into conventional LPEI for Export Investment Credit amounting to US$25,000,000 which used for purchase new and used equipment and machines that will be used by CK and Sharia LPEI for Export Investment Financing amounting to US$25,000,000 which uses for purchase new and used equipment and machines that will be used by CK.

This facility will end at June 25, 2026 with and option to extend until March 25, 2027.

For every request credit withdrawal made by CK, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Export Investment Credit Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$4,158,720 and US$1,200,414, respectively and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of this loan facility is amounting to US$41,000,000 and US$50,000,000, respectively.

The Term Loan Facilities provides several negative covenants for the Company. The Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

MIFA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Berdasarkan Akta Notaris Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., No. 119 tanggal 27 Juli 2022, MIFA ("Debitur") menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dengan BNI untuk penyediaan Fasilitas *Tranche A, Tranche B* dan *Tranche C. Tranche A*, Fasilitas *Senior Secured Term Loan*, sebesar AS$99.000.000 digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman dari pihak berelasi, *Tranche B*, Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor, sebesar AS$30.000.000 digunakan untuk pembiayaan L/C Export dan SKBDN dan *Tranche* C, Fasilitas *Treasury Line*, sebesar AS$5.000.000 digunakan untuk transaksi mata uang asing/*spot*/TOM/*forward* dan derivatif.

Fasilitas ini akan berakhir 30 bulan untuk Fasilitas *Tranche A* dan 12 bulan sejak tanggal perjanjian ditandatangani untuk *Tranche B* dan *C*.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Perbankan dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$6.321.026 dan AS$2.346.906 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar AS$84.150.000.

Perjanjian Fasilitas Perbankan tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi MIFA. Berdasarkan perjanjian pinjaman, MIFA juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

MIFA

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Based on the Notarial Deed of Surjadi, S.H., MKn., MM., MH., No. 119 dated July 27, 2022, MIFA ("Debtor") entered into Banking Facilities Agreement with BNI related to the availability of Tranche A, Tranche B and Tranche C Facilities. Tranche A, Senior Secured Term Loan Facility, amounting to US$99,000,000 is used to refinance loan from related party, Tranche B, Export Notes Negotiation Facility, amounting to US$30,000,000 is used to finance L/C export and SKBDN and Tranche C, Treasury Line Facility amounting to US$5,000,000, is used to foreign exchange/Spot/TOM/Forward and derivatives line transaction.

This facility will end 30 months for Tranche A Facility and 12 months since the signing of the agreement for Tranche B Facility and Tranche C Facility.

Based on the agreement, the Banking Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$6.321.026 and US$2,346,906, respectively and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2022, the outstanding balance of this loan facility is amounting to US$84,150,000.

The Banking Facilities provides several negative covenants for MIFA. Based on the agreement, MIFA is also required to maintain certain financial ratios.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

MIFA (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, MIFA telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

RJR

Pinjaman Kredit Sindikasi

Berdasarkan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., No. 19 tanggal 9 September 2022, RJR ("Debitur") mengadakan Perjanjian Kredit Sindikasi Fasilitas *Senior Secured Term Loan* dengan Mandiri sebesar AS$320.000.000 digunakan untuk membiayai pembelian 30% saham GEMS dari GMR. Fasilitas ini akan berakhir pada 31 Desember 2027.

Berdasarkan Perjanjian Pemindahan tanggal 13 September 2022, Mandiri ("Kreditur Lama") sepakat untuk memindahkan sebagian komitmen untuk membiayai pembelian 30% saham GEMS dari GMR sebesar AS$70.000.000 kepada LPEI. Kemudian berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 7 November 2022, Mandiri juga sepakat untuk memindahkan sebagian komitmen untuk membiayai pembelian 30% saham GEMS dari GMR sebesar AS$20.000.000 kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 13 Februari 2023, komitmen untuk membiayai pembelian 30% saham GEMS dari GMR untuk PT Bank JTrust Indonesia Tbk sebesar AS$24.500.000.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

MIFA (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)

As of December 31, 2022, MIFA has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

RJR

Syndicated Credit Facility

Based on the Notarial Deed of Muhammad Hanafi, S.H., No. 19 dated September 9, 2022, RJR ("Debtor") entered Syndicated Credit Facility Senior Secured Term Loan Facilities with Mandiri amounting to US$320,000,000 used for purchasing the 30% shares of GEMS from GMR. This Facility will end at December 31, 2027.

Based on Transfer Agreement dated September 13, 2022, Mandiri ("Initial Creditor") agreed to transfer some commitment to finance the purchase of 30% shares of GEMS from GMR amounting to US$70,000,000 to LPEI. Then based on Transfer Agreement dated November 7, 2022, Mandiri also agreed to transfer some commitment to finance the purchase of 30% shares of GEMS from GMR amounting to US$20,000,000 to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Based on Transfer Agreement dated February 13, 2023, transferred commitment to finance the purchase of 30% shares of GEMS from GMR to PT Bank JTrust Indonesia Tbk amounting to US$24,500,000.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

RJR (lanjutan)

Pinjaman Kredit Sindikasi (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas *Senior Secured Term Loan* dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar AS$29.521.465 dan AS$7.959.297 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar AS$261.402.649 dan AS$320.000.000.

Berdasarkan Perjanjian Gadai Saham (Kondisional) Nomor 22 tanggal 9 September 2022, Pinjaman Kredit Sindikasi dijamin dengan hak atas gadai 30% saham GEMS yang dimiliki RJR sebanyak 1.764.705.900 lembar dan saham tambahan yang sewaktu-waktu diberikan kepada RJR akibat pembayaran dividen atau akibat pemecahan atau konversi saham sesuai yang tertulis dalam Perjanjian tersebut.

Perjanjian Kredit Sindikasi tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi RJR. Berdasarkan perjanjian Kredit Sindikasi tersebut, RJR juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, RJR telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

RJR (continued)

Syndicated Credit Facility (continued)

Based on the agreement, the Senior Secured Term Loan Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense from this facility is amounting to US$29,521,465 and US$7,959,297, respectively, and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 and 2022 , the outstanding balance of this loan facility is amounting to AS$261,402,649 and US$320,000,000, respectively.

Based on Pledge of Shares Agreement (Conditional) Number 22 dated September 9, 2022, the Syndicated Credit Facility is secured by the right to pledge 30% shares of GEMS owned by RJR totalling to 1,764,705,900 shares and additional shares which can be given to RJR from time to time as a result of dividend payments or as a result of a split or conversion of shares as written in the Agreement.

The Syndicated Credit Facility provides several negative covenants for RJR. Based on the Syndicated Credit Facility, RJR is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, RJR has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

SSB

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Pada tanggal 24 Februari 2023, SSB menandatangani Perubahan Perjanjian Pinjaman dengan OCBC terkait dengan fasilitas *Demand Loan*, dengan perubahan sebagai berikut:

- Penambahan fasilitas baru berupa Fasilitas *Term Loan* dengan jumlah batas sebesar Rp60 miliar.

Fasilitas *Term Loan* berlaku sampai dengan 24 Februari 2028.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh SSB, harus terlebih dahulu mendapatkan counter-sign dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas *Term Loan* dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$210.735 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar AS$3.892.060.

Perjanjian Pinjaman tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi SSB. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, SSB juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, SSB telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

SSB

PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

On February 24, 2023, SSB entered into Amendment of Loan Agreement with OCBC related to Demand Loan facility, with changes as follows:

- *Addition of new facility which is Term Loan Facility with maximum credit limit amounting to Rp60 billion.*

Term Loan Facility is available until February 24, 2028.

For every request credit withdrawal made by SSB, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Term Loan Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$210,735 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, the outstanding balance of this loan facility amounted to US$3,892,060.

The Loan Agreement provides several negative covenants for SSB. Based on the Loan Agreement, SSB is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, SSB has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan dan CK

Perjanjian Term Loan dengan PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perusahaan dan CK menandatangani Surat Penawaran Fasilitas Perbankan dengan Permata untuk penyediaan fasilitas *Term Loan* dengan batas maksimum sebesar AS$50.000.000, dimana fasilitas ini hanya digunakan oleh CK untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin yang digunakan pada *Permitted Business*. Fasilitas ini akan berakhir pada 30 Januari 2028.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK harus terlebih dahulu mendapatkan *counter-sign* dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Term Loan dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$3.698.105 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar AS$50.000.000.

Perjanjian Pinjaman tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

The Company and CK

Term Loan Agreement with PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On January 27, 2023, the Company and CK entered into Banking Facility Offer Letter with Permata for the availability of Term Loan facility with maximum credit limit amounting to US$50,000,000, where this facility is solely used by CK to finance the purchase of heavy equipment and/or machineries used in Permitted Business. This facility will mature on January 30, 2028.

For every request credit withdrawal made by CK, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Term Loan Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$3,698,105 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, the outsatanding balance of this loan facility is amounting to US$50,000,000.

The Loan Agreement provides several negative covenants for the Company. Based on the Loan Agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan dan CK (lanjutan)

Perjanjian Term Loan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan dan CK menandatangani Surat Penawaran Fasilitas Perbankan dengan Mandiri untuk penyediaan fasilitas *Term Loan* dengan batas maksimum sebesar Rp1.875.000.000.000, dimana fasilitas ini hanya digunakan oleh CK untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin yang digunakan pada *Permitted Business*. Fasilitas ini akan berakhir pada 23 Juni 2026 dengan opsi dapat diperpanjang sampai 23 Juni 2028.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK harus terlebih dahulu mendapatkan *counter-sign* dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas *Term Loan* dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$4.822.258 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar AS$105.635.868.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

The Company and CK (continued)

Term Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

On April 18, 2023, the Company and CK entered into Banking Facility Offer Letter with Mandiri for the availability of Term Loan facility with maximum credit limit amounting to Rp1,875,000,000,000, where this facility is solely used by CK to finance the purchase of heavy equipment and/or machineries used in Permitted Business. This facility will mature on June 23, 2026 with option to extend until June 23, 2028.

For every request credit withdrawal made by CK, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Term Loan Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$4,822,258 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, the outstanding balance of this loan facility is amounting to US$105,635,868.

Based on the Loan Agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan dan CK (lanjutan)

Perjanjian Term Loan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

Pada tanggal 21 Desember 2023, Perusahaan dan CK menandatangani Surat Penawaran Fasilitas Perbankan dengan Mandiri untuk penyediaan fasilitas *Term Loan* dengan batas maksimum sebesar Rp1.600.000.000.000, dimana fasilitas ini hanya digunakan oleh CK untuk membiayai pembelian alat berat dan/atau mesin sehubungan dengan kegiatan pertambangan. Fasilitas ini akan berakhir pada 23 Juni 2026 dengan opsi dapat diperpanjang sampai 23 Desember 2028.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK harus terlebih dahulu mendapatkan *counter-sign* dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Term Loan dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$Nihil.

Pada tanggal 31 Desember 2023 saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah sebesar AS$Nihil.

Perjanjian Pinjaman tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

The Company and CK (continued)

Term Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

On December 21, 2023, the Company and CK entered into Banking Facility Offer Letter with Mandiri for the availability of Term Loan facility with maximum credit limit amounting to Rp1,600,000,000,000, where this facility is solely used by CK to finance the purchase of heavy equipment and/or machineries in relation to mining activities. This facility will mature on June 23, 2026 with option to extend until December 23, 2028.

For every request credit withdrawal made by CK, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Term Loan Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$Nil.

As of December 31, 2023, the outstanding balance of this loan is amounting to US$Nil.

The Loan Agreement provides several negative covenants for the Company. Based on the Loan Agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan)

Utang bank jangka panjang (lanjutan)

Perusahaan dan CK (lanjutan)

Perjanjian Term Loan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ("BRI")

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria No. 122 tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan dan CK menandatangani Perjanjian Kredit Bilateral dengan BRI, untuk penyediaan fasilitas Transaksi Khusus dengan batas maksimum sebesar AS$100.000.000 untuk keperluan capital expenditure berupa pembelian aset. Fasilitas ini akan berakhir pada 24 Mei 2028.

Untuk setiap permohonan penarikan kredit yang dilakukan oleh CK harus terlebih dahulu mendapatkan *counter-sign* dari pejabat Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Fasilitas Perbankan dikenakan suku bunga mengambang tertentu.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar AS$2.680.425 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 fasilitas pinjaman yang digunakan sebesar AS$100.000.000.

Perjanjian Pinjaman tersebut mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (waiver) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

18. BANK LOANS (continued)

Long-term bank loans (continued)

The Company and CK (continued)

Term Loan Agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("BRI")

Based on Notary Deed of Jose Dima Satria No.122 dated May 24, 2023, the Company and CK entered into Bilaterial Credit Agreement with BRI, for the availability of Special Transaction facility with maximum credit limit amounting to US$100,000,000, where this facility is used for capital expenditure for purcase assets. This facility will mature in May 24, 2028.

For every request credit withdrawal made by CK, it must first obtain a counter-sign from an official of the Company.

Based on the agreement, the Banking Facilities bears a certain floating interest rate.

For the year ended December 31, 2023, interest expense from this facility is amounting to US$2,680,425 and is presented as part of "Finance Charges" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023 loan facility used amounted to US$100,000,000.

The Loan Agreement provides several negative covenants for the Company. Based on the Loan Agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023, the Company has either complied with all of the covenants of the above-mentioned bank loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

18. UTANG BANK (lanjutan) / *18. BANK LOANS (continued)*

Utang bank jangka panjang (lanjutan) / ***Long-term bank loans (continued)***

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Payments made for long-term bank loans are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Fasilitas Perbankan			*Banking Facilities*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	49.500.000	14.850.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.550.630	-	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia	9.000.000	-	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia*
Fasilitas Kredit Sindikasi			*Syndicated Credit Facility*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.227.820	4.375.000	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	23.935.000	4.375.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia	12.818.170	-	*Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia*
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.	4.486.360	-	*PT Bank JTrust Indonesia Tbk*
Total	**175.517.980**	**23.600.000**	***Total***

19. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK / *19. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY*

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

The details of accrued expenses are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Biaya proyek dan operasional	14.195.859	30.697.489	*Project and operational cost*
Bunga	7.956.329	8.233.414	*Interest*
Royalti	662.948	26.122.288	*Royalty*
Honorarium tenaga ahli	171.749	1.950.349	*Professional fees*
Dana kompensasi dan penalti terkait *Domestic Market Obligation ("DMO")* (Catatan 39)	-	22.729.551	*Compensation fund and penalty of Domestic Market Obligation ("DMO") (Note 39)*
Lain-lain	12.856.544	23.819.423	*Others*
Total	**35.843.429**	**113.552.514**	***Total***

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek / *Short-term Employee Benefits Liability*

Akun ini terdiri dari akrual beban gaji dan tunjangan karyawan.

This account consists of accrual for employee salaries and benefits.

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17.439.132	19.700.460	*Short-term employee benefits liability*

20. UANG MUKA PELANGGAN / *20. ADVANCES FROM CUSTOMERS*

Rincian uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of advances from customers are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pihak berelasi (Catatan 33)	1.170.801	204.169	*Related parties (Note 33)*
Pihak ketiga	634.713	535.436	*Third parties*
Total	**1.805.514**	**739.605**	***Total***

21. PROVISI UNTUK KEWAJIBAN RESTORASI LINGKUNGAN / *21. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RESTORATION OBLIGATION*

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 ("PP 78/2010") mengharuskan Grup menyediakan jaminan keuangan atau jaminan reklamasi. Peraturan tersebut mengharuskan setiap perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan studi tahunan yang memperkirakan besarnya jumlah biaya reklamasi dan melaporkan rencana reklamasinya. Rencana tersebut mencakup perkiraan biaya dari pekerjaan untuk pemulihan lahan tambang bila dikerjakan oleh kontraktor luar.

A financial surety, or reclamation guarantee, is required under Government Regulation No. 78 of 2010 ("PP 78/2010"). The regulation requires that an annual study be undertaken by a mining company operating in Indonesia to estimate its reclamation costs and that a plan be submitted to the Government. The plan includes an estimate of the cost of performing the rehabilitation work by an outside contractor.

Untuk setiap pekerjaan yang tidak dilaksanakan sendiri oleh perseroan sesuai dengan rencana pada periode tersebut, Pemerintah dapat menuntut pembayaran untuk pekerjaan yang masih harus dikerjakan oleh para kontraktor. Jaminan tersebut dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi (Catatan 40) atau, pada kondisi tertentu yang menyangkut perusahaan-perusahaan publik, dapat berupa cadangan akuntansi yang dicatat dalam buku Grup.

For any work a company does not carry out in the period pursuant to the plan, the Government can require payment for the outstanding work to be carried out by the contractor. The surety can be in the form of a joint account, time deposit, bank guarantee (Note 40) or, in certain circumstances involving public companies, an accounting reserve recorded in the accounts of the Group.

Akun ini merupakan provisi biaya penutupan tambang yang akan terjadi pada akhir umur tambang.

This account pertains to the provision for the restoration of the mine area at the end of the mine term.

21. PROVISI UNTUK KEWAJIBAN RESTORASI LINGKUNGAN (lanjutan)

21. PROVISION FOR ENVIRONMENTAL RESTORATION OBLIGATION (continued)

Mutasi provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan adalah sebagai berikut:

The movements of provision for environmental restoration are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Saldo awal	4.575.062	4.957.337	*Beginning balance*
Provisi untuk restorasi selama tahun berjalan	1.066.116	363.373	*Provision for restoration during the year*
Biaya restorasi aktual yang dibayar selama tahun berjalan	(621.413)	(676.017)	*Actual restoration costs paid during the year*
Selisih translasi	13.671	(69.631)	*Translation difference*
Dekonsolidasi Grup MDB (Catatan 1c)	(2.948.874)	-	*Deconsolidation MDB Group (Note 1c)*
Saldo akhir	**2.084.562**	**4.575.062**	***Ending balance***

Manajemen Grup berpendapat bahwa provisi untuk restorasi telah cukup untuk menutup semua liabilitas pengelolaan lingkungan hidup. Manajemen juga berkeyakinan bahwa penyisihan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The management of the Group believes that the provision for restoration is adequate to cover all obligations for environmental management. Management further believes that the provision is in accordance with existing regulations.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

22. LIABILITAS SEWA

22. LEASE LIABILITIES

Grup memiliki komitmen sewa pembiayaan mencakup bangunan dan prasarana, perlengkapan, peralatan dan inventaris kantor, kendaraan, kapal, mesin dan peralatan dengan jangka waktu sewa mulai dari 2 (dua) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun dan jatuh tempo pada berbagai tanggal dengan perincian sebagai berikut:

The Group has lease commitments covering building and improvements, office furniture, fixtures and equipment, vehicles, vessels and machinery and equipment with lease terms ranging from 2 (two) years to 10 (ten) years and expiring on various dates with details as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Pihak ketiga	76.127.547	16.877.183	*Third parties*
Pihak berelasi	73.847.158	86.729.999	*Related parties*
Sub-total	149.974.705	103.607.182	*Sub-total*
Dikurangi beban bunga	(23.850.760)	(15.605.398)	*Less amount applicable to interest*
Neto	126.123.945	88.001.784	*Net*
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			*Less current maturities*
Pihak ketiga	(22.002.167)	(10.847.112)	*Third parties*
Pihak berelasi	(28.765.821)	(26.277.977)	*Related parties*
Liabilitas sewa - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			*Lease liabilites - net of current maturities*
Pihak ketiga	41.607.468	12.110.615	*Third parties*
Pihak berelasi	33.748.489	38.766.080	*Related parties*

22. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *22. LEASE LIABILITIES (continued)*

Nilai kini dari jadwal pembayaran liabilitas sewa berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The present values of the scheduled payments of the lease liabilities by the year of maturity are as follows:

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*			
	Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan Minimum/ *Minimum Lease Payment*	**Komponen Bunga/ *Interest Component***	**Nilai Kini/ *Present Value***	
Dalam 1 tahun	61.067.341	(10.299.353)	50.767.988	*Within 1 year*
Dalam 2 - 5 tahun	81.487.862	(12.357.844)	69.130.018	*Within 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	7.419.502	(1.193.563)	6.225.939	*Over 5 years*
Total	**149.974.705**	**(23.850.760)**	**126.123.945**	***Total***

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*			
	Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan Minimum/ *Minimum Lease Payment*	**Komponen Bunga/ *Interest Component***	**Nilai Kini/ *Present Value***	
Dalam 1 tahun	44.588.631	(7.463.542)	37.125.089	*Within 1 year*
Dalam 2 - 5 tahun	53.165.091	(7.359.193)	45.805.898	*Within 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	5.853.460	(782.663)	5.070.797	*Over 5 years*
Total	**103.607.182**	**(15.605.398)**	**88.001.784**	***Total***

Tingkat bunga per tahun / *Interest rates per annum*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Rupiah			*Rupiah*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	14,00%	14,00%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*

Seluruh aset yang diperoleh melalui perjanjian sewa pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas liabilitas sewa (Catatan 15).

All assets acquired under finance lease agreements are used as collateral for the lease liabilities (Note 15).

Biaya yang diakui dalam laba rugi adalah sebagai berikut:

The following are the amounts recognized in profit or loss:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Bunga atas liabilitas sewa	12.524.392	8.297.637	*Interest on lease liabilities*
Depresiasi aset hak-guna			*Depreciation right of use assets*
Beban pokok pendapatan	55.083.176	36.733.658	*Cost of revenue*
Beban penjualan, umum dan administrasi	2.296.754	2.336.530	*Selling, general and administrative expenses*
Beban terkait liabilitas sewa bernilai rendah dan jangka pendek	16.486.395	21.838.983	*Expenses related to low value and short-term lease liabilities*

23. PERPAJAKAN / *23. TAXATION*

a. Taksiran Tagihan Pajak / *a. Estimated Claims for Tax Refund*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Lebih bayar pajak penghasilan:			*Overpayments of corporate income:*
2023	25.341.100	-	*2023*
2022	3.436.677	3.757.493	*2022*
2021	-	2.529.753	*2021*
2018	-	1.630.081	*2018*
2016	258.643	367.363	*2016*
Lebih bayar pajak pertambahan nilai:			*Overpayments of value added tax:*
2023	7.362.167	-	*2022*
2022	7.795.357	-	*2022*
Pembayaran ketetapan pajak untuk pajak pertambahan nilai:			*Payment of tax assessments for value added tax:*
2018	-	60.988	*2018*
2016	-	4.493.511	*2016*
Pembayaran ketetapan pajak untuk Pungutan pajak penghasilan:			*Payment of tax assessments for withholding income tax:*
2019	-	254.068	*2019*
2018	83.246	238.023	*2018*
2016	253.784	233.344	*2016*
Pembayaran ketetapan pajak untuk pajak penghasilan:			*Payment of tax assessments for corporate income tax:*
2016	98.763	98.763	*2016*
Sub-total	44.629.737	13.663.387	*Sub-total*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas taksiran tagihan pajak	(49.342)	(52.231)	*Allowance for impairment losses on estimated claims for tax refund*
Taksiran tagihan pajak - neto	**44.580.395**	**13.611.156**	***Estimated claims for tax refund - net***

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021

Perusahaan

Pada tanggal 18 April 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar AS$1.915.464, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh Perusahaan.

Berdasarkan SKPLB tersebut, rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2021 dikoreksi menjadi rugi fiskal sebesar AS$9.341.316 dari rugi fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$24.260.510. Selisih sebesar AS$14.919.194 dicatat sebagai pengurang akumulasi rugi fiskal.

Perusahaan tidak mengajukan Surat Keberatan atas SKPLB tersebut.

Pada tanggal 25 Mei 2023, Perusahaan telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

2021 Corporate Income Tax

The Company

On April 18, 2023, the Company received Overpayment Tax Assessment Letter ("SKPLB") for 2021 corporate income tax amounting to US$1,915,464, which is the overpayment amount that was claimed by the Company.

In accordance to the SKPLB, the Company's tax loss for 2021 was corrected to become fiscal loss of US$9,341,316 out of the previously reported fiscal loss amounting to US$24,260,510. The difference amounting to US$14,919,194 is recorded as deduction to accumulated tax loss.

The Company did not submit an Objection Letter to the SKPLB.

On May 25, 2023, the Company has received the tax refund from the DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 (lanjutan)

SSB

Pada tanggal 11 April 2023, SSB menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp8.487.680.442.

Berdasarkan SKPLB tersebut, laba fiskal SSB untuk tahun 2021 dikoreksi menjadi laba fiskal sebesar Rp36.402.923.938 dari laba fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp36.221.349.853.

Pada tanggal 9 Mei 2023, SSB telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

Reswara

Pada tanggal 7 Maret 2023, Reswara menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar AS$77.244 yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh Reswara. Berdasarkan SKPLB tersebut, tidak ada koreksi atas rugi fiskal yang dilaporkan Reswara sebelumnya.

Pada tanggal 5 April 2023, Reswara telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

CK

Pada tanggal 9 Desember 2022, CK menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar AS$8.549.491, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh CK. Berdasarkan SKPLB tersebut, rugi kena pajak CK dikoreksi menjadi sebesar AS$2.102.419 dari rugi fiskal yang sebelumnya dilaporkan CK sebesar AS$2.425.795.

Pada tanggal 20 Desember 2022, CK menerima restitusi atas lebih bayar tersebut dan manajemen tidak mengajukan keberatan.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2021 Corporate Income Tax (continued)

SSB

On April 11, 2023, SSB received a SKPLB for 2021 corporate income tax amounting to Rp8,487,680,442.

In accordance to the SKPLB, the SSB's taxable income for 2021 was corrected to become taxable income of Rp36,402,923,938 which was previously reported amounting to Rp36,221,349,853.

On May 9, 2023, SSB has received the tax refund from the DGT and does not submit any tax objection.

Reswara

On March 7, 2023, Reswara received SKPLB on annual corporate income tax 2021 amounting to US$77,244, which is the overpayment amount that was claimed by Reswara. Based on the SKPLB, there is no correction on Reswara's taxable loss that previously reported.

On April 5, 2023, Reswara has received the tax refund from the DGT.

CK

On December 9, 2022, CK received SKPLB for 2021 corporate income tax amounting to US$8,549,491, which is the overpayment amount that was claimed by CK. Based on the SKPLB, CK's taxable loss was corrected to become US$2,102,419 from taxable loss which was previously reported by CK amounting to US$2,425,795.

On December 20, 2022, CK received the restitution on such overpayment and management does not submit any tax objection.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020

Perusahaan

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar AS$2.684.229, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh Perusahaan.

Berdasarkan SKPLB tersebut, rugi fiskal Perusahaan untuk tahun 2020 dikoreksi menjadi rugi fiskal sebesar AS$7.985.249 dari rugi fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$8.629.163. Selisih sebesar AS$643.914 dicatat sebagai pengurang akumulasi rugi fiskal.

Perusahaan tidak mengajukan Surat Keberatan atas SKPLB tersebut.

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perusahaan telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

CK

Pada tanggal 20 Juli 2022, CK menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar AS$5.682.152.

Berdasarkan SKPLB tersebut, laba fiskal CK untuk tahun 2020 dikoreksi menjadi laba fiskal sebesar AS$6.740.950 dari laba fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$6.082.090.

Pada tanggal 15 Agustus 2022, CK telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP dan tidak mengajukan keberatan.

TIA

Pada tanggal 7 Juni 2022, TIA menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar AS$2.251.867 yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh TIA.

Pada tanggal 6 Juli 2022, TIA telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2020 Corporate Income Tax

The Company

On April 22, 2022, the Company received a SKPLB for 2020 corporate income tax amounting to US$2,684,229, which is the overpayment amount that was claimed by the Company.

In accordance to the SKPLB, the Company's tax loss for 2020 was corrected to become fiscal loss of US$7,985,249 out of the previously reported fiscal loss amounting to US$8,629,163. The difference amounting to US$643,914 is recorded as deduction to accumulated tax loss.

The Company did not submit an Objection Letter to the SKPLB.

On June 2, 2022, the Company has received the tax refund from the DGT.

CK

On July 20, 2022, CK received a SKPLB for 2020 corporate income tax amounting to US$5,682,152.

In accordance to the SKPLB, the CK's taxable income for 2020 was corrected to become taxable income of US$6,740,950 out of the previously reported taxable income amounting to US$6,082,090.

On August 15, 2022, CK has received the tax refund from the DGT and does not submit any tax objection.

TIA

On June 7, 2022, TIA received a SKPLB for 2020 corporate income tax amounting to US$2,251,867 which is the overpayment amount that was claimed by TIA.

On July 6, 2022, TIA has received the tax refund from the DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020 (lanjutan)

MIFA

Pada tanggal 27 April 2022, MIFA menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar AS$3.209.703 (termasuk sanksi administrasi bunga sebesar AS$705.253) dari lebih bayar yang dilaporkan oleh MIFA sebesar AS$157.615.

Berdasarkan SKPKB tersebut, penghasilan kena pajak MIFA tahun 2020 dikoreksi menjadi AS$35.774.164 dari yang telah dilaporkan oleh MIFA sebesar AS$26.282.813.

Pada tanggal 27 Mei 2022, MIFA mengajukan Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi sebesar AS$705.253.

Pada tanggal 30 Mei 2022, MIFA telah membayar Pokok SKPKB tersebut sebesar AS$2.504.450.

Pada tanggal 12 September 2022, MIFA menerima Surat Keputusan Pengurangan Sanksi yang mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan MIFA sebesar AS$352.626.

BEL

Pada tanggal 14 Juli 2022, BEL menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar AS$106.252 (termasuk sanksi administrasi bunga sebesar AS$25.562) dari lebih bayar yang dilaporkan oleh BEL sebesar AS$176.336.

Berdasarkan SKPKB tersebut, penghasilan kena pajak BEL tahun 2020 dikoreksi menjadi AS$2.814.630 dari yang telah dilaporkan oleh MIFA sebesar AS$4.005.532.

Pada tanggal 18 Juli 2022, BEL tidak mengajukan keberatan dan telah membayar SKPKB tersebut sebesar AS$106.252.

BDD

Pada tanggal 25 April 2022, BDD menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar AS$115.709.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2020 Corporate Income Tax (continued)

MIFA

On April 27, 2022, MIFA received an Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") on annual corporate income tax 2020 amounting to US$3,209,703 (including sanctions administration interest of US$705,253) from MIFA reported overpayment of US$157,615.

Based on the SKPKB, the taxable income MIFA tax year 2020 is corrected to US$35,774,164 from what was reported by MIFA US$26,282,813.

On May 27, 2022, MIFA filed Application for Reduction of Administrative Sanctions amounting to US$705,253.

On May 30, 2022, MIFA has paid Principal of the SKPKB amounted to US$2,504,450.

On September 12, 2022, MIFA received Decision on Reduction of Sanctions which partially accepted the objection submitted by MIFA amounting to US$352,626.

BEL

On July 14, 2022, BEL received SKPKB on annual corporate income tax 2020 amounting to US$106,252 (including sanctions administration interest of US$25,562) from BEL reported overpayment of US$176,336.

Based on the SKPKB, the taxable income BEL tax year 2020 is corrected to US$2,814,630 from what was reported by MIFA US$4,005,532.

On July 18, 2022, BEL did not submit an objection and paid the SKPKB amounted to US$106,252.

BDD

On April 25, 2022, BDD received a SKPLB for 2020 corporate income tax amounting to US$115,709.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2020 (lanjutan)

BDD (lanjutan)

Pada tanggal 25 Mei 2022, BDD telah menerima restitusi pajak dari DJP, sebesar Rp974.337.658, dimana restitusi yang diterima BDD dikurangi kompensasi atas utang pajak pasal 21 dan PPN tahun 2020. Selisih sebesar Rp684.386.592 dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya".

PBR

Pada tanggal 14 April 2022, PBR menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp485.017.015.

Pada tanggal 30 Mei 2022, PBR telah menerima restitusi pajak dari DJP, sebesar Rp212.371.576, dimana restitusi yang diterima PBR dikurangi kompensasi atas pasal 21, 4(2) dan PPN tahun 2020. Selisih sebesar Rp272.645.439 dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya".

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019

CK

Pada tanggal 6 Oktober 2021, CK menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar AS$4.753.116, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh CK. Berdasarkan SKPLB tersebut, penghasilan kena pajak CK dikoreksi menjadi sebesar AS$13.977.733 dari laba fiskal yang dilaporkan CK sebelumnya sebesar AS$6.656.566.

Pada tanggal 10 November 2021, CK telah menerima restitusi atas lebih bayar tersebut.

Terkait dengan SKPLB tersebut, pada tanggal 23 Desember 2021, CK mengajukan keberatan kepada DJP yang menyetujui sebagian SKPLB, dimana penghasilan kena pajak CK menjadi US$13.906.274.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2020 Corporate Income Tax (continued)

BDD (continued)

On May 25, 2022, BDD received restitution from the DGT, amounting to Rp974,337,658, where the restitution received by BDD was reduced by compensation for tax payable article 21 and VAT for 2020. The difference was Rp684,386,592 was recorded as part of "Other Expenses".

PBR

On April 14, 2022, PBR received a SKPLB for 2020 corporate income tax amounting to Rp485,017,015.

On May 30, 2022, PBR received restitution from the DGT, amounting to Rp212,371,576, where the refund received by PBR was reduced by compensation for articles 21, 4(2) and 2020 VAT. The difference was Rp272,645,439 recorded as part of "Other Expenses".

2019 Corporate Income Tax

CK

On October 6, 2021, CK received SKPLB for 2019 corporate income tax amounting to US$4,753,116, which is the overpayment amount that was claimed by CK. Based on the SKPLB, CK's taxable income was corrected to become US$13,977,733 from taxable income which was previously reported by CK amounting to US$6,656,566.

On November 10, 2021, CK received the restitution on such overpayment.

Related to the SKPLB, on December 23, 2021, CK submitted an objection to DGT, which partially agreed with SKPLB, where CK's taxable income to become US$13,906,274.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 (lanjutan)

CK (lanjutan)

Pada tanggal 25 Oktober 2022, CK menerima keputusan keberatan yang menyetujui sebagian keberatan yang diajukan CK, dimana penghasilan kena pajak CK menjadi AS$13.967.224.

CK tidak mengajukan banding terkait dengan keputusan keberatan dan mencatat penyesuaian atas aset pajak tangguhan terkait rugi fiskal dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

TIA

Pada tanggal 22 Juli 2021, TIA menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar AS$7.101.383 dari jumlah yang diajukan TIA sebesar AS$8.280.009. Sehubungan dengan SKPLB tersebut, TIA mengajukan keberatan pada tanggal 18 Oktober 2021.

Pada tanggal 13 Agustus 2021, TIA menerima SPMKP dari DJP, dimana restitusi yang diterima TIA dikurangi atas utang pajak PPN 2019 sebesar Rp4.773.192.267. Pada tanggal 23 Agustus 2021, TIA menerima restitusi dari DJP sebesar Rp98.175.557.084 atau setara dengan AS$6.772.193. Selisih sebesar AS$329.190 dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya".

Pada tanggal 22 Juli 2022 TIA menerima Hasil Penelitian Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menerima seluruh keberatan yang diajukan oleh TIA. Sehubungan dengan hasil tersebut TIA akan menerima tambahan restitusi sebesar AS$1.178.626. Pada tanggal 9 September 2022, TIA telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2019 Corporate Income Tax (continued)

CK (continued)

On October 25, 2022, CK received objection decision which partially accept the objection submitted by CK, where CK's taxable income to become US$13,967,224.

CK does not submit any tax appeal related to decision on tax objection and recorded the adjustment on the deferred tax asset related to tax loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

TIA

On July 22, 2021, TIA received SKPLB on its corporate income tax for year 2019 amounting to US$7,101,383 instead of US$8,280,009 as claimed by TIA. In relation to the SKPLB, TIA submitted an objection dated October 18, 2021.

On August 13, 2021, TIA received SPMKP from DGT, where the restitution received by TIA was deducted with compensation of taxes payable of 2019 VAT amounting to Rp4,773,192,267. On August 23, 2021, TIA has received the restitution amounting to Rp98,175,557,084 or equivalent to US$6,772,193 from DGT. The difference amounting to US$329,190 is recorded as part of "Other Expenses".

On July 22, 2022, TIA received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT accepts all objections submitted by TIA. TIA will receive an additional restitution of US$1,178,626. On September 9, 2022, TIA has received the tax refund from the DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018

MIFA

Pada tanggal 12 Juli 2019, MIFA menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2018.

Pada tanggal 27 April 2020, MIFA menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar AS$640.572 dari lebih bayar yang diklaim MIFA sebesar AS$2.157.814. Berdasarkan SKPLB tersebut, laba fiskal MIFA untuk tahun 2018 dikoreksi sebesar AS$4.455.324 menjadi AS$38.644.409 dari laba fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$34.189.085.

Pada tanggal 19 Mei 2020, MIFA telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

Pada tanggal 17 Juli 2020, MIFA mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada DJP atas SKPLB tersebut.

Pada tanggal 18 Juni 2021, MIFA menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh MIFA.

Pada tanggal 14 September 2021, MIFA mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 21 November 2023, MIFA menerima Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan MIFA dengan koreksi yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak sebesar AS$1.494.081.

Pada tanggal 20 Desember 2023, MIFA telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP sebesar AS$643.959. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, MIFA sedang dalam proses untuk pengajuan sisa restitusi sebesar AS$452.604.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2018 Corporate Income Tax

MIFA

On July 12, 2019, MIFA received Notice Letter of Field Inspection of tax compliance in 2018.

On April 27, 2020, MIFA received SKPLB for 2018 corporate income tax amounting to US$640,572 out of overpayment claimed by MIFA amounting to US$2,157,814. Based on SKPLB, MIFA's taxable income for 2018 was corrected amounting to US$4,455,324 to become US$38,644,409 from previously reported fiscal taxable income of US$34,189,085.

On May 19, 2020, MIFA has received the tax refund from the DGT.

On July 17, 2020, MIFA submitted an Application for Objection to SKPLB to the DGT.

On June 18, 2021, MIFA received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT which fully reject the objection submitted by MIFA.

On September 14, 2021, MIFA submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT which fully reject the Decision of Objection.

On November 21, 2023, MIFA received Decision of Tax Appeal for tax assessment letter from Tax Court which partially granted the Objection submitted by the Company with correction sustained by the Tax Court totaling to US$1,494,081.

On December 20, 2023, MIFA partially received the tax refund from the DGT amounting to US$643,959. Until the completion date of the consolidated financial statement, MIFA still on process to submit refund request for the remaining US$452,604.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 (lanjutan)

CK

Pada tanggal 12 Agustus 2020, CK menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar AS$6.700.696, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh CK. Berdasarkan SKPLB tersebut, laba fiskal CK dikoreksi menjadi sebesar AS$33.037.410 dari laba fiskal yang dilaporkan CK sebelumnya sebesar AS$22.894.965.

Terkait SKPLB tersebut, pada tanggal 5 November 2020, CK mengajukan keberatan kepada DJP, yang menyetujui sebagian dari SKPLB, dimana laba fiskal CK menjadi AS$32.150.363.

Pada tanggal 16 November 2020, CK telah menerima restitusi atas lebih bayar tersebut.

Pada tanggal 8 September 2021, CK menerima keputusan keberatan yang menyetujui sebagian keberatan yang diajukan CK, dimana laba fiskal CK menjadi AS$32.398.363.

Pada tanggal 27 Oktober 2021, CK mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut, dengan laba fiskal sebesar AS$32.150.362.

Pada tanggal 31 Mei 2023, CK menerima putusan banding yang menyetujui sebagian banding yang diajukan CK. dimana laba fiskal CK menjadi sebesar AS$32.176.609. Atas selisih laba fiskal sebesar AS$26.247, CK telah mengurangi kompensasi rugi fiskal yang diutilisasi dan membayar kurang bayar tersebut pada SPT Pembetulan PPh Badan tahun 2022.

CKB

Pada tanggal 13 Desember 2023, CKB menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar Rp108.814.970. Pada tanggal 18 Desember 2023, CKB tidak mengajukan keberatan dan telah membayar SKPKB tersebut.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2018 Corporate Income Tax (continued)

CK

On August 12, 2020, CK received SKPLB for 2018 corporate income tax amounting to US$6,700,696, which is the overpayment amount that was claimed by CK. Based on the SKPLB, CK's taxable income was corrected to become US$33,037,410 from taxable income which was previously reported by CK amounting to US$22,894,965.

Related to the SKPLB, on November 5, 2020, CK submitted an objection to DGT, which partially agreed with SKPLB, where CK's taxable income to become US$32,150,363.

On November 16, 2020, CK received the restitution on such overpayment.

On September 8, 2021, CK received objection decision which partially accept the objection submitted by CK, where CK's taxable income to become US$32,398,363.

On October 27, 2021, CK submitted Tax Appeal to Tax Court related to the Decision of Objection, with taxable income amounting to US$32,150,362.

On May 31, 2023, CK received appeal decision which partially accept the appeal submitted by CK, where CK's taxable income to become US$32,176,609. Related to the difference on taxable income amounting US$26,247, CK has deducted the compensation of tax loss utilized and paid such underpayment in corporate income tax returns correction year 2022.

CKB

On December 13, 2023, CKB received SKPKB on its corporate income tax for year 2018 amounting to Rp108,814,970. On December 18, 2023, CKB did not submit an objection and paid the SKPKB.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018 (lanjutan)

SSB

Pada tanggal 23 Oktober 2020, SSB menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar Rp12,38 miliar, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh SSB.

Pada tanggal 20 November 2020, SSB menerima SPMKP dari DJP sebesar Rp10,08 miliar, dimana restitusi yang diterima SSB dikurangi kompensasi atas utang pajak PPN 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1,94 miliar dan Rp331,18 juta. SSB telah menerima restitusi tersebut pada tanggal 2 Desember 2020.

Pada tanggal 22 November 2020, SSB telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada DJP yang tidak menerima pengurangan pada SPMKP karena pengurang utang pajak masih dalam proses hukum.

Pada tanggal 9 Februari 2022, SSB mengirim surat kembali kepada DJP yang memohon penjelasan atas pemotongan restitusi atas lebih bayar atas pajak penghasilan badan 2018, dimana putusan banding atas PPN 2016 telah keluar dengan hasil mengabulkan sebagian dari sengketa pajak SSB.

Pada tanggal 10 Januari 2023, SSB menerima restitusi pajak berdasarkan surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak PPN tahun 2016 tersebut sebesar Rp719,3 juta.

Pada tanggal 8 November 2023, SSB menerima restitusi pajak berdasarkan surat keputusan pengurangan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak PPN tahun 2016 tersebut sebesar Rp1,5 miliar.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2018 Corporate Income Tax (continued)

SSB

On October 23, 2020, SSB received SKPLB for 2018 corporate income tax amounting to Rp12.38 billion, which is the overpayment amount that was claimed by SSB.

On November 20, 2020, SSB received SPMKP from DGT amounting to Rp10.08 billion, where the restitution received by SSB was deducted with compensation of taxes payable of 2016 and 2017 VAT amounting to Rp1.94 billion and Rp331.18 million, respectively. SSB received the restitution on December 2, 2020.

On November 22, 2020, SSB submitted letter to DGT which does not accept the deduction on SPMKP due to the deduction of taxes payables are still on process.

On February 9, 2022, SSB sent another letter to DGT to request for explanation on the restitution deduction related to overpayment of 2018 corporate income tax, where the decision on tax appeal of 2016 VAT has been issued with the result partially accept SSB's tax disputes.

On January 10, 2023, SSB received a tax refund based on the decision letter to reduce the tax assessment on the 2016 VAT tax bill amounting to Rp719.3 million.

On November 8, 2023, SSB received a tax refund based on the decision letter to reduce the tax assessment on the 2016 VAT tax bill amounting to Rp1.5 billion.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2017

SSB

Pada tanggal 16 April 2019, SSB menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp2,79 miliar dari lebih bayar yang dilaporkan oleh SSB sebesar Rp14,28 miliar.

Berdasarkan SKPKB tersebut, penghasilan kena pajak SSB tahun 2017 dikoreksi menjadi Rp66,07 miliar dari yang telah dilaporkan oleh SSB sebesar Rp1,56 miliar.

Pada tanggal 12 Juli 2019, SSB mengajukan Keberatan atas SKPKB kepada DJP sebesar Rp16,46 miliar dan mencatat selisihnya sebesar Rp606,20 juta sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 10 Juni 2020, SSB menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh SSB.

Pada tanggal 28 Agustus 2020, SSB mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2022, SSB menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan SSB dimana penghasilan kena pajak menjadi sebesar Rp49,6 miliar dan lebih bayar menjadi Rp2,0 miliar.

Pada tanggal 9 Agustus 2022, SSB telah menerima restitusi sebesar Rp1,3 miliar, dimana restitusi tersebut dikurangi kompensasi atas kurang bayar PPh pasal 21 tahun 2020 dan PPN 2014 masing-masing sebesar Rp528,3 juta dan Rp145,1 juta. SSB telah mencatat potongan atas kompensasi kurang bayar tersebut sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan sisanya telah di perhitungkan dengan provisi yang telah dicadangkan oleh SSB.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2017 Corporate Income Tax

SSB

On April 16, 2019, SSB received SKPKB for 2017 corporate income tax amounting Rp2.79 billion out of Rp14.28 billion overpayment that was reported by SSB.

Based on the SKPKB, SSB's taxable income in 2017 was corrected to become Rp66.07 billion out of Rp1.56 billion which was reported by SSB.

On July 12, 2019, SSB submitted an Objection on SKPKB to DGT amounting to Rp16.46 billion and recorded the difference amounting Rp606.20 million as part of "Other Expenses" in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On June 10, 2020, SSB received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT which fully rejected the objection submitted by SSB.

On August 28, 2020, SSB submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT which fully rejected the Decision of Objection.

On June 24, 2022, SSB received decision on appeal letter from Tax Court which partially accepted the objection submitted by SSB, where the taxable income become Rp49.6 billion and the overpayment become Rp2.0 billion.

On August 9, 2022, SSB received the restitution amounting to Rp1.3 billion, where such restitution was compensated with underpayment of tax payable article 21 fiscal year 2020 and VAT 2014 amounting to Rp528.3 million and Rp145.1 million, respectively. SSB has recorded the compensation of such underpayment as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022 and the remaining amount has been settled against the provision that has been made by SSB.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2017 (lanjutan)

SSB (lanjutan)

Pada tanggal 30 Mei 2023, DJP menerbitkan surat putusan gugatan atas kompensansi kurang bayar PPh Pasal 21 tahun 2020 sebesar Rp528,3 juta yang sebelumnya telah dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2022.

Dalam putusan gugatan tersebut, membatalkan seluruh STP PPh Pasal 21 tahun 2020 yang diterbitkan oleh DJP kepada SSB dengan total sebesar Rp528,3 juta. Namun atas restitusi seluruhnya dikompensasikan untuk Denda Penagihan atas Sengketa PPN tahun 2016.

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016

Pada tanggal 23 April 2018, SSB menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar Rp1,22 miliar dari lebih bayar yang dilaporkan oleh SSB sebesar Rp12,91 miliar.

Berdasarkan SKPKB tersebut, penghasilan kena pajak tahun 2016 dikoreksi menjadi sebesar Rp109,58 miliar dari yang telah dilaporkan oleh SSB sebesar Rp64,72 miliar. Pada tanggal 20 Juli 2018, SSB mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB kepada DJP.

Pada tanggal 18 Juni 2019, SSB menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan oleh SSB dimana rugi fiskal SSB menjadi Rp27,23 miliar dan lebih bayar menjadi Rp5,97 miliar.

Pada tanggal 16 September 2019, SSB mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut, dimana rugi fiskal SSB sebesar Rp64,35 miliar dan lebih bayar sebesar Rp12,79 miliar.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2017 Corporate Income Tax (continued)

SSB (continued)

On May 30, 2023, DGT issued a lawsuit decision regarding compensation for underpayment of income tax article 21 for 2020 amounting to Rp528.3 million which had previously been recorded as part of "Other Expenses" in the 2022 consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

In the lawsuit's decision, the entire 2020 income tax article 21 STP issued by DGT to SSB was cancelled for a total of Rp528.3 million. However, the entire restitution is compensated for tax penalty for VAT disputes in 2016.

2016 Corporate Income Tax

On April 23, 2018, SSB received SKPKB of corporate income tax of 2016 amounting to Rp1.22 billion from overpayment reported by SSB amounting to Rp12.91 billion.

Based on the SKPKB, the taxable income for year 2016 was corrected to Rp109.58 billion from previously reported by SSB amounting to Rp64.72 billion. On July 20, 2018, SSB submitted an Application for Objection to SKPKB to the DGT.

On June 18, 2019, SSB received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT partially granted objections raised by SSB where SSB's fiscal loss becoming Rp27.23 billion and overpayment amounting to Rp5.97 billion.

On September 16, 2019, SSB submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT on its objection where SSB's fiscal loss amounting to Rp64.35 billion and overpayment amounting to Rp12.79 billion.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 (lanjutan)

SSB

Pada tanggal 11 November 2021, SSB menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan SSB dimana lebih bayar menjadi Rp12,78 miliar, selisih sebesar Rp16,70 juta telah dibebankan di tahun 2021.

Pada tanggal 24 Januari 2022, SSB telah menerima restitusi sebesar Rp6,80 miliar. Pada tanggal 9 Februari 2022 SSB telah menyampaikan Surat Penjelasan Pengembalian Kelebihan Pajak kepada DJP atas selisih restitusi yang diterima.

Pada tanggal 8 dan 23 November 2023, SSB menerima restitusi pajak sebesar Rp1,8 miliar.

Pada tanggal 28 Februari 2024, SSB mengirim surat kepada DJP yang memohon penjelasan atas lebih bayar yang belum diterima restitusinya oleh SSB.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, SSB belum menerima restitusi tambahan dari Kantor Pajak.

CK

Pada tanggal 5 Juni 2018, CK menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar AS$60.333.820 dari lebih bayar yang diklaim CK sebesar AS$5.394.800. Berdasarkan SKPKB tersebut, rugi fiskal CK dikoreksi dari AS$5.433.723 menjadi laba fiskal sebesar AS$198.150.591.

Terkait dengan SKPKB tersebut, CK mengajukan keberatan pada tanggal 24 Agustus 2018 kepada DJP.

Pada tanggal 9 Juli 2019, CK menerima Keputusan Keberatan dari DJP yang mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan oleh CK, dimana rugi fiskal CK menjadi AS$12.384.329 dan lebih bayar CK menjadi AS$2.036.780.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Corporate Income Tax (continued)

SSB

On November 11, 2021, SSB received appeal letter from Tax Court which partially accepted the objection submitted by SSB, where overpayment to become Rp12.78 billion, difference amounting to Rp16.70 million has been charged to expense in 2021.

On January 24, 2022, SSB received restitution of Rp6.80 billion. On February 9, 2022, SSB submitted an Explanation Letter related to difference of restitution received to DGT.

On November 8 and 23, 2023, SSB received a tax refund amounting to Rp1.8 billion.

On February 28, 2024, SSB sent a letter to DGT to request for explanation on the overpayment where the restitution has not yet been received by SSB.

Until the completion date of the consolidated financial statements, SSB has not received additional restitution from Tax Office.

CK

On June 5, 2018, CK received SKPKB of 2016 corporate income tax amounting to US$60,333,820 out of overpayment claimed by CK amounting to US$5,394,800. In accordance with the SKPKB, CK's tax loss was corrected from US$5,433,723 becoming taxable income amounting to US$198,150,591.

Related to the SKPKB, CK submitted an objection on August 24, 2018 to the DGT.

On July 9, 2019, CK received Decision of Objection from DGT which partially granted the objection submitted by CK, where CK's fiscal loss becoming US$12,384,329 and overpayment of CK becoming US$2,036,780.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 (lanjutan)

CK (lanjutan)

Pada tanggal 13 Agustus 2019, CK telah menerima restitusi dari DJP sebesar Rp28.804.758.051 atau setara AS$2.072.134.

Pada tanggal 2 Oktober 2019, CK mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil Keputusan Keberatan tersebut, dengan rugi fiskal sebesar AS$5.433.723 dan lebih bayar sebesar AS$5.394.800.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, CK menerima putusan banding yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan CK. CK menerima restitusi sebesar Rp47.848.430.542 atau setara dengan AS$3.376.106 pada tanggal 14 Desember 2021.

Pada tanggal 24 Januari 2022, CK menerima Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh DJP kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan Banding tersebut.

Pada tanggal 6 Desember 2022, CK telah menerima keputusan dari PK dari MA yang menolak seluruhnya pengajuan dari DJP.

ATR

Pada tanggal 13 Februari 2019, ATR menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2016. Berdasarkan SKPKB tersebut, penghasilan kena pajak tahun 2016 dikoreksi menjadi sebesar AS$479.500 dari yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$155.788.

Pada tanggal 16 April 2020, ATR menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh ATR.

ATR mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan pada tanggal 10 Juli 2020.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Corporate Income Tax (continued)

CK (continued)

On August 13, 2019, CK received restitution from DGT amounting to Rp28,804,758,051 or equivalent to US$2,072,134.

On October 2, 2019, CK submitted Tax Appeal to Tax Court related to the Decision of Objection, with taxable loss amounting to US$5,433,723 and overpayment amounting to US$5,394,800.

On October 14, 2021, CK received appeal decision letter which partially accepted the appeal submitted by CK. CK received the restitution amounting to Rp47,848,430,542 or equivalent to US$3,376,106 on December 14, 2021.

On January 24, 2022, CK received Judicial Review Request Letter submitted by DGT to Tax Court related to the decision on tax appeal.

On December 6 2022, CK received the decision of the Supreme Court's Judicial Review which completely rejected DGT's application.

ATR

On February 13, 2019, ATR received SKPKB of 2016 corporate income tax. Based on the SKPKB, the taxable income for year 2016 was corrected to US$479,500 from previously reported amounting to US$155,788.

On April 16, 2020, ATR received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT which fully rejected the objection submitted by ATR.

ATR filed an Appeal Letter to the Tax Court regarding the Decision of Objection on July 10, 2020.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 (lanjutan)

ATR (lanjutan)

Pada tanggal 26 September 2022, ATR menerima putusan banding yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan oleh ATR. Pada tanggal 28 Oktober 2022, ATR menerima restitusi sebesar Rp1.060.415.042. Pada tanggal 16 Desember 2022, ATR telah menyampaikan Surat Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 3 Oktober 2023, ATR menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan ATR.

BDD

Pada tanggal 30 November 2021, BDD menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar AS$16.925, berdasarkan SKPKB tersebut, laba fiskal BDD dikoreksi menjadi AS$234.332 dari laba fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$188.589.

Pada tanggal 28 Desember 2021, BDD tidak mengajukan keberatan dan telah membayar SKPKB tersebut.

TIA

Pada tanggal 7 April 2020, TIA menerima SKPKB atas pajak penghasilan badan tahun 2016 sebesar AS$197.525, berdasarkan SKPKB tersebut, laba fiskal TIA dikoreksi menjadi AS$31.830.981 dari laba fiskal yang dilaporkan TIA sebelumnya sebesar AS$31.297.128.

Terkait dengan SKPKB tersebut, TIA mengajukan keberatan pada tanggal 1 Juli 2020 kepada DJP.

Pada tanggal 27 Mei 2021, TIA menerima Keputusan Keberatan dari DJP yang menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh TIA.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Corporate Income Tax (continued)

ATR (continued)

On September 26, 2022, ATR received appeal decision letter which partially accepted the appeal submitted by ATR. On October 28, 2022, ATR received the restitution amounting to Rp1,060,415,042. On December 16, 2022, ATR submitted Judicial Review Request Letter to Supreme Court.

On October 3, 2023, ATR received decision from Supreme Court which rejected the judicial review request submitted by ATR.

BDD

On November 30, 2021 BDD received Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") on its corporate income tax for year 2016 amounting to US$16,925, in accordance to the SKPKB, BDD taxable income was corrected to US$234,332 from previously reported by BDD amounting to US$188,589.

On December 28, 2021, BDD did not submit an objection and paid the SKPKB.

TIA

On April 7, 2020, TIA received SKPKB on its corporate income tax for year 2016 amounting to US$197,525, in accordance to the SKPKB, TIA's taxable income was corrected to US$31,830,981 from previously reported by TIA amounting to US$31,297,128.

Related to the SKPKB, TIA submitted an objection on July 1, 2020 to DGT.

On May 27, 2021, TIA received a Decision of Objection from the DGT which fully rejected the objection submitted by TIA.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016 (lanjutan)

TIA (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2021, TIA mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil Keputusan Keberatan tersebut. Sehubungan dengan pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak, TIA membayar 50% dari jumlah pajak yang masih terutang sebesar AS$98.763 pada tanggal 25 Agustus 2021.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan atas banding tersebut.

Pajak Penghasilan Badan Tahun 2015

MIFA

Pada tanggal 28 Februari 2020, MIFA menerima SKPN atas pajak penghasilan badan tahun 2015.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") tersebut, rugi fiskal MIFA tahun 2015 dikoreksi sebesar AS$370.826 menjadi AS$24.604.257 dari rugi fiskal yang dilaporkan sebelumnya sebesar AS$24.975.083.

Pada tanggal 26 Mei 2020, MIFA mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada DJP atas SKPN tersebut.

Pada tanggal 22 April 2021, MIFA menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh MIFA.

Pada tanggal 19 Juli 2021, MIFA mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 9 Mei 2023, MIFA menerima Putusan Banding dari Pengadilan Pajak. Berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh MIFA. Rugi fiskal MIFA tahun 2015 menjadi AS$24.547.339 dari rugi fiskal yang disetujui MIFA pada saat pembahasan akhir sebesar AS$24.604.257

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Corporate Income Tax (continued)

TIA (continued)

On August 25, 2021, TIA submitted Tax Appeal to Tax Court related to the Decision of Objection. Upon to submission Tax Appeal to the Tax Court, TIA paid 50% from tax issue amount that still process amounting to US$98,763 on August 25, 2021.

Until the completion date of the consolidated financial statements, Tax Court has not yet issued decision related to the tax appeal.

2015 Corporate Income Tax

MIFA

On February 28, 2020, MIFA received SKPN for 2015 corporate income tax.

Based on the Nil Tax Assessment Letter ("SKPN"), MIFA's tax loss for 2015 was corrected amounting to US$370,826 to become US$24,604,257 from previously reported tax loss of US$24,975,083.

On 26 May, 2020, MIFA submitted an Application for Objection to SKPN to the DGT.

On April 22, 2021, MIFA received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT which fully rejected the objection submitted by MIFA.

On July 19, 2021, MIFA submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT which fully rejected the Decision of Objection.

On May 9, 2023, MIFA received an Appeal Decision from Tax Court. Based on the Decision, Tax Court partially accepted the appeal submitted by MIFA. MIFA's fiscal loss for year 2015 became US$24,547,339 from the fiscal loss approved by MIFA during the final discussion of US$24,604,257.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

MIFA (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2019

CK

Pada tanggal 6 Oktober 2021, CK menerima SKPKB atas PPN tahun 2019 sebesar Rp1.162.088.166 atau setara dengan US$81.441.

Terkait dengan SKPKB tersebut, CK mengajukan keberatan kepada DJP yang menolak sebagian SKPKB tersebut pada tanggal 23 Desember 2021 dan mencatat nilai yang disetujui oleh CK sebesar US$13.619 sebagai bagian dari "Beban Lainnya".

Pada tanggal 26 Oktober 2022, CK menerima keputusan keberatan yang menerima seluruh keberatan yang diajukan CK.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2018

CK

Pada tanggal 12 Agustus 2020, CK menerima SKPKB atas PPN tahun 2018 sebesar Rp1.150.637.408 atau setara dengan AS$80.639.

Terkait SKPKB tersebut, CK mengajukan keberatan kepada DJP yang menolak seluruh SKPKB pada tanggal 25 Oktober 2020.

Pada tanggal 2 Agustus 2021, CK menerima keputusan keberatan dari DJP yang menerima sebagian keberatan yang diajukan CK, dimana kurang bayar CK menjadi sebesar Rp1,0 miliar.

CK menyetujui sebagian keputusan tersebut dan mengajukan Banding atas kurang bayar sebesar AS$7.120 kepada DJP pada tanggal 27 Oktober 2021.

Pada tanggal 22 Mei 2023, CK menerima putusan banding yang mengabulkan seluruh sengketa PPN Tahun 2018 dan pada tanggal 14 Juli 2023 CK telah menerima pengembalian sebesar Rp1.000.043.498 atau setara dengan AS$66.070.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

MIFA (continued)

2019 Value Added Tax ("VAT")

CK

On October 6, 2021, CK received SKPKB on 2019 VAT amounting to Rp1,162,088,166 or equivalent to US$81,441.

Related to the SKPKB, CK submitted an objection to DGT which partially object the SKPKB on December 23, 2021 and recorded the amount agreed by CK amounting to US$13,619 as part of "Other Expenses".

On October 26, 2022, CK received objection decision which fully accepted the objection submitted by CK.

2018 Value Added Tax ("VAT")

CK

On August 12, 2020, CK received SKPKB on 2018 VAT amounting to Rp1,150,637,408 or equivalent to US$80,639.

Related to the SKPKB, CK submitted an objection to DGT which fully objected the SKPKB on October 25, 2020.

On August 2, 2021, CK received decision on objection from DGT which partially accepted the objection submitted by CK, where CK's underpayment to become Rp1.0 billion.

CK partially agreed with such decision and submitted appeal on the underpayment amounting to US$7,120 to DGT dated October 27, 2021.

On May 22 2023, CK received an appeal decision which granted all 2018 VAT disputes and on July 14 2023 CK received a restitution of Rp1,000,043,498 or the equivalent of US$66,070.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2018 (lanjutan)

CKB

Pada tanggal 13 Desember 2023, CKB menerima SKPKB atas PPN tahun 2018 sebesar Rp255.045.000. Pada tanggal 19 Desember 2023 CKB tidak mengajukan keberatan dan telah membayar SKPKB tersebut.

BDD

Pada tanggal 4 Desember 2023, BDD menerima SKPKB atas PPN tahun 2018 sebesar Rp172.406.315. Pada tanggal 13 Desember 2023 BDD tidak mengajukan keberatan dan telah membayar SKPKB tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2017

SSB

Pada tanggal 16 April 2019, SSB menerima SKPKB dan STP PPN tahun 2017 sebesar Rp3,30 miliar.

Pada tanggal 12 Juli 2019, SSB mengajukan Keberatan Pajak atas SKPKB tersebut kepada DJP.

Pada tanggal 10 Juni 2020, SSB menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh SSB dimana kurang bayar SSB menjadi Rp1,65 miliar dan denda sebesar Rp1,40 miliar.

Pada tanggal 28 Agustus 2020, SSB mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 2022, SSB menerima Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan oleh SSB.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2018 Value Added Tax ("VAT") (continued)

CKB

On December 13, 2023, CKB received SKPKB on 2018 VAT amounting to Rp255,045,000. On December 19, 2023, CKB did not submit an objection and paid the SKPKB.

BDD

On December 4, 2023, BDD received SKPKB on 2018 VAT amounting to Rp172,406,315. On December 13, 2023, BDD did not submit an objection and paid the SKPKB.

2017 Value Added Tax ("VAT")

SSB

On April 16, 2019, SSB received SKPKB and STP of 2017 VAT amounting to Rp3.30 billion.

On July 12, 2019, SSB has submitted an Application for Objection to SKPKB to the DGT.

On June 10, 2020, SSB received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT fully rejected the objection submitted by SSB where SSB's underpayment becoming Rp1.65 billion and penalty amounting to Rp1.40 billion.

On August 28, 2020, SSB submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT which fully rejected the Decision of Objection.

On June 9, 2022, SSB received Appeal Decision from the Tax Court which fully granted the objection submitted by SSB.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2017 (lanjutan)

CK

Pada tanggal 2 Mei 2019, CK menerima SKPKB PPN tahun 2017 sebesar Rp834.097.158 atau setara dengan AS$58.455.

Terkait dengan SKPKB PPN tersebut, CK menyetujui sebagian hasil SKPKB sebesar Rp252.273.973 atau setara dengan AS$18.148 yang telah dicatat sebagai bagian dari "Beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengajukan keberatan sebesar Rp581.823.185 atau setara dengan AS$40.776 pada tanggal 31 Juli 2019.

Pada tanggal 13 dan 31 Desember 2019, CK menerima Keputusan Keberatan dari DJP yang mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan oleh CK.

CK menyetujui sebagian keputusan tersebut dan mengajukan banding atas kurang bayar sebesar Rp484.706.218 atau setara dengan AS$33.969 ke DJP pada tanggal 4 Maret 2020.

Pada tanggal 3 Maret 2021, CK menerima Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan oleh CK.

Pada 10 Februari 2022 Pihak DJP mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan pada 10 Februari 2023, Mahkamah Agung menolak seluruh PK yang diajukan DJP.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2017 Value Added Tax ("VAT") (continued)

CK

On May 2, 2019, CK received SKPKB of 2017 VAT amounting to Rp834,097,158 or equivalent to US$58,455.

In relation to the SKPKB of VAT, CK partially agreed to the result of the SKPKB of Rp252,273,973 or equivalent to US$18,148 which has been recorded as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2019 and submitted an objection amounting to Rp581,823,185 or equivalent to US$40,776 dated July 31, 2019.

On December 13 and 31, 2019, CK received a Decision of Objection from the DGT which partially granted the objection submitted by CK.

CK partially agreed with such decision and submitted appeal on the underpayment amounting to Rp484,706,218 or equivalent to US$33,969 to DGT dated March 4, 2020.

On March 3, 2021, CK received Appeal Decision from the Tax Court which fully granted the objection submitted by CK.

On February 10 2022, DJP submitted a PK to the Supreme Court and on February 10 2023, the Supreme Court rejected all PKs submitted by DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2016

CK

Pada tanggal 6 Juni 2018, CK menerima SKPKB atas pajak pertambahan nilai tahun 2016 sebesar Rp489.276.205.086 atau setara dengan AS$34.289.429 termasuk tambahan penalti.

CK mengajukan keberatan pada tanggal 14 Agustus 2018 sebesar AS$34.289.429.

Pada tanggal 23 Juli 2019, CK menerima keputusan keberatan dari DJP yang mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan oleh CK. CK menyetujui sebagian keputusan tersebut sebesar Rp5.970.188.786 atau setara dengan AS$429.479 yang telah dicatat sebagai bagian dari "Beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengajukan banding atas kurang bayar tersebut dengan angka lebih bayar menurut CK sebesar Rp74.869.654.971 atau setara dengan AS$5.247.011 ke DJP pada tanggal 2 Oktober 2019.

Pada tanggal 14 Oktober 2021, CK menerima Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan oleh CK sehingga nilai kurang bayar menjadi sebesar Rp5.970.574.078 atau setara dengan AS$418.429.

Pada tanggal 24 dan 25 Januari 2022, DJP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung terkait dengan hasil putusan banding, yang kemudian selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menolak seluruh permohonan DJP.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Value Added Tax ("VAT")

CK

On June 6, 2018, CK received SKPKB of 2016 value added tax amounting to Rp489,276,205,086 or equivalent to US$34,289,429 including penalties.

CK submitted objection letters dated August 14, 2018 amounting to US$34,289,429.

On July 23, 2019, CK received a Decision of Objection from the DGT which partially granted the objection submitted by CK. CK partially agreed with such decision amounting to Rp5,970,188,786 or equivalent to US$429,479 which has been recorded as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2019 and has submitted appeal on the underpayment with the overpayment amount per CK amounting to Rp74,869,654,971 or equivalent to US$5,247,011 to DGT dated October 2, 2019.

On October 14, 2021, CK received Appeal Decision from the Tax Court which partially granted the appeal submitted by CK in which the underpayment amounted to Rp5,970,574,078 or equivalent to US$418,429.

On January 24 and 25, 2022, DGT submitted a request for Judicial review to Supreme Court related to the appeal decision, which was later during August until December 2022, Supreme Court issued a decision which fully object the judicial review request from DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2016 (lanjutan)

CK (lanjutan)

Pada tanggal 3 September 2019, DJP menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ("SPMKP") atas pajak penghasilan badan tahun 2017, dimana di dalam SPMKP tersebut, DJP memperhitungkan kurang bayar PPN untuk masa tertentu tahun 2016 dan 2017, sebesar Rp61.225.310.150 (setara dengan AS$4.493.510). Pada tanggal 21 Oktober 2019, melalui suratnya ke DJP, CK menyatakan keberatan terkait pengurangan tersebut dan mencatat nilai tersebut sebagai bagian dari Taksiran Tagihan Pajak untuk PPN tahun 2016 dan 2017. Pada tanggal 7 Maret 2023, CK mengirimkan surat kembali kepada DJP untuk membatalkan pengurangan kurang bayar PPN untuk masa tertentu tahun 2016 dan 2017 tersebut.

Pada tanggal 12 Juni 2023, CK menerima Surat Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PPN Tahun 2016 dan pada tanggal 5 Juli 2023, CK telah menerima restitusi dari DJP.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 22 September 2023, CK mengajukan permohonan imbalan Bunga terhadap kelebihan pembayaran atas Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak.

Pada tanggal 6 Oktober 2023, CK menerima surat jawaban atas surat permohonan imbalan Bunga. DJP menolak untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKIB) yang diajukan CK.

Pada tanggal 19 Oktober 2023, CK mengajukan gugatan atas penolakan penerbitan SKIB.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan atas banding tersebut.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Value Added Tax ("VAT") (continued)

CK (continued)

On September 3, 2019, DGT issued Tax Overpayment Refund Order ("SPMKP") on 2017 corporate income tax, where in the SPMKP, DGT compensated underpayment on certain VAT for year 2016 and 2017, amounting to Rp61,225,310,150 (equivalent to US$4,493,510). On October 21, 2019, through its letter to DGT, CK expressed its objection on such deduction and recorded the balance as part of Claims for Tax Refund for VAT year 2016 and 2017. On March 7, 2023, the Company sent another letter to DGT to revoke such compensation on underpayment on certain VAT for year 2016 and 2017.

On June 12, 2023, CK received Tax Assessment Deduction Letter for VAT Collection Letter year 2016 and on July 5, 2023, CK received restitution from DGT.

On July 31, 2023 and September 22 2023, CK submitted an application for interest compensation for the excess payment for the Tax Collection Letter for which the Tax Assessment Reduction Decree had been issued.

On October 6, 2023, CK received a response letter to the letter requesting interest compensation. DGT refused to issue the Decision Letter for Providing Interest Compensation (SKIB) submitted by CK.

On October 19 2023, CK filed a lawsuit against the rejection of the issuance of SKIB

Until the completion date of the consolidated financial statements, Tax Court has not yet issued decision related to the tax appeal.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2016 (lanjutan)

SSB

Pada tanggal 23 April 2018, SSB menerima SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai tahun 2016 sebesar Rp11,01 miliar dan denda sebesar Rp6,57 miliar. Atas SKPKB tersebut, SSB telah mengajukan keberatan ke DJP yang menolak seluruh SKPKB dan membayar sebesar Rp9,23 miliar atas SKPKB PPN periode Agustus 2016.

Pada tanggal 13 dan 18 Juni 2019, SSB menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP mengabulkan sebagian keberatan yang diajukan oleh SSB dimana kurang bayar SSB menjadi Rp11,01 miliar dan denda sebesar Rp6,57 miliar.

Pada tanggal 11 dan 16 September 2019, SSB mengajukan banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut yang menolak seluruh Keputusan Keberatan.

Pada tanggal 21 Oktober 2021, SSB menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan SSB. Pada tanggal 7 Januari 2022, SSB telah menerima restitusi sebesar Rp8,68 miliar, selisih sebesar Rp548 juta dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya".

Pada tanggal 7 Februari 2022, SSB menerima Surat Permohonan Peninjauan Kembali atas pajak pertambahan nilai tahun 2016 yang diajukan oleh DJP kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan Banding tanggal 21 Oktober 2021 yang menyetujui sebagian Banding yang diajukan SSB.

Pada tanggal 7 Maret 2022, SSB telah menyampaikan surat kontra memori kepada Mahkamah Agung atas Surat Permohonan Peninjauan Kembali tersebut.

Pada tanggal 2 Maret 2023, SSB menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan DJP.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Value Added Tax ("VAT") (continued)

SSB

On April 23, 2018, SSB received the SKPKB for 2016 Value Added Tax amounting to Rp11.01 billion and penalty amounting to Rp6.57 billion. For the SKPKB, SSB has filed an objection to the DGT which rejected all SKPKB and paid amounting to Rp9.23 billion on SKPKB VAT period August 2016.

On June 13 and 18, 2019, SSB received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT partially granted objections raised by SSB where SSB's underpayment becoming Rp11.01 billion and penalty amounting to Rp6.57 billion.

On September 11 and 16, 2019, SSB submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT which fully rejected the Decision of Objection.

On October 21, 2021, SSB received appeal letter from Tax Court which partially accepted the objection submitted by SSB. On January 7, 2022, SSB received the restitution amounting to Rp8.68 billion, difference amounting to Rp548 million recorded as part of "Other Expenses".

On February 7, 2022, SSB received Judicial Review Request Letter related to 2016 value added tax which was submitted by DGT to Tax Court related to Decision of Tax Appeal dated October 21, 2021 which partially accepted Appeal submitted by SSB.

On March 7, 2022, SSB submitted contra documents to Supreme Count related to the Judicial Review Request Letter.

On March 2, 2023, SSB received decision from Supreme Court which rejected the judicial review request submitted by DGT.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2014

SSB

Pada tanggal 29 April 2019, SSB menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar ("SKPKB") PPN tahun 2014 sebesar Rp4,17 miliar.

Pada tanggal 3 Juli 2019, SSB mengajukan Keberatan Pajak atas SKPKB tersebut kepada DJP.

Pada tanggal 3 Juni 2020, SSB menerima Keputusan Keberatan dari DJP. Berdasarkan surat tersebut, DJP menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh SSB dimana kurang bayar SSB menjadi Rp2,10 miliar dan denda sebesar Rp2,10 miliar.

Pada tanggal 28 Agustus 2020, SSB mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak terkait hasil keputusan DJP atas keberatan tersebut.

Pada tanggal 9 Juni 2022, SSB menerima putusan banding dari Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian banding yang diajukan SSB, dimana kurang bayar SSB menjadi Rp73,6 juta dan denda sebesar Rp73,6 juta.

Atas kurang bayar tersebut telah dipotong dari restitusi lebih bayar pajak penghasilan 2017 dan telah dicatat SSB sebagai bagian dari "Beban Lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun 2019

MIFA

Pada tanggal 23 Juli 2021, MIFA menerima SKPKB atas PPh Pasal 23 tahun 2019 sebesar Rp7.156.573.934.

Berdasarkan SKPKB tersebut, MIFA mengajukan keberatan yang menolak seluruh SKPKB pada tanggal 18 Oktober 2021 dan melakukan pembayaran sebesar Rp3.578.286.967 (setara dengan AS$254.068).

Pada tanggal 18 Agustus 2022, MIFA menerima keputusan keberatan dari DJP yang menerima seluruh keberatan yang diajukan MIFA.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2014 Value Added Tax ("VAT")

SSB

On April 29, 2019, SSB received SKPKB of 2014 VAT amounting to Rp4.17 billion.

On July 3, 2019, SSB has submitted an Application for Objection to SKPKB to the DGT.

On June 3, 2020, SSB received a Decision of Objection from the DGT. Based on the letter, DGT fully rejected the objection submitted by SSB where SSB's underpayment becoming Rp2.10 billion and penalty amounting to Rp2.10 billion.

On August 28, 2020, SSB submitted tax appeal to Tax Court related to the decision of DGT which fully rejected the Decision of Objection.

On June 9, 2022, SSB received appeal letter from Tax Court which partially accepted the objection submitted by SSB, where SSB's underpayment to become Rp73.6 million and penalty amounting to Rp73.6 million.

The underpayment was deducted from the restitution of overpayment on 2017 corporate income tax and was recorded by SSB as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

2019 Withholding Tax ("WHT")

MIFA

On July 23, 2021, MIFA received SKPKB of 2019 WHT article 23 amounting to Rp7,156,573,934.

Based on such SKPKB, MIFA submitted Objection on SKPKB on October 18, 2021 which fully rejected the SKPKB and made payment of Rp3,578,286,967 (equivalents to US$254,068).

On August 18, 2022, MIFA received decision on objection from DGT which accepted the objection submitted by MIFA.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2014 (lanjutan)

SSB (lanjutan)

Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun 2019

MIFA

Pada tanggal 23 Juli 2021, MIFA menerima SKPKB atas PPh Pasal 23 tahun 2019 sebesar Rp7.156.573.934.

Berdasarkan SKPKB tersebut, MIFA mengajukan keberatan yang menolak seluruh SKPKB pada tanggal 18 Oktober 2021 dan melakukan pembayaran sebesar Rp3.578.286.967 (setara dengan AS$254.068).

Pada tanggal 18 Agustus 2022, MIFA menerima keputusan keberatan dari DJP yang menerima seluruh keberatan yang diajukan MIFA.

Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun 2018

TIA

Pada tanggal 2 Juni 2020, TIA menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2) dan 15 tahun 2018 masing-masing sebesar AS$120.235 dan AS$46.257.

Berdasarkan SKPKB tersebut, TIA mengajukan keberatan yang menolak seluruh SKPKB pada tanggal 27 Agustus 2020. Pada tanggal 30 Juni 2021, TIA menerima Keputusan Keberatan dari DJP atas PPh Pasal 4(2) dan 15 yang menolak semua keberatan yang diajukan TIA.

TIA mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan PPh Pasal 4(2) dan 15 pada tanggal 29 September 2021 dan melakukan pembayaran masing-masing sebesar AS$60.117 dan AS$23.129.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan atas banding tersebut.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2014 Value Added Tax ("VAT") (continued)

SSB (continued)

2019 Withholding Tax ("WHT")

MIFA

On July 23, 2021, MIFA received SKPKB of 2019 WHT article 23 amounting to Rp7,156,573,934.

Based on such SKPKB, MIFA submitted Objection on SKPKB on October 18, 2021 which fully rejected the SKPKB and made payment of Rp3,578,286,967 (equivalents to US$254,068).

On August 18, 2022, MIFA received decision on objection from DGT which accepted the objection submitted by MIFA.

2018 Withholding Tax ("WHT")

TIA

On June 2, 2020, TIA received SKPKB of 2018 WHT article 4(2) and 15 amounting to US$120,235 and US$46,257, respectively.

Based on such SKPKB, TIA submitted Objection on SKPKB on August 27, 2020 which fully reject the SKPKB. On June 30, 2021 TIA received Decision of Objection of WHT article 4(2) and 15 which fully rejected the SKPKB objection submitted by TIA.

TIA submitted Tax Appeal to Tax Court related to the Decision of Objection of WHT Article 4(2) and 15 on September 29, 2021 and made payment of US$60,117 and US$23,129, respectively.

Until the completion date of the consolidated financial statements, Tax Court has not yet issued decision related to the tax appeal.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun 2018 (lanjutan)

MIFA

Pada tanggal 27 April 2020, MIFA menerima SKPKB atas PPh Pasal 23 dan 26 tahun 2018 masing-masing sebesar Rp3.994.717.188 dan Rp3.408.317.430.

Berdasarkan SKPKB tersebut, MIFA mengajukan keberatan yang menolak seluruh SKPKB pada tanggal 17 Juli 2020. Pada tanggal 18 Juni 2021, MIFA menerima Keputusan Keberatan dari DJP atas PPh Pasal 23 yang menolak semua keberatan yang diajukan MIFA dan PPh Pasal 26 yang menerima semua keberatan yang diajukan MIFA.

MIFA mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan PPh Pasal 23 pada tanggal 14 September 2021 dan melakukan pembayaran sebesar Rp2.202.750.272 (setara dengan AS$154.777).

Pada tanggal 9 Mei 2023, MIFA menerima Putusan Banding dari Pengadilan Pajak. Berdasarkan Putusan tersebut, Pengadilan Pajak mengabulkan seluruh permohonan banding dan MIFA mendapatkan pengembalian pajak sebesar Rp2.202.750.272

CKB

Pada tanggal 13 Desember 2023, CKB menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2), 23 dan 26 tahun 2018 masing-masing senilai Rp44.784.214, Rp200.649.120 dan Rp404.211.580. Pada tanggal 18 Desember 2023 CKB tidak mengajukan keberatan dan telah membayar SPKB tersebut.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2018 Withholding Tax ("WHT") (continued)

MIFA

On April 27, 2020, MIFA received SKPKB of 2018 WHT article 23 and 26 amounting to Rp3,994,717,188 and Rp3,408,317,430, respectively.

Based on such SKPKB, MIFA submitted Objection on SKPKB on July 17, 2020 which fully rejected the SKPKB. On June 18, 2021 MIFA received Decision of Objection of WHT article 23 which fully rejected the SKPKB objection submitted by MIFA and WHT article 26 which fully accepted the SKPKB objection submitted by MIFA.

MIFA submitted Tax Appeal to Tax Court related to the Decision of Objection of WHT Article 23 on September 14, 2021 and made payment of Rp2,202,750,272 (equivalents to US$154,777).

On May 9, 2023, MIFA received an Appeal Decision from the Tax Court. Based on the Decision, Tax Court fully accepted the appeal and MIFA received tax refund amounted to Rp2,202,750,272.

CKB

On December 13, 2023, CKB received SKPKB of WHT article 4(2), 23 and 26 year 2018 amounting to Rp44,784,214, Rp200,649,120 and Rp404,211,580, respectively. On December 18, 2023 CKB did not submit an objection and paid the SKPKB.

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Taksiran Tagihan Pajak (lanjutan)

Pajak Penghasilan ("PPh") Tahun 2016

TIA

Pada tanggal 7 April 2020, TIA menerima SKPKB atas PPh Pasal 4(2), 23 dan 15 tahun 2016 masing-masing sebesar Rp1.601.815.695, Rp5.528.570.091 dan Rp211.085.537.

Berdasarkan SKPKB tersebut, TIA mengajukan keberatan yang menolak seluruh SKPKB pada tanggal 1 Juli 2020. Pada tanggal 27 Mei 2021, TIA menerima Keputusan Keberatan dari DJP atas PPh Pasal 4(2), 23 dan 15 yang menolak semua keberatan yang diajukan TIA.

TIA mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan PPh Pasal 4(2), 23 dan 15 pada tanggal 25 Agustus 2021 dan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp800.907.848, Rp2.764.285.046 dan Rp105.542.769.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Pengadilan Pajak belum mengeluarkan keputusan atas banding tersebut.

23. TAXATION (continued)

a. Estimated Claims for Tax Refund (continued)

2016 Withholding Tax ("WHT")

TIA

On April 7, 2020, TIA received SKPKB of 2016 WHT article 4(2), 23 and 15 amounting to Rp1,601,815,695, Rp5,528,570,091 and Rp211,085,537, respectively.

Based on such SKPKB, TIA submitted Objection on SKPKB on July 1, 2020, which fully rejected the SKPKB. On May 27, 2021, TIA received Decision of Objection of WHT article 4(2), 23 and 15 which fully rejected the SKPKB objection submitted by TIA.

TIA submitted Tax Appeal to Tax Court related to the Decision of Objection of WHT Article 4(2), 23 and 15 on August 25, 2021, and made payment of Rp800,907,848, Rp2,764,285,046 and Rp105,542,769.

Until the completion date of the consolidated financial statements, Tax Court has not yet issued decision related to the tax appeal.

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut: / *The details of taxes payable are as follows:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Pajak penghasilan:			*Income taxes:*
Pasal 21	766.585	461.355	*Article 21*
Pasal 4 (2)	150.863	718.028	*Article 4 (2)*
Pasal 15	17.279	74.734	*Article 15*
Pasal 22	-	17	*Article 22*
Pasal 23	982.840	1.603.239	*Article 23*
Pasal 25	2.144.149	2.706.977	*Article 25*
Pasal 29	2.897.319	23.611.403	*Article 29*
Pajak pertambahan nilai	864.380	971.243	*Value added tax*
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	1.743.883	1.845.414	*Motor vehicle fuel tax*
Total	**9.567.298**	**31.992.410**	***Total***

c. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Neto / *c. Income Tax Benefits (Expense) - Net*

Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan - neto Grup adalah sebagai berikut: / *The details of income tax benefits (expense) - net of the Group are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kini			*Current*
Entitas anak	(59.273.111)	(93.333.133)	*Subsidiaries*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	(196.553)	(805.099)	*The Company*
Entitas anak	3.602.634	2.980.295	*Subsidiaries*
Neto	3.406.081	2.175.196	*Net*
Beban pajak penghasilan - neto	**(55.867.030)**	**(91.157.937)**	***Income tax expense - net***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

d. Pajak Kini / *d. Current Tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran rugi fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated tax loss is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	371.490.923	433.061.444	*Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak - neto	(379.420.699)	(571.191.487)	*Profit before income tax of the subsidiaries - net*
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	70.606.770	120.444.853	*Elimination of transactions with subsidiaries*
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	62.676.994	(17.685.190)	*Profit (loss) before income tax of the Company*
Beda temporer			*Temporary differences*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha	739.748	(349.059)	*Allowance for expected credit losses on trade receivables*
Aset hak-guna	505.739	(152.703)	*Right of use asset*
Penyisihan imbalan kerja karyawan - neto	300.782	21.697	*Provision for employee benefits - net*
Penyusutan	12.082	11.243	*Depreciation*
Amortisasi	(30.167)	366.506	*Amortization*
Utang sewa	(430.091)	-	*Lease liabilities*
Beban akrual	(2.986.817)	3.445.137	*Accrued expenses*
Beda temporer - neto	(1.888.724)	3.342.821	*Temporary differences - net*
Beda permanen			*Permanent differences*
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(912.653)	(334.920)	*Interest income already subjected to final income tax*
Dividen	(81.928.779)	(13.802.559)	*Dividend*
Lain-lain	(57.373)	7.267.293	*Others*
Total beda permanen	(82.898.805)	(6.870.186)	*Total permanent differences*
Taksiran rugi fiskal	(22.110.535)	(21.212.555)	*Estimated taxable loss*
Akumulasi rugi fiskal awal tahun	(75.643.542)	(50.535.495)	*Cumulative tax losses at beginning of year*
Koreksi rugi fiskal	23.207.745	(3.895.492)	*Adjustment of tax loss*
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun Perusahaan	**(74.546.332)**	**(75.643.542)**	***Cumulative tax losses at end of year of the Company***
Pajak penghasilan dibayar di muka - Pasal 23	908.220	2.700.291	*Prepayments of income tax - Article 23*
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan Perusahaan	**908.220**	**2.700.291**	***Estimated claims for tax refund corporate income tax of the Company***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

d. Pajak Kini (lanjutan) / *d. Current Tax (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dan taksiran rugi fiskal adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliation between profit before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, and estimated tax loss is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Taksiran tagihan pajak			*Estimated claims for tax refund*
Perusahaan	908.220	2.700.291	*The Company*
Entitas anak	24.432.880	1.057.202	*Subsidiaries*
Total taksiran tagihan pajak	**25.341.100**	**3.757.493**	***Total estimated claims for tax refund***
Utang pajak penghasilan badan			***Corporate income tax payable***
Entitas anak	**2.897.319**	**23.611.403**	***Subsidiaries***

e. Pajak Tangguhan / *e. Deferred Tax*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Aset pajak tangguhan			***Deferred tax assets***
Entitas anak			***Subsidiaries***
Aset pajak tangguhan - neto			*Deferred tax assets - net*
Liabilitas sewa	5.567.741	4.847.200	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2.010.139	1.740.381	*Employee benefits liability*
Beban akrual	1.917.468	2.210.428	*Accrued expenses*
Aset tetap	1.573.884	2.778.013	*Fixed assets*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	943.058	1.183.379	*Allowance for expected credit losses*
Rugi fiskal	865.331	-	*Tax loss*
Cadangan atas keusangan persediaan	710.124	726.519	*Allowance for obsolescence of inventories*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset takberwujud	71.492	70.060	*Allowance for impairment losses of intangible assets*
Properti pertambangan	(16.239)	(979.031)	*Mining properties*
Aset hak-guna	(4.933.707)	(4.490.578)	*Right of use assets*
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi intragrup	648.116	1.110.048	*Unrealized gain on intra-group transactions*
Aset pajak tangguhan - neto	**9.357.407**	**9.196.419**	***Deferred tax assets - net***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

e. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *e. Deferred Tax (continued)*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: (continued)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Liabilitas pajak tangguhan			***Deferred tax liabilities***
Perusahaan			***Company***
Aset hak-guna	223.678	334.941	*Right of use assets*
Aset tetap	481	3.139	*Fixed assets*
Utang sewa	-	(310.474)	*Lease liabilities*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Liabilitas pajak tangguhan - neto			*Deferred tax liabilities - net*
Aset hak-guna	21.055.513	14.230.598	*Right of use assets*
Aset tetap	11.029.925	4.301.078	*Fixed assets*
Aset takberwujud	1.609.809	1.997.618	*Intangible assets*
Properti pertambangan	-	2.304.828	*Mining properties*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	-	(17.536)	*Allowance for expected credit losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset tak berwujud	(211.321)	(807.312)	*Allowance for impairment losses of intangible assets*
Beban akrual	(2.044.642)	(2.047.944)	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	(3.093.784)	(2.279.997)	*Employee benefits liability*
Liabilitas sewa	(22.208.771)	(14.620.139)	*Lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	**6.360.888**	**3.088.800**	***Deferred tax liabilities - net***

Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan - neto adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax income (expense) - net are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Perusahaan			***Company***
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak yang berlaku:			*Effects of temporary differences at applicable tax rates:*
Aset hak-guna	111.263	(33.594)	*Right of use assets*
Penyusutan	2.658	-	*Depreciation*
Liabilitas sewa	(310.474)	-	*Lease liabilities*
Beban akrual	-	(610.274)	*Accrued expense*
Aset tetap	-	2.473	*Fixed assets*
Aset takberwujud	-	21.767	*Intangible assets*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	-	(185.471)	*Employee benefits liability*
Total - Perusahaan	(196.553)	(805.099)	*Total - Company*

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

e. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *e. Deferred Tax (continued)*

Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan - neto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of deferred tax income (expense) - net are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Entitas anak			***Subsidiaries***
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak yang berlaku:			*Effects of temporary differences at applicable tax rates:*
Liabilitas sewa	8.563.166	5.859.137	*Lease liabilities*
Beban akrual	7.527.600	1.291.635	*Accrued expense*
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	865.331	(4.005.967)	*Tax loss carry forward*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	775.385	169.719	*Employee benefits liability*
Aset takberwujud	536.275	(228.698)	*Intangible assets*
Properti pertambangan	54.246	(219.209)	*Mining Properties*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset takberwujud	-	(1.164.412)	*Allowance for impairment losses of intangible assets*
Cadangan atas keusangan persediaan	(63.869)	7.088	*Allowance for obsolescence of inventories*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(381.533)	780.837	*Allowance for expected credit losses*
Cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap	(580.945)	-	*Allowance for impairment losses of fixed assets*
Aset tetap	(6.331.147)	6.570.706	*Fixed assets*
Aset hak-guna	(7.474.011)	(5.921.550)	*Right of use assets*
Total - Entitas anak	3.490.498	3.139.286	*Total - Subsidiaries*
Laba yang belum direalisasi atas transaksi intragrup	112.136	(158.991)	*Unrealized gain of intra-group transactions*
Manfaat pajak tangguhan - neto	**3.406.081**	**2.175.196**	***Deferred tax income - net***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

e. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *e. Deferred Tax (continued)*

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba akuntansi sebelum beban pajak penghasilan dan beban pajak seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense computed using the prevailing tax rates on the accounting profit before income tax expense and the tax expense reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Laba sebelum pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	371.490.923	433.061.444	*Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	70.606.770	120.444.853	*Elimination of transactions with subsidiaries*
Laba sebelum pajak penghasilan	**442.097.693**	**553.506.297**	***Profit before income tax***
Pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(97.261.492)	(121.771.385)	*Income tax with applicable tax rate*
Pengaruh pajak atas beda permanen:			*Tax effects on permanent differences:*
Bagian atas laba entitas asosiasi	31.679.326	14.649.323	*Share profit of associates*
Dividen	23.524.681	31.782.190	*Dividend*
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final - neto	2.111.495	2.202.471	*Income already subject to final tax - net*
Hadiah dan sumbangan	(1.296.630)	(1.107.538)	*Gifts and donations*
Lain-lain	(2.767.710)	(2.462.975)	*Others*
Penggunaan aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya	2.448.015	-	*Utilization of deferred tax asset previously unrecognized*
Pajak tangguhan dari laba yang belum direalisasi atas transaksi intragrup	112.136	(158.991)	*Deferred tax arising from unrealized gain of intra-group transactions*
Penyesuaian aset pajak tangguhan	(77.116)	(1.459.090)	*Deferred tax asset adjustment*
Penyesuaian atas rugi fiskal atas ketetapan pajak	(253.914)	(3.192.828)	*Adjustment on tax loss based on tax assessment*
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui - neto	(14.085.821)	(9.639.114)	*Unrecognized deferred tax assets - net*
Beban pajak penghasilan per laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian - neto	**(55.867.030)**	**(91.157.937)**	***Income tax expense per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income - net***

23. PERPAJAKAN (lanjutan) / *23. TAXATION (continued)*

e. Pajak Tangguhan (lanjutan) / *e. Deferred Tax (continued)*

Akumulasi rugi fiskal Grup adalah sebagai berikut:

The Group's tax losses carried forward is as follows:

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*			
	Akumulasi Rugi Fiskal/ *Cumulative Tax Losses*	**Aset Pajak Tangguhan yang tidak Diakui/ *Unrecognized Deferred Tax Asset***	**Tahun Kedaluwarsa/ *Expired Year***	
Perusahaan	74.546.332	16.400.193	2024 - 2028	*The Company*
Entitas anak				*Subsidiaries*
Reswara Grup	64.140.240	14.110.853	2026 - 2028	*Reswara Group*
AJN Grup	21.643.782	4.761.632	2024 - 2028	*AJN Group*
Total	**160.330.354**	**35.272.678**		***Total***

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*			
	Akumulasi Rugi Fiskal/ *Cumulative Tax Losses*	**Aset Pajak Tangguhan yang tidak Diakui/ *Unrecognized Deferred Tax Asset***	**Tahun Kedaluwarsa/ *Expired Year***	
Perusahaan	75.643.542	16.641.579	2023 - 2027	*The Company*
Entitas anak				*Subsidiaries*
Reswara Grup	25.109.897	5.524.177	2026 - 2027	*Reswara Group*
AJN Grup	20.690.552	4.551.921	2023 - 2027	*AJN Group*
Total	**121.443.991**	**26.717.677**		***Total***

f. Pengampunan Pajak / *f. Tax Amnesty*

TIA, ATR, BDD, dan Reswara memutuskan untuk memanfaatkan fasilitas pengampunan pajak berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Aset pengampunan pajak diukur berdasarkan nilai yang dilaporkan pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("SKPP"). Uang tebusan (jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan aturan Pengampunan Pajak) dibebankan pada laporan laba rugi pada periode saat SKPP diterima.

TIA, ATR, BDD and Reswara have decided to utilize tax amnesty facility based on Tax Amnesty Law. Tax amnesty assets are measured at the amount reported in the Tax Amnesty Approval Letter ("SKPP"). The redemption money (the amount of tax paid in accordance with Tax Amnesty law) shall be charged directly to profit or loss in the period when the SKPP was received.

Berdasarkan PSAK No. 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", selisih antara nilai yang diakui sebagai aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan sebagai "Tambahan Modal Disetor" dan tidak bisa direklasifikasi sebagai saldo laba atau komponen laba atau rugi tahun berjalan. Selisih tersebut disajikan sebagai "Komponen Lainnya dari Ekuitas" dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Based on PSAK No. 70 "Accounting for Assets and Liabilities of Tax Amnesty", any difference between amounts initially recognized for the tax amnesty assets and the related tax amnesty liabilities is presented as "Additional Paid-In Capital" and shall not be reclassified to retained earnings or recycled to profit or loss subsequently. Such difference was presented as "Other Components of Equity" in the consolidated statement of equity.

24. UTANG OBLIGASI / *24. BONDS PAYABLE*

Rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: / *The details of bonds payable are as follows:*

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*					
	Pokok Obligasi/ *Bonds Principal*	Beban Emisi Utang yang belum Diamortisasi/ *Unamortized Issuance Costs*	Total/*Total*	Jangka Pendek/ *Current*	Jangka Panjang/ *Non-current*	
Senior Notes ABM Investama	160.000.000	(4.640.872)	155.359.128	-	155.359.128	*Senior Notes ABM Investama*

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*					
	Pokok Obligasi/ *Bonds Principal*	Beban Emisi Utang yang belum Diamortisasi/ *Unamortized Issuance Costs*	Total/*Total*	Jangka Pendek/ *Current*	Jangka Panjang/ *Non-current*	
Senior Notes ABM Investama	160.000.000	(6.085.960)	153.914.040	-	153.914.040	*Senior Notes ABM Investama*

Pada tanggal 5 Agustus 2021, Perusahaan menerbitkan *Senior Notes* sebesar AS$200.000.000 dengan harga 98,548% dari nilai pokok, dengan Bank of New York Mellon ("BNYM") sebagai wali amanat yang diatur dalam *Indenture*. *Senior Notes* akan jatuh tempo pada 5 Agustus 2026, kecuali dilunasi lebih cepat, dan dikenakan bunga 9,50% per tahun. Bunga dibayarkan setiap enam bulan pada tanggal 5 Februari dan 5 Agustus setiap tahunnya, dimulai pada tanggal 5 Februari 2022. Penerimaan neto yang diperoleh dari *Senior Notes* ini digunakan untuk melunasi *Notes* yang ada.

On August 5, 2021, the Company issued Senior Notes amounting to US$200,000,000 at the issuance price of 98.548% of the principal amount, with Bank of New York Mellon ("BNYM") as trustee which regulated in the Indenture. The Senior Notes will mature on August 5, 2026, unless earlier redeemed, and bear interest of 9.50% per annum. Interest is payable semi-annually on February 5 and August 5 each year, commencing on February 5, 2022. The net proceeds of the Senior Notes were used to repayment the outstanding Notes.

Notes mendapatkan peringkat B1 dan B+ masing-masing dari Moody's Investor Service, Inc. dan Fitch Rating Ltd., berdasarkan *rating* yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2024 dan 29 September 2023.

The Notes were rated B1 and B+ by Moody's Investor Service, Inc. and Fitch Rating Ltd., based on the rating issued on February 12, 2024 and September 29, 2023, respectively.

Pada tanggal 23 November 2022, Perusahaan melakukan pembayaran sebagian *Senior Secured Notes* sebesar AS$40.000.000.

On November 23, 2022, the Company made partial payment of the Senior Secured Notes amounting to US$40,000,000.

Pada tanggal 12 September 2022, Perusahaan dan BNYM menandatangani *Second Supplemental Indenture* yang menambah definisi baru atas investasi yang diizinkan yang diatur sebelumnya dalam *Indenture* serta amendemen atas ketentuan *Priority Indebtedness.*

On September 12, 2022, the Company and BNYM has entered into Supplemental Indenture which added the new definition of the permitted investment which previously regulated under the Indenture and amendment the provisions of Priority Indebtedness.

Sehubungan dengan Notes tersebut, Grup ABM tanpa AJN dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam *Indenture*.

In relation to the Notes, ABM Group without AJN are restricted to perform certain actions as stipulated in the Indenture.

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan atau Grup ABM tanpa AJN juga diharuskan memenuhi rasio keuangan tertentu yang diuji setiap triwulanan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan tersebut di atas seperti disebutkan dalam *indenture* atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan *indenture* terkait.

24. BONDS PAYABLE (continued)

The Company or ABM Group without AJN shall maintain certain financial ratios which will be assessed quarterly.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company as either complied with all of the covenants of the above-mentioned bonds payable as stipulated in the respective indenture or obtained necessary waivers as required by the respective indenture.

25. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

25. SHARE CAPITAL

As of December 31, 2023 and 2022, the composition of the Company's shareholders is as follows:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/ *Amount*	*Shareholders*
PT Tiara Marga Trakindo	1.474.573.133	53,5592%	78.042.982	*PT Tiara Marga Trakindo*
Valle Verde Pte. Ltd., Singapura	702.349.867	25,5106%	37.172.438	*Valle Verde Pte. Ltd., Singapore*
Rachmat Mulyana Hamami (Komisaris Utama)	6.120.500	0,2223%	802.611	*Rachmat Mulyana Hamami (President Commissioner)*
Achmad Ananda Djajanegara (Direktur Utama)	1.283.500	0,0466%	70.363	*Achmad Ananda Djajanegara (President Director)*
Mivida Hamami (Komisaris)	133.500	0,0049%	7.333	*Mivida Hamami (Commissioner)*
Masyarakat umum dan karyawan (dengan pemilikan masing-masing di bawah 5%)	568.704.500	20,6564%	30.459.181	*Public and employees (each with ownership interest below 5%)*
Total	**2.753.165.000**	**100,0000%**	**146.554.908**	***Total***

26. TAMBAHAN MODAL DISETOR - NETO

Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

The details of this account are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Tambahan modal disetor dari penawaran perdana saham	147.510.299	147.510.299	*Additional paid-in-capital from initial public offering*
Biaya emisi saham	(8.098.156)	(8.098.156)	*Share issuance costs*
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(23.815.379)	(23.815.379)	*Difference in value of transaction with entities under common control*
Biaya emisi obligasi wajib tukar	(509.566)	(509.566)	*Issuance cost of mandatory convertible bond*
Total	**115.087.198**	**115.087.198**	***Total***

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI / *27. NON-CONTROLLING INTERESTS*

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the details of non-controlling interests in net assets of the subsidiaries are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
PT Sanggar Sarana Baja	52.500	51.912	*PT Sanggar Sarana Baja*
PT Cipta Krida Bahari	(1.244)	(1.387)	*PT Cipta Krida Bahari*
PT Anzara Janitra Nusantara	(145.322)	(195.410)	*PT Anzara Janitra Nusantara*
PT Reswara Minergi Hartama	-	67.303.404	*PT Reswara Minergi Hartama*
Total	**(94.066)**	**67.158.519**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari kepentingan non-pengendali atas total penghasilan (rugi) komprehensif entitas anak adalah sebagai berikut:

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the details of non-controlling interests in total comprehensive income (loss) of the subsidiaries are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
PT Reswara Minergi Hartama	26.572.517	71.956.423	*PT Reswara Minergi Hartama*
PT Anzara Janitra Nusantara	50.088	(1.218)	*PT Anzara Janitra Nusantara*
PT Sanggar Sarana Baja	588	113	*PT Sanggar Sarana Baja*
PT Cipta Krida Bahari	143	339	*PT Cipta Krida Bahari*
Total	**26.623.336**	**71.955.657**	***Total***

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan entitas anak dari Grup yang memiliki kepentingan non-pengendali yang material terhadap Grup.

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian:

27. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

The following is the summarized financial information for the Group's subsidiaries that has non-controlling interests that are material to the Group.

Summarized consolidated statements of financial position:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	
	PT Reswara Minergi Hartama	
Aset		***Assets***
Aset lancar	108.435.232	*Current assets*
Aset tidak lancar	653.282.673	*Non-current assets*
Total aset	**761.717.905**	***Total assets***
Liabilitas		***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek	(86.080.790)	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	(193.587.925)	*Non-current liabilities*
Total liabilitas	**(279.668.715)**	***Total liabilities***
Kepentingan non-pengendali	-	*Non-controlling interests*
Aset neto	**482.049.190**	***Net assets***

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
	PT Reswara Minergi Hartama	
Aset		***Assets***
Aset lancar	279.129.588	*Current assets*
Aset tidak lancar	701.747.224	*Non-current assets*
Total aset	**980.876.812**	***Total assets***
Liabilitas		***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek	(234.081.408)	*Current liabilities*
Liabilitas jangka panjang	(326.335.933)	*Non-current liabilities*
Total liabilitas	**(560.417.341)**	***Total liabilities***
Kepentingan non-pengendali	(67.190.325)	*Non-controlling interests*
Aset neto	**353.269.146**	***Net assets***

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan entitas anak dari Grup yang memiliki kepentingan non-pengendali yang material terhadap Grup. (lanjutan)

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

27. NON-CONTROLLING INTERESTS (continued)

The following is the summarized financial information for the Group's subsidiaries that has non-controlling interests that are material to the Group. (continued)

Summarized consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*	
	PT Reswara Minergi Hartama	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	512.588.530	*Revenue from contracts with customers*
Laba tahun berjalan	228.113.345	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(5.690.103)	*Other comprehensive loss for the year, net of tax*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	222.423.242	*Total comprehensive income for the year*
Total penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali entitas anak	26.622.748	*Total comprehensive income attributable to the subsidiaries - non-controlling*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*	
	PT Reswara Minergi Hartama	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	736.929.337	*Revenue from contracts with customers*
Laba tahun berjalan	313.918.743	*Profit for the year*
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(4.405.470)	*Other comprehensive loss for the year, net of tax*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	309.513.273	*Total comprehensive income for the year*
Total penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali entitas anak	71.956.423	*Total comprehensive income attributable to the subsidiaries - non-controlling*

28. DIVIDEN KAS DAN CADANGAN UMUM

Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan secara bertahap mencadangkan sekurang-kurangnya 20% dari modal yang ditempatkan sebagai cadangan dana umum, maka berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2023, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 51 tanggal 10 Mei 2023, pemegang saham menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

a. Penambahan cadangan umum atas saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar AS$100.000; dan

b. Pembagian dividen kas sejumlah US$75.000.000 atau setara dengan Rp1.101.266.000.000 yang diambil dari laba tahun 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada bulan Juni 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas dividen kas.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2022, yang telah diaktakan dalam Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 5 tanggal 11 Mei 2022, pemegang saham menyetujui, antara lain, sebagai berikut:

a. Penambahan cadangan umum atas saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar AS$100.000; dan

b. Pembagian dividen kas sebesar Rp267 per saham atau sejumlah Rp735.095.055.000 atau setara dengan AS$50.504.624 yang diambil dari laba tahun 2021 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada bulan Juni 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas dividen kas.

28. CASH DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE

In compliance with Corporation Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007, which requires companies to set aside, on a gradual basis, an amount equivalent to at least 20% of their subscribed capital as general reserve, based on Annual General Shareholders Meeting held on May 10, 2023 which was covered by Notarial Deed No. 51 dated May 10, 2023 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others, the following:

a. Additional appropriation of retained earnings for general reserve amounting to US$100,000; and

b. The distribution of cash dividends amounting to US$75,000,000 or equivalent to Rp1,101,266,000,000 which were taken from income for 2022 attributable to equity holders of the parent company. In June 2023, the Company has paid such cash dividends.

Based on Annual General Shareholders Meeting held on May 11, 2022 which was covered by Notarial Deed No. 5 dated May 11, 2022 of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others, the following:

a. Additional appropriation of retained earnings for general reserve amounting to US$100,000; and

b. The distribution of cash dividends amounting to Rp267 per share or totaling Rp735,095,055,000 or equivalent to US$50,504,624 which were taken from income for 2021 attributable to equity holders of the parent company. In June 2022, the Company has paid such cash dividends.

29. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN

Rincian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang dapat diatribusikan ke setiap lini bisnis setelah eliminasi adalah sebagai berikut:

29. REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS

The details of revenue from contracts with customers attributable to each business units after eliminations are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kontraktor tambang dan tambang batubara	1.239.653.937	1.230.195.953	*Mining contractors and coal mining*
Jasa			*Services*
Logistik dan sewa kapal	146.786.009	130.798.226	*Logistics and vessel rental*
Divisi *Site Services* ("SSD") dan Repabrikasi	52.762.061	47.690.914	*Site Services Division ("SSD") and Remanufacturing*
Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	948.319	1.036.437	*Power engine rental*
Pabrikasi	37.658.771	29.626.048	*Manufacturing*
Perdagangan bahan bakar	15.189.759	6.179.793	*Fuel trading*
Total	**1.492.998.856**	**1.445.527.371**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, nilai kontrak konstruksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, construction contracts are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Pendapatan kontrak	8.177.636	28.826.290	*Contract revenue*
Agregat biaya yang terjadi dan laba yang diakui sampai tanggal pelaporan	8.000.240	16.774.683	*Aggregate amount of costs incurred and recognized profit up to the reporting date*
Aset terkait kontrak konstruksi	4.340.249	223.020	*Asset related to construction contract*
Liabilitas terkait kontrak konstruksi	(4.523.372)	(12.125.788)	*Liabilities related to construction contract*

Rincian pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of revenue from contracts with customers to individual customers representing more than 10% of the total revenue from contracts with customers are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Nilai:			*Amount:*
PT Multi Harapan Utama (Catatan 33)	179.753.383	177.626.565	*PT Multi Harapan Utama (Note 33)*
Persentase:			*Percentage:*
PT Multi Harapan Utama (Catatan 33)	12,04%	12,29%	*PT Multi Harapan Utama (Note 33)*

29. PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pendapatan dari PT Multi Harapan Utama merupakan pendapatan yang berasal dari segmen kontraktor tambang dan tambang batubara serta logistik dan sewa kapal masing-masing sebesar AS$179.646.768 dan AS$106.615.

29. REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMERS (continued)

For the year ended December 31,2023, revenue from PT Multi Harapan Utama represents revenue from mining contractors and coal mining, and logistic and vessel rental segment amounting to US$179,646,768 and US$106,615, respectively.

30. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan yang dapat diatribusikan ke setiap lini bisnis setelah eliminasi adalah sebagai berikut:

30. COST OF REVENUE

The details of cost of revenue attributable to each business units after eliminations are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Kontraktor tambang dan tambang batubara	608.075.607	504.099.455	*Mining contractors and coal mining*
Perdagangan bahan bakar	271.873.478	214.606.950	*Fuel trading*
Jasa			*Services*
Logistik dan sewa kapal	130.253.404	128.542.340	*Logistic and vessel rental*
Divisi *Site Services* (“SSD”) dan Repabrikasi	52.475.045	46.684.468	*Site Services Division (“SSD”) and Remanufacturing*
Sewa mesin pembangkit tenaga listrik	821.379	949.795	*Power engine rental*
Pabrikasi	37.453.914	28.740.092	*Manufacturing*
Total	**1.100.952.827**	**923.623.100**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, there were no purchase made to any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total revenue from contracts with customers.

31. BEBAN PENJUALAN, UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban penjualan, umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

31. SELLING, GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of selling, general and administrative expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Biaya penjualan	41.127.008	27.778.512	*Selling expenses*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	30.209.319	32.948.202	*Salaries and employees' benefits*
Honorarium tenaga ahli	14.090.573	21.308.008	*Professional fees*
Informasi dan teknologi	8.254.904	5.138.072	*Information and technology*
Penyusutan dan amortisasi	5.437.142	4.986.805	*Depreciation and amortization*
Perjalanan dinas	1.881.731	1.315.731	*Travelling*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha - neto (Catatan 6)	1.603.408	2.893.998	*Provision for expected credit losses on trade receivables - net (Note 6)*
Penyisihan kerugian kredit ekspektasian piutang non-usaha - neto	1.066.584	687.531	*Provision for expected credit losses on non-trade receivables - net*
Sewa	805.026	595.609	*Rental*
Peralatan dan fasilitas	729.677	592.934	*Utilities and facilities*
Telekomunikasi	199.158	260.848	*Telecommunication*
Lain-lain	4.966.320	6.561.620	*Others*
Total	**110.370.850**	**105.067.870**	***Total***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

Dana Pensiun Iuran Pasti

Perusahaan dan entitas anak tertentu menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun iuran pasti Perusahaan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah iuran pasti yang dibayarkan ke DPLK masing-masing sebesar Rp169,0 miliar (setara dengan AS$11.079.961) dan Rp185,4 miliar (setara dengan AS$12.464.964).

Defined Contribution Pension Plan

The Company and certain subsidiaries have a defined contribution pension plan for all of their eligible permanent employees. The defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK").

As of December 31, 2023 and 2022, the defined benefits paid to DPLK amounted to Rp169.0 billion (equivalents to US$11,079,961) and Rp185.4 billion (equivalents to US$12,464,964), respectively.

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Dana Pensiun Manfaat Pasti

Perusahaan dan beberapa entitas anak tertentu menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti untuk sebagian karyawan tetap yang didanai melalui kontribusi bulanan kepada dana pensiun yang dikelola terpisah. Program pensiun manfaat pasti dikelola oleh Dana Pensiun PT Trakindo Utama. Sumber dana program pensiun berasal dari kontribusi Perusahaan dan beberapa entitas anak tertentu, dan karyawan yang termasuk dalam program pensiun ini. Manfaat dana pensiun tersebut telah disesuaikan dengan manfaat minimal sesuai Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)).Tambahan manfaat pasti di luar dari Undang-Undang tidak didanai. Umur normal pensiun adalah 55 tahun.

Liabilitas berdasarkan UU Cipta Kerja telah dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada usia pensiun normal dari Dana Pensiun dengan manfaat yang diperoleh sesuai dengan UU Cipta Kerja setelah dikurangi akumulasi kontribusi dari pemberi kerja dan hasil investasi terkait. Jika manfaat dana yang didanai pemberi kerja lebih kecil dari manfaat sesuai UU Cipta Kerja, Grup akan menyediakan kekurangannya.

Beberapa karyawan tetap tidak ikut serta dalam kedua program. Liabilitas imbalan kerja Grup atas karyawan tersebut dihitung berdasarkan persyaratan minimum UU Cipta Kerja.

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian ditentukan melalui perhitungan aktuaria independen KKA Halim & Rekan berdasarkan laporannya yang tanggal 26 Maret 2024 untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 28 Maret 2023 untuk tanggal 31 Desember 2022.

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Defined Benefit Pension Plan

The Company and certain subsidiaries have a defined benefit pension plan, covering certain permanent employees, which plan is funded through monthly contributions to a separately administered fund. The pension plan is managed by Dana Pensiun PT Trakindo Utama. The fund for the pension plan is contributed by the Company and certain subsidiaries and their covered employees. The benefits under such pension plan have been adjusted to cover minimum benefits under Collective Labor Agreement and Job Creation Law No. 11/2020 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The additional benefits under the Law are unfunded. The normal retirement age is 55 years.

The obligation under the Cipta Kerja Law has been calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated under the Cipta Kerja Law after deducting the accumulated employer contributions and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the Cipta Kerja Law, the Group will provide for such shortage.

Some permanent employees are not covered in both programs. The Group's liability for the benefits of these employees is calculated based on the minimum requirement of the Cipta Kerja Law.

The employee benefits liability as of December 31, 2023 and 2022 recognized in the consolidated statement of financial position were determined through actuarial valuations performed by an independent actuary KKA Halim & Rekan based on its reports dated March 26, 2024 for December 31, 2023 and March 28, 2023 for December 31, 2022.

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Dana Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Defined Benefit Pension Plan (continued)

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam menghitung liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining the liability for employee benefits as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Tingkat diskonto	6,34% - 7,09% p.a	4,96% - 7,43% p.a	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	2023 - 2025: 5,00% p.a > 2025: 8,00% p.a	2022 - 2025: 5,00% p.a > 2025: 8,00% p.a	*Annual salary increase rate*
Tingkat mortalitas	TMI 4 (2019)	TMI 4 (2019)	*Mortality rate*
Usia pensiun	55 tahun (asumsi seluruh karyawan pensiun pada usia pensiun)/ *55 years (all employees are assumed to retire at the retirement age)*		*Retirement age*
Tingkat pengunduran diri	10% untuk karyawan usia di bawah 30 tahun dan menurun hingga 1% pada usia 55 tahun/ *10% for employees before age of 30 years and will linearly decrease until 1% at the age of 55 years*		*Resignation rate*
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat mortalitas/*10% of the mortality rate*		*Disability rate*

a. Beban Imbalan Kerja Neto

a. Net Employee Benefits Expense

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The details of employee benefits expense are as follows:

		Tidak didanai/*Unfunded plan*				
	Didanai/ *Funded*	**Imbalan pasca kerja/ *Post employment benefit***	**Imbalan jangka panjang lainnya/ *Other long-term benefits***	**Kontrak/ *Contract***	**Total/ *Total***	
31 Desember 2023						***December 31, 2023***
Biaya jasa kini	122.524	4.636.230	565.443	732.476	6.056.673	*Current service cost*
Biaya jasa masa lalu	160.977	(1.328.736)	(34.966)	(18.785)	(1.221.510)	*Past service cost*
Biaya bunga - neto	86.833	1.019.330	196.320	-	1.302.483	*Interest cost - net*
Rugi aktuarial tahun berjalan - neto	-	-	288.409	-	288.409	*Net actuarial loss recognized in the year - net*
Beban imbalan kerja neto	**370.334**	**4.326.824**	**1.015.206**	**713.691**	**6.426.055**	***Net employee benefits expense***

		Tidak didanai/*Unfunded plan*				
	Didanai/ *Funded*	**Imbalan pasca kerja/ *Post employment benefit***	**Imbalan jangka panjang lainnya/ *Other long-term benefits***	**Kontrak/ *Contract***	**Total/ *Total***	
31 Desember 2022						***December 31, 2022***
Biaya jasa kini	128.116	3.072.811	580.055	591.941	4.372.923	*Current service cost*
Biaya bunga - neto	121.213	923.554	165.554	1	1.210.322	*Interest cost - net*
Laba aktuarial tahun berjalan - neto	-	-	(183.586)	-	(183.586)	*Net actuarial gains recognized in the year - net*
Beban imbalan kerja neto	**249.329**	**3.996.365**	**562.023**	**591.942**	**5.399.659**	***Net employee benefits expense***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

b. Liability for Employee Benefits

Rincian liabilitas imbalan kerja neto adalah sebagai berikut:

The details of the net liability for employee benefits:

	31 Desember 2023/*December 31, 2023*			
	Didanai/ *Funded Plan*	**Tidak Didanai/ *Unfunded Plan***	**Total/ *Total***	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	5.830.635	23.670.695	29.501.330	*Present value of defined benefit obligation*
Nilai wajar aset program	(3.918.476)	(998.922)	(4.917.398)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	**1.912.159**	**22.671.773**	**24.583.932**	***Long-term employee benefits liability***

	31 Desember 2022/*December 31, 2022*			
	Didanai/ *Funded Plan*	**Tidak Didanai/ *Unfunded Plan***	**Total/ *Total***	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	4.814.287	18.798.222	23.612.509	*Present value of defined benefit obligation*
Nilai wajar aset program	(3.430.469)	(876.477)	(4.306.946)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	**1.383.818**	**17.921.745**	**19.305.563**	***Long-term employee benefits liability***

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements in present value of defined benefit obligation are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*			
	Didanai/ *Funded Plan*	**Tidak Didanai/ *Unfunded Plan***	**Total/ *Total***	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti 1 Januari	4.814.287	18.798.222	23.612.509	*Present value of defined benefit obligation on January 1*
Biaya jasa kini	122.524	5.934.149	6.056.673	*Current service cost*
Biaya bunga	341.446	1.282.643	1.624.089	*Interest cost*
Kontribusi peserta	35.680	-	35.680	*Contribution by plan participants*
Transfer keluar	-	(15.234)	(15.234)	*Transfer out*
Rugi aktuarial dari penyesuaian pengalaman	244.265	830.965	1.075.230	*Actuarial loss from changes from experience adjustment*
Rugi aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	256.228	969.814	1.226.042	*Actuarial loss from changes in financial assumption*
Pembayaran manfaat berdasarkan dana pensiun	(233.455)	(1.891.817)	(2.125.272)	*Benefits paid - pension fund*
Pengurangan liabilitas kerja karyawan - dekonsolidasi Grup MDB	-	(1.179.167)	(1.179.167)	*Deduction of employee benefits liability - deconsolidation of MDB Group*
Biaya jasa masa lalu	160.977	(1.382.487)	(1.221.510)	*Past service cost*
Selisih translasi	88.683	323.607	412.290	*Translation difference*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	**5.830.635**	**23.670.695**	**29.501.330**	***Present value of defined benefit obligation***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

b. Liability for Employee Benefits (continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in present value of defined benefit obligation are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ *Year Ended December 31, 2022*			
	Didanai/ *Funded Plan*	**Tidak Didanai/ *Unfunded Plan***	**Total/ *Total***	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti 1 Januari	5.103.209	19.077.043	24.180.252	*Present value of defined benefit obligation on January 1*
Biaya jasa kini	128.116	4.244.807	4.372.923	*Current service cost*
Biaya bunga	365.858	1.129.198	1.495.056	*Interest cost*
Kontribusi peserta	42.493	-	42.493	*Contribution by plan participants*
Transfer keluar	-	(3.107)	(3.107)	*Transfer out*
Laba aktuarial dari penyesuaian pengalaman	(93.944)	(233.346)	(327.290)	*Actuarial gain from changes from experience adjustment*
Laba aktuarial dari perubahan asumsi keuangan	(74.973)	(779.429)	(854.402)	*Actuarial gain from changes in financial assumption*
Penyesuaian akibat perubahan metode atribusi	-	(1.145.879)	(1.145.879)	*Adjustment due to change in benefit attribution period*
Pembayaran manfaat berdasarkan dana pensiun	(163.818)	(1.569.965)	(1.733.783)	*Benefits paid - pension fund*
Selisih translasi	(492.654)	(1.921.100)	(2.413.754)	*Translation difference*
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	**4.814.287**	**18.798.222**	**23.612.509**	***Present value of defined benefit obligation***

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movements in fair value of plan assets are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Nilai wajar aset program 1 Januari	4.306.946	4.167.593	*Fair value of plan assets on January 1*
Kontribusi perusahaan	841.270	813.988	*Contribution by the employer*
Kontribusi pekerja	35.680	42.493	*Contribution by the participant*
Pendapatan bunga aset program	321.606	284.734	*Interest income on plan assets*
Pengembalian aktual aset program	51.118	(44.834)	*Actual return on plan assets*
Pembayaran manfaat	(721.715)	(517.475)	*Benefits payment*
Selisih translasi	82.493	(439.553)	*Translation difference*
Nilai wajar aset program 31 Desember	**4.917.398**	**4.306.946**	***Fair value of plan assets on December 31***

Nilai wajar aset program pada akhir periode dianalisa sebagai berikut:

The fair value of plan assets at the end of the reporting period is analysed as follows:

	Persentase/ *Percentage*	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Instrumen utang	58,50%	2.876.677	2.519.563	*Debt instruments*
Instrumen ekuitas	23,50%	1.155.589	1.012.133	*Equity instruments*
Deposito berjangka	18,00%	885.132	775.250	*Time deposits*
Total		**4.917.398**	**4.306.946**	***Total***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

b. Liability for Employee Benefits (continued)

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Movements in the employee benefits liability for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/
*Year Ended December 31, 2023***

	Didanai/ *Funded Plan*	**Tidak Didanai/ *Unfunded Plan***	**Total/*Total***	
Saldo awal	1.383.818	17.921.745	19.305.563	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja	370.334	6.055.721	6.426.055	*Employee benefits expense*
Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	413.513	1.551.649	1.965.162	*Employee benefits expense recognized in the other comprehensive income*
Transfer keluar	-	(15.234)	(15.234)	*Transfer out*
Pembayaran kontribusi	(278.504)	(562.766)	(841.270)	*Contribution paid*
Pembayaran manfaat	-	(1.403.557)	(1.403.557)	*Benefits paid*
Pengurangan liabilitas kerja karyawan - dekonsolidasi Grup MDB	-	(1.179.167)	(1.179.167)	*Deduction of employee benefits liability - deconsolidation of MDB Group*
Selisih translasi	22.998	303.382	326.380	*Translation difference*
Saldo akhir	**1.912.159**	**22.671.773**	**24.583.932**	***Ending balance***

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/
*Year Ended December 31, 2022***

	Didanai/ *Funded Plan*	**Tidak Didanai/ *Unfunded Plan***	**Total/*Total***	
Saldo awal	1.687.216	18.325.443	20.012.659	*Beginning balance*
Beban imbalan kerja	249.329	5.150.330	5.399.659	*Employee benefits expense*
Beban imbalan kerja yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(143.912)	(805.945)	(949.857)	*Employee benefits expense recognized in the other comprehensive income*
Transfer keluar	-	(3.107)	(3.107)	*Transfer out*
Pembayaran kontribusi	(266.545)	(547.443)	(813.988)	*Contribution paid*
Pembayaran manfaat	-	(1.216.308)	(1.216.308)	*Benefits paid*
Penyesuaian akibat perubahan metode atribusi diakui dalam laba rugi	-	(1.120.711)	(1.120.711)	*Adjustment due to change in benefit attribution period recognized in Profit or Loss*
Penyesuaian akibat perubahan metode atribusi diakui dalam penghasilan komprehensif lain	-	(25.168)	(25.168)	*Adjustment due to change in benefit attribution period recognized in Other Comprehensive Income*
Selisih translasi	(142.270)	(1.835.346)	(1.977.616)	*Translation difference*
Saldo akhir	**1.383.818**	**17.921.745**	**19.305.563**	***Ending balance***

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Liability for Employee Benefits (continued)

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2023 is as follows:

	Tingkat Diskonto (Tidak Didanai)/ *Discount Rate (Unfunded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	(1.933.111)	2.261.261	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	(365.328)	412.582	*Impact on the current service cost and interest cost*

	Tingkat Diskonto (Didanai)/ *Discount Rate (Funded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	(615.004)	742.492	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	(17.856)	21.669	*Impact on the current service cost and interest cost*

	Kenaikan Gaji (Tidak Didanai)/ *Salary Increase (Unfunded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	2.345.163	(2.029.784)	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	420.081	(376.178)	*Impact on the current service cost and interest cost*

	Kenaikan Gaji (Didanai)/ *Salary Increase (Funded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	205.162	(193.623)	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	9.829	(9.255)	*Impact on the current service cost and interest cost*

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 is as follows:

	Tingkat Diskonto (Tidak Didanai)/ *Discount Rate (Unfunded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	(1.599.676)	1.885.090	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	(280.410)	326.320	*Impact on the current service cost and interest cost*

32. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

32. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

b. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)

b. Liability for Employee Benefits (continued)

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2022 is as follows: (continued)

	Tingkat Diskonto (Didanai)/ *Discount Rate (Funded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	(523.101)	633.030	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	(59.756)	45.105	*Impact on the current service cost and interest cost*

	Kenaikan Gaji (Tidak Didanai)/ *Salary Increase (Unfunded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	1.968.335	(1.681.871)	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	554.912	(475.033)	*Impact on the current service cost and interest cost*

	Kenaikan Gaji (Didanai)/ *Salary Increase (Funded)*		
	1% Kenaikan/ *Increase*	**1% Penurunan/ *Decrease***	
Pengaruh pada kewajiban imbalan pasti	189.699	(177.895)	*Impact on the defined benefit obligation*
Pengaruh pada biaya jasa kini dan biaya bunga	21.582	(27.942)	*Impact on the current service cost and interest cost*

Jatuh tempo kewajiban imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The maturity profile of defined benefit obligation as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Dalam jangka waktu 12 bulan	2.788.823	1.742.023	*Within the next 12 months*
Antara 1 dan 2 tahun	1.417.492	2.403.117	*Between 1 and 2 years*
Antara 2 dan 5 tahun	11.035.167	8.925.664	*Between 2 and 5 years*
Lebih dari 5 tahun	162.472.708	142.442.311	*Beyond 5 years*
Total	**177.714.190**	**155.513.115**	***Total***

Durasi rata-rata (dalam tahun) dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 9,08 tahun.

The average duration (in years) of the benefit obligation as of December 31, 2023 is 9.08 years.

Durasi rata-rata (dalam tahun) dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 10,10 tahun.

The average duration (in years) of the benefit obligation as of December 31, 2022 is 10.10 years.

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap sebagai pihak berelasi dari Grup berkaitan dengan kesamaan pemilik. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Rincian transaksi dan saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Saldo Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group has transactions with entities which are considered related parties. The entities are considered related parties of the Group in view of their common ownership. Sales or purchase price among related parties is determined based on prices agreed by both parties.

The details of transactions and balances with related parties are as follows:

a. Significant Balances with Related Parties

	Total/*Total*		Persentase terhadap total aset konsolidasian/ *Percentage to total consolidated assets*		
	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Piutang Usaha (Catatan 6)					*Trade Receivables (Note 6)*
PT Mifa Bersaudara	53.846.941	-	2,50%	-	*PT Mifa Bersaudara*
PT Multi Harapan Utama	43.168.939	42.398.028	2,00%	2,14%	*PT Multi Harapan Utama*
PT Borneo Indobara	29.542.875	14.482.999	1,37%	0,73%	*PT Borneo Indobara*
PT Trakindo Utama	11.841.927	11.929.194	0,55%	0,60%	*PT Trakindo Utama*
PT Bungo Bara Utama	10.215.569	4.965.332	0,47%	0,25%	*PT Bungo Bara Utama*
PT Kuansing Inti Makmur	4.586.171	1.293.840	0,21%	0,07%	*PT Kuansing Inti Makmur*
PT Bungo Bara Makmur	4.531.586	7.511.921	0,21%	0,38%	*PT Bungo Bara Makmur*
PT Chakra Jawara	2.513.425	1.246.137	0,12%	0,06%	*PT Chakra Jawara*
PT Sumberdaya Sewatama	397.748	160.184	0,02%	0,01%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Chitra Paratama	192.570	192.657	0,01%	0,01%	*PT Chitra Paratama*
PT Bara Energi Lestari	144.607	-	0,01%	-	*PT Bara Energi Lestari*
PT Tri Swardana Utama	93.341	60.603	0,00%	0,00%	*PT Tri Swardana Utama*
PT SSB Sammitr Distribution	70.724	-	0,00%	-	*PT SSB Sammitr Distribution*
PT Roda Nusantara GTJ	22.064	-	0,00%	-	*PT Roda Nusantara GTJ*
Glorioso Trading, LDA	16.017	-	0,00%	-	*Glorioso Trading, LDA*
PT Mitra Solusi Telematika	15.812	20.563	0,00%	0,00%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	3.665	699	0,00%	0,00%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT Nagata Bisma Shakti	466	-	0,00%	-	*PT Nagata Bisma Shakti*
PT Energi Alamraya Semesta	-	802.394	-	0,04%	*PT Energi Alamraya Semesta*
Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapura	-	248.883	-	0,01%	*Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapore*
Halcon Primo Logistic Pte. Ltd., Singapura	-	4.835	-	0,00%	*Halcon Primo Logistic Pte. Ltd., Singapore*
Total	**161.204.447**	**85.318.269**	**7,47%**	**4,30%**	***Total***
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(1.217.570)	(876.085)	(0,06%)	(0,04%)	*Allowance for expected credit losses*
Neto	**159.986.877**	**84.442.184**	**7,41%**	**4,26%**	***Net***
Piutang Non-usaha					*Non-trade Receivables*
PT Media Djaya Bersama	16.101.906	-	0,75%	-	*PT Media Djaya Bersama*
PT Mifa Bersaudara	5.222.967	-	0,24%	-	*PT Mifa Bersaudara*
PT Multi Harapan Utama	5.000.000	4.036.870	0,23%	0,20%	*PT Multi Harapan Utama*
PT Borneo Indobara	2.830.949	4.784.909	0,13%	0,24%	*PT Borneo Indobara*
PT Trakindo Utama	2.693.465	2.423.384	0,12%	0,12%	*PT Trakindo Utama*
PT Sumberdaya Sewatama	19.774	117.518	0,00%	0,01%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Agro City Kaltim	17.497	1.207.148	0,00%	0,06%	*PT Agro City Kaltim*
PT Bara Energi Lestari	12.760	-	0,00%	-	*PT Bara Energi Lestari*
PT Chitra Paratama	2.780	1.518	0,00%	0,00%	*PT Chitra Paratama*
PT Mahadana Dasha Utama	646	-	0,00%	-	*PT Mahadana Dasha Utama*
PT Wargi Santosa	5	-	0,00%	-	*PT Wargi Santosa*
PT Kuansing Inti Makmur	-	558	-	0,00%	*PT Kuansing Inti Makmur*
Total	**31.902.749**	**12.571.905**	**1,47%**	**0,63%**	***Total***
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(1.373.667)	(1.691.947)	(0,06%)	(0,09%)	*Allowance for expected credit losses*
Neto	**30.529.082**	**10.879.958**	**1,41%**	**0,54%**	***Net***

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Saldo Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

a. Significant Balances with Related Parties (continued)

	Total/*Total*		Persentase terhadap total aset konsolidasian/ *Percentage to total consolidated assets*		
	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Uang Muka, Biaya Dibayar di Muka dan Aset Lancar Lainnya (Catatan 8)					*Advances, Prepaid Expenses, and Other Current Assets (Note 8)*
PT Chakra Jawara	727.099	328.967	0,03%	0,02%	*PT Chakra Jawara*
PT Mitra Solusi Telematika	264.290	68.283	0,01%	0,00%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Wargi Santosa	63.716	217.503	0,00%	0,01%	*PT Wargi Santosa*
PT Sumberdaya Sewatama	51.479	-	0,00%	-	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Tiara Marga Trakindo	36.805	-	0,00%	-	*PT Tiara Marga Trakindo*
Total	**1.143.389**	**614.753**	**0,04%**	**0,03%**	***Total***
Uang Jaminan (Catatan 16)					*Security Deposit (Note 16)*
PT Trakindo Utama	3.484.695	2.612.066	0,16%	0,13%	*PT Trakindo Utama*
PT Wargi Santosa	536.748	155.998	0,02%	0,01%	*PT Wargi Santosa*
PT Tiara Marga Trakindo	159.177	193.195	0,01%	0,01%	*PT Tiara Marga Trakindo*
Total	**4.180.620**	**2.961.259**	**0,19%**	**0,15%**	***Total***

	Total/*Total*		Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian/ *Percentage to total consolidated liabilities*		
	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Utang Usaha (Catatan 17)					*Trade Payables (Note 17)*
PT Trakindo Utama	144.810.728	124.461.445	10,36%	9,12%	*PT Trakindo Utama*
PT Chitra Paratama	5.689.461	4.366.596	0,41%	0,32%	*PT Chitra Paratama*
PT Chakra Jawara	3.622.771	1.662.836	0,26%	0,12%	*PT Chakra Jawara*
PT Karya Kharisma Mandiri	2.848.813	491.165	0,20%	0,04%	*PT Karya Kharisma Mandiri*
PT Wargi Santosa	2.243.868	1.459.939	0,16%	0,11%	*PT Wargi Santosa*
PT Mitra Solusi Telematika	914.730	577.464	0,07%	0,04%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Sumberdaya Sewatama	612.134	860.193	0,04%	0,06%	*PT Sumberdaya Sewatama*
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapura	384.072	632.567	0,03%	0,05%	*Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapore*
PT Tiara Marga Trakindo	253.494	44.464	0,02%	0,00%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Nagata Bima Shakti	222.587	-	0,02%	-	*PT Nagata Bima Shakti*
PT Tri Swardana Utama	21.631	33.467	0,00%	0,00%	*PT Tri Swardana Utama*
PT Triyasa Propertindo	13.559	6.029	0,00%	0,00%	*PT Triyasa Propertindo*
Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapura	720	-	0,00%	-	*Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapore*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	-	233	-	0,00%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
Total	**161.638.568**	**134.596.398**	**11,57%**	**9,86%**	***Total***
Utang Non-usaha					*Non-trade Payables*
PT Mifa Bersaudara	708.868	-	0,05%	-	*PT Mifa Bersaudara*
PT Tiara Marga Trakindo	156.882	40.069	0,01%	0,00%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Mitra Solusi Telematika	54.502	576.012	0,00%	0,04%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Kuansing Inti Makmur	13.682	-	0,00%	-	*PT Kuansing Inti Makmur*
PT Bungo Bara Utama	11.475	-	0,00%	-	*PT Bungo Bara Utama*
PT Chakra Jawara	6.233	6.114	0,00%	0,00%	*PT Chakra Jawara*
PT Bungo Bara Makmur	930	-	0,00%	-	*PT Bungo Bara Makmur*
PT Triyasa Propertindo	631	4.473	0,00%	0,00%	*PT Triyasa Propertindo*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	34	39	0,00%	0,00%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT Sumberdaya Sewatama	-	1.814.244	-	0,13%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Trakindo Utama	-	50.975	-	0,00%	*PT Trakindo Utama*
Total	**953.237**	**2.491.926**	**0,06%**	**0,17%**	***Total***

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Saldo Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

a. Significant Balances with Related Parties (continued)

	Total/*Total*		Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian/ *Percentage to total consolidated liabilities*		
	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	**31 Desember 2023/ *December 31, 2023***	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Uang Muka Pelanggan (Catatan 20)					*Advances from Customers (Note 20)*
PT SSB Sammitr Distribution	1.008.966	25.119	0,07%	0,00%	*PT SSB Sammitr Distribution*
PT Chakra Jawara	153.061	178.980	0,01%	0,01%	*PT Chakra Jawara*
PT Roda Nusantara GTJ	8.704	-	0,00%	-	*PT Roda Nusantara GTJ*
PT Trakindo Utama	70	70	0,00%	0,00%	*PT Trakindo Utama*
Total	**1.170.801**	**204.169**	**0,08%**	**0,01%**	***Total***
Liabilitas Sewa (Catatan 22)					*Lease Liabilities (Note 22)*
PT Trakindo Utama	50.198.402	51.167.382	3,59%	3,75%	*PT Trakindo Utama*
PT Wargi Santosa	8.533.672	8.505.009	0,61%	0,62%	*PT Wargi Santosa*
PT Tiara Marga Trakindo	2.949.797	4.253.670	0,21%	0,31%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	557.688	741.319	0,04%	0,05%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT Mitra Solusi Telematika	229.798	311.956	0,02%	0,02%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Sumberdaya Sewatama	44.953	20.348	0,00%	0,00%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Chakra Jawara	-	44.373	-	0,00%	*PT Chakra Jawara*
Total	**62.514.310**	**65.044.057**	**4,47%**	**4,75%**	***Total***
Beban Akrual (Catatan 19)					*Accrued Expenses (Note 19)*
PT Sumberdaya Sewatama	55.995	-	0,00%	-	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Mitra Solusi Telematika	11.675	82.281	0,00%	0,01%	*PT Mitra Solusi Telematika*
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapura	-	4.477	-	0,00%	*Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapore*
PT Chitra Paratama	-	390	-	0,00%	*PT Chitra Paratama*
PT Trakindo Utama	-	79	-	0,00%	*PT Trakindo Utama*
Total	**67.670**	**87.227**	**0,00%**	**0,01%**	***Total***

b. Transaksi Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi

b. Significant Transactions with Related Parties

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		Persentase terhadap total pendapatan dari kontrak dengan pelanggan / *Percentage to total revenue from contracts with customers*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Catatan 29)					*Revenue from Contracts with Customers (Note 29)*
PT Multi Harapan Utama	179.753.383	177.626.565	12,04%	12,29%	*PT Multi Harapan Utama*
PT Borneo Indobara	104.114.718	20.121.927*)	6,97%	1,39%	*PT Borneo Indobara*
PT Trakindo Utama	94.187.792	86.543.669	6,31%	5,99%	*PT Trakindo Utama*
PT Bungo Bara Makmur	41.174.908	10.619.844*)	2,76%	0,73%	*PT Bungo Bara Makmur*
PT Kuansing Inti Makmur	35.097.929	2.117.512*)	2,35%	0,15%	*PT Kuansing Inti Makmur*
PT Bungo Bara Utama	17.856.162	7.896.203*)	1,20%	0,55%	*PT Bungo Bara Utama*
PT Chakra Jawara	7.922.647	3.381.277	0,53%	0,23%	*PT Chakra Jawara*
PT Sumberdaya Sewatama	1.770.027	512.060	0,12%	0,04%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Chitra Paratama	971.115	719.286	0,07%	0,05%	*PT Chitra Paratama*
Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapura	683.783	1.941.912	0,05%	0,13%	*Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapore*
PT Tri Swardana Utama	452.723	378.203	0,03%	0,03%	*PT Tri Swardana Utama*
PT Mitra Solusi Telematika	175.276	143.517	0,01%	0,01%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Roda Nusantara GTJ	55.902	-	0,00%	-	*PT Roda Nusantara GTJ*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	29.277	32.064	0,00%	0,00%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
Glorioso Trading, LDA	16.136	-	0,00%	-	*Glorioso Trading, LDA*
PT Nagata Bisma Shakti	12.261	-	0,00%	-	*PT Nagata Bisma Shakti*
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapura	1.528	39.628	0,00%	0,00%	*Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapore*
PT SSB Sammitr Distribution	-	33.489	-	0,00%	*PT SSB Sammitr Distribution*
Total	**484.275.567**	**312.107.156**	**32,44%**	**21,59%**	***Total***

*) untuk periode 15 September 2022 - 31 Desember 2022/
for the period September 15, 2022 - December 31, 2022

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

b. Significant Transactions with Related Parties (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31*,		Persentase terhadap beban terkait/ *Percentage to total respective expenses*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Sewa Ruang Kantor, Tempat Parkir dan Kendaraan					*Rented Office Space, Parking Spaces and Vehicles*
PT Wargi Santosa	152.905	232.981	0,14%	0,22%	*PT Wargi Santosa*
PT Tiara Marga Trakindo	24.595	660.187	0,02%	0,63%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Trakindo Utama	7.728	11.572	0,01%	0,01%	*PT Trakindo Utama*
Total	**185.228**	**904.740**	**0,17%**	**0,86%**	***Total***
Sewa alat berat					*Rented Heavy Equipment*
PT Trakindo Utama	21.251.821	18.615.234	1,93%	2,02%	*PT Trakindo Utama*
PT Wargi Santosa	8.233.486	9.825.441	0,76%	1,06%	*PT Wargi Santosa*
PT Karya Kharisma Mandiri	3.620.427	2.700.597	0,33%	0,29%	*PT Karya Kharisma Mandiri*
PT Sumberdaya Sewatama	1.063.274	1.145.814	0,10%	0,12%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Chitra Paratama	310.255	235.443	0,03%	0,03%	*PT Chitra Paratama*
PT Tiara Marga Trakindo	177.105	13.333	0,02%	0,00%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Chakra Jawara	-	2.172	-	0,00%	*PT Chakra Jawara*
Total	**34.656.368**	**32.538.034**	**3,17%**	**3,52%**	***Total***
Pembelian Aset Tetap					*Purchase of Fixed Assets*
PT Trakindo Utama	233.311.805	256.557.361	10,79%	12,94%	*PT Trakindo Utama*
PT Chakra Jawara	22.545.018	7.235.454	1,04%	0,36%	*PT Chakra Jawara*
PT Karya Kharisma Mandiri	2.557.085	32.305.969	0,12%	1,63%	*PT Karya Kharisma Mandiri*
PT Sumberdaya Sewatama	1.169.390	2.034.024	0,05%	0,10%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	735.339	-	0,03%	-	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT Triyasa Propertindo	64.053	-	0,00%	-	*PT Triyasa Propertindo*
PT Chitra Paratama	30.581	3.108.541	0,00%	0,16%	*PT Chitra Paratama*
PT Wargi Santosa	22.867	-	0,00%	-	*PT Wargi Santosa*
PT Tri Swardana Utama	-	80.097	-	0,00%	*PT Tri Swardana Utama*
PT Mitra Solusi Telematika	-	5.221	-	0,00%	*PT Mitra Solusi Telematika*
Total	**260.436.138**	**301.326.667**	**12,05%**	**15,19%**	***Total***
Pembelian Aset Takberwujud					*Purchase of Intangible Assets*
PT Mitra Solusi Telematika	-	1.059.805	-	0,05%	*PT Mitra Solusi Telematika*
Penambahan Aset Hak-guna					*Addition of Right of Use Assets*
PT Trakindo Utama	17.382.256	28.283.128	0,80%	1,43%	*PT Trakindo Utama*
PT Wargi Santosa	7.617.574	7.893.927	0,35%	0,40%	*PT Wargi Santosa*
PT Tiara Marga Trakindo	1.992.019	4.514.487	0,09%	0,23%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Sumberdaya Sewatama	401.475	63.421	0,02%	0,00%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Mitra Solusi Telematika	108.634	333.006	0,01%	0,02%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Chitra Paratama	-	72.686	-	0,00%	*PT Chitra Paratama*
PT Chakra Jawara	-	62.563	-	0,00%	*PT Chakra Jawara*
Total	**27.501.958**	**41.223.218**	**1,26%**	**2,08%**	***Total***

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi Signifikan dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

b. Significant Transactions with Related Parties (continued)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		Persentase terhadap beban terkait/ *Percentage to total respective expenses*		
	2023	**2022**	**2023**	**2022**	
Pembelian Jasa Teknologi dan Informasi					*Purchase of Information and Technology Services*
PT Mitra Solusi Telematika	1.905.194	2.434.125	1,73%	2,32%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	8.388	3.705	0,01%	0,00%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
Total	**1.913.582**	**2.437.830**	**1,74%**	**2,32%**	***Total***
Pembelian Suku Cadang dan Lain-lain					*Purchase of Spare Parts and Others*
PT Trakindo Utama	65.589.273	46.933.220	5,96%	5,08%	*PT Trakindo Utama*
PT Chitra Paratama	23.212.970	16.130.233	2,11%	1,75%	*PT Chitra Paratama*
PT Chakra Jawara	6.001.864	4.479.837	0,55%	0,49%	*PT Chakra Jawara*
PT Sumberdaya Sewatama	1.181.046	2.050.329	0,11%	0,22%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Mitra Solusi Telematika	513.338	388.144	0,05%	0,04%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Tri Swardana Utama	114.600	202.580	0,01%	0,02%	*PT Tri Swardana Utama*
PT Wargi Santosa	1.392	12.104	0,00%	0,00%	*PT Wargi Santosa*
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapura	-	488.777	-	0,05%	*Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapore*
PT Tiara Marga Trakindo	-	32.070	-	0,00%	*PT Tiara Marga Trakindo*
Total	**96.614.483**	**70.717.294**	**8,79%**	**7,65%**	***Total***
Biaya Keuangan					*Finance Charges*
PT Trakindo Utama	5.266.961	4.731.274	4,96%	9,02%	*PT Trakindo Utama*
PT Wargi Santosa	1.022.412	980.709	0,96%	1,87%	*PT Wargi Santosa*
PT Tiara Marga Trakindo	454.179	31.893	0,43%	0,06%	*PT Tiara Marga Trakindo*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	95.760	10.401	0,09%	0,02%	*PT Chandra Sakti Utama Leasing*
PT Sumberdaya Sewatama	21.750	1.743	0,02%	0,00%	*PT Sumberdaya Sewatama*
PT Mitra Solusi Telematika	19.045	14.014	0,02%	0,03%	*PT Mitra Solusi Telematika*
PT Chakra Jawara	1.192	2.221	0,00%	0,00%	*PT Chakra Jawara*
PT Chitra Paratama	-	4.377	-	0,01%	*PT Chitra Paratama*
Total	**6.881.299**	**5.776.632**	**6.48%**	**11,01%**	***Total***
Pendapatan Jasa Konsultasi					*Consultation Fee Income*
PT Multi Harapan Utama	-	3.792.617	-	24,82%	*PT Multi Harapan Utama*
Pendapatan Pemeliharaan Jalan *Hauling* Batubara					*Coal Hauling Road Maintenance Income*
PT Borneo Indobara	5.845.903	3.267.780*)	18,69%	21,38%	*PT Borneo Indobara*
Pendapatan Fasilitas Pelabuhan					*Port Facility Income*
PT Borneo Indobara	8.926.595	1.793.453*)	15,38%	11,74%	*PT Borneo Indobara*

*) untuk periode 15 September 2022 - 31 Desember 2022/
for the period September 15, 2022 - December 31, 2022

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

c. Transaksi dengan Manajemen Kunci

c. Transaction with Key Management Personnel

Kompensasi Manajemen Kunci

Key Management Compensation

Di dalam melakukan aktivitas operasionalnya, Grup memiliki beberapa personil kunci yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi Grup. Jumlah kompensasi manajemen kunci untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

In the operational activities, the Group has several key personnel consisting of the Group's Boards of Commissioners and Directors. The compensation to key management for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek			*Salaries and other short-term employee benefits*
Dewan Komisaris	1.291.373	1.211.853	*Board of Commissioners*
Direksi	8.706.876	4.613.505	*Board of Directors*
Total	**9.998.249**	**5.825.358**	***Total***

d. Kontrak Jasa Pertambangan dengan MHU

d. Mining Services Contract with MHU

Pada tanggal 27 Juni 2019, CK menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan nomor 01/CK-MHU/KONT-TAMB/VI/2019 dengan MHU, pihak berelasi, untuk pekerjaan mengembangkan dan melaksanakan jasa pertambangan di wilayah Kalimantan Timur dengan luas area 39.972 Ha. Kontrak tersebut berlaku lima tahun hingga tanggal 1 April 2024 dengan target pekerjaan sebesar 180 juta *Bank Cubic Meter* ("BCM").

On June 27, 2019, CK entered the Mining Services Contract no. 01/CK-MHU/KONT-TAMB/VI/2019 with MHU, a related party, for developing and implementing mining services in East Kalimantan area with an area of 39,972 Ha. The contract is valid for five years until April 1, 2024 with the target production of 180 million Bank Cubic Meter ("BCM").

Sehubungan dengan investasi ANN pada MHU (Catatan 10), pada tanggal 31 Oktober 2019, CK dan MHU menandatangani Amendemen I atas Kontrak Jasa Pertambangan, dimana jangka waktu kontrak diubah menjadi jangka waktu umur tambang (yang akan direviu setiap 3 tahun atau waktu lain yang disepakati oleh kedua belah pihak) dan meningkatkan target pekerjaan menjadi sebesar 204,4 juta BCM.

In relation with ANN's investment to MHU (Note 10), on October 31, 2019, CK and MHU signed the Amendment I of the Mining Services Contract, whereas the contract term was changed to become life of mine (which will be reviewed each 3 years or other period which agreed by both parties) and increased the target of production to become 204.4 million BCM.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, total pendapatan jasa pertambangan yang diakui CK masing-masing sebesar AS$179.646.768 dan AS$117.804.335, yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, total mining services income recognized by CK amounted to US$179,646,768 and US$117,804,335 respectively, recorded as part of "Revenue from Contracts with Customers" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

d. Kontrak Jasa Pertambangan dengan MHU (lanjutan)

Sehubungan dengan investasi ANN pada MHU (Catatan 10), pada tanggal 31 Oktober 2019, ANN menandatangani Kontrak Jasa Konsultasi dengan MHU, dimana ANN menyediakan jasa konsultasi berkaitan dengan jasa pertambangan yang dilakukan oleh CK sebagai kontraktor MHU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Jasa Pertambangan CK dengan MHU berikut dengan amendemennya. MHU akan dikenakan biaya konsultasi berdasarkan pencapaian target pekerjaan yang dilakukan oleh CK sebesar AS$26,7 juta yang akan dikenakan secara bertahap oleh ANN sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Kontrak telah mengalami perubahan pada tanggal 27 Oktober 2020 untuk mengubah jangka waktu perjanjian sampai dengan 31 Desember 2025.

Berdasarkan Amendemen Kedua Kesepakatan *Consultation Fee* tanggal 18 Oktober 2021 perhitungan pembayaran jasa konsultasi Tahap III dan Tahap VII diubah sebelumnya sebesar Rp56,4 miliar dan Rp75,4 miliar menjadi sebesar Rp102,3 miliar dan Rp29,5 miliar.

Berdasarkan Amendemen Ketiga Kesepakatan *Consultation Fee* tanggal 3 Februari 2022 kontrak Jasa Konsultasi berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, total pendapatan jasa konsultasi yang diakui ANN sebesar AS$3.792.617, yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

e. Akad Ijarah dengan PT Karya Kharisma Mandiri ("KKM")

Pada tanggal 10 Desember 2019, CK menandatangani perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah No. 01/IJARAH/KKM-CK/XII/2019 dengan KKM, pihak berelasi, dimana KKM akan menyewakan alat berat kepada CK untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak serah terima aset, yaitu pada bulan Januari 2020.

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Mining Services Contract with MHU (continued)

In relation with ANN's investment to MHU (Note 10), on October 31, 2019, ANN has signed Consultation Fee Agreement with MHU, whereby ANN will provide consultation services related to mining services performed by CK as MHU's contractor In accordance with the clause stipulated in the CK Mining Services Contract with MHU together with the amendments. MHU will be charged with consultation fee based on the achievement of CK's target of production totaling to US$26.7 million which will be charged by ANN gradually until December 31, 2022.

The contract has been amended on October 27, 2020 to amend contract period up to December 31, 2025.

Based on the Second Amendment to the Consultation Fee Agreement dated October 18, 2021, the calculation of payment for consulting services Phase III and Phase VII amend from amounting to Rp56.4 billion and Rp75.4 billion, respectively, become to Rp102.3 billion and Rp29.5 billion, respectively.

Based on the Third Amendment to the Consultation Fee Agreement dated February 3, 2022, the Consultation contract terminated in December 31, 2022.

For the year ended December 31, 2022 , total consultation fee income recognized by ANN amounted to US$3,792,617, respectively, recorded as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

e. Ijarah Agreement with PT Karya Kharisma Mandiri ("KKM")

On December 10, 2019, CK signed Akad Pembiayaan Ijarah No. 01/IJARAH/KKM-CK/XII/2019 agreement with KKM, a related party, where KKM will rent heavy equipments to CK for a period of 2 (two) years since the handover of assets, which was in January 2020.

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Akad Ijarah dengan PT Karya Kharisma Mandiri ("KKM") (lanjutan)

Perjanjian ini terkahir kali diubah dengan Perubahan Kedua atas Akad Ijarah No. 01/IJARAH/KKM-CK/XII/2019 tanggal 29 Juli 2022, dimana jangka waktu sewa atas alat berat adalah antara 24 sampai dengan 40 bulan terhitung sejak berita acara penerimaan aset.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, total beban sewa yang diakui CK adalah sebesar AS$1.098.899 dan AS$3.549.325, yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

f. Akad Ijarah dengan PT Wargi Santosa ("WS")

Pada tanggal 28 Agustus 2020, CK menandatangani perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah nomor 01/IJARAH/WS-CK/VIII/2020 dengan WS, pihak berelasi, dimana WS akan menyewakan truk kepada CK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 1 September 2020.

Pada tanggal 28 September 2020, CK menandatangani perjanjian Akad Pembiayaan Ijarah nomor 02/IJARAH/WS-CK/IX/2020 dengan WS, pihak berelasi, dimana WS akan menyewakan truk kepada CK untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak 1 Oktober 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, total beban sewa yang diakui CK adalah sebesar AS$4.452.825 dan AS$3.683.238, yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g. Perjanjian Jual dan Sewa Balik dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL")

Pada tanggal 27 Januari 2021, NBE menandatangani perjanjian "Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Fasilitas Jual dan Sewa Balik" nomor 14302100049 dengan CSUL. Berdasarkan perjanjian ini, CSUL akan memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi dengan fasilitas jual dan sewa balik sebesar Rp21.406.101.150. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 14% dan berakhir sampai dengan 28 Januari 2026.

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

e. Ijarah Agreement with PT Karya Kharisma Mandiri ("KKM") (continued)

This agreement was last amended with Second Amendment on Akad Ijarah No. 01/IJARAH/KKM-CK/XII/2019 dated July 29, 2022, where the rent term of the heavy equipment is between 24 to 40 months since the assets handover report.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the total of rent expense recorded by CK is amounting to US$1,098,899 and US$3,549,325, respectively, which is recorded as part of "Cost of Revenue" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

f. Ijarah Agreement with PT Wargi Santosa ("WS")

On August 28, 2020, CK signed Akad Pembiayaan Ijarah agreement number 01/IJARAH/WS-CK/VIII/2020 with WS, a related party, where WS will rent truck to CK for a period of 4 (four) years since September 1, 2020.

On September 28, 2020, CK signed Akad Pembiayaan Ijarah agreement number 02/IJARAH/WS-CK/IX/2020 with WS, a related party, where WS will rent heavy equipment to CK for a period of 4 (four) years since October 1, 2020.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the total of rent expense recorded by CK is amounting to US$4,452,825 and US$3,683,238, respectively, which is recorded as part of "Costs of Revenue" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

g. Sale and Leaseback Agreement with PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL")

On January 27, 2021, NBE signed an "Investment Financing Agreement with Sale and Leaseback Facility" number 14302100049 with CSUL. Based on this agreement, CSUL will provide financing facilities in the form of sale and leaseback facilities amounting to Rp21,406,101,150. This facility bears interest at 14% and will expire on January 28, 2026.

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

g. Perjanjian Jual dan Sewa Balik dengan PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL") (lanjutan)

Sebagai hasil dari transaksi jual dan sewa balik tersebut, NBE membukukan penerimaan kas sebesar Rp17.124.880.920 (setara dengan AS$1.196.540), pelepasan aset tetap sebesar Rp19.489.393.357 (setara dengan AS$1.361.751), aset hak-guna atas sewa balik sebesar Rp21.166.083.141 (setara dengan AS$1.478.904) dan liabilitas sewa sebesar Rp16.725.212.714 (setara dengan AS$1.168.614).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beban bunga atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp1.460.816.537 (setara dengan AS$95.760) dan Rp2.034.350.180 (setara dengan AS$136.800) dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h. Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Jalan Hauling Batubara dengan PT Borneo Indobara ("BIB")

Pada 26 November 2010, TIA dan PT Borneo Indobara ("BIB") menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Jalan *Hauling* batubara. BIB dapat melintasi jalan *hauling* batubara milik TIA dengan volume tertentu selama jangka waktu perjanjian dengan membayar biaya tertentu untuk pemeliharaan kepada TIA. Kontrak ini berlaku efektif tanggal 26 November 2010 sampai dengan 25 November 2020.

Perjanjian ini terakhir diperbaharui pada tanggal 26 November 2020 untuk merubah jangka waktu Perjanjian sampai dengan 25 November 2025.

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

g. Sale and Leaseback Agreement with PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL") (continued)

As a result of the sale and leaseback transaction, NBE recorded cash receipts of Rp17,124,880,920 (equivalent to US$1,196,540), disposal of fixed asset amounting to Rp19,489,393,357 (equivalent to US$1,361,751), right of use assets related leaseback amounting to Rp21,166,083,141 (equivalent to US$1,478,904) and lease liability amounting to Rp16,725,212,714 (equivalent to US$1,168,614).

For the year ended December 31, 2023 and 2022, interest expense on this loan facility amounted to Rp1,460,816,537 (equivalent to US$95,760) and Rp2,034,350,180 (equivalent to US$136,800) was recorded as part of "Finance Charges" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

h. Coal Hauling Road Maintenance Agreement with PT Borneo Indobara ("BIB")

On November 26, 2010, TIA and PT Borneo Indobara ("BIB") entered into Coal Hauling Road Maintenance Agreement. BIB may pass the hauling road which is owned by TIA for a certain volume for certain contract period and pay certain fees for maintenance to TIA. The contract is effective as of November 26, 2010 up to November 25, 2020.

This agreement was last renewed on November 26, 2020 to amend time period of Agreement to November 25, 2025.

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

i. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Pelabuhan dengan PT Borneo Indobara ("BIB")

Kontrak telah mengalami perubahan pada tanggal 28 Desember 2018 untuk mengubah volume batubara dan jumlah tongkang per hari yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Perjanjian ini terakhir diperbaharui pada tanggal 14 November 2022 untuk merubah jangka waktu Perjanjian sampai dengan 16 Februari 2036.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, total pendapatan pemeliharaan jalan *hauling* batubara yang diakui TIA sebesar Rp90.360.752.386 atau (setara dengan AS$5.845.903), yang diakui sebagai bagian dari "Pendapatan lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

j. Kontrak Jasa Pertambangan dengan PT Kuansing Inti Makmur ("KIM"), PT Karya Cemerlang Persada ("KCP"), PT Bungo Bara Utama ("BBU") dan PT Bungo Bara Makmur ("BBM") (bersama-sama disebut sebagai "Grup KIM")

CK menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan No. 001/KIM-CK/LM/II/2020 dengan KIM untuk pekerjaan mengembangkan dan melaksanakan jasa pertambangan di wilayah Jambi sejak tanggal 1 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2027.

CK menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan No. 002/KCP-CK/LM/II/2020 dengan KCP untuk pekerjaan mengembangkan dan melaksanakan jasa pertambangan di wilayah Jambi sejak tanggal 1 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2028.

CK menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan No. 003/BBU-CK/LM/II/2020 dengan BBU untuk pekerjaan mengembangkan dan melaksanakan jasa pertambangan di wilayah Jambi sejak tanggal 1 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2027.

CK menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan No. 004/BBM-CK/LM/II/2020 dengan BBM untuk pekerjaan mengembangkan dan melaksanakan jasa pertambangan di wilayah Jambi sejak tanggal 1 November 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 Oktober 2027.

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

i. Port Facility Agreement with PT Borneo Indobara ("BIB")

The contract has been amended on December 28, 2018 to amend coal volume and number of barges per day which became effective as of January 1, 2019 up to December 31, 2019.

This agreement was last renewed on November 14, 2022 to amend time period of Agreement to February 16, 2036.

For the year ended December 31, 2023, total coal hauling road maintenance income recognized by TIA amounted to Rp90,360,752,386 (equivalent to US$5,845,903), recorded as part of "Other income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

j. Mining Services Contract with PT Kuansing Inti Makmur ("KIM"), PT Karya Cemerlang Persada ("KCP"), PT Bungo Bara Utama ("BBU") and PT Bungo Bara Makmur ("BBM") (collectively refer as "KIM Group")

CK entered into Mining Service Contract No. 001/KIM-CK/LM/II/2020 with KIM for developing and implementing mining services in Jambi area started on November 1, 2019 and valid until October 2, 2027.

CK entered into Mining Service Contract No. 002/KCP-CK/LM/II/2020 with KCP for developing and implementing mining services in Jambi area started on November 1, 2019 and valid until October 24, 2028.

CK entered into Mining Service Contract No. 003/BBU-CK/LM/II/2020 with BBU for developing and implementing mining services in Jambi area started on November 1, 2019 and valid until October 2, 2027.

CK entered into Mining Service Contract No. 004/BBM-CK/LM/II/2020 with BBM for developing and implementing mining services in Jambi area started on November 1, 2019 and valid until October 2, 2027.

33. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

j. Kontrak Jasa Pertambangan dengan PT Kuansing Inti Makmur ("KIM"), PT Karya Cemerlang Persada ("KCP"), PT Bungo Bara Utama ("BBU") dan PT Bungo Bara Makmur ("BBM") (bersama-sama disebut sebagai "Grup KIM") (lanjutan)

Kontrak dengan Grup KIM memiliki target produksi kumulatif sebesar 226,0 juta BCM.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, total pendapatan jasa pertambangan yang diakui CK adalah sebesar AS$94.032.965, yang dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

k. Sifat Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi

Rincian sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

33. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

j. Mining Services Contract with PT Kuansing Inti Makmur ("KIM"), PT Karya Cemerlang Persada ("KCP"), PT Bungo Bara Utama ("BBU") and PT Bungo Bara Makmur ("BBM") (collectively refer as "KIM Group") (continued)

All contracts with KIM Group have a cumulative production target of 226.0 million BCM.

For the year then ended December 31, 2023, total mining services income recognized by CK amounted to US$94,032,965, recognized as part of "Revenue from Contracts with Customers" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

k. Nature of Relationship with Related Parties

The details of nature of relationship with the related parties are as follows:

Perusahaan/*Company*	**Sifat Hubungan/*Nature of Relationship***
PT Tiara Marga Trakindo ("TMT")	Entitas induk Perusahaan/ *Parent entity of the Company*
PT Trakindo Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Chandra Sakti Utama Leasing	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Mahadana Dasha Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Chakra Jawara	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Chitra Paratama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Tri Swardana Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Triyasa Propertindo	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Mitra Solusi Telematika	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
Dana Pensiun PT Trakindo Utama	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Karya Kharisma Mandiri	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Roda Nusantara GTJ	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
Glorioso Trading, LDA	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
PT Nagata Bisma Shakti	Entitas yang dikendalikan oleh TMT/ *Entity controlled by TMT*
Valle Verde Pte. Ltd., Singapura/ *Singapore* ("VV")	Pemegang saham Perusahaan/ *Shareholder of the Company*
Halcon Primo Logistics Pte. Ltd., Singapura/*Singapore*	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
Mega Strada Pte. Ltd., Singapura/*Singapore*	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
Pan Terra Pte. Ltd., Singapura/*Singapore*	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
Vega Orient Line Pte. Ltd., Singapura/*Singapore*	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT Multi Harapan Utama	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT Sumberdaya Sewatama	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT Pradipa Aryasatya	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT Energi Alamraya Semesta	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT Agro City Kaltim	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT Wargi Santosa	Entitas sepengendali/ *Entity under common control*
PT SSB Sammitr Distribution	Entitas asosiasi melalui SSB/ *Associated entity through SSB*
PT Golden Energy Mines Tbk ("GEMS")	Entitas asosiasi melalui RJR/ *Associated entity through RJR*
PT Roundhill Capital Indonesia	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Kuansing Inti Makmur	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Trisula Kencana Sakti	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
GEMS Trading Resources Pte. Ltd	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Borneo Indobara	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Karya Cemerlang Persada	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Bungo Bara Utama	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Bara Harmonis Batang Asam	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Bungo Bara Makmur	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Bara Sentosa Lestari	Entitas yang dikendalikan oleh GEMS/ *Entity controlled by GEMS*
PT Media Djaya Bersama*)	Entitas asosiasi melalui Reswara/*Associated entity through Reswara*
PT MIFA Bersaudara*)	Entitas asosiasi melalui Reswara/*Associated entity through Reswara*
PT Bara Energi Lestari*)	Entitas asosiasi melalui Reswara/*Associated entity through Reswara*

*) Pihak berelasi pada tanggal 29 Desember 2023/
related parties as of December 29, 2023

34. INFORMASI SEGMEN

Segmen Primer

Grup mengklasifikasikan usahanya menjadi 3 (tiga) segmen usaha, yaitu jasa, pabrikasi dan kontraktor tambang dan tambang batubara. Informasi mengenai segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

34. SEGMENT INFORMATION

Primary Segments

The Group classifies its business into 3 (three) main business segments, namely services, manufacturing and mining contractors and coal mining. Information concerning the Group's business segments is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/*Year Ended December 31, 2023*						
	Jasa/ *Services*	**Pabrikasi/ *Manufacturing***	**Kontraktor Tambang dan Tambang Batubara/ *Mining Contractors and Coal Mining***	**Lain-lain/ *Others***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Neto/*Net***	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan - pelanggan eksternal	200.496.389	37.658.771	1.239.653.937	15.189.759	-	1.492.998.856	*Revenue from contracts with customers - external customers*
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan - antar segmen	32.732.328	7.645.258	120.872.481	280.537.726	(441.787.793)	-	*Revenue from contracts with customers - inter-segment*
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	233.228.717	45.304.029	1.360.526.418	295.727.485	(441.787.793)	1.492.998.856	*Revenue from contracts with customers*
Beban pokok pendapatan	188.013.093	38.571.517	1.036.718.402	272.050.458	(434.400.643)	1.100.952.827	*Cost of revenue*
Laba bruto	**45.215.624**	**6.732.512**	**323.808.016**	**23.677.027**	**(7.387.150)**	**392.046.029**	***Gross profit***
Beban penjualan, umum dan administrasi						(110.370.850)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan lainnya						47.753.670	*Other income*
Beban lainnya						(23.801.736)	*Other expenses*
Laba usaha						**305.627.113**	***Profit from operations***
Bagian laba entitas asosiasi						143.996.935	*Share of profit of associates*
Pendapatan dividen						25.000.000	*Dividend income*
Pendapatan keuangan - neto						4.812.848	*Finance income - net*
Biaya keuangan						(106.107.407)	*Finance charges*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan						**373.329.489**	***Profit before final tax and income tax***
Beban pajak final						(1.838.566)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan						**371.490.923**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan - neto						(55.867.030)	*Income tax expense - net*
Laba tahun berjalan						**315.623.893**	***Profit for the year***
Rugi komprehensif lain						(5.342.280)	*Other comprehensive loss*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan						**310.281.613**	***Total comprehensive income for the year***
Segmen aset	205.102.951	60.421.045	1.859.206.137	538.307.304	(506.349.542)	2.156.687.895	*Segment assets*
Segmen liabilitas	(87.780.095)	(41.595.037)	(1.219.297.555)	(291.151.641)	242.063.400	(1.397.760.928)	*Segment liabilities*
Informasi lainnya:							*Other information:*
Belanja modal	22.145.708	5.842.154	491.146.167	1.502.476	(146.247)	520.490.258	*Capital expenditures*
Biaya depresiasi dan amortisasi	17.807.940	2.109.896	169.795.248	3.677.107	(3.477.789)	189.912.402	*Depreciation and amortization expense*

34. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

34. SEGMENT INFORMATION (continued)

Segmen Primer (lanjutan)

Primary Segments (continued)

Grup mengklasifikasikan usahanya menjadi 3 (tiga) segmen usaha, yaitu jasa, pabrikasi dan kontraktor tambang dan tambang batubara. Informasi mengenai segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Group classifies its business into 3 (three) main business segments, namely services, manufacturing and mining contractors and coal mining. Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/*Year Ended December 31, 2022*						
	Jasa/ *Services*	**Pabrikasi/ *Manufacturing***	**Kontraktor Tambang dan Tambang Batubara/ *Mining Contractors and Coal Mining***	**Lain-lain/ *Others***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Neto/*Net***	
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan - pelanggan eksternal	179.525.577	29.626.048	1.230.195.953	6.179.793	-	1.445.527.371	*Revenue from contracts with customers - external customers*
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan - antar segmen	46.956.249	5.354.227	112.979.891	222.107.836	(387.398.203)	-	*Revenue from contracts with customers - inter-segment*
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	226.481.826	34.980.275	1.343.175.844	228.287.629	(387.398.203)	1.445.527.371	*Revenue from contracts with customers*
Beban pokok pendapatan	184.515.429	29.652.457	855.577.060	214.641.908	(360.763.754)	923.623.100	*Cost of revenue*
Laba bruto	**41.966.397**	**5.327.818**	**487.598.784**	**13.645.721**	**(26.634.449)**	**521.904.271**	***Gross profit***
Beban penjualan, umum dan administrasi						(105.067.870)	*Selling, general and administrative expenses*
Pendapatan lainnya						15.282.698	*Other income*
Beban lainnya						(36.387.450)	*Other expenses*
Laba usaha						**395.731.649**	***Profit from operations***
Bagian laba entitas asosiasi						66.587.832	*Share of profit of associates*
Pendapatan dividen						22.500.000	*Dividend income*
Pendapatan keuangan - neto						2.596.132	*Finance income - net*
Biaya keuangan						(52.481.411)	*Finance charges*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan						**434.934.202**	***Profit before final tax and income tax***
Beban pajak final						(1.872.758)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan						**433.061.444**	***Profit before income tax***
Beban pajak penghasilan - neto						(91.157.937)	*Income tax expense - net*
Laba tahun berjalan						**341.903.507**	***Profit for the year***
Rugi komprehensif lain						(14.766.725)	*Other comprehensive loss*
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan						**327.136.782**	***Total comprehensive income for the year***
Segmen aset	185.754.973	55.366.884	1.715.236.433	573.775.982	(547.555.708)	1.982.578.564	*Segment assets*
Segmen liabilitas	(82.135.767)	(48.189.551)	(1.195.705.344)	(320.240.974)	281.214.347	(1.365.057.289)	*Segment liabilities*
Informasi lainnya:							*Other information:*
Belanja modal	27.349.341	4.825.709	374.464.198	5.005.914	(2.612.557)	409.032.605	*Capital expenditures*
Biaya depresiasi dan amortisasi	16.887.887	1.415.040	123.120.012	3.050.750	(1.908.885)	142.564.804	*Depreciation and amortization expense*

34. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / *34. SEGMENT INFORMATION (continued)*

Informasi Geografis / ***Geographic Information***

Seluruh aset tidak lancar Grup berlokasi di Indonesia. Tabel berikut menyajikan penjualan berdasarkan lokasi pelanggan:

All of the Group non-current assets located in Indonesia. The following table presents sales based on the location of the customers:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2023	**2022**	
Negara			***Country***
Indonesia	1.042.240.093	825.798.592	*Indonesia*
Singapura	193.401.814	268.432.733	*Singapore*
Tiongkok	117.721.743	128.566.770	*China*
India	116.932.071	189.121.554	*India*
Swiss	16.220.828	22.072.729	*Switzerland*
Mongolia	3.379.384	1.767.184	*Mongolia*
Jerman	2.742.543	2.783.560	*German*
Jepang	23.630	302.540	*Japan*
Vietnam	-	6.227.100	*Vietnam*
Lain - lain	336.750	454.609	*Others*
Total penjualan sesuai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	**1.492.998.856**	**1.445.527.371**	***Total sales per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI / *35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES*

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023:

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023:

Perusahaan / ***The Company***

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Non-Tunai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") / ***Revolving Non-Cash Loan Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")***

Pada tanggal 25 Maret 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Mandiri, pihak ketiga, untuk fasilitas pinjaman *revolving* non-tunai (*non-cash loan*) dalam batas jumlah maksimum tidak melebihi AS$20.000.000 dan dapat digunakan untuk penerbitan L/C, SKBDN dan Bank Garansi (*Bid Bonds/ Performance Bonds/ Advance Payment/ Maintenance/ Retention/ Custom Bond*). Fasilitas ini akan berakhir satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan digunakan untuk membiayai *non-cash loan* Grup yang terutang.

On March 25, 2014, the Company entered into a loan agreement with Mandiri, a third party, for revolving non-cash loan facility with a maximum credit amount of US$20,000,000 and can be used for issuance of L/C, SKBDN and Bank Guarantee (Bid Bonds/ Performance Bonds/ Advance Payment/ Maintenance/ Retention/ Custom Bond). The facility will end in one year since the signing of the agreement and used to refinance existing non-cash loan facility of the Group.

Pada tanggal 24 Mei 2023 perusahaan telah menandatangani amendemen untuk tambahan limit sebesar AS$100.000.000 dan tambahan fasilitas *Trust Receipt* berdasarkan amandemen tersebut fasilitas ini akan berakhir tanggal 24 April 2024.

On May 24, 2023, the company has signed an amendment to add the facility amounting to US$100,000,000 and to add Trust Receipt Facility and based on the amendment this facility will end on April 24, 2024.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Non-Tunai dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas *non-cash loan* yang telah digunakan adalah sebesar Rp78 miliar (setara dengan AS$5.088.153) dan AS$1.328.374.

Pada tanggal 31 Desember 2022, fasilitas *non-cash loan* yang telah digunakan adalah sebesar Rp 393 miliar (setara dengan AS$25.255.399), AS$4.832.954, EUR655.693 (setara dengan AS$698.411), SGD1.032.878 (setara dengan AS$769.168), dan AUD160.160 (setara dengan AS$108.621).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

Fasilitas Omnibus *Revolving Loan* dari PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 29 Juni 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan Permata, pihak ketiga, untuk Fasilitas Pinjaman *Omnibus Revolving* dalam batas jumlah maksimum tidak melebihi AS$10.000.000 dan dapat digunakan untuk penerbitan L/C, SKBDN, *post import financing*, dan Bank Garansi. Fasilitas ini akan berakhir satu tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Berdasarkan amandemen perjanjian pinjaman tanggal 26 Juni 2023, fasilitas ini akan berakhir pada 29 Januari 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman atas fasilitas ini adalah masing-masing sebesar Rp27 milliar (setara dengan AS$1.799.651) AS$112.278, EUR1.113.679 (setara dengan AS$1.232.397) and AUD38.763 (setara dengan AS$26.486).

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023: (continued)

The Company (continued)

Revolving Non-Cash Loan Facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") (continued)

As of December 31, 2023, the non-cash loan facility used amounted to Rp78 billion (equivalent to US$5,088,153) and US$1,328,374.

As of December 31, 2022, the non-cash loan facility used amounted to Rp393 billion (equivalent to US$25,255,399), US$4,832,954, EUR655,693 (equivalent to US$698,411), SGD1,032,878 (equivalent to US$769,168), AUD160,160 (equivalent to US$108,621).

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Company has maintained all financial ratios as required in the loan agreement.

Omnibus Revolving Loan Facility from PT Bank Permata Tbk ("Permata")

On June 29, 2021, the Company entered into a loan agreement with Permata, a third party, for Omnibus Revolving Loan Facility with a maximum credit amount of US$10,000,000 and can be used for issuance of L/C, SKBDN, post import financing and Bank Guarantee. The facility will end in one year since the signing of the agreement.

Based on amendment of loan facility dated June 26, 2023, this facility will mature on January 29, 2024.

As of December 31, 2023, the outstanding balance of this loan facility is amounting to Rp27 billion (equivalent to US$1,799,651), US$112,278, EUR1,113,679 (equivalent to US$1,232,397) and AUD38,763 (equivalent to US$26,486).

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas Omnibus *Revolving Loan* dari PT Bank Permata Tbk ("Permata") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, fasilitas *non-cash loan* yang telah digunakan adalah sebesar Rp 50,87 miliar (setara dengan AS$3.267.829), AS$1.668.530, EUR517.413 (setara dengan AS$551.122), dan AUD217.904 (setara dengan AS$147.783).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

Fasilitas *Non Cash Loan* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 24 Mei 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan BRI, pihak ketiga, untuk Fasilitas Pinjaman *Non Cash Loan* dalam batas jumlah maksimum tidak melebihi AS$50.000.000 yang dapat digunakan untuk penerbitan L/C, SKBDN line, *Trust Receipt*, Bank Garansi dan SBLC.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas *non-cash loan* yang telah digunakan adalah sebesar Rp100 miliar (setara dengan AS$6.477.103).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023: (continued)

The Company (continued)

Omnibus Revolving Loan Facility from PT Bank Permata Tbk ("Permata") (continued)

As of December 31, 2022, the non-cash loan facility used amounted to Rp 50.87 billion (equivalent to US$3,267,829), US$1,668,530, EUR517,413 (equivalent to US$551,122), and AUD217,904 (equivalent to US$147,783).

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the abovementioned loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

Non Cash Loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

On May 24, 2023, the Company entered into a loan agreement with BRI, a third party, for Omnibus Revolving Loan Facility with a maximum credit amount not exceeding of US$50,000,000 which can be used for issuance of L/C, SKBDN line, Trust receipt, Bank Guarantee and SBLC.

As of December 31, 2023, the non-cash loan facility used amounted to Rp100 billion (equivalent to US$6,477,103).

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the abovementioned loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas *Non Cash Loan* dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 159 tanggal 31 Januari 2022, PWP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Trade Purchase Financing* ("Fasilitas TPF") dengan OCBC dengan jumlah batas maksimum sebesar Rp155.000.000.000.

Pada tanggal 27 Januari 2023, PWP menandatangani Perubahan Perjanjian Pinjaman dengan PT Bank OCBC NISP Tbk, berdasarkan Perjanjian Perubahan Pinjaman No. 33/ILS-JKT/PK/I/2023 tanggal 27 Januari 2023, terkait dengan Fasilitas *Trade Purchase Financing* ("TPF"), dengan perubahan sebagai berikut:

a) Mengalihkan Fasilitas TPF kedalam Fasilitas Trade Gabungan.

b) Menambah Fasilitas Bank Garansi ("Fasilitas BG") dalam Fasilitas Trade Gabungan; sehingga Fasilitas Trade Gabungan menjadi sebagai berikut:
   i. Fasilitas TPF dengan jumlah batas maksimal Rp155.000.000.000.
   ii. Fasilitas BG dengan jumlah batas maksimal Rp600.000.000.000.

c) Memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 31 Januari 2024.

Pada tanggal 16 Januari 2024, berdasarkan Perjanjian Perubahan Pinjaman Nomor 07/ILS-JKT/PK/I/2023 tanggal 16 Januari 2024, PWP dan OCBC setuju untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 31 Januari 2025.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023: (continued)

The Company (continued)

Non Cash Loan from PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., No. 159 dated January 31, 2022, PWP entered into Trade Purchase Financing Facility ("TPF Facility") Agreement with OCBC with maximum limit of Rp155,000,000,000.

On January 27, 2023, PWP entered into Amendment of Loan Agreement with PT Bank OCBC NISP Tbk, based on Loan Amendment Agreement No. 33/ILS-JKT/PK/I/2023 dated January 27, 2023 ,related to Trade Purchase Financing Facility ("TPF"), with changes as follows:

a) Diverting TPF Facility to Combined Trade Facility.

b) Adding Bank Guarantee Facility ("BG Facility") in the Joint Trade Facility; so that the Joint Trade Facility becomes as follows:
   i. TPF Facility with a maximum limit of Rp155,000,000,000.
   ii. BG Facility with a maximum limit of Rp600,000,000,000.

c) Extending the term of the loan facility until January 31, 2024.

On January 16, 2024, based on Loan Amendment Agreement No. 07/ILS-JKT/PK/I/2023 dated January 16, 2024, PWP and OCBC agreed to extend the term of the loan facility until January 31, 2025.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas *Non Cash Loan* dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Jumlah penggunaan Fasilitas TPF dan Fasilitas BG dengan jumlah batas maksimal bersama-sama tidak melebihi Rp600.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023, fasilitas *non-cash loan* yang telah digunakan adalah sebesar Rp600 miliar (setara dengan AS$38.920.602).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman bank tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (*waiver*) sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit terkait.

TIA

Pemeliharaan Jalan *Hauling* Batubara

Pada tanggal 28 Januari 2014, TIA dan PT Prolindo Cipta Nusantara ("PCN") menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Jalan *Hauling* Batubara. PCN dapat melintasi jalan *hauling* batubara milik TIA dengan volume tertentu selama jangka waktu perjanjian dengan membayar biaya tertentu untuk pemeliharaan kepada TIA. Kontrak ini berlaku efektif tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan 3 Juni 2020.

Perjanjian telah mengalami perubahan beberapa kali, perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020 untuk merubah jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 Juni 2022. Perjanjian ini berakhir pada tahun 2022.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023: (continued)

The Company (continued)

Non Cash Loan from PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")

Total use of the TPF Facility and BG Facility with a total maximum limit together not exceeding Rp600,000,000,000.

As of December 31, 2023, the non-cash loan facility used amounted to Rp600 billion (equivalent to US$38,920,602).

Based on the loan agreement, the Company is also required to maintain certain financial ratios.

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has either complied with all of the covenants of the abovementioned loans as stipulated in the respective loan agreements or obtained necessary waivers as required by respective loan agreement.

TIA

Coal Hauling Road Maintenance

On January 28, 2014, TIA and PT Prolindo Cipta Nusantara ("PCN") entered into Coal Hauling Road Maintenance Agreement. PCN may pass the hauling road which is owned by TIA for a certain volume for certain contract period and pay certain fees for maintenance to TIA. The contract is effective as of June 4, 2015 up to June 3, 2020.

The Agreement has been amended several times, latest amendment was made on June 1, 2020 to amend time period of Agreement to June 3, 2022. The Agreement terminate in 2022.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

Litigasi

PT Prolindo Cipta Nusantara

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Oktober 2021, dengan nomor register 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., PT Prolindo Cipta Nusantara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Maka, TIA menjadi salah satu kreditur PCN di PKPU.

Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan pada tanggal 21 Februari 2022, Perjanjian Perdamaian yang disepakati pada tanggal 17 Februari 2022, telah sah dan mengikat secara hukum.

TIA

Beban Royalti/ Eksploitasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 81/2019, perusahaan yang memiliki izin eksploitasi diwajibkan untuk membayar royalti sesuai dengan spesifikasi *Gross as Received* ("GAR") yang masing-masing sebesar 3% untuk dibawah 4.700 GAR, 5% untuk 4.700 GAR hingga 5.700 GAR dan 7% untuk diatas 5.700 GAR.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beban eksploitasi masing-masing sebesar AS$15.097.973 dan AS$18.005.959, disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023: (continued)

Litigations

PT Prolindo Cipta Nusantara.

Based on the Decision of the Commercial Court at Central Jakarta Court dated October 18, 2021 with registered number 412/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., PT Prolindo Cipta Nusantara ("PCN") as TIA's client is in the Suspension of Payment Liability ("PKPU"). Therefore, TIA became one of PCN's creditors in PKPU.

Based on the decision of the Judges of the Court on February 21, 2022, the Settlement Agreement which was agreed on February 17, 2022, is valid and legally binding.

TIA

Royalty/ Exploitation Fee

Based on Government Regulation No. 45/2003 which was replaced by Government Regulation No. 81/2019, companies holding mining rights will have an obligation to pay a royalty accordingly with Gross as Received ("GAR") specification which is 3% for coal below 4,700 GAR, 5% for coal 4,700 GAR until 5,700 GAR and 7% for coal above 5,700 GAR.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, exploitation fees amounted to US$15,097,973 and US$18,005,959, respectively, recorded as part of "Cost of Revenue" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Berikut adalah perjanjian-perjanjian signifikan Grup pada tanggal 31 Desember 2023: (lanjutan)

BEL

Beban Royalti/ Eksploitasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 81/2019, perusahaan yang memiliki izin eksploitasi diwajibkan untuk membayar royalti sesuai dengan spesifikasi *Gross as Received* ("GAR") yang masing-masing sebesar 3% untuk dibawah 4.700 GAR, 5% untuk 4.700 GAR hingga 5.700 GAR dan 7% untuk diatas 5.700 GAR.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, iuran eksploitasi masing-masing sebesar AS$11.928.185 dan AS$2.941.945, disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Pendapatan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara BEL dengan Gubernur Aceh No. 010/BEL-GUB/PERJ/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, BEL diwajibkan untuk membayar Sumbangan Pembangunan Daerah ("SPD") dengan cara bagi hasil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harga jual FOB Tongkang lebih kecil atau sama dengan AS$40 sebesar 1%.
- Harga jual FOB Tongkang di atas AS$40 - AS$50 sebesar 2%.
- Harga jual FOB Tongkang di atas AS$50 sebesar 3%.

BEL juga diwajibkan menyediakan dana pengembangan masyarakat atau program CSR sebesar 1% dari hasil penjualan batubara, dimana dana tersebut dikelola sendiri oleh BEL dan digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat disekitar lokasi tambang.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara BEL dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bulan Februari 2018, BEL diwajibkan untuk memberikan Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1% dari total penjual batu bara yang akan dibayarkan ke Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The following are the significant agreements of the Group as of December 31, 2023: (continued)

BEL

Royalty/ Exploitation Fee

Based on Government Regulation No. 45/2003 which was replaced by Government Regulation No. 81/2019, companies holding mining rights will have an obligation to pay a royalty accordingly with Gross as Received ("GAR") specification which is 3% for coal below 4,700 GAR, 5% for coal 4,700 GAR until 5,700 GAR and 7% for coal above 5,700 GAR.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, exploitation fees amounted to US$11,928,185 and US$2,941,945, respectively, presented as part of "Cost of Revenue" in the consolidated statements of profit or loss and comprehensive income.

Based on the Cooperation Agreement between BEL and the Governor of Aceh No. 010/BEL-GUB/PERJ/VII/2014 date July 17, 2014, BEL is required to pay the Regional Development Contribution ("SPD") in terms of profit sharing in accordance with the following terms:

- *FOB Barge selling price less than or equal to US$40 by 1%.*
- *FOB Barge selling price above US$40 - US$50 by 2%.*
- *FOB Barge selling price above US$50 by 3%.*

BEL also required to provide community development funds or CSR programs of 1% from coal sales, where the funds are managed by BEL itself and are used for social programs and community empowerment around the mine site.

Based on the Memorandum of Understanding between BEL and the Nagan Raya Regency Government in February 2018, BEL is required to provide a Regional Development Contribution of 1% from the total coal sales which will be paid to the Head of the Nagan Raya Regency Mining and Energy Office.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

MIFA

Beban Royalti/Eksploitasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45/2003 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 81/2019, perusahaan yang memiliki izin eksploitasi diwajibkan untuk membayar royalti sesuai dengan spesifikasi *Gross as Received* (”GAR”) yang masing-masing sebesar 3% untuk dibawah 4.700 GAR, 5% untuk 4.700 GAR hingga 5.700 GAR dan 7% untuk diatas 5.700 GAR.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, iuran eksploitasi masing-masing sebesar AS$31.381.327 dan AS$44.709.280 disajikan sebagai bagian dari “Beban Pokok Pendapatan” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara MIFA dengan Gubernur Aceh No. 064/MIFA-GA/PERJ/IX/2013 tanggal 3 September 2013, MIFA diwajibkan untuk membayar Sumbangan Pembangunan Daerah (“SPD”) dengan cara bagi hasil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harga jual FOB Tongkang lebih kecil atau sama dengan AS$40 sebesar 1%.
- Harga jual FOB Tongkang di atas AS$40 - AS$50 sebesar 2%.
- Harga jual FOB Tongkang di atas AS$50 sebesar 3%.

MIFA juga diwajibkan menyediakan dana pengembangan masyarakat atau program CSR sebesar 1% dari hasil penjualan batubara, dimana dana tersebut dikelola sendiri oleh MIFA dan digunakan untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat disekitar lokasi tambang.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara MIFA dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 22 November 2007, MIFA diwajibkan untuk memberikan Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1% dari penjualan batu bara.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

MIFA

Royalty/Exploitation Fee

Based on Government Regulation No. 45/2003 which was replaced by Government Regulation No. 81/2019, companies holding mining rights will have an obligation to pay a royalty accordingly with Gross as Received (“GAR”) specification which is 3% for coal below 4,700 GAR, 5% for coal 4,700 GAR until 5,700 GAR and 7% for coal above 5,700 GAR.

For the year ended December 31, 2023 and 2022, exploitation fees amounted to US$31,381,327 and US$44,709,280, respectively, presented as part of “Cost of Revenue” in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Based on the Cooperation Agreement between MIFA and the Governor of Aceh No. 064/MIFA-GA/PERJ/IX/2013 date September 3, 2013, MIFA is required to pay the Regional Development Contribution (“SPD”) in terms of profit sharing in accordance with the following terms:

- *FOB Barge selling price less than or equal to US$40 by 1%.*
- *FOB Barge selling price above US$40 - US$50 by 2%.*
- *FOB Barge selling price above US$50 by 3%.*

MIFA also required to provide community development funds or CSR programs of 1% from coal sales, where the funds are managed by MIFA itself and are used for social programs and community empowerment around the mine site.

Based on the Memorandum of Understanding between MIFA and the Governor of West Aceh date November 22, 2007, MIFA is required to make a Regional Development Contribution by 1% from coal sales.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

MIFA (lanjutan)

Perjanjian Pengalihan Hak Membeli Batubara

Pada tanggal 22 Desember 2021, IMK bersama-sama dengan MIFA dan CTPL Pte. Ltd., Singapura ("CTPL") menandatangani "Perjanjian Pengalihan Hak Membeli Batubara" yang mengalihkan hak membeli batubara MIFA dari IMK ke CTPL. Berdasarkan perjanjian tersebut, CTPL setuju untuk membayar deposit sejumlah AS$25.000.000 dalam beberapa tahap kepada IMK dan IMK wajib membayarkan deposit tersebut kepada MIFA untuk dan atas nama CTPL pada setiap pengiriman batubara.

Pada tanggal 15 September 2022, IMK bersama-sama dengan MIFA dan IMR Metallurgical Resources Pte. Ltd., Swiss ("IMR") menandatangani "Perjanjian Pengalihan Hak Membeli Batubara" yang mengalihkan hak membeli batubara MIFA dari IMK ke IMR. Berdasarkan perjanjian tersebut, IMR setuju untuk membayar deposit sejumlah AS$6.000.000 dalam beberapa tahap kepada IMK dan IMK wajib membayarkan deposit tersebut kepada MIFA untuk dan atas nama IMR pada setiap pengiriman batubara.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah piutang usaha MIFA kepada IMK sehubungan dengan transaksi di atas adalah sejumlah AS$27.668.304.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

CK

Kontrak Jasa Pertambangan

Kontrak Jasa Pertambangan dengan PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua ("BMB")

CK menandatangani Kontrak Jasa Pertambangan No. 01/CK-BMB/KONT-TAMB/XII/2019 dengan BMB untuk pekerjaan mengembangkan dan melaksanakan jasa pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan sejak tanggal 21 Oktober 2019, untuk target pekerjaan sebesar 30,0 juta BCM setiap tahun. Kontrak tersebut berlaku sampai dengan umur tambang. CK dan BMB akan mereviu kontrak tersebut setiap lima tahun.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

MIFA (continued)

Coal Transfer Rights Agreement

On December 22, 2021, IMK together with MIFA and CTPL Pte. Ltd., Singapore ("CTPL") jointly signed the "Coal Transfer Rights Agreement" which transferred the right to purchase MIFA's coal from IMK to CTPL. Based on the agreement, CTPL agreed to pay a deposit totaling to US$25,000,000 through several trenches to IMK and IMK is obliged to pay such deposit to MIFA for and on behalf of CTPL. IMK is obliged to pay the deposit to MIFA for and on behalf of CTPL on every coal shipment.

On September 15, 2022, IMK together with MIFA and IMR Metallurgical Resources Pte. Ltd., Switzerland ("IMR") jointly entered into a "Coal Purchase Rights Transfer Agreement" which transferred the rights to purchase MIFA's coal from IMK to IMR. Based on the agreement, IMR agreed to pay a deposit totaling to US$6,000,000 through several trenches to IMK and IMK is obliged to pay the deposit to MIFA for and on behalf of IMR on every coal shipment.

As of December 31, 2022, the total trade receivables of MIFA from IMK in relation with the above transactions are totaling to US$27,668,304.

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements.

CK

Mining Services Contract

Mining Services Contract with PT Binuang Mitra Bersama Blok Dua ("BMB")

CK entered into Mining Service Contract No. 01/CK-BMB/KONT-TAMB/XII/2019 with BMB for developing and implementing mining services in South Kalimantan area started on October 21, 2019, for a production target of 30.0 million BCM per annum. The contract is valid until life of mine. CK and BMB will review the contract every five years.

35. PERJANJIAN SIGNIFIKAN, PERIKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

CK (lanjutan)

Litigasi

PT Bangun Olahsarana Sukses

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2020, dengan nomor register 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, PT Bangun Olahsarana Sukses ("BOS"), sebagai klien CK, berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Maka, CK menjadi salah satu kreditur BOS di PKPU.

Berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan pada tanggal 16 Februari 2021, Perjanjian Perdamaian yang disepakati pada tanggal 3 Februari 2021, telah sah dan mengikat secara hukum.

Pada tanggal 24 Februari 2021, PT Max Extraction Asia, salah satu kreditur BOS, mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2020, dengan nomor register 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst.

Pada tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Putusan No. 699/Pdt.Sus-Pailit/2021, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya yang menolak kasasi sebagaimana dimaksud diatas.

Pada tanggal 27 September 2022, BOS dinyatakan pailit, sebagai dari pembatalan Perjanjian Perdamaian, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.44/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/ PN.Niaga. Jkt.Pst. juncto No. 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo piutang CK dari BOS adalah masing-masing sebesar AS$4.080.438 dan AS$4.080.250 dan CK telah mencatat cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha penuh atas saldo tersebut.

NBE

Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik

Pada tanggal 25 April 2016, NBE menandatangani perjanjian pembelian tenaga listrik dengan PT PLN (Persero) dengan kapasitas daya terpasang 2MW di Kalimantan Selatan. Perjanjian pembelian tenaga listrik ini akan berlangsung selama 20 tahun sejak tanggal operasi komersial. Pada bulan Agustus 2020, NBE telah beroperasi secara komersial.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

CK (continued)

Litigations

PT Bangun Olahsarana Sukses

Based on the decision of the Commercial Court at Central Jakarta Court dated August 14, 2020 with registered number 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst, PT Bangun Olahsarana Sukses ("BOS") as CK's client is in the Suspension of Payment Liability ("PKPU"). Therefore, CK becomes one of BOS creditors in PKPU.

Based on the result of Court Judges Panel dated February 16, 2021, the settlement agreement which was voted on February 3, 2021, is valid and legally binding.

On February 24, 2021, PT Max Extraction Asia, one of BOS' creditor, filed a cassation against the decision of the Commercial Court at Central Jakarta Court dated August 14,2020 with registered number 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst.

On June 10, 2021, based on the Decision number 699/Pdt.Sus-Pailit/2021, the Supreme Court has released its Decision rejecting the above mention cassation.

On September 27, 2022, BOS was declared bankrupt, as a result of the cancellation of the Peace Agreement, based on the Decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court No.44/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto No. 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

As of December 31, 2023 and 2022, CK's receivables from BOS amounted to US$4,080,438 and to US$4,080,250 respectively and CK has recorded full allowance for expected credit losses on trade receivables for such balance.

NBE

Power Purchase Agreement

On April 25, 2016, NBE entered into power purchase agreement with PT PLN (Persero) with installed capacity of 2MW in South Kalimantan. This power purchase agreement is valid for 20 years from the date of commercial operations. On August 2020, NBE has been operating commercially.

36. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang signifikan sebagai berikut:

36. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2023 and 2022, the Group has significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*		**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***		
	Dalam jutaan/ *In millions*	**Setara dengan AS$/*Equivalent Amount in US$***	**Dalam jutaan/ *In millions***	**Setara dengan AS$/*Equivalent Amount in US$***	
Rupiah					***Rupiah***
Aset					*Assets*
Kas dan setara kas	1.454.649	94.359.663	1.287.815	81.864.817	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan lancar lainnya	1.450	94.080	439.470	27.936.572	*Other current financial assets*
Piutang usaha	4.419.087	286.655.903	2.080.529	132.256.610	*Trade receivables*
Piutang non-usaha	159.327	10.335.178	175.563	11.160.343	*Non-trade receivables*
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	296.279	19.218.958	804.358	51.132.001	*Prepaid value added taxes*
Aset lancar lainnya	12.801	830.365	15.438	981.352	*Other current assets*
Taksiran tagihan pajak	348.176	22.585.350	150.202	9.548.160	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	119.535	7.753.977	130.878	8.319.746	*Other non-current assets*
Sub-total	6.811.304	441.833.474	5.084.253	323.199.601	*Sub-total*
Liabilitas					*Liabilities*
Utang bank jangka pendek	230.000	14.919.564	189.464	12.043.975	*Short-term bank loans*
Utang usaha	1.406.822	91.257.272	3.492.304	222.001.413	*Trade payables*
Utang non-usaha	45.293	2.938.033	34.743	2.208.546	*Non-trade payables*
Utang pajak	114.190	7.407.257	143.849	9.144.284	*Taxes payable*
Beban akrual	551.890	35.799.850	1.488.780	94.639.895	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	268.842	17.439.132	167.082	10.621.209	*Short-term employee benefits liability*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	378.986	24.583.932	303.696	19.305.563	*Long-term employee benefits liability*
Utang bank jangka panjang	1.688.483	109.527.928	-	-	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	1.944.327	126.123.945	1.384.356	88.001.784	*Lease liabilities*
Uang muka pelanggan	27.834	1.805.514	11.635	739.605	*Customer deposit*
Sub-total	6.656.667	431.802.427	7.215.909	458.706.274	*Sub-total*
Aset (Liabilitas) dalam Rupiah - neto	**154.637**	**10.031.047**	**(2.131.656)**	**(135.506.673)**	***Assets (Liabilities) in Rupiah - net***
Euro					***Euro***
Aset					*Asset*
Kas dan setara kas	0,00	3.187	0,00	3.107	*Cash and cash equivalents*
Liabilitas					*Liabilities*
Utang usaha	1,20	1.335.332	0,19	203.370	*Trade payables*
Beban akrual	0,12	135.047	0,06	63.587	*Accrued expenses*
Sub-total	1,32	1.470.379	0,25	266.957	*Sub-total*
Liabilitas dalam Euro - neto	**(1,32)**	**(1.467.192)**	**(0,25)**	**(263.850)**	***Liabilities in Euro - net***
Mata uang asing lainnya					***Other foreign currencies***
Aset					*Assets*
Kas dan setara kas		1.502		2.300	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha		108.661		-	*Trade receivables*
Sub-total		110.163		2.300	*Sub-total*
Liabilitas					*Liabilities*
Utang usaha		772.976		447.254	*Trade payables*
Beban akrual		102.693		19.909	*Accrued expenses*
Sub-total		875.669		467.163	*Sub-total*
Liabilitas dalam mata uang asing lainnya - neto		**(765.506)**		**(464.863)**	***Liabilities in other foreign currencies - net***

Akun "Beban Lainnya" mencakup rugi selisih kurs yang berasal dari operasi sebesar AS$1.642.521 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Akun "Pendapatan Lainnya" mencakup laba selisih kurs yang berasal dari operasi sebesar AS$1.105.190 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

The "Other Expenses" accounts include loss on foreign exchange from operations amounting to US$1,642,521 for the year ended December 31, 2023. The "Other Income" accounts include gain on foreign exchange from operations amounting to US$1,105,190 for the year ended December 31, 2022.

37. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan adalah nilai dimana instrumen dapat dipertukarkan/ diselesaikan antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar (*arm's length transaction*), yang bukan berasal dari penjualan yang dipaksakan atau likuidasi.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

a. Kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha, piutang non-usaha, aset lancar lainnya tertentu, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

b. Nilai tercatat dari utang bank jangka panjang, liabilitas sewa tertentu dan utang lain-lain jangka panjang mendekati nilai wajarnya disebabkan oleh pemakaian suku bunga mengambang atas instrumen tersebut, dimana tingkat bunga tersebut selalu disesuaikan oleh kreditur.

c. Nilai wajar dari aset tidak lancar lainnya tertentu diperkirakan dengan mendiskontokan arus kas masa depan, menggunakan tingkat suku bunga saat ini bagi pinjaman, yang mempersyaratkan risiko kredit dan sisa masa jatuh tempo yang serupa.

d. Utang obligasi disajikan dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE dan besaran imbalan. Biaya perolehan diamortisasi ditentukan dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode SBE dan besaran imbalan.

e. Nilai wajar dari investasi pada saham telah diestimasi dengan menggunakan model diskonto arus kas. Penilaian tersebut mengharuskan manajemen untuk membuat asumsi tertentu tentang input model, termasuk perkiraan arus kas, tingkat diskonto, risiko kredit dan volatilitas. Probabilitas berbagai estimasi dalam kisaran tersebut dapat dinilai secara wajar dan digunakan dalam estimasi manajemen atas nilai wajar untuk investasi pada saham ini.

37. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Fair values of the financial assets and liabilities are included at the amounts at which the instruments could be exchanged/settled in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Group's financial instruments:

a. Cash and cash equivalents, other current financial assets, trade receivables, non-trade receivables, certain other current assets, short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, accrued expenses and short-term employee benefits liability approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

b. The carrying values of long-term bank loans, certain lease liabilities and long-term non-trade payables approximate their fair values due to the floating rate interests on these instruments which are subject to adjustments by the creditors.

c. The fair values of certain other non-current assets are estimated by discounting future cash flows, using rates currently available for debt with similar terms, credit risks and remaining maturities.

d. The bonds payable is carried at amortized costs using the EIR method and rate of return. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are integral part of the EIR method and rate of return.

e. The fair values of the investment in shares have been estimated using a discounted cash flow model. The valuation requires management to make certain assumptions about the model inputs, including forecast cash flows, the discount rate, credit risk and volatility. The probabilities of the various estimates within the range can be reasonably assessed and are used in management's estimate of fair value for these investment in shares.

37. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

37. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup:

The following tables set forth the fair values of financial assets and financial liabilities of the Group:

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	**31 Desember 2022/ *December 31, 2022***	
Aset Keuangan Lancar			***Current Financial Assets***
Kas dan setara kas	188.576.976	221.566.137	*Cash and cash equivalents*
Aset keuangan lancar lainnya	5.674.289	99.390.434	*Other current financial assets*
Piutang usaha	313.541.656	255.624.573	*Trade receivables*
Piutang non-usaha	31.013.696	11.204.938	*Non-trade receivables*
Aset lancar lainnya	1.350.554	1.546.589	*Other current assets*
Total Aset Keuangan Lancar	**540.157.171**	**589.332.671**	***Total Current Financial Assets***
Aset Keuangan Tidak Lancar			***Non-Current Financial Assets***
Aset tidak lancar lainnya	8.340.654	8.903.367	*Other non-current assets*
Investasi saham	16.731.209	23.619.168	*Investment in shares*
Total Aset Keuangan Tidak Lancar	**25.071.863**	**32.522.535**	***Total Non-Current Financial Assets***
Total Aset Keuangan	**565.229.034**	**621.855.206**	***Total Financial Assets***
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek			***Current Financial Liabilities***
Utang bank jangka pendek	69.419.564	60.043.975	*Short-term bank loans*
Utang usaha	255.451.164	226.453.754	*Trade payables*
Utang non-usaha	4.448.521	6.907.076	*Non-trade payables*
Beban akrual	35.843.429	113.552.514	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	17.439.132	19.700.460	*Short-term employee benefits liability*
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Current maturities of:*
Liabilitas sewa	50.767.988	37.125.089	*Lease liabilities*
Utang bank jangka panjang	186.938.153	120.419.068	*Long-term bank loans*
Total Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	**620.307.951**	**584.201.936**	***Total Current Financial Liabilities***
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang			***Non-Current Financial Liabilities***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			*Long-term debts - net of current maturities:*
Utang obligasi	155.359.128	153.914.040	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	75.355.957	50.876.695	*Lease liabilities*
Utang bank jangka panjang	502.335.698	516.363.178	*Long term bank loans*
Total Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	**733.050.783**	**721.153.913**	***Total Non-current Financial Liabilities***
Total Liabilitas Keuangan	**1.353.358.734**	**1.305.355.849**	***Total Financial Liabilities***

37. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Hierarki Nilai Wajar

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari masukan (*input*) yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan dari suatu *input* tertentu terhadap pengukuran nilai wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat memengaruhi penilaian dari aset dan liabilitas yang diukur dan penempatannya dalam hierarki nilai wajar.

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang dikuotasikan (*quoted prices*) dalam sebuah pasar yang aktif. Jika pasar untuk sebuah instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan dari penggunaan metode penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang terbentuk pada tanggal pengukuran dalam sebuah transaksi pertukaran yang wajar dengan pertimbangan bisnis normal.

Metode penilaian termasuk penggunaan harga dalam transaksi pasar yang wajar (*arm's length*) terakhir antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan.

Jika terdapat metode penilaian yang biasa digunakan oleh para peserta pasar untuk menentukan harga dari instrumen dan metode tersebut telah didemonstrasikan untuk menyediakan estimasi yang andal atas harga yang diperoleh dari transaksi pasar yang aktual, entitas harus menggunakan metode tersebut. Metode penilaian yang dipilih membuat penggunaan maksimum dari *input* pasar dan bergantung sedikit mungkin atas *input* yang spesifik untuk entitas (*entity-specific input*). Metode tersebut memperhitungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta pasar dalam menentukan sebuah harga dan selaras dengan metode ekonomis untuk penilaian sebuah instrumen keuangan. Secara berkala, Grup menelaah metode penilaian dan mengujinya untuk validitas dengan menggunakan harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan pengemasan kembali) atau berdasarkan data pasar yang tersedia dan dapat diobservasi.

37. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Fair Value Hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgment, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations.

Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis.

If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Group calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

37. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

37. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Hierarki Nilai Wajar (lanjutan)

Fair Value Hierarchy (continued)

Tabel berikut menyediakan hierarki pengukuran nilai wajar dari Grup:

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Group:

	Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement at the End of Reporting Period Using*				
	Total/ ***Total***	**Harga Kuotasian dalam Pasar Aktif untuk Aset yang Identik (Level 1)/** ***Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets (Level 1)***	**Input yang Dapat Diobservasi Lain yang Signifikan (Level 2)/** ***Significant Observable Inputs (Level 2)***	**Input yang Tidak Dapat Diobservasi yang Signifikan (Level 3)/** ***Significant Unobservable Inputs (Level 3)***	
Pada 31 Desember 2023					***As of December 31, 2023***
Aset tidak lancar					*Non-current assets*
Investasi pada saham	16.731.209	-	-	16.731.209	*Investments in shares*

	Pengukuran Nilai Wajar pada Akhir Periode Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement at the End of Reporting Period Using*				
	Total/ ***Total***	**Harga Kuotasian dalam Pasar Aktif untuk Aset yang Identik (Level 1)/** ***Quoted Prices in Active Markets for Identical Assets (Level 1)***	**Input yang Dapat Diobservasi Lain yang Signifikan (Level 2)/** ***Significant Observable Inputs (Level 2)***	**Input yang Tidak Dapat Diobservasi yang Signifikan (Level 3)/** ***Significant Unobservable Inputs (Level 3)***	
Pada 31 Desember 2022					***As of December 31, 2022***
Aset tidak lancar					*Non-current assets*
Investasi pada saham	23.619.168	-	-	23.619.168	*Investments in shares*

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

a. Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha dan non-usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang obligasi dan liabilitas sewa. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana dan memberikan jaminan untuk mendukung operasi Grup. Grup juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti kas dan setara kas, aset keuangan lancar lainnya, piutang usaha dan non-usaha, dan aset lancar lainnya tertentu yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

a. Risk Management

The principal financial liabilities of the Group consist of short-term bank loan, trade and non-trade payables, accrued expenses, short-term employee benefit liability, bonds payable and lease liabilities. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds and to provide guarantees to support the operations of the Group. The Group also has various financial assets such as cash and cash equivalents, other current financial assets, trade and non-trade receivables, and certain other current assets which arise directly from its operations.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas, risiko mata uang, risiko kredit dan risiko likuiditas. Prioritas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan seiring perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang jangka pendek dan utang jangka panjangnya. Fluktuasi suku bunga mempengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo utang Grup yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Grup terkait dengan risiko suku bunga adalah dengan mengelola biaya bunga melalui kombinasi pinjaman dengan suku bunga tetap dan mengambang. Grup mengevaluasi perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang jangka pendek, utang bank jangka panjang dan utang jangka panjang lainnya sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar uang.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai formal atas risiko suku bunga. Untuk liabilitas sewa, Grup mengelola risiko suku bunga dengan mengalihkannya kepada para pelanggan.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

The main risks arising from the Group's financial instruments are fair value and cash flow interest rate risk, foreign exchange rate risk, credit risk and liquidity risk. The priority in managing these risks has significantly increased in light of the considerable change and volatility in both Indonesian and international financial markets. The Company's Board of Directors reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below:

a. Fair Value and Cash Flow Interest Rate Risk

Fair value and cash flow interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group is exposed to the risk of changes in market interest rates relating primarily to its short-term loans and long-term loans. Interest rate fluctuations influence the cost of new loans and interest on the Group's outstanding debt which bears floating interest rates.

The Group's policies relating to interest rate risk are to manage interest cost through a mix of fixed and variable rate debts. The Group evaluates the fixed to floating ratio of its short-term loans, long-term bank loans and other long-term loans in line with movements of relevant interest rates in the financial markets.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. For lease liabilities, the Group may seek to mitigate interest rate risk by passing it on to its customers.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas (lanjutan)

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan konsolidasian Grup yang terkait risiko suku bunga:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

a. Fair Value and Cash Flow Interest Rate Risk (continued)

The following table sets out the carrying amounts, by maturity, of the Group's consolidated financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:

31 Desember 2023/*December 31, 2023*

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	Kurang dari atau sama dengan satu tahun (≤ 1 Tahun)/ *Less than or equal to one year (≤ 1 Year)*	Lebih dari satu tahun (> 1 Tahun)/ *More than one year (> 1 Year)*	Kurang dari atau sama dengan satu tahun (≤ 1 Tahun)/ *Less than or equal to one year (≤ 1 Year)*	Lebih dari satu tahun (> 1 Tahun)/ *More than one year (> 1 Year)*	Total/*Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang bank jangka pendek	69.419.564	-	-	-	69.419.564	*Short term bank loan*
Utang obligasi	-	-	-	155.359.128	155.359.128	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	-	-	50.767.988	75.355.957	126.123.945	*Lease liabilities*
Utang bank jangka panjang	186.938.153	502.335.698	-	-	689.273.851	*Long-term bank loans*
Total	**256.357.717**	**502.335.698**	**50.767.988**	**230.715.085**	**1.040.176.488**	***Total***

31 Desember 2022/*December 31, 2022*

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	Kurang dari atau sama dengan satu tahun (≤ 1 Tahun)/ *Less than or equal to one year (≤ 1 Year)*	Lebih dari satu tahun (> 1 Tahun)/ *More than one year (> 1 Year)*	Kurang dari atau sama dengan satu tahun (≤ 1 Tahun)/ *Less than or equal to one year (≤ 1 Year)*	Lebih dari satu tahun (> 1 Tahun)/ *More than one year (> 1 Year)*	Total/*Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang bank jangka pendek	60.043.975	-	-	-	60.043.975	*Short term bank loan*
Utang obligasi	-	-	-	153.914.040	153.914.040	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	-	-	37.125.089	50.876.695	88.001.784	*Lease liabilities*
Utang bank jangka panjang	120.419.068	516.363.178	-	-	636.782.246	*Long-term bank loans*
Total	**180.463.043**	**516.363.178**	**37.125.089**	**204.790.735**	**938.742.045**	***Total***

b. Risiko Mata Uang

Risiko mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi nilai tukar terhadap Grup terutama berasal dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.

b. Foreign Exchange Rate Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from short-term loans, long-term loans, trade receivables from sales in foreign currencies and trade payables from purchases in foreign currencies.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko Mata Uang (lanjutan)

Aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada Catatan 36.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran Rupiah terhadap mata uang asing, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan sebagai berikut:

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

b. Foreign Exchange Rate Risk (continued)

Monetary assets and liabilities of the Group which are denominated in foreign currencies as of December 31, 2023 and 2022 are presented in Note 36.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in the Rupiah exchange rate against foreign currency, with all other variables held constant, the effect to the profit (loss) before income tax as follows:

	Perubahan tingkat AS$/ *Change in US$ rate*	**Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan/ *Effect on profit (loss) before income tax***	
31 Desember 2023			***December 31, 2023***
Rupiah	+1%	(100.310)	*Indonesian Rupiah*
Euro Eropa	+1%	(13.197)	*European Euro*
Dolar Australia	+1%	19	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	+1%	1.380	*Singapore Dollar*
Rupiah	-1%	100.310	*Indonesian Rupiah*
Euro Eropa	-1%	13.197	*European Euro*
Dolar Australia	-1%	(19)	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	-1%	(1.380)	*Singapore Dollar*
31 Desember 2022			***December 31, 2022***
Rupiah	+1%	1.355.067	*Indonesian Rupiah*
Euro Eropa	+1%	(1.885)	*European Euro*
Dolar Australia	+1%	(3.796)	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	+1%	(1.893)	*Singapore Dollar*
Rupiah	-1%	(1.355.067)	*Indonesian Rupiah*
Euro Eropa	-1%	1.885	*European Euro*
Dolar Australia	-1%	3.796	*Australian Dollar*
Dolar Singapura	-1%	1.893	*Singapore Dollar*

Grup tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk risiko pertukaran mata uang asing. Walaupun demikian, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat masing-masing terhadap Rupiah, Dolar Australia, Dolar Singapura dan Euro Eropa menghasilkan lindung nilai natural terhadap risiko mata uang Grup.

The Group has no formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the United States dollar and each of the Rupiah, Australian Dollar, Singapore Dollar and European Euro provide some degree of natural hedge for the Group's foreign exchange exposure.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak terhadap suatu instrumen keuangan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan, saldo piutang usaha dikaji secara terus menerus dan penyisihan kerugian atas penurunan nilai dibentuk, jika diperlukan. Selain itu, Standar dan Operasi yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada pelanggan dan monitor atas kredit yang diberikan dilakukan perbaikan secara terus menerus. Nilai maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6. Tidak ada risiko kredit yang terpusat.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya, yang mencakup kas dan setara kas serta aset keuangan lancar lainnya, karena wanprestasi dari pihak terkait, Grup memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan hanya menempatkan investasinya pada bank-bank dengan peringkat kredit yang tinggi. Nilai maksimum eksposur terhadap risiko ini adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan sebagaimana diungkapkan pada Catatan 4 dan 5.

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

c. Credit Risk

Credit risk is the risk that a party to a financial instrument will fail to discharge its obligation and will result in a financial loss to the other party. The Group is exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers. The Group trades only with recognized and credit worthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures.

In addition, trade receivables balances are monitored on an ongoing basis and allowance for impairment losses is provided, if needed. In addition, the Standard and Operating Procedures relating to credit granting to customers and monitoring on credit is continuously being improved. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of trade receivables as shown in Note 6. There is no concentration of credit risk.

With respect to credit risk arising from other financial assets, which comprise cash and cash equivalents and other current financial assets, from default of the counterparty, the Group has a policy not to place investments in instruments that have a high credit risk and to put the investments only in banks with high credit ratings. The maximum exposure to this risk is equal to the carrying amounts of the above mentioned financial assets as disclosed in Note 4 and 5.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi likuiditasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Grup memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi Grup dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang jangka panjang mereka, dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga ketersediaan komitmen fasilitas kredit.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan (termasuk pembayaran bunga):

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

d. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Group monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. The Group also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including its long-term loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets to maintain flexibility in funding by keeping committed credit facilities available.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities as of December 31, 2023 based on contractual discounted payments to be made (including interest payments):

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1 - 3 tahun/ *1 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas Jangka Pendek						***Current Liabilities***
Utang bank jangka pendek	69.419.564	-	-	-	69.419.564	*Short-term bank loans*
Utang usaha	255.451.164	-	-	-	255.451.164	*Trade payables*
Utang non-usaha	4.448.521	-	-	-	4.448.521	*Non-trade payables*
Beban akrual	35.843.429	-	-	-	35.843.429	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja Jangka pendek	17.439.132	-	-	-	17.439.132	*Short-term employee benefits liability*
Sub-total	**382.601.810**	**-**	**-**	**-**	**382.601.810**	***Sub-total***
Liabilitas Jangka Panjang						***Non-current Liabilities***
Utang obligasi	-	-	160.000.000	-	160.000.000	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	186.899.454	416.669.412	91.191.081	-	694.759.947	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	50.767.988	51.777.248	17.352.770	6.225.939	126.123.945	*Lease liabilities*
Sub-total	**237.667.442**	**468.446.660**	**268.543.851**	**6.225.939**	**980.883.892**	**Sub-total**
Total	**620.269.252**	**468.446.660**	**268.543.851**	**6.225.939**	**1.363.485.702**	**Total**
Biaya transaksi yang belum diamortisasi					(10.126.967)	*Unamortized transaction cost*
Neto					**1.353.358.735**	**Net**

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risk Management (continued)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

d. Liquidity Risk (continued)

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan (termasuk pembayaran bunga):

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities as of December 31, 2022 based on contractual discounted payments to be made (including interest payments):

	Kurang dari 1 tahun/ *Below 1 year*	1 - 3 tahun/ *1 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *Over 5 years*	Total/ *Total*	
Liabilitas Jangka Pendek						***Current Liabilities***
Utang bank jangka pendek	60.043.975	-	-	-	60.043.975	*Short-term bank loans*
Utang usaha	226.453.754	-	-	-	226.453.754	*Trade payables*
Utang non-usaha	6.907.076	-	-	-	6.907.076	*Non-trade payables*
Beban akrual	113.552.514	-	-	-	113.552.514	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	19.700.460	-	-	-	19.700.460	*Short-term employee benefits liability*
Sub-total	**426.657.779**	**-**	**-**	**-**	**426.657.779**	***Sub-total***
Liabilitas Jangka Panjang						***Non-current Liabilities***
Utang obligasi	-	-	160.000.000	-	160.000.000	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	86.306.000	375.622.000	183.472.000	-	645.400.000	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	37.125.089	40.454.142	5.351.756	5.070.797	88.001.784	*Lease liabilities*
Sub-total	**123.431.089**	**416.076.142**	**348.823.756**	**5.070.797**	**893.401.784**	**Sub-total**
Total	**550.088.868**	**416.076.142**	**348.823.756**	**5.070.797**	**1.320.059.563**	**Total**
Biaya transaksi yang belum diamortisasi					(14.703.714)	*Unamortized transaction cost*
Neto					**1.305.355.849**	**Net**

e. Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan

e. Changes In Liabilities Arising From Financing Activities

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ *Year Ended December 31, 2023*								
	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Arus Kas/ *Cash Flows*	Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange*	Penghentian/ *Termination*	Dekonsolidasi/ Grup MDB *Deconsolidation of MDB Group*	Amortisasi Biaya Transaksi dan emisi/ *Amortization of Transaction and Issuance Cost*	Perolehan aset hak guna melalui liabilitas sewa/ *Acquisition right of use asset through lease liabilities*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Utang obligasi	153.914.040	-	-	-	-	1.445.088	-	155.359.128	*Bonds payables*
Utang bank jangka pendek	60.043.975	15.850.218	896.522	-	(7.371.151)	-	-	69.419.564	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	636.782.246	85.289.229	(2.738.101)	-	(34.126.028)	4.066.505	-	689.273.851	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	88.001.784	(54.908.582)	1.798.170	499.191	(1.072.760)	-	91.806.142	126.123.945	*Lease liabilities*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	938.742.045	46.230.865	(43.409)	499.191	(42.569.939)	5.511.593	91.806.142	1.040.176.488	*Total liabilities from financing activities*

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

a. Risk Management (continued)

e. Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari Aktivitas Pendanaan (lanjutan)

e. Changes In Liabilities Arising From Financing Activities (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/*Year Ended December 31, 2022*

	Saldo Awal/ *Beginning Balances*	Arus Kas/ *Cash Flows*	Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange*	Penghentian/ *Termination*	Amortisasi Biaya Transaksi dan emisi/ *Amortization of Transaction and Issuance Cost*	Perolehan aset hak guna melalui liabilitas sewa/ *Acquisition right of use asset through lease liabilities*	Saldo Akhir/ *Ending Balances*	
Utang bank jangka pendek	4.700.000	55.683.010	(339.035)	-	-	-	60.043.975	*Short-term bank loans*
Utang obligasi	192.035.070	(40.000.000)	-	-	1.878.970	-	153.914.040	*Bonds payables*
Liabilitas sewa	64.627.485	(35.982.702)	(6.006.320)	(1.720.833)	-	67.084.154	88.001.784	*Lease liabilities*
Utang bank jangka panjang	123.851.498	511.585.820	-	-	1.344.928	-	636.782.246	*Long-term bank loans*
Total liabilitas dari aktivitas pendanaan	385.214.053	491.286.128	(6.345.355)	(1.720.833)	3.223.898	67.084.154	938.742.045	*Total liabilities from financing activities*

b. Manajemen Modal

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan agar Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mendukung usaha dan memaksimumkan nilai pemegang saham. Modal Grup terdiri dari modal saham dan saldo laba. Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi dan memenuhi persyaratan dari pihak pemberi pinjaman.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang neto dengan ekuitas neto. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran perusahaan-perusahaan terkemuka dalam industri sejenis di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Grup menyertakan dalam pinjaman neto, utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa dan utang obligasi dikurangi kas dan setara kas. Termasuk dalam modal adalah modal saham dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

b. Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize stockholder value. The capital of the Group consists of share capital and retained earnings. The Group manages the capital structure and make adjustments to changing economic conditions and to meet the requirements of the lenders.

The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debts with the net equity. The Group's policy is to maintain the gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies with similar industry in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost. The Group includes within net debt, short-term bank loans, long-term bank loans, lease liabilities and bonds payable less cash and cash equivalents. Capital includes share capital, and equity attributable to the majority shareholders of the Company.

38. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

38. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Manajemen Modal (lanjutan)

b. Capital Management (continued)

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Utang bank jangka pendek	69.419.564	60.043.975	*Short-term bank loans*
Utang obligasi	155.359.128	153.914.040	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	689.273.851	636.782.246	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	126.123.945	88.001.784	*Lease liabilities*
Total	1.040.176.488	938.742.045	*Total*
Dikurangi kas dan setara kas	(188.576.976)	(221.566.137)	*Less cash and cash equivalents*
Utang neto	851.599.512	717.175.908	*Net debts*
Ekuitas neto	758.926.967	617.521.275	*Net equity*
Rasio pengungkit	**1,12**	**1,16**	***Gearing ratio***
Rasio kewajiban terhadap ekuitas	**1,37**	**1,52**	***Debt to equity ratio***

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Grup telah mematuhi setiap persyaratan permodalan dari pihak pemberi pinjaman.

There are no changes to the objectives, policies and processes as of December 31, 2023 and 2022. The Group is in compliance with the capital requirements of lenders.

39. PERATURAN PERTAMBANGAN

39. MINING REGULATIONS

Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020

Mining Law No. 3/2020

Pada tanggal 10 Juni 2020, telah diundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU No. 3/2020"). UU No. 3/2020 mengatur beberapa hal, diantaranya adalah pemegang PKP2B yang bermaksud untuk memperoleh IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian harus mengajukan penyesuaian dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PKP2B berakhir serta dapat diperpanjang setelah memenuhi syarat dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 3/2020.

On June 10, 2020, Law No. 3 of 2020 on Amendment to Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Law No. 3/2020") was promulgated. Law No. 3/2020 governs several provisions, including that the holder of a CCA/CCoW that intends to obtain IUPK for the Continuation of Contract/Agreement Operation shall submit the adjustment within 5 (five) years at the earliest and 1 (one) year at the latest before the CCA/CCoW expires, and can be extended after fulfilling the requirements as stipulated in Law No. 3/2020.

UU No. 3/2020 turut mengatur bahwa peraturan pelaksanaan atas UU No. 3/2020 harus ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak UU No. 3/2020 mulai berlaku. Pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan yang mengubah beberapa ketentuan pada UU No. 3/2020.

Law No. 3/2020 also regulates that the implementing regulations of the Law No. 3/2020 shall be established within 1 (one) year after the Law No. 3/2020 coming into force. On November 2, 2020, Law No. 11/2020 on Job Creation was promulgated, which amended several provisions of Law No. 3/2020.

39. PERATURAN PERTAMBANGAN (lanjutan)

Undang-Undang Pertambangan No. 3/2020 (lanjutan)

Sebagai implementasi dari Undang-undang Pertambangan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah, diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan pada tanggal 1 Februari 2010. Kemudian Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 55 Tahun 2010 pada tanggal 5 Juli 2010 yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Pada bulan Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah atas UU Pertambangan No. 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah No. 22/2010 dan 23/2010 ("PP No. 22" dan "PP No. 23"). PP No. 22 mengatur tentang pembentukan area pertambangan dengan menggunakan IUP baru. PP No. 23 memperjelas prosedur untuk memperoleh IUP baru. PP No. 23 menyatakan bahwa PKP2B yang ada akan tetap diakui oleh Pemerintah, namun demikian perpanjangan atas PKP2B tersebut akan dilakukan melalui penerbitan IUP.

Pemerintah Indonesia mengubah PP No. 23 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24/2012 pada tanggal 21 Februari 2012 dan selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2014 tertanggal 11 Januari 2014, Peraturan Pemerintah No. 77/2014 tertanggal 14 Oktober 2014, Peraturan Pemerintah No. 1/2017 tertanggal 11 Januari 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 8/2018 tertanggal 7 Maret 2018. Pada tanggal 9 September 2021, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut PP No. 23 termasuk perubahannya.

Grup terus memonitor perkembangan dari implementasi peraturan pelaksanaan dari Undang - Undang Pertambangan baru ini dan menganalisis pengaruhnya terhadap operasional Grup. Manajemen Grup berpendapat bahwa ketentuan - ketentuan pada Undang - Undang Pertambangan dan Peraturan Pemerintah terkait pertambangan tidak akan menimbulkan dampak signifikan pada operasional Grup dalam waktu dekat.

39. MINING REGULATIONS (continued)

Mining Law No. 3/2020 (continued)

As implementation to the Mining Law, the Government of the Republic of Indonesia issued several Government Regulation (GR), among others, Government Regulation No. 22 Year 2010 regarding the Mining Area on February 1, 2010. In addition, the Government issued GR No. 55 Year 2010 on July 5,2010 regarding the development and supervision of implementation of mineral and coal mining activities in Indonesia.

In February 2010, the Government released two implementing regulations for Mining Law No. 4/2009, i.e. Government Regulation No. 22/2010 and 23/2010 ("GR No. 22" and "GR No. 23"). GR No. 22 deals with the establishment of the mining areas under the new IUP. GR No. 23 provides clarifications regarding the procedures to obtain the new IUP. GR No. 23 indicates that existing CCA/CCoWs will be honored by the Government, although any extension of existing CCA/CCoWs will take place through the issue of an IUP.

The Government further amended GR No. 23 by issuing, among others, Government Regulation No. 24/2012 on February 21, 2012 and later by issuing Government Regulation No. 1/2014 dated January 11, 2014, Government Regulation No. 77/2014 dated October 14, 2014, Government Regulation No. 1/2017 dated January 11, 2017 and Government Regulation No. 8/2018 dated March 7, 2018. On September 9, 2021, the Government issued Government Regulation No. 96 of 2021 concerning the Implementation of Mineral and Coal Business Activities which revokes GR No. 23 including its amendments.

The Group continuously monitored the development and implementation of the new Mining Law and Government Regulation in mining and analyzed the impact on the Group's operations. The Group's management believes that the provisions of the new Mining Law will have no significant impact to the Group in the near term.

39. PERATURAN PERTAMBANGAN (lanjutan)

Peraturan DMO

Pada tanggal 4 Agustus 2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("KESDM") mengeluarkan Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation* atau "DMO") yang mencabut Keputusan Menteri No. 255.K/30/MEM/2020. Diktum 6 Keputusan Menteri No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 mengatur bahwa pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM.

Pada tanggal 19 Januari 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022 yang mengatur tentang pedoman pengenaan sanksi administratif, larangan ekspor batubara, pengenaan denda dan dana kompensasi untuk pemenuhan batubara dalam negeri.

Pada tanggal 21 November 2022, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen 267/202") yang mencabut Kepmen No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 dan Kepmen No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022. Kepmen 267/2022 ini menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara dalam Persetujuan RKAB, atau perubahannya yang disetujui oleh Pemerintah, mana yang lebih tinggi.

Kepmen 267/2022 juga mengatur antara lain terkait (i) kewajiban pembayaran denda dan dana kompensasi atas tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO), (ii) sanksi administratif termasuk larangan ekspor batubara, (iii) harga jual batubara sebesar AS$70 per metrik ton kapal FOB untuk pasokan listrik untuk kepentingan publik, serta (iv) penugasan untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri pada keadaan darurat.

39. MINING REGULATIONS (continued)

DMO Regulation

On August 4, 2021, the Minister of Energy and Mineral Resources ("MoEMR") issued Ministerial Decree No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 on the Fulfilment of Domestic Coal Needs (Domestic Market Obligation or "DMO"), which revokes Ministerial Decree No. 255.K/30/MEM/2020. Dictum 6 of Ministerial Decree No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 stipulates the guidelines for imposing fines and compensation funds are set by the Director General of Mineral and Coal on behalf of the Minister of EMR.

On January 19, 2022, the MoEMR issued Ministerial Decree No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022, which stipulates the guidelines for imposing administrative sanctions, prohibition of coal exports, imposing fines and compensation funds to fulfil domestic coal needs.

On November 21, 2022, the KESDM issued Ministerial Decree No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 concerning Fulfilment of Domestic Coal Needs ("Kepmen 267/2022") which revokes Kepmen No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021 and Kepmen No. 13.K/HK.021/MEM.B/2022. Kepmen 267/2022 stipulates the percentage of coal sales for domestic coal needs (domestic market obligation) of 25% (twenty five percent) of the total planned coal production in the RKAB Approval, or the amendment to the RKAB approved by the Government, whichever is higher.

Kepmen 267/2022 also stipulates, among others, (i) obligation to pay fines and/or compensation of non-fulfilment of domestic market obligation (DMO), (ii) administrative sanctions including export ban, (iii) coal sales price of US$70 per metric tonne FOB vessel for supplying coal for electricity provided in the public interest, and (iv) assignment to meet domestic coal needs in an emergency condition.

39. PERATURAN PERTAMBANGAN (lanjutan)

Peraturan DMO (lanjutan)

Pada tanggal 17 November 2023, KESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen 399/2023"). Kepmen 399/2023 ini menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada pemegang IUP-OP, IUPK Operasi Produksi, PKP2B Operasi Produksi, dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian Komoditas Batubara sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan.

Kepmen 399/2023 juga mengatur antara lain terkait (i) kewajiban pembayaran dana kompensasi atas tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO), (ii) formula perhitungan dana kompensasi, dan (iii) sanksi administratif, termasuk pelarangan ekspor batubara.

Melalui Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. B-111/KU.01/DBN.PW/2022 tertanggal 11 Maret 2022, MIFA telah menerima penagihan terkait dengan dana kompensasi DMO tahun 2021 sebesar AS$4.788.423. Dana kompensasi DMO tersebut telah dibayarkan oleh MIFA pada tanggal 20 Maret 2023 sebesar AS$5.363.033 dimana sebesar AS$574.610 adalah denda bunga.

Melalui Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. B-14203/MB.06/DBN.PW/2022 tertanggal 6 Juni 2022, BEL telah menerima penagihan terkait dengan dana kompensasi DMO tahun 2021 sebesar AS$321.741. Dana kompensasi DMO tersebut telah dibayarkan oleh BEL pada tanggal 17 Maret 2023 sebesar AS$360.350 dimana sebesar AS$38.609 adalah denda bunga.

Berdasarkan evaluasi dari manajemen, MIFA dan BEL tidak mencapai ketentuan DMO untuk tahun 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, MIFA dan BEL telah mencatat beban dana kompensasi DMO untuk tahun 2022 masing-masing sebesar AS$16.416.267 dan AS$589.901 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

39. MINING REGULATIONS (continued)

DMO Regulation (continued)

On November 17, 2023, the KESDM issued Ministerial Decree No. 399.K/MB.01/MEM.B/2023 concerning Amendments to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 267.K/MB.01/MEM.B/2022 concerning Fullfilment of Domestic Coal Needs ("Kepmen 399/2023"). Kepmen 399/2023 sets the percentage of coal sales for domestic needs (domestic market obligation) to holders of IUP-OP, IUPK Production Operation, PKP2B Production Operation, and IUPK as Continuation of Coal Commodity Contract/Agreement Production Operation at 25% (twenty five percent) from the realization of coal production in the current year.

Kepmen 399/2023 also stipulates, among others, (i) obligation to pay compensation of non-fulfilment of domestic market obligation (DMO), (ii) compensation calculation formula, and (iii) administrative sanctions, including export ban.

Through Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No. B-111/KU.01/DBN.PW/2022 dated March 11, 2022, MIFA has received billing related to the DMO in 2021 compensation fund amounting to US$4,788,423. MIFA has paid the DMO compensation funds on March 20, 2023 amounting to US$5,363,033 which include US$574,610 as interest penalty.

Furthermore, through Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No. B-14203/MB.06/DBN.PW/2022 dated June 6, 2022, MIFA has received billing related to the DMO compensation funds in 2021 amounting to US$321,741. BEL has paid the DMO compensation funds on March 17, 2023 amounting to US$360,350 which include US$38,609 as interest penalty.

Based on management's assessment, MIFA and BEL did not meet the DMO requirement for 2022. For the year then ended December 31, 2022, MIFA and BEL have recorded DMO compensation funds for 2022 amounting to US$16,416,267 and US$589,901 respectively, recorded as part of "Other expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

39. PERATURAN PERTAMBANGAN (lanjutan)

Peraturan DMO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup sudah mencatat total beban akrual atas dana kompensasi dan penalti DMO sebesar AS$22.729.551 (Catatan 19).

Melalui Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. B-1863/MB.06/DBN.PL/2023 tertanggal 15 Desember 2023, BEL telah menerima penagihan terkait dengan dana kompensasi DMO tahun 2023 sebesar AS$12.997, dimana lebih rendah dibandingkan dengan yang telah dicadangkan sebelumnya oleh BEL. Selisih sebesar AS$576.904 dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Melalui Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. B-1895/MB.06/DBN.PL/2023 tertanggal 15 Desember 2023, MIFA telah menerima penagihan terkait dengan dana kompensasi DMO tahun 2023 sebesar AS$8.536.145, dimana lebih rendah dibandingkan dengan yang telah dicadangkan sebelumnya oleh MIFA. Selisih sebesar AS$7.880.122 dicatat sebagai bagian dari "Beban Lainnya."

Berdasarkan evaluasi dari manajemen, MIFA dan BEL tidak mencapai ketentuan DMO untuk tahun 2023. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, MIFA dan BEL telah mencatat beban dana kompensasi DMO untuk tahun 2023 masing-masing sebesar AS$2.672.985 dan AS$796.162 yang dicatat sebagai bagian dari "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 1c).

Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Pada tanggal 12 Juli 2023, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam ("PP 36/2023"). Dengan penerbitan PP 36/2023 tersebut, dana hasil produksi sumber daya alam yang telah dimasukkan dan ditempatkan ke dalam rekening khusus wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu 3 bulan. PP 36/2023 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

39. MINING REGULATIONS (continued)

DMO Regulation (continued)

As of December 31, 2022, the Group has recorded accrued compensation fund and penalty of DMO totaling to US$22,729,551 (Note 19).

Through Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No.B-1863/MB.06/DBN.PL/2023 dated December 15, 2023, BEL has received billing related to the DMO compensation fund in 2023 amounting to US$12,997, which is lower than amount previously accrued by BEL. The difference of US$576,904 was recorded as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Through Letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources No.B-1895/MB.06/DBN.PL/2023 dated December 15, 2023, MIFA has received billing related to the DMO compensation fund in 2023 amounting to US$8,536,145, which is lower than amount previously accrued by BEL. The difference of US$7,880,122 was recorded as part of "Other Expenses."

Based on management's assessment, MIFA and BEL did not meet the DMO requirement for 2023. For the year then December 31, 2023, MIFA and BEL have recorded DMO compensation funds for 2023 amounting to US$2,672,985 and US$796,162 respectively, recorded as part of "Other Expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements (Note 1c).

Foreign Exchange Export Proceeds from the Business, Management, and/or Processing of Natural Resources

On July 12, 2023, President of Republic Indonesia determined the Government Regulation No. 36 of 2023 regarding Foreign Exchange Export Proceeds from the Business, Management, and/or Processing of Natural Resources ("GR 36/2023"). With the issuance of GR 36/2023, foreign exchange export proceeds from natural resources exported goods which has been included and placed into the special account at least 30% must remain in place in the Indonesian financial system for a period of 3 months. GR 36/2023 comes into force on August 1, 2023.

40. JAMINAN REKLAMASI

Pada tanggal 3 Mei 2018, KESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen 26/2018") dimana mengatur juga mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pada saat Permen 26/2018 berlaku, Permen No. 07/2014 tentang reklamasi dan penutupan tambang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Permen 26/2018 juga mengatur bahwa suatu perusahaan disyaratkan untuk menyediakan jaminan untuk reklamasi tambang dan penutupan tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, KESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 ("Kepmen 1827") yang mengatur bentuk jaminan reklamasi dapat berupa rekening bersama, deposito berjangka, bank garansi, atau cadangan akuntansi, apabila perusahaan yang bersangkutan merupakan Perseroan Terbuka dan telah menempatkan sahamnya lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total saham yang dimiliki dan perusahaan dengan modal disetor tidak kurang dari AS$50.000.000 sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian dan/atau perubahannya. Jika berupa deposito berjangka, jaminan reklamasi harus ditempatkan dalam mata uang Rupiah atau Dolar AS di bank milik negara di Indonesia atas nama Dirjen Minerba KESDM, atau Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal reklamasi. Jaminan pasca tambang ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank milik negara dalam mata uang Rupiah atau Dolar AS di bank milik negara di Indonesia atas nama Dirjen Minerba KESDM, atau Gubernur qq perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu sesuai dengan jadwal pasca tambang.

Pada tanggal 2 Mei 2018, MESDM mengeluarkan Peraturan Menteri No. 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan serta Keputusan Menteri No. 1827/2018 yang lebih jauh mengatur aspek perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pascatambang, dan penentuan cadangan akuntansi.

40. RECLAMATION GUARANTEE

On May 3, 2018, the KESDM issued the Ministerial Regulation No. 26 Year 2018 concerning the Rules for the Implementation of Good Mining and Supervision of Mineral and Coal Mining ("Permen 26/2018"), which regulates the implementation of reclamation and post-mining in the mineral and coal mining business activities. As of the effective date of Permen 26/2018, the Permen No. 07/2014 regarding mine reclamation and post-mining activities was revoked and no longer valid. Permen 26/2018 also stipulates that an entity is required to provide mine reclamation and mine closure guarantees.

On May 7, 2018, the KESDM issued the Minister Decree No. 1827K/30/MEM/2018 ("Kepmen 1827"), which stipulates the form of reclamation guarantees which can be in the form of joint accounts, time deposits, bank guarantees, or accounting reserves, if the entity is a public listed entity and has issued more than 40% (forty percent) of the total shares owned and the entity with paid-up capital not less than US$50,000,000 as stated in the deed of establishment and/or amendments thereto. If it is in the form of time deposits, the reclamation guarantees must be placed in Rupiah or US Dollar currency at a state-owned bank in Indonesia on behalf of the Directorate General of Mineral and Coal KESDM, or Governor qq the relevant entity, with the duration according to the reclamation schedule. Mine closure guarantees placed in the form of deposits at a state-owned bank in Indonesia on behalf of the Directorate General of Mineral and Coal KESDM, or Governor qq the relevant entity with the duration according to the mine closure schedule.

On May 2, 2018, the MoEMR released an implementing regulation No. 26/2018 on Implementation of Good Mining Practice Principles and Mining Supervision and Ministerial Decision No. 1827/2018 which further regulates aspects of the reclamation plan, the consideration of future value from the post-mining costs and accounting reserve determination.

40. JAMINAN REKLAMASI (lanjutan)

TIA menyediakan Jaminan Reklamasi dalam bentuk deposito berjangka. Jaminan Reklamasi yang telah ditempatkan oleh TIA pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20,55 miliar (setara dengan AS$1.333.277).

TIA, BEL dan MIFA menyediakan Jaminan Reklamasi dalam bentuk deposito berjangka. Jaminan Reklamasi yang telah ditempatkan oleh TIA, BEL dan MIFA pada tanggal 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17,79 miliar (setara dengan AS$1.130.852), Rp2,07 miliar (setara dengan AS$131.524) dan Rp7,50 miliar (setara dengan AS$476.937).

Selain itu, TIA menyediakan jaminan pascatambang dalam bentuk rekening bersama di bank pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2023 jaminan pascatambang yang ditempatkan oleh TIA sebesar Rp4,69 miliar (setara dengan AS$304.241) dan AS$586.677.

Selain itu, TIA, MIFA dan BEL menyediakan jaminan pascatambang dalam bentuk rekening bersama di bank pemerintah. Pada tanggal 31 Desember 2022 jaminan pascatambang yang ditempatkan oleh TIA, MIFA dan BEL masing-masing sebesar Rp4,47 miliar (setara dengan AS$283.993) dan AS$583.621, Rp2,84 miliar (setara dengan tidak AS$180.809) dan Rp3,06 miliar (setara dengan AS$194.753).

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup MDB tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

40. RECLAMATION GUARANTEE (continued)

TIA provided Reclamation Guarantee in the form of time deposit. The guarantee, which has been placed by the TIA as of December 31, 2023 amounting to Rp20.55 billion (equivalent to US$1,333,277) respectively.

TIA, BEL and MIFA provided Reclamation Guarantee in the form of time deposit. The guarantee, which has been placed by the TIA, BEL and MIFA as of December 31, 2022 amounting to Rp17.79 billion (equivalent to US$1,130,852), Rp2.07 billion (equivalent to US$131,524) and Rp7.50 billion (equivalent to US$476,937) respectively.

In addition, TIA provided a post-mining activities guarantee in the form of joint account at state-owned bank. As of December 31, 2023, TIA have placed post-mining activities guarantee amounted to Rp4.69 billion (equivalent to US$304,241) and US$586,677, respectively.

In addition, TIA, MIFA and BEL provided a post-mining activities guarantee in the form of joint account at state-owned bank. As of December 31, 2022, TIA, MIFA, and BEL have placed post-mining activities guarantee amounted to Rp4.47 billion (equivalent to US$283,993) and US$583,621, Rp2.84 billion (equivalent to US$180,809) and Rp3.06 billion (equivalent to US$194,753), respectively.

As of December 31, 2023, MDB Group is deconsolidated in the Group's consolidated financial statements.

41. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS / *41. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION*

Transaksi non-kas yang signifikan: / *Significant non-cash transactions:*

	31 Desember 2023/ *December 31, 2023*	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*	
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	91.806.142	67.084.154	*Acquisition of right of use through lease liabilities*
Perolehan aset tetap melalui:			*Acquisition of fixed assets through*:
Utang	76.380.217	80.648.118	*Payables*
Uang muka pembelian aset tetap	1.306.466	643.679	*Advance for purchase of fixed assets*
Penerimaan dividen melalui piutang non-usaha	5.000.000	-	*Dividend income through non-trade receivables*
Reklasifikasi aset tetap ke aset takberwujud	183.878	38.393	*Reclassification of fixed assets to intangible assets*
Transfer aset hak-guna ke aset tetap	-	3.285.188	*Transfer of right of use assets to fixed assets*
Perolehan investasi dalam saham melalui konversi piutang	-	3.190.000	*Addition of investment in shares through conversion of receivable*
Perolehan aset takberwujud melalui utang	-	1.364.360	*Acquisition of intangible assets through payables*

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN / *42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD*

Perusahaan dan CK / *The Company and CK*

Berdasarkan surat keterangan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, nomor 222/CN.NOT/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Perusahaan dan CK telah menandatangani Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") untuk penyediaan Fasilitas Pinjaman Kredit Investasi dan *Uncommitted Time Loan* dengan jumlah batas maksimum masing-masing sebesar Rp700.000.000.000 dan Rp300.000.000.000. Fasilitas Kredit Investasi akan berakhir 5 (lima) tahun dan Fasilitas *Uncommitted Time Loan* akan berakhir 1 (satu) tahun sejak tanggal sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Based on Notary Statement of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., number 222/CN.NOT/III/2024 dated March 14, 2024, the Company and CK entered into Banking Facility with PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") for the availability of Investment Credit Loan Facility and Uncommitted Time Loan Agreement with maximum limit of Rp700,000,000,000 and Rp300,000,000,000, respectively. This Investment Credit facility will mature in 5 (five) years and Uncommitted Time Loan will mature 1 (one) year since facilty Agreement date.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") Tahun 2022 / *2022 Value Added Tax ("VAT")*

TIA / *TIA*

Pada tanggal 15 Januari 2024, TIA menerima SKPLB atas PPN tahun 2022 sebesar Rp124.265.784.764 atau setara dengan AS$7.795.357, yang nilai lebih bayarnya sama dengan yang diklaim oleh TIA.

Pada tanggal 7 Februari 2024, TIA telah menerima restitusi pajak tersebut dari DJP.

On January 15, 2024, TIA received SKPLB on 2022 VAT amounting to Rp124,265,784,764 or equivalent to US$7,795,357, which is the overpayment amount that was claimed by TIA.

On February 7, 2024, TIA has received the tax refund from DGT.

REFERENSI SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: Annual Report of Public Company

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
A	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: 1. Pendapatan/penjualan; 2. Laba bruto; 3. Laba (rugi); 4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 5. Total laba (rugi) komprehensif; 6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; 7. Laba (rugi) per saham; 8. Jumlah aset; 9. Jumlah liabilitas; 10. Jumlah ekuitas; 11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; 12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; 13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; 14. Rasio lancar; 15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas; 16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan 17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya	**Summary of Key Financial Information** Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with the previous 3 (three) fiscal years or since commencement of business. This is in the event that the Issuer or the Public Company commences the business less than 3 (three) years, and the report shall at least contain: 1. Income/sales; 2. Gross profit; 3. Profit (loss); 4. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and noncontrolling interest; 5. Total comprehensive profit (loss); 6. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest; 7. Earning (loss) per share; 8. Total assets 9. Total liabilities; 10. Total equities 11. Profit (loss) to total assets ratio; 12. Profit (loss) to equities ratio; 13. Profit (loss) to income ratio; 14. Current ratio; 15. Liabilities to equities ratio; 16. Liabilities to total assets ratio; and 17. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;	16-21
B	**Informasi Saham** Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: 1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: A. Jumlah saham yang beredar; B. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; C. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan D. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	**Stock Information** Stock Information for Public Company at least contains: 1. Shares issued for each three- month period in the last 2 (two) fiscal years, at least covering: A. Total of outstanding shares; B. Market capitalization based on the price of the shares listed on the Stock Exchange; C. Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and D. Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on. Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company which shares is listed on the Stock Exchange;	22-23

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: A. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; B. Rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; C. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; D. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan E. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	2. In the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, issuance of convertible securities, as well as additions and subtractions of capital, then the share information referred to in point 1) should be added with explanation on: A. Date of corporate action; B. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, total of convertible securities issued, and change in par value of shares; C. Total of outstanding shares prior to and after corporate action; D. Total of convertible securities issued; and E. Share price prior to and after corporate action;	
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan	3. In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the fiscal year, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and	
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut.	4. In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the last period of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting.	
C	**Laporan Direksi** Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; B. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; C. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; D. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan E. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; 2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan 3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	**Board of Directors Report** The Board of Directors Report should at least contain the following items regarding: 1. The performance of the Issuer or Public Company, at least covering: A. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company; B. The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuer or Public Company; C. The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; D. Comparison between achievement of results and targets; and E. Challenges faced by the Issuer or Public Company; 2. Description on business prospects; 3. Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company.	50-57

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
D	**Laporan Dewan Komisaris** Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; 2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan 3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	**Board of Commissioners Report** The Board of Commissioners Report should at least contain the following items regarding: 1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of the strategy of the Issuer or Public Company carried out by the Board of Directors; 2. View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors; 3. View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company.	42-49
E	**Profil Perusahaan** Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: 1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; 2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: A. Alamat; B. Nomor telepon; C. Alamat surat elektronik; dan D. Alamat situs web; 3. Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; 5. Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; 6. Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. 7. Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; 8. Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; 9. Profil Direksi, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; B. Foto terbaru; C. Usia; D. Kewarganegaraan; E. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; F. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	**Company Profile** Profile of the Issuer or Public Company should cover at least: 1. Name of Issuer or Public Company, including change of name, reason of change, and the effective date of the change of name during the fiscal year; 2. Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include: A. Address; B. Telephone number; C. E-mail address; and D. Website address; 3. Brief history of the Issuer or Public Company; 4. Vision and mission of the Issuer or Public Company and corporate culture; 5. Line of business based on the latest Articles of Association in the fiscal year, and types of products and/or services produced; 6. Operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities. 7. Organization structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, along with their names and positions; 8. List of industry association memberships on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance; 9. Board of Directors profiles include: A. Name and short description of duties and functions; B. Latest photograph C. Age; D. Citizenship E. Education and certification; F. History position, covering information on: • Legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company; • Concurrent positions, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Directors does not have any concurrent positions, this matter shall be disclosed; and	62-63 64-67 68-71 72-73 74-75 78-79 76-77 85-88

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; • Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan • Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	• Work experience and period in and outside the Issuer or Public Company; • Disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders either directly or indirectly to the individual owner, including name of the affiliated party. If a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and • Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	
10.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatan; B. Foto terbaru; C. Usia; D. Kewarganegaraan; E. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; F. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; • Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; G. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; H. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan I. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	10. Profile of the Board of Commissioners, at least containing: A. Name and position; B. Recent photograph; C. Age; D. Nationality; E. Education history and certification; F. Position history, including information on: • Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners; • The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. If a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, the matter shall be disclosed; and • Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; G. Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; If the members of the Board of Commissioners have no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; H. Statement of independence of the independent commissioner if the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and I. Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. If there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	80-84

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	11. Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	11. If there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;	
	12. Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	12. Total employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; the disclosure of information can be presented in table.	92-97
	13. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: A. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; B. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan C. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.	13. Names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, consisting of information regarding: A. Shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company; B. The Board of Commissioners and the Board of Directors members who own shares of the Issuers or Public Company. If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, this matter shall be disclosed; and C. Groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuer or Public Company; The aforementioned information is presented in table.	98-103
	14. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	14. Percentage of indirect ownership of the Issuer or Public Company shares by the Board of Directors and the Board of Commissioners members at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners members; If all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	
	15. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: A. Kepemilikan institusi lokal; B. Kepemilikan institusi asing; C. Kepemilikan individu lokal; dan D. Kepemilikan individu asing;	15. Total shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on: A. Ownership of local institutions; B. Ownership of foreign institutions; C. Ownership of local individual; and D. Ownership of foreign individual;	
	16. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	16. Information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder. The information is presented in scheme or diagram;	
	17. Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	17. Name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company with entity (if any), percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company, associates, joint ventures; For subsidiaries, the information on the addresses of the subsidiaries is included;	106-113

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	18. Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	18. Chronology of share listing, total of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and change in par value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	98
	19. Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/ imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	19. Other securities listing information other than securities as referred to in point 18), which have not yet matured in the fiscal year at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/ yield, maturity date, offering value, and rating of securities (if any);	114
	20. Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi: A. Nama dan alamat; B. Periode penugasan; C. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; D. Biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan E. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20. Information on the use of the services of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) and their networks/associations/allies include: A. Name and address; B. Assignment period; C. Information on audit and/or non-audit services provided; D. Audit and non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and E. If AP and KAP and their network/association/ alliance, which are appointed do not provide non-audit services, the information shall be disclosed; and Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/allies is presented in table.	114-117
	21. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	21. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	
F	**Analisis dan Pembahasan Manajemen** Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: 1. Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: A. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; B. Pendapatan/penjualan; dan C. Profitabilitas;	**Management Discussion and Analysis** Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including: 1. Operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including: A. Production, including process, capacity, and growth; B. Income/sales; and C. Profitability;	124-141
	2. Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: A. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; B. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; C. Ekuitas; D. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan E. Arus kas;	2. Comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning: A. Current assets, non-current assets, and total assets; B. Short term liabilities, long term liabilities, total liabilities; C. Equity; D. Sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and E. Cash flows;	144-160

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	3. Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	3. Capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;	161-162
	4. Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	4. Account receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;	163
	5. Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	5. Capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;	164-165
	6. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a. tujuan dari ikatan tersebut; B. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; C. Mata uang yang menjadi denominasi; dan D. Langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	6. Discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least: A. The purpose of such ties; B. Source of funds expected to fulfill the said ties; C. Currency of denomination; and D. Steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;	166
	7. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: A. Jenis investasi barang modal; B. Tujuan investasi barang modal; dan C. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	7. Discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include: A. Type of investment of capital goods; B. Objective of the investment of capital goods; and C. Value of the investment of capital goods;	166-167
	8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	8. Material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);	167
	9. Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	9. Information on the prospects of the Issuer or the Public Company in connection with industry, economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;	169-170
	10. Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: A. Pendapatan/penjualan; B. Laba (rugi); C. Struktur modal (*capital structure*); atau D. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	10. Comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning: A. Income/sales B. Profit (loss); C. Capital structure; or D. Others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	168
	11. Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: A. Pendapatan/penjualan; B. Laba (rugi); C. Struktur modal (capital structure); D. Kebijakan dividen; atau E. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	11. Target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning: A. Income/sales; B. Profit (loss); C. Capital structure; or D. Dividend policy; E. Or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;	170-171
	12. Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	12. Marketing aspects of the Company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;	142-143
	13. Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: A. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; B. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; C. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan D. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	13. Description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least: A. Dividend policy, among others, containing information on the percentage of dividends distributed to net income; B. The date of the payment of cash dividend and date of distribution of non-cash dividend; C. Total of cash per share (cash and/or non cash); and D. Total of dividend per year paid; Disclosure of information is presented in table. If the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	172-173

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: A. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan B. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	14. Use of proceeds from Public Offerings, under the condition of: A. During the fiscal year, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, the realization of the cumulative use of proceeds until the end of fiscal year should be disclosed; and B. If there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, Issuer should explain the changes;	174
	15. Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: A. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; B. Nama pihak yang melakukan transaksi; C. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); D. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; E. Pemenuhan ketentuan terkait; dan F. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: • Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); dan • Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*) G. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	15. Material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/ capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, among others include: A. Transaction date, value, and object; B. Name of transacting parties; C. Nature of related parties (if any); D. Description of the fairness of the transaction; and E. Compliance with related rules and regulations; F. If there is an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses the following information: • Statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and • Role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle G. For affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation shall be disclosed that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out in order to generate operating income, and those are run regularly, repeatedly, and/or continuously; If the affiliated transactions or material transactions in question have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	174-183

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	H. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; I. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 16. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan 17. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	H. For disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS that approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is disclosed; I. If there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transactions, such matters shall be disclosed; 16. Changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and 17. Changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any).	185 -186 184
G	**Tata Kelola** Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: 1. RUPS, paling sedikit memuat: A. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: • Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan • Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; B. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; 2. Direksi, paling sedikit memuat: A. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. B. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi C. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. D. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: • Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan • Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	**Corporate Governance** Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least: 1. GMS, at least contains: A. Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include: • GMS resolutions in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year are realized; and • GMS resolutions for the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year that have not been realized and the reasons for not being realized; B. If the Issuer or Public Company uses an independent party in the implementation of the GMS to calculate the votes, this matter shall be disclosed; 2. Board of Directors, at least contains: A. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in table. B. Statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors C. Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in table. D. Training and/or competency improvement of members of the Board of Directors: • Policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and • Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	200-210 216-221; 223-235

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	E. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: • Prosedur penilaian kinerja; dan • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan F. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	E. Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors in the fiscal year shall at least contain: • Performance appraisal procedures; and • Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and F. If the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
3.	Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; B. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; C. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	3. The Board of Commissioners, at least contains: A. Duties and responsibilities of the Board of Commissioners; B. Statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners; C. Policies and implementation of the frequency of the Board of Commissioners meetings, the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors and the level of attendance of the Board of Commissioners members in such meetings including attendance at the GMS; Information on the level of attendance of the Board of Commissioners members at the Board of Commissioners meeting, the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors, or the GMS can be presented in table.	211-215; 223-235; 238-239
	D. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: • Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan • Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); E. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: • Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan • Pihak yang melakukan penilaian; dan F. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: • Prosedur penilaian kinerja; dan • Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	D. Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: • Policy on training and/or improving the competence of the Board of Commissioners members, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and • Training and/or competency improvement attended by the Board of Commissioners members during the fiscal year (if any); E. Performance assessment of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing: • Procedures for implementing performance assessment; • Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings; and • The party conducting the assessment; and F. Assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes: • Performance assessment procedures; and • Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competence and attendance at meetings;	
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan B. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: • Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	4. Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain: A. Nomination procedure, including brief description of the policy and nomination process for the Board of Directors members and/or the Board of Commissioners members; and B. Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including: • Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	235-241

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	• Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan • Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	• Remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and • Total remuneration for each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in table.	
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: A. Nama; B. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; C. Periode penugasan dewan pengawas syariah; D. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan E. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	5. Sharia supervisory board, for Issuer or Public Company that carries out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain the following information: A. Name; B. Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board; C. Period of assignment of the sharia supervisory board; D. Duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and E. Frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuer or Public Company;	N/a
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; B. Usia; C. Kewarganegaraan; D. Riwayat pendidikan; E. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; F. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; G. Pernyataan independensi komite audit; H. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); I. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan J. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit;	6. The Audit Committee, at least contains the following information: A. Name and position in the committee; B. Age; C. Citizenship D. Education background; E. History of position; including: • Legal basis for the appointment as member of the committee; • Concurrent position, as member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and • Work experience and period in and outside the Issuer or Public Company; F. Period and terms of office of the member of Audit Committee; G. Statement of independence of the Audit Committee; H. Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); I. Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and J. Implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	242-249
7.	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; B. Usia; C. Kewarganegaraan; D. Riwayat pendidikan;	7. Nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least contains the following information: A. Name and position in committee membership; B. Age; C. Nationality; D. Education background;	249-256

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	E. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; F. Periode dan masa jabatan anggota komite; G. Pernyataan independensi komite; H. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); I. Uraian tugas dan tanggung jawab; J. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); K. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; L. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan M. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksuddalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: • Alasan tidak dibentuknya komite; dan • Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	E. History of position, including information on: • Legal basis for appointment as committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and • Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; F. Period and term of office of the committee members; G. Statement of committee independence; H. Training and/or competency improvement that the committee members participated in the fiscal year (if any); I. Description of duties and responsibilities; J. Statement that the committee members have a guideline or charter; K. Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting; L. Brief description of the implementation of activities in the financial year; and M. If no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company only discloses the information as referred to in point i) to point l) and disclose: • Reasons for not forming the committee; and • Parties who carry out the nomination and remuneration functions;	
	8. Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: A. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; B. Usia; C. Kewarganegaraan; D. Riwayat pendidikan; E. Riwayat jabatan, meliputi informasi: • Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; • Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; F. Periode dan masa jabatan anggota komite; G. Pernyataan independensi komite; H. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan I. Uraian tugas dan tanggung jawab; J. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; K. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan L. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	8. Other committees by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least contain the following information: A. Name and position in committee membership; B. Age; C. Nationality; D. Education background; E. History of position, including information on: • Legal basis for appointment as committee member; • Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and • Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; F. Period and term of office of the committee members; G. Statement of committee independence; H. Training and/or competency improvement that the committee members participated in the fiscal year (if any); and I. Description of duties and responsibilities; J. Statement that the committee has guidelines or charters; K. Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the L. Brief description of the committee's activities for the fiscal year; meeting; and	257-271

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	9. Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: A. Nama; B. Domisili; C. Riwayat jabatan, meliputi: • Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; D. Riwayat pendidikan; E. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan F. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	9. Corporate Secretary, including: A. Name; B. Domicile; C. History of position, including • Legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and • Work experience and period in and outside the Issuer or Public Company; D. Education background; E. Education and/or training during the fiscal year; and F. Brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the fiscal year;	272-278
	10. Unit audit internal, paling sedikit memuat: A. Nama kepala unit audit internal; B. Riwayat jabatan, meliputi: • Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan • Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; C. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); D. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; E. Struktur dan kedudukan unit audit internal; F. Uraian tugas dan tanggung jawab; G. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan H. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	10. The Internal Audit Unit, at least contains the following information: A. Name of Head of Internal Audit Unit; B. History of position, including: • Legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and • Work experience and period I and outside the Issuer or Public Company; C. Qualification or certification as internal auditor (if any); D. Education and/or training during the fiscal year; E. Structure and position of Internal Audit Unit; F. Description of duties and responsibilities; G. Statement that the Internal Audit Unit has Internal Audit Unit charter; and H. Brief description on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the fiscal year;	278-284
	11. Uraian mengenai sistem pengendalian internal (*internal control*) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; B. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan C. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	11. Description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering: A. Finan ial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and B. Review on the effectiveness of internal control systems; C. Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	292-297
	12. Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; B. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; C. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan D. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	12. Risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least includes: A. General description about the company's risk management system the Issuer or Public Company; B. Types of risk and the management; and C. Review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company D. Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	286-291
	13. Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: A. Pokok perkara/gugatan; B. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan C. Pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	13. Important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors (if any), among others include: A. Substance of the case/claim; B. Status of settlement of case/claim; and C. Potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company	298-299

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	14. Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	14. Information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);	
	15. Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: A. Pokok-pokok kode etik; B. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan C. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	15. Information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes: A. Key points of the code of conduct B. Socialization of the code of conduct and enforcement; and C. Statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;	300-304
	16. Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: A. Jumlah saham dan/atau opsi; B. Jangka waktu pelaksanaan; C. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan D. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	16. Brief description of the policy for providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program share ownership by employees (employee stock ownership program/ESOP); In terms of providing compensation through management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the disclose of information must at least contain: A. Total shares and/or options; B. Implementation period; C. Requirements for eligible employees and/or management; and D. Exercise price or determination of exercise price;	241
	17. Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: A. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan B. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	17. Brief description of the information disclosure policy regarding: A. Share ownership of the Board of Directors and the Board of Commissioners members is no later than 3 (three) working days after the ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and B. Implementation of the policy;	241
	18. Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Cara penyampaian laporan pelanggaran; B. Perlindungan bagi pelapor; C. Penanganan pengaduan; D. Pihak yang mengelola pengaduan; dan E. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: • Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan • Tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	18. Description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include: A. Mechanism for violation reporting; B. Protection for the whistleblower; C. Handling of violation reports; D. Unit responsible for handling of violation report; and E. Results from violation report handling, at least includes: • Total of complaints received and processed during the fiscal year; and • Follow up of complaints; If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter shall be disclosed.	306-310

No.	Isi Laporan Tahunan	Annual Report Content	Halaman Page
	19. Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: A. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan B. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	19. Description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing: A. Programs and procedures implemented in overcoming corruption, kickbacks, fraud, bribery and gratuities in Issuer or Public Company; and B. Anti-corruption training/socialization to employees of Issuer or Public Company; If the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the policy should be disclosed.	303
	20. Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: A. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau B. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	20. Implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Company for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including: A. Statement regarding recommendation that have been implemented; and/or B. Description of recommendation that have not been implemented, alon with the reason and alternatives of implementation (if any) Disclosure of information is presented in table.	311-320
H	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies that are Sustainability Reports as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies	Dokumen Laporan Keberlanjutan Sustainability Report Document
I	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit	Audited Annual Financial Report	Dokumen Laporan Keuangan Teraudit Financial Report Audited
J	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan	Statement Letter of the Board of Directors and the Board of Commissioners Members regarding Responsibility for the Annual Report	58-59

2023
Laporan Tahunan
Annual Report

Solid Performance
Towards Business Sustainability

Kinerja Solid Menuju Keberlanjutan Usaha

PT ABM Investama Tbk
Kantor Pusat Head Office
Gedung TMT 1, 18th Floor, Suite 1802
Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta, 12560, Indonesia